Danantara Indonesia

asdp
Indonesia Ferry

LANGKAH TERPADU, KINERJA TUMBUH

UNITED STEPS, DRIVING GROWTH

LANGKAH TERPADU, KINERJA TUMBUH

UNITED STEPS, DRIVING GROWTH

LAPORAN TAHUNAN | 2025 | ANNUAL REPORT
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan Tahunan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ini disusun mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, SEOJK No.16/SEOJK.04/2021, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), serta praktik terbaik dalam *Annual Report Award* (ARA) *Guidelines*. Selanjutnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam laporan ini akan disebut sebagai "ASDP" dan/atau "Perseroan". Laporan ini memuat informasi, data, serta pernyataan yang didasarkan pada kondisi, asumsi, dan proyeksi pada saat penyusunan, termasuk pernyataan yang bersifat *forward-looking statements* yang dipengaruhi oleh risiko dan ketidakpastian, sehingga realisasi kinerja aktual dapat berbeda dari yang diungkapkan.

Perseroan telah menyusun laporan ini secara wajar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data internal, laporan keuangan yang telah diaudit, serta sumber eksternal yang relevan. Namun demikian, Perseroan tidak menjamin kelengkapan maupun ketepatan absolut atas seluruh informasi, khususnya yang bersifat estimasi, asumsi, maupun yang berasal dari pihak ketiga. Oleh karena itu, penggunaan informasi dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

The Annual Report of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) was prepared in reference to the regulations of the Financial Services Authority, including POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, the Indonesia General Manual on Corporate Governance (PUG-KI), and best practices within the Annual Report Award (ARA) Guidelines. Hereinafter, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) shall be referred to as "ASDP" and/or the "Company." This report contains information, data, and statements based on conditions, assumptions, and projections at the time of drafting, including forward-looking statements influenced by risks and uncertainties; consequently, actual performance results may differ from those disclosed.

The Company prepared this report in a fair, accurate, and accountable manner based on internal data, audited financial statements, and relevant external sources. Nevertheless, the Company does not guarantee the absolute completeness or accuracy of all information, particularly regarding estimates, assumptions, or data derived from third parties. Accordingly, the use of information within this report is entirely the responsibility of the user.

Laporan ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan investasi, bisnis, maupun keputusan strategis lainnya. Pengguna laporan diharapkan melakukan analisis tambahan dan mempertimbangkan berbagai faktor relevan sebelum mengambil keputusan. Perseroan tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi tanpa kajian yang memadai.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui informasi yang bersifat prospektif setelah tanggal penerbitan laporan ini, kecuali sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh informasi dalam laporan ini harus dipahami dalam konteks keterbatasan yang melekat serta dinamika lingkungan usaha yang dapat berubah sewaktu-waktu.

This report is not intended to serve as the sole basis for investment, business, or other strategic decision-making. Users of this report are expected to conduct additional analysis and consider various relevant factors before reaching a decision. The Company shall not be held liable for any consequences arising from the use of information without adequate assessment.

The Company is under no obligation to update forward-looking information after the publication date of this report, except as required by applicable laws and regulations. Consequently, all information within this report must be understood within the context of inherent limitations and the dynamics of a business environment that may change at any time.

LANGKAH TERPADU, KINERJA TUMBUH
UNITED STEPS, DRIVING GROWTH

Tahun 2025 menjadi momentum bagi ASDP untuk memperkuat transformasi yang terintegrasi dalam menjawab dinamika industri dan kebutuhan konektivitas nasional. Sebagai penghubung utama antarpulau, ASDP memastikan seluruh proses bisnis berjalan selaras, efisien, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Tema "Langkah Terpadu, Kinerja Tumbuh" ini mencerminkan penguatan integrasi dan keselarasan langkah strategis Perseroan dalam mengoptimalkan berbagai inisiatif yang telah berjalan, sehingga menghasilkan eksekusi yang lebih efektif dan berdampak terhadap peningkatan kinerja.

The year 2025 served as a momentum for ASDP to strengthen its integrated transformation in response to industry dynamics and national connectivity demands. As a primary inter-island connector, ASDP ensures that all business processes operate in alignment, efficiency, and with a focus on long-term value creation.

The theme "United Steps, Driving Growth" reflects the strengthening of integration and the alignment of the Company's strategic measures in optimizing various ongoing initiatives, thereby resulting in more effective execution and an impact on performance enhancement.

Implementasinya difokuskan pada disiplin eksekusi, pengambilan keputusan berbasis data, serta optimalisasi aset dan sumber daya. Transformasi digital menjadi pendorong utama peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan, didukung oleh penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

Kinerja yang tumbuh mencerminkan peningkatan kualitas operasional, produktivitas layanan, serta keandalan sistem secara menyeluruh. Dengan langkah yang terintegrasi, ASDP memperkuat perannya dalam mendukung konektivitas nasional sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan.

Implementation is focused on execution discipline, data-driven decision-making, and the optimization of assets and resources. Digital transformation serves as the primary driver for improving efficiency, transparency, and service quality, supported by the strengthening of governance and risk management.

Growing performance reflects an improvement in operational quality, service productivity, and overall system reliability. Through integrated measures, ASDP strengthens its role in supporting national connectivity while simultaneously creating sustainable added value for stakeholders.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

Laporan Tahunan 2025 | Annual Report 2025

Langkah Terpadu, Kinerja Tumbuh
United Steps, Driving Growth

Memasuki tahun 2025, ASDP mengarahkan fokus transformasi pada penguatan sinergi lintas fungsi dan integrasi layanan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas eksekusi dan kinerja Perseroan. Setelah melalui fase transformasi dan inovasi pada tahun-tahun sebelumnya, ASDP menekankan pentingnya keselarasan langkah di seluruh lini organisasi untuk memastikan setiap inisiatif strategis berjalan secara efektif dan memberikan dampak optimal. Pendekatan ini diwujudkan melalui peningkatan koordinasi antar unit kerja, optimalisasi peran entitas anak, serta penguatan integrasi proses bisnis dan layanan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital.

Keselarasan langkah strategis dan operasional tersebut menjadi pendorong utama dalam menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Melalui penguatan disiplin operasional, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang terintegrasi, ASDP mampu meningkatkan produktivitas layanan dan menjaga keandalan operasional. Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi, ASDP memperkuat perannya dalam mendukung konektivitas nasional sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai bersifat lebih berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

In 2025, ASDP directed its transformational focus toward strengthening cross-functional synergy and service integration as the groundwork for improving the Company's execution quality and performance. Following phases of transformation and innovation in previous years, ASDP emphasized the importance of alignment across all organizational lines to ensure every strategic initiative operated effectively and delivered optimal impact. This approach was realized through enhanced coordination between work units, the optimization of subsidiary roles, and the strengthening of business process and service integration supported by the utilization of digital technology.

The alignment of these strategic and operational steps became the primary driver in creating sustainable performance growth. Through the reinforcement of operational discipline, the optimization of asset utilization, and the implementation of integrated governance and risk management, ASDP was able to increase service productivity and maintain operational reliability. With an increasingly integrated approach, ASDP reinforced its role in supporting national connectivity while ensuring that the growth achieved was of higher quality and sustainable for all stakeholders.

Laporan Tahunan 2024 | Annual Report 2024

Inovasi untuk Menghubungkan Indonesia dengan Keunggulan

Innovation for Connecting Indonesia with Excellence

Tahun 2024 menjadi periode yang penuh dinamika bagi PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), di mana Perseroan tetap menunjukkan ketangguhan sebagai penyedia layanan transportasi penyeberangan nasional. Sepanjang tahun tersebut, ASDP terus mendorong inovasi melalui penerapan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas layanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem dan peningkatan fasilitas guna memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Di saat yang sama, Perseroan memperkuat kompetensi SDM melalui program pengembangan berkelanjutan, serta mengimplementasikan praktik bisnis yang ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan. Penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip GCG juga terus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasional.

Year 2024 was characterized by significant dynamics for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (ASDP), during which the Company continued to demonstrate resilience as a provider of national ferry transportation services. Throughout the year, ASDP persistently drove innovation through the implementation of technology and digitalization to enhance operational efficiency and service quality, including the system infrastructure development and the facilities improvement to provide a superior user experience. Simultaneously, the Company strengthened its human capital competency through sustainable development programs and implemented environmentally friendly business practices as part of its commitment to sustainability. The reinforcement of internal control systems and the application of GCG implementation principles were also consistently pursued to ensure regulatory compliance and to enhance operational transparency and accountability.

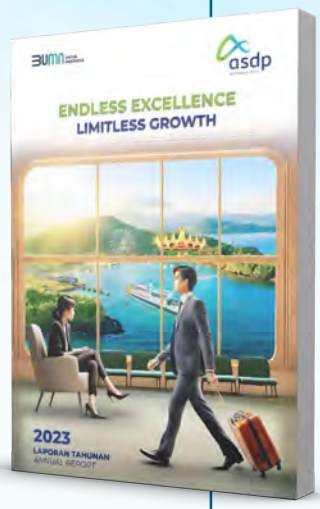

Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023

Endless Excellence Limitless Growth

Keunggulan dan Pertumbuhan yang Tanpa Batas

Pada tahun 2023, Perseroan memiliki *game changer* dengan tema *People & Culture* yang mengedepankan pengembangan SDM dan penguatan terhadap internalisasi budaya Perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Perseroan menyadari bahwa kualitas SDM yang mumpuni menjadi salah satu *key success factor* untuk menciptakan kualitas layanan terbaik dan keunggulan kompetitif. Perseroan juga melakukan eksplorasi terhadap berbagai peluang baru sesuai dengan visi dan misi Perseroan, terutama di bidang *waterfront tourism* sebagai salah satu *core business* baru serta memperluas jangkauan bisnis pelabuhan dan penyeberangan melalui pertumbuhan organik dan anorganik. Perseroan meyakini bahwa langkah strategis yang dilakukan di tahun 2023 dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang tidak terbatas dan berkelanjutan, baik dari sisi bisnis maupun operasional, dan dapat menjadi pemimpin dalam industri pelabuhan, penyeberangan, dan *waterfront tourism*.

In 2023, the Company introduced a game changer initiative under the theme of "People & Culture," prioritizing the HR development and the strengthening of the Company's culture internalization. As a service-oriented entity, the Company recognized that proficient HR quality is a key success factor in creating premier service quality and a competitive advantage. The Company also explored various new opportunities aligned with its vision and mission, particularly in the field of waterfront tourism as a new core business, while expanding the reach of its port and ferry business through both organic and inorganic growth. The Company believes that the strategic measures undertaken in 2023 will drive unlimited and sustainable business growth, both from business and operational perspectives, positioning the Company as a leader in the port, ferry, and waterfront tourism industries.

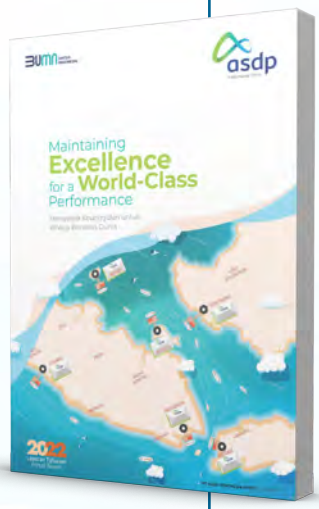

Laporan Tahunan 2022 | Annual Report 2022

Maintaining Excellence for a World-Class Performance

Mengelola Keunggulan untuk Kinerja Berkelas Dunia

Menuju usia emas 50 tahun, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) konsisten beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat demi memberikan kinerja dan pelayanan yang terbaik. Salah satu cara adaptasi dalam merespons perubahan yang ada yaitu dengan melakukan inovasi. Selain melakukan inovasi, ASDP juga berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* dalam mengembangkan ide-ide sehingga menjadi inovasi yang tepat guna sesuai kebutuhan pasar saat ini. Dengan spirit *"Going World Class"*, ASDP menargetkan peningkatan pertumbuhan dan profitabilitas di tahun-tahun berjalan yang akan datang. Komitmen untuk terus tumbuh dan bergerak maju diiringi dengan kemampuan adaptasi melalui nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan setiap bagian dalam perusahaan mampu bersinergi dan bertumbuh sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Approaching its golden jubilee of 50 years, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) consistently adapted to societal conditions and needs to deliver optimal performance and services. One method of adaptation in response to ongoing changes is the execution of innovation. In addition to innovating, ASDP collaborated with various stakeholders in developing ideas to ensure they translate into appropriate innovations that meet current market demands. With the spirit of "Going World Class", ASDP targeted increased growth and profitability in the coming years. The commitment to continuous growth and forward momentum is accompanied by the ability to adapt through economic value, social value, and environmental value in a sustainable manner. This ensures that every segment within the Company is capable of synergizing and growing in accordance with the corporate vision and mission.

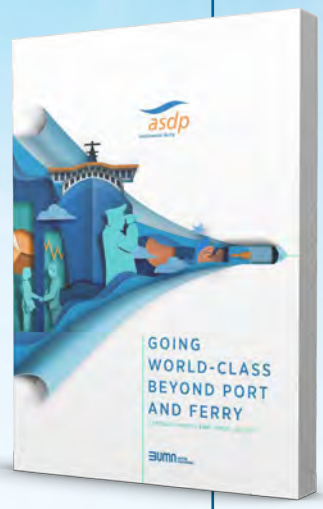

Laporan Tahunan 2021 | Annual Report 2021

Going World-Class Beyond Port and Ferry

Dalam rangka mengokohkan landasan pertumbuhan berkelanjutan, Manajemen ASDP terus berkomitmen untuk melanjutkan agenda transformasi, melakukan akselerasi dan penguatan bisnis Perseroan dengan penerapan bisnis model yang memperkuat pertumbuhan anorganik dan juga pelaksanaan kerja sama strategis dengan pihak eksternal, diantaranya dengan pembangunan kawasan wisata terintegrasi Bakauheni Harbour City, pengoperasian pelabuhan dan juga kolaborasi bisnis lainnya. Langkah ASDP mengakuisisi perusahaan ferry swasta merupakan inisiatif strategis sebagai bagian dari RJPP 2020-2024 khususnya dalam pengembangan jasa manajemen dan operator kapal ferry yang akseleratif khususnya dalam penambahan armada serta mendorong pertumbuhan perusahaan yang agresif dalam rangka menuju IPO.

Solidifying the foundation for sustainable growth, ASDP Management remained committed to continue the transformation agenda, accelerated and strengthened the Company's business through the implementation of business models that bolster inorganic growth and the execution of strategic partnerships with external parties, including the development of the Bakauheni Harbour City integrated tourism area, port operations, and other business collaborations. ASDP's step in acquiring a private ferry company constituted a strategic initiative as part of the 2020-2024 LTP, specifically in the accelerative development of ferry ship management and operator services, particularly in fleet expansion and drove aggressive corporate growth in preparation for the IPO.

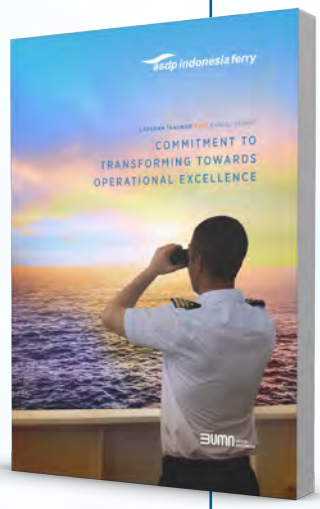

Laporan Tahunan 2020 | Annual Report 2020

Commitment to Transform Towards Operational Excellence
Komitmen untuk Bertransformasi Menuju Keunggulan Operasional

ASDP serius dalam melaksanakan transformasi digital baik mencakup aspek *People*, *Process* dan *Technology*. Ketiga aspek tersebut sangat mendukung transformasi bisnis model, menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan dan karyawan serta memberdayakan para karyawan untuk menciptakan inovasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kepuasan *stakeholder*. Disadari bahwa bisnis sangat dinamis maka *strong leadership*, menjadi *role model* dalam integritas dan etos kerja, berorientasi kepada hasil dan proses, harus tetap terimplementasi dalam kegiatan operasional ASDP. Semua yang kami lakukan adalah bentuk komitmen kami untuk senantiasa berkinerja *excellence* demi kepuasan pelanggan, menjaga keberlanjutan Perseroan dan tetap memberikan nilai tambah bagi bagi *stakeholder* ASDP.

ASDP was steadfast in its digital transformation, encompassing the aspects of People, Process, and Technology. These three pillars significantly supported the transformation of the business model, created new experiences for both customers and employees while empowered personnel to generate innovations aimed at enhancing efficiency, effectiveness, and stakeholder satisfaction. Acknowledging the highly dynamic business environment, strong leadership, being a role model in integrity and work ethic, and remained results- and process-oriented, must remain firmly implemented within ASDP's operational activities. All our efforts represented our commitment to consistently achieved performance excellence for customer satisfaction, safeguard the Company's sustainability, and continued to provide added value to ASDP's stakeholders.

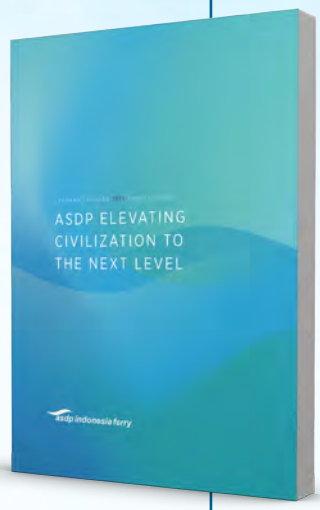

Laporan Tahunan 2019 | Annual Report 2019

ASDP Elevating Civilization to the Next Level

ASDP Mengangkat Peradaban ke Tingkat Berikutnya

Implementasi digitalisasi, pengembangan infrastruktur dan membangun SDM yang unggul, menjadi modal kuat ASDP untuk terus berlayar, tumbuh dan berkembang. Penerapan standar keselamatan yang tinggi, tata kelola perusahaan yang baik dan transformasi bisnis secara berkelanjutan menjadi faktor pendorong tercapainya Visi ASDP menjadi Perseroan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat regional, serta mampu memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.

The implementation of digitalization, infrastructure development, and the cultivation of superior human capital served as a robust foundation for ASDP to continue navigating, growing, and expanding. The application of high safety standards, good corporate governance, and sustainable business transformation were the driving factors in achieving ASDP's Vision to become the premier and largest port and ferry service provider at the regional level, while maintaining the capacity to deliver added value to stakeholders.

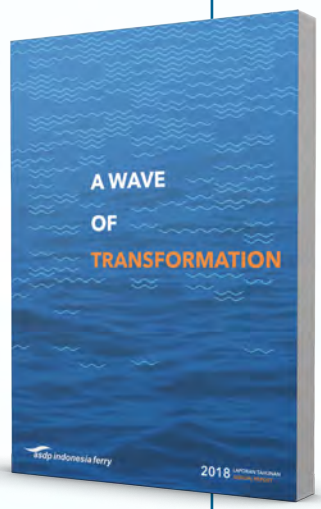

Laporan Tahunan 2018 | Annual Report 2018

A Wave of Transformation

Gelombang Transformasi

Transformasi diwujudkan dengan peningkatan konektivitas penyeberangan melalui penambahan lintasan, operasional armada Kapal Logistik, Kapal Pariwisata, dan Kapal Eksekutif, peresmian Terminal Eksekutif, serta pembangunan Marina di Labuan Bajo. Didukung oleh peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan risiko yang semakin baik akan semakin mendekati tujuan akhir transformasi ASDP di industri penyeberangan.

The transformation was manifested through the improved ferry connectivity by increasing routes, the operation of Logistics Vessel Fleets, Tourism Vessels, and Executive Vessels, the inauguration of Executive Terminals, and the development of the Marina in Labuan Bajo. Supported by the improved application of GCG, increasingly refined risk management will further advance ASDP toward the objective of its transformation within the ferry industry.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

4	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability
6	Tentang Tema: Langkah Terpadu, Kinerja Tumbuh About Theme: United Steps, Driving Growth
8	Kesinambungan Tema Theme Continuity
13	Daftar Isi Table of Contents
16	Pendahuluan Introduction

IKHTISAR UTAMA
KEY HIGHLIGHTS

20	Pencapaian Kinerja Penting 2025 Key Performance Achievement in 2025
22	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights
32	Ikhtisar Operasional Operational Highlights
33	Informasi Harga Saham Share Price Information
34	Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds
34	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Information on Other Financing Sources
35	Aksi Korporasi Corporate Actions
35	Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) Temporary Stock Trading Suspension and/or Delisting
36	Peristiwa Penting Significant Events

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORTS

47	Laporan Dewan Komisaris Report of The Board of Commissioners
61	Laporan Direksi Report of The Board of Director
76	Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2025 oleh Dewan Komisaris dan Direksi Statement of Accountability of 2025 Annual Report by the Board of Commissioners and the Board of Directors

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

80	Identitas Perusahaan Company Identity
81	*Brand* Perusahaan Company Brand
82	Riwayat Singkat Perusahaan Company's Brief History
84	Jejak Langkah Milestone
88	Visi, Misi, & Budaya Perusahaan Vision, Mission, & Corporate Culture
89	Review Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi Review of Vision and Mission by The Boards of Commissioners and Directors
90	Tata Nilai dan Budaya Perseroan Company Core Values and Culture
92	Bidang Usaha Line of Business
95	Area Operational Operational Areas
101	Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri List of Association Membership
102	Struktur Organisasi Organizational Structure
104	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners
110	Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya Changes in the Composition of Board of Commissioners and Its Reasons
111	Profil Direksi Profile of the Board of Directors
118	Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya Changes in the Composition of Board of Directors and Its Reasons
119	Profil Pejabat Eksekutif Profile of the Executive Officials
126	Demografi Karyawan Employees Demographic
130	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition
132	Struktur Grup Perusahaan, Entitas Anak, Asosiasi dan Perusahaan Patungan Company Group Structure, Subsidiaries, Associates, and Joint Venture

133	Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi Subsidiaries and/or Associated Entities
134	Kronologi Penerbitan Saham Chronology of Shares Listing
134	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing
135	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Information on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services
136	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professions
137	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
141	Informasi yang Tersedia di *Website* Information on Website
142	Hubungi Kami Contact Us

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION OF COMPANY PERFORMANCE

146	Analisis Kondisi Perekonomian Global Analysis of Global Economic Condition
147	Analisis Kondisi Perekonomian Indonesia Analysis of Indonesian Economic Condition
149	Prospek Usaha Business Outlook
151	Peran ASDP dalam Industri Penyeberangan Nasional ASDP's Role in the National Ferry Industry
152	Strategi Bisnis ASDP Berdasarkan Tinjauan Ekonomi dan Industri 2025 ASDP Business Strategy Based on 2026 Economic and Industry Review
155	Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar Marketing Aspects and Market Share
156	Tinjauan Kinerja Operasi per Segmen usaha Operational Performance Overview per Business Segment
170	Tinjauan Keuangan Financial Review
170	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
178	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
182	Laporan Arus Kas Consolidated Statement of Cash Flow
185	Kemampuan Membayar Utang Solvency
188	Kolektabilitas Piutang Receivables Collectibility
189	Struktur Modal dan Kebijakan atas Struktur Modal Capital Structure and Policy on Capital Structure
191	Ikatan Material Investasi Barang Modal Material Commitments on Capital Goods Investment
206	Perbandingan Target dan Realisasi 2025 Comparison of Target and Realization in 2025
217	Target/Proyeksi Perusahaan 2026 Company Target/Projections in 2026
222	Kebijakan, Pengumuman, dan Pembayaran Dividen Dividen Policy, Announcement, and Payment
224	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Disvestasi, Akuisisi, dan Restrukturasi Utang dan Modal Material Information on Investments, Expansion, Mergers/Consolidations, Divestments, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring
224	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties
234	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Amendments to Statutory Regulations and Their Impact
242	Perjanjian, Komitmen, dan Kontinjensi Penting Significant Agreements, Commitments, and Contingencies
250	Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi Implementation of the Changes in Accounting Policies
252	Tingkat Kesehatan Perusahaan The Company's Soundness Level
253	Informasi Kelangsungan Usaha Going Concern Information
255	Kontribusi kepada Negara Contribution to the Country
257	Sumber Daya Manusia Human Capital
274	Teknologi Informasi Information Technology

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

282	Komitmen dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Commitment and Policy
283	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation Basis
284	Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Implementation of Corporate Governance Principles
286	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Application of Corporate Governance Guidelines for Public Companies
290	Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure and Mechanism
292	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
307	Dewan Komisaris Board of Commissioners
333	Direksi Board of Directors
359	Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination & Remuneration of the Boards of Commissioners and Directors
370	Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Organs and Committees Under the Board of Commissioners

372	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners
376	Komite Audit Audit Committees
393	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
409	Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Risk Monitoring and Integrated Governance Committee
431	Komite Lain di Perseroan Other Committees in Company
431	Organ dan Komite di Bawah Direksi Organs and Committees Under the Board of Directors
432	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
439	Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit
452	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
457	Manajemen Risiko Risk Management
475	Perkara Hukum Legal Cases
480	Informasi Tentang Sanksi Administratif Information on Administrative Sanctions
481	Kode Etik Code of Conduct
485	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Policy on Long-Term Performance-Based Compensation
485	Kebijakan *Insider Trading* Policy on Insider Trading
486	Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi serta Pelaksanaannya dalam Jangka Panjang Policy on Disclosure of Share Ownership by the Boards of Commissioners and Directors and Its Long-Term Implementation
486	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
495	Program Anti Korupsi Anti-Corruption Program
498	Kebijakan Gratifikasi Policy on Gratification
501	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) Submission of State Officials Wealth Report (LHKPN)
502	Transparansi Praktek *Bad Governance* Transparency of Bad Governance Practices
504	Pengungkapan Terkait Penerapan Atas Pedoman Governansi Perusahaan Dengan Pendekatan "*Comply or Explain*" atau "*Apply or Explain*" Disclosure on the Implementation of Corporate Governance Guidelines Using the "Comply or Explain" or "Apply or Explain" Approach

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

506	**REFERENSI SILANG SEOJK** No.16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik **CROSS-REFERENCE To SEOJK** No. 16/SEOJK.04/2021: Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS

522	**Laporan Keuangan** Financial Statements

PERAN STRATEGIS ASDP:

MENDORONG INTEGRASI TRANSPORTASI NASIONAL, MEMPERKUAT KETAHANAN LOGISTIK, DAN MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN INKLUSIF

STRATEGIC ROLE OF ASDP:

DRIVING INTEGRATION OF NATIONAL TRANSPORTATION, STRENGTHENING LOGISTICS RESILIENCE, AND ACCELERATING INCLUSIVE DEVELOPMENT

Menjembatani Indonesia, ASDP Memperkuat Peran sebagai Penggerak Konektivitas dan Integrasi Logistik Nasional

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat perannya sebagai tulang punggung konektivitas nasional dengan menghadirkan layanan penyeberangan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebutuhan mobilitas yang semakin kompleks, ASDP tidak hanya berfokus pada perluasan kapasitas armada, tetapi juga melakukan transformasi layanan berbasis digital dan peningkatan kualitas operasional. Upaya ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk mendukung ketahanan ekonomi maritim nasional serta mempercepat konektivitas antarwilayah secara lebih efisien dan andal.

Seiring dengan penguatan peran tersebut, ASDP terus mengembangkan model bisnis yang adaptif melalui optimalisasi jaringan lintasan, peningkatan utilisasi armada, serta penguatan integrasi layanan pelabuhan dan penyeberangan. Transformasi ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem transportasi yang terhubung secara menyeluruh, sehingga mampu meningkatkan kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Dengan kapabilitas operasional yang semakin kuat, ASDP menegaskan posisinya sebagai operator penyeberangan terdepan yang berkontribusi strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Bridging Indonesia, ASDP Strengthens Its Role as a Driver of National Connectivity and Logistics Integration

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) continues to strengthen its role as the backbone of national connectivity by providing integrated and sustainable ferry services. In facing economic dynamics and increasingly complex mobility demands, ASDP not only focuses on expanding fleet capacity but also undergoes digital-based service transformation and improves operational quality. These efforts are in line with the Company's commitment to support national maritime economic resilience and accelerate interregional connectivity more efficiently and reliably.

As these roles strengthen, ASDP continues to develop an adaptive business model through optimizing route networks, improving fleet utilization, as well as strengthening the integration of port and ferry services. This transformation is aimed at creating a fully connected transportation ecosystem, thereby enhancing the smooth distribution of goods and public mobility. With increasingly strong operational capabilities, ASDP asserts its position as a leading ferry operator that contributes strategically to supporting national development.

ASDP Memperluas Konektivitas Berbasis Keberlanjutan untuk Mendorong Pemerataan Pembangunan

ASDP terus memperluas jangkauan layanan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Pengembangan konektivitas ini tidak hanya berfokus pada aspek transportasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat akses ekonomi, meningkatkan efisiensi rantai logistik, serta membuka peluang pertumbuhan baru di daerah. Dengan dukungan operasional yang mencakup 27 cabang, 37 pelabuhan, 318 rute penyeberangan, serta 222 unit kapal, ASDP memastikan kesinambungan layanan yang andal dan menjangkau seluruh wilayah strategis di Indonesia.

Selain itu, ASDP mengedepankan inovasi layanan dan efisiensi operasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh lintasan. Penguatan layanan perintis dan tol laut menjadi elemen strategis dalam menjangkau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur darat, sehingga transportasi penyeberangan tetap menjadi tulang punggung mobilitas nasional. Peran ini semakin diperkuat melalui kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam mendukung pembangunan inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.

Ke depan, ASDP akan terus mengakselerasi transformasi bisnis dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan, digitalisasi, dan inovasi layanan sebagai pilar utama pengembangan Perseroan. Dengan peran strategis tersebut, ASDP tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga berfungsi sebagai *enabler* pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

ASDP Expands Sustainability Based Connectivity to Promote Equitable Development

ASDP continues to expand its services to reach the 3T regions (Frontier, Outermost, and Least Developed) as part of its commitment to supporting national development equity. Developing the connectivity requires focus not only on transportation aspects but also objective to strengthen economic access, improve logistics chain efficiency, and open new growth opportunities in the regions. With operational support covering 27 branches, 37 ports, 318 crossing routes, and 222 vessels, ASDP ensures reliable service continuity that reaches all strategic areas in Indonesia.

In addition, ASDP prioritizes service innovation and operational efficiency to improve service quality across all routes. Strengthening pioneer services and sea tolls plays a strategic element in reaching areas with limited land infrastructure, ensuring that ferry transportation continues to function as the backbone for national mobility. This role is further strengthened through contributions to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in supporting inclusive development and improving the welfare of communities residing in remote areas.

Moving forward, ASDP will continue to accelerate business transformation by integrating aspects of sustainability, digitalization, and service innovation as the main pillars of the Company's development. With this strategic role, ASDP not only serves as a connector between regions but also takes up role as the enabler of inclusive, sustainable, and globally competitive national economic growth.

1 IKHTISAR UTAMA
KEY HIGHLIGHTS

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2025 menunjukkan konsistensi Perseroan dalam memperkuat fundamental operasional dan memperluas peran strategisnya dalam sistem transportasi nasional. Dengan dukungan 27 cabang, 37 pelabuhan, 318 lintasan penyeberangan, serta 222 unit kapal, ASDP memastikan keberlanjutan layanan yang andal dalam menghubungkan wilayah dan mendukung kelancaran arus barang dan penumpang.

In 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) demonstrated consistency in strengthening the fundamentals in operations and expanding its strategic role in national transportation system. Running operations supported by 27 branches, 37 ports, 318 crossing routes, and 222 vessels, ASDP ensures reliable service continuity that connect regions and supports the smooth journey of goods and public mobility.

PENCAPAIAN KINERJA PENTING 2025
KEY PERFORMANCE ACHIEVEMENT IN 2025

RINGKASAN KINERJA 2025
PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2025

Bisnis Penyeberangan
Ferry Business

Lintasan Komersial, Perintis, LDF (*Long Distance Ferry*) - Kapal Wisata, Kargo - Ternak
Commercial, Pioneer, LDF (Long Distance Ferry), Tourism, Cargo, and Livestock Ferry Routes

Bisnis Pelabuhan
Ports Business

Pemeliharaan Dermaga-Jasa Sandar, Jasa Kepil/Tamba

Dock Maintenance, Berthing Services, Mooring/Tug Services

Bisnis Penunjang
Supporting Business

Advertising-Area Komersial, Air Tawar, SPBBK (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus)
Advertising, Commercial Areas, Fresh Water, Fuel Filling Station (SPBBK)

Jumlah Kantor Cabang
Number of Branch Offices
27

Jumlah Kapal
Number of Vessels
222
ASDP & JN

Jumlah Pelabuhan
Number of Ports
37

Jumlah Rute
Number of Routes
318

Tingkat Kesehatan Karyawan
Company Health Level
AAA

Corporate Rating
idAA+

Jumlah Karyawan
Number of Employees
4.738

Kepuasan Karyawan
Employee Satisfaction
4,06

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Costs Employees
Rp 20,21 Miliar Billion

Jumlah Karyawan yang Mengikuti Pelatihan Number of Employees Participated in Training	Penyaluran Dana TJSL CSER Fund Distribution	Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	Pangsa Pasar Market Share
2.155	Rp 10,12 Miliar Billion	3,34	39,36%

Keuangan | Finance

Total Aset
Total Assets

(dalam Rp juta| in million IDR)

Realisasi 2025
2025 Realization: 11.354.685

Pendapatan
Revenue

(dalam Rp juta| in million IDR)

Realisasi 2025
2025 Realization: 4.962.465

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

(dalam Rp juta| in million IDR)

Realisasi 2025
2025 Realization: 285.430

Operasional | Operational

Produksi Pelabuhan | Port Output

Jasa Sandar (GRT-Call) Docking Services (GRT-Call)	Pas Pelabuhan Penumpang (Orang) Passenger Pass (Persons)	Pas Pelabuhan Kendaraan (Unit) Vehicle Pass (Unit)
1.086.150.395	4.949.672	13.896.104

Pas Pelabuhan Jasa Parkir (Unit) Parking Pass (Unit)	Jasa Pemeliharaan Dermaga (Unit) Dock Maintenance (Unit)
359.350	13.896.104

Produksi Penyeberangan | Ferriage Output

Trip Trips	Penumpang (Orang) Passenger (Persons)	Kendaraan Roda 2 dan 3 2 and 3-Wheeled Vehicles
288.566	5.713.288	3.403.117

Kendaraan Roda ≥ 4 ≥ 4-Wheeled Vehicles	Jumlah Barang (Ton) Goods (Tons)
3.823.816	28.850.105

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Financial Position (in million IDR)

Deskripsi *Description*	2025	2024	2023*	2022	2021
ASET **ASSETS**					
ASET LANCAR **CURRENT ASSETS**					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	**1.940.072**	1.836.375	1.488.345	1.341.491	1.858.784
Piutang Usaha Trade receivables					
Pihak Berelasi Related parties	**38.596**	11.894	1.347	3.318	6.933
Pihak Ketiga Third parties	**35.038**	19.856	35.328	28.519	25.549
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	**62.629**	47.115	55.307	54.531	71.860
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income					
Pihak Berelasi Related parties	**95.551**	59.775	200.127	44.796	43.945
Pihak Ketiga Third parties	**5.071**	893	4.637	30.827	22.305
Persediaan Inventories	**146.050**	128.289	94.709	80.951	52.464
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	**12.408**	9.214	6.833	64.698	64.482
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	**64.072**	51.820	63.132	47.636	34.130
Jumlah Aset Lancar **Total Current Asset**	**2.399.487**	**2.165.232**	**1.949.764**	**1.696.767**	**2.180.452**
ASET TIDAK LANCAR **NON-CURRENT ASSET**					
Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Pihak Berelasi Accrued Income - Related parties	**65.438**	85.627	-	-	-
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	**275.387**	275.435	275.527	277.280	3.089
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	**391**	468	456	488	521
Properti Investasi Investment Property	**699.760**	701.344	703.320	665.537	677.534
Aset Tetap Fixed Assets	**7.872.524**	8.132.548	8.057.902	7.277.013	5.242.249

Deskripsi *Description*	2025	2024	2023*	2022	2021
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	25.246	27.443	48.382	76.258	100.189
Aset Takberwujud Intangible Assets	16.388	23.006	20.350	17.392	16.061
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	65	61	-	512	1.042
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**8.955.198**	**9.245.932**	**9.105.937**	**8.314.480**	**6.040.684**
JUMLAH ASET **TOTAL ASSETS**	**11.354.685**	**11.411.164**	**11.055.701**	**10.011.247**	**8.221.136**
LIABILITAS **ASSETS**					
LIABILITAS JANGKA PENDEK **CURRENT LIABILITIES**					
Utang Usaha Trade Payables					
Pihak Berelasi Related parties	55.217	78.475	55.673	107.315	96.325
Pihak Ketiga Third parties	401.761	371.171	353.271	197.809	168.999
Utang Pajak Tax Payables	43.564	42.369	37.506	33.688	23.705
Utang Asuransi Insurance Debt	26.854	25.836	26.602	23.750	18.940
Beban Akrual dan Provisi Accrued Expense and Provision	381.256	359.207	296.437	202.315	107.504
Utang Bank Jangka Pendek Short Term Bank Loans	-	23.836	-	20.000	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities					
Pihak Berelasi Related parties	757	13.408	10.714	125.811	123.091
Pihak Ketiga Third parties	121.200	104.150	106.182	68.750	41.032
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang: Short-Term Portion of Long-Term Loans:					
Pinjaman Bank Bank Loans	259.698	263.432	262.779	78.097	-
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan	44.400	34.300	28.200	24.411	20.749
Liabilitas Sewa Lease Liability	6.581	13.934	35.821	37.800	64.591
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**1.341.286**	**1.330.119**	**1.213.186**	**919.747**	**664.936**

Deskripsi *Description*	2025	2024	2023*	2022	2021
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES					
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek Non-Current Liabilities - Net of Short-Term Portion:					
Pinjaman Bank Bank Loans	206.037	449.402	570.613	931.194	-
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan	587.663	630.902	654.504	438.180	462.583
Liabilitas Sewa Lease Liability	4.744	9.092	12.106	37.353	43.591
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Other Non-Current Liabilities	6.049	7.345	7.793	4.666	4.137
Liabilitas Imbalan Pascakerja Retirement Benefit Liabilities	106.644	117.308	144.321	142.106	119.926
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	67.300	68.140	68.466	68.975	11.376
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	978.437	**1.282.190**	**1.457.803**	**1.622.473**	**641.613**
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	2.319.723	**2.612.308**	**2.670.989**	**2.542.220**	**1.313.662**
EKUITAS EQUITY					
Modal Dasar - 10.000.000 Saham (2024: 10.000.000 Saham) Share Capital – 10.000.000 Shares (2024: 10.000.000 Shares)					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 5.561.760 Saham (2024: 5.561.760 Saham Issued and Fully Paid Capital – 5,561,760 Shares (2024: 5,561,760 Shares)	5.561.760	5.561.760	5.173.195	5.173.195	5.173.195
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-up Capital	8.445	8.445	397.010	8.445	8.445
Saldo Laba Retained Earnings					
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated Retained Earnings	2.807.584	2.413.803	1.831.027	1.368.262	1.042.809
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated Retained Earnings	461.739	631.837	809.213	768.066	553.419
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Equity Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	8.839.528	8.615.846	8.210.445	7.317.968	6.777.869
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	195.434	183.009	174.267	151.058	129.606
JUMLAH EKUITAS **TOTAL EQUITY**	9.034.962	**8.798.855**	**8.384.712**	**7.469.026**	**6.907.475**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS **TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**	11.354.685	**11.411.164**	**11.055.701**	**10.011.247**	**8.221.136**

*Saldo setelah reklasifikasi | Balance after reclassification

Total Aset
Total Assets

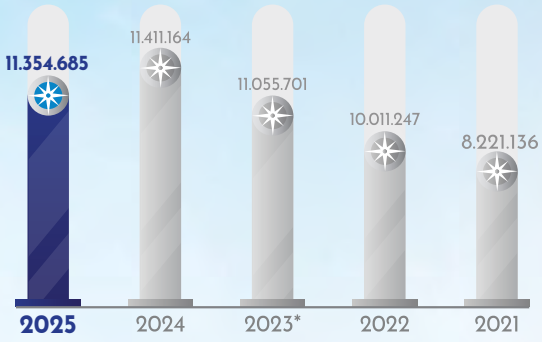

Total Liabilitas
Total Liabilities

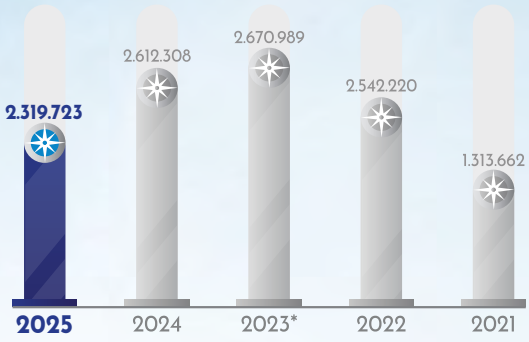

Laporan Laba/(Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million IDR)

Deskripsi *Description*	2025	2024	2023*	2022	2021
PENDAPATAN USAHA **REVENUE**	**4.962.465**	**5.024.559**	**4.924.834**	**4.322.161**	**3.487.204**
BEBAN POKOK PENDAPATAN **COST OF REVENUE**	**(3.577.017)**	**(3.397.604)**	**(3.227.064)**	**(2.890.947)**	**(2.512.574)**
LABA BRUTO **GROSS PROFIT**	**1.385.447**	**1.626.955**	**1.697.770**	**1.431.214**	**974.630**
BEBAN USAHA **OPERATING EXPENSES**					
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	**(1.102.484)**	(1.063.013)	(1.088.886)	(840.689)	(653.175)
Pendapatan Lainnya Other Income	**101.821**	93.520	203.548	182.389	84.905
Beban Lainnya Other Expenses	**(30.934)**	(108.392)	(20.829)	(32.356)	(24.166)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	**(36.671)**	(38.607)	(37.374)	(33.559)	(25.444)
LABA USAHA **OPERATING PROFIT**	**317.180**	**510.463**	**754.229**	**706.999**	**356.751**
Pendapatan Keuangan Financial Income	**91.995**	77.384	51.191	41.389	51.091
Beban Keuangan Financial Expenses	**(98.922)**	(115.419)	(139.540)	(132.202)	(48.461)
Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih Non-Operating Income (Expenses) - Net	**(6.927)**	(38.034)	(88.349)	(90.813)	2.630
LABA SEBELUM PAJAK **PROFIT BEFORE TAX**	**310.252**	**472.429**	**665.880**	**616.186**	**359.381**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN **INCOME TAX EXPENSES**	**(24.822)**	**(25.123)**	**(29.340)**	**(31.012)**	**(33.080)**
LABA TAHUN BERJALAN **PROFIT FOR THE YEAR**	**285.430**	**447.306**	**636.540**	**585.174**	**326.301**

Deskripsi *Description*	2025	2024	2023*	2022	2021
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN **OTHER COMPREHENSIVE INCOME**					
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti Reappraisal of Defined Benefit Liabilities.	**(5.576)**	(3.411)	(10.638)	(25.761)	(32.775)
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	**1.217**	921	2.219	2.138	8.095
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak Total Other Comprehensive Income After Tax	**(4.360)**	(2.490)	(8.419)	(23.623)	(24.680)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF **TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT**	**281.071**	**444.816**	**628.121**	**561.552**	**301.621**
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	**272.987**	438.745	613.449	563.765	325.453
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	**12.444**	8.561	23.091	21.409	848
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN PROFIT FOR THE YEAR	**285.430**	**447.306**	**636.540**	**585.174**	**326.301**
Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	**268.647**	436.074	605.030	540.099	300.818
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	**12.424**	8.742	23.091	21.452	802
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME**	**281.071**	**444.816**	**628.121**	**561.552**	**301.621**
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar **Net Income (Loss) per Share**	**0,05**	**0,08**	**0,12**	**0,11**	**0,06**

*Saldo setelah reklasifikasi | Balance after reclassification

Pendapatan Usaha
Revenue

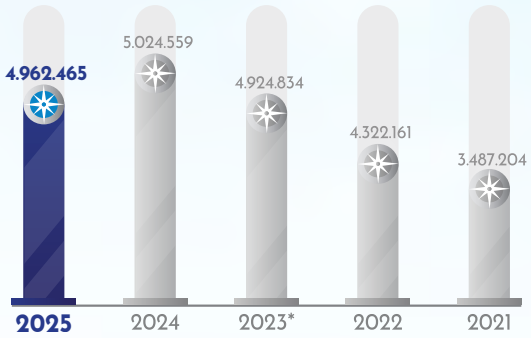

Laba Bruto
Gross Profit

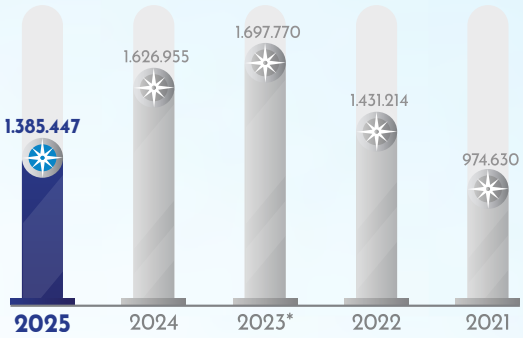

Laba Usaha
Operating Profit

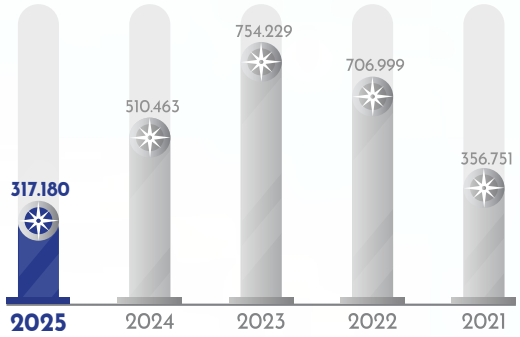

Laba Sebelum Pajak
Profit Before Tax

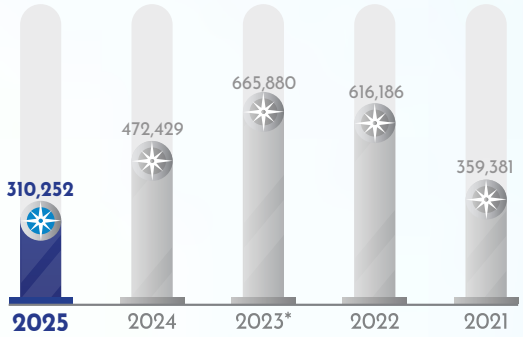

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

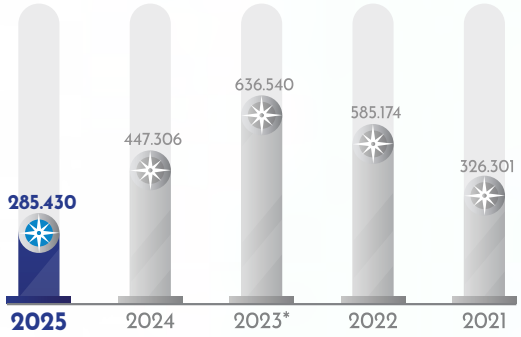

Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Cash Flows (in million IDR)

Deskripsi *Description*	2025	2024	2023*	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**					
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	**4.954.690**	5.029.483	4.919.996	4.322.807	3.498.051
Pembayaran Kas kepada Pemasok Payments to Suppliers	**(2.219.756)**	(2.138.289)	(1.995.716)	(2.069.281)	(1.412.294)
Pembayaran kepada Karyawan Payments to Employees	**(1.127.918)**	(1.089.194)	(1.116.107)	(983.683)	(764.254)
Pembayaran Beban Usaha Payment of Operating Expenses	**(512.020)**	(493.597)	(509.825)	(350.134)	(293.799)
Penerimaan Lain-lain Other Receipts	**54.735**	67.260	78.002	49.246	74.994
Pembayaran Bunga Pinjaman Payments of Loan Interest	**(97.467)**	(113.287)	(120.138)	(107.155)	(28.958)
Penerimaan Bunga Interest Receipts	**91.650**	77.384	51.191	41.389	51.091
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payments	**(147.144)**	(178.458)	(168.167)	(109.814)	(84.078)
Penerimaan Restitusi Pajak Tax Restitution	**-**	-	1.331	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi **Net Cash Generated From Operating Activities**	**996.771**	**1.161.303**	**1.140.567**	**793.374**	**1.040.752**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**					
Penerimaan Jaminan Usaha Receipts of Business Guarantee	**43.720**	30.252	19.965	20.004	88.252
Pembayaran Jaminan Usaha Payments of Business Guarantee	**(33.194)**	(29.318)	(24.185)	(41.223)	(258.724)
Perolehan Aset Takberwujud Acquisition of Intangible Assets	**(2.224)**	(9.571)	(8.212)	(6.258)	(1.140)
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	**(515.921)**	(614.092)	(777.972)	(819.456)	(370.567)
Hasil Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sales of Fixed Assets	**-**	-	1.518	-	25.068
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Net Cash Used in Investing Activities**	**(507.619)**	**(622.730)**	**(788.888)**	**(846.933)**	**(517.110)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**					
Pencairan Pinjaman Sindikasi Disbursement for Syndicated Loan	**-**	-	705.000	-	327.544
Pembayaran Pinjaman Sindikasi Payment for Syndicated Loan	**(34.300)**	(26.300)	(462.591)	(20.741)	(4.882)
Pembayaran Pinjaman Bank Payments for Bank Loans	**(270.936)**	(256.221)	(195.899)	(120.132)	-
Penerimaan Pinjaman Bank Receipts from Bank Loans	**-**	159.500	-	600.000	-

Deskripsi *Description*	2025	2024	2023*	2022	2021
Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi Receipts for Related Parties Loan	**130.700**	124.794	25.325	2.720	109.000
Pembayaran Pinjaman Pihak Berelasi Payments for Related Parties Loan	**(143.300)**	(122.100)	(140.422)	-	-
Pembayaran Dividen Payments for Dividends	**(44.964)**	(30.672)	(101.000)	-	-
Pembayaran Liabilitas Sewa Payments for Leases	**(24.256)**	(41.389)	(35.225)	(53.645)	(50.874)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan **Net Cash Generated From (Used in) Financing Activities**	**(387.056)**	**(192.389)**	**(204.813)**	**461.847**	**380.787**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS INCREASE (DECREASE) IN NET CASH AND CASH EQUIVALENTS	**102.096**	346.184	146.866	(517.299)	529.555
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS	**1.602**	1.846	(12)	7	398
KAS DAN SETARA KAS – SALDO AWAL CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR	**1.836.375**	1.488.345	1.341.491	1.858.784	1.328.830
KAS DAN SETARA KAS – SALDO AKHIR CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR	**1.940.072**	1.836.375	1.488.345	1.341.491	1.858.784

*Saldo setelah reklasifikasi | Balance after reclassification

Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
Net Cash Generated From Operating Activities

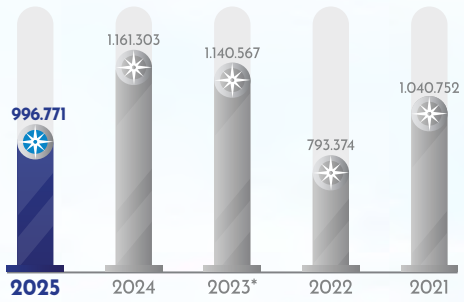

Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Net Cash Used in Investing Activities

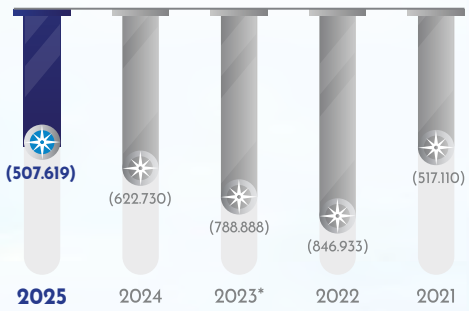

Jumlah Arus Kas bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
Net Cash Generated From (Used in) Financing Activities

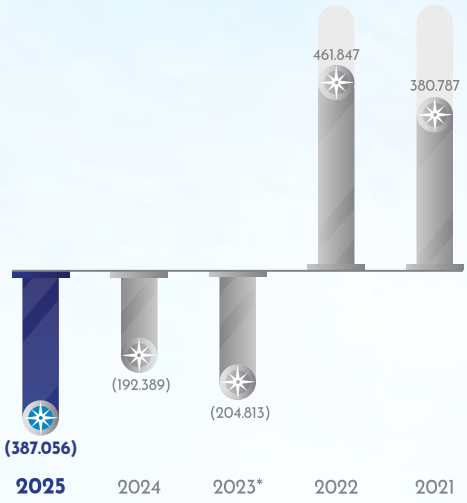

Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas
Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents

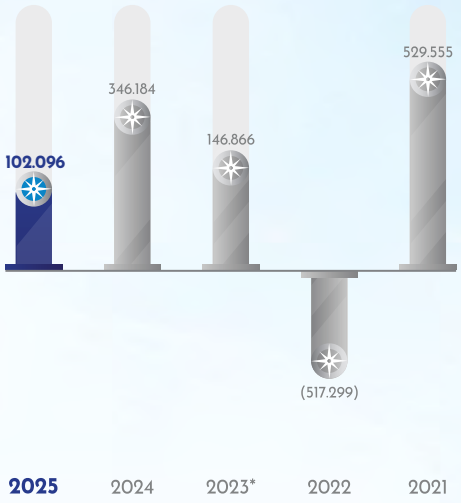

Kas dan Setara Kas - Saldo Awal dan Akhir
Cash and Cash Equivalents at the Beginning and End of Year

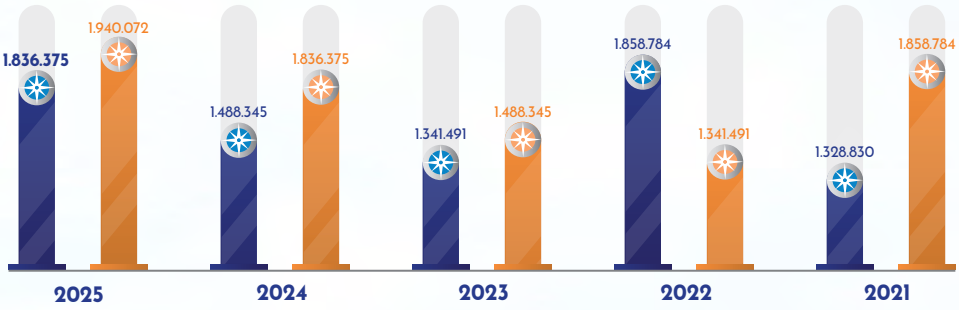

Kas dan Setara Kas - Saldo Awal
Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year

Kas dan Setara Kas - Saldo Akhir
Cash and Cash Equivalents at the End of Year

Rasio Keuangan
Financial Ratio

Deskripsi *Description*	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Likuiditas (%) **Liquidity Ratio (%)**					
Rasio Lancar Current Ratio	**178,89**	162,78	160,71	184,48	324,45
Rasio Kas Cash Ratio	**144,64**	138,06	122,68	145,85	276,58
Rasio Cepat Quick Ratio	**140,45**	140,45	125,70	149,32	281,42
Rasio Solvabilitas (%) **Solvency Ratio (%)**					
Rasio Liabilitas Terhadap Aset Debt to Asset Ratio	**9,77**	12,49	14,15	15,65	15,98
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	**0,12**	0,16	0,19	0,21	0,09
Interest Coverage Ratio	**2,88**	4,89	4,40	4,47	8,19
Rasio Profitabilitas (%) **Profitability Ratio (%)**					
Rasio Laba Bersih Terhadap Aset Net Profit to Asset Ratio	**2,47**	3,94	5,76	5,85	3,97
Rasio Laba Bersih Terhadap Ekuitas Net Profit to Equity Ratio	**3,15**	5,13	8,12	8,00	4,72
Rasio Laba Bersih Terhadap Imbalan Investasi Net Profit to Return on Investment Ratio	**9,07**	11,33	10,98	11,43	10,0
Margin Laba Operasi Operating Profit Margin	**4,96**	10,46	11,35	12,89	10,05
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	**5,75**	8,90	12,93	13,54	9,19
Rasio Aktivitas **Activity Ratio**					
Rata-rata Periode Penagihan Piutang (Hari) Average Collection Period (Days)	**5,42**	2,31	2,72	2,69	3,40
Perputaran Total Aset (%) Total Asset Turnover (%)	**50,20**	49,32	51,12	45,49	44,13
Perputaran Aset Lancar (%) Current Asset Turnover (%)	**2,09**	2,30	2,58	2,58	1,63
Perputaran Aset Tetap (%) Fixed Asset Turnover (%)	**0,64**	0,61	0,62	0,60	0,68
Perputaran Modal Kerja (%) Working Capital Turnover (%)	**4,75**	5,95	6,83	5,64	2,35

IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Produksi Pelabuhan
Port Output

Uraian *Description*	2025	2024	2023	2022	2021
Jasa Sandar (GRT-Call) Docking Services (GRT-Call)	1.086.150.395	1.085.815.743	997.786.012	949.820.444	926.983.944
Pas Pelabuhan Penumpang (Orang) Passenger Pass (Persons)	4.949.672	5.133.645	5.166.438	4.541.042	3.317.311
Pas Pelabuhan Kendaraan (Unit) Vehicle Pass (Unit)	13.896.104	13.639.207	13.140.673	12.343.696	10.124.657
Pas Pelabuhan Jasa Parkir (Unit) Parking Pass (Unit)	359.350	314.699	210.868	247.154	253.396
Jasa Pemeliharaan Dermaga (Unit) Dock Maintenance (Unit)	13.896.104	13.639.205	13.140.673	12.342.656	10.123.031

Produksi Penyeberangan
Ferriage Output

Uraian *Description*	2025	2024	2023	2022	2021
Trip Trips	288.566	319.760	323.668	318.979	206.258
Penumpang (Orang) Passenger (Persons)	5.713.288	6.196.022	6.505.663	7.622.313	4.429.612
Kendaraan Roda 2 2 Wheeled Vehicles	3.403.117	3.996.314	4.177.538	4.079.129	2.395.657
Kendaraan Roda ≥ 4 ≥ 4-Wheeled Vehicles	3.823.816	4.408.997	4.483.918	4.401.092	2.924.619
Jumlah Barang (Ton) Goods (Tons)	28.850.105	1.234.381	997.211	2.012.909	2.462.346

Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama
Ancillary Services and Joint Operations

Uraian *Description*	2025	2024	2023	2022	2021
Produksi BBM (Kilo Liter) Fuel Production (Kilo Litre)	99.228	101.566	108.095	101.680	101.347

INFORMASI HARGA SAHAM
SHARE PRICE INFORMATION

Uraian *Description*	2025	2024	2023	2022	2021
Modal Saham (dalam Rupiah penuh) Share Capital (in full Rupiah amount) Modal dasar – 10.000.000 saham biasa; nilai nominal Rp1.000.000 per saham Authorized capital – 10,000,000 ordinary shares; at par value of Rp1,000,000 per share Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 5.561.760 saham biasa Issued and paid-up capital of 5,561,760 shares	5.561.760	5.561.760	5.173.195	5.173.195	5.173.195

Per 31 Desember 2025, ASDP masih berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, sehingga Perseroan tidak memiliki informasi terkait harga saham, volume perdagangan, maupun kapitalisasi pasar. Dengan demikian, informasi mengenai harga saham tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of 31 December 2025, ASDP remains a State-Owned Enterprise (SOE), not listed as a public company on the Indonesia Stock Exchange. Therefore, the Company does not have information regarding share price, trading volume, or market capitalization, and information regarding share price is not presented in this Annual Report.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI
INFORMATION ON BONDS, SUKUK, AND/OR CONVERTIBLE BONDS

Per 31 Desember 2025, ASDP tidak memiliki instrumen efek yang bersifat utang yang diterbitkan kepada publik, baik dalam bentuk obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nilai penerbitan, tingkat bunga atau imbal hasil, jatuh tempo, peringkat efek, maupun realisasi penggunaan dana yang perlu diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

As of 31 December 2025, ASDP had no debt instruments issued to the public, whether in the form of bonds, sukuk, or convertible bonds. Therefore, there is no information regarding the issuance value, interest rate or yield, maturity date, security rating, or actual use of proceeds that require disclosure in this Annual Report.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA
INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

Per 31 Desember 2025, ASDP memperoleh sumber pendanaan dari fasilitas pinjaman perbankan, pembiayaan lembaga keuangan, serta arus kas operasional. ASDP tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan efek lainnya dalam bentuk apa pun. Pengelolaan sumber pendanaan dilakukan secara *prudent* dengan mempertimbangkan struktur permodalan yang optimal, profil risiko, serta kebutuhan likuiditas Perseroan guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan usaha.

As of 31 December 2025, ASDP obtained funding from bank loans, financing from financial institutions, and operational cash flow. ASDP did not receive funding from any securities issuances. Funding sources were managed prudently, taking into account the Company's optimal capital structure, risk profile, and liquidity needs to support operational sustainability and business development.

AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTIONS

Per 31 Desember 2025, ASDP tidak melakukan aksi korporasi yang berkaitan dengan transaksi material, penawaran umum efek, maupun aksi korporasi lainnya yang berdampak signifikan terhadap struktur permodalan dan kepemilikan Perseroan. Seluruh aktivitas usaha yang dilakukan selama tahun berjalan difokuskan pada penguatan kinerja operasional, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi aset guna mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

As of 31 December 2025, ASDP has not undertaken any corporate actions related to material transactions, public offerings of securities, or other corporate actions that significantly impact the Company's capital structure and ownership. All business activities carried out during the year were focused on strengthening operational performance, improving service quality, and optimizing assets to support sustainable business growth.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)
TEMPORARY STOCK TRADING SUSPENSION AND/OR DELISTING

Per 31 Desember 2025, ASDP tidak memiliki saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat aksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) maupun penghapusan pencatatan saham (*delisting*) yang perlu diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

As of 31 December 2025, ASDP does not own any shares listed on the Indonesia Stock Exchange, so there are no temporary suspensions of trading (suspension) or delisting of shares (delisting) that need to be disclosed in this Annual Report.

PERISTIWA PENTING
SIGNIFICANT EVENTS

Januari | *January*

Safety Starts from Us!

ASDP menyelenggarakan peringatan Bulan K3 Nasional melalui program "*Safety Starts from Us!*" yang berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2025 dengan melibatkan seluruh karyawan di 27 cabang. Inisiatif ini menjadi bagian dari penguatan budaya keselamatan kerja sekaligus peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya implementasi K3 dalam operasional Perseroan.

ASDP commemorated the National OHS Month by organizing the "Safety Starts from Us!" program, which took place from 12 January to 12 February 2025, involving all employees across 27 branches. This initiative served to strengthen the workplace safety culture and increase collective awareness of the importance of OHS implementation in the Company's operations.

Bantuan TJSL di Yayasan Bhakti Bunda Sejahtera
CSER Assistance at Yayasan Bhakti Bunda Sejahtera

Melalui program tanggung jawab sosial, ASDP menyalurkan bantuan bagi lansia dalam bentuk makanan, susu, dan alat bantu. Kegiatan ini mencerminkan kepedulian Perseroan terhadap kelompok rentan sekaligus memperkuat citra inklusif melalui pemberian manfaat nyata kepada masyarakat.

Through its social responsibility program, ASDP provided assistance to the elderly in the form of food, milk, and mobility aids. The activity reflects the Company's concern for vulnerable groups while also enhancing its inclusive image by delivering tangible benefits to the community.

Maret | *March*

ASDP Dukung SDGs untuk Kesejahteraan Masyarakat
ASDP Supports SDGs for Community Welfare

Dalam program Sobat Aksi Ramadhan BUMN Berbagi, ASDP menyalurkan bantuan sembako kepada pondok pesantren yang dipadukan dengan kegiatan edukatif dan interaksi sosial. Program ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempertegas komitmen Perseroan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara berkelanjutan.

Under the *Sobat Aksi Ramadhan BUMN Berbagi* program, ASDP distributed essential food supplies to Islamic boarding schools (*pesantren*), integrating the donations with educational activities and social engagement. The program not only supports community welfare but also reaffirms the Company's commitment to the continuous achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Mudik Ramah Anak (TJSL) | Child-Friendly Homecoming (CSER)

ASDP menghadirkan fasilitas ruang bermain anak melalui program Semarak di area pelabuhan dengan beragam aktivitas interaktif. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan keluarga selama periode mudik sekaligus memperkuat positioning Perseroan sebagai penyedia layanan yang ramah anak dan berorientasi pada pengalaman pelanggan.

ASDP provided play area for children under the Semarak program at port facilities, offering various interactive activities. This initiative was designed to improve family comfort during the peak holiday travel season while strengthening the Company's position as the provider of child-friendly and customer-oriented service.

Mudik Gratis ASDP (TJSL) | ASDP Free Homecoming (CSER)

ASDP memberangkatkan peserta Mudik Gratis rute Jakarta–Bandar Lampung melalui program BUMN dengan menyediakan tiket tanpa biaya. Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik yang aman dan nyaman, sekaligus menegaskan peran Perseroan dalam menyediakan layanan transportasi yang inklusif dan berorientasi pada keselamatan publik.

ASDP facilitated the homecoming of participants of *Free Mudik* program initiated by the SOEs for the Jakarta–Bandar Lampung route by providing complimentary tickets. This program aimed to support the smooth flow of safe and comfortable seasonal travel while underscoring the Company's role in providing inclusive and public safety-oriented transportation services.

MoU ASDP dan DABN di Surabaya | ASDP and DABN MoU in Surabaya

ASDP menginisiasi kerja sama strategis dengan DABN (PT Delta Artha Bahari Nusantara) melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam pengembangan layanan Ro-Ro (*Roll-on/Roll-off*) dan distribusi logistik dari Probolinggo ke Kawasan Timur Indonesia. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi konektivitas maritim serta memperkuat peran Perseroan sebagai penggerak logistik nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

ASDP initiated a strategic collaboration with DABN (PT Delta Artha Bahari Nusantara) through the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) for the development of Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) services and logistics distribution from Probolinggo to Eastern Indonesia. The collaboration is aimed at increasing the efficiency of maritime connectivity and strengthening the Company's role as a national logistics driver and driver of regional economic growth.

April | *April*

Posko Angkutan Lebaran 2025 | 2025 Eid Transport Command Center

ASDP menyelenggarakan Angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung secara lancar dan terkendali dengan melayani 5,82 juta penumpang serta 1,3 juta kendaraan di 15 lintasan nasional. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan operasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap keandalan dan aspek keselamatan layanan penyeberangan Perseroan.

ASDP organized the 2025 Eid (*Lebaran*) Transport, which proceeded smoothly and remained under control, serving 5.82 million passengers and 1.3 million vehicles across 15 national routes. This achievement reflected the effectiveness of the Company's operational management while strengthening public trust in the reliability and safety standards of its ferry services.

TJSL melakukan kegiatan *Ocean Clean Up Day* untuk seluruh cabang.
Organized CSER of Ocean Clean Up Day across all branches.

ASDP melaksanakan *Ocean Clean Up Day* bersama komunitas lokal melalui kegiatan bersih pantai dan laut di kawasan Pelabuhan Merak yang diintegrasikan dengan penguatan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan. Inisiatif ini menegaskan komitmen Perseroan dalam pelestarian lingkungan sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

ASDP organized Ocean Clean Up Day in collaboration with local communities, conducting coastal and marine cleaning activities within the Merak Port area, integrated with the reinforcement of sustainable waste management practices. The initiative underscored the Company's commitment to environmental conservation while supporting the Sustainable Development Goals (SDGs).

Penyelengaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025.
Execution of 2025 Eid Transport Operations.

ASDP berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung aman dan lancar. Kolaborasi ini mencerminkan penguatan sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keandalan layanan transportasi nasional.

ASDP collaborated with the Ministry of Transportation and various stakeholders to ensure the 2025 Eid Transport operations were conducted safely and efficiently. The collaboration reflected the strengthening of cross-sector synergy while enhancing public confidence in the reliability of the national transportation infrastructure.

Mei | May

TJSL melakukan kegiatan ASDP tanam terumbu karang di Labuan Bajo.
ASDP CSER planted coral reef in Labuan Bajo.

ASDP berkolaborasi dengan komunitas lokal melakukan penanaman 30 media terumbu karang di perairan Labuan Bajo sebagai upaya rehabilitasi ekosistem laut yang disertai dengan kegiatan edukasi konservasi. Inisiatif ini mempertegas komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

ASDP collaborated with local communities to plant 30 coral reef media in the waters of Labuan Bajo as part of a marine ecosystem rehabilitation effort, complemented by conservation education activities. The initiative reaffirmed the Company's commitment to environmental sustainability while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Juni | *June*

Seluruh cabang melaksanakan kegiatan Gema Qurban ASDP.
All branches nationwide organized ASDP Gema Qurban.

ASDP melalui program ASDP Berbagi menyalurkan 20 sapi dan 100 kambing kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional sebagai wujud kepedulian sosial Perseroan. Program ini sekaligus mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Through the ASDP *Berbagi* program, the Company distributed 20 cows and 100 goats as sacrificial animals to communities surrounding its operational areas as a form of corporate social responsibility. This program reflected the Company's commitment to enhancing community welfare and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Pelayaran Perdana KMP Jatra II di Nias: ASDP Dorong *Geopark* Dunia dari Barat Nusantara.
Inaugural Voyage of KMP Jatra II in Nias: ASDP Promotes World-Class Geopark from Western Indonesia.

ASDP mengoperasikan KMP Jatra II pada lintasan Sibolga–Gunungsitoli guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus logistik. Pengoperasian ini turut mendukung pengembangan Geopark Nias sebagai destinasi wisata berkelas dunia, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T.

ASDP deployed the KMP Jatra II on the Sibolga–Gunungsitoli route to enhance inter-regional connectivity and streamline logistics flows. This operation supported the development of the Nias Geopark as a world-class tourism destination while driving equitable development and economic growth in frontier, outermost, and least developed (3T) regions.

ASDP Perkuat Konektivitas dan Logistik Wilayah Barat, KMP Jatra II Mulai Layani Nias-Sibolga.
ASDP Strengthens Connectivity and Logistics in Western Indonesia as KMP Jatra II Commenced Nias-Sibolga Service.

ASDP mengoperasikan KMP Jatra II pada lintasan Gunungsitoli-Sibolga guna memperkuat konektivitas wilayah barat serta meningkatkan kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Inisiatif ini turut mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Nias.
ASDP operated the KMP Jatra II to serve the Gunungsitoli-Sibolga route, aimed at reinforcing connectivity in the western region and improving the efficiency of logistics distribution and public mobility. The initiative further promoted equitable development and stimulated economic growth across the Nias Islands.

Juli | *July*

TJSL ASDP berkolaborasi dengan Pelindo peluncuran *Vending Machine* UMK di Ajibata Labuan Bajo.
ASDP CSER collaborates with Pelindo to launch SME Vending Machines in Ajibata, Labuan Bajo.

ASDP bersama Pelindo menghadirkan *vending machine* UMK di Pelabuhan Ajibata sebagai sarana pemasaran produk UMKM berbasis digital yang beroperasi 24 jam dengan sistem pembayaran QRIS. Inisiatif ini bertujuan memperluas akses pasar di kawasan wisata strategis sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal serta pengembangan ekosistem UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.
ASDP, in partnership with Pelindo, introduced SME vending machines at Ajibata Port as a digital marketing platform for SMSE products. Operating 24 hours a day and utilizing QRIS payment systems, this initiative aimed to expand market access within strategic tourism zones while reinforcing local economic empowerment and the development of an inclusive, sustainable SME ecosystem.

Direksi ASDP gandeng KPK perkuat sistem antikorupsi, Dirut: Komitmen wujudkan BUMN Berintegritas.
ASDP BoD partners with KPK (Corruption Eradication Commission) to strengthen anti-corruption systems; President Director is committed to realizing SOEs of integrity.

ASDP melalui *kick-off meeting* bersama KPK memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui evaluasi menyeluruh, percepatan digitalisasi tata kelola, serta penguatan budaya integritas. Inisiatif ini menegaskan komitmen Perseroan dalam menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
ASDP, in a kick-off meeting with the KPK, strengthened its corruption prevention framework through comprehensive evaluations, the acceleration of governance digitalization, and the reinforcement of a culture of integrity. This initiative underscored the Company's commitment to implement transparent and accountable governance while enhancing public trust.

Agustus | *August*

ASDP dengan Garuda Indonesia dan Taspen melakukan relawan bakti BUMN Batch VIII di Gorontalo.

ASDP, Garuda Indonesia, and Taspen organized Batch VIII of SOEs volunteer program (Relawan Bakti BUMN) in Gorontalo.

ASDP melalui program Relawan Bakti BUMN melaksanakan rangkaian kegiatan sosial di Gorontalo yang meliputi edukasi gizi, pengajaran, layanan posyandu, pelatihan UMKM, serta pembangunan fasilitas desa. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempertegas komitmen Perseroan terhadap pembangunan sosial berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

ASDP implemented the program through a series of social initiatives in Gorontalo, encompassing nutritional education, teaching, *Posyandu* (integrated health post) services, SME training, and the construction of village facilities. This program aimed to enhance the community's quality of life while reaffirming the Company's commitment to sustainable social development and community empowerment.

ASDP perkuat pemeriksaan tiket penyeberangan demi keselamatan dan ketertiban layanan.

ASDP enhanced ferry ticket inspections to ensure service safety and order.

ASDP memperkuat proses verifikasi tiket penyeberangan melalui pencocokan data penumpang dan kendaraan di pelabuhan guna meningkatkan aspek keselamatan, ketertiban, dan kepastian layanan. Langkah ini sekaligus mendukung terciptanya operasional yang lebih tertib, aman, dan andal.

ASDP strengthened its ferry ticket verification process by reconciling passenger and vehicle data at ports to improve safety, order, and service certainty. This measure further supported the establishment of more disciplined, secure, and reliable operations.

Manifest Digital: Kolaborasi ASDP, Operator Ferry, dan Regulator Demi Keselamatan Penyeberangan.

Digital Manifest: Collaboration Between ASDP, Ferry Operators, and Regulators for Maritime Safety.

ASDP berkolaborasi dengan operator ferry dan regulator dalam memperkuat integritas data *manifest* digital melalui verifikasi terintegrasi atas data penumpang dan kendaraan. Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan aspek keselamatan penyeberangan sekaligus mewujudkan layanan yang aman, tertib, dan andal.

ASDP collaborated with ferry operators and regulators to strengthen the integrity of digital manifest data through the integrated verification of passenger and vehicle information. The initiative was aimed at enhancing maritime safety standards while realizing secure, orderly, and reliable transportation services.

September | September

ASDP memperingati Hari Pelanggan Nasional.
ASDP commemorated National Customer Day.

ASDP pada Hari Pelanggan Nasional 2025 memberikan apresiasi kepada pelanggan setia atas dukungan terhadap transformasi digital melalui penggunaan layanan pembelian tiket secara daring dan pengisian data manifest yang tertib. Inisiatif ini sekaligus mendorong penguatan budaya layanan digital yang aman, modern, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

On National Customer Day 2025, ASDP extended its appreciation to loyal customers for their support of the Company's digital transformation, specifically regarding the adoption of online ticketing services and the disciplined submission of manifest data. The initiative further promoted the reinforcement of a digital service culture that is secure, modern, and oriented toward customer satisfaction.

Wisuda Mahasiswa Penerima Beasiswa dari ASDP di Sumbawa.
Graduation of ASDP Scholarship Recipients in Sumbawa.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ASDP berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah, penyediaan meubel dan perlengkapan belajar, serta pengembangan ruang vokasi di pesantren yang tersebar di wilayah Cilegon, Bakauheni, Gresik, dan Lampung, termasuk dukungan bagi panti asuhan dan sekolah alam dalam membentuk karakter anak sejak dini. Komitmen tersebut diperkuat melalui pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.

Through its Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) program, ASDP contributes to improving the quality of education by improving school facilities, providing furniture and learning equipment, as well as developing vocational facilities in Islamic boarding schools across Cilegon, Bakauheni, Gresik, and Lampung. ASDP also supported orphanages and nature-based schools in fostering children's character development from the early age. The commitment is further strengthened by awarding scholarships for high-achieving students to pursue higher education at Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), as part of a long-term investment in developing high-quality human capital.

Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan LLAJ Nasional 2025.
National Transportation Day and National Road Transport Safety Day 2025.

ASDP meraih Penghargaan Kepatuhan dan Pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan Terbaik 2025 dari Kementerian Perhubungan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dalam menjaga disiplin peningkatan kualitas layanan. Pencapaian ini sekaligus mempertegas komitmen Perseroan terhadap aspek keselamatan, ketertiban, serta penyediaan layanan publik yang unggul dan andal.

ASDP received the 2025 Award for Best Compliance and Fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) for Ferry Transport from the Ministry of Transportation, recognizing the Company's consistency in maintaining disciplined service quality improvements. This achievement underscored the Company's commitment to aspects of safety, order, and the provision of superior and reliable public services.

Desember | December

Nataru 2025 ASDP | ASDP Nataru 2025.

ASDP menyiapkan strategi layanan prima untuk periode Nataru 2025/2026 dengan mengantisipasi puncak pergerakan pada 21-23 dan 28-29 Desember 2025 guna memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan layanan penyeberangan. Upaya ini juga diiringi dengan optimalisasi pemanfaatan layanan digital Ferizy sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi.

ASDP prepared outstanding service strategies for the 2025/2026 Year-End and New Year (Nataru) period by anticipating peak traffic flows on 21-23 and 28-29 December 2025 to ensure seamless, secure, and comfortable ferry services. These efforts were accompanied by the optimized utilization of the Ferizy digital platform as part of the Company's commitment to enhancing technology-driven service quality.

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORTS

Pada tahun 2025, Perseroan semakin memperkuat perannya sebagai penghubung utama antarpulau melalui optimalisasi kinerja operasional dan keuangan, guna menghadirkan konektivitas yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

In 2025, the Company further strengthened its role as the primary inter-island connector by optimizing operational and financial performance to deliver reliable, efficient, and sustainable connectivity for the national economy.

FIRE

Sepanjang tahun buku 2025, ASDP menunjukkan kinerja yang tetap terjaga di tengah dinamika industri penyeberangan dan tantangan eksternal yang masih berlangsung. Capaian tersebut didukung oleh penguatan aspek operasional, pengelolaan keuangan yang pruden, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta konsistensi Direksi dalam menjalankan strategi Perseroan secara terukur.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Direksi, baik dari aspek operasional, keuangan, maupun implementasi strategi. Memasuki tahun 2026, Dewan Komisaris memandang prospek usaha ASDP tetap positif, seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas antarpulau, peran strategis transportasi penyeberangan dalam distribusi logistik nasional, serta pengembangan layanan digital yang semakin terintegrasi.

Throughout financial year 2025, ASDP maintained resilient performance amid the dynamics of the ferry industry and ongoing external challenges. This achievement was supported by the strengthening of operational aspects, prudent financial management, the implementation of good corporate governance, and the Board of Directors' consistency in executing the Company's strategy in a measured manner.

The Board of Commissioners carried out periodic supervision and evaluation of the Board of Directors' performance across operational, financial, and strategic implementation aspects. Entering 2026, the Board of Commissioners views ASDP's business outlook as remaining positive, supported by the growing need for inter-island connectivity, the strategic role of ferry transportation in national logistics distribution, and the development of increasingly integrated digital services.

ACHMAD BAIDOWI

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently as Independent Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat menjalankan kegiatan usaha dengan baik sepanjang Tahun Buku 2025. Kami percaya pencapaian kinerja Perseroan pada tahun ini tidak terlepas dari sinergi yang solid, komitmen, serta dedikasi seluruh jajaran manajemen dan insan Perseroan dalam menjaga keberlanjutan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan selama Tahun Buku 2025. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi dan kebijakan yang dijalankan oleh Direksi, termasuk memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan berjalan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut juga mencakup aspek pengelolaan risiko, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung peran Perseroan sebagai penghubung utama konektivitas nasional.

Dewan Komisaris memandang bahwa langkah-langkah strategis yang ditempuh Perseroan selama tahun 2025 telah sejalan dengan arah pengembangan usaha serta kebutuhan peningkatan layanan penyeberangan yang semakin andal dan efisien. Dewan Komisaris akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil tetap berorientasi pada prinsip kehati-hatian, peningkatan kinerja yang berkelanjutan, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Honorable Shareholders and Stakeholders,

We offer our praise and gratitude to God Almighty for His abundant grace and blessings, enabling PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) to conduct its business activities successfully throughout Financial Year 2025. We believe that the Company's performance achievements this year resulted from the solid synergy, commitment, and dedication of the entire management team and the Company's personnel in maintaining operational sustainability and public service.

Allow us to present the report of the oversight implementation on the Company management during Financial Year 2025. In performing its duties, the Board of Commissioners is consistently guided by the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, while upholding the principles of independence, professionalism, and accountability.

Throughout 2025, the Board of Commissioners actively monitored the implementation of strategies and policies carried out by the Board of Directors, including ensuring that the Company's operational activities proceeded in accordance with the established work program and budget. The oversight also encompassed aspects of risk management, the strengthening of the internal control system, and the implementation of good corporate governance to safeguard business continuity and support the Company's role as the primary connector of national connectivity.

The Board of Commissioners views that the strategic steps taken by the Company during 2025 were aligned with the direction of business development and the increasing need to improve reliable and efficient ferry services. The Board of Commissioners will continue to ensure that every policy and decision made remains oriented toward the principles of prudence, sustainable performance improvement, and long-term value creation for all stakeholders.

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Perekonomian global pada tahun 2025 masih berada dalam fase normalisasi dengan tingkat pertumbuhan yang moderat. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berada pada kisaran 3,0%, di tengah tekanan inflasi yang mulai mereda namun masih diikuti oleh kebijakan suku bunga yang relatif tinggi di sejumlah negara maju. Kondisi ini berdampak pada aktivitas perdagangan global yang tumbuh terbatas, namun tetap memberikan ruang bagi sektor transportasi dan logistik untuk mempertahankan perannya sebagai enabler utama dalam mendukung pergerakan barang dan manusia. Di sisi lain, volatilitas harga energi, khususnya bahan bakar, masih menjadi faktor utama yang memengaruhi struktur biaya operasional industri transportasi.

Di tingkat nasional, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang stabil dengan pertumbuhan berada pada kisaran 5,0%, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan mobilitas masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang positif, sejalan dengan peningkatan aktivitas logistik dan distribusi antarwilayah. Inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5%–3,0% serta stabilitas nilai tukar Rupiah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga efisiensi biaya dan kesinambungan operasional. Kondisi ini memperkuat permintaan terhadap layanan transportasi penyeberangan sebagai bagian integral dari sistem konektivitas nasional.

INDUSTRI PENYEBERANGAN – SEGMEN PENUMPANG

Segmen penumpang menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Peningkatan jumlah perjalanan, khususnya pada periode puncak seperti Angkutan Lebaran dan libur akhir tahun, mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan penyeberangan. Namun demikian, peningkatan volume penumpang juga menuntut pengelolaan kapasitas yang lebih optimal, peningkatan standar keselamatan, serta penyediaan layanan yang semakin nyaman dan efisien. Digitalisasi layanan, termasuk sistem reservasi dan manajemen antrean, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pengalaman pengguna (*customer experience*).

ECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

The global economy in 2025 remained in a transition phase with a moderate growth rate. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth to be in the range of 3.0%, amidst inflationary pressures that began to ease but were still accompanied by relatively high interest rate policies in several developed nations. This condition impacted global trade activities, which experienced limited growth, yet still provided room for the transportation and logistics sector to maintain its role as a key enabler in supporting the movement of goods and people. On the other hand, energy price volatility, particularly fuel, remained a primary factor influencing the operational cost structure of the transportation industry.

At the national level, the Indonesian economy demonstrated stable performance with growth within the range of 5.0%, supported by household consumption that remained strong, increased public mobility, and the acceleration of infrastructure development. Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the transportation and warehousing sector recorded positive growth, in line with the increase in logistics activities and inter-regional distribution. Controlled inflation in the range of 2.5%–3.0% and the stability of the Rupiah exchange rate provided business players with the room to maintain cost efficiency and operational continuity. This condition supports the demand for ferry transportation services as an integral part of the national connectivity system.

FERRY INDUSTRY - PASSENGER SEGMENT

The passenger segment showed an increasing trend in tandem with the recovery of public mobility and the growth of the domestic tourism sector. The increase in the number of trips, particularly during peak periods such as the Eid Transportation and year-end holidays, reflects the public's high reliance on ferry services. Nevertheless, the increase in passenger volume also demands more optimal capacity management, enhanced safety standards, and the provision of increasingly comfortable and efficient services. The digitalization of services, including reservation systems and queue management, represents a key factor in enhancing customer experience.

INDUSTRI PENYEBERANGAN – SEGMEN LOGISTIK DAN KENDARAAN

Pada segmen logistik, transportasi penyeberangan memiliki peran vital sebagai penghubung rantai pasok antarwilayah, khususnya untuk distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas strategis. Data BPS menunjukkan bahwa arus distribusi barang domestik terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan. Peningkatan volume kendaraan angkutan barang turut mendorong kebutuhan terhadap layanan penyeberangan yang andal dan tepat waktu. Tantangan utama pada segmen ini terletak pada efisiensi waktu layanan, optimalisasi kapasitas muat, serta pengendalian biaya operasional yang sensitif terhadap fluktuasi harga bahan bakar.

INDUSTRI PENYEBERANGAN – INFRASTRUKTUR DAN PELABUHAN

Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan integrasi antarmoda transportasi menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing industri penyeberangan. Ketersediaan fasilitas pelabuhan yang memadai, termasuk dermaga, terminal penumpang, serta sistem pendukung logistik, berperan penting dalam mempercepat waktu layanan dan meningkatkan kapasitas layanan. Di sisi lain, kebutuhan investasi yang signifikan serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam memastikan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, Perseroan memiliki posisi strategis sebagai operator penyeberangan yang berperan penting dalam mendukung konektivitas nasional. Dengan jaringan lebih dari 300 lintasan dan dukungan armada yang luas, Perseroan terus mengoptimalkan kinerja operasional melalui peningkatan keandalan layanan, penguatan infrastruktur pelabuhan, serta implementasi digitalisasi layanan yang terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk menjawab peningkatan permintaan sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada pengguna jasa.

Ke depan, prospek industri penyeberangan diperkirakan tetap tumbuh positif seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan kebutuhan distribusi logistik nasional. Namun demikian, Perseroan tetap mencermati sejumlah risiko utama, antara lain fluktuasi harga energi, perubahan kebijakan regulasi, keterbatasan kapasitas infrastruktur, serta peningkatan ekspektasi pengguna jasa. Dalam menghadapi dinamika tersebut, Perseroan akan terus memperkuat pengelolaan risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan implementasi strategi yang adaptif guna menjaga keberlanjutan kinerja dan menciptakan nilai tambah jangka panjang.

FERRY INDUSTRY - LOGISTICS AND VEHICLE SEGMENT

In the logistics segment, ferry transportation plays a vital role as a supply chain connector between regions, especially for the distribution of basic necessities and strategic commodities. Data from Statistics Indonesia (BPS) indicates that the domestic distribution flow of goods continued to rise in line with economic growth and trade activities. The increase in the volume of cargo vehicles further drove the demands for reliable and timely ferry services. The primary challenge in this segment lies in service time efficiency, cargo capacity optimization, and the control of operational costs that are sensitive to fuel price fluctuations.

FERRY INDUSTRY - INFRASTRUCTURE AND PORTS

Development of port infrastructure and the integration of intermodal transportation are determining factors in enhancing the competitiveness of the ferry industry. The availability of adequate port facilities, including berths, passenger terminals, and logistics support systems, plays an important role in accelerating service times and increasing service capacity. On the other hand, significant investment needs and coordination with various stakeholders pose challenges in ensuring sustainable and integrated infrastructure development.

In this context, the Company holds a strategic position as a ferry operator that plays a critical role in supporting national connectivity. With a network of over 300 routes and the support of an extensive fleet, the Company continues to optimize its operational performance through enhanced service reliability, the strengthening of port infrastructure, and the implementation of integrated service digitalization. These measures were undertaken to address the increase in demand while simultaneously improving efficiency and service quality for service users.

Looking ahead, the ferry industry outlook is projected to maintain positive growth in line with increasing public mobility and national logistics distribution needs. Nevertheless, the Company remains mindful of several key risks, including energy price fluctuations, regulatory policy changes, infrastructure capacity constraints, and rising service user expectations. In facing these dynamics, the Company will continue to strengthen risk management, enhance operational efficiency, and ensure the implementation of adaptive strategies to maintain performance sustainability and create long-term value.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan Perseroan secara efektif sepanjang Tahun Buku 2025. Di tengah dinamika eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja operasional dan keuangan, ASDP tetap mampu menjaga stabilitas kinerja serta menunjukkan capaian yang positif, khususnya melalui penguatan pendapatan, pengendalian biaya, dan pelaksanaan inisiatif strategis yang berkelanjutan.

Penerapan prinsip *good corporate governance* juga terus menunjukkan peningkatan, tercermin dari penguatan sistem pengendalian internal, implementasi manajemen risiko yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kualitas dan transparansi pelaporan kinerja. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Dalam melakukan penilaian, Dewan Komisaris berpedoman pada capaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) sebagaimana ditetapkan oleh Pemegang Saham, dengan tetap mempertimbangkan dinamika eksternal yang memengaruhi pencapaian target. Secara umum, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas capaian kinerja Direksi pada tahun 2025, dengan perolehan Tingkat Kesehatan "idAA+ (Sangat Sehat)" dan capaian KPI sebesar 100,33%.

Namun demikian, Dewan Komisaris mencermati bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, antara lain EBITDA yang terealisasi sebesar Rp0,91 triliun atau 65,79% dari target, serta rasio profitabilitas yang masih dipengaruhi oleh tekanan biaya operasional dan faktor eksternal lainnya. Hal ini menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja ke depan melalui penguatan efisiensi dan optimalisasi pendapatan.

Dewan Komisaris mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah diambil Direksi sepanjang tahun 2025 dalam menjaga kinerja dan mendorong pertumbuhan Perseroan. Ke depan, Dewan Komisaris mendorong penguatan sinergi lintas unit, peningkatan efektivitas investasi, serta pengembangan pasar yang lebih adaptif, khususnya pada wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has executed its corporate management duties effectively throughout FY 2025. Amidst the external and internal dynamics affecting operational and financial performance, ASDP was still able to maintain performance stability and demonstrate positive achievements, particularly through revenue bolstering, cost control, and the execution of sustainable strategic initiatives.

The implementation of good corporate governance principles also continued to show improvement, as reflected in the strengthened internal control system, the implementation of a more integrated risk management, and the enhanced quality and transparency of performance reporting. These efforts serve as a basis for maintaining the Company's accountability and business sustainability.

The Board of Commissioners assessment was based on the Corporate Soundness Rating and the realization of Key Performance Indicators (KPI) as established by the Shareholders, while considering the external dynamics that influenced target achievements. In general, the Board of Commissioners expresses appreciation for the performance achieved by the Board of Directors in 2025, with the attainment of a Corporate Soundness Rating of "idAA+ (Very Healthy)" and a KPI achievement of 100.33%.

Nevertheless, the Board of Commissioners notes that several indicators have not met their targets, including EBITDA that was realized at Rp0.91 trillion or 65.79% of the target, as well as profitability ratios that remained affected by operational cost pressures and other external factors. These items remain areas of focus for future performance improvement through enhanced efficiency and revenue optimization.

The Board of Commissioners appreciates various strategic steps taken by the Board of Directors throughout 2025 in safeguarding performance and driving the Company's growth. The Board of Commissioners encourages stronger cross-unit synergy, enhanced investment effectiveness, and more adaptive market development, particularly in regions with high growth potential.

PANDANGAN ATAS KINERJA OPERASIONAL

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja operasional ASDP sepanjang tahun 2025 dikelola dengan baik, tercermin dari capaian positif pada sejumlah indikator utama, meskipun tetap terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian.

Pada segmen penyeberangan, ASDP mampu menjaga perannya sebagai tulang punggung konektivitas nasional, dengan pengelolaan lintasan yang luas serta dukungan armada yang memadai. Kinerja operasional menunjukkan penurunan, antara lain tercermin dari berkurangnya jumlah trip sebesar 14,11% dan volume kendaraan sebesar 9,25%. Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah pengiriman barang sebesar 1.922,18%.

Pada segmen penyeberangan perintis, Dewan Komisaris mencermati adanya dinamika operasional yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kondisi cuaca dan keterbatasan infrastruktur. Meskipun demikian, Perseroan tetap mampu menjaga keberlangsungan layanan dengan tingkat adaptasi yang baik terhadap kondisi lapangan.

Sementara itu, pada segmen pelabuhan, kinerja menunjukkan tren positif dengan peningkatan jasa sandar sebesar 0,03%, volume kendaraan sebesar 1,88%, serta pertumbuhan layanan pendukung lainnya. Hal ini mencerminkan peningkatan produktivitas dan efektivitas pengelolaan pelabuhan yang semakin terintegrasi.

Pada segmen aneka jasa, Dewan Komisaris mencatat kontribusi yang positif, terutama dari peningkatan pendapatan jasa pendukung sebesar 0,40%. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan aset Perseroan masih perlu ditingkatkan untuk mendorong kinerja yang lebih maksimal.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja operasional ASDP menunjukkan peningkatan yang baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek efisiensi, pengelolaan kapasitas, serta peningkatan kualitas layanan guna menjaga daya saing.

PANDANGAN ATAS KINERJA KEUANGAN

Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja keuangan ASDP pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang baik di tengah tantangan industri. Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp4,96 triliun, menurun sebesar 1,24% dibandingkan tahun sebelumnya.

VIEWS ON OPERATIONAL PERFORMANCE

The Board of Commissioners assesses that ASDP's operational performance throughout 2025 has been managed well, as reflected in the positive achievements across several key indicators, although certain challenges require further attention.

In the ferry segment, ASDP upholds its role as the backbone of national connectivity, utilizing the management of an extensive route network and the support of an adequate fleet. Operational performance showed a decline, reflected in a 14.11% decrease in the number of trips and a 9.25% decrease in vehicle volume. Meanwhile, there was a 1,922.18% increase in the volume of cargo shipped.

In the pioneer ferry segment, the Board of Commissioners notes operational dynamics influenced by external factors, including weather conditions and infrastructure constraints. Despite these challenges, the Company was still able to maintain service continuity with a good level of adaptation to field conditions.

Meanwhile, in the port segment, performance demonstrated a positive trend with an increase in docking services of 0.03%, vehicle volume of 1.88%, and the growth of other supporting services. This reflects increased productivity and more integrated effectiveness in port management.

In the ancillary services segment, the Board of Commissioners notes a positive contribution, primarily from the 0.40% increase in supporting service revenues. However, the optimization of the Company's asset utilization still requires further enhancement to drive maximized performance.

Overall, the Board of Commissioners assesses that ASDP's operational performance showed a good improvement, although further reinforcement remains necessary in aspects of efficiency, capacity management, and service quality to maintain competitiveness.

VIEWS ON FINANCIAL PERFORMANCE

The Board of Commissioners views that ASDP's financial performance in 2025 demonstrated good resilience amidst industry challenges. Revenue was recorded at Rp4.96 trillion, down by 1.24% compared to the previous year.

Laba komprehensif ASDP tahun 2025 tercatat sebesar Rp281,07 miliar, menurun sebesar 36,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp444,80 miliar. Penurunan tersebut terutama mencerminkan tekanan terhadap profitabilitas Perseroan di tengah dinamika operasional dan kondisi eksternal industri penyeberangan, namun kinerja tetap terjaga melalui pengelolaan biaya, penguatan efisiensi, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.

Dari sisi struktur keuangan, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp11,35 triliun, menurun sebesar 0,49%. Sementara itu, liabilitas tercatat sebesar Rp2,32 triliun dengan perubahan sebesar 11,20%, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, liabilitas Perseroan masih mencerminkan pengelolaan struktur permodalan yang tetap terjaga. Ekuitas meningkat menjadi Rp9,03 triliun, seiring dengan akumulasi laba dan penguatan posisi keuangan Perseroan.

Likuiditas Perseroan menunjukkan perbaikan dengan rasio lancar sebesar 16,11 basis poin, mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sisi lain, pengendalian biaya tetap menjadi fokus utama, terutama dalam menjaga efisiensi di tengah tekanan biaya energi dan operasional.

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Direksi dalam menjaga disiplin keuangan, termasuk pengendalian beban operasional, optimalisasi pendapatan, serta pengelolaan arus kas yang memadai. Upaya ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja Direksi sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat strategi pertumbuhan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset Perseroan guna meningkatkan profitabilitas. Selain itu, penguatan manajemen risiko, tata kelola biaya, serta pengembangan layanan berbasis kebutuhan pasar menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja.

Dengan fondasi yang kuat dan arah strategi yang jelas, Dewan Komisaris meyakini bahwa ASDP memiliki kapasitas untuk terus tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

ASDP's comprehensive profit for 2025 was recorded at Rp281.07 billion, a 36.81% decrease compared to Rp444.80 billion in the previous year. This decrease primarily reflected pressure on the Company's profitability amidst the operational dynamics and external conditions of the ferry industry. However, performance was maintained through cost management, enhanced efficiency, and the application of prudent financial management principles.

In terms of financial structure, the Company's total assets were recorded at Rp11.35 trillion, a 0.49% decrease. Meanwhile, liabilities were recorded at Rp2.32 trillion, a change of 11.20%. Despite the decrease from the previous year, the Company's liabilities still reflected the Company's sound capital structure management. Equity increased to Rp9.03 trillion, in line with accumulated profits and the Company's strengthening financial position.

The Company's liquidity showed improvement with a current ratio of 16.11 basis points, reflecting the ability to meet short-term obligations. On the other hand, cost control remains a primary focus, particularly in maintaining efficiency amidst energy and operational cost pressures.

The Board of Commissioners appreciates the Directors measures in maintaining financial discipline, including the control of operational expenses, revenue optimization, and the management of adequate cash flows. These efforts contributed to maintain financial stability and support business sustainability.

The Board of Commissioners views that the performance of the Board of Directors throughout 2025 has shown good results, although several areas still require attention and improvement.

Moving forward, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue strengthening growth strategies and operational efficiency, as well as optimizing assets utilization to increase profitability. Additionally, fortified risk management, cost governance, and the development of market-demand-driven services represent key factors in safeguarding performance sustainability.

With a solid foundation and a clear strategic direction, the Board of Commissioners believes that ASDP has the capacity to continue growing sustainably and deliver optimal value-added results for shareholders and all stakeholders.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Dewan Komisaris memandang bahwa strategi yang dirumuskan oleh Direksi pada tahun 2025 telah mencerminkan arah kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan dinamika industri transportasi penyeberangan. Strategi tersebut diformulasikan secara terstruktur melalui tiga pilar utama, yaitu *Business Expansion*, *Operational Excellence*, dan *Sustainability*, yang dinilai mampu memperkuat fundamental Perseroan sekaligus mendorong pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Pada pilar *Business Expansion*, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan upaya yang terarah dalam memperluas peluang usaha, baik melalui pengembangan layanan penyeberangan, optimalisasi segmen pendukung, maupun peningkatan nilai tambah dari aset yang dimiliki. Langkah ini dipandang penting dalam memperkuat posisi Perseroan di pasar sekaligus menangkap potensi pertumbuhan yang semakin berkembang, khususnya dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik nasional.

Pada pilar *Operational Excellence*, Dewan Komisaris mencermati adanya peningkatan fokus Direksi dalam memperkuat efisiensi operasional, keandalan layanan, serta kualitas proses bisnis secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari upaya optimalisasi pemanfaatan armada dan infrastruktur, peningkatan disiplin operasional, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efektivitas dan transparansi layanan. Pilar ini menjadi kunci dalam menjaga daya saing Perseroan di tengah tekanan biaya dan meningkatnya ekspektasi pengguna jasa.

Sementara itu, pada pilar *Sustainability*, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah memperkuat fondasi tata kelola melalui penguatan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Selain itu, perhatian terhadap aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi juga menunjukkan komitmen Perseroan dalam memastikan bahwa pertumbuhan usaha berjalan dalam koridor prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi ketiga pilar strategis tersebut telah memberikan arah yang jelas dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi usaha, efisiensi operasional, dan penguatan fondasi perusahaan, sehingga mampu mendukung keberlanjutan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

SUPERVISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN FORMULATING AND IMPLEMENTING COMPANY STRATEGY

The Board of Commissioners views that the strategy formulated by the Board of Directors in 2025 has reflected a comprehensive, adaptive policy direction that is aligned with the dynamics of the ferry transportation industry. The strategy is structured through three main pillars, namely Business Expansion, Operational Excellence, and Sustainability, which are weighed as capable of strengthening the Company's fundamentals while driving sustainable performance growth.

In Business Expansion pillar, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated targeted efforts in expanding business opportunities, whether through the development of ferry services, the optimization of supporting segments, or enhancing the value-added potential of owned assets. This step is viewed as essential in strengthening the Company's position in the market while capturing growing growth potential, particularly in supporting national connectivity and logistics systems.

In Operational Excellence pillar, the Board of Commissioners observes an increased focus by the Board of Directors on strengthening operational efficiency, service reliability, and overall business process quality. This is reflected in efforts to optimize fleet and infrastructure utilization, enhance operational discipline, and leverage digital technology to support service effectiveness and transparency. This pillar serves as the key to maintaining the Company's competitiveness amidst cost pressures and rising service user expectations.

In Sustainability Pillar, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has reinforced the governance foundation by strengthening risk management, the internal control system, and sustainable human resource development. Furthermore, attention to sustainability aspects and compliance with regulations also demonstrates the Company's commitment to ensuring that business growth proceeds within the corridors of prudence and good governance principles.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the implementation of these three strategic pillars has provided a clear direction in maintaining a balance between business expansion, operational efficiency, and the strengthening of the corporate foundation, thereby supporting the sustainability of the Company's performance over the long term.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris mencermati bahwa prospek usaha yang disusun Direksi untuk periode mendatang telah mempertimbangkan secara memadai perkembangan kondisi ekonomi dan industri yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan tetap berada pada kisaran 5%, serta inflasi yang relatif terjaga, kebutuhan terhadap layanan transportasi penyeberangan diperkirakan masih akan meningkat, seiring dengan pertumbuhan mobilitas masyarakat dan aktivitas distribusi logistik antarwilayah. Kondisi ini memberikan ruang yang cukup bagi ASDP untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja usaha.

Dari sisi industri, Dewan Komisaris menilai bahwa posisi ASDP sebagai operator utama penyeberangan nasional memberikan keunggulan tersendiri dalam menangkap peluang tersebut. Jaringan lintasan yang luas, dukungan armada, serta peran strategis dalam layanan perintis dan logistik domestik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. Namun demikian, Dewan Komisaris juga menekankan bahwa pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor yang perlu dicermati, antara lain fluktuasi harga energi, tekanan terhadap biaya operasional, kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan yang semakin tinggi dari pengguna jasa.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa arah strategi yang dirumuskan Direksi telah mengakomodasi aspek peluang dan risiko secara cukup seimbang. Fokus pada penguatan efisiensi operasional, optimalisasi aset, serta pengembangan layanan berbasis digital dinilai relevan untuk menjawab kebutuhan pasar sekaligus menjaga daya saing Perseroan. Di sisi lain, Dewan Komisaris tetap memandang perlunya konsistensi dalam pengendalian biaya, disiplin dalam pelaksanaan investasi, serta penguatan manajemen risiko agar pertumbuhan yang diharapkan tidak mengurangi kualitas kinerja keuangan Perseroan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha ASDP ke depan masih berada dalam koridor yang positif. Namun demikian, pencapaian prospek tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi Direksi dalam mengeksekusi strategi yang telah ditetapkan, kemampuan dalam menjaga efisiensi operasional, serta ketepatan dalam merespons dinamika eksternal yang terus berkembang.

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS OUTLOOK PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners attentively notes that the business outlook prepared by the Board of Directors for the upcoming period has adequately considered economic and industry developments relevant to the Company's business activities. With national economic growth projected to remain around 5% and inflation relatively controlled, the demand for ferry transportation services is expected to continue rising, in line with the growth of public mobility and inter-regional logistics distribution activities. The circumstance provides sufficient room for ASDP to maintain, and even enhance, its business performance.

From the industry perspective, the Board of Commissioners assesses that ASDP's position as the primary national ferry operator provides a distinct advantage in capturing these opportunities. The extensive route network, fleet support, and strategic role in pioneer services and domestic logistics constitute vital factors in safeguarding business sustainability. Nevertheless, the Board of Commissioners also emphasizes that growth is inseparable from several factors that require close monitoring, including energy price fluctuations, pressures on operational costs, the need for infrastructure capacity expansion, and increasingly higher service quality demands from service users.

Pertaining to this, the Board of Commissioners assesses that the strategic direction formulated by the Board of Directors has accommodated both opportunities and risks in a reasonably balanced manner. The focus on strengthening operational efficiency, asset optimization, and the development of digital-based services is deemed relevant to address market needs and stay competitive. On the other hand, the Board of Commissioners views the need for consistency in cost control, discipline in investment execution, and stronger risk management so that the expected growth does not diminish the quality of the Company's financial performance.

Considering these various factors, the Board of Commissioners views ASDP's future business outlook remains within positive corridors. However, the achievement of this outlook will highly depend on the consistency of the Board of Directors in executing the established strategies, the ability to maintain operational efficiency, and precision in responding to continuously evolving external dynamics.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan tata kelola Perseroan sepanjang tahun buku 2025 telah dilaksanakan secara memadai dan menunjukkan arah perbaikan yang berkelanjutan. Perseroan telah mengintegrasikan prinsip good corporate governance dalam proses pengelolaan usaha, baik pada tingkat strategis maupun operasional, sehingga mendukung terciptanya sistem pengambilan keputusan yang lebih terukur, akuntabel, dan selaras dengan kepentingan jangka panjang Perseroan.

Dewan Komisaris mencermati bahwa penerapan tata kelola tidak hanya tercermin pada kepatuhan terhadap ketentuan formal, tetapi juga pada upaya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan profesionalisme. Dalam hal ini, peran Direksi dalam memastikan implementasi kebijakan dan prosedur secara konsisten di seluruh lini organisasi menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas tata kelola secara keseluruhan. Dewan Komisaris juga menilai bahwa koordinasi antar fungsi pengawasan, termasuk Satuan Pengawasan Internal dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris, telah berjalan dengan baik dalam mendukung sistem pengendalian yang lebih komprehensif.

MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan manajemen risiko telah menjadi bagian yang semakin melekat dalam proses bisnis Perseroan. Proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko telah dilakukan secara lebih sistematis serta dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis. Dewan Komisaris mencermati bahwa risiko utama, baik yang bersifat operasional, keuangan, maupun eksternal, telah direspons dengan langkah mitigasi yang memadai. Meskipun demikian, Dewan Komisaris memandang bahwa penguatan implementasi manajemen risiko di tingkat operasional masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam memastikan konsistensi pelaksanaan mitigasi serta peningkatan kesadaran risiko di seluruh unit kerja.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam aspek pengendalian internal, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem yang diterapkan telah mendukung keandalan operasional dan pelaporan keuangan Perseroan. Mekanisme pengendalian yang ada telah dirancang untuk memitigasi risiko penyimpangan serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal. Dewan Komisaris juga mencermati bahwa fungsi audit internal telah menjalankan perannya secara independen dan objektif dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners views that the implementation of corporate governance throughout financial year 2025 has been carried out adequately and demonstrates a continuous path of improvement. The Company has integrated good corporate governance principles into its business management processes, both at the strategic and operational levels to support the creation of a decision-making system that is more measurable, accountable, and aligned with the Company's long-term interests.

The Board of Commissioners observes that governance implementation is reflected not only in compliance with formal provisions but also in efforts to build a corporate culture that upholds integrity, transparency, and professionalism. The Board of Directors plays a role in ensuring the consistent implementation of policies and procedures across all lines of the organization serves as an important factor determining overall governance effectiveness. The Board of Commissioners also assesses that coordination among oversight functions, including the Internal Audit Unit and the committees under the Board of Commissioners, has proceeded well in supporting a more comprehensive control system.

RISK MANAGEMENT

The Board of Commissioners assesses that the implementation of risk management has become an increasingly embedded part of the Company's business processes. The processes of risk identification, assessment, and mitigation have been conducted more systematically and are tied to the achievement of strategic objectives. The Board of Commissioners notes that key risks in operational, financial, or external, have been addressed with adequate mitigation steps. Nonetheless, the Board also views that the reinforced implementation of risk management at the operational level needs to be continuously enhanced, particularly in ensuring consistency in mitigation execution and increasing risk awareness across all work units.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

In the aspect of internal control, the Board of Commissioners assesses that the system implemented has supported the Company's operational reliability and financial reporting. The existing control mechanisms have been designed to mitigate deviation risks and ensure compliance with internal policies. The Board of Commissioners also notes that the internal audit function has executed its role independently and objectively in evaluating control effectiveness. Moving forward, the

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong agar penguatan pengendalian internal difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses monitoring yang lebih efektif.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dewan Komisaris memandang bahwa sistem pelaporan pelanggaran telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik. Sistem ini memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Dewan Komisaris menilai bahwa keberadaan sistem ini telah berkontribusi dalam memperkuat budaya integritas di lingkungan Perseroan. Namun demikian, efektivitasnya perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi yang berkelanjutan serta penanganan laporan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Board of Commissioners encourages that the strengthening of internal control be focused on enhancing the quality of risk-based oversight and leveraging technology to support a more effective monitoring process.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Board of Commissioners views that the whistleblowing system has become one of the important instruments supporting the implementation of good governance. This system provides space for all stakeholders to report information regarding alleged violations in a secure and confidential manner. The Board of Commissioners assesses that the existence of this system has contributed to strengthening the culture of integrity within the Company's environment. Nevertheless, its effectiveness needs to be continuously enhanced through sustained dissemination and the handling of reports conducted in a transparent and accountable manner.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sepanjang tahun buku 2025. Keberadaan komite-komite tersebut berperan penting dalam memberikan kajian yang mendalam, objektif, dan independen terhadap berbagai aspek pengelolaan Perseroan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur oleh Dewan Komisaris.

Secara umum, Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas masing-masing komite telah sesuai dengan piagam komite (*charter*) yang berlaku, serta selaras dengan prinsip *good corporate governance*. Koordinasi antara komite dengan Dewan Komisaris maupun dengan Direksi juga berjalan dengan baik, ditandai dengan penyampaian rekomendasi dan laporan yang relevan, tepat waktu, dan berbasis analisis yang memadai.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners assesses that the committees under the Board of Commissioners executed their functions and responsibilities effectively in supporting the implementation of oversight duties throughout financial year 2025. The committees plays an important role in providing in-depth, objective, and independent reviews of various aspects of the Company's management, thereby supporting more precise and measured decision-making by the Board of Commissioners.

In general, the Board of Commissioners views that each committee has executed their respective duties in accordance with the committee charters and principles of good corporate governance. Coordination between the committees, the Board of Commissioners, and the Board of Directors has also proceeded well, characterized by the submission of relevant, timely recommendations and reports based on adequate analysis.

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah melaksanakan perannya secara optimal dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan, khususnya terkait dengan keandalan laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Komite Audit secara aktif melakukan penelaahan atas laporan keuangan, berkoordinasi dengan auditor internal maupun eksternal, serta memantau tindak lanjut atas temuan audit. Dewan Komisaris memandang bahwa kontribusi Komite Audit telah memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal Perseroan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam memastikan tersedianya kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan strategis Perseroan. Komite ini berperan dalam memberikan rekomendasi terkait struktur organisasi, proses nominasi, serta kebijakan remunerasi yang mempertimbangkan prinsip kewajaran, daya saing, dan kinerja. Dewan Komisaris memandang bahwa peran Komite Nominasi dan Remunerasi telah mendukung terciptanya tata kelola SDM yang lebih terarah dan berkelanjutan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi telah berperan aktif dalam memantau efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola Perseroan secara menyeluruh. Komite ini melakukan evaluasi terhadap profil risiko, efektivitas mitigasi yang dilakukan, serta keselarasan implementasi tata kelola di seluruh lini organisasi. Dewan Komisaris memandang bahwa peran komite ini semakin penting dalam menghadapi dinamika risiko yang berkembang, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan pemantauan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap efektivitas fungsi pengawasan. Namun demikian, Dewan Komisaris mendorong agar masing-masing komite terus meningkatkan kualitas kajian, memperkuat pendekatan berbasis risiko, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh manajemen.

AUDIT COMMITTEE

The Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has executed its role optimally in supporting the effectiveness of the oversight role, particularly regarding the reliability of financial reports, the effectiveness of internal controls, and compliance with applicable regulations. The Audit Committee actively conducted reviews of financial statements, coordinated with both internal and external auditors, and monitored the follow-up on audit findings. The Board of Commissioners views that the Audit Committee's contributions have provided reasonable assurance over the quality of the Company's financial reporting and internal control system.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Board of Commissioners assesses that the Nomination and Remuneration Committee executed its function well in ensuring the availability of human resource management policies aligned with the Company's strategic needs. The committee gives recommendations related to organizational structure, nomination processes, and remuneration policies that consider the principles of fairness, competitiveness, and performance. The Board views that the role of the Nomination and Remuneration Committee has helped created a more directed and sustainable HR governance.

RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Board of Commissioners assesses that the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee has played an active role in monitoring the effectiveness of risk management implementation and corporate governance across the Company as a whole. The committee evaluates risk profile, effectiveness of the mitigations performed, and alignment of governance implementation across all lines of the organization. The Board of views that the Committee's role becomes increasingly critical in facing evolving risk dynamics, thus requiring strengthened coordination and continuous monitoring.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the performance of the committees under the Board of Commissioners has significantly supported the effectiveness of the oversight function. Nevertheless, the Board of Commissioners encourages each committee to continue enhancing the quality of its reviews, strengthening risk-based approaches, and ensuring that every recommendation provided can be optimally followed up by management.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama yang merangkap sebagai Komisaris Independen, 4 (empat) Komisaris, serta 1 (satu) Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku, khususnya terkait keberadaan Komisaris Independen dalam mendukung penerapan prinsip *good corporate governance*. Adapun susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As of 31 December 2025, there were no changes to the composition of the Board of Commissioners. The Board consists of 1 (one) President Commissioner concurrently serving as an Independent Commissioner, 4 (four) Commissioners, and 1 (one) Independent Commissioners. The composition has met the applicable regulations, particularly regarding the presence of Independent Commissioners in supporting the implementation of GCG principles. The composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Dasar Pengangkatan** *Appointment Basis*	**Tanggal Efektif** *Effective Date*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Shareholders Decree No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 November 2024 – saat ini 19 November 2024 – present
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Shareholders Decree No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 November 2024 – saat ini 19 November 2024 – present
Taufik Rachman	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Shareholders Decree No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 November 2024 – saat ini 19 November 2024 – present
Joddy Hernady	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Shareholders Decree No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 November 2024 – saat ini 19 November 2024 – present
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-225/MBU/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024. Shareholders Decree No. SK-225/MBU/10/2024 dated 17 October 2024.	17 Oktober 2024 – saat ini 17 October 2024 – present
Elba Damhuri	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Shareholders Decree No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 November 2024 – saat ini 19 November 2024 – present

APRESIASI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi, integritas, dan komitmen dalam mengelola Perseroan sepanjang tahun buku 2025. Berbagai inisiatif strategis yang dijalankan, disertai dengan disiplin dalam eksekusi, telah mampu menjaga stabilitas kinerja sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan Perseroan di tengah dinamika industri yang terus berkembang. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para pemegang saham, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada ASDP. Kepercayaan tersebut menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi Perseroan serta mendorong keberlanjutan kinerja di masa mendatang.

Ke depan, kami akan terus memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, dengan fokus pada penguatan kualitas strategi, disiplin operasional, serta pengelolaan risiko yang terukur. Kami meyakini bahwa dengan arah kebijakan yang tepat dan eksekusi yang konsisten, ASDP akan terus memperkuat perannya sebagai penggerak konektivitas nasional serta menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

APPRECIATION

The Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors along with the entire management team and employees for their dedication, integrity, and commitment to managing the Company throughout financial year 2025. The various strategic initiatives implemented, accompanied by discipline in execution, have successfully maintained performance stability while simultaneously strengthening the Company's growth foundation amidst continuously evolving industry dynamics. We also express our gratitude to the shareholders, business partners, and all stakeholders for the trust and support consistently given to ASDP. This trust serves as a vital element in reinforcing the Company's position and driving performance sustainability in the future.

Moving forward, we will continue to ensure the execution of an effective oversight function, focusing on strengthening strategic quality, operational discipline, and measured risk management. We believe that with the right policy direction and consistent execution, ASDP will continue to strengthen its role as a driver of national connectivity and deliver quality, sustainable growth.

Jakarta, 27 Agustus | August 2026

Atas Nama Dewan Komisaris | On Behalf of the Board of Commissioners

ACHMAD BAIDOWI

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

President Commissioner concurrently as Independent Commissioner

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika industri penyeberangan, ASDP tetap menjaga ketahanan kinerja melalui penguatan operasional, peningkatan layanan, dan pengelolaan usaha yang pruden. Sepanjang tahun 2025, ASDP mencatatkan total aset sebesar Rp11,35 triliun dan laba bersih sebesar Rp285,43 miliar.

Dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas antarpulau dan distribusi logistik nasional, ASDP memandang prospek usaha tetap positif. Perseroan akan terus menjalankan strategi secara adaptif dan terukur untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Amid global economic uncertainty and the dynamics of the ferry industry, ASDP continued to maintain performance resilience through operational strengthening, service enhancement, and prudent business management. Throughout 2025, ASDP recorded total assets of Rp11.35 trillion and net profit of Rp285.43 billion.

With the growing need for inter-island connectivity and national logistics distribution, ASDP views its business outlook as remaining positive. The Company will continue to execute its strategies in an adaptive and measured manner to create sustainable added value for all stakeholders.

HERU WIDODO

Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTOR

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat menjalankan kegiatan usaha dengan baik sepanjang tahun buku 2025. Di tengah dinamika ekonomi global dan perkembangan industri transportasi yang semakin kompleks, ASDP tetap menunjukkan ketahanan kinerja serta konsistensi dalam memperkuat perannya sebagai penyedia layanan penyeberangan yang andal dan terintegrasi di Indonesia. Tahun ini menjadi fase penting dalam memperkuat arah transformasi, dengan menitikberatkan pada keselarasan strategi, peningkatan kualitas operasional, serta penguatan fondasi bisnis yang berkelanjutan.

Kami terus memperkuat peran ASDP sebagai penghubung utama konektivitas antarpulau, yang tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam kelancaran distribusi logistik nasional. Melalui pendekatan yang terukur, ASDP menjalankan berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada peningkatan efisiensi, optimalisasi pemanfaatan aset, serta pengembangan layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa. Dalam laporan ini, kami menyampaikan kinerja, strategi, serta langkah-langkah adaptif yang telah ditempuh sepanjang tahun sebagai bentuk akuntabilitas kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus sebagai landasan untuk melanjutkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Honorable Shareholders and Stakeholders,

We offer our praise and gratitude to God Almighty for His abundant grace and blessings, enabling PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) to successfully conduct its business activities throughout financial year 2025. Amid global economic dynamics and increasingly complex transportation industry developments, ASDP continued to stay resilient and consistent in performing and strengthening its role as the reliable and integrated ferry service provider in Indonesia. This year marked a crucial phase in reinforcing our transformation trajectory, centering on strategic alignment, operational quality enhancement, and the bolstering of a sustainable business foundation.

We are committed to continuously strengthen ASDP's role as the primary transportation hub for connectivity between islands, which not only supports public mobility but also contributes to the smooth flow of national logistics distribution. Using a measured approach, ASDP executed various strategic initiatives focused on increasing efficiency, optimizing asset utilization, and developing digital-based services to enhance service quality for users. In this report, we present the performance, strategies, and adaptive measures implemented throughout the year as a form of accountability to all shareholders and stakeholders, as well as a foundation to pursue higher quality, sustainable growth.

ANALISIS ATAS KINERJA PERSEROAN

Sepanjang tahun buku 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan kinerja yang relatif solid di tengah dinamika industri transportasi dan tekanan eksternal yang masih berlanjut. Ketidakpastian global, fluktuasi harga energi, serta peningkatan ekspektasi terhadap kualitas layanan menjadi faktor yang memengaruhi lingkungan usaha Perseroan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja melalui penerapan strategi yang adaptif, penguatan disiplin operasional, serta peningkatan koordinasi antar fungsi. Hal ini mencerminkan

ANALYSIS OF THE COMPANY'S PERFORMANCE

Throughout financial year 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) demonstrated a relatively solid performance amidst the industry's ongoing dynamics and external pressures. Global uncertainty, energy price fluctuations, and rising expectations on service quality constituted factors influencing the Company's business environment. In confronting these conditions, the Company successfully maintained performance stability by implementing adaptive strategies, reinforced operational discipline, and improved inter-functional coordination. It reflects the Company's

kemampuan Perseroan dalam menjaga kesinambungan usaha sekaligus merespons perubahan secara terukur dan terarah.

Dari sisi operasional, Perseroan tetap menjaga keandalan layanan penyeberangan melalui pengelolaan 222 unit kapal, 318 lintasan, 37 pelabuhan, 87 dermaga, dan 27 cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan produksi penyeberangan sebanyak 288.566 trip, melayani 5,71 juta penumpang dan 7,23 juta kendaraan. Capaian tersebut mencerminkan peran strategis ASDP dalam menjaga konektivitas antarpulau, mendukung mobilitas masyarakat, serta memperkuat kelancaran distribusi logistik nasional di tengah dinamika operasional dan kondisi eksternal yang menantang.

Dari sisi keuangan, Perseroan mencatatkan kinerja yang mencerminkan pengelolaan usaha yang pruden dan terukur. Pendapatan usaha mencapai Rp4,96 triliun, dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp3,58 triliun, sehingga Perseroan mampu menghasilkan laba tahun berjalan sebesar Rp285,43 miliar. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan pengendalian biaya operasional di tengah dinamika industri.

Struktur keuangan Perseroan juga menunjukkan kondisi yang sehat, dengan jumlah aset sebesar Rp11,35 triliun yang didukung oleh pengelolaan sumber daya secara optimal. Sementara itu, liabilitas tercatat sebesar Rp2,32 triliun, mencerminkan tingkat leverage yang terjaga dan kemampuan Perseroan dalam mengelola kewajiban secara terkendali. Secara keseluruhan, kinerja keuangan ini memberikan dasar yang kuat bagi Perseroan untuk mempertahankan stabilitas usaha serta mendukung pengembangan bisnis pada periode mendatang.

Secara keseluruhan, kinerja Perseroan pada tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dengan fondasi yang semakin kuat. Dalam periode mendatang, Perseroan akan terus memperkuat efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset guna mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas. Perseroan juga akan terus mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penguatan manajemen risiko, serta pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan pelaksanaan strategi yang konsisten, Perseroan optimistis dapat menjaga keberlanjutan kinerja dan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

capability to preserve business continuity while responding to changes in a measured and targeted manner.

From an operational perspective, the Company consistently maintains reliable ferry transportation services by managing 222 vessels, 318 routes, 37 ports, 87 docks, and 27 branches across vast Indonesian regions. Throughout 2025, the Company recorded the output of 288,566 ferry trips, serving 5.71 million passengers and 7.23 million vehicles. The achievement reflects ASDP's strategic role in maintaining inter-island connectivity, supporting community mobility, and strengthening the seamlessness of national logistics distribution amidst operational dynamics and challenging external conditions.

From a financial perspective, the Company recorded a performance that reflects prudent and measured business management. Revenue was recorded at Rp4.96 trillion, with cost of revenue amounting to Rp3.58 trillion, enabling the Company to generate profit for the year of Rp285.43 billion. The achievement demonstrates the Company's capability to maintain a balance between revenue growth and operating cost control amidst industry dynamics.

The Company's financial structure also indicated a healthy condition, with total assets amounting to Rp11.35 trillion, supported by optimal resource management. Meanwhile, liabilities were recorded at Rp2.32 trillion, reflecting a well-maintained leverage level and the Company's capability to manage its obligations in a controlled manner. Overall, this financial performance provides a strong foundation for the Company to maintain business stability and support business development in the upcoming period.

Overall, the Company's performance in 2025 demonstrated a positive trajectory with an increasingly robust foundation. Moving forward, the Company will continue to strengthen operational efficiency, enhance service quality, and optimize asset utilization to drive higher quality growth. The Company will also continue to prioritize implementing good corporate governance, reinforcing risk management, and developing innovations relevant to market demands. By incorporating an integrated approach and consistent strategy execution, the Company remains optimistic about sustaining performance continuity and creating long-term added value for all stakeholders.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Dalam rangka memperkuat daya saing dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, ASDP menetapkan arah strategi yang terstruktur melalui tiga pilar utama, yaitu *Business Expansion*, *Operational Excellence*, dan *Sustainability*. Ketiga pilar ini dirancang untuk saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat fondasi tata kelola dan keberlanjutan Perseroan.

1. ***Business Expansion***

   Pada pilar *Business Expansion*, Perseroan berfokus pada perluasan sumber pendapatan serta optimalisasi potensi bisnis yang dimiliki. Strategi ini diwujudkan melalui penguatan manajemen armada terintegrasi guna menjaga pangsa pasar eksisting sekaligus memperluas layanan ke segmen yang lebih beragam, termasuk *long distance* ferry, kapal *charter*, serta potensi lintasan internasional.

   Di sisi lain, Perseroan juga mendorong ekspansi bisnis pelabuhan melalui peningkatan kapasitas dan layanan, termasuk rencana pengembangan pelabuhan di lokasi strategis seperti Jangkar di Jawa Timur dan kawasan Danau Toba dengan skema kerja sama operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan serta mendukung peningkatan volume trafik penyeberangan.

   Untuk memperkuat daya tarik layanan, Perseroan melakukan peningkatan *customer experience* melalui diferensiasi layanan, khususnya untuk segmen premium, sekaligus mengembangkan sumber pendapatan tambahan di luar tiket (*non-farebox revenue*). Pengembangan aplikasi Ferizy secara berkelanjutan juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan keterlibatan pengguna, integrasi layanan perjalanan, serta monetisasi platform digital.

   Perseroan turut memperkuat layanan logistik melalui optimalisasi pemanfaatan armada dan pengembangan program IFCS (*Indonesia Ferry Corporate System*) ASDP untuk menangkap peluang pertumbuhan distribusi *middle-mile*. Selain itu, pengembangan kawasan komersial dan *waterfront* serta perluasan layanan *ancillary* seperti periklanan, ritel, distribusi bahan bakar, layanan *managed service*, dan pemanfaatan aset *idle* menjadi bagian dari strategi diversifikasi pendapatan.

THE COMPANY'S STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

In order to strengthen competitiveness and ensure sustainable growth, ASDP established a structured strategic direction through three main pillars. They are Business Expansion, Operational Excellence, and Sustainability. These three pillars are designed to complement one another in driving business growth, increasing operational efficiency, and strengthening the Company's governance and sustainability foundations.

1. **Business Expansion**

   Under the Business Expansion pillar, the Company focuses on expanding revenue streams and optimizing its inherent business potential. This strategy is realized through the reinforcement of integrated fleet management to maintain existing market share while expanding services into more diverse segments, including long-distance ferries, charter ships, and potential international routes.

   On the other hand, the Company is also driving port business expansion by increasing capacity and services, including plans of port development in strategic locations such as Jangkar in East Java and the Lake Toba region through operational cooperation schemes. This move is expected to increase service capacity and support growth in ferry traffic volume.

   To enhance service appeal, the Company is improving the customer experience through service differentiation, particularly for the premium segment, while simultaneously developing additional non-farebox revenue streams. The continuous development of the Ferizy application also remains a primary focus in increasing user engagement, integrating travel services, and monetizing digital platforms.

   The Company also reinforces its logistics services by optimizing fleet utilization and developing the ASDP IFCS (Indonesia Ferry Corporate System) program to capture middle-mile distribution growth opportunities. Furthermore, the development of commercial and waterfront areas, alongside the expansion of ancillary services, such as advertising, retail, fuel distribution, managed services, and the utilization of idle assets, forms part of the revenue diversification strategy.

3. ***Operational Excellence***
   Pada pilar *Operational Excellence*, Perseroan berfokus pada peningkatan efisiensi dan keandalan operasional secara menyeluruh. Pengoptimalan kinerja feri dilakukan melalui program modifikasi dan retrofit mesin kapal serta peningkatan kapasitas angkut guna mendukung efisiensi dan produktivitas armada.

   Transformasi operasi pelabuhan juga menjadi perhatian utama, antara lain melalui pengembangan *buffer zone* untuk memisahkan area operasional dan komersial, sehingga meningkatkan keamanan, kelancaran operasional, dan kenyamanan pengguna jasa.

   Di sisi keuangan, Perseroan melakukan penguatan manajemen dan proses keuangan melalui otomatisasi proses penagihan dan pembayaran. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, mempercepat proses, serta mendukung efisiensi operasional secara keseluruhan.

4. ***Sustainability***
   Pada pilar *Sustainability*, Perseroan berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG) ke dalam strategi bisnis. Implementasi ESG dilakukan melalui pengembangan infrastruktur penyeberangan dan pelabuhan yang berkelanjutan, serta pelaksanaan program yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Melalui ketiga pilar strategis tersebut, Perseroan menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mencapai pertumbuhan usaha, tetapi juga memastikan keberlanjutan kinerja, peningkatan nilai tambah, serta kontribusi yang lebih luas bagi pemangku kepentingan dan pembangunan nasional.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan arah strategi dan kebijakan strategis Perseroan guna memastikan keberlanjutan kinerja serta pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam menjalankan peran tersebut, Direksi secara aktif melakukan evaluasi terhadap kondisi internal dan eksternal, termasuk dinamika industri, perkembangan regulasi, serta peluang dan risiko yang dihadapi Perseroan, sebagai dasar dalam penyusunan strategi yang adaptif dan terukur.

3. **Operational Excellence**
   Under the Operational Excellence pillar, the Company focuses on comprehensively increasing efficiency and operational reliability. Ferry performance optimization is conducted through vessel engine modification and retrofit programs, as well as capacity increases, to support fleet efficiency and productivity.

   Port operations transformation is also a primary focus, including the development of buffer zones to separate operational and commercial areas, thereby enhancing safety, operational smoothness, and service user comfort.

   Financially, the Company is strengthening financial management and processes through the automation of billing and payment processes. This step is expected to increase accuracy, expedite processes, and support overall operational efficiency.

4. **Sustainability**
   Under the Sustainability pillar, the Company is committed to integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its business strategy. ESG implementation is carried out through the development of sustainable ferry and port infrastructure, as well as the execution of programs that contribute to economic development and the welfare of communities surrounding operational areas.

These three strategic pillars affirms the Company's commitment to not only achieving business growth but also ensuring performance sustainability, increasing added value, and providing broader contributions to stakeholders and national development.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES OF THE COMPANY

The Board of Directors holds a central role in formulating the Company's strategic direction and policies to ensure performance sustainability and the achievement of long-term objectives. In fulfilling this role, the Board of Directors actively evaluates internal and external conditions, including industry dynamics, regulatory developments, as well as opportunities and risks faced by the Company, as a basis for preparing adaptive and measured strategies.

Perumusan strategi dilakukan secara terstruktur melalui proses perencanaan yang komprehensif, yang mencakup penyelarasan visi, misi, dan sasaran strategis dengan kondisi pasar serta kapabilitas Perseroan. Direksi juga memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang ditetapkan selaras dengan arah pengembangan usaha, kebutuhan pemangku kepentingan, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

Dalam implementasinya, Direksi berperan dalam memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan ke dalam rencana kerja yang operasional dan terukur, termasuk melalui penetapan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) yang jelas. Direksi juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan strategi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan secara responsif terhadap perubahan kondisi.

Selain itu, Direksi turut memastikan bahwa perumusan dan pelaksanaan strategi didukung oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penguatan manajemen risiko, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian, strategi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada keberlanjutan kinerja dan penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Strategy formulation is structured through a comprehensive planning process, which includes aligning the vision, mission, and strategic targets with market conditions and the Company's capabilities. The Board of Directors also ensures that every established strategic policy aligns with the business development direction, stakeholder needs, and the prudent risk management.

In its implementation, the Board of Directors plays a role in ensuring that formulated strategies can be applied into operational and measurable work plans, including the establishment of clear Key Performance Indicators (KPIs). The Board of Directors also conducts periodic monitoring and evaluation of executed strategy to ensure alignment between planning and realization, making necessary adjustments responsively to changing situations.

Furthermore, the Board of Directors ensures that strategy formulation and execution are supported by the implementation of good corporate governance, reinforced risk management, and the development of competent human resources. Accordingly, the executed strategies are not only oriented toward business growth but also toward performance sustainability and added value creation for all stakeholders.

PERBANDINGAN HASIL YANG DICAPAI DENGAN TARGET

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Perseroan secara berkala melakukan pengukuran atas realisasi capaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan kendala yang memengaruhi kinerja, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan strategi dan kebijakan ke depannya.

COMPARISON OF ACHIEVED RESULTS WITH TARGETS

As part of performance evaluation, the Company regularly measures actual achievements against the targets established in the work plan. The evaluation aims not only to assess the level of achievement but also to identify driving factors and constraints affecting performance, thereby serving as a basis for future strategy and policy refinement.

OPERASIONAL

Pada tahun 2025, realisasi kinerja Perseroan menunjukkan capaian yang beragam dibandingkan target RKAP. Pada segmen penyeberangan komersial, realisasi trip mencapai 133.075 trip atau 87,11% dari target, dengan realisasi penumpang sebesar 3.999.349 orang atau 86,81% dan kendaraan sebesar 4.764.411 unit atau 82,74%. Sementara itu, segmen penyeberangan perintis mencatat realisasi trip yang melampaui target, yaitu 93.916 trip atau 107,87%, meskipun realisasi penumpang dan kendaraan masing-masing masih berada pada 82,45% dan 89,29% dari target. Pada segmen penyeberangan anak perusahaan, realisasi trip, penumpang, dan kendaraan masing-masing mencapai 73,18%, 72,36%, dan 67,34% dari target.

Pada segmen usaha pelabuhan, kinerja infrastruktur menunjukkan capaian 100,00% terhadap target, baik untuk jumlah pelabuhan, dermaga, moveable bridge, plengsengan, maupun ponton. Dari sisi layanan pelabuhan, jasa sandar berhasil melampaui target dengan pencapaian 110,12%, sedangkan jasa parkir mencatat realisasi yang signifikan sebesar 255,58%. Namun demikian, beberapa indikator lain masih berada di bawah target, antara lain pas pelabuhan sebesar 89,08%, penumpang sebesar 80,95%, kendaraan sebesar 90,80%, dan pemeliharaan dermaga sebesar 90,80%. Adapun penjualan BBM terealisasi sebesar 99.228.400 liter atau 95,75% dari target.

Untuk layanan pendukung, realisasi penyeberangan Terminal Eksekutif Gabungan Merak-Bakauheni mencapai 1.166.460 pengguna jasa atau 77,00% dari target, dengan capaian tertinggi pada kendaraan Golongan I sebesar 170,87% dan Golongan III sebesar 105,24%. Pada bisnis sewa ruangan, tingkat okupansi Sosoro Mall, Anjungan Agung Mall, dan Plaza Marina Labuan Bajo masing-masing mencapai 29,44%, 15,86%, dan 78,87%. Secara keseluruhan, realisasi pangsa pasar Perseroan mencapai 39,36%, atau 95,53% dari target RKAP 2025, yang mencerminkan bahwa posisi ASDP di industri penyeberangan tetap terjaga meskipun sebagian indikator operasional masih memerlukan optimalisasi.

KEUANGAN

Dari sisi keuangan, Perseroan mencatatkan dinamika kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah aset pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,35 triliun, menurun sebesar Rp0,06 triliun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp11,41 triliun. Sementara itu, liabilitas menurun sebesar Rp0,29 triliun dari Rp2,61 triliun menjadi Rp2,32 triliun, yang mencerminkan upaya pengelolaan kewajiban secara lebih terkendali.

OPERATIONAL ASPECTS

In 2025, the performance results of the Company showed varied attainments compared to the WPB targets. For commercial ferry transportation segment, actual trips is 133,075 trips or 82.74% of the target, with actual passengers at 3,999,349 people or 86.81% and vehicles at 4,764,411 units or 82.74%. Meanwhile, the pioneer ferry transportation segment recorded actual trips that exceeded the target, totaling 93,916 trips or 107.87%, although actual passengers and vehicles remained at 82.45% and 89.29% of their respective targets. In the subsidiary ferry transportation business segment, actual trips, passengers, and vehicles reached 73.18%, 72,36%, and 67.34% of their respective targets.

Within the port business segment, performance on the infrastructure demonstrated a 100.00% attainment of the target across the number of ports, docks, movable bridges, levee docks, and floating docks. In terms of port services, dock service successfully exceeded the target achieving 110.12%, while parking services recorded a significant result attainment of 255.58%. Nevertheless, several other indicators remained below target, including port admission fees at 89.08%, passengers at 80.95%, vehicles at 90.80%, and dock maintenance at 90.80%. Furthermore, fuel sales were actualized at 99,228,400 liters, or 95.75% of the target.

For supporting services, the actual ferry transportation of the Merak-Bakauheni Joint Executive Terminal reached 1,166,460 service users or 77.00% of the target, with the highest attainments observed in Class I vehicles at 170.87% and Class III vehicles at 105.24%. In the property rent business, the occupancy rates of Sosoro Mall, Anjungan Agung Mall, and Plaza Marina Labuan Bajo reached 29.44%, 15.86%, and 78.87% respectively. Overall, the actual market share of the Company reached 39.36%, or 95.53% of the 2025 WPB target, reflecting that the position of ASDP within the ferry transportation industry remains maintained although certain operational indicators still require optimization.

FINANCIAL ASPECTS

From a financial perspective, the Company recorded dynamic performance compared to the previous year. Total assets in 2025 were recorded at Rp11.35 trillion, a decrease of Rp0.06 trillion compared to 2024 at Rp11.41 trillion. Meanwhile, liabilities decreased by Rp0.29 trillion from Rp2.61 trillion to Rp2.32 trillion, reflecting efforts to manage obligations in a more controlled manner.

Pendapatan usaha mengalami penurunan sebesar Rp0,06 triliun dari Rp5,02 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp4,96 triliun pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp285,43 miliar, menurun sebesar Rp161,88 miliar dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp447,31 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap profitabilitas, yang dipengaruhi oleh dinamika pendapatan serta beban operasional. Meskipun demikian, Perseroan tetap mampu menjaga stabilitas keuangan melalui pengendalian liabilitas dan pengelolaan aset yang optimal, sehingga kinerja keuangan secara keseluruhan tetap berada dalam kondisi yang terjaga.

Revenue decreased by Rp0.06 trillion, from Rp5.02 trillion in 2024 to Rp4.96 trillion in 2025. In line with this, profit for the year was recorded at Rp285.43 billion, declining by Rp161.88 billion compared to the previous year's achievement of Rp447.31 billion. The decline indicates pressure on profitability, influenced by revenue dynamics and operating expenses. Nevertheless, the Company remained capable of maintaining financial stability through liability control and optimal asset management, ensuring that overall financial performance remained in a well-preserved condition.

KENDALA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Sepanjang tahun 2025, pencapaian kinerja ASDP dipengaruhi oleh sejumlah kendala operasional, terutama gangguan armada dan infrastruktur layanan. Beberapa kejadian signifikan meliputi tidak beroperasinya KMP Tandemand sepanjang tahun 2025 akibat insiden kebakaran pada 2 Oktober 2024, insiden KMP Portlink III yang menabrak Dermaga 6 Eksekutif Merak pada 17 Maret 2025 sehingga berdampak pada fasilitas *moveable bridge* dan kelancaran layanan, kerusakan dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni pada 17-25 Juni 2025 yang berdampak pada penurunan *throughput* dan penjadwalan ulang layanan, serta kandasnya KMP Tongkol pada 27 Juni 2025 yang masih menimbulkan gangguan pelayanan dan berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan. Selain itu, cuaca ekstrem turut memengaruhi operasional, termasuk tidak beroperasinya sembilan kapal di Cabang Kupang selama tujuh hari pada Juni 2025.

Perseroan juga menghadapi kendala dari sisi pengaturan lalu lintas dan pola layanan. Pembatasan arus kendaraan pada periode Angkutan Lebaran di lintasan Pelabuhan BBJ-Muara Pilu dan Ciwandan-Wika Beton berdampak pada penurunan aktivitas di Pelabuhan Merak. Selain itu, pergeseran operasional dari Dermaga Eksekutif I ke Dermaga Eksekutif II turut memengaruhi kinerja segmen eksekutif, karena tarif Dermaga Eksekutif II masih menggunakan tarif reguler sehingga menurunkan minat pengguna jasa terhadap layanan eksekutif.

Dari sisi pasar, ASDP menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat di beberapa wilayah layanan. Persaingan tersebut tercermin dari strategi tarif dan promosi langsung atau *direct cash* yang dilakukan kompetitor, masuknya operator swasta pada lintasan Kupang-Aimere-Waingapu dengan fasilitas kapal yang lebih unggul dan tarif lebih rendah,

CHALLENGES FACED BY THE COMPANY

Throughout 2025, ASDP's performance achievement was affected by several operational constraints, particularly fleet disruptions and service infrastructure issues. Significant events included the non-operation of KMP Tandemand throughout 2025 due to a fire incident on 2 October 2024, the incident involving KMP Portlink III colliding with Executive Pier 6 at Merak on 17 March 2025, which affected the moveable bridge facility and service continuity, damage to the executive pier at Bakauheni Port on 17 to 25 June 2025, which affected throughput and required service rescheduling, as well as the grounding of KMP Tongkol on 27 June 2025, which continued to disrupt services and posed a potential loss of revenue. In addition, extreme weather also affected operations, including the non-operation of nine vessels at the Kupang Branch for seven days in June 2025.

The Company also faced constraints related to traffic management and service patterns. Vehicle flow restrictions during the Eid Transportation period on the BBJ Port to Muara Pilu and Ciwandan to Wika Beton routes affected activities at Merak Port. In addition, the operational shift from Executive Pier I to Executive Pier II also affected the performance of the executive segment, as Executive Pier II still applied regular tariffs, thereby reducing customer interest in executive services.

From a market perspective, ASDP faced increasingly intense competition across several service areas. This competition was reflected in competitors' tariff strategies and direct cash promotions, the entry of private operators on the Kupang to Aimere to Waingapu route with vessels offering superior facilities and lower tariffs, as well as the presence of competing vessels

serta kehadiran kapal pesaing dengan waktu tempuh lebih cepat di beberapa cabang. Kondisi tersebut memengaruhi volume produksi Perseroan dan menjadi perhatian utama dalam penguatan strategi operasional, layanan, serta daya saing pada periode mendatang.

ANALISIS PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek usaha ASDP pada periode mendatang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang menunjukkan kecenderungan stabilisasi secara bertahap. Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berada pada kisaran 2,8%–3,0% pada tahun 2025 dan meningkat ke kisaran 3,0%–3,2% pada tahun 2026, dengan inflasi global menurun dari kisaran 4,0%–4,5% menjadi sekitar 3,5%–4,0%. Stabilitas ini memberikan landasan yang lebih kondusif bagi sektor transportasi dan logistik global, termasuk industri penyeberangan yang sangat dipengaruhi oleh mobilitas barang dan penumpang.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 4,8%–5,2% pada tahun 2025 dan meningkat menuju 5,0%–5,3% pada tahun 2026, dengan inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran 2,0%–3,0%. Kondisi ini mencerminkan daya tahan konsumsi domestik dan aktivitas distribusi logistik yang stabil. Bagi ASDP, hal tersebut menjadi katalis positif bagi peningkatan trafik penumpang dan kendaraan, mengingat karakteristik bisnis Perseroan yang sangat bergantung pada mobilitas antarwilayah di negara kepulauan.

Dari sisi biaya, harga minyak dunia diproyeksikan berada pada kisaran AS$70–AS$85 per barel pada tahun 2025 dan relatif stabil pada kisaran AS$70–AS$80 per barel pada tahun 2026. Dalam konteks industri ferry dan *short sea shipping global*, biaya bahan bakar umumnya berkontribusi sekitar 25%–40% terhadap total biaya operasional, sehingga volatilitas harga energi menjadi determinan utama terhadap margin usaha. Dengan demikian, kemampuan ASDP dalam mengendalikan konsumsi bahan bakar dan meningkatkan efisiensi operasional menjadi faktor kunci dalam menjaga profitabilitas.

Dari perspektif industri, sektor transportasi penyeberangan global menunjukkan tren pemulihan pascapandemi dengan pertumbuhan trafik yang kembali ke level pra-pandemi, bahkan meningkat di beberapa wilayah yang didorong oleh aktivitas pariwisata dan logistik regional. Operator ferry di kawasan Eropa dan Asia mencatatkan peningkatan volume penumpang dan kendaraan, disertai dengan fokus pada

with shorter travel times in several branches. These conditions affected the Company's production volume and have become a key focus in strengthening operational strategy, service quality, and competitiveness in the upcoming period.

ANALYSIS OF THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECT

The business prospects of ASDP in the upcoming period are influenced by global economic dynamics that demonstrate a trend toward gradual stabilization. Based on International Monetary Fund (IMF) projections, global economic growth is estimated to be in the range of 2.8%–3.0% in 2025 and rise to a range of 3.0%–3.2% in 2026, with global inflation decreasing from a range of 4.0%–4.5% to approximately 3.5%–4.0%. This stability provides a more conducive foundation for the global transportation and logistics sector, including the ferry industry, which is highly influenced by the mobility of goods and passengers.

In Indonesia, economic growth is projected to be in the range of 4.8%–5.2% in 2025 and increase toward 5.0%–5.3% in 2026, with inflation well-maintained within a range of 2.0%–3.0%. The condition reflects resilient domestic consumption and stable logistics distribution activities. For ASDP, this serves as a positive catalyst for increasing passenger and vehicle traffic, given the Company's business characteristics that are highly dependent on inter-region mobility in the archipelagic nation.

From a cost perspective, world oil prices are projected to be in the range of USD 70–USD 85 per barrel in 2025 and remain relatively stable in the range of USD 70–USD 80 per barrel in 2026. In the context of the global ferry and short sea shipping industry, fuel costs generally contribute around 25%–40% to total operating expenses, making energy price volatility a primary determinant of operating margins. Consequently, ASDP's capability to control fuel consumption and increase operational efficiency constitutes a key factor in safeguarding profitability.

From the industry perspective, the global ferry transport sector shows a post-pandemic recovery trend as traffic growth has returned to pre-pandemic levels, and even higher in several regions driven by tourism activities and regional logistics. Ferry operators in Europe and Asia also recorded increased volumes in both passenger and vehicle segments, accompanied by a focus on service digitalization, fleet optimization, and the

digitalisasi layanan, optimalisasi armada, serta pengembangan sumber pendapatan non-tiket. Tren ini sejalan dengan arah strategis ASDP dalam memperkuat layanan penyeberangan sekaligus mengembangkan bisnis pendukung seperti jasa kepelabuhanan dan kawasan komersial.

Dalam merespons peluang tersebut, ASDP terus memperkuat strategi melalui optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan melalui layanan non-penyeberangan dan pengembangan kawasan *waterfront* menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan bisnis, sejalan dengan praktik terbaik industri global yang mengarah pada *integrated transport and port services*.

Secara keseluruhan, dengan dukungan kondisi makroekonomi yang relatif stabil hingga tahun 2026, tren industri yang positif, serta strategi yang selaras dengan praktik global, ASDP memiliki prospek usaha yang kuat untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Kemampuan Perseroan dalam mengelola efisiensi biaya, mengoptimalkan peluang pertumbuhan, serta menjaga kualitas layanan akan menjadi faktor penentu dalam memperkuat posisi kompetitif dan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

KOMITMEN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Direksi berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan terintegrasi dalam seluruh aspek pengelolaan usaha. Penerapan GCG mengacu pada ketentuan SEOJK-16/SEOJK.04/2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta selaras dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Dalam implementasinya, Perseroan telah mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran ke dalam proses perencanaan strategis, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan operasional. Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan secara efektif sesuai dengan peran dan kewenangannya, serta didukung oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang memastikan kualitas pengawasan berjalan secara optimal.

development of non-ticket revenue streams. This trend aligns with ASDP's strategic direction in strengthening ferry services while developing supporting businesses such as port services and commercial areas.

In responding to these opportunities, ASDP continues to reinforce its strategy through optimal asset utilization, operational efficiency enhancements, and the development of digital-based services to improve service quality for users. Furthermore, diversifying revenue sources through non-ferry services and waterfront area developments turned into strategic steps to strengthen business resilience, in line with global industry best practices moving toward integrated transport and port services.

Overall, supported by relatively stable macroeconomic conditions through 2026, positive industry trends, and strategies aligned with global practices, ASDP possesses strong business prospects to continue growing sustainably. The Company's capability to manage cost efficiency, optimize growth opportunities, and maintain service quality will be the deciding factors in reinforcing its competitive position and creating long-term added value for all stakeholders.

COMMITMENT TO IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Directors is committed to consistently and integrally applying good corporate governance (GCG) principles across all aspects of business management. GCG implementation refers to SEOJK-16/SEOJK.04/2021 regarding the form and content of annual reports of Issuers or Public Companies, and the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI), which emphasize the importance of balance between value creation and sustainability.

In its implementation, the Company has integrated the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness into the strategic planning, decision-making, and operational execution processes. The Boards of Directors and Commissioners execute their management and oversight functions effectively in accordance with their respective roles and authorities, supported by committees under the Board of Commissioners that ensure oversight quality runs optimally.

Dari perspektif evaluatif, penerapan GCG di Perseroan menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan, serta pengelolaan risiko yang semakin terstruktur. Namun demikian, Perseroan menyadari bahwa dinamika industri dan kompleksitas usaha menuntut peningkatan berkelanjutan, terutama dalam aspek integrasi antar fungsi, penguatan budaya kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung transparansi dan akurasi pengambilan keputusan.

Perseroan juga terus memperkuat kerangka manajemen risiko yang mengacu pada praktik terbaik internasional, di mana proses identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan proses bisnis. Hal ini sejalan dengan prinsip PUG-KI yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian dari penciptaan nilai jangka panjang. Di sisi lain, sistem pengendalian internal terus disempurnakan untuk memastikan keandalan laporan keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan integritas, Perseroan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dikelola secara independen. Sistem ini memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran secara aman dan rahasia, serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel. Perseroan juga senantiasa memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan pemerintah dan regulator sektoral. Kepatuhan ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan mengintegrasikan aspek keberlanjutan melalui penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam pengelolaan usaha, termasuk melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pendekatan ini mencerminkan keselarasan antara strategi bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam PUG-KI.

Secara keseluruhan, Perseroan menilai bahwa penerapan GCG telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pengelolaan usaha dan kinerja Perseroan. Dengan terus melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan, Perseroan optimistis dapat meningkatkan efektivitas tata kelola, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan dan bernilai tambah.

From an evaluative perspective, GCG implementation in the Company demonstrates positive development, particularly in strengthening the internal control system, enhancing reporting quality, and structuring risk management more systematically. Nevertheless, the Company recognizes that industry dynamics and business complexities demand continuous improvement, especially in inter-functional integration aspects, reinforcing a compliance culture, and technology utilization to support transparency and decision-making accuracy.

The Company also continues to strengthen its risk management framework by referencing international best practices, where risk identification, measurement, and mitigation processes are conducted systematically and integrated with business processes. It aligns with PUG-KI principles that emphasize the importance of risk management as part of long-term value creation. On the other hand, the internal control system is constantly improved to ensure financial report reliability, operational effectiveness, and regulatory compliance.

As part of its commitment to transparency and integrity, the Company provides a Whistleblowing System mechanism that is managed independently. This system enables all stakeholders to report suspected violations safely and confidentially, ensuring that every report is followed up objectively and accountably. The Company also continuously ensures compliance with applicable laws and regulations, including government and sectoral regulator policies. This compliance is viewed not merely as an obligation, but as part of efforts to safeguard the Company's reputation and business sustainability.

Furthermore, the Company integrates sustainability aspects by applying Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in business management, including through the execution of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs. This approach reflects the alignment between business strategy and social and environmental responsibilities, as mandated in PUG-KI.

Overall, the Company assesses that GCG implementation has contributed positively to the quality of business management and the Company's performance. By applying continuous refinements, the Company is optimistic about increasing governance effectiveness, reinforcing stakeholder trust, and supporting the achievement of sustainable, value-added performance.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan penyesuaian susunan dan nomenklatur Direksi yang ditetapkan melalui keputusan Pemegang Saham. Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 Oktober 2025, dilakukan pemberhentian terhadap beberapa anggota Direksi, yaitu:

Pemberhentian:

1. Djunia Satriawan
2. Wahyu Wibowo
3. Kusnadi Chandra Wijaya

Pengangkatan:

1. Rudi Sunarko
2. Bunga Herlina Oktaviyanti
3. Nana Sutisna

Berdasarkan informasi di atas, susunan anggota Direksi ASDP per 31 Desember 2025 hingga Laporan Tahunan ini ditandatangani secara rinci adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTOR

In 2025, the Company adjusted the composition and nomenclature of the Board of Directors following the Shareholders' resolution. The Shareholder Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 dated 30 October 2025 stated the terminations of several members of the Board of Directors, namely:

Termination of:

1. Djunia Satriawan
2. Wahyu Wibowo
3. Kusnadi Chandra Wijaya

Appointment of:

1. Rudi Sunarko
2. Bunga Herlina Oktaviyanti
3. Nana Sutisna.

Based on the information above, the composition of ASDP's Board of Directors as of 31 December 2025 until the signing date of this Annual Report is detailed as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan *Appointment Basis*	Tanggal Efektif *Effective Date*
Heru Widodo	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024 Shareholders Decree No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024	19 November 2024 – saat ini 19 November 2024 – present
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024 Shareholders Decree No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024	19 November 2024 – saat ini 19 November 2024 – present
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi dan Transformasi Director of Operations and Transformation	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024 Shareholders Decree No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024	19 November 2024 – saat ini 19 November 2024 – present
Nana Sutisna	Direktur Teknik Director of Engineering	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 Oktober 2025 Shareholders' Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 dated 30 October 2025	30 Oktober 2025 – saat ini 30 October 2025 – present
Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan Director of Finance	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 Oktober 2025 Shareholders' Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 dated 30 October 2025	30 Oktober 2025 – saat ini 30 October 2025 – present
Rudi Sunarko*	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of Human Resources and Corporate Services	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 Oktober 2025 Shareholders' Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 dated 30 October 2025	30 Oktober 2025 – 19 Februari 2026 30 October 2025 – 19 February 2026
Ardhi Ekapaty**	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of Human Resources and Corporate Services	Keputusan Pemegang Saham No. SK 129 Tahun 2026 & SK.057/DI-DAM/DO2026 Tanggal 19 Februari 2026 Shareholder Decision No.SK 129 of 2026 & SK.057/DI-DAM/DO2026 dated 19 February 2026	19 Februari 2026 - saat ini 19 February 2026 - present

*Berhenti menjabat per 19 Februari 2026 | Term of office ended on 19 February 2026
**Mulai menjabat per 19 Februari 2026 | Took office on 19 February 2026

APRESIASI

Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan kolaborasi yang telah terjalin sepanjang tahun berjalan. Kontribusi aktif dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra kerja, serta seluruh insan Perusahaan menjadi faktor kunci dalam menjaga kinerja dan memastikan keberlanjutan operasional Perseroan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Kami juga memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang konsisten dalam menjalankan peran masing-masing. Upaya kolektif tersebut tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang pertumbuhan.

Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong inovasi berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan serta mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan secara berkesinambungan.

APPRECIATION

The Board of Directors expresses its highest appreciation to all stakeholders for the support, trust, and collaboration established throughout the current year. The active contributions of Shareholders, the Board of Commissioners, business partners, and all Company personnel have been key factors in maintaining performance and ensuring the Company's operational sustainability amidst continuously evolving industry dynamics.

We also extend our appreciation to all employees for their dedication, professionalism, and consistent commitment to fulfilling their respective roles. Their collective efforts have supported the achievement of performance targets and strengthened the organizational foundation in confronting challenges and capturing growth opportunities.

We are committed to continuously reinforcing synergies, increasing governance quality, and driving sustainable innovation to create optimal value addition for all stakeholders and support the continuous achievement of the Company's strategic objectives.

Jakarta, 27 Agustus | August 2026
Atas Nama Direksi | On Behalf of the Board of Directors

HERU WIDODO
Direktur Utama
President Director

We Bridge the Nation
ferizy
KMP CAKALANG

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2025:
Composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2025:

1. **ACHMAD BAIDOWI**
   Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
   President Commissioner concurrently as Independent Commissioner

2. **SITI ARIANI MUFLIKHAH**
   Komisaris Independen
   Independent Commissioner

3. **TAUFIK RACHMAN**
   Komisaris
   Commissioner

4. **JODDY HERNADY**
   Komisaris
   Commissioner

5. **SUSI MEYRISTA TARIGAN**
   Komisaris
   Commissioner

6. **ELBA DAMHURI**
   Komisaris
   Commissioner

Komposisi Direksi per 31 Desember 2025:
Composition of the Board of Directors as of 31 December 2025:

1. **HERU WIDODO**
   Direktur Utama
   President Director

2. **YOSSIANIS MARCIANO**
   Wakil Direktur Utama
   Deputy President Director

3. **RIO THEODORE NATALIANTO LASSE**
   Direktur Operasi & Transformasi
   Director of Operations & Transformation

4. **NANA SUTISNA**
   Direktur Teknik
   Director of Engineering

5. **BUNGA HERLINA OKTAVIYANTI**
   Direktur Keuangan
   Director of Finance

6. **RUDI SUNARKO***
   Direktur SDM dan Layanan Korporasi
   Director of HR and Corporate Services

*Berhenti menjabat per 19 Februari 2026 | *Term of office ended on 19 February 2026

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2025 OLEH DEWAN KOMISARIS
STATEMENT OF ACCOUNTABILITY OF 2025 ANNUAL REPORT BY THE BOARD COMMISSIONERS

Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 telah disajikan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan laporan ini merupakan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

Laporan Tahunan ini telah disusun berdasarkan data dan informasi yang valid serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keandalan informasi yang disajikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) declare that all information in the Annual Report for Financial Year 2025 has been presented completely, accurately, and accountably. The preparation of this report is the responsibility of the Board of Directors in executing its Company's management role, with oversight by the Board of Commissioners in accordance with their respective roles and authorities.

This Annual Report has been compiled based on valid data and information, and refers to applicable provisions, specifically the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021. Accordingly, the Board of Commissioners and the Board of Directors declare full responsibility for the accuracy of the information presented as a form of accountability to the Shareholders and all stakeholders.

Jakarta, 27 Agustus | August 2026

DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONERS

Achmad Baidowi

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently as Independent Commissioner

Siti Ariani Muflikhah
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Taufik Rachman
Komisaris
Commissioner

Joddy Hernady
Komisaris
Commissioner

Susi Meyrista Tarigan
Komisaris
Commissioner

Elbo Damhuri
Komisaris
Commissioner

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2025 OLEH DIREKSI
STATEMENT OF ACCOUNTABILITY OF 2025 ANNUAL REPORT BY THE BOARD OF DIRECTORS

Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 telah disajikan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan laporan ini merupakan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

Laporan Tahunan ini telah disusun berdasarkan data dan informasi yang valid serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keandalan informasi yang disajikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) declare that all information in the Annual Report for Financial Year 2025 has been presented completely, accurately, and accountably. The preparation of this report is the responsibility of the Board of Directors in executing its Company's management role, with oversight by the Board of Commissioners in accordance with their respective roles and authorities.

This Annual Report has been compiled based on valid data and information, and refers to applicable provisions, specifically the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021. Accordingly, the Board of Commissioners and the Board of Directors declare full responsibility for the accuracy of the information presented as a form of accountability to the Shareholders and all stakeholders.

Jakarta, 27 Agustus | August 2026

DIREKSI | BOARD OF DIRECTORS

Heru Widodo
Direktur Utama | President Director

Yossianis Marciano
Wakil Direktur Utama
Deputy President Director

Rio Theodore Natalianto Lasse
Direktur Operasi & Transformasi
Director of Operations and Transformation

Nana Sutisna
Direktur Teknik
Director of Engineering

Bunga Herlina Oktaviyanti
Direktur Keuangan
Director of Finance

Ardhi Ekapaty
Direktur SDM dan Layanan Korporasi
Director of Human Resources and Corporate Services

3 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Profil Perseroan menjadi cerminan atas kapasitas, arah pengembangan, serta nilai strategis PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam membangun konektivitas yang andal dan berkelanjutan.

The Company Profile reflects the capacity, development trajectory, and strategic value of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) in establishing reliable and sustainable connectivity.

IDENTITAS PERUSAHAAN
COMPANY IDENTITY

Nama Perusahaan Company Name	**PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)**
Nama Panggilan Acronym	ASDP
Jenis/Badan Hukum Perusahaan Company Type/Legal Entity	Perseroan Terbatas Limited Liability Company
Tanggal Pendirian Date of Establishment	8 Desember 1993 8 December 1993
Status Perusahaan Company Status	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprise (SOE)
Bidang Usaha Line of Business	• Jasa angkut sungai, danau, dan penyeberangan River, lake, and ferry transport services • Jasa angkut laut Sea transportation services • Aktivitas penunjang angkutan Transportation support activities
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis for Establishment	Akta No. 82 tentang Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.13294.HT.01.01-Th.93 tanggal 8 Desember 1993. Deed No. 82 concerning Limited Liability Companies (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan as stipulated in the Decree of the Minister of Justice No. C2.13294.HT.01.01-Th.93 dated 8 December 1993.
Entitas Anak Subsidiaries	• PT Indonesia Ferry Property • PT Jembatan Nusantara
Jumlah Pekerja Number of Employees	4.738 orang 4,738 people
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	PT ASDP Indonesia Ferry Building Jalan Jend. Achmad Yani Kav. 52A, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, 10510, Indonesia
Telepon Phone	*Call Center* : 021-191 *SMS Center* : 0811-1021191
Kepemilikan Saham Share Ownership	99,99% saham PT Danantara Asset Management 0,01% saham Negara Republik Indonesia 99.99% share of PT Danantara Asset Management 0.01% share of The Republic of Indonesia
Alamat Surat Elektronik Email Address	corporate.secretary@asdp.id
Situs Web Website	www.asdp.id

BRAND PERUSAHAAN
COMPANY BRAND

asdp
Indonesia Ferry

Filosofi Logo Perusahaan | Philosophy of Company Logo

Logogram

Posisi logogram berada di bagian atas merepresentasikan bahwa ASDP Indonesia Ferry senantiasa untuk *looking up to limitless possibilities* (visioner, peka, dan sadar akan berbagai potensi di masa depan) untuk mengalirkan kemakmuran bagi masyarakat. Secara keseluruhan logo menggambarkan ASDP Indonesia Ferry sebagai garda utama keterhubungan perairan Nusantara yang akan terus berkembang dan senantiasa memberi dampak positif yang berkelanjutan.

The top placement of the logogram represents ASDP Indonesia Ferry's commitment to looking up to limitless possibilities (visionary, responsive, and forward-looking mindset) to deliver prosperity to the public. Overall, the logo portrays ASDP Indonesia Ferry as the primary vanguard of the archipelago's maritime connectivity, dedicated to continuous growth and generating sustainable positive impacts.

Arti Warna | Color Meaning

Hijau Green	Warna hijau melambangkan tujuan ASDP untuk mengalirkan kemakmuran bagi masyarakat melalui pembaharuan dan pertumbuhan.	The green color symbolizes ASDP's goal to bring welfare to society through revitalization and growth.
Hijau Tosca Turquoise	Warna hijau tosca, yang dihasilkan dari perpaduan hijau dan biru melambangkan empati dan ketulusan layanan yang diberikan Perseroan.	The turquoise, a combination of green and blue, symbolizes empathy and sincerity in the services provided by the Company.
Biru Blue	Warna biru terinspirasi dari warna perairan yang berkaitan erat dengan ASDP, serta melambangkan reliabilitas dan harmoni.	The blue is inspired by the color of the waters, closely related to ASDP, and symbolizes reliability and harmony.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
COMPANY'S BRIEF HISTORY

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memulai perjalanan usahanya pada tanggal 27 Maret 1973 sebagai Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF) yang berada di bawah Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan. Pembentukan proyek ini merupakan langkah awal pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi penyeberangan guna mendukung konektivitas wilayah, khususnya di daerah kepulauan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan transportasi penyeberangan, pada tahun 1986 status organisasi tersebut ditingkatkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan nama Perum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum ASDP). Selanjutnya, pada tahun 1993, Perusahaan kembali mengalami transformasi menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme pengelolaan usaha. Perubahan status tersebut dituangkan dalam Akta No. 82 tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.13294.HT.01.01-1993 tanggal 8 Desember 1993.

Dalam rangka memperkuat identitas korporasi serta menyesuaikan dengan dinamika industri, pada tanggal 5 Agustus 2008 Perusahaan menetapkan perubahan nama menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Perubahan tersebut merupakan bagian dari penguatan posisi Perseroan sebagai penyedia layanan penyeberangan yang profesional dan berdaya saing, serta tercatat dalam Akta No. 9 tanggal 24 November 2004 yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-29540 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) commenced its business operations on 27 March 1973 as the Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF) under the Directorate of River, Lake, and Ferry Transport Traffic, Directorate General of Land Transportation, Department of Transport. The establishment of this business represented the government's pioneer step in providing ferry transportation services to support regional connectivity, particularly across archipelagic areas.

In line with the increasing demand for ferry transportation services, the organization's status was transformed in 1986 to a Public Utility Company (*Perusahaan Umum*, Perum) under the name Perum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum ASDP). In 1993, the Company underwent further transformation into a Limited Liability Company under the name PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), as part of initiatives to enhance operational performance and professional business management. The status change was formalized through Deed No. 82 dated 29 June 1993, executed before Imas Fatimah, S.H., a notary in Jakarta, and received ratification via the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2.13294.HT.01.01-1993 dated 8 December 1993.

To strengthen its corporate identity and to adapt to industry dynamics, the Company formalized its name change to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) on 5 August 2008. The modification was part of reinforcing the Company's positioning as a professional and competitive ferry service provider, as recorded in Deed No. 9 dated 24 November 2004, executed before Yualita Widyadhari, S.H., a notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. C-29540 HT.01.04. TH.2004 dated 7 December 2004.

Transformasi kelembagaan yang telah dilalui menjadi tonggak penting dalam perjalanan Perseroan, sekaligus mempertegas peran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang tidak hanya berorientasi pada kinerja usaha, tetapi juga memiliki mandat strategis dalam menyediakan layanan penyeberangan, termasuk layanan perintis, guna mendukung pemerataan pembangunan dan konektivitas nasional. Hingga tahun 2025, Perseroan terus memperkuat kapabilitas operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan model bisnis yang adaptif untuk menjawab tantangan industri yang semakin dinamis.

The institutional transformations undertaken serve as critical milestones in the Company's journey, while reinforcing the role of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) that is not only performance-oriented but also carries a strategic mandate to provide ferry services, including pioneering services, to support equitable development and national connectivity. Through the financial year 2025, the Company continues to strengthen its operational capabilities, enhance service quality, and develop adaptive business models to address an increasingly dynamic industry environment.

PERUBAHAN NAMA
NAME CHANGE

1973

Didirikan dengan nama Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF).
Established under the name Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF).

1980

Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF) berubah nama menjadi Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PASDP).
Proyek Angkutan Sungai, Danau, and Ferry (PASDF) changed its name to Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PASDP).

1986

PASDP bermetamorfosis menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum PASDP).
PASDP morphed into Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum PASDP).

1992

Perum ASDP bertransformasi menjadi PT ASDP (Persero).
Perum PASDP transformed into PT ASDP (Persero).

2008

PT ASDP (Persero) berubah nama menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
PT ASDP (Persero) changed its name to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

JEJAK LANGKAH
MILESTONE

1973

Berdirinya Perusahaan dimulai dari pembentukan Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF).

The Company was established with the establishment of Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF).

1980

Dilakukan perubahan nama menjadi Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PASDP).

Change of name to Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PASDP).

1986

Perubahan status PASDP menjadi perusahaan dengan status Perusahaan Umum (Perum).

Change of PASDP status into a company of Perusahaan Umum (Perum) status.

2018

Perseroan untuk pertama kalinya memperoleh rating "idAA" dari PEFINDO dengan prospek Stabil. Pencapaian ini ditunjang oleh dukungan kuat dari pemerintah, posisi pasar yang mapan di segmen penyeberangan penumpang dan kendaraan, serta profitabilitas yang sehat.

For the first time, the Company obtained an "idAA" rating from PEFINDO with Stable prospects. The achievement was reinforced by strong support from the government, an established market position in the passenger and vehicle crossing segments, as well as healthy profitability.

2019

Perseroan melalui PT Indonesia Ferry Properti membangun ekosistem *waterfront tourism* di Kawasan Marina Labuan Bajo yang merupakan salah satu ekosistem pariwisata Super Prioritas.

The Company, through PT Indonesia Ferry Properti, built a waterfront tourism ecosystem in Labuan Bajo Marina Area, which is one of the Super Priority tourism ecosystems.

2020

Perseroan meluncurkan layanan pembelian tiket ferry berbasis *online* melalui sistem Ferizy yang tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO37001:2016.

The Company launched an online ferry ticket purchasing service through the Ferizy system, which is ISO37001:2016 Anti-Bribery Management System certified.

2021

- Perseroan menggagas pengembangan Kawasan Bakauheni *Harbour City* (BHC) di Kawasan Menara Siger, Bakauheni, Lampung.
- Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melaksanakan *groundbreaking* Masjid BSI, Area UMKM, Renovasi Menara Siger, *Creative Hub, Housing Development*, dan *Enterpreneurship Center* di Kawasan Bakauheni *Harbour City* (BHC).

- The Company initiated the development of Bakauheni Harbour City (BHC) Area in Siger Tower area, Bakauheni, Lampung.
- Deputy SOEs Minister Kartiko Wirjoatmodjo and Lampung Governor Arinal Djunaidi carried out the groundbreaking of BSI Mosque, MSME Area, Siger Tower Renovation, Creative Hub, Housing Development, and Entrepreneurship Center in Bakauheni Harbour City (BHC) area.

2022

- Perseroan melakukan akuisisi perusahaan penyedia jasa penyeberangan yaitu PT Jembatan Nusantara.
- Perseroan melakukan perluasan digitalisasi metode pembayaran *cashless* pada 17 pelabuhan.
- Presiden Joko Widodo melakukan peresmian Pelabuhan Penyeberangan dan 2 Kapal Ferry untuk mendukung KSPN Danau Toba.

- The Company acquired a company providing crossing services, namely PT Jembatan Nusantara.
- The Company expanded the digitalization of cashless payment methods at 17 ports.
- President Joko Widodo inaugurated the Ferry Port and 2 Ferry vessels to support the National Tourism Strategic Area (*Kawasan Strategis Pariwisata Nasional*, KSPN) of Lake Toba.

1992

Perusahaan Umum (Perum) ASDP bertransformasi menjadi PT ASDP (Persero).

Perusahaan Umum (Perum) ASDP was transformed into PT ASDP (Persero).

2004

Perseroan melakukan perubahan identitas perusahaan dari PT ASDP (Persero) menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

The Company changed its corporate identity from PT ASDP (Persero) to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

2008

Perseroan melakukan transformasi bisnis dan melakukan redefinisi visi dan misi, moto perusahaan serta modernisasi operasional menuju standar internasional.

The Company transformed its business and redefined its vision, mission, and motto as well as modernized operations towards international standards.

2012

Perseroan melakukan modernisasi armada dengan menyediakan kapal berkapasitas besar dan lengkap dengan fasilitas berstandar internasional.

The Company modernized its fleet by providing large capacity ships complete with international standard facilities.

2014

Perseroan membukukan pendapatan operasional sebesar Rp1,9 triliun.

The Company recorded an operating revenue of Rp1.9 trillion.

2017

Perseroan meningkatkan pelayanan dengan menerapkan *online ticketing* di sejumlah rute.

The Company improved service by implementing online ticketing on several routes.

2023

- Peluncuran logo baru yang bertepatan dengan usia emas Perseroan menjadi semangat baru dalam transformasi perusahaan menuju perusahaan berkelas dunia.
- *Soft opening* Krakatau Park dan Siger Park sebagai langkah awal beroperasinya Bakauheni *Harbour City* (BHC).

- The launch of the new logo, coincided with the Company's golden anniversary, brought new spirit to the Company's transformation into a world-class company.
- Soft opening of Krakatau Park and Siger Park marked the first step in the operation of Bakauheni Harbour City (BHC).

2024

- ASDP operasikan lintasan baru perintis Siompu – Batauga di Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi antar pulau.
- Peresmian *e-Ticketing* di Pelabuhan Penajam.

- ASDP commenced operations of the new pioneer route Siompu – Batauga in Southeast Sulawesi to improve inter-island transportation connectivity.
- Inauguration of e-Ticketing at Penajam Port.

JEJAK LANGKAH
MILESTONE

2025

- Implementasi *Port Operation Control Center* (POCC) Fase 2 di Cabang Merak dan Bakauheni sebagai pusat kendali operasional pelabuhan berbasis data dan *real-time*, termasuk pelaksanaan posko operasional pada 19–31 Desember 2025 untuk pengujian dan penyempurnaan sistem.
- Pengembangan ASDP *Port Services* (APS) di Pelabuhan Kayangan dan Pototano sebagai *pilot project* digitalisasi layanan pelabuhan, khususnya jasa sandar dan penyediaan air tawar, guna memperkuat transparansi, dokumentasi, dan akuntabilitas layanan.
- Penyelesaian implementasi *Intelligent Port Monitoring* (IPM) Fase I di lintasan Merak-Bakauheni melalui teknologi *License Plate Recognition* (LPR) untuk mendukung otomasi penghitungan, klasifikasi, dan identifikasi kendaraan.
- Pengembangan *prototipe Artificial Maintenance Diagnostic* (AMD) sebagai *platform* berbasis *knowledge-based* AI untuk mendukung diagnosis kondisi mesin kapal dan meningkatkan keandalan pemeliharaan armada.
- Penyusunan kajian *Warehouse Management System* (WARMES) di Pelabuhan Mamuju sebagai dasar pengembangan bisnis pergudangan dan optimalisasi aset non-produktif untuk menciptakan sumber pendapatan baru.
- Pelaksanaan ASDP *Next Practice Program* bertema *"Driving Transformation Towards Global Standard Company"* sebagai wadah perumusan inisiatif strategis dan transformasi berbasis *next practice*.
- Penetapan *Roadmap* Transformasi ASDP 2025-2027 yang mencakup 5 pilar, 14 inisiatif, 37 program, dan 2 *transformation rituals*, serta pembentukan *Transformation Office* berbasis *task force* untuk mempercepat eksekusi agenda transformasi.
- Penyelenggaraan *Innovation Competition* untuk mendorong budaya inovasi di seluruh unit kerja, dengan tindak lanjut berupa kajian *feasibility study* atas ide-ide terbaik yang berpotensi diimplementasikan.
- Pelaksanaan kajian *Hybrid Ferry* (Hi-Fy) sebagai langkah awal pengembangan kapal penyeberangan berbasis energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- Penerbitan *Industry Insight Volume* 09 dan pelaksanaan *Transformation Talk* bertema transformasi perusahaan sebagai sarana penguatan wawasan strategis, *benchmarking*, dan penyelarasan arah transformasi ASDP.

- Implementation of Port Operation Control Center (POCC) Phase 2 at the Merak and Bakauheni Branches as a data-driven and real-time port operational control center, including the establishment of an operational command post on 19–31 December 2025 for system testing and refinement.
- Development of ASDP Port Services (APS), pilot project on digitalization, at Kayangan and Pototano Ports, particularly docking services and freshwater supply, to strengthen service transparency, documentation, and accountability.
- Completion of Intelligent Port Monitoring (IPM) Phase I on the Merak-Bakauheni route through License Plate Recognition (LPR) technology to support automation in vehicle counting, classification, and identification.
- Development of the Artificial Maintenance Diagnostic (AMD) prototype as a knowledge-based AI platform to support vessel engine condition diagnostics and improve fleet maintenance reliability.
- Preparation of the Warehouse Management System (WARMES) study at Mamuju Port as the basis for warehouse business development and optimization of non-productive assets to create new revenue streams.
- Implementation of the ASDP Next Practice Program with the theme "Driving Transformation Towards Global Standard Company" as a forum for formulating strategic initiatives and next-practice-based transformation.
- Establishment of the ASDP Transformation Roadmap 2025-2027, comprising 5 pillars, 14 initiatives, 37 programs, and 2 transformation rituals, as well as the formation of a task force-based Transformation Office to accelerate the execution of the transformation agenda.
- Organization of the Innovation Competition to foster an innovation culture across all work units, followed by feasibility studies on the best ideas with potential for implementation.
- Implementation of the Hybrid Ferry (Hi-Fy) study as an initial step toward the development of more energy-efficient and environmentally friendly ferry vessels.
- Publication of Industry Insight Vol. 09 and convening of Transformation Talk with corporate transformation theme to strengthen strategic insight, benchmarking, and alignment of ASDP's transformation direction.

VISI, MISI, & BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, & CORPORATE CULTURE

Visi | Vision

Terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar melalui jasa penyeberangan-pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata *waterfront*.

Leading in connecting the community and the market through integrated port-ferry transportation services and waterfront tourism destination.

Misi | Mission

- Menciptakan dan mengoptimalkan nilai Perusahaan dengan menghubungkan masyarakat dan pasar.
  Creating and optimizing the Corporate value by connecting the community with the market.
- Menekankan keunggulan operasional melalui:
  Emphasizing operational advantages through:
  a. Budaya pelayanan yang profesional dan berkualitas;
     Professional and quality service culture;
  b. Fasilitas pelabuhan terintegrasi, armada dan infrastruktur yang handal;
     Integrated port facilities, reliable fleet, and infrastructure;
  c. Penerapan teknologi berbasis nilai.
     Value-based technology application.
- Aktif mendukung dan berperan dalam pengembangan ekonomi melalui layanan logistik dan tujuan wisata pilihan.
  Actively supporting and playing a role in economic development through logistic services and selected tourism destinations.
- Secara konsisten mengedepankan keselamatan dan layanan penuh keramahan, tulus, dan berkualitas.
  Consistently prioritizing safety and full-services hospitality, sincerity, and quality.
- Penerapan standar lingkungan berkelanjutan.
  Implementing sustainable environmental standards.

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REVIEW OF VISION AND MISSION BY THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala meninjau visi dan misi Perseroan guna memastikan relevansinya dengan dinamika industri dan arah kebijakan pemegang saham. Berdasarkan peninjauan tahun 2025, visi dan misi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dinilai tetap relevan sebagai landasan strategis dalam mendukung peran Perseroan sebagai penghubung konektivitas antarpulau yang andal dan berkelanjutan. Penguatan implementasi terus didorong melalui penyelarasan strategi dan peningkatan kualitas eksekusi, sehingga visi dan misi terinternalisasi secara efektif dalam operasional serta mampu mendorong penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.

The Boards of Commissioners and Directors periodically review the Company's vision and mission to ensure continued relevance with industry dynamics and shareholder policy directions. Based on the 2025 review, the vision and mission of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) were deemed to remain entirely relevant as a strategic foundation supporting the Company's role in facilitating reliable and sustainable inter-island connectivity. Implementation reinforcement continues to be driven through strategic alignment and execution quality enhancements, ensuring that the vision and mission are effectively internalized within operations and capable of driving sustainable value creation.

TATA NILAI DAN BUDAYA PERSEROAN
COMPANY CORE VALUES AND CULTURE

AKHLAK

Tata nilai Perseroan terus diselaraskan dengan perkembangan visi dan misi serta dinamika industri. Pada tahun 2020, sejalan dengan penerbitan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengadopsi nilai-nilai AKHLAK sebagai landasan budaya Perseroan.

Tata nilai tersebut menjadi pedoman dalam setiap tindakan, pengambilan keputusan, daan interaksi kerja, sehingga seluruh insan ASDP dapat bertindak secara konsisten dan selaras dengan arah strategis Perseroan, serta berkontribusi dalam mendorong kinerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Core values are continuously aligned with the evolution of the vision, mission, and industry dynamics. In 2020, pursuant to the issued Ministry of SOE Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adopted the AKHLAK values as its core corporate culture.

The core values serve as guidelines for every action, decision-making process, and professional interaction, enabling all ASDP personnel to act consistently and in alignment with the Company's strategic direction, while contributing to performance optimization and sustainable growth.

AMANAH

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan Perilaku:
- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dari tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.

TRUSTWORTHY

Definition: Uphold the trust given.
Code of Conduct:
- Fulfill promises and commitments.
- Responsible for the task, and the decision of the actions taken.
- Adhere to moral and ethical values.

KOMPETEN

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan Perilaku:
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

COMPETENT

Definition: Continuous learning and developing capabilities.
Code of Conduct:
- Increase self-competence to respond to everchanging challenges.
- Help others learn.
- Completing tasks of the highest quality.

HARMONIS

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan Perilaku:
- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

HARMONIOUS

Definition: Care for each other and respect differences.
Code of Conduct:
- Respect everyone regardless of background.
- Keen to helping others.
- Build a conducive work environment.

LOYAL

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Panduan Perilaku:
- Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

LOYAL

Definition: Dedicate and prioritize the interests of the Nation and Country.
Code of Conduct:
- Maintain the good reputation of fellow employees, Leaders, SOEs, and the Country.
- Willing to make sacrifices to achieve a greater goal.
- Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics.

ADAPTIF

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Panduan Perilaku:
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

ADAPTIVE

Definition: Continue to innovate and be enthusiastic in moving or facing change.
Code of Conduct:
- Quickly adapt to get better.
- Continuously make improvements following technological developments.
- Act proactively.

KOLABORATIF

Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.
Panduan Perilaku:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

COLLABORATIVE

Definition: Building synergistic cooperation.
Code of Conduct:
- Provide opportunities for various parties to contribute.
- Open to working together to generate added value.
- Mobilize the utilization of various resources for common goals.

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN MENURUT ANGGARAN DASAR PERSEROAN
BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

MAKSUD DAN TUJUAN

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3, maksud dan tujuan ASDP adalah menjalankan usaha di bidang penyelenggaraan jasa pelabuhan, jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta jasa angkutan laut. Kegiatan usaha tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari peran strategis Perseroan dalam mendukung konektivitas nasional dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, Perseroan juga berfokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing, dengan tujuan memperoleh keuntungan serta meningkatkan nilai Perseroan. Seluruh kegiatan usaha dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dan tata kelola perusahaan yang baik.

KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Jasa kepelabuhanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
2. Jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, barang dan hewan.
3. Jasa angkutan laut berjadwal untuk penumpang, kendaraan, barang dan hewan.
4. Jasa *charter* kapal.

PURPOSE AND OBJECTIVES

Pursuant to Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objectives of ASDP are to conduct business operations in port services; transport services on river, lake, and ferry; as well as sea transport services. These business activities are executed as part of the Company's strategic role in supporting national connectivity and public mobility.

Furthermore, the Company focuses on optimizing its resources to generate high-quality, competitive goods and/or services, aiming to generate profitability and maximize Company value. All business activities are conducted in accordance with corporate principles of a Limited Liability Company and good corporate governance.

BUSINESS ACTIVITIES

The Company's business activities pursuant to Article 3, Paragraph 2 of the Articles of Association are as follows:

1. Port services for river, lake, and ferry transportation.
2. River, lake, and ferry transport services for passengers, vehicles, cargo, and livestock.
3. Scheduled sea transport services for passengers, vehicles, cargo, and livestock.
4. Vessel chartering services.

5. Penyediaan dan pengusahaan jasa terminal, dermaga, dan fasilitas lainnya untuk kegiatan tambak kapal, naik turun penumpang dan kendaraan serta bongkar muat barang dan hewan.
6. Penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan, perairan pelabuhan untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan berlabuhnya kapal-kapal.
7. Penyediaan tenaga listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), instalasi limbah dan fasilitas lainnya untuk menunjang keperluan operasional kapal.
8. Penyediaan dan pemanfaatan tanah/lahan untuk berbagai bangunan, lahan parkir dan lapangan yang berhubungan dengan kepentingan dan kelancaran angkutan/pelabuhan.
9. Perdagangan dalam negeri, ekspor dan impor dalam bidang alat/peralatan keselamatan kapal, mesin kapal laut, kapal laut, suku cadang kapal laut, minyak pelumas, jasa perawatan kapal.
10. Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfatan sumber daya yang dimiliki untuk:
    - Properti,
    - Periklanan,
    - Pergudangan,
    - Perkantoran,
    - Fasilitas pariwisata,
    - Penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang terkait dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

5. Provision and operation of terminals, docks, and other facilities for vessel docking, passenger and vehicle embarkation and disembarkation, as well as cargo and livestock handling.
6. Provision and commercial operation of port basins and port waters to support traffic flow and vessel anchorage.
7. Provision and operation of electricity, fresh water, fuel, waste management, and other utilities to support vessel operations.
8. Provision and utilization of land for various buildings, parking areas, and yards related to transportation and port activities and efficiency.
9. Domestic trade, export, and import of vessel safety equipment, vessel engines, vessels, vessel spare parts, lubricants, and vessel maintenance services.
10. The Company may conduct business ac tivities to optimize the utilization of its resources for:
    - Property,
    - Advertising,
    - Warehousing,
    - Office spaces,
    - Tourism facilities,
    - Leasing and operations of infrastructure and facilities related to river, lake, and ferry transportation.

PRODUK DAN JASA
PRODUCT AND SERVICES

Hingga akhir Desember 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyediakan berbagai produk dan layanan yang terbagi dalam tiga segmen usaha utama, yaitu Angkutan dan Penyeberangan, Pelabuhan, serta Aneka Jasa dan Kerja Sama.

As of 31 December 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) provides a diverse portfolio of products and services divided into three primary business segments: Transport and Ferrying, Ports, and Ancillary Services and Cooperation Business.

Segmen Usaha Angkutan dan Penyeberangan
Transport and Ferry Business Segment

Pada segmen Angkutan dan Penyeberangan, kegiatan usaha Perseroan mencakup layanan lintasan komersial dan perintis, dengan total 172 kapal yang melayani 299 lintasan, terdiri dari 92 lintasan komersial, 203 lintasan perintis, dan 4 lintasan kapal ternak. Segmen ini menjadi tulang punggung operasional Perseroan dalam mendukung konektivitas antarpulau di Indonesia.

Under the Transport and Ferry segment, the Company's operations encompass commercial and pioneering routes, utilizing a total of 172 vessels servicing 299 routes, which comprise 92 commercial routes, 203 pioneering routes, and 4 livestock transport routes. This segment forms the operational backbone of the Company in supporting inter-island connectivity across Indonesia.

Segmen Usaha Pelabuhan
Ports Business Segment

Pada segmen Pelabuhan, Perseroan mengelola 37 pelabuhan dengan 87 dermaga yang tersebar di 27 cabang di seluruh Indonesia. Layanan yang diberikan meliputi jasa terminal, dermaga, serta fasilitas penunjang seperti penyediaan bahan bakar, air bersih, serta fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan guna mendukung kelancaran operasional penyeberangan.

Under the Ports segment, the Company manages 37 ports with 87 docks spread across 27 branches nationwide. Services provided include terminal and docking services, alongside supporting facilities such as fuel and fresh water supply, as well as passenger and vehicle embarkation/disembarkation facilities to support smooth ferrying operations.

Segmen Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama
Ancillary Services and Cooperation Business Segment

Sementara itu, pada segmen Aneka Jasa dan Kerja Sama, Perseroan mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui berbagai layanan tambahan, antara lain pengusahaan dan penyewaan properti, pergudangan, perkantoran, fasilitas pariwisata, periklanan, serta penyediaan listrik, bahan bakar minyak, dan air tawar sebagai sumber pendapatan non-penyeberangan.

Meanwhile, under the Ancillary Services and Cooperation segment, the Company optimizes asset utilization through various ancillary services, including property management and leasing, warehousing, office spaces, tourism facilities, advertising, and the provision of electricity, fuel, and fresh water as sources of non-ferrying revenue.

AREA OPERATIONAL
OPERATIONAL AREAS

Sebagai penyedia layanan penyeberangan nasional, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki cakupan area operasional yang luas dan tersebar di berbagai wilayah strategis Indonesia. Penyebaran ini dirancang untuk memastikan konektivitas antarpulau yang optimal, mendukung mobilitas masyarakat, serta memperlancar distribusi logistik nasional melalui pengelolaan lintasan dan pelabuhan yang terintegrasi.

As the national ferry service provider, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) maintains an extensive operational area across strategic regions in Indonesia. The distribution is designed to ensure optimal inter-island connectivity, support public mobility, and expedite national logistics distribution through integrated route and port management.

	2025	2024
Kantor Pusat | Head Office	1	1
Kantor Cabang | Branch Office	27	27
Kantor Regional | Regional Office	4	4

KANTOR PUSAT
HEAD OFFICE

PT ASDP Indonesia Ferry Building
Jalan Jend. Achmad Yani Kav. 52A,
Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, 10510, Indonesia

Call Center
021-191

Email
corporate.secretary@asdp.id

SMS Center
08111-021191

Website
www.asdp.id

KANTOR CABANG
BRANCH OFFICES

No	Kantor Cabang *Branch Offices*	Alamat *Address*	Kapal *Vessel*	Pelabuhan *Port*
1	Ambon	Jl. Jend. Sudirman Tantui Atas, Ambon 97111. Telp. (+62-911)341557	1. KMP. Temi 2. KMP. Samandar 3. KMP. Danau Rana 4. KMP. Layur 5. KMP. Tanjung Madlahar 6. KMP. Lobster	1. Galala 2. Namlea 3. Hunimua 4. Waipirit 5. Poka (Rencana akan dijadikan *Workshop* | Planned for Workshop)
2	Bajo'e	Komp. Pelabuhan Penyeberangan 24, Bajo'e Bone, Sulawesi Selatan 92716. Telp. (+62-481)22171	Arwana	1. Bajoe 2. Kolaka
3	Bakauheni	Jl. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung 35592. Telp. (+62-727)331032	1. KMP. Jatra III 2. TB. Merak 3. KMP. Portlink V	Bakauheni
4	Balikpapan	Jl. Syarifuddin Yos Ruko Balikpapan Point Block C1 Kalimantan Timur 76115. Telp. (+62-542)875679	1. KMP. Manta II 2. KMP. Julung Julung 3. KM. Camara Nusantara 5	1. Penajam 2. Mamuju
5	Banda Aceh	Jl. Rama Setia Desa Deah Geulumpang Banda Aceh, Aceh 23232. Telp. (+62-651)49966	KMP. Papuyu	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. | No ASDP-owned port.
6	Bangka	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Muntok, Bangka Barat Bangka, Belitung 33311. Telp. (+62-716)22278	1. KMP. Kuala Bate-II 2. KMP. Gorare 3. KMP. Putri Leanpuri	Tanjung Kalian
7	Batam	Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur Batam, Kepulauan Riau 29411. Telp. (+62-778)479171	1. KMP. Kundur 2. KMP. Paray 3. KMP. Bahtera Nusantara 01 4. KMP. Bahtera Nusantara 03 5. KMP. Tirus Meranti	1. Telaga Punggur 2. Tanjung Uban
8	Batulicin	Jl. Pelabuhan Ferry No.1 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72171. Telp. (+62-518)70408	KMP. Bamega Jaya	1. Batulicin 2. Tanjung Serdang
9	Bau Bau	Jl. Jend. Sudirman No. 69, Kelurahan Wale, Kota Bau-Bau, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93711. Telp. (+62-402)2825205	3. 1. KMP. Madidihang 4. 2. KMP. INERIE 5. 3. KMP. Bahteramas II 6. 4. KMP. Sulthan Murhum 7. 5. KMP. Sulthan Murhum II 8. 6. KMP. Pulau Rubiah 9. 7. KMP. Semumu	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. No ASDP-owned port.

No	Kantor Cabang *Branch Offices*	Alamat *Address*	Kapal *Vessel*	Pelabuhan *Port*
10	Biak	Jl. Imanuel/Suci No. 21, Biak Papua 98111. Telp. (+62-981)22577	1. KMP. Masirei 2. KMP. Kasuari Pasifik IV 3. KMP. Napan Wainami 4. KMP. Emfote 5. KMP. Itaufili 6. KMP. Mamberamo Foja	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. | No ASDP-owned port.
11	Bitung	Jl. Moch. Hatta Pelabuhan Penyeberangan Pateten, Bitung, Sulawesi Utara 95524. Telp. (+62-438)30847	1. KMP. Bawal 2. KMP. Tarusi 3. KMP. Porodisa 4. KM. Kendhaga Nusantara 1	Bitung
12	Kayangan	Jl. Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur NTB 83611. Telp. (+62-376)21773	1. KMP. Belida 2. KMP. Raja Enggano 3. KMP. Prathita-IV	1. Kayangan 2. Pototano
13	Ketapang	Jl. Jend. Gatot Subroto Ketapang, Banyuwangi 68451 Telp. (+62-333)424308	1. Prathita IV 2. KMP. Jatra-II	1. Ketapang 2. Gilimanuk 3. Jangkar (Aset milik Pemprov Jatim dan Pemkab Situbondo)
14	Kupang	Pelabuhan Penyeberangan Bolok Kupang Nusa Tenggara Timur 85111. Telp. (+62-380)890420	1. KMP. Uma Kalada 2. KMP. Ile Ape 3. KMP. Ile Mandiri 4. KMP. Namparnos	1. Bolok 2. Larantuka 3. Rote
15	Lembar	Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Mataram 83111. Telp. (+62-370)681313	1. KMP. Portlink II 2. KMP. Portlink VII 3. KMP. Roditha	1. Lembar 2. Padangbai
16	Luwuk	Jl. Tan Malaka No.15, Luwuk, Sulawesi Tengah 94715. Telp: (+62-461)22375	1. KMP. Moinit 2. KMP. Tanjung Api 3. KMP. Tuna Tomini 4. KMP. Cengkih Afo 5. KMP. Teluk Tolo 6. KMP. Dolosi	Pagimana
17	Merak	Jl. Raya Pelabuhan Merak, Merak, Banten 42438. Telp: (+62-254)571031-2	1. KMP. Port Link III 2. KMP. Sebuku 3. KMP. Legundi 4. KMP. Batu Mandi 5. KMP. Ferrindo V 6. KMP. Port Link	Merak
18	Merauke	Jl. Brawijaya Simpang Masjid Raya No. 20, Merauke, Papua 99616. Telp: (+62-971)321088	1. KMP. Bambit 2. KMP. Binar 3. KMP. Muyu 4. KMP. Kokonao	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. | No ASDP-owned port.
19	Padang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4, Padang, Sumatera Barat. Telp: (+62-751)27153	1. KMP. Gambolo 2. KMP. Ambu-Ambu	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. | No ASDP-owned port.
20	Pontianak	Jl. Komodor Yos Sudarso No. 47, Pontianak, Kalimantan Barat. Telp: (+62-561)773200	1. KMP. Primas I 2. KMP. Semah 3. KMP. Merawan I 4. KMP. Biramata 5. KMP. Binaul 6. KMP. Gunung Palong 7. KMP. Silok 8. KMP. Merawan II 9. KMP. Saluang	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. | No ASDP-owned port.

No	Kantor Cabang *Branch Offices*	Alamat *Address*	Kapal *Vessel*	Pelabuhan *Port*
21	Sape	Pelabuhan Penyeberangan Sape, Nusa Tenggara Barat 84182. Telp: (+62-374)71075	1. KMP. Cucut 2. KMP. Komodo	1. Sape 2. Labuan Bajo
22	Selayar	Jl. Pelabuhan Penyeberangan Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Telp: (+62-413)2589680	1. KMP. Sangke Palangga 2. KMP. Bontoharu 3. KMP. Opudi 4. KMP. Pangkilang 5. KMP. Takabonarate 6. KM. Kendhaga Nusantara 4 7. KM. Kendhaga Nusantara 15	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. No ASDP-owned port.
23	Danau Toba	Kantor ASDP, Pelabuhan Ihan Batak Jl. Justini Sirait, Pardamean Ajibata, Kec. Ajibata, Kab. Toba, Sumatera Utara 21174	1. KMP. Simeuleu 2. KMP. Kaldera Toba	1. Ajibata (KSPO) 2. Ambarita (KSPO)
24	Singkil	Komp. Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Pulau Sarok, Aceh Singkil, Aceh 24785. Telp: (+62-658)21381	KMP. Aceh Hebat 3	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. | No ASDP-owned port.
25	Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM. 11, Sorong, Papua Barat 98416. Telp: (+62-951) 321121	1. KMP. Terubuk I 2. KMP. Kurisi 3. KMP. Kalabia 4. KMP. Arar	Tidak ada pelabuhan milik ASDP. | No ASDP-owned port.
26	Surabaya	Jl. Kalimas Baru No. 194 A, Surabaya, Jawa Timur 60165. Telp: (+62-31) 3297165	1. KMP. Gili Iyang 2. KMP. Drajat Paciran 3. KMP. Munggiyango Hulalo 4. KM. Kendhaga Nusantara 3	1. Ujung 2. Kamal
27	Ternate	Jl. Komp. Pelabuhan Ferry Bastiong, Ternate Selatan, Maluku Utara 97716. Telp: (+62-921) 3127773	1. KMP. Kolorai 2. KMP. Ngafi 3. KMP. Lompa 4. KMP. Pulau Sagori 5. KMP. Ariwangan 6. KMP. Gorango 7. KMP. Kerapu II	1. Bastiong 2. Rum 3. Sidangole

KANTOR REGIONAL
REGION OFFICES

Regional 1	Ruko King Bussines Center (KBC) Blok B1 No. 7, Kal. Belian, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29464.
Regional 2	Jl. Raya Pelabuhan Merak, Merak, Banten 42438. Telp. (+62-254)571202, 571032
Regional 3	Jl. Jend. Gatot Subroto Ketapang, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68451. Telp. (+62-333)424308
Regional 4	Jl. Racing Centre No.36, Kerampuang, Kec, Penakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231.

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI INDUSTRI
LIST OF ASSOCIATION MEMBERSHIP

Sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi strategis dan meningkatkan kapabilitas bisnis, ASDP secara aktif berpartisipasi dalam berbagai asosiasi industri yang relevan. Daftar keanggotaan asosiasi industry yang diikuti adalah sebagai berikut:

In efforts to reinforce its strategic position and enhance business capabilities, ASDP actively participates in relevant industry associations. The membership to industry association is as follows:

No	Nama Asosiasi Industri *Name of Industry Association*	Tahun Bergabung *Year Joining*	Skala Asosiasi *Scale*
1	GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) GAPASDAP (National Association of River, Lake, and Ferry Transportation Operators)	1976	Nasional | National
2	INFA & *Port (Indonesian National Ferryowners Association & Port)* INFA & Port (Indonesian National Ferryowners Association & Port)	2015	Nasional | National
3	Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) Indonesian Digital Economy Logistics Association	Mei 2025 | May 2025	Nasional | National
4	Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) Indonesian Cold Chain Association	Juni 2025 | June 2025	Nasional | National
5	*Indonesian National Shipowners' Association* (INSA) Indonesian National Shipowners' Association	Desember 2025 | December 2025	Nasional | National
6	Interferry	2023	Internasional | International

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi ASDP disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, serta rencana jangka panjang Perseroan. Hingga 31 Desember 2025, struktur organisasi mengacu pada Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-278/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024, sebagai dasar pengaturan fungsi, peran, dan tanggung jawab guna memastikan efektivitas pengelolaan organisasi.

ASDP's organizational structure is designed to support the achievement of the Company's vision, mission, and long-term plan. As of 31 December 2025, the organizational structure follows the Ministry of SOEs Decree No. SK-278/MBU/11/2024 dated 11 November 2024, for the basis for regulating functions, roles, and responsibilities to ensure effective organizational management.

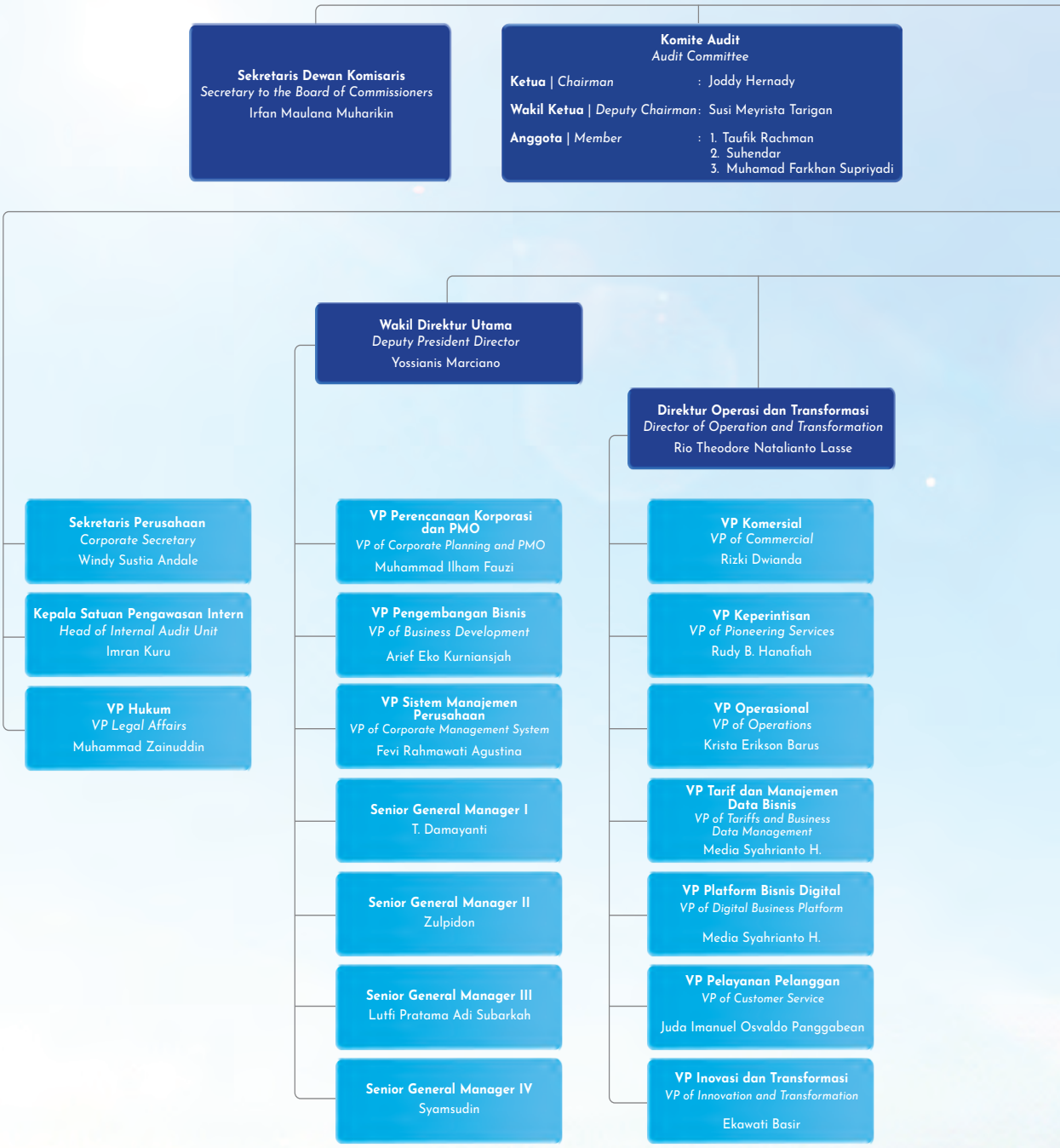

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | *President Commissioner concurrently as Independent Commissioner*	: Achmad Badowi
Komisaris Independen | *Independent Commissioner*	: Siti Ariani Muflikhah
Komisaris | *Commissioner*	: Taufik Rachman
Komisaris | *Commissioner*	: Joddy Hernady
Komisaris | *Commissioner*	: Susi Meyrista Tarigan
Komisaris | *Commissioner*	: Elba Damhuri

Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee

Ketua | *Chairman*	: Achmad Baidowi
Wakil Ketua | *Deputy Chairman*	: Elba Damhuri
Anggota | *Member*	: 1. Taufik Rachman 2. Surahman

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Ketua | *Chairman*	: Siti Ariani Muflikha
Wakil Ketua | *Deputy Chairman*	: Taufik Rachman
Anggota | *Member*	: 1. Ahkmad Syafiudin 2. Munir M. Ali

Direktur Utama
President Director
Heru Widodo

Direktur Teknik
Director of Engineering
Nana Sutisna

- **VP Optimalisasi dan Manajemen Armada**
  VP of Fleet Optimization & Management
  Muhammad Ramadhani Hadi Saputra
- **VP Optimalisasi dan Manajemen Pelabuhan**
  VP of Port Optimization & Management
  Ni Komang Triana Dewi Wulandari
- **VP Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan**
  VP of Safety, Health & Environment
  Amir
- **VP Pengendalian Mutu**
  VP of Quality Control
  Husin Alatas

Direktur SDM dan Layanan Korporasi
Director of Human Resources & Corporate Services
Rudi Sunarko

- **VP Perencanaan Organisasi dan Sistem SDM**
  VP of Organization Planning and HR Systems
  Christoper Samosir
- **VP Pengelolaan SDM**
  VP of HR Management
  Sari Vica Amelia
- **VP Pembinaan dan Pengawakan Kapal**
  VP of Shipbuilding and Crew
  Januar Setiadi Wishnuadi
- **VP Pembelajaran dan Pengembangan SDM**
  VP of Learning and HR Development
  Yasirwan
- **VP Pengadaan Armada**
  VP of Fleet Procurement
  Wendy Priana Negara
- **VP Manajemen Rantai Pasok**
  VP of Supply Chain
  Yani Andrianto
- **VP Properti dan Umum**
  VP of Property and General Affairs
  Mohamad Rivai

Direktur Keuangan
Director of Finance
Bunga Herlina Oktaviyanti

- **VP Perencanaan dan Pengendalian Keuangan**
  VP of Financial Planning and Control
  Amrulloh Hakiem
- **VP Keuangan dan Perbendaharaan**
  VP of Finance and Treasury
  Muhammar. Qashidi
- **VP Akuntansi**
  VP of Accounting
  Werdin S. M. P.
- **VP Teknologi Informasi**
  VP of Information Technology
  Hendra Setiawan
- **VP Manajemen Risiko**
  VP of Risk Management
  Nuke Dewi Novianti

PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Achmad Baidowi

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently as Independent Commissioner

Indonesia, Jakarta

Banyuwangi, 13 April 1980. Berusia 45 tahun per Desember 2025.
Banyuwangi, 13 April 1980. Aged 45 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S3 Pendidikan Doktor Politik dan Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • S2 Pendidikan Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional Jakarta. • S1 Sosiologi Agama dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	• Doctoral degree, Politics and Government, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • Master's degree, Political Science, Universitas National Jakarta. • Bachelor's degree, Sociology of Religion, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	Anggota DPR RI tercatat dari tahun 2016 – 2024. Selama di DPR RI, beliau aktif terlibat dalam panitia perumusan RUU Pemilu, RUU Ketahanan Siber, RUU Cipta Kerja, dan RUU Ibukota Negara.	Member of the Indonesian House of Representatives from 2016 to 2024. While in the House of Representatives, he was actively involved in the formulation committee of the Election Bill, Cyber Resilience Bill, Job Creation Bill, and State Capital Bill.
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Menteri BUMN No.SK-279/ MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Pertama dengan masa jabatan November 2024-November 2029. First period with a term of office from November 2024 to November 2029.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Commissioners Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	• Ketua Yayasan Wakaf Qur'an Indonesia. • Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). • Wakil Ketua Umum II DPP Peradaban. • Ketua Bidang BUMN MN KAHMI.	• Chairman of Waqaf Qur'an Indonesia Foundation. • Expert Council Member of Indonesian Association of Muslim Intellectuals (ICMI). • Deputy Chairman II of DPP Peradaban. • Head of SOEs Division, MN KAHMI.

Siti Ariani Muflikhah

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Indonesia, Bekasi

Yogyakarta, 30 Agustus 1969. Berusia 56 tahun per Desember 2025.
Yogyakarta, 30 August 1969. Aged 56 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S2 Magister *Management of Communication,* Universitas Trisakti. • *Broadcast Media* BBC di *World Service Unit.* • *Film Summer School (International Documentary Film Festival & Goethe ASEAN).* • S1 Philosophy dari Universitas Gadjah Mada.	• Master's degree in Communication Management, Universitas Trisakti. • Broadcast Media training, BBC World Service Unit. • Film Summer School (International Documentary Film Festival & Goethe ASEAN). • Bachelor's degree in Philosophy, Universitas Gadjah Mada.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Konsultan (2020). • Staf Informasi dan Komunikasi Politik di Kantor Staf Presiden (2015–2019). • Produser di Tanamera (Dokumenter & Program TV) (2008–2014).	• Consultant (2020). • Political Communication and Information Staff, Presidential Executive Office (2015-2019). • Producer at Tanamera (Documentaries & TV Programs) (2008-2014).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-279/ MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Pertama dengan masa jabatan November 2024-November 2029. First period with a term of office from November 2024 to November 2029.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Commissioners Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	• Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. • Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.	• Chairman of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. • Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.
Perusahaan Lain *Other Companies*	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain. Does not hold any concurrent positions in other companies.	

Taufik Rachman

Komisaris
Commissioner

Indonesia, Jakarta

Surabaya, 17 April 1980. Berusia 45 tahun per Desember 2025.
Surabaya, 17 April 1980. Aged 45 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S3 Hukum dari Victoria University, Melbourne, Australia. • S2 Hukum dari La Trobe University, Melbourne, Australia. • S1 Hukum dari Universitas Airlangga.	• Doctoral degree, Law, Victoria University, Melbourne, Australia. • Master's degree, Law, La Trobe University, Melbourne, Australia. • Bachelor's degree, Law, Universitas Airlangga.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK (2024-2029). • Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023. • *Legal Consultant* Kominfo (2021). • Ketua Departemen Ilmu Hukum (2021-saat ini). • Ahli Pidana Indonesia USAID (kontrak 2019).	• Member of the Selection Committee for KPK Leadership and Supervisory Board candidates (2024-2029). • Member of the Selection Committee for High Leadership Positions within the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2023. • Legal Consultant Kominfo (2021). • Department Head of Legal Studies (2021-present). • Indonesian Criminal Law Expert for USAID (contract in 2019).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-279/ MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Pertama dengan masa jabatan November 2024-November 2029. First period with a term of office from November 2024 to November 2029.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Commissioners Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	• Anggota Komite Audit. • Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.	• Member of Audit Committee. • Deputy Chairman of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.
Perusahaan Lain *Other Companies*	• Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK | Member of the Selection Committee for KPK Leadership and KPK Supervisory Board candidates. • Ketua Departemen Ilmu Hukum di FH Unair | Head of the Department of Legal Studies at FH Unair.	

Joddy Hernady

Komisaris
Commissioner

Indonesia, Jakarta

Bandung, 26 Januari 1968. Berusia 57 tahun per Desember 2025.
Bandung, 26 January 1968. Aged 57 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Sains Teknik Elektro dari University of Southern California (USC), Los Angeles – USA. • Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).	• Master of Science, Electrical Engineering, University of Southern California (USC), Los Angeles – USA. • Bachelor's degree, Telecommunication Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Senior Advisor – Corporate Strategic Planning,* PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. • Komisaris PT. FitAja Digital Nusantara (Agustus 2022–Agustus 2023). • *Supervisory Board,* Cellum Global, Hungary (April 2018–Juni 2021). • Komisaris PT Metranet (April 2020–Okt 2020).	• Senior Advisor – Corporate Strategic Planning at PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. • Commissioner, PT FitAja Digital Nusantara (August 2022–August 2023). • Supervisory Board, Cellum Global, Hungary (April 2018–June 2021). • Commissioner, PT Metranet (April 2020–Oct 2020).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-279/ MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Pertama dengan masa jabatan November 2024 - November 2029. First period with a term of office from November 2024 to November 2029.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Commissioners Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Ketua Komite Audit. Chairman of Audit Committee.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain. Does not hold any concurrent positions in other companies.	

Susi Meyrista Tarigan

Komisaris
Commissioner

Indonesia, Jakarta

Medan, 14 Mei 1976. Berusia 49 tahun per Desember 2025.
Medan, 14 May 1976. Aged 49 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Akuntansi, Universitas Indonesia (2008). • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2001). • Diploma 3 Akuntansi di STAN (1997).	• Master's Degree, Accounting, Universitas Indonesia (2008). • Bachelor's Degree, Accounting, Universitas Indonesia (2001). • Diploma, Accounting, STAN (1997).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Kepala Bidang Anggota Komisaris di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015-2019). • Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015). • Kepala Bidang Sistem Informasi di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014-2015). • Sekretaris Dewan Komisaris I di PT Pelabuhan Indonesia (2014-2017). • Kasubid Perencanaan dan Pengembangan di PT Pelabuhan Indonesia (2010-2014).	• Head of Commissioner Member Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015–2019). • Head of Administration and Finance Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015). • Head of Information System Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014–2015). • Secretary to the Board of Commissioners I, PT Pelabuhan Indonesia (2014–2017). • Head of Planning and Development Subdivision, PT Pelabuhan Indonesia (2010–2014).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-233/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. • Keputusan Menteri BUMN No. SK-225/MBU/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024.	• Decree of the Minister of SOEs No. SK-233/MBU/10/2019 dated 17 October 2019. • Decree of the Minister of SOEs No. SK-225/MBU/10/2024 dated 17 October 2024.
Periode Jabatan *Term of Office*	• Pertama dengan masa jabatan Oktober 2019-Oktober 2024. • Periode kedua dengan masa jabatan Oktober 2024-Oktober 2029.	• First period with a term of office from October 2019 to October 2024. • Second period with a term of office from November 2024 to November 2029.
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Commissioners Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Wakil Ketua Komite Audit. Deputy Chairman of Audit Committee.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kementerian BUMN. Head of General Affairs and Finance Bureau, Ministry of State-Owned Enterprises.	

Elba Damhuri

Komisaris
Commissioner

Indonesia, Jakarta

Bekasi, 20 Januari 1974. Berusia 51 tahun per Desember 2025.
Bekasi, 20 January 1974. Aged 51 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S2 Magister Ekonomi Politik Global dari University of Newcastle, United Kingdom. • S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam, Bandung.	• Master's degree, Global Political Economy, University of Newcastle, United Kingdom. • Bachelor's degree, Communication Studies, Universitas Islam Bandung.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	Jurnalis senior dan editor di Indonesia, beliau dikenal atas kontribusinya di industri media, khususnya sebagai Pemimpin Redaksi Harian Republika. Selain menjalankan tugas editorial, ia sering menulis tentang isu-isu ekonomi, politik, dan global. Dengan pengalaman jurnalistiknya yang luas, ia kerap diundang sebagai pembicara di berbagai forum mengenai media dan komunikasi.	Senior journalist and editor in Indonesia, renowned for contributions to the media industry, particularly as Chief Editor of Harian Republika. Also a frequent writer of economic, political, and global issues. The extensive journalistic experience leads to numerous invitations to speak at various forums on media and communication.
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-279/ MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Pertama dengan masa jabatan November 2024-November 2029. First period with a term of office from November 2024 to November 2029.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Commissioners Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	• Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. • Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.	• Deputy Chairman of Nomination and Remuneration Committee. • Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.
Perusahaan Lain *Other Companies*	Juru Bicara Kementerian Perhubungan. Spokesperson for the Ministry of Transportation.	

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA
CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND ITS REASONS

Sepanjang tahun buku 2025 sampai dengan tahun buku ditandatangani, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tidak mengalami pergantian atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

Sehingga susunan Dewan Komisaris periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Throughout financial year 2025 up to the signing date of this report, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) experienced no changes or restructuring in the composition of the Board of Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners for the period of 1 January 2025 – 31 December 2025 is:

Susunan Anggota Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025
Membership of the Board of Commissioners for the Period of 1 January 2025 – 31 December 2025

Nama | Name	Jabatan | Position
Achmad Baidowi	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen | Independent Commissioner
Taufik Rachman	Komisaris | Commissioner
Joddy Hernady	Komisaris | Commissioner
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris | Commissioner
Elba Damhuri	Komisaris | Commissioner

PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Heru Widodo

Direktur Utama
President Director

Indonesia, Jakarta

Boyolali, 17 Desember 1981. Berusia 44 tahun per Desember 2025.
Boyolali, 17 December 1981. Aged 44 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	Sarjana Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Bachelor of Psychology, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	Anggota DPR RI dari Komisi III dari tahun 2021–2024. Member of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in Commission III from 2021 to 2024.
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Pemegang Saham No.SK-278/ MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. Shareholders' Resolution No.SK-278/ MBU/11/2024 dated 11 November 2024.
Periode Jabatan *Term of Office*	Pertama dengan masa Jabatan 11 November 2024-11 November 2029. First period with a term of office from 11 November 2024 to 11 November 2029.
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subsection of this Annual Report.
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions	
ASDP	Tidak memiliki jabatan rangkap di ASDP. Does not hold any concurrent positions in ASDP.
Perusahaan Lain *Other Companies*	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain. Does not hold any concurrent positions in other companies.

Yossianis Marciano

Wakil Direktur Utama
Deputy President Director

Indonesia, Jakarta

Jakarta, 8 Maret 1984. Berusia 41 tahun per Desember 2025.
Jakarta, 8 March 1984. Aged 41 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S2 Master of Shipping and Transport, Netherland Maritime University. • S1 Ilmu Pelayaran dari Sekolah Tinggu Ilmu Pelayaran, 2006.	• Master of Shipping and Transport, Netherland Maritime University. • Bachelor of Maritime Science, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, 2006.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Direktur Strategi dan Komersial di PT Pelindo Jasa Maritim (Mar 2024-Nov 2024). • Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut, dan Direktur Penumpang Komersil PT Pelayaran Nasional Indonesia (Feb 2022-Feb 2024). • SVP *Marketing* PT Pelindo Solusi Logistik (Okt 2021-Feb 2022). • Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo Tanjung Priok (Jan 2019-Oct 2021). • *General Manager* Pelabuhan Tanjung Pandan PT Pelabuhan Indonesia II (Jan 2019-Jul 2020).	• Director of Strategy and Commercial, PT Pelindo Jasa Maritim (Mar 2024 - Nov 2024). • Director of Freight and Sea Toll Transportation Business, and Director of Commercial Passenger Affairs, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Feb 2022-Feb 2024). • SVP Marketing, PT Pelindo Solusi Logistik (Oct 2021-Feb 2022). • Director of Commercial and Business Development, PT Pelindo Tanjung Priok (Jan 2019-Oct 2021). • General Manager of Tanjung Pandan Port, PT Pelabuhan Indonesia II (Jan 2019-Jul 2020).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Pemegang Saham No.SK-278/ MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. Shareholders' Resolution No.SK-278/ MBU/11/2024 dated 11 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Pertama dengan masa jabatan 11 November 2024-11 November 2029. First period with a term of office from 11 November 2024 to 11 November 2029.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Tidak memiliki jabatan rangkap di ASDP. Does not hold any concurrent positions in ASDP.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain. Does not hold any concurrent positions in other companies.	

Rio Theodore Natalianto Lasse

Direktur Operasi & Transformasi
Director of Operations & Transformation

Indonesia, Jakarta

Jakarta, 24 Desember 1973. Berusia 52 tahun per Desember 2025.
Jakarta, 24 December 1973. Aged 52 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S3 Doctor of Philosophy (PhD) dari School of Interdisciplinary Management Technology (SIMT), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 2026. • S2 *Master of Business Administration* dari University of California Los Angeles - National University of Singapore, 2015. • S2 *Master of Engineering Science* dari University of New South Wales, Sydney Australia, 2001. • S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, 1996.	• Doctor of Philosophy (PhD), School of Interdisciplinary Management Technology (SIMT), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 2026. • Master of Business Administration, University of California Los Angeles - National University of Singapore, 2015. • Master of Engineering Science, University of New South Wales, Sydney Australia, 2001. • Bachelor of Civil Engineering, Institut Teknologi Bandung, 1996.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Komisaris Utama di PT Energi Pelabuhan Indonesia. • *Group Head of Business Development and Strategic Alliances Holding Office,* PT Pelabuhan Indonesia Persero (2023-2024). • Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021-2023). • Direktur Teknik & Operasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2021). • Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014-2015).	• President Commissioner, PT Energi Pelabuhan Indonesia. • Group Head of Business Development and Strategic Alliances Holding Office, PT Pelabuhan Indonesia Persero (2023-2024). • President Director, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2021- 2023). • Director of Engineering & Operations, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2021). • Director of Commercial and Business Development, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014-2015).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Pemegang Saham No.SK-278/ MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. Shareholders' Resolution No.SK-278/ MBU/11/2024 dated 11 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Pertama dengan masa jabatan 11 November 2024-11 November 2029. First period with a term of office from 11 November 2024 to 11 November 2029.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Tidak memiliki jabatan rangkap di ASDP. Does not hold any concurrent positions in ASDP.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain. Does not hold any concurrent positions in other companies.	

Nana Sutisna

Direktur Teknik
Directors of Engineering

Indonesia, Jakarta

Pulomerak, 9 Juli 1968. Berusia 57 tahun per Desember 2025.
Pulomerak, 9 July 1968. Aged 57 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	Sarjana Manajemen Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (2003-2007).	Bachelor's Degree in Accounting Management, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (2003-2007).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *General Manager* Batam, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2023). • *General Manager* Sorong, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2022). • *Port Operations Manager*, Cabang Merak, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2021). • *Operations Manager*, Cabang Bakauheni, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020). • *Operations Manager*, Cabang Luwuk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2019).	• General Manager Batam, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2023). • General Manager Sorong, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2022). • Port Operations Manager, Merak Branch, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2021). • Operations Manager, Bakauheni Branch, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020). • Operations Manager, Luwuk Branch, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2019).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 Oktober 2025. Shareholder Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 dated 30 October 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	30 Oktober 2025-saat ini | 30 October 2025-present.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Tidak memiliki jabatan rangkap di ASDP. Does not hold any concurrent positions in ASDP.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain. Does not hold any concurrent positions in other companies.	

Bunga Herlina Oktaviyanti

Direktur Keuangan
Director of Finance

Jakarta, Indonesia

Madiun, 6 Oktober 1983. Berusia 42 tahun per Desember 2025.
Madiun, 6 October 1983. Aged 42 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• *Leading with Emotional Intelligence (Short Course Program)*, University of New South Wales, Australia (November 2023). • Magister Keuangan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia (Agustus 2016-Juli 2019). • Sarjana Akuntansi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia (Agustus 2001-Maret 2005).	• Leading with Emotional Intelligence (Short Course Program), University of New South Wales, Australia (November 2023). • Master's Degree in Finance, Universitas Gadjah Mada, Indonesia (August 2016-July 2019). • Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia (August 2001-March 2005).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Executive Business Officer*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta (Februari 2025-Oktober 2025). • SVP *Project Management Office Division Head*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta (Maret 2024-Januari 2025). • VP *Manufacturing & Property Division*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta (November 2021-Februari 2024). • AVP *Syndication & Financial Services Division*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta (Februari 2018-Oktober 2021). • *Senior Manager Risk Management Group Head*, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Regional Office* Padang, Indonesia (Oktober 2016-Januari 2018).	• Executive Business Officer, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Head Office Jakarta (February 2025-October 2025). • SVP Project Management Office Division Head, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Head Office Jakarta (March 2024-January 2025). • VP Manufacturing & Property Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Head Office Jakarta (November 2021-February 2024). • AVP Syndication & Financial Services Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Head Office Jakarta (February 2018-October 2021). • Senior Manager Risk Management Group Head, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Regional Office Padang, Indonesia (October 2016-January 2018).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 Oktober 2025. Shareholder Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 dated 30 October 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	30 Oktober 2025 – saat ini | 30 October 2025 – present.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Tidak memiliki jabatan rangkap di ASDP. Does not hold any concurrent positions in ASDP.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	Dewan Pengawas Dana Pensiun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Supervisory Board for Pension Funds of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).	

Rudi Sunarko

Direktur SDM dan Layanan Korporasi
Director of HR and Corporate Services

Indonesia, Jakarta

Kebumen, 1 Januari 1970. Berusia 55 tahun per Desember 2025.
Kebumen, 1 January 1970. Aged 55 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• ANT I, Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta (2010). • ANT II, Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta (1998). • ANT III, Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta (1994).	• Nautical Expert Level I, Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta (2010). • Nautical Expert Level II, Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta (1998). • Nautical Expert Level III, Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta (1994).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Senior General Manager* Regional II, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Juli 2025-Oktober 2025). • *Senior General Manager* Regional III, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (April 2025-Juli 2025). • *General Manager* Cabang Merak, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Juli 2024-April 2025). • *General Manager* Cabang Bakauheni, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Februari 2023-Juli 2024). • *Vice President* Operasional, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Juli 2018-Februari 2023).	• Senior General Manager Regional II, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (July 2025-October 2025). • Senior General Manager Regional III, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (April 2025-July 2025). • General Manager, Merak Branch, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (July 2024-April 2025). • General Manager, Bakauheni Branch, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (February 2023-July 2024). • Vice President Operations, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (July 2018-February 2023).
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 Oktober 2025. Shareholder Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 dated 30 October 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	30 Oktober 2025-19 Februari 2026 | 30 October 2025-19 February 2026.	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Tidak memiliki jabatan rangkap di ASDP. Does not hold any concurrent positions in ASDP.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain. Does not hold any concurrent positions in other companies.	

Ardhi Ekapaty*

Direktur SDM dan Layanan Korporasi
Director of HR and Corporate Services

Jakarta, Indonesia

Jakarta, 3 Oktober 1970. Berusia 55 tahun per Desember 2025.
Jakarta, 3 October 1970. Aged 55 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Jurusan Marketing, STIE Mahardika Surabaya (2010). • Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas Pancasila (1996).	• Department of Marketing, STIE Mahardika Surabaya (2010). • Department of Management Economics, Universitas Pancasila (1996).

Pengalaman Kerja
Professional Background
	• *General Manager* Cabang
	  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang (November 2025-Februari 2026.
	  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka (Februari 2024-November 2025.
	  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar (November 2022-Februari 2024).
	  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang (Juli 2021-November 2022).
	  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Balikpapan (Desember 2019-Juli 2021.
		• Branch General Manager
		  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang Branch (November 2025-February 2026).
		  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bangka Branch (February 2024-November 2025).
		  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) LemBranch (November 2022-February 2024).
		  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kupang Branch (July 2021-November 2022).
		  • PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Balikpapan Branch (December 2019-July 2021).

Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis for Appointment*	Keputusan Pemegang Saham No. SK 129 Tahun 2026 & SK.057/DI-DAM/DO2026 Tanggal 19 Februari 2026 Shareholder Decision No.SK 129 of 2026 & SK.057/DI-DAM/DO2026 dated 19 February 2026	
Periode Jabatan *Term of Office*	19 Februari 2026-saat ini | 19 February 2026-present	
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Does not have any affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Main and Controlling Shareholders.	
Kepemilikan Saham di ASDP *Shareholding in ASDP*	Disajikan terpisah pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subsection of this Annual Report.	
Jabatan Rangkap | Concurrent Positions		
ASDP	Tidak memiliki jabatan rangkap di ASDP. Does not hold any concurrent positions in ASDP.	
Perusahaan Lain *Other Companies*	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain. Does not hold any concurrent positions in other companies.	

*Mulai menjabat per 19 Februari 2026 | Took office on 19 February 2026.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA
CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND ITS REASONS

Sepanjang tahun buku 2025 sampai dengan tahun buku ditandatangani, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengalami perubahan pada susunan Direksi. Perubahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perseroan yang menjadi dasar dalam penyesuaian komposisi dan penguatan fungsi kepemimpinan di lingkungan Perseroan.

Memberhentikan:
1. Djunia Satriawan
2. Wahyu Wibowo
3. Kusnadi Chandra Wijaya

Mengangkat:
1. Rudi Sunarko
2. Bunga Herlina Oktaviyanti
3. Nana Sutisna

Susunan Direksi per 31 Desember 2025 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani adalah sebagai berikut:

Throughout the 2025 financial year until the signing of this report, the Board of Directors' composition of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) experienced changes following the Shareholder Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 dated 30 October 2025 concerning the Dismissal of Members of the Company's Board of Directors, which serves as the basis for adjusting the composition and strengthening the leadership function within the Company.

Dismissing:
1. Djunia Satriawan
2. Wahyu Wibowo
3. Kusnadi Chandra Wijaya

Appointing:
1. Rudi Sunarko
2. Bunga Herlina Oktaviyanti
3. Nana Sutisna

The composition of the Board of Directors as of 31 December 2025 until the signing date of this Annual Report is as follows:

Periode Januari - 30 Oktober 2025 *Period of January - 30 October 2025*		**Periode 30 Oktober 2025 - Saat ini** *Period of 30 October 2025 - Present*	
Nama | *Name*	**Jabatan** | *Position*	**Nama** | *Name*	**Jabatan** | *Position*
Heru Widodo	Direktur Utama President Director	Heru Widodo	Direktur Utama President Director
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director
Rio Theodore Natalanto Lasse	Direktur Operasi dan Transformasi Director of Operations and Transformation	Rio Theodore Natalanto Lasse	Direktur Operasi dan Transformasi Director of Operations and Transformation
Kusnadi Chandra Wijaya	Direktur Teknik dan Fasilitas Director of Engineering and Facilities	Nana Sutisna	Direktur Teknik Director of Engineering
Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Information Technology and Risk Management	Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan Director of Finance
Wahyu Wibowo	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of Human Resources and Corporate Services	Rudi Sunarko*	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of Human Resources and Corporate Services
		Ardhi Ekapaty**	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of Human Resources and Corporate Services

*Berhenti menjabat per 19 Februari 2026 | Term of office ended on 19 February 2026
**Mulai menjabat per 19 Februari 2026 | Took office on 19 February 2026

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
PROFILE OF THE EXECUTIVE OFFICIALS

DIREKTORAT UTAMA
MAIN DIRECTORATE

Windy Sustia Andale
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Imran Kuru
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Muhammad Zainuddin
Vice President Hukum
Vice President of Legal Affairs

WAKIL DIREKTORAT UTAMA
DEPUTY TO MAIN DIRECTORATE

Muhammad Ilham Fauzi
Vice President Perencanaan Korporasi dan PMO
Vice President of Corporate Planning and PMO

Arief Eko Kurniansjah
Vice President Pengembangan Bisnis
Vice President of Business Development

Fevi Rahmawati Agustina
Vice President Sistem Manajemen Perusahaan
Vice President of Corporate Management Systems

T. Damayanti
Senior General Manager I

Zulpidon
Senior General Manager II

Lutfi Pratama Adi Subarkah
Senior General Manager III

Syamsudin
Senior General Manager IV

Syamsuddin Tanassy
General Manager Cabang Ambon
General Manager of Ambon Branch

Anom Sedayu Panatagama
General Manager Cabang Bajoe
General Manager of Bajoe Branch

Partogi Tamba
General Manager Cabang Bakauheni
General Manager of Bakauheni Branch

Heru Wahyono
General Manager Cabang Balikpapan
General Manager of Balikpapan Branch

Reno Yulianto
General Manager Cabang Banda Aceh
General Manager of Banda Aceh Branch

Agustinus Cahyo Upandika
General Manager Cabang Bangka
General Manager of Bangka Branch

Andri Setiawan
General Manager Cabang Batam
General Manager of Batam Branch

Sigit Purwanto
General Manager Cabang Batulicin
General Manager of Batulicin Branch

Zullivan Ramadhana Miraza
General Manager Cabang Bau Bau
General Manager of Bau Bau Branch

Windra Soelistiawan
General Manager Cabang Biak
General Manager of Biak Branch

Rudy Mahmudi
General Manager Cabang Bitung
General Manager of Bitung Branch

Nikson M Ambarita
General Manager Cabang Danau Toba
General Manager of Danau Toba Branch

Erlisetya Wahyudi
General Manager Cabang Kayangan
General Manager of Kayangan Branch

Ardhi Ekapaty
General Manager Cabang Ketapang
General Manager of Ketapang Branch

Wijaya Santosa
General Manager Cabang Kupang
General Manager of Kupang Branch

Handoyo Priyanto
General Manager Cabang Lembar
General Manager of Lembar Branch

Agus Djoko Triyanto
General Manager Cabang Luwuk
General Manager of Luwuk Branch

Umar Imran Batubara
General Manager Cabang Merak
General Manager of Merak Branch

Rizal Agustiar
General Manager Cabang Merauke
General Manager of Merauke Branch

Hari Gunanto
General Manager Cabang Padang
General Manager of Padang Branch

R.M Ardhani Friandy
General Manager Cabang Pontianak
General Manager of Pontianak Branch

Burhan Zahim
General Manager Cabang Sape
General Manager of Sape Branch

Fauzie Akhmad
General Manager Cabang Selayar
General Manager of Selayar Branch

Rachmadian Adha
General Manager Cabang Singkil
General Manager of Singkil Branch

Eko Yulianto
General Manager Cabang Sorong
General Manager of Sorong Branch

Ronaldo Hutabrat
General Manager Cabang Surabaya
General Manager of Surabaya Branch

Mushar Usman
General Manager Cabang Ternate
General Manager of Ternate Branch

DIREKTORAT OPERASI DAN TRANSFORMASI
OPERATION AND TRANSFORMATION DIRECTORATE

Rizki Dwianda
Vice President Komersial
Vice President of Commercial

Rudy B Hanafiah
Vice President Keperintisan
Vice President of Pioneering Services

Krista Erikson Barus
Vice President Operasional
Vice President of Operations

Media Syahrianto H
Vice President Tarif dan Manajemen Data Bisnis
Vice President of Tariffs and Business Data Management

Media Syahrianto H
Vice President Platform Bisnis Digital
Vice President of Digital Business Platform

Juda Imanuel Osvaldo Panggabean
Vice President Pelayanan Pelanggan
Vice President of Customer Service

Ekawati Basir
Vice President Inovasi dan Transformasi
Vice President of Innovation & Transformation

DIREKTORAT TEKNIK
ENGINEERING DIRECTORATE

Muhammad Ramadhani Hadi Saputra
Vice President Optimalisasi dan Manajemen Armada
Vice President of Fleet Optimization & Management

Ni Komang Triana Dewi Wulandari
Vice President Optimalisasi dan Manajemen Pelabuhan
Vice President of Port Optimization & Management

Amir
Vice President Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan
Vice President of Safety, Health & Environment

Husin Alatas
Vice President Pengendalian Mutu
Vice President of Quality Control

DIREKTORAT SDM DAN LAYANAN KORPORASI
HUMAN CAPITAL & CORPORATE SERVICES DIRECTORATE

Christoper Samosir
Vice President Perencanaan Organisasi dan Sistem SDM
Vice President of Organization Planning and HR Systems

Sari Vica Amelia
Vice President Pengelolaan SDM
Vice President of HR Management

Januar Setiadi Wishnuadi
Vice President Pembinaan dan Pengawakan Kapal
Vice President of Shipbuilding and Crewing

Yasirwan
Vice President Pembelajaran dan Pengembangan SDM
Vice President of Learning and HR Development

Wendy Priana Negara
Vice President Pengadaan Armada
Vice President of Fleet Procurement

Yani Andrianto
Vice President Manajemen Rantai Pasok
Vice President of Supply Chain Management

Mohamad Rivai
Vice President Properti dan Umum
Vice President of Property and General Affairs

DIREKTORAT KEUANGAN
FINANCE DIRECTORATE

Amrulloh Hakiem
Vice President Perencanaan dan Pengendalian Keuangan
Vice President of Financial Planning and Control

Muhammar Qashidi
Vice President Keuangan dan Perbendaharaan
Vice President of Finance and Treasury

Werdin S.M.P.
Vice President Akuntansi
Vice President of Accounting

Hendra Setiawan
Vice President Teknologi Informasi
Vice President of Information Technology

Nuke Dewi Novianti
Vice President Manajemen Risiko
Vice President of Risk Management

DEMOGRAFI KARYAWAN
EMPLOYEES DEMOGRAPHIC

Pekerja Berdasarkan Tingkat Organisasi
Workers by Organizational Level

Kategori *Category*	2025			2024			2023		
	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*
Karyawan Darat | Ashore Employees									
D-1 | BoD-1	84	12	96	67	10	77	59	9	68
D-2 | BoD-2	185	51	236	184	48	232	172	42	216
D-3 | BoD-3	114	29	143	43	13	56	32	12	44
D-4 | BoD-4	198	58	256	225	38	263	190	18	208
D-5 | BoD-5	622	335	957	783	255	1.038	874	244	1.135
D-6 | BoD-6	10	0	10	9	0	9	0	0	0
Sub-Total	**1.213**	**485**	**1.698**	**1.311**	**364**	**1.675**	**1.327**	**325**	**1.671**
Karyawan Laut | Marine Employees									
Nakhoda | Captain	165	0	165	173	0	173	165	0	165
Perwira | Officer	1.089	2	1.091	1.116	2	1.118	1.127	3	1.130
Rating	1.783	1	1.784	1.760	1	1.761	1.790	1	1.772
Sub-Total	3.037	3	3.040	3.049	3	3.052	3.082	4	3.067
Jumlah Karyawan Total Employees	**4.250**	**488**	**4.738**	**4.360**	**367**	**4.727**	**4.409**	**329**	4.738

Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Workers by Education Level

Kategori *Category*	2025			2024			2023		
	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*
Karyawan Darat | Ashore Employees									
S-3 Doktoral Doctorates	0	0	0	0	0	0	1	0	1
S-2 Pascasarjana Postgraduates	51	11	62	47	8	55	47	9	56
S-1 Sarjana Undergraduates	522	388	910	550	271	821	513	230	743
D-3 Diploma	166	31	197	143	23	166	145	25	170
SMA/SMK High School	484	55	539	571	61	632	626	62	688
SMP Junior High	**5**	**1**	**6**	7	1	8	12	1	13
SD Primary School	**2**	**0**	**2**	2	0	2	2	0	2
Sub-Total	**1.230**	**486**	**1.716**	**1.320**	**364**	**1.684**	**1.346**	**327**	**1.673**

Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Workers by Education Level

Kategori *Category*	2025			2024			2023		
	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*
Karyawan Laut | Marine Employees									
ANT.I Nautical Expert Level I	8	0	8	8	0	8	10	0	10
ANT.II Nautical Expert Level II	34	0	34	33	0	33	36	0	36
ANT.III Nautical Expert Level III	204	1	205	203	1	204	218	0	218
ANT.IV Nautical Expert Level IV	219	1	220	261	2	263	272	2	274
ANT.V Nautical Expert Level V	237	0	237	237	0	237	256	0	256
ANT.D Nautical Expert Level D	1.027	0	1.027	1.012	0	1.012	970	0	970
ATT.I Technical Expert Level I	5	0	5	5	0	5	6	0	6
ATT.II Technical Expert Level II	29	0	29	30	0	30	33	0	33
ATT.III Technical Expert Level III	217	0	217	218	0	218	223	0	223
ATT.IV Technical Expert Level IV	232	0	232	256	0	256	270	0	270
ATT.V Technical Expert Level V	183	0	183	189	0	189	200	0	200
ATT.D Technical Expert Level D	625	0	625	588	0	588	569	0	569
Sub-Total	3.020	2	3.022	3.040	3	3.043	3.063	2	3.065
Jumlah Karyawan Total Employees	**4.250**	**488**	**4.738**	**4.360**	**367**	**4.727**	**4.409**	**329**	**4.738**

Pekerja Berdasarkan Status Ketenagakerjaan
Workers by Employment Status

Kategori *Category*	2025			2024			2023		
	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*
Organik (Karyawan Tetap) Organic (Permanent Employees)	2.933	343	3.276	3.080	276	3.356	3.234	236	3.470
Non Organik (Karyawan Tidak Tetap/Kontrak) Non-Organic (Non-Permanent/ Contract Employees)	1.317	145	1.462	1.280	91	1.371	1.175	93	1.268
Jumlah Karyawan Total Employees	**4.250**	**488**	**4.738**	**4.360**	**367**	**4.727**	**4.409**	**329**	**4.738**

Pekerja Berdasarkan Lokasi Kerja
Workers by Working Area

Kategori *Category*	2025			2024			2023		
	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*	Pria *Male*	Wanita *Female*	Jumlah *Total*
Ambon	256	8	264	253	8	261	253	8	261
Bajoe	63	7	70	61	11	72	61	8	69
Bakauheni	127	14	141	137	13	150	137	12	149
Balikpapan	184	8	192	203	8	211	203	4	207
Banda Aceh	68	7	75	68	8	76	68	7	75
Bangka	160	6	166	153	7	160	152	6	158
Batam	270	27	297	283	23	306	283	25	308
Batulicin	156	1	157	157	2	159	144	4	148
Bau Bau	276	6	282	256	6	262	271	0	271
Biak	90	3	93	93	7	100	93	9	102
Bitung	135	4	139	115	8	123	115	5	120
Jepara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kayangan	81	5	86	84	9	93	84	13	97
Ketapang	128	16	144	143	12	155	143	6	149
Kupang	207	6	213	202	9	211	202	13	215
Lembar	90	7	97	93	8	101	93	42	135
Luwuk	145	7	152	142	2	144	142	2	144
Merak	231	45	276	262	38	300	262	30	292
Merauke	83	2	85	84	5	89	84	8	92
Padang	70	4	74	70	5	75	70	5	75
Pontianak	149	3	152	150	3	153	150	23	173
Sape	71	2	73	77	1	78	77	0	77
Selayar	138	5	143	136	5	141	136	12	148
Danau Toba	126	6	132	104	3	107	123	1	124

Pekerja Berdasarkan Lokasi Kerja
Workers by Working Area

Kategori Category	2025			2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Singkil	79	2	81	80	3	83	80	2	82
Sorong	80	7	87	100	9	109	100	11	111
Surabaya	98	12	110	93	11	104	93	18	111
Ternate	266	5	271	243	9	252	251	10	261
Tual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Pusat | Head Office	357	241	598	470	129	599	493	40	533
Regional I	14	3	17	11	1	12	11	1	12
Regional II	17	7	24	12	3	15	12	3	15
Regional III	15	6	21	13	0	13	13	0	13
Regional IV	20	6	26	12	1	13	10	1	11
Jumlah Karyawan Total Employees	**4.250**	**488**	**4.738**	**4.360**	**367**	**4.727**	**4.409**	**329**	**4.738**

Pekerja Berdasarkan Rentang Usia
Workers by Age

Kategori Category	2025			2024			2023		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
<30 Tahun | Years Old	1.422	242	1.664	1.508	221	1.729	1.495	192	1.687
30 – 50 Tahun | Years Old	2.265	232	2.497	2.247	131	2.378	2.334	120	2.454
>50 Tahun | Years Old	563	14	577	605	15	620	580	17	597
Jumlah Karyawan Total Employees	**4.250**	**488**	**4.738**	**4.360**	**367**	**4.727**	**4.409**	**329**	**4.738**

Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Workers by Gender

Kategori Category	2025	2024	2023
Pria | Male	4.250	4.360	4.409
Wanita | Female	488	367	329
Jumlah Karyawan Total Employees	**4.738**	**4.727**	**4.738**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS COMPOSITION

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) with all (100%) of its shares owned by the State of the Republic of Indonesia.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

Jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham ASDP sampai dengan akhir tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDING STRUCTURE OF THE COMPANY

The total paid-in capital by the shareholder of ASDP through the end of financial year 2025 is as follows:

Pemegang Saham *Shareholder*	31 Januari | *January 2025*			31 Desember | *December 2025*		
	Jumlah Lembar *Shares*	Nilai Saham *Share Value*	%	Jumlah Lembar *Shares*	Nilai Saham *Share Value*	%
Pemerintah Negara Republik Indonesia | Government of the Republic of Indonesia	5.561.760	Rp5.561.760.000.000	100%	1	Rp1.000.000	0,01%
PT Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Danantara Asset Management	-	-	-	5.561.759	Rp5.561.759.000.000	99,99%

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Hingga 31 Desember 2025, Negara Republik Indonesia dan PT Danantara Asset Management bertindak sebagai pemegang saham Perseroan yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan strategis dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam struktur tersebut, Negara Republik Indonesia tetap menjadi pemegang saham utama sekaligus pengendali Perseroan.

INFORMATION ON PRINCIPAL AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

As of 31 December 2025, the Republic of Indonesia and PT Danantara Asset Management acted as the Company's shareholders with the authority to determine strategic policy direction and decision-making in accordance with applicable provisions. Under this structure, the Republic of Indonesia remains the Company's majority and controlling shareholder.

Tabel Nama Pemegang Saham dan Persentasi Kepemilikan
Shareholder Names and Ownership Percentage

Nama Pemegang Saham *Shareholder Names*	Persentase Kepemilikan *Ownership Percentage*
Komposisi Pemegang Saham Perusahaan. Company Shareholder Composition.	Hingga 31 Desember 2025, struktur kepemilikan saham ASDP sepenuhnya berada pada Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham tunggal, yang mencerminkan status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara di bawah pengendalian pemerintah. As of 31 December 2025, the shareholding structure of ASDP is entirely held by the State of the Republic of Indonesia as the sole shareholder, reflecting the status of the Company as a State-Owned Enterprise under government control.

Nama Pemegang Saham *Shareholder Names*	Persentase Kepemilikan *Ownership Percentage*
Pemegang Saham Dengan Kepemilikan 5% atau Lebih dari 5%. Shareholders with 5% or Greater Ownership.	Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat pihak lain yang memiliki kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih di Perseroan selain Negara Republik Indonesia, sehingga seluruh kepemilikan saham terkonsentrasi pada satu pemegang saham. As of 31 December 2025, there are no other parties holding a shareholding of 5% or more in the Company besides the State of the Republic of Indonesia, thereby concentrating total share ownership within a single shareholder.
Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Company Share Ownership by the Boards of Commissioners and Directors.	Hingga 31 Desember 2025, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Perseroan, sehingga tidak terdapat kepemilikan langsung oleh organ perusahaan. As of 31 December 2025, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors do not hold shares in the Company, representing zero direct equity ownership by corporate organs.
Kepemilikan Saham oleh Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5%. Public Share Ownership with Less than 5% Ownership.	Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki kepemilikan saham oleh masyarakat, sehingga tidak terdapat penyebaran kepemilikan saham publik dengan porsi kurang dari 5%. As of 31 December 2025, the Company has no public equity ownership, and there is no distribution of public shares holding a portion below 5%.

KEPEMILIKAN SAHAM TIDAK LANGSUNG OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hingga 31 Desember 2025, seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang menjabat tidak memiliki kepemilikan saham tidak langsung di Perseroan.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN BERDASARKAN KLASIFIKASINYA.

a. Kepemilikan Institusi Lokal
   Hingga 31 Desember 2025, seluruh saham ASDP dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga kepemilikan saham Perseroan seluruhnya diklasifikasikan sebagai kepemilikan institusi lokal.
b. Kepemilikan Institusi Asing
   Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki kepemilikan saham oleh institusi asing.
c. Kepemilikan Individu Lokal
   Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat kepemilikan saham ASDP oleh individu lokal. Struktur kepemilikan saham Perseroan berada pada Negara Republik Indonesia dan PT Danantara Asset Management, sehingga tidak terdapat porsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham individu lokal.
d. Kepemilikan Individu Asing
   Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki kepemilikan saham oleh individu asing.

INDIRECT SHARE OWNERSHIP BY THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

As of 31 December 2025, no sitting members of the Board of Commissioners or the Board of Directors hold indirect share ownership in the Company.

NUMBER OF SHAREHOLDERS AND OWNERSHIP PERCENTAGE BY CLASSIFICATION

a. Domestic Institutional Ownership
   As of 31 December 2025, all shares of ASDP are owned by the State of the Republic of Indonesia, classifying total corporate share ownership under domestic institutional ownership.
b. Foreign Institutional Ownership
   As of 31 December 2025, the Company has zero share ownership by foreign institutions.
c. Domestic Individual Ownership
   As of 31 December 2025, there was no ASDP share ownership by local individuals. The Company's share ownership structure was held by the Republic of Indonesia and PT Danantara Asset Management, and therefore there was no portion of shares owned by local individual shareholders.
d. Foreign Individual Ownership
   As of 31 December 2025, the Company has zero share ownership by foreign individuals.

Kepemilikan | *Ownership*	Jumlah | *Total*
Institusi Lokal | Local Institution	100% Pemerintah Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia
Institusi Asing | Foreign Institution	Tidak ada | None
Individu Lokal | Local Individual	Tidak ada | None
Individu Asing | Foreign Individual	Tidak ada | None

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN
COMPANY GROUP STRUCTURE, SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, AND JOINT VENTURE

ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI
SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATED ENTITIES

ENTITAS ANAK

Sebagai bagian dari penguatan struktur usaha dan optimalisasi pengelolaan portofolio bisnis, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki entitas anak yang mendukung pelaksanaan strategi usaha di berbagai segmen operasional. Keberadaan entitas anak tersebut berperan dalam memperluas kapabilitas bisnis, meningkatkan fleksibilitas operasional, serta menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan. Berikut profil singkat dan kinerja entitas anak ASDP hingga 31 Desember 2025.

SUBSIDIARIES

As part of reinforcing its business structure and optimizing portfolio management, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) maintains subsidiaries that support the execution of corporate strategy across various operational segments. The presence of these subsidiaries serves to expand business capabilities, enhance operational flexibility, and create synergies that support the Company's sustainable growth. The brief profiles and performance of ASDP's subsidiaries as of 31 December 2025 are detailed below.

Nama Entitas Anak *Name of Subsidiary*	**PT Indonesia Ferry Property**	**PT Jembatan Nusantara**
Tanggal Pendirian | Date of Establishment	5 September 2017	22 September 1975
Bidang Usaha | Line of Business	Penyediaan jasa, perdagangan, konstruksi, dan pengelolaan *property*. | Provision of services, trading, construction, and property management.	Pelayaran | Shipping
Alamat | Address	Jl. Jend. A. Yani Kav. No. 52A, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, 10510.	Gedung Pelni Heritage Lt. 2, Jl. Pahlawan No. 112-114, Surabaya, 60175, Jawa Timur, Indonesia
No. Telepon | Telephone Number	(021) 38799011	+62 31 99220000
Surat Elektronik | Email	contact@ifpro.co.id	corporatejn1@gmail.com
Website Perusahaan | Company Website	https://ifpro.co.id/	https://jembatannusantara.com
Dasar Pendirian | Basis of Establishment	Akta Pendirian No. 21 tanggal 5 September 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn | Deed of Establishment No. 21 dated 5 September 2017, made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn	Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. No. 140 tanggal 22 Februari 2022 | Notarial Deed of Jose Dima Satria S.H., M.Kn. Number 140 dated 22 February 2022.
Persentase Kepemilikan Saham Share Ownership Percentage	51%	99,9%
Dewan Komisaris | Board of Commissioners	**Komisaris Utama** Vinsensius Jemadu **Komisaris** Ni Made Sasanti **Komisaris Independen** Ahmad Fanani	**Komisaris** Kusnadi C Wijaya **Komisaris Independen** Edwin Angkasa Putra
Direksi | Board of Directors	**Direktur Utama** Ferry Snyders **Direktur** Fajar Saiful Bahri	**Direktur Utama** Andi Mashuri **Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Resiko** Handi Sumarna **Direktur Komersial dan Teknis** Hendriawan Nur Kuncoro
Total Aset | Total Assets	Rp1.117.001.114.327	Rp1.430.048.223.929

Nama Entitas Anak *Name of Subsidiary*	PT Indonesia Ferry Property	PT Jembatan Nusantara
Liabilitas | Liabilities	Rp718.099.530.400	Rp603.670.000.519
Ekuitas | Equity	Rp398.901.583.927	Rp826.378.223.410
Pendapatan Usaha | Revenue	Rp353.899.623.987	Rp454.337.557.315
Laba/Rugi Tahun Berjalan | Net Profit	Rp25.447.006.831	Rp(255.085.445.363)
Status Operasi | Operating Status	Beroperasi | In operation	Beroperasi | In operation

ASOSIASI DAN PERUSAHAAN PATUNGAN

Hingga 31 Desember 2025, ASDP tidak memiliki perusahaan asosiasi maupun perusahaan patungan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang disajikan terkait kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, maupun status operasional entitas asosiasi dan perusahaan patungan Perseroan.

ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

As of 31 December 2025, ASDP does not hold interest in associate companies or joint ventures. Accordingly, no information is presented regarding shareholding percentages, lines of business, total assets, or operational status of associate entities and joint ventures of the Company.

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARES LISTING

Hingga 31 Desember 2025, ASDP belum mencatatkan sahamnya di bursa efek, sehingga Perseroan tidak memiliki informasi terkait aksi korporasi di pasar modal, harga penawaran saham, jumlah saham tercatat, maupun pencatatan saham pada bursa efek tertentu.

As of 31 December 2025, ASDP has not listed its shares on any stock exchange; hence, the Company has no information to disclose regarding capital market corporate actions, share offering prices, number of listed shares, or specific exchange listings.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING

Hingga 31 Desember 2025, ASDP belum melakukan pencatatan efek di pasar modal, baik dalam bentuk saham maupun instrumen efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat kronologis pencatatan efek yang dapat disampaikan dalam periode pelaporan ini.

As of 31 December 2025, ASDP has not executed any listing of securities on the capital market, whether in the form of equities or other debt instruments. Thus, there is no historical timeline of securities listings to report during this reporting period.

INFORMASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

INFORMATION ON THE USE OF PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM SERVICES

Nama Akuntan Publik (AP) Tahun 2025 Name of Public Accountant (PA) for 2025	INDRA SOESETIAWAN
Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2025 Name of Public Accounting Firm (KAP) for 2025	KAP DJOKO SIDIK & INDRA
No. Izin Akuntan Publik Public Accountant License Number	AP.0139
Alamat KAP Address of KAP	Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta Pusat, 10310.
Periode Penugasan AP AP Appointment Period	10 Desember 2025 – 8 April 2026 10 December 2025 – 8 April 2026
Ruang Lingkup Jasa Audit Scope of Audit Services	Melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun Buku 2025 meliputi: Conducting audit of the Financial Statements of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for the 2025 Financial Year, including: 1. Audit kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengujian pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan dan masalah yang perlu dilakukan perbaikan serta memberikan rekomendasi; Auditing compliance with applicable laws and conducting internal control tests, identifying weaknesses and issues requiring improvement, and providing recommendations. 2. Audit atas Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Tahun Buku 2025; Auditing the financial statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program for the 2025 financial year; 3. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kunci KPI (Key Performance Indicator) Korporat dan KPI Individu Tahun 2025. Evaluating the Corporate Key Performance Indicators (KPIs) and Individual KPIs for the 2025. 4. Melakukan evaluasi komposit risiko Tahun Buku 2025 Evaluating the composite risk for the 2025 Financial Year.
Ruang Lingkup Jasa Non Audit Scope of Non-Audit Services	-
Biaya Jasa Audit Audit Service Fees	Rp 1.587.244.500
Biaya Jasa Non Audit Non-Audit Service Fees	-
Surat Rekomendasi Dewan Komisaris Atas Penunjukan KAP Board of Commissioners' Recommendation Letter for KAP Appointment	37/KOM/VII/2025
Surat Rekomendasi Komite Audit Atas Penunjukan KAP Audit Committee's Recommendation Letter for KAP Appointment	-

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONS

Lembaga Profesi *Professional Institution*	Nama Lembaga *Complete Name*	Alamat *Address*
Notaris | Notary	Kantor Notaris | Notary Office Nanda Fauz Iwan,S.H., M.Kn.	Rukan Royal Palace Blok C/16, Jl. Prof. DR. Soepomo No. 178A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.
Konsultan Hukum | Legal Consultant	Bagus Enrico & *Partners*	CBD Mega Kuningan, Menara Rajawali 15/F, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. Kav. 5 1, RT.5/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950.
	Dewi Djalal & *Partners*	Pakuwon Tower, Lantai 15, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870.
	S&N *Partnership*	Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 10 Unit 04, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan, 12710.
	PT Prama Daksa Ifotama	Gd. Wirausaha Lt. 1, Unit 104, Jl. HR Rasuna Said, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
	Baraka *Law Office*	Jl. H Kavling No.35-36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
	Hansel & *Partners*	Equity Tower, Floor 26H, Suite 2610, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
	Kantor Hukum | Law Office Soesilo Aribowo, SH & Rekan	Grha Deka, Jl. TB Simatupang Kav. VIII No.1, RT.1/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12520.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan
Awards

Nama Penghargaan | Award
Special Achievement for Social Initiative Mudik Lebaran

Acara | Event
Top Corporate Social Reqsponsibility (CSR) of the Year 2025

Penyelenggara | Organizer
Tras N Co

Tanggal | Date
9 Mei 2025 | 9 May 2025

Nama Penghargaan | Award
Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold)

Acara | Event
Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025

Penyelenggara | Organizer
Hukumonline

Tanggal | Date
10 Mei 2025 | 10 May 2025

Nama Penghargaan | Award
10 penghargaan bergengsi, terdiri dari 3 Penghargaan Prima Utama dan 7 Penghargaan Prima Madya | 10 prestigious awards, consisting of 3 Prima Utama Awards and 7 Prima Madya Awards

Acara | Event
Anugerah Pelayanan Prima

Penyelenggara | Organizer
Kementerian Perhubungan RI | Indonesian Ministry of Transportation

Tanggal | Date
10 Mei 2025 | 10 May 2025

Nama Penghargaan | Award
Digital Service in Inter-Island Transportation of the Year

Acara | Event
Marketeers Editor's Choice Award 2025

Penyelenggara | Organizer
Marketeers

Tanggal | Date
12 September 2025 | 12 September 2025

Nama Penghargaan | Award
Penghargaan Kepatuhan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Terbaik 2025 | Award for Compliance and Fulfillment of Minimum Service Standards for the Best Ferry Transportation 2025

Acara | Event
Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan LLAJ Nasional 2025
National Transportation Day and National Road Traffic Safety Day 2025

Penyelenggara | Organizer
Kementerian Perhubungan RI | Indonesian Ministry of Transportation

Tanggal | Date
18 September 2025 | 18 September 2025

Nama Penghargaan | Award
Inter-Island Transport & Logistics Connectivity of The Year

Acara | Event
Indonesia Logistics Awards 2025

Penyelenggara | Organizer
Supply Chain Indonesia

Tanggal | Date
9 Oktober 2025 | 9 October 2025

Nama Penghargaan | Award
Media Relations Awards (MRA):
- *Press Release on Sustainability*
- *Press Gathering Terbaik* | Best Press Gathering

Acara | Event
HUT ke-79 SPS "Pers Maju, Sumber Daya Indonesia Melaju"
79th Anniversary of SPS

Penyelenggara | Organizer
Serikat Perusahaan

Tanggal | Date
21 Oktober 2025 | 21 October 2025

Nama Penghargaan | Award
Integrated Connectivity & 3T Service Excellence

Acara | Event
Bisnis Indonesia *Logistics Award* 2025

Penyelenggara | Organizer
Bisnis Indonesia

Tanggal | Date
5 November 2025 | 5 November 2025

Nama Penghargaan | Award
In Recognition of Achievement In Performing Social Responsibility Activities

Acara | Event
Top Corporate Social Responsibility (CSR) of the Year 2025

Penyelenggara | Organizer
Tras N Co

Tanggal | Date
26 November 2025 | 26 November 2025

Nama Penghargaan | Award
Public Service (Public Service Excellence for Business Growth)

Acara | Event
CX Maestro Award 2025

Penyelenggara | Organizer
Marketeers

Tanggal | Date
6 Desember 2025 | 6 December 2025

Nama Penghargaan | Award
Predikat "Informatif" | The predicate "Informative"

Acara | Event
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
2025 Public Information Transparency Award

Penyelenggara | Organizer
Komisi Informasi Pusat (KIP)

Tanggal | Date
15 Desember 2025 | 15 December 2025

Sertifikat
Certification

Nama Sertifikat | Certificate
ISO 37001:2016

Tanggal Sertifikasi | Certification Date
28 Desember 2023-27 Desember 2026 | 28 December 2023-27 December 2026

Instansi Pemberi Sertifikasi | Certifying Agency
The British Standards Institution (BSI)

INFORMASI YANG TERSEDIA DI *WEBSITE*
INFORMATION ON WEBSITE

ASDP menyediakan akses terhadap informasi yang material dan relevan bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat melalui situs web resmi Perseroan, yaitu https://www.asdp.id/. Melalui kanal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Informasi disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta diperbarui secara berkala untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

ASDP provides access to material and relevant information for shareholders, stakeholders, and the public through the Company's official website at https://www.asdp.id/. Through this medium, the Company implements the principles of transparency and disclosure as part of its commitment to good corporate governance. Information is presented in both Indonesian and English, and is updated periodically to ensure the availability of accurate, timely, and accessible data for stakeholders.

Tentang Kami
About Us

- Sekilas ASDP | *About ASDP*
- Tonggak Sejarah | *Milestones*
- Visi Misi | *Vision & Mission*
- Makna Logo | *Logo Meaning*
- Struktur Perusahaan | *Company Structure*
- Anak Usaha | *Subsidiary*
- Dewan Direksi | *Directors*
- Dewan Komisaris | *Commissioners*

Layanan
Services

- Peta (Lintasan) | *Maps (Route)*
- Kapal | *Ship*
- Pelabuhan | *Harbor*
- Produk Kami | *Our Products*
- Standar Pelayanan | *Port Services Standard*

Publikasi & Media
Publications & Media

- Siaran Pers | *Press Release*
- Penghargaan | *Award*
- Publikasi | *Publication*
- Galeri | *Gallery*

PPID/KIP
PPID/KIP

Keberlanjutan
Sustainability

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Kontak Kami
Contact Us

HUBUNGI KAMI
CONTACT US

ASDP Indonesia Ferry

Email
corporate.secretary@asdp.id

Call Center
021-191

SMS Center
08111021191

Alamat Kantor Pusat | Head Office Address
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 52 A,
Cempaka Putih Timur, Kota Jakarta Pusat, 10510, Indonesia

We Bridge the Nation
PORTLINK V
Janantara
Indonesia
asdp

4 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION OF COMPANY PERFORMANCE

Ketangguhan operasional Perseroan sepanjang 2025 tercermin dari kemampuannya menjaga kesinambungan layanan di tengah tekanan pada volume penyeberangan, dengan dukungan armada yang meningkat menjadi 222 unit. Di saat produksi trip, penumpang, dan kendaraan mengalami penurunan, Perseroan tetap menunjukkan kinerja positif pada lini usaha strategis, tercermin dari capaian jasa sandar yang melampaui target hingga 110% dan pertumbuhan jasa parkir sebesar 14%. Ketahanan operasional tersebut turut menopang fundamental keuangan yang tetap solid, ditandai dengan ekuitas sebesar Rp9,03 triliun, kas dan setara kas yang meningkat menjadi Rp1,84 triliun, serta laba tahun berjalan sebesar Rp285,43 miliar sebagai fondasi untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan Perseroan.

The Company's operational resilience throughout 2025 was reflected in its capability to maintain service continuity amidst pressure on ferry crossing volumes, supported by an fleet that expanded to 222 vessels. While trip production, passengers, and vehicles experienced declines, the Company consistently demonstrated positive performance within its strategic business lines. This was evidenced by docking service achievements that exceeded targets by 110% and a 14% growth in parking services. The operational resilience sustained the Company's strong financial fundamentals, which remained solid, characterized by equity of Rp9.03 trillion, cash and cash equivalents increasing to Rp1.84 trillion, and profit for the year recorded at Rp285.43 billion as a foundation to safeguard the Company's sustainable growth.

ANALISIS KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
ANALYSIS OF GLOBAL ECONOMIC CONDITION

Perekonomian global sepanjang 2025 bergerak dalam lingkungan yang masih penuh ketidakpastian, meskipun stabilitas pertumbuhan relatif tetap terjaga. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3%, mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi dunia tetap bertumbuh, namun belum kembali pada tingkat ekspansi historis. Tingginya suku bunga di sejumlah negara utama, ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, serta meningkatnya fragmentasi perdagangan global masih menjadi faktor yang menahan percepatan pemulihan ekonomi dunia.

Arah pertumbuhan antar kawasan juga menunjukkan dinamika yang berbeda. Amerika Serikat tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan global melalui konsumsi domestik yang kuat dan pasar tenaga kerja yang resilien. Sebaliknya, kawasan Eropa menghadapi perlambatan yang dipengaruhi lemahnya aktivitas manufaktur dan tekanan biaya energi, sementara Tiongkok masih berada dalam fase penyesuaian akibat melemahnya sektor properti dan permintaan domestik. Di tengah kondisi tersebut, India dan sejumlah negara berkembang di Asia tetap mencatatkan pertumbuhan yang lebih solid, didorong oleh konsumsi, investasi, dan penguatan aktivitas ekonomi domestik.

Bagi industri transportasi dan logistik, kondisi global tersebut membawa implikasi yang nyata terhadap dinamika biaya operasional, stabilitas rantai pasok, serta pergerakan mobilitas barang dan penumpang. Fluktuasi harga energi, perubahan pola perdagangan, dan meningkatnya kebutuhan efisiensi operasional menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara cermat. Dalam konteks tersebut, perusahaan yang memiliki ketahanan operasional, fleksibilitas model bisnis, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan eksternal akan berada pada posisi yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

The global economy throughout 2025 navigated an situation that remained fraught with uncertainty, although growth stability was relatively maintained. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth at 3.3%, reflecting that world economic activity has continued to expand, yet has not returned to historical expansion levels. High interest rates in several major countries, prolonged geopolitical tensions, and rising global trade fragmentation remained factors restraining the acceleration of global economic recovery.

The direction of growth across regions also exhibited differing dynamics. The United States remained one of the primary anchors of global growth through robust domestic consumption and a resilient labor market. On the other hand, the European region faced a slowdown influenced by weak manufacturing activity and energy cost pressures, while China remained in an adjustment phase due to a weakening property sector and domestic demand. Amidst these conditions, India and several emerging economies in Asia continued to record more solid growth, driven by consumption, investment, and the strengthening of domestic economic activity.

For the transportation and logistics industry, these global conditions brought tangible implications for operational cost dynamics, supply chain stability, and the movement of goods and passenger mobility. Energy price fluctuations, shifting trade patterns, and an increasing demand for operational efficiency constituted factors that must be meticulously anticipated. In this context, enterprises with operational resilience, business model flexibility, and the capability to adapt to external changes will be positioned more strongly to maintain sustainable growth.

Indikator Makro Global yang Memengaruhi Transportasi & Logistik
Global Macro Indicators Impacting Transportation & Logistics

Indikator *Indicators*	2025	2024	Sumber *Source*
Pertumbuhan Ekonomi Global Global Economic Growth	**3,30%**	3,30%	IMF, *World Economic Outlook Update*, January 2025
Pertumbuhan Volume Perdagangan Global Global Trade Volume Growth	**3,20%**	3,40%	WTO, *Global Trade Outlook and Statistics*, April 2025
Inflasi Global Global Inflation	**4,30%**	5,80%	IMF, *World Economic Outlook Update*, January 2025
Harga Minyak Brent (rata-rata) Brent Oil Price (average)	**US$80,6/barel**	US$80,7/barel	World Bank/U.S. EIA
Federal Funds Rate	**4,25%-4,50%**	5,25%-5,50%	U.S. Federal Reserve

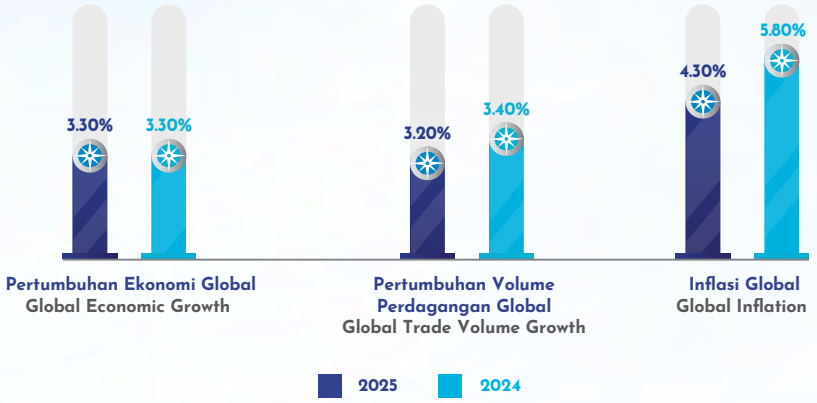

ANALISIS KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA
ANALYSIS OF INDONESIAN ECONOMIC CONDITION

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang tetap kuat di tengah kondisi global yang masih penuh tekanan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% sepanjang tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, dengan pertumbuhan triwulan IV 2025 mencapai 5,39% secara tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap bergerak positif, ditopang oleh permintaan dalam negeri, investasi, belanja pemerintah, serta kinerja sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

The Indonesian economy in 2025 demonstrated a resilience that remained robust amidst ongoing global pressurised conditions. Statistics Indonesia (BPS) recorded that the Indonesian economy grew by 5.11% throughout 2025, higher compared to 2024, with fourth-quarter 2025 growth reaching 5.39% on a year-on-year basis. The achievement indicates that domestic economic activity continued to move positively, sustained by domestic demand, investment, government spending, as well as the performance of sectors directly linked to public mobility and goods distribution.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi nasional masih berada dalam tingkat yang terkendali. Inflasi tahunan pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92%, sedangkan inflasi inti berada pada level 2,38%. Kondisi tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga, sekaligus memberikan ruang bagi aktivitas konsumsi dan mobilitas untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas inflasi juga menjadi faktor penting bagi sektor transportasi, mengingat pergerakan biaya operasional dan daya beli pengguna jasa memiliki keterkaitan langsung terhadap permintaan layanan.

From the price stability perspective, national inflation remained within controlled levels. Annual inflation in December 2025 was recorded at 2.92%, while core inflation stood at 2.38%. The situation reflects that public purchasing power remained relatively stable, while simultaneously providing room for consumption and mobility to continue supporting national economic growth. Inflation stability also represents an important factor for the transportation sector, given that operational cost fluctuation and the purchasing power of service users correlate directly to service demand.

Sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor dengan kinerja paling menonjol sepanjang tahun 2025. Pada triwulan IV 2025, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98% secara tahunan, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas logistik, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga konektivitas dan kelancaran arus barang. Bagi ASDP, kondisi ini menjadi indikator penting bahwa kebutuhan terhadap layanan penyeberangan, kepelabuhanan, dan konektivitas antarpulau tetap memiliki ruang pertumbuhan yang relevan dengan agenda pembangunan nasional.

The transportation and warehousing sector emerged as the most prominent sectors in performance throughout 2025. In the Q4 of 2025, the transportation and warehousing business field recorded the highest growth of 8.98% on a year-on-year basis, aligned with increasing public mobility, logistics activities, and support from government policies in maintaining connectivity and the smooth flow of goods. For ASDP, this condition serves as an important indicator that the demand for ferry transportation, port, and inter-island connectivity services retains a relevant growth space within the national development agenda.

Meski demikian, perekonomian nasional tetap menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicermati, terutama terkait fluktuasi harga energi, dinamika nilai tukar, perubahan pola mobilitas masyarakat, serta kebutuhan peningkatan efisiensi dalam rantai logistik nasional. Dalam konteks tersebut, kemampuan perusahaan transportasi untuk menjaga keandalan layanan, mengoptimalkan aset, memperkuat digitalisasi, dan mengendalikan biaya operasional menjadi faktor kunci dalam mempertahankan daya saing. Bagi ASDP, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi dasar penting untuk terus memperkuat peran sebagai penghubung konektivitas nasional, sekaligus menjaga kualitas layanan yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

Nevertheless, the national economy continues to face a number of challenges that warrant close monitoring, particularly regarding energy price fluctuations, exchange rate dynamics, shifts in public mobility patterns, and the need for enhanced efficiency within the national logistics chain. In this context, the capability of transportation enterprises to maintain service reliability, optimize assets, strengthen digitalization, and control operational costs constitutes a key factor in sustaining competitiveness. For ASDP, the growth momentum of the Indonesian economy in 2025 forms an essential foundation to continuously reinforce its role as a connector of national connectivity, while simultaneously safeguarding reliable, efficient, and sustainable service quality.

Indikator *Indicators*	**2025**	**2024**	**Sumber** *Source*
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Indonesia's Economic Growth	**5,11%**	5,03%	BPS, Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen dan Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (Badan Pusat Statistik Indonesia). Statistics Indonesia, Indonesian Economy to Grow 5.11 Percent in 2025 and 5.03 Percent in 2024.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku GDP at Current Prices	**Rp23.821,1 triliun** **Rp23,821.1 trillion**	Rp22.139,0 triliun Rp22,139.0 trillion	BPS, Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 dan 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia). Statistics Indonesia, Official Statistics on Indonesia's Economic Growth in 2025 and 2024.
PDB per Kapita GDP per Capita	**Rp83,7 juta** **Rp83.7 million**	Rp78,6 juta Rp78.6 million	BPS, Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 dan 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia). Statistics Indonesia, Official Statistics on Indonesia's Economic Growth in 2025 and 2024.

Indikator *Indicators*	2025	2024	Sumber *Source*
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Economic Growth in the Q4	**5,39%**	5,02%	BPS, Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 dan 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia). Statistics Indonesia, Official Statistics on Indonesia's Economic Growth in 2025 and 2024.
Pertumbuhan Tertinggi dari Sisi Produksi pada Triwulan IV Highest Production Growth in the Q4	**Transportasi dan Pergudangan** **Transportation and Warehousing** **8,98%**	Jasa Lainnya Other Services: 11,36%	BPS, Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 dan 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia). Statistics Indonesia, Official Statistics on Indonesia's Economic Growth in 2025 and 2024.

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

ANALISIS INDUSTRI PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN INDONESIA

Industri pelabuhan dan penyeberangan Indonesia pada tahun 2025 tetap memegang peran strategis dalam mendukung konektivitas nasional, khususnya bagi negara kepulauan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat dan distribusi barang yang tersebar lintas wilayah. Kinerja industri ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap resilien, di mana ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025 dan meningkat pada Triwulan IV 2025 sebesar 5,39% secara *year-on-year*. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan IV 2025 sebesar 8,98%, menunjukkan kuatnya aktivitas mobilitas dan logistik pada akhir tahun.

Di sisi penyeberangan, permintaan layanan masih dipengaruhi oleh pola musiman, terutama periode Angkutan Lebaran serta Natal dan Tahun Baru, yang mendorong peningkatan mobilitas orang dan kendaraan pada lintasan-lintasan utama. BPS mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2025, jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meningkat 12,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan bahwa moda penyeberangan tetap menjadi bagian penting dalam sistem transportasi nasional, terutama dalam menghubungkan wilayah yang belum sepenuhnya terintegrasi oleh jaringan transportasi darat.

Namun demikian, industri penyeberangan juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pengaturan arus kendaraan pada periode puncak, perubahan pola perjalanan masyarakat,

ANALYSIS OF INDONESIA'S PORT AND FERRY INDUSTRY

The Indonesian port and ferrying industry in 2025 continued to hold a strategic role in supporting national connectivity, particularly for an archipelagic state with public mobility and goods distribution needs dispersed across regions. The performance of this industry was supported by national economic growth that stayed resilient, wherein the Indonesian economy grew 5.11% throughout 2025 and increased in the Q4 of 2025 by 5.39% on a year-on-year basis. From the production side, the transportation and warehousing sectors recorded the highest growth in the Q4 of 2025 at 8.98%, demonstrating the strength of mobility and logistics activities at the year-end.

On the ferry transportation side, service demand was influenced by seasonal patterns, primarily the Eid holiday period as well as Christmas and New Year, which increased people and vehicles mobility on primary routes. BPS recorded that from January to December 2025, the number of river, lake, and ferry transportation passengers increased by 12.02% compared to the same period in the preceding year. This indicator demonstrates that the ferry crossing mode remains a vital part of the national transportation system, particularly in connecting regions that have not been fully integrated by land transportation networks.

However, the ferry transportation industry also faces increasingly complex challenges. Managing vehicle flows during peak periods, shifting public travel patterns,

tekanan biaya operasional, serta kebutuhan peningkatan kapasitas layanan menjadi faktor yang perlu dikelola secara cermat. Pada periode Nataru 2025/2026, pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan dilakukan melalui skema pengalihan kendaraan ke beberapa pelabuhan, termasuk pengaturan di Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan industri penyeberangan semakin membutuhkan koordinasi lintas pemangku kepentingan, kesiapan infrastruktur, dan sistem operasional yang adaptif.

Bagi industri pelabuhan, peningkatan aktivitas transportasi dan logistik mendorong kebutuhan terhadap layanan pelabuhan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis data. Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi ekosistem logistik nasional melalui penguatan *National Logistic Ecosystem* untuk meningkatkan efisiensi arus barang, memperbaiki koordinasi antarpelaku, serta mempercepat proses layanan logistik. Dalam konteks tersebut, pelabuhan penyeberangan tidak hanya berfungsi sebagai titik naik-turun penumpang dan kendaraan, tetapi juga sebagai simpul konektivitas yang berperan dalam kelancaran rantai pasok domestik.

Dengan kondisi tersebut, prospek industri pelabuhan dan penyeberangan Indonesia tetap positif, sejalan dengan kebutuhan konektivitas antarpulau, pertumbuhan mobilitas masyarakat, dan penguatan distribusi logistik nasional. Bagi ASDP, peluang tersebut perlu direspons melalui peningkatan keandalan armada, optimalisasi kapasitas pelabuhan, penguatan layanan digital, serta pengelolaan arus kendaraan dan penumpang yang lebih terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, Perseroan dapat terus memperkuat perannya sebagai penghubung utama konektivitas nasional sekaligus mendukung pemerataan ekonomi antarwilayah.

operational cost pressures, and the need for service capacity expansion are factors that must be managed meticulously. In the Christmas and New Year 2025/2026 period, road traffic and ferry transportation management was executed through vehicle diversion schemes to several ports, including traffic management at Merak, Ciwandan, and BBJ Bojonegara Ports to maintain a smooth crossing flow. The policy indicates that the management of the ferrying industry increasingly requires cross-stakeholder coordination, infrastructure readiness, and adaptive operational systems.

For the port industry, the increase in transportation and logistics activities drives the demands for port services that are more efficient, integrated, and data-driven. The Government also continues to encourage the digitalization through the reinforcement of the National Logistics Ecosystem to enhance the efficiency of goods flow, improve coordination among industry players, and accelerate logistics service processes. In this context, ferry ports function not merely as embarkation and disembarkation points for passengers and vehicles, but also as connectivity nodes that play a role in the smoothness of the domestic supply chain.

Under these conditions, the outlook for the Indonesian port and ferry transportation industry remains positive, in line with inter-island connectivity demands, public mobility growth, and the stronger national logistics distribution. For ASDP, these opportunities must be responded to by improving fleet reliability, optimizing port capacity, strengthening digital services, and managing vehicle and passenger flows in a more integrated manner. This approach will enable the Company to continuously reinforce its role as the primary connector of national connectivity while simultaneously supporting economic equalization across regions.

Transportasi Laut, Desember 2024 - Desember 2025
Sea Transportation, December 2024 - December 2025

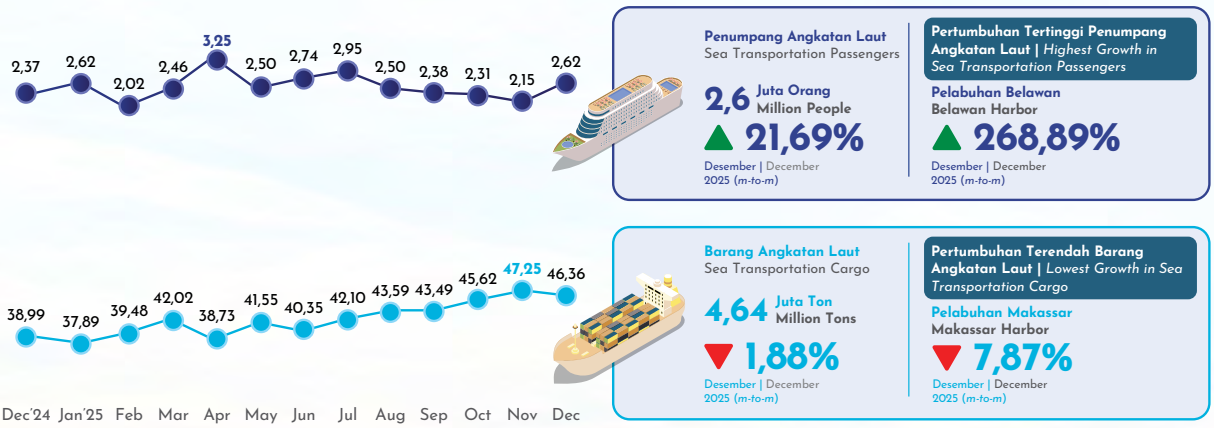

Sumber: Badan Pusat Statistik, Penumpang Angkatan Laut Domestik per Desember 2025
Source: Statistics Indonesia., Domestic Maritime Passengers as of December 2025

PERAN ASDP DALAM INDUSTRI PENYEBERANGAN NASIONAL
ASDP'S ROLE IN THE NATIONAL FERRY INDUSTRY

ASDP memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas nasional melalui layanan penyeberangan yang menghubungkan mobilitas masyarakat, kendaraan, dan distribusi barang antarpulau. Peran tersebut tidak hanya berada pada ruang komersial, tetapi juga melekat pada fungsi pelayanan publik, terutama dalam menjaga akses transportasi di wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2025, ASDP Group mengelola 222 unit kapal, meningkat dibandingkan 220 unit kapal pada tahun sebelumnya, yang menjadi basis penting dalam menjaga keberlangsungan layanan penyeberangan nasional.

Sepanjang tahun 2025, dinamika industri penyeberangan masih dipengaruhi oleh perubahan pola mobilitas, pengaturan arus kendaraan pada periode puncak, kondisi cuaca, kesiapan armada, serta persaingan layanan di sejumlah lintasan. Di tengah kondisi tersebut, Perseroan tetap menjaga kehadiran layanan pada jaringan penyeberangan yang memiliki fungsi strategis bagi mobilitas masyarakat dan rantai pasok domestik. Pada segmen penyeberangan, ASDP mencatat realisasi 288.566 trip, melayani 5,71 juta penumpang dan 7,23 juta kendaraan, yang menunjukkan besarnya skala layanan Perseroan dalam mendukung pergerakan orang dan kendaraan lintas wilayah.

Peran ASDP juga tercermin dari kontribusi pada layanan kepelabuhanan yang menjadi simpul penting dalam kelancaran arus transportasi penyeberangan. Pada tahun 2025, jasa sandar mencapai 1,09 miliar GRT-*Call* atau 110% dari target, sementara jasa parkir mencatat realisasi 359.350 unit atau 256% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan pada sebagian volume penyeberangan, fungsi pelabuhan tetap menjadi penopang utama dalam menjaga kontinuitas layanan, pengaturan arus kendaraan, dan efisiensi operasional di titik-titik konektivitas utama.

ASDP holds a strategic role in strengthening national connectivity through ferry transportation services that connect the mobility of people, vehicles, and inter-island goods distribution. The role rests not only within the commercial sphere, but is also inherently attached to public service functions, particularly in maintaining transportation access in regions that require sustainable connectivity support. Until the end of 2025, ASDP Group managed 222 units of vessel, an increase compared to 220 vessel units in the preceding year, which serves as an important base in maintaining the continuity of national ferry transportation services.

Throughout 2025, the dynamics of the ferry industry were still influenced by shifts in mobility patterns, vehicle flow management during peak periods, weather conditions, fleet readiness, and service competition on a number of routes. Amidst these conditions, the Company consistently maintained its service presence across ferry crossing networks that hold a strategic function for public mobility and the domestic supply chain. In the ferry transportation segment, ASDP recorded a realization of 288,566 trips, serving 5.71 million passengers and 7.23 million vehicles, which demonstrates the vast scale of the Company's services in supporting the movement of people and vehicles across regions.

The role of ASDP was also reflected in its contribution to port services, which constitute an important node in ensuring the smooth flow of ferry transportation. In 2025, docking services reached 1.09 billion GRT-Call or 110% of the target, while parking services recorded 359,350 units or 256% of the target. These achievements demonstrate that despite pressures on a portion of ferry crossing volumes, port functions remained a pillar in maintaining service continuity, vehicle flow management, and operational efficiency at key connectivity points.

Dengan skala operasional tersebut, ASDP berperan sebagai penghubung utama dalam ekosistem penyeberangan nasional sekaligus pendukung pemerataan ekonomi antardaerah. Ke depan, penguatan manajemen armada, peningkatan keandalan pelabuhan, optimalisasi layanan digital, serta integrasi proses operasional menjadi faktor penting bagi Perseroan untuk menjaga kualitas layanan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing industri penyeberangan Indonesia secara berkelanjutan.

With such operational scale, ASDP acts as the primary connector within the national ferry transportation ecosystem while simultaneously acting as a supporter of inter-regional economic equalization. Moving forward, reinforcing fleet management, enhancing port reliability, optimizing digital services, and integrating operational processes constitute vital factors for the Company to safeguard service quality, increase productivity, and strengthen the competitiveness of the Indonesian ferry transportation industry in a sustainable manner.

Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Desember 2024 - Desember 2025
River, Lake, and Ferry Transportation, December 2024 – December 2025

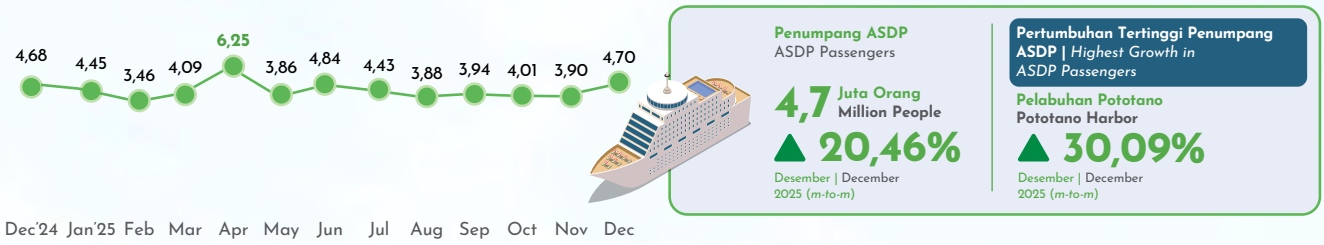

Sumber: Badan Pusat Statistik, Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan per Desember 2025.
Source: Statistics Indonesia, River, Lake, and Ferry Transportation as of December 2025.

STRATEGI BISNIS ASDP BERDASARKAN TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI 2025

ASDP BUSINESS STRATEGY BASED ON 2025 ECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

Untuk mencapai tujuan organisasi dan merespons dinamika ekonomi serta industri penyeberangan tahun 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan keandalan layanan, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan usaha. Arah kebijakan tersebut mencakup empat fokus utama, yaitu penguatan infrastruktur dan layanan, peningkatan efisiensi serta produktivitas, pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

To achieve organizational objectives and respond to the economic and ferry industry dynamics of 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) established strategic policies directed toward strengthening competitiveness, enhancing service reliability, and safeguarding sustainable business growth. The policy direction encompasses four primary focuses, namely strengthening infrastructure and services, increasing efficiency and productivity, leveraging innovation and technology, as well as sustainability and social responsibility.

PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN

ASDP menempatkan penguatan infrastruktur dan layanan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas konektivitas penyeberangan nasional. Strategi ini diwujudkan melalui peremajaan armada, peningkatan fasilitas pelabuhan, serta pengembangan lintasan yang memiliki potensi ekonomi, pariwisata, dan logistik. Modernisasi fasilitas pelabuhan diarahkan untuk memperkuat kelancaran arus penumpang, kendaraan, dan barang, termasuk melalui penambahan fasilitas bongkar muat, peningkatan sistem lalu lintas kapal, serta penyediaan fasilitas penumpang yang lebih memadai. Di sisi lain, pengembangan logistik terintegrasi dilakukan untuk memperkuat peran ASDP dalam rantai pasok nasional melalui layanan transportasi multimoda yang lebih efisien dan terhubung.

STRENGTHENING INFRASTRUCTURE AND SERVICES

ASDP places the strengthening of infrastructure and services as the core foundation in upgrading the capacity and quality of national ferry transportation connectivity. The strategy is realized through fleet modernization, port facility upgrades, and routes development carrying economic, tourism, and logistics potential. The modernization of port facilities is aimed toward strengthening the smooth flow of passengers, vehicles, and goods, including by expanding cargo handling facilities, upgrading vessel traffic systems, and developing more adequate passenger facilities. On the other hand, development of integrated logistics is conducted to reinforce ASDP's role within the national supply chain through multimodal transportation services that are more efficient and interconnected.

PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS

Peningkatan efisiensi dan produktivitas menjadi prioritas untuk memastikan aset dan sumber daya Perseroan dapat memberikan hasil yang optimal. ASDP mendorong optimalisasi operasional melalui penerapan teknologi kepelabuhanan dan pelayaran, evaluasi pola operasi, pengaturan jadwal lintasan, serta pemanfaatan armada secara lebih efektif. Upaya ini juga didukung oleh penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan, pengembangan kapabilitas teknis, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan dan terukur. Selain itu, Perseroan memperluas kolaborasi dengan BUMN, BUMD, dan mitra swasta untuk menciptakan sinergi layanan, meningkatkan efisiensi biaya, serta mempercepat pengembangan infrastruktur dan layanan baru.

INCREASING EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY

Increasing efficiency and productivity stands as a priority to ensure that the Company's assets and resources can deliver optimal results. ASDP drives operational optimization by implementing port and maritime technology, evaluating operating patterns, managing route schedules, and utilizing more effective fleets. These effort are also supported by the strengthening of human resource competencies through training programs, technical capability development, and the application of a performance management system that is transparent and measurable. Furthermore, the Company expands collaboration with SOEs, regional-owned enterprises (BUMDs), and private partners to create service synergies, enhance cost efficiency, and accelerate the development of new infrastructure and services.

INOVASI DAN TEKNOLOGI

ASDP terus memperkuat pemanfaatan teknologi sebagai pengungkit pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan. Fungsi teknologi informasi diarahkan sebagai *business driver* dan *strategic business partner* yang mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan pengalaman pelanggan. Digitalisasi layanan dikembangkan melalui platform pemesanan tiket, pembayaran, informasi perjalanan, pelacakan kargo, serta sistem manajemen pelabuhan berbasis teknologi. Pemanfaatan *big data analytics*, aplikasi bergerak, dan pemantauan aset secara real time menjadi bagian penting dalam meningkatkan akurasi perencanaan, respons operasional, dan transparansi layanan kepada pengguna jasa.

INNOVATION AND TECHNOLOGY

ASDP continuously reinforces the utilization of technology as a lever for growth and service quality enhancement. The information technology function is positioned to operate as a business driver and strategic business partner that supports operational efficiency, data-driven decision-making, and customer experience improvement. Service digitalization is developed through ticket reservation platforms, payments, travel information, cargo tracking, and technology-based port management systems. Utilizing big data analytics, mobile applications, and real-time asset monitoring has formed a vital part in enhancing planning accuracy, operational responsiveness, and service transparency for service users.

KEBERLANJUTAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dalam menjalankan strategi bisnis, ASDP juga menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari pengelolaan perusahaan. Perseroan mendorong pengelolaan lingkungan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, penggunaan teknologi dan praktik operasional yang lebih ramah lingkungan, serta kajian pengembangan energi terbarukan untuk mendukung agenda penurunan emisi. Dari sisi sosial, ASDP menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup di sekitar wilayah operasional. Sementara itu, dari aspek tata kelola, Perseroan memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko, transparansi, serta akuntabilitas pelaporan sebagai dasar dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Melalui keempat arah kebijakan tersebut, ASDP berupaya membangun strategi bisnis yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Penguatan armada, pelabuhan, digitalisasi, sumber daya manusia, kemitraan strategis, serta pengelolaan risiko menjadi kunci dalam mendukung peran Perseroan sebagai penghubung konektivitas nasional sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi antardaerah.

SUSTAINABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY

In executing its business strategy, ASDP also positions sustainability as an integral part of corporate management. The Company promotes environmental management through the implementation of environmental management systems, the use of environmentally friendly technologies and operational practices, and development studies on renewable energy to support the emission reduction agenda. From the social aspect, ASDP executes community empowerment programs focused on enhancing the quality of life around operational areas. From the governance aspect, the Company strengthens the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, risk management, transparency, and reporting accountability as a basis for upholding the trust of shareholders and stakeholders.

Through these four policy directions, ASDP endeavors to build a business strategy that is more adaptive, efficient, and sustainable. Strengthening the fleet, ports, digitalization, human resources, strategic partnerships, and risk management constitutes the key to supporting the Company's role as a connector of national connectivity while simultaneously reinforcing its contribution to inter-regional economic growth.

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
MARKETING ASPECTS AND MARKET SHARE

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan *brand awareness*, peningkatan *engagement* pelanggan, serta perluasan kolaborasi strategis melalui pelaksanaan program *campaign*, *event*, dan *joint partnership*. Strategi tersebut dijalankan secara terukur dengan mengacu pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan Perseroan, sehingga setiap inisiatif pemasaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan eksposur, tetapi juga pada penguatan kualitas interaksi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Pada aspek *Campaign & Event*, Perseroan menargetkan 42 program pada tahun 2025 dan berhasil merealisasikan 47 program, atau mencapai 111,90% dari target. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi, komunikasi pemasaran, dan aktivasi layanan dalam memperkuat visibilitas Perseroan serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan pengguna jasa. Sementara itu, pada program *Joint Partnership*, Perseroan berhasil merealisasikan 18 program dari target 17 program, atau mencapai 105,90%. Realisasi ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam membangun sinergi dengan mitra strategis untuk mendukung perluasan pasar, peningkatan nilai layanan, dan penguatan posisi ASDP dalam ekosistem transportasi penyeberangan.

Secara keseluruhan, kinerja pemasaran tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dengan realisasi yang melampaui target pada seluruh indikator utama. Hal ini menegaskan komitmen Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan dalam menjalankan strategi pemasaran yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, pengalaman pelanggan, serta penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi Perseroan.

MARKETING STRATEGY

The marketing strategy in 2025 was focused on strengthening brand awareness, increasing customer engagement, and expanding strategic collaborations through campaign programs, events, and joint partnerships. The strategy was executed in a measurable manner with reference to the Key Performance Indicators (KPIs) established by the Company, ensuring that each marketing initiative was oriented not merely toward expanding exposure, but also toward strengthening quality interactions with customers and stakeholders.

In the Campaign & Event aspect, the Company targeted 42 programs in 2025 and successfully realized 47 programs, thereby achieving 111.90% of the target. The achievement demonstrates the effectiveness of executing promotional activities, marketing communications, and service activations in strengthening the Company's visibility and building closer relationships with service users. Meanwhile, in the Joint Partnership program, the Company successfully realized 18 programs from a target of 17 programs, or reaching 105.90%. The accomplishment reflects the Company's capability to build synergies with strategic partners to support market expansion, service value enhancement, and the reinforcement of ASDP's position within the ferry transportation ecosystem.

Overall, marketing performance in 2025 demonstrated positive achievements with realizations exceeding targets across all primary indicators. This underscores the commitment of the Marketing and Customer Service Division in executing marketing strategies that are adaptive, collaborative, and oriented toward enhancing service quality, customer experience, and sustainable value creation for the Company.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar Perseroan menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 45,16% pada tahun 2023 menjadi 42,64% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 39,36% pada tahun 2025. Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya dinamika persaingan pada industri penyeberangan, termasuk perubahan preferensi pengguna jasa, penguatan layanan oleh operator lain, serta

MARKET SHARE

The Company's market share recorded a declining trend over the past three years, from 45.16% in 2023 to 42.64% in 2024, and decreasing further to 39.36% in 2025. The trend reflects the increasing competitive dynamics within the ferry transportation industry, including shifts in service user preferences, service improvement by other operators, and competition on a number of strategic routes. Facing

kompetisi pada sejumlah lintasan strategis. Menghadapi kondisi tersebut, ASDP terus memperkuat strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan, optimalisasi kanal digital, penguatan *brand awareness*, serta perluasan kolaborasi strategis guna mempertahankan daya saing dan memperkuat posisi Perseroan dalam industri penyeberangan nasional.

these conditions, ASDP continuously reinforces its marketing and customer service strategies through service quality enhancement, digital channel optimization, brand awareness strengthening, and the expansion of strategic collaborations to maintain competitiveness and reinforce the Company's position within the national ferry transportation industry.

Uraian *Description*	2025	2024	2023
Pangsa Pasar Perusahaan (%) Market Share (%)	39,36	42,64	45,16

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Kegiatan usaha ASDP dijalankan melalui beberapa segmen utama yang saling mendukung dalam memperkuat konektivitas nasional, yaitu segmen penyeberangan, segmen pelabuhan, segmen aneka usaha jasa dan kerja sama, serta segmen usaha anak perusahaan. Struktur segmen tersebut mencerminkan peran ASDP tidak hanya sebagai operator layanan penyeberangan, tetapi juga sebagai pengelola simpul pelabuhan, penyedia layanan pendukung, dan pengembang ekosistem bisnis yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat, kendaraan, dan distribusi barang antardaerah.

ASDP's business activities are executed through several primary segments that mutually support each other in strengthening national connectivity, namely the ferry transportation segment, the port segment, the ancillary services and partnership segment, and the subsidiary business segment. The segmental structure reflects ASDP's role, not limited as a ferry service operator, but also as a manager of port nodes, a provider of supporting services, and a developer of a business ecosystem relating to the mobility of people, vehicles, and inter-regional goods distribution.

Segmen Usaha Penyeberangan | Ferry Transportation Business Segment

Segmen usaha penyeberangan merupakan inti bisnis ASDP yang berperan dalam menyediakan layanan angkutan penyeberangan bagi penumpang, kendaraan, dan barang. Segmen ini memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas antarpulau, terutama pada lintasan komersial dan perintis yang menjadi penghubung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di berbagai wilayah Indonesia. Melalui segmen ini, ASDP menjalankan fungsi bisnis sekaligus pelayanan publik, khususnya dalam menjaga akses transportasi pada wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas berkelanjutan.

The ferry transportation business segment forms the core business of ASDP, that is to provide ferry transportation services for passengers, vehicles, and cargo. This segment holds a strategic position in supporting inter-island connectivity, particularly on commercial and pioneer routes that serve as connectors for public mobility and logistics distribution across various regions of Indonesia. Through this segment, ASDP carries out business operations as well as public services, specifically in maintaining transportation access in regions that require sustainable connectivity support.

Segmen Usaha Pelabuhan | Port Business Segment

Segmen usaha pelabuhan merupakan bagian penting dari rantai layanan penyeberangan ASDP, karena berfungsi sebagai simpul utama dalam pengaturan arus kapal, penumpang, kendaraan, dan aktivitas pendukung lainnya. Melalui pengelolaan pelabuhan, Perseroan memastikan proses sandar kapal, embarkasi dan debarkasi penumpang, serta pergerakan kendaraan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan efisien. Segmen ini juga menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dan kelancaran operasional penyeberangan.

The port business segment represents a vital portion of ASDP's ferry transportation service chain, as it functions as the primary node for managing the flow of vessels, passengers, vehicles, and other supporting activities. Through port management, the Company ensures that docking services, passenger embarkation/debarkation, and vehicle movements can proceed in a more orderly, safe, and efficient manner. This segment also serves as an important foundation to support service quality improvements and smooth ferrying operations.

Segmen Aneka Usaha Jasa dan Kerja Sama | Ancillary Services and Partnership Segment

Segmen aneka usaha jasa dan kerja sama merupakan lini usaha pendukung yang dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset serta memperluas sumber pendapatan di luar layanan utama penyeberangan. Segmen ini mencakup berbagai aktivitas pendukung, termasuk penyediaan bahan bakar, layanan fasilitas, kerja sama pemanfaatan aset, serta layanan komersial lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem pelabuhan dan penyeberangan. Keberadaan segmen ini penting untuk memperkuat diversifikasi pendapatan dan meningkatkan nilai tambah dari aset yang dimiliki Perseroan.

The ancillary services and partnership segment is a supporting business line developed to optimize asset utilization and expand revenue sources beyond the primary ferry transportation services. This segment encompasses various supporting activities, including fuel provisioning, facility services, asset utilization joint operations, as well as other commercial services that relate to the port and ferry transportation ecosystem. This segment is vital to strengthen revenue diversification and brings improvement to the added value of the assets owned by the Company.

SEGMEN USAHA PENYEBERANGAN

Pada tahun 2025, sarana produksi segmen usaha penyeberangan ASDP Group didukung oleh 222 unit kapal, meningkat dibandingkan 220 unit kapal pada tahun 2024 dan mencapai 102% dari rencana sebanyak 218 unit kapal. Komposisi armada tersebut terdiri dari 78 unit kapal komersial, 78 unit kapal perintis, 1 unit kapal ternak, 3 unit bus air, 4 unit kapal KSO (KMP BBR, KMP Aceh Hebat 1, KMP Aceh Hebat 2, dan KMP Aceh Hebat 3), 53 unit kapal PT Jembatan Nusantara, 1 unit kapal yang diusulkan *scrap*, serta 4 unit kapal kontainer atau kargo. Komposisi ini menunjukkan kesiapan kapasitas operasional Perseroan dalam melayani kebutuhan penyeberangan yang beragam, mulai dari lintasan utama bertrafik tinggi, lintasan pelayanan publik, hingga layanan khusus angkutan barang dan logistik.

FERRY TRANSPORTATION BUSINESS SEGMENT

In 2025, the production assets of the ASDP Group ferry transportation business segment were supported by 222 vessel units, increasing from 220 units in 2024 and securing 102% of the targeted 218 units. The fleet composition comprised 78 units of commercial vessel, 78 units of pioneer vessel, 1 unit of livestock vessel, 3 units of water bus, 4 units of Joint Operation vessel (KMP BBR, KMP Aceh Hebat 1, KMP Aceh Hebat 2, and KMP Aceh Hebat 3), 53 units of PT Jembatan Nusantara vessels, 1 unit of vessel proposed for scrap, as well as 4 units of container or cargo vessel. This composition demonstrates the Company's readiness in operational capacity to serve diverse ferry crossing demands, spanning from high-traffic primary routes, public service routes, to specialized cargo and logistics transportation services.

Tabel Sarana Produksi Usaha Penyeberangan Tahun 2025

Production Facilities for Ferry Business in 2025

Uraian *Description*	RKAP 2025 *WPB 2025*	Realisasi 2025 *Realization 2025*	Realisasi 2024 *Realization 2024*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*	Pertumbuhan (%) *Growth (%)*
	(1)	(2)	(3)	4=2/1	5=(2-3)/3
Kapal Komersil Commercial Vessel	75	78	75	104,00	4,00
Kapal Perintis Pioneer Vessels	79	78	79	98,73	(0,01)
Kapal Stop Operasi Non-Operational Vessels	2	-	2	(200,00)	(1,00)
Kapal *Scrap* Scrap Vessel	1	1	1	100,00	-
Kapal KSO Joint Operations Vessel	4	4	4	100,00	-
Kapal Ternak Livestock Vessel	1	1	1	100,00	-
Kapal/Bus Air Vessel/Water Bus	3	3	5	100,00	(0,40)
Kapal Kontainer/Kargo Container/Cargo Vessel	-	4	-	400,00	400,00
Kapal JN JN Vessel	53	53	53	100,00	-
Jumlah Total	**218**	**222**	**220**	**101,83**	**0,91%**

Hingga akhir tahun 2025, ASDP Group melayani 326 lintasan, terdiri dari 98 lintasan komersial, 204 lintasan perintis, 5 lintasan tol laut, dan 19 lintasan kargo. Struktur lintasan tersebut mencerminkan luasnya peran ASDP dalam mendukung konektivitas nasional, baik pada rute-rute dengan aktivitas ekonomi tinggi maupun pada lintasan yang memiliki fungsi pelayanan publik dan distribusi logistik.

Until the end of 2025, ASDP Group served 326 routes, consisting of 98 commercial routes, 204 pioneer routes, 5 marine toll routes, and 19 cargo routes. The route structure reflects ASDP's extensive role in supporting national connectivity, both on routes with high economic activity and on routes that carry out public service and logistics distribution functions.

PENYEBERANGAN KOMERSIL

Pada tahun 2025, kinerja segmen bisnis penyeberangan komersial menghadapi tekanan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi trip tercatat sebanyak 133.075 trip, menurun 21.858 trip atau 14,11% dari 154.933 trip pada tahun 2024. Penurunan volume juga terlihat pada jumlah penumpang yang mencapai 3.999.349 orang, turun 310.896 orang atau 7,20%, serta kendaraan yang terealisasi sebanyak 4.764.411 unit, menurun 485.898 unit atau 9,25%. Penurunan kendaraan tersebut terjadi pada kendaraan roda 2 yang turun 216.985 unit atau 10,16%, serta kendaraan roda 4 atau lebih yang turun 268.913 unit atau 8,63%. Di sisi lain, volume barang menunjukkan pertumbuhan signifikan menjadi 4.529.130 ton, meningkat 4.305.157 ton dibandingkan tahun 2024, yang mencerminkan adanya pergeseran karakter permintaan pada segmen komersial dari dominasi mobilitas penumpang dan kendaraan menuju penguatan arus barang.

Tekanan pada kinerja penyeberangan komersial terutama dipengaruhi oleh gangguan operasional dan kendala armada yang berdampak langsung terhadap kesinambungan layanan. Beberapa kejadian signifikan, seperti insiden kebakaran KMP Tandemand di Cabang Batam, kerusakan dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni, kendala teknis pada KMP Tenggiri, KMP Wayangan, KMP Ranaka, KMP Portlink VII, KMP Teluk Cenderawasih II, KMP Bahtera Nusantara, KMP Halmahera, serta KMP Cucut, menyebabkan berkurangnya hari operasi, keterbatasan kapal pengganti, penurunan jumlah trip, dan penjadwalan ulang layanan. Selain itu, cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, termasuk Cabang Kupang, turut membatasi operasi kapal dan mempertegas pentingnya penguatan kesiapan armada, perencanaan pemeliharaan, serta sistem kontinjensi operasional yang lebih responsif terhadap risiko teknis maupun risiko iklim.

Selain faktor internal operasional, kinerja segmen komersial juga dipengaruhi oleh tekanan persaingan dan kebijakan eksternal. Persaingan harga serta promosi langsung atau *direct cashback* oleh operator pesaing di Cabang Bangka dan Bajo berdampak pada penurunan volume pelanggan, sementara masuknya operator DLU pada lintasan Kupang–Aimere–Waingapu dengan fasilitas kapal yang lebih kompetitif dan tarif lebih rendah turut menekan daya saing ASDP pada lintasan tersebut. Kehadiran kapal pesaing dengan sailing time lebih cepat di Cabang Batulicin juga menjadi tantangan terhadap preferensi pengguna jasa. Di sisi regulasi dan eksternal, pembatasan waktu operasional pada lintasan Telaga Punggur, Tanjung Uban serta penutupan lintasan komersial Tebas Kuala, Tebas Seberang sejak

COMMERCIAL FERRY

In 2025, the performance of the Commercial Ferry business segment faced significant pressure compared to the preceding year. Trip volume was recorded at 133,075 trips, down by 21,858 trips or 14.11% from 154,933 trips in 2024. A decline in volume was also observed in the number of passengers, which stood at 3.999,349 individuals, down by 310,896 individuals or 7.20%, while vehicles were recorded at 4,764,411 units, decreasing by 485,898 units or 9.25%. The contraction in vehicles occurred in 2-wheeled vehicles, which fell by 216,985 units or 10.16%, and 4-wheeled or more vehicles, which dropped by 268,913 units or 8.63%. On the other hand, cargo volume demonstrated significant expansion to 4,529,130 tons, rising by 4,305,157 tons compared to 2024, reflecting a shift in demand characteristics within the commercial segment away from passenger and vehicle mobility dominance toward the strengthening of cargo flows.

The challenges on Commercial Ferry performance was primarily influenced by operational disruptions and fleet constraints that directly impacted service continuity. Several significant occurrences, such as the fire incident on KMP Tandemand in the Batam Branch, damage to the executive dock at Bakauheni Port, and technical issues on KMP Tenggiri, KMP Wayangan, KMP Ranaka, KMP Portlink VII, KMP Teluk Cenderawasih II, KMP Bahtera Nusantara, KMP Halmahera, and KMP Cucut, led to reduced operating days, limited replacement vessels, a decrease in trips, and service rescheduling. In addition, extreme weather in multiple regions, including the Kupang Branch, further restricted vessel operations and underscored the vital importance of improving fleet readiness, maintenance planning, and operational contingency systems that are more responsive to technical and climate risks.

Beyond internal operational factors, the performance of the commercial segment was also affected by competitive pressures and external policies. Price competition and direct cashback promotions by competing operators in the Bangka and Bajo Branches resulted in a decline in customer volume, while the entry of operator DLU on the Kupang–Aimere–Waingapu route with more competitive vessel facilities and lower tariffs further compressed ASDP's competitiveness on the route. Competing vessels with faster sailing times in the Batulicin Branch also posed a challenge to service user preferences. On the regulatory and external front, operational time restrictions on the Telaga Punggur and Tanjung Uban routes, alongside the closure of the Tebas Kuala and Tebas Seberang commercial routes since the opening of the

beroperasinya Jembatan Penghubung pada 3 Maret 2025 turut membatasi ruang pertumbuhan layanan. Dengan kondisi tersebut, fokus perbaikan Perseroan perlu diarahkan pada peningkatan keandalan armada, penajaman strategi komersial per lintasan, optimalisasi pola operasi, serta diferensiasi layanan agar segmen penyeberangan komersial dapat kembali menjadi penggerak kinerja yang lebih stabil dan berdaya saing.

Connecting Bridge on 3 March 2025, further restricted service provided. The conditions necessitated improvements to be focused on fleet reliability, refining commercial strategies of each route, optimizing operating patterns, and pushing for service differentiation so that the Commercial Ferry business segment can perform more stable and competitive.

Tabel Kinerja Segmen Bisnis Penyeberangan Komersil Tahun 2024-2025
Performance of Commercial Ferry Line Business Segment in 2024-2025

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Trip Trips	133.075	154.933	(21.858)	(14,11)
Penumpang (orang) Passengers (person)	3.999.349	4.309.845	(310.496)	(7,20)
Kendaraan (unit) Vehicles (unit)	4.764.411	5.250.309	(485.898)	(9,25)
Roda 2 2-Wheeled	1.917.925	2.134.910	(216.985)	(10,16)
Roda 4 4-Wheeled	2.846.486	3.115.399	(268.913)	(8,63)
Barang (ton) Goods (ton)	4.529.130	223.973	4.305.157	1.922,18

PENYEBERANGAN PERINTIS

Pada tahun 2025, segmen bisnis penyeberangan perintis menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dengan peningkatan frekuensi layanan dan volume kendaraan. Realisasi trip mencapai 93.916 trip, meningkat 9.373 trip atau 11,09% dibandingkan 84.543 trip pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga keberlanjutan layanan pada lintasan perintis yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, terutama pada daerah yang belum sepenuhnya layak secara komersial namun memiliki kebutuhan transportasi yang penting bagi masyarakat. Dari sisi kendaraan, realisasi tahun 2025 tercatat sebanyak 503.494 unit, meningkat 20.762 unit atau 4,12% dibandingkan tahun sebelumnya, ditopang oleh kenaikan kendaraan roda 2 sebesar 4,62% dan kendaraan roda 4 atau lebih sebesar 3,52%.

Di sisi lain, jumlah penumpang pada segmen perintis tercatat sebanyak 1.006.597 orang, menurun 28.978 orang atau 2,88% dibandingkan 1.035.575 orang pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi trip belum sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan jumlah penumpang, seiring dengan karakteristik permintaan lintasan perintis yang cenderung dipengaruhi oleh pola mobilitas masyarakat,

PIONEER FERRY

In 2025, the Pioneer Ferry business segment demonstrated sustained performance, characterized by an increase in service frequency and vehicle volumes. Trip realization concluded at 93,916 trips, expanding by 9,373 trips or 11.09% compared to 84,543 trips in 2024. The growth reflects the Company's commitment to maintain service continuity on pioneer routes that hold a strategic function in supporting regional connectivity, particularly in areas that are yet fully commercially viable but having vital transportation demands for the public. From the vehicle perspective, the 2025 realization was recorded at 503,494 units, rising by 20,762 units or 4.12% compared to the preceding year, supported by a 4.62% increase in 2-wheeled vehicles and a 3.52% increase in vehicles with 4 wheels or more.

On the other hand, passenger volume within the pioneer segment was recorded at 1,006,597 individuals, down by 28,978 individuals or 2.88% compared to 1,035,575 individuals in 2024. The decline indicates that the expansion in trip frequency was not followed by passenger volume growth, as pioneer route demand characteristics tend to be influenced by public mobility patterns, geographical conditions, weather, and local

kondisi geografis, cuaca, serta kebutuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, Perseroan terus memandang segmen perintis sebagai bagian penting dari mandat pelayanan publik, dengan fokus pada peningkatan ketepatan jadwal, keandalan armada, evaluasi kebutuhan lintasan, serta optimalisasi layanan agar fungsi konektivitas, mobilitas dasar, dan pemerataan akses transportasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

economic needs. Accordingly, the Company continues to view the pioneer segment as a vital component of its public service mandate, with a focus on improving schedule punctuality, fleet reliability, route requirement evaluations, and service optimization so that connectivity functions, basic mobility, and equitable transportation access can proceed sustainably

Tabel Kinerja Segmen Bisnis Penyeberangan Perintis Tahun 2024-2025
Performance of Pioneer Ferry Line Business Segment in 2024-2025

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Trip Trips	93.916	84.543	9.373	11,09
Penumpang (orang) Passengers (person)	1.006.597	1.035.575	(28.978)	(2,88)
Kendaraan (unit) Vehicles (unit)	503.494	482.732	20.762	4,12
Roda 2 2-Wheeled	360.167	344.275	15.892	4,62
Roda 4 4-Wheeled	143.327	138.457	4.870	3,52

PENYEBERANGAN ANAK PERUSAHAAN

Pada tahun 2025, segmen bisnis penyeberangan anak perusahaan (PT Jembatan Nusantara/PT JN) mencatat kinerja yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan berkurangnya aktivitas layanan pada lintasan yang dioperasikan. Jumlah trip terealisasi sebanyak 61.587 trip, turun 18.697 trip atau 23,29% dari 80.284 trip pada tahun 2024. Penurunan frekuensi pelayaran tersebut turut memengaruhi volume penumpang, yang tercatat sebesar 707.342 orang, lebih rendah 143.260 orang atau 16,84% dibandingkan 850.602 orang pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja segmen anak perusahaan masih menghadapi tekanan dari sisi utilisasi armada, efektivitas pola operasi, serta dinamika permintaan pengguna jasa.

Tekanan serupa juga terlihat pada angkutan kendaraan. Sepanjang tahun 2025, jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 1.959.028 unit, menurun 713.242 unit atau 26,69% dibandingkan 2.672.270 unit pada tahun 2024. Penurunan tersebut berasal dari kendaraan roda 2 yang turun 392.104 unit atau 25,85% menjadi 1.125.025 unit, serta kendaraan roda 4 atau lebih yang turun 281.138 unit atau 25,21% menjadi 834.003 unit. Dengan capaian tersebut, fokus pengelolaan segmen anak perusahaan perlu diarahkan

SUBSIDIARY FERRY SERVICES

In 2025, the ferry transportation business segment of the subsidiary (PT Jembatan Nusantara/PT JN) recorded lower performance compared to the preceding year, aligned with diminished service activities on the routes operated. The number of trips completed at 61,587 trips, dropping by 18,697 trips or 23.29% from 80,284 trips in 2024. The reduced sailing frequency consequently affected passenger volume, which was recorded at 707,342 individuals, lower by 143,260 individuals or 16.84% compared to 850,602 individuals in the prior year. The situation indicates that the performance of the subsidiary segment still faces challenges in fleet utilization, the effectiveness of operating patterns, and demand dynamics.

Similar difficulties was also evident in vehicle ferrying. Throughout 2025, the volume of vehicles served stood at 1,959,028 units, decreasing by 713,242 units or 26.69% compared to 2,672,270 units in 2024. The 2-wheeled vehicles decreased by 392,104 units, or 25.85%, to 1,125,025 units, while vehicles with 4 wheels or more decreased by 281,138 units, or 25.21%, to 834,003 units. The management focus for the subsidiary segment needs to be directed toward evaluating route productivity, adjusting operating schedules, improving fleet readiness, and

pada evaluasi produktivitas lintasan, penyesuaian jadwal operasi, peningkatan kesiapan armada, serta penguatan strategi layanan agar kontribusi segmen ini terhadap kinerja ASDP Group dapat kembali meningkat secara lebih stabil dan berkelanjutan.

strengthening service strategies so that the subsidiary segment's contribution to the ASDP Group's performance can increase in a more stable and sustainable manner.

Tabel Kinerja Segmen Bisnis Penyeberangan Anak Perusahaan Tahun 2024-2025
Performance of Subsidiary Ferry Line Business Segment in 2024-2025

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Trip Trips	61.587	80.284	(18.697)	(23,29)
Penumpang (orang) Passengers (person)	707.342	850.602	(143.260)	(16,84)
Kendaraan (unit) Vehicles (unit)	1.959.028	2.672.270	(713.242)	(26,69)
Roda 2 2-Wheeled	1.125.025	1.517.129	(392.104)	(25,85)
Roda 4 4-Wheeled	834.003	1.115.141	(281.138)	(25,21)

KAPASITAS DAN PERKEMBANGAN

Segmen penyeberangan tetap menjadi inti bisnis ASDP dalam melayani mobilitas penumpang, kendaraan, dan barang antarpulau. Pada tahun 2025, segmen ini menghadapi tekanan pada volume layanan akibat dinamika operasional, kesiapan armada, perubahan pola perjalanan, dan persaingan di sejumlah lintasan. Selanjutnya, ASDP akan memperkuat keandalan armada, optimalisasi pola operasi, keselamatan pelayaran, serta strategi layanan berbasis karakteristik masing-masing lintasan.

CAPACITY AND DEVELOPMENT

The ferry transportation segment remains the core business of ASDP in serving the inter-island mobility of passengers, vehicles, and cargo. In 2025, the segment faced challenges on service volumes attributed to operational dynamics, fleet readiness, shifts in travel patterns, and competition across a number of routes. Moving forward, ASDP will strengthen fleet reliability, operating pattern optimization, maritime safety, and service strategies based on the distinct characteristics of each route.

SEGMEN USAHA PELABUHAN

Pada tahun 2025, infrastruktur pelabuhan yang dikelola Perseroan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah pelabuhan tetap sebanyak 37 pelabuhan dengan jumlah 89 dermaga pada 18 cabang di seluruh Indonesia. Dari sisi fasilitas dermaga, jumlah dermaga meningkat dari 88 unit pada tahun 2024 menjadi 89 unit pada tahun 2025, atau bertambah 1 unit setara 1,14%, yang terutama berasal dari peningkatan dermaga plengsengan dari 24 unit menjadi 25 unit atau naik 4,17%. Sementara itu, dermaga *moveable bridge* tetap sebanyak 61 unit dan dermaga ponton tetap sebanyak 3 unit. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Perseroan terus menjaga kesiapan dan

PORT BUSINESS SEGMENT

In 2025, the port infrastructure managed by the Company remained relatively stable compared to the preceding year, the number of ports remained the same at 37 ports encompassing 89 docks across 18 branches throughout Indonesia. From the dock facility perspective, the number of docks increased from 88 units in 2024 to 89 units in 2025, increased by 1 unit or a 1.14% expansion, which primarily resulted from addition in levee docks from 24 units to 25 units, representing a 4.17% rise. Meanwhile, moveable bridge docks stayed the same at 61 units, and floating docks remained at 3 units. This outlook reaffirms the Company's commitment to preserving the readiness and reliability of

keandalan infrastruktur pelabuhan sebagai simpul utama layanan penyeberangan, sekaligus memperkuat kapasitas pendukung operasional dalam melayani pergerakan penumpang, kendaraan, dan barang secara berkelanjutan.

port infrastructure as a vital node for ferry transportation services, while simultaneously strengthening the operational capacity required to sustain the movement of passengers, vehicles, and cargo.

Tabel Jumlah Infrastruktur Pelabuhan Tahun 2024-2025
Port Infrastructure Quantity in 2024-2025

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Jumlah Pelabuhan Total Port	37	37	-	-
Jumlah Dermaga Total Docks:	89	88	1	1,14
Moveable Bridge Moveable Bridge	61	61	-	-
Plengsengan Levee Dock	25	24	1	4,17
Ponton Floating	3	3	-	-

yang relatif terjaga, meskipun terdapat dinamika pada beberapa indikator layanan. Jasa sandar tercatat sebesar 1.086.150.395 GRT-*Call*, meningkat 334.652 GRT-*Call* atau 0,03% dibandingkan 1.085.815.743 GRT-*Call* pada tahun 2024. Peningkatan juga terlihat pada layanan kendaraan yang mencapai 13.896.104 unit, naik 256.899 unit atau 1,88%, serta jasa parkir yang terealisasi sebanyak 359.350 unit, meningkat 44.651 unit atau 14,19%. Sejalan dengan pergerakan kendaraan, pemeliharaan dermaga juga meningkat menjadi 13.896.104 unit, naik 256.899 unit atau 1,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pelabuhan masih menjadi salah satu penopang penting operasional Perseroan, terutama dalam mendukung kelancaran arus kendaraan dan layanan kapal.

Di sisi lain, beberapa indikator mengalami penurunan, terutama pada pas pelabuhan dan penumpang. Pas pelabuhan tercatat sebanyak 19.205.126, meningkat 117.575 atau 0,62% dibandingkan 19.087.551 pada tahun 2024, sedangkan jumlah penumpang mencapai 4.949.672 orang, turun 183.973 orang atau 3,58% dari 5.133.645 orang pada tahun sebelumnya. Penurunan jumlah penumpang tersebut menunjukkan adanya perubahan pola mobilitas pengguna jasa, yang perlu direspons melalui penguatan kualitas layanan, pengaturan arus yang lebih efektif, serta optimalisasi fasilitas pelabuhan. Secara keseluruhan, kinerja segmen pelabuhan tahun 2025 tetap menunjukkan fondasi

The performance of the port business segment demonstrated relatively sustained achievements, despite dynamics appearing across several service indicators. Docking services were recorded at 1,086,150,395 GRT-Call, up by 334,652 GRT-Call, or 0.03%, compared to 1,085,815,743 GRT-Call in 2024. Increase was also visible in vehicle services by attending 13,896,104 units, up by 256,899 units or 1.88%, and parking services by facilitating 359,350 units, increased by 44,651 units or 14.19%. In line with vehicle movements, dock maintenance also increased to 13,896,104 units, rising by 256,899 units or 1.88% compared to the prior year. These outcomes demonstrate that port activity remains a vital pillar supporting the operations of the Company, particularly in sustaining the smooth flow of vehicles and vessel services.

On the other side, several indicators recorded declines, particularly in port admission passes and passengers. Port admission passes were recorded at 19,205,126, rising by 117,575 or 0.62% compared to 19,087,551 in 2024, while passenger volume stood at 4,949,672 individuals, dropping by 183,973 individuals or 3.58% from 5,133,645 individuals in the preceding year. The decline in passenger volume indicates a shift in the mobility patterns of service users, which needs to be addressed through strengthening service quality, more effective flow management, and the optimization of port facilities. Overall, the performance of the port segment in 2025 continued to show a robust operational foundation,

operasional yang kuat, terutama melalui pertumbuhan jasa sandar, kendaraan, jasa parkir, dan pemeliharaan dermaga, namun tetap memerlukan penguatan strategi layanan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan aktivitas kendaraan dan pemulihan volume penumpang.

primarily through growth in docking services, vehicles, parking services, and dock maintenance, yet it requires strengthened service strategies to maintain a balance between vehicle service growth and passenger volume recovery.

Tabel Kinerja Segmen Bisnis Pelabuhan Tahun 2024-2025
Performance of Port Business Segment in 2024-2025

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Jasa Sandar (GRT-*Call*) Docking Services (GRT-*Call*)	1.086.150.395	1.085.815.743	334.652	0,03
Pas Pelabuhan Port Pass:	19.205.126	19.087.551	117.575	0,62
Penumpang (orang) Passenger (person)	4.949.672	5.133.645	(183.973)	(3,58)
Kendaraan (unit) Vehicle (unit)	13.896.104	13.639.207	256.897	1,88
Jasa Parkir (unit) Parking Service (unit)	359.350	314.699	44.651	14,19
Pemeliharaan Dermaga (unit) Dock Maintenance (unit)	13.896.104	13.639.205	256.899	1,88

KAPASITAS DAN PERKEMBANGAN

Segmen pelabuhan berkembang sebagai penopang penting operasional Perseroan melalui pengelolaan arus kapal, kendaraan, penumpang, dan layanan pendukung di kawasan pelabuhan. Pengembangan segmen ini diarahkan pada modernisasi fasilitas, peningkatan kapasitas layanan, penguatan manajemen lalu lintas pelabuhan, serta pemanfaatan teknologi agar operasional semakin efisien, tertib, dan terintegrasi.

CAPACITY AND DEVELOPMENT

The port segment develops as a vital pillar supporting the operations of the Company through flow management of vessels, vehicles, passengers, and supporting services within the port premises. The development of the segment is directed toward facility modernization, expanding service capacity, strengthening port traffic management, and leveraging technology to make operations increasingly efficient, orderly, and integrated.

SEGMEN USAHA ANEKA JASA DAN KERJA SAMA (UAJK)

Hingga 31 Desember 2025, ASDP melalui segmen usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama (UAJK) terus mengoptimalkan kegiatan operasional sebagai bagian dari upaya diversifikasi pendapatan dan pemanfaatan aset Perseroan. Segmen ini mencakup sejumlah layanan pendukung yang memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem penyeberangan dan kepelabuhanan, antara lain penjualan bahan bakar minyak, layanan penyeberangan Terminal Eksekutif, serta penyewaan ruang komersial pada tiga aset utama, yaitu Sosoro Mall, Anjungan Agung Mall, dan Plaza Marina Labuan Bajo. Melalui pengelolaan segmen UAJK,

ANCILLARY SERVICES AND PARTNERSHIP BUSINESS SEGMENT

As of 31 December 2025, ASDP, through the Ancillary Services and Partnership business segment, continuously optimized operational activities as part of efforts to diversify revenue and utilize the assets of the Company. The segment encompasses a number of supporting services that are closely intertwined to the ferry transportation and port ecosystem, including the sale of fuel oil, Executive Terminal services, as well as the rental of commercial space across three primary assets, namely Sosoro Mall, Anjungan Agung Mall, and Plaza Marina Labuan Bajo. Through management of the UAJK

Perseroan berupaya memperkuat kontribusi pendapatan *non-farebox*, meningkatkan nilai tambah aset, serta menghadirkan layanan pendukung yang lebih terintegrasi bagi pengguna jasa dan pemangku kepentingan.

segment, the Company endeavors to strengthen non-farebox revenue contributions, improve the added value of assets, and deliver better integrated supporting services for service users and stakeholders.

PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Kinerja produksi bahan bakar minyak pada tahun 2025 tercatat sebesar 99.228.400 liter, menurun 2.337.700 liter atau 2,30% dibandingkan 101.566.100 liter pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya produksi SPBBK Merak yang mencapai 90.474.400 liter, turun 2.727.700 liter atau 2,93% dibandingkan 93.202.100 liter pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, SPBBK Ketapang mencatat pertumbuhan positif dengan realisasi sebesar 8.754.000 liter, meningkat 390.000 liter atau 4,66% dibandingkan 8.364.000 liter pada tahun 2024.

FUEL SALES

The production performance of fuel oil in 2025 was recorded at 99,228,400 liters, dropping by 2.337.700 liters or 2.30% compared to 101,566,100 liters in 2024. The contraction was primarily influenced by diminished production at SPBBK Merak, which reached 90,474,400 liters, down by 2.727.700 liters or 2.93% compared to 93,202,100 liters in the preceding year. On the other hand, SPBBK Ketapang recorded positive growth with a realization of 8,754,000 liters, increasing by 390,000 liters or 4.66% compared to 8,364,000 liters in 2024.

Tabel Produksi Bahan Bakar Minyak Tahun 2024-2025 (dalam satuan liter)
Fuel Oil Production in 2024-2025 (in liters)

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
SPBBK Merak	90.474.400	93.202.100	(2.727.700)	(2,93)
SPBBK Ketapang	8.754.000	8.364.000	390.000	4,66
Jumlah Total	**99.228.400**	**101.566.100**	**(2.337.700)**	**(2,30)**

PENYEBERANGAN TERMINAL EKSEKUTIF

Terminal Eksekutif Gabungan Merak-Bakauheni merupakan layanan bernilai tambah yang dikembangkan Perseroan untuk menghadirkan pengalaman penyeberangan yang lebih nyaman, tertib, dan efisien pada koridor utama Jawa-Sumatera. Pada tahun 2025, total produksi layanan tercatat sebesar 1.166.460, menurun 152.345 atau 11,55% dibandingkan 1.318.805 pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya volume pejalan kaki sebesar 58.219 orang atau 13,56% menjadi 371.048 orang, serta kendaraan golongan IV sebagai kontributor terbesar yang menurun 82.833 unit atau 11,56% menjadi 633.769 unit. Penurunan juga terjadi pada kendaraan golongan II sebesar 1.690 unit atau 1,94%, kendaraan golongan V sebesar 918 unit atau 11,51%, dan kendaraan golongan VI sebesar 8.917 unit atau 11,75%.

EXECUTIVE TERMINAL MANAGEMENT

The Merak-Bakauheni Joint Executive Terminal is a value-added service developed by the Company to deliver a more comfortable, orderly, and efficient ferrying experience on the flagship Java-Sumatra route. In 2025, total service produced was recorded at 1,166,460, decreasing by 152,345 or 11.55% compared to 1,318,805 in 2024. The reduction was primarily influenced by a contraction in pedestrian volume by 58,219 individuals or 13.56% to 371,048 individuals, and class IV vehicles as the largest contributor decreased by 82,833 units, or 11.56% to 633,769 units. Decline also occurred in class II vehicles by 1,690 units or 1.94%, class V vehicles by 918 units or 11.51%, and class VI vehicles by 8,917 units or 11.75%.

Meski demikian, beberapa golongan kendaraan masih mencatat pertumbuhan positif. Kendaraan golongan I meningkat 26 unit atau 17,33% menjadi 176 unit, sementara kendaraan golongan III meningkat 206 unit atau 10,49% menjadi 2.169 unit. Namun, kenaikan pada kedua golongan tersebut belum mampu mengimbangi penurunan pada pejalan kaki dan kendaraan golongan IV yang memiliki kontribusi dominan terhadap total produksi layanan. Kondisi ini menjadi masukan bagi Perseroan untuk memperkuat daya tarik layanan eksekutif melalui peningkatan kualitas pengalaman pelanggan, penajaman segmentasi pengguna jasa, optimalisasi pola operasi, serta diferensiasi layanan agar Terminal Eksekutif Gabungan Merak–Bakauheni dapat kembali memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap kinerja usaha.

Nonetheless, several vehicle classes posted positive growth. Class I vehicles rose by 26 units, or 17.33%, to 176 units. While class III vehicles increased by 206 units, or 10.49%, to 2,169 units. However, the increase in both classes was unable to offset the declines in pedestrians and class IV vehicles, having hold a dominant contribution toward total service production. The condition serves as information for the Company to strengthen the appeal of executive services through improving customer experience quality, sharpening service user segmentation, optimizing operating patterns, and differentiating services so that the Merak–Bakauheni Joint Executive Terminal can deliver a more optimal contribution toward business performance.

Tabel Produksi Penyeberangan Terminal Eksekutif Gabungan Merak-Bakauheni Tahun 2024-2025
Ferry Transportation Services Output of Merak and Bakauheni Joint Executive Terminals in 2024-2025

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Pejalan Kaki Pedestrian	371.048	429.267	(58.219)	(13,56)
Kendaraan Golongan I Vehicles Class I	176	150	26	17,33
Kendaraan Golongan II Vehicles Class II	85.268	86.958	(1.690)	(1,94)
Kendaraan Golongan III Vehicles Class III	2.169	1.963	206	10,49
Kendaraan Golongan IVA Vehicles Class IVA	633.769	716.602	(82.833)	(11,56)
Kendaraan Golongan VA Vehicles Class VA	7.057	7.975	(918)	(11,51)
Kendaraan Golongan VIA Vehicles Class VIA	66.973	75.890	(8.917)	(11,75)
Jumlah Total	**1.166.460**	**1.318.805**	**(152.345)**	**(11,55)**

SEWA RUANGAN

Kinerja produksi sewa ruangan tahun 2025 menunjukkan perbaikan pemanfaatan aset komersial Perseroan, tercermin dari peningkatan luas area tersewa dan okupansi pada seluruh lokasi utama. Pada Sosoro Mall, meskipun *net lettable area* menurun 15,41% menjadi 7.787, luas area tersewa meningkat 75,53% menjadi 2.292,36 dan mendorong okupansi naik menjadi 29,44%. Anjungan Agung Mall juga mencatat peningkatan luas area tersewa sebesar 23,17% menjadi 1.083,90, dengan okupansi naik menjadi 15,86%. Sementara itu, Plaza Marina Labuan Bajo mencatat kinerja paling kuat, dengan *net lettable area* naik 3,18% menjadi 2.335, luas area tersewa meningkat 58,62% menjadi 1.841,53, dan okupansi mencapai 78,87%.

PROPERTY RENT

The property rental production in 2025 demonstrated an improvement in the utilization of the Company's commercial assets, as shown in increased leased area square footage and occupancy across all primary locations. At Sosoro Mall, although the net lettable area decreased by 15.41% to 7,787, the leased area square footage expanded by 75.53% to 2,292.36 and drove occupancy up to 29.44%. Anjungan Agung Mall also recorded an increase in leased area square footage by 23.17% to 1,083.90, with occupancy rising to 15.86%. Meanwhile, Plaza Marina Labuan Bajo recorded the strongest performance, with net lettable area rising by 3.18% to 2,335, leased area square footage expanding by 58.62% to 1,841.53, and occupancy securing 78.87%.

Tabel Produksi Sewa Ruangan Tahun 2024-2025

Property Rent Production in 2024-2025

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Sosoro Mall				
Area Bersih Sewa (NLA) Net Lettable Area (NLA)	7.787	9.206	(1.419)	(15,41)
Luas Area Tersewa Rented Area	2.292,36	1.306	986,36	75,53
Tingkat Okupansi (%) Occupancy Rate (%)	29,44	14,19	15,25	107,47
Anjungan Agung Mall				
Area Bersih Sewa (NLA) Net Lettable Area (NLA)	6.833	6.997	(164)	(2,34)
Luas Area Tersewa Rented Area	1.083,90	880	203,90	23,17
Tingkat Okupansi (%) Occupancy Rate (%)	15,86	12,58	3,28	26,07
Plaza Marina Labuan Bajo				
Area Bersih Sewa (NLA) Net Lettable Area (NLA)	2.335	2.263	72	3,18
Luas Area Tersewa Rented Area	1.841,53	1.161	680,53	58,62
Tingkat Okupansi (%) Occupancy Rate (%)	78,87	73,41	5,46	7,44

KAPASITAS DAN PERKEMBANGAN

Segmen Aneka Usaha Jasa dan Kerja Sama berperan dalam diversifikasi usaha melalui penjualan BBM, Terminal Eksekutif, penyewaan ruang komersial, serta pemanfaatan aset. Perkembangan segmen ini menunjukkan ruang penguatan pada pendapatan *non-farebox* dan profitabilitas. Selanjutnya, ASDP akan fokus pada peningkatan utilisasi aset, kurasi mitra dan tenant, serta penguatan kerja sama strategis untuk menciptakan kontribusi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

CAPACITY AND DEVELOPMENT

The Ancillary Services and Partnership segment plays a role in business diversification through fuel sales, Executive Terminals, commercial property rental, and asset utilization. The development of the segment shows room for strengthening non-farebox revenue and profitability. Moving forward, ASDP will focus on improving asset utilization, curating partners and tenants, and strengthening strategic cooperation to generate a healthier and more sustainable contribution.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PER SEGMEN

KONTRIBUSI PENDAPATAN PER SEGMEN PADA PENDAPATAN PERUSAHAAN

Kontribusi pendapatan Perseroan pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang berbeda pada masing-masing segmen usaha. Pendapatan usaha penyeberangan masih menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp3,11 triliun, namun menurun Rp127,66 miliar atau 3,94% dibandingkan Rp3,24 triliun pada tahun 2024. Di sisi lain, pendapatan usaha pelabuhan mencatat pertumbuhan positif sebesar Rp63,12 miliar atau 5,39%, dari Rp1,17 triliun menjadi Rp1,23 triliun. Segmen aneka jasa dan kerja sama juga tetap tumbuh, meskipun terbatas, sebesar Rp2,45 miliar atau 0,40% menjadi Rp617,60 miliar. Secara konsolidasi, pendapatan usaha Perseroan tercatat sebesar Rp4,96 triliun, menurun Rp62,09 miliar atau 1,24% dibandingkan Rp5,02 triliun pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan pada segmen penyeberangan masih menjadi faktor utama penurunan pendapatan, sementara segmen pelabuhan berperan sebagai penyeimbang melalui pertumbuhan layanan yang lebih solid.

Dari sisi laba usaha, kinerja per segmen menunjukkan pergeseran kontribusi yang cukup signifikan. Laba usaha segmen penyeberangan tercatat sebesar Rp689,25 miliar, menurun Rp280,72 miliar atau 28,94% dibandingkan Rp969,97 miliar pada tahun 2024, sejalan dengan tekanan pada volume produksi dan pendapatan segmen tersebut. Sebaliknya, segmen pelabuhan mencatat peningkatan laba usaha yang kuat menjadi Rp827,96 miliar, naik Rp191,01 miliar atau 29,99% dibandingkan Rp636,96 miliar pada tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan meningkatnya peran segmen pelabuhan sebagai penopang profitabilitas Perseroan. Sementara itu, segmen aneka jasa dan kerja sama mencatat rugi usaha sebesar Rp131,76 miliar, berbalik dari laba usaha sebesar Rp20,03 miliar pada tahun 2024, sehingga menekan laba usaha konsolidasi.

REVENUE AND PROFITABILITY BY SEGMENT

REVENUE CONTRIBUTION BY SEGMENT TO THE COMPANY'S TOTAL REVENUE

The revenue contribution of the Company in 2025 showed differing dynamics across each business segment. Ferry transportation business revenue remained the primary contributor with a realization of Rp3.11 trillion, yet it decreased by Rp127.66 billion or 3.94% compared to Rp3.24 trillion in 2024. On the other hand, port business revenue recorded positive growth of Rp63.12 billion or 5.39%, rising from Rp1.17 trillion to Rp1.23 trillion. The ancillary services and partnership segment also sustained modest growth, by Rp2.45 billion or 0.40% to Rp617.60 billion. On a consolidated basis, the operating revenue of the Company was recorded at Rp4,96 trillion, down by Rp62.09 billion or 1.24% compared to Rp5.02 trillion in the preceding year. The state of affairs demonstrates that pressure on the ferry transportation segment remained the primary factor behind the revenue decline, while the port segment functioned as a counterbalance through more solid service growth.

From the operating profit perspective, performance of each segment showed drastic shift in contributions. The operating profit of the ferry transportation segment was recorded at Rp689.25 billion, down by Rp280.72 billion, or 28.94%, compared to Rp969.97 billion in 2024, as the production volumes and revenue in the segment pressured. In contrast, the operating profit of port segment spiked to Rp827.96 billion, rising by Rp191.01 billion, or 29.99%, compared to Rp636.96 billion in 2024. The achievement shows the port segment's rising role as the pillar for the Company's profitability. The ancillary services and partnership segment recorded an operating loss of Rp131.76 billion, reversing from the operating profit of Rp20.03 billion in 2024, thereby compressing consolidated operating profit. Overall, the total

Secara keseluruhan, jumlah laba usaha Perseroan mencapai Rp1,39 triliun, menurun Rp241,51 miliar atau 14,84% dibandingkan Rp1,63 triliun pada tahun 2024.

Dengan komposisi tersebut, kinerja tahun 2025 mencerminkan pentingnya penguatan portofolio usaha yang lebih seimbang antarsegmen. Segmen penyeberangan tetap menjadi basis utama pendapatan, namun membutuhkan optimalisasi lebih lanjut melalui peningkatan keandalan armada, penguatan pola operasi, dan strategi komersial yang lebih adaptif. Di sisi lain, pertumbuhan laba usaha segmen pelabuhan memperlihatkan ruang penguatan yang strategis bagi Perseroan, khususnya melalui peningkatan produktivitas layanan, pengelolaan arus kendaraan dan penumpang, serta optimalisasi aset pelabuhan. Adapun segmen aneka jasa dan kerja sama perlu diarahkan pada perbaikan profitabilitas, penguatan model bisnis, serta peningkatan efektivitas pengelolaan aset agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

operating profit of the Company was recorded at Rp1.39 trillion, decreasing by Rp241.51 billion, or 14.84%, compared to Rp1.63 trillion in 2024.

The composition of 2025 performance reflects the importance of strengthening a more balanced business portfolio across segments. The ferry transportation segment remains the primary base for revenue, but requires further optimization through improving fleet reliability, strengthening operating patterns, and adopting more adaptive commercial strategies. On the other side, operating profit growth in the port segment reveals a strategic strengthening space for the Company, particularly through improving service productivity, managing vehicle and passenger flows, and optimizing port assets. Meanwhile, the ancillary services and partnership segment needs to be directed toward profit remediation, strengthening business models, and improving asset management effectiveness to deliver a more optimal contribution toward the Company's performance sustainably.

Tabel Kontribusi Pendapatan per Segmen pada Pendapatan Perusahaan (dalam Rp juta)
Revenue Contribution per Segment to Company Revenue (in Rp million)

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Pendapatan Usaha Penyeberangan Ferry Transportation Revenue	3.109.897	3.237.560	(127.663)	(3,94)
Pendapatan Usaha Pelabuhan Port Services Revenue	1.234.970	1.171.851	63.119	5,39
Pendapatan Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama Ancillary Services and Partnership Revenue	617.598	615.148	2.450	0,40
Pendapatan Usaha Total Revenue	4.962.465	5.024.559	(62.094)	(1,24)

Tabel Kontribusi Laba Usaha per Segmen pada Laba Usaha Perusahaan (dalam Rp juta)
Operating Profit Contribution per Segment to the Company's Operating Profit (in Rp million)

Uraian *Description*	2025	2024	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Laba Usaha Segmen Usaha Penyeberangan Operating Profit of Ferry Transportation Segment	689.248	969.972	(280.724)	(28,94)
Laba Usaha Segmen Usaha Pelabuhan Operating Profit of Port Services Segment	827.960	636.955	191.005	29,99
Laba Usaha Segmen Aneka Jasa dan Kerja Sama Operating Profit of Ancillary Services and Partnership Segment	(131.760)	20.028	(151.788)	(757,90)
Jumlah Laba Usaha Total Operating Profit	**1.385.448**	**1.626.955**	**(241.507)**	**(14,84)**

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Adapun rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

The details of the Company's consolidated financial position report as of 31 December 2025 are as follows:

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Financial Position (in Rp million)

Deskripsi *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
ASET ASSETS				
ASET LANCAR CURRENT ASSETS				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.940.072	1.836.375	103.697	5,65
Piutang Usaha Trade receivables	73.634	31.750	41.884	131,92
Pihak Berelasi Related parties	38.596	11.894	26.702	224,50
Pihak Ketiga Third parties	35.038	19.856	15.182	76,46
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	62.629	47.115	15.514	32,93
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income	100.622	60.668	39.954	65,86
Pihak Berelasi Related parties	95.551	59.775	35.776	59,85
Pihak Ketiga Third parties	5.071	893	4.178	467,86
Persediaan Inventories	146.050	128.289	17.761	13,84
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	12.408	9.214	3.194	34,66
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	64.072	51.820	12.252	23,64
Jumlah Aset Lancar Total Current Asset	**2.399.487**	**2.165.232**	**234.255**	**10,82**
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSET				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Pihak Berelasi Accrued Income - Related parties	65.438	85.627	(20.189)	(23,58)
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	275.387	275.435	(48)	(0,02)
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	391	468	(77)	(16,45)

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Financial Position (in Rp million)

Deskripsi *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Properti Investasi Investment Property	699.760	701.344	(1.584)	(0,23)
Aset Tetap Fixed Assets	7.872.524	8.132.548	(260.024)	(3,20)
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	25.246	27.443	(2.197)	(8,01)
Aset Takberwujud Intangible Assets	16.388	23.006	(6.618)	(28,77)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	65	61	4	6,56
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**8.955.198**	**9.245.932**	**(290.734)**	**(3,14)**
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	**11.354.685**	**11.411.164**	**(56.479)**	**(0,49)**
LIABILITAS **LIABILITIES**				
LIABILITAS JANGKA PENDEK **CURRENT LIABILITIES**				
Utang Usaha Trade Payables	456.978	449.646	7.332	1,63
Pihak Berelasi Related parties	55.217	78.475	(23.258)	(29,64)
Pihak Ketiga Third parties	401.761	371.171	30.590	8,24
Utang Pajak Tax Payables	43.564	42.369	1.195	2,82
Utang Asuransi Insurance Debt	26.854	25.836	1.018	3,94
Beban Akrual dan Provisi Accrued Expense and Provision	381.256	359.207	22.049	6,14
Utang Bank Jangka Pendek Short Term Bank Loans	-	23.836	(23.836)	(100,00)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	121.957	117.558	4.399	3,74
Pihak Berelasi Related parties	757	13.408	(12.651)	(94,35)
Pihak Ketiga Third parties	121.200	104.150	17.050	16,37
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang: Short-Term Portion of Long-Term Loans:	310.679	311.666	(987)	(0,32)
Pinjaman Bank Bank Loans	259.698	263.432	(3.734)	(1,42)
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan	44.400	34.300	10.100	29,45
Liabilitas Sewa Lease Liability	6.581	13.934	(7.353)	(52,77)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**1.341.286**	**1.330.119**	**11.167**	**0,84**

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Financial Position (in Rp million)

Deskripsi *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
LIABILITAS JANGKA PANJANG **NON-CURRENT LIABILITIES**				
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek Non-Current Liabilities - Net of Short-Term Portion:	798.444	1.089.396	(290.952)	(26,71)
Pinjaman Bank Bank Loans	206.037	449.402	(243.365)	(54,15)
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan	587.663	630.902	(43.239)	(6,85)
Liabilitas Sewa Lease Liability	4.744	9.092	(4.348)	(47,82)
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Other Non-Current Liabilities	6.049	7.345	(1.296)	(17,64)
Liabilitas Imbalan Pascakerja Retirement Benefit Liabilities	106.644	117.308	(10.664)	(9,09)
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	67.300	68.140	(840)	(1,23)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	978.437	1.282.190	(303.753)	(23,69)
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	2.319.723	2.612.308	(292.585)	(11,20)
EKUITAS **EQUITY**				
Modal Dasar - 10.000.000 Saham (2024:10.000.000 Saham) **Share Capital - 10.000.000 Shares (2024: 10.000.000 Shares)**				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.561.760 Saham (2024: 5.561.760 Saham) Issued and Fully Paid Capital - 5,561,760 Shares (2024: 5,561,760 Shares)	5.561.760	5.561.760	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-up Capital	8.445	8.445	-	-
Saldo Laba **Retained Earnings**				
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated Retained Earnings	2.807.584	2.413.803	393.781	16,31
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated Retained Earnings	461.739	631.837	(170.098)	(26,92)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada: **Equity Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	8.839.528	8.615.846	223.682	2,60
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	195.434	183.009	12.425	6,79
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	9.034.962	8.798.855	236.107	2,68
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	11.354.685	11.411.164	(56.479)	(0,49)

ASET

Jumlah aset ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,35 triliun, menurun Rp56,48 miliar atau 0,49% dibandingkan Rp11,41 triliun pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya aset tidak lancar, khususnya aset tetap dan aset tak berwujud, meskipun aset lancar masih mencatat pertumbuhan. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur aset Perseroan tetap kuat, dengan dukungan likuiditas yang meningkat dan pengelolaan aset tidak lancar yang lebih selektif.

ASSETS

The total assets of ASDP in 2025 stood at Rp11.35 trillion, representing a decline of Rp56.48 billion, or 0.49%, compared to Rp11.41 trillion in 2024. The contraction was driven by a decrease in non-current assets, specifically fixed assets and intangible assets, despite continued growth in current assets. The composition demonstrates that the Company's asset structure remains robust, supported by improved liquidity and more selective management of non-current assets.

ASET LANCAR

Aset lancar ASDP meningkat dari Rp2,17 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,40 triliun pada tahun 2025, atau naik Rp234,26 miliar setara 10,82%. Peningkatan ini terutama ditopang oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, persediaan, pajak dibayar di muka, serta aset lancar lainnya. Pertumbuhan aset lancar mencerminkan penguatan likuiditas dan kapasitas Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek.

CURRENT ASSETS

The current assets expanded from Rp2.17 trillion in 2024 to Rp2.40 trillion in 2025, marking an increase of Rp234.26 billion or 10.82%. The growth was primarily underpinned by higher cash and cash equivalents, trade receivables, accrued revenue, inventories, prepaid taxes, and other current assets. The expansion in current assets reflects stronger liquidity and the Company's capacity to meet short-term operational requirements.

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas tercatat sebesar Rp1,94 triliun pada tahun 2025, meningkat Rp103,70 miliar atau 5,65% dibandingkan Rp1,84 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan posisi likuiditas Perseroan, sehingga memberikan ruang yang lebih baik dalam mendukung kebutuhan operasional, pemenuhan kewajiban jangka pendek, serta fleksibilitas pendanaan.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents were recorded at Rp1.94 trillion in 2025, rising by Rp103.70 billion or 5.65% compared to Rp1.84 trillion in 2024. The upward movement indicates an improved liquidity position for the Company, providing better financial buffer to support operational needs, satisfy short-term obligations, and maintain funding flexibility.

PIUTANG USAHA

Piutang usaha meningkat menjadi Rp73,63 miliar pada tahun 2025, naik Rp41,88 miliar atau 131,92% dibandingkan Rp31,75 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan piutang pihak berelasi dan pihak ketiga, yang mencerminkan peningkatan tagihan atas aktivitas usaha Perseroan. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan kolektibilitas yang disiplin agar tidak menekan arus kas operasional.

TRADE RECEIVABLES

Trade receivables increased to Rp73.63 billion in 2025, growing by Rp41.88 billion or 131.92% from Rp31.75 billion in 2024. This increase was primarily derived from higher receivables from related parties and third parties, reflecting an increase in billings from the Company's business activities. The condition necessitates disciplined collection management to avoid placing pressure on operational cash flows.

PIUTANG LAIN-LAIN

Pendapatan yang masih harus diterima meningkat dari Rp60,67 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp100,62 miliar pada tahun 2025, atau naik Rp39,95 miliar setara 65,86%. Kenaikan ini terutama berasal dari pihak berelasi yang meningkat Rp35,78 miliar, serta pihak ketiga yang meningkat Rp4,18 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pendapatan yang telah menjadi hak Perseroan namun belum diterima secara kas pada akhir periode pelaporan.

OTHER RECEIVABLES

Accrued revenue rose from Rp60.67 billion in 2024 to Rp100.62 billion in 2025, representing an increase of Rp39.95 billion or 65.86%. The growth primarily originated from related parties, which increased by Rp35.78 billion, and third parties, which rose by Rp4.18 billion. The increase indicates revenue that the Company was entitled to but had not yet received in cash by the end of the reporting period.

PERSEDIAAN

Persediaan tercatat sebesar Rp146,05 miliar pada tahun 2025, meningkat Rp17,76 miliar atau 13,84% dibandingkan Rp128,29 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kebutuhan persediaan untuk mendukung kesinambungan operasional, khususnya dalam menjaga kesiapan layanan dan kebutuhan pendukung kegiatan usaha Perseroan.

INVENTORIES

Inventories stood at Rp146.05 billion in 2025, reflecting an increase of Rp17.76 billion, or 13.84%, compared to Rp128.29 billion in 2024. The expansion indicates higher inventory requirements to support operational continuity, particularly in maintaining service readiness and meeting the supporting needs of the Company's business activities.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pajak dibayar di muka meningkat menjadi Rp12,41 miliar pada tahun 2025, naik Rp3,19 miliar atau 34,66% dibandingkan Rp9,21 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kenaikan pembayaran pajak yang belum dapat dikreditkan atau diperhitungkan pada periode berjalan, sehingga dicatat sebagai aset lancar Perseroan.

PREPAID TAXES

Prepaid taxes rose to Rp12.41 billion in 2025, an increase of Rp3.19 billion or 34.66% compared to Rp9.21 billion in 2024. The increase reflects higher tax payments that could not yet be credited or offset during the current period, and were consequently recorded as current assets of the Company.

BEBAN DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Uang muka dan biaya dibayar di muka tercatat sebesar Rp64,07 miliar pada tahun 2025, meningkat Rp12,25 miliar atau 23,64% dibandingkan Rp51,82 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pembayaran di muka untuk mendukung kebutuhan operasional dan kegiatan usaha yang manfaat ekonominya akan direalisasikan pada periode berikutnya.

PREPAYMENTS AND ADVANCES

Advances and prepayments were recorded at Rp64.07 billion in 2025, representing an increase of Rp12.25 billion or 23.64% against Rp51.82 billion in 2024. The growth indicates an increase in advance payments to support operational requirements and business activities, the economic benefits of which will be realized in subsequent periods.

ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya meningkat menjadi Rp62,63 miliar pada tahun 2025, naik Rp15,51 miliar atau 32,93% dibandingkan Rp47,12 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini turut memperkuat aset lancar Perseroan dan mencerminkan adanya tambahan pos aset jangka pendek yang mendukung kebutuhan operasional dan pengelolaan keuangan.

OTHER CURRENT ASSETS

Other current assets increased to Rp62.63 billion in 2025, rising by Rp15.51 billion or 32.93% from Rp47.12 billion in 2024. The expansion further reinforced the Company's current assets and reflects additional short-term asset items supporting operational needs and financial management.

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar ASDP tercatat sebesar Rp8,96 triliun pada tahun 2025, menurun Rp290,73 miliar atau 3,14% dibandingkan Rp9,25 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya aset tetap, aset hak guna, aset tak berwujud, serta pendapatan yang masih harus diterima pihak berelasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian nilai aset jangka panjang, termasuk dampak penyusutan, amortisasi, dan pengelolaan aset tetap Perseroan.

NON-CURRENT ASSETS

ASDP's non-current assets were recorded at Rp8.96 trillion in 2025, a decrease of Rp290.73 billion or 3.14% compared to Rp9.25 trillion in 2024. The decline was primarily influenced by decreases in fixed assets, right-of-use assets, intangible assets, and accrued revenue from related parties. These dynamics reflect carrying value adjustments of long-term assets, including the impact of depreciation, amortization, and the management of the Company's fixed assets.

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PIHAK BERELASI

Pendapatan yang masih harus diterima dari pihak berelasi pada aset tidak lancar tercatat sebesar Rp65,44 miliar pada tahun 2025, menurun Rp20,19 miliar atau 23,58% dibandingkan Rp85,63 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya tagihan jangka panjang kepada pihak berelasi, yang menunjukkan adanya penyelesaian atau reklasifikasi atas hak pendapatan Perseroan.

ACCRUED REVENUE FROM RELATED PARTIES

Accrued revenue from related parties under non-current assets stood at Rp65.44 billion in 2025, declining by Rp20.19 billion or 23.58% compared to Rp85.63 billion in 2024. The decrease reflects a reduction in long-term billings to related parties, indicating the settlement or reclassification of the Company's revenue entitlements.

ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset keuangan tidak lancar lainnya relatif stabil, tercatat sebesar Rp275,39 miliar pada tahun 2025 dibandingkan Rp275,44 miliar pada tahun 2024, atau menurun tipis Rp48 juta setara 0,02%. Pergerakan yang terbatas ini menunjukkan bahwa komposisi aset keuangan jangka panjang Perseroan relatif terjaga sepanjang periode pelaporan.

OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS

Other non-current financial assets remained stable at Rp275.39 billion in 2025 compared to Rp275.44 billion in 2024, representing a marginal decline of Rp48 million or 0.02%. The limited movement indicates that the composition of the Company's long-term financial assets was relatively well-maintained throughout the reporting period.

UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Uang muka dan biaya dibayar di muka pada aset tidak lancar tercatat sebesar Rp391 juta pada tahun 2025, menurun Rp77 juta atau 16,45% dibandingkan Rp468 juta pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya pembayaran di muka jangka panjang yang manfaat ekonominya direalisasikan pada periode setelah satu tahun.

PREPAYMENTS AND ADVANCES

Advances and prepayments under non-current assets were recorded at Rp391 million in 2025, decreasing by Rp77 million or 16.45% from Rp468 million in 2024. The decline indicates a reduction in long-term advance payments whose economic benefits are to be realized beyond one year.

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi tercatat sebesar Rp699,76 miliar pada tahun 2025, menurun Rp1,58 miliar atau 0,23% dibandingkan Rp701,34 miliar pada tahun 2024. Penurunan yang relatif terbatas ini menunjukkan bahwa nilai properti investasi Perseroan masih terjaga, dengan perubahan terutama berasal dari penyesuaian nilai tercatat pada periode berjalan.

INVESTMENT PROPERTY

Investment property stood at Rp699,76 billion in 2025, decreasing by Rp1.58 billion or 0.23% compared to Rp701.34 billion in 2024. The limited decline indicates that the value of the Company's investment properties was well-preserved, with modifications stemming primarily from carrying value adjustments in the current period.

ASET TETAP

Aset tetap tercatat sebesar Rp7,87 triliun pada tahun 2025, menurun Rp260,02 miliar atau 3,20% dibandingkan Rp8,13 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi faktor utama berkurangnya aset tidak lancar dan mencerminkan dampak penyusutan serta pengelolaan aset operasional Perseroan, terutama pada sarana dan prasarana pendukung layanan penyeberangan dan kepelabuhanan.

FIXED ASSET

Fixed asset was recorded at Rp7.87 trillion in 2025, a decrease of Rp260.02 billion or 3.20% from Rp8.13 trillion in 2024. The reduction was the primary driver behind the contraction of non-current assets, reflecting the impact of depreciation and the operational asset management of the Company, particularly regarding supporting infrastructure and facilities for ferry transport and port services.

ASET HAK GUNA

Aset hak guna menurun dari Rp27,44 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp25,25 miliar pada tahun 2025, atau turun Rp2,20 miliar setara 8,01%. Penurunan ini mencerminkan amortisasi atas aset yang digunakan Perseroan berdasarkan pengaturan sewa atau hak penggunaan aset sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku.

RIGHT-OF-USE ASSETS

Right-of-use assets decreased from Rp27.44 billion in 2024 to Rp25.25 billion in 2025, or a decline of Rp2.20 billion, equivalent to 8.01%. The decrease reflects the amortization of assets utilized by the Company under lease arrangements or asset-use rights in compliance with applicable accounting standards.

ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud tercatat sebesar Rp16,39 miliar pada tahun 2025, menurun Rp6,62 miliar atau 28,77% dibandingkan Rp23,01 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama mencerminkan amortisasi atas aset tidak berwujud yang dimiliki Perseroan, termasuk aset yang berkaitan dengan sistem, perangkat lunak, atau hak ekonomi lainnya.

INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets stood at Rp16.39 billion in 2025, declining by Rp6.62 billion or 28.77% compared to Rp23.01 billion in 2024. The decrease primarily reflects the amortization of intangible assets held by the Company, including assets relating to systems, software, or other economic rights.

ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset pajak tangguhan meningkat menjadi Rp65 juta pada tahun 2025, naik Rp4 juta atau 6,56% dibandingkan Rp61 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya pengakuan manfaat pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer sesuai standar akuntansi yang berlaku.

LIABILITAS

Jumlah liabilitas ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,32 triliun, menurun Rp292,59 miliar atau 11,20% dibandingkan Rp2,61 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas jangka panjang, khususnya pinjaman bank dan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun. Kondisi ini mencerminkan penguatan struktur permodalan Perseroan melalui penurunan kewajiban secara konsolidasi.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp1,34 triliun pada tahun 2025, meningkat Rp11,17 miliar atau 0,84% dibandingkan Rp1,33 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan utang usaha pihak ketiga, utang pajak, utang asuransi, beban akrual dan provisi, serta liabilitas jangka pendek lainnya, meskipun terdapat penurunan utang bank jangka pendek dan bagian jangka pendek dari utang jangka panjang. Secara umum, kenaikan yang terbatas menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek Perseroan masih relatif terkendali.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang menurun dari Rp1,28 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp978,44 miliar pada tahun 2025, atau turun Rp303,75 miliar setara 23,69%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman bank, pinjaman sindikasi, liabilitas sewa, liabilitas imbalan pascakerja, serta liabilitas pajak tangguhan. Penurunan liabilitas jangka panjang memperkuat profil solvabilitas Perseroan dan menurunkan eksposur kewajiban jangka panjang.

DEFERRED TAX ASSETS

Deferred tax assets increased to Rp65 million in 2025, rising by Rp4 million or 6.56% from Rp61 million in 2024. The increase indicates the recognition of deferred tax benefits arising from temporary differences in accordance with applicable accounting standards.

LIABILITIES

ASDP's total liabilities in 2025 were recorded at Rp2.32 trillion, reflecting a decrease of Rp292.59 billion or 11.20% compared to Rp2.61 trillion in 2024. The decline was primarily driven by a reduction in long-term liabilities, particularly bank loans and long-term liabilities net of current maturities. The condition reflects the strengthening of the Company's capital structure through a consolidated reduction in obligations.

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities stood at Rp1.34 trillion in 2025, representing an increase of Rp11.17 billion or 0.84% compared to Rp1.33 trillion in 2024. The increase was primarily driven by higher trade payables to third parties, tax payables, insurance payables, accrued expenses and provisions, as well as other current liabilities, despite decreases in short-term bank loans and the current portion of long-term debt. Generally, the limited increase indicates that the Company's short-term obligations remain well within control.

NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current liabilities decreased from Rp1.28 trillion in 2024 to Rp978.44 billion in 2025, falling by Rp303.75 billion or 23.69%. The reduction was primarily influenced by decreases in bank loans, syndicated loans, lease liabilities, post-employment benefit obligations, and deferred tax liabilities. The decline in long-term liabilities strengthens the Company's solvency profile and lowers its exposure to long-term obligations.

EKUITAS

Ekuitas ASDP meningkat dari Rp8,80 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp9,03 triliun pada tahun 2025, atau naik Rp236,11 miliar setara 2,68%. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya serta peningkatan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali. Pertumbuhan ekuitas ini menunjukkan bahwa struktur permodalan Perseroan tetap kuat dan mampu menopang keberlanjutan usaha.

EQUITY

ASDP's equity expanded from Rp8.80 trillion in 2024 to Rp9.03 trillion in 2025, rising by Rp236.11 billion or 2.68%. The expansion was primarily driven by an increase in appropriated retained earnings along with growth in equity attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests. The equity growth demonstrates that the Company's capital structure remains strong and capable of supporting business sustainability.

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Jumlah liabilitas dan ekuitas ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,35 triliun, menurun Rp56,48 miliar atau 0,49% dibandingkan Rp11,41 triliun pada tahun 2024. Pergerakan tersebut sejalan dengan penurunan jumlah aset, di mana penurunan liabilitas berhasil diimbangi oleh peningkatan ekuitas. Komposisi ini mencerminkan struktur keuangan Perseroan yang tetap sehat, dengan ketergantungan terhadap liabilitas yang lebih rendah dan dukungan permodalan yang semakin kuat.

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

The total liabilities and equity in 2025 stood at Rp11.35 trillion, representing a decline of Rp56.48 billion or 0.49% compared to Rp11.41 trillion in 2024. The movement is aligned with the reduction in total assets, wherein the decline in liabilities was successfully offset by the expansion in equity. The composition reflects a healthy financial structure for the Company, characterized by a lower dependence on liabilities and a strengthened capital foundation.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Adapun rincian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The details of the Company's consolidated profit and loss and other comprehensive income statements as of 31 December 2025 are as follows:

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in Rp million)

Deskripsi *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
PENDAPATAN USAHA **REVENUE**	**4.962.465**	**5.024.559**	**(62.094)**	**(1,24)**
BEBAN POKOK PENDAPATAN **COST OF REVENUE**	**(3.577.017)**	**(3.397.604)**	**(179.413)**	**5,28**
LABA BRUTO **GROSS PROFIT**	**1.385.447**	**1.626.955**	**(241.508)**	**(14,84)**
BEBAN USAHA **OPERATING EXPENSES**	**(1.068.268)**	**(1.116.492)**	**48.224**	**(4,32)**
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	**(1.102.484)**	(1.063.013)	(39.471)	3,71
Pendapatan Lainnya Other Income	**101.821**	93.520	8.301	8,88

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in Rp million)

Deskripsi *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
Beban Lainnya Other Expenses	(30.934)	(108.392)	77.458	(71,46)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(36.671)	(38.607)	1.936	(5,01)
LABA USAHA **OPERATING PROFIT**	**317.180**	**510.463**	**(193.283)**	**(37,86)**
Pendapatan Keuangan Financial Income	91.995	77.384	14.611	18,88
Beban Keuangan Financial Expenses	(98.922)	(115.419)	16.497	(14,29)
Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih Non-Operating Income (Expenses) - Net	(6.927)	(38.034)	31.107	(81,79)
LABA SEBELUM PAJAK **PROFIT BEFORE TAX**	**310.252**	**472.429**	**(162.177)**	**(34,33)**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN **INCOME TAX EXPENSES**	**(24.822)**	**(25.123)**	**301**	**(1,20)**
LABA TAHUN BERJALAN **PROFIT FOR THE YEAR**	**285.430**	**447.306**	**(161.876)**	**(36,19)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN **OTHER COMPREHENSIVE INCOME**				
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti Reappraisal of Defined Benefit Liabilities.	(5.576)	(3.411)	(2.165)	63,47
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	1.217	921	296	32,14
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak **Total Other Comprehensive Income After Tax**	**(4.360)**	**(2.490)**	**(1.870)**	**75,10**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF **TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT**	**281.071**	**444.816**	**(163.745)**	**(36,81)**
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada: **Income for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	272.987	438.745	(165.758)	(37,78)
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	12.444	8.561	3.883	45,36
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN **PROFIT FOR THE YEAR**	**285.430**	**447.306**	**(161.876)**	**(36,19)**
Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: **Comprehensive Income Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	268.647	436.074	(167.427)	(38,39)
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	12.424	8.742	3.682	42,12
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME**	**281.071**	**444.816**	**(163.745)**	**(36,81)**
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar **Net Income (Loss) per Share**	**51.320,15**	**80.425,25**	**(29.105,10)**	**(36,19)**

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp4,96 triliun, menurun Rp62,09 miliar atau 1,24% dibandingkan Rp5,02 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terutama mencerminkan tekanan pada aktivitas usaha utama Perseroan, khususnya pada segmen penyeberangan, meskipun sebagian segmen lain masih mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan konsolidasian.

REVENUE

The revenue of ASDP in 2025 was recorded at Rp4.96 trillion, reflecting a decline of Rp62.09 billion or 1.24% against Rp5.02 trillion in 2024. The decrease primarily reflects pressure on the Company's core business activities, particularly within the ferry transportation segment, even though other segments continued to deliver positive contributions to consolidated revenue.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan meningkat menjadi Rp3,58 triliun pada tahun 2025, naik Rp179,41 miliar atau 5,28% dibandingkan Rp3,40 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan biaya langsung yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan, sehingga memberikan tekanan terhadap margin usaha Perseroan di tengah pendapatan yang mengalami penurunan.

COST OF REVENUE

The cost of revenue increased to Rp3.58 trillion in 2025, rising by Rp179.41 billion or 5.28% compared to Rp3.40 trillion in 2024. The upward movement indicates an increase in direct expenses associated with service delivery, thereby placing pressure on the Company's operating margins amidst declining revenue.

LABA BRUTO

Laba bruto ASDP tercatat sebesar Rp1,39 triliun pada tahun 2025, menurun Rp241,51 miliar atau 14,84% dibandingkan Rp1,63 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kombinasi penurunan pendapatan usaha dan kenaikan beban pokok pendapatan, yang berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas pada level bruto.

GROSS PROFIT

The gross profit of ASDP stood at Rp1.39 trillion in 2025, down by Rp241.51 billion or 14.84% from Rp1.63 trillion in the preceding financial year. The contraction was primarily influenced by the combined effect of lower revenue and higher cost of revenue, which impacted profitability at the gross level.

BEBAN USAHA

Beban usaha pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,07 triliun, menurun Rp48,22 miliar atau 4,32% dibandingkan Rp1,12 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya pengendalian biaya operasional, terutama pada beban administrasi dan umum serta beban lainnya, meskipun Perseroan tetap menjaga dukungan terhadap kebutuhan operasional dan layanan.

OPERATING EXPENSES

Operating expenses in 2025 were recorded at Rp1.07 trillion, representing a decrease of Rp48.22 billion or 4.32% compared to Rp1.12 trillion in 2024. The decline reflects operational cost controls, particularly within general and administrative expenses and other expenses, while the Company maintained necessary support for operational requirements and services.

LABA USAHA

Laba usaha ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp317,18 miliar, menurun Rp193,28 miliar atau 37,86% dibandingkan Rp510,46 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya laba bruto, sehingga efisiensi pada beban usaha belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan pada pendapatan dan beban pokok.

OPERATING PROFIT

The operating profit in 2025 was recorded at Rp317.18 billion, down by Rp193.28 billion or 37.86% against Rp510.46 billion in 2024. The decline was primarily driven by weaker gross profit, meaning that efficiencies achieved in operating expenses were not fully able to offset the pressures on revenue and cost of revenue.

LABA SEBELUM PAJAK

Laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp310,25 miliar pada tahun 2025, menurun Rp162,18 miliar atau 34,33% dibandingkan Rp472,43 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan turunnya laba usaha, meskipun Perseroan masih memperoleh dukungan dari peningkatan pendapatan keuangan dan penurunan beban keuangan.

PROFIT BEFORE TAX

Profit before tax stood at Rp310.25 billion in 2025, declining by Rp162.18 billion or 34.33% compared to Rp472.43 billion in 2024. The reduction is in line with the lower operating profit, though the Company still benefited from an increase in finance income and a decrease in finance costs.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan ASDP tercatat sebesar Rp24,82 miliar pada tahun 2025, menurun Rp301 juta atau 1,20% dibandingkan Rp25,12 miliar pada tahun 2024. Penurunan beban pajak tersebut sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak, meskipun secara proporsional penurunannya lebih terbatas dibandingkan penurunan laba.

INCOME TAX EXPENSE

The income tax expense of ASDP was recorded at Rp24.82 billion in 2025, a decrease of Rp301 million or 1.20% from Rp25.12 billion in 2024. The reduction in tax expense is aligned with the decrease in profit before tax, though proportionally the contraction was more limited than the decline in earnings.

LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp285,43 miliar, menurun Rp161,88 miliar atau 36,19% dibandingkan Rp447,31 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tekanan profitabilitas Perseroan akibat penurunan pendapatan usaha dan kenaikan beban pokok pendapatan, meskipun efisiensi pada beberapa pos biaya tetap memberikan dampak penahan.

PROFIT FOR THE YEAR

The profit for the year for ASDP in 2025 was recorded at Rp285.43 billion, down by Rp161.88 billion or 36.19% compared to Rp447.31 billion in 2024. The decline reflects the pressures on the Company's profitability caused by reduced revenue and an increased cost of revenue, although efficiency gains in several cost items provided a cushioning effect.

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF

Jumlah laba komprehensif ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp281,07 miliar, menurun Rp163,75 miliar atau 36,81% dibandingkan Rp444,82 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya laba tahun berjalan, disertai peningkatan rugi komprehensif lain setelah pajak yang berasal dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

ASDP's total comprehensive income in 2025 was recorded at Rp281.07 billion, declining by Rp163.75 billion or 36.81% from Rp444.82 billion in 2024. The contraction was primarily driven by the lower profit for the year, coupled with an increase in other comprehensive loss after tax arising from the remeasurement of defined benefit obligations.

LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp51.320,15, menurun Rp29.105,10 atau 36,19% dibandingkan Rp80.425,25 pada tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, sehingga mencerminkan penurunan nilai laba yang dihasilkan untuk setiap saham dasar Perseroan.

NET INCOME PER SHARE

The net income per share of ASDP in 2025 stood at Rp51,320.15, down by Rp29,105.10 or 36.19% compared to Rp80,425.25 in 2024. The decrease is aligned with the reduction in profit for the year attributable to owners of the parent entity, thereby reflecting lower earnings generated for each share of the Company.

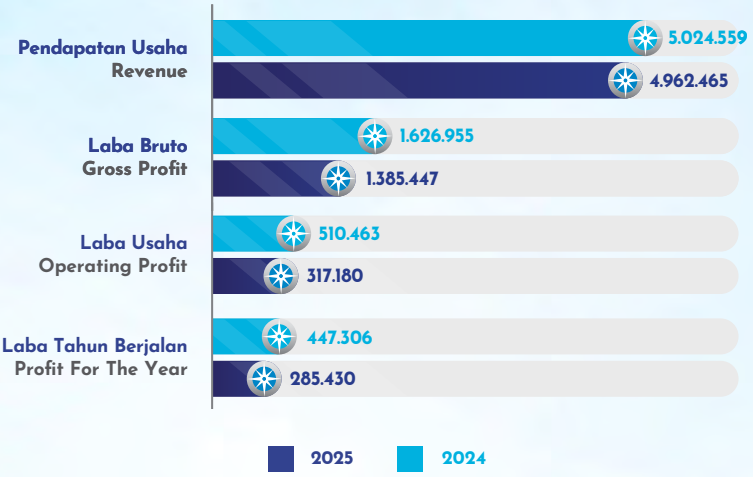

LAPORAN ARUS KAS

Adapun rincian laporan arus kas Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW

The details of the Company's cash flow report as of 31 December 2025 are as follows:

Tabel Laporan Arus Kas (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Cash Flow (in Rp million)

Deskripsi *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	4.954.690	5.029.483	(74.793)	(1,49)
Pembayaran Kas kepada Pemasok Payments to Suppliers	(2.219.756)	(2.138.289)	(81.467)	3,81
Pembayaran kepada Karyawan Payments to Employees	(1.127.918)	(1.089.194)	(38.724)	3,56
Pembayaran Beban Usaha Payment of Operating Expenses	(512.020)	(493.597)	(18.423)	3,73
Penerimaan Lain-lain Other Receipts	54.735	67.260	(12.525)	(18,62)
Pembayaran Bunga Pinjaman Payments of Loan Interest	(97.467)	(113.287)	15.820	(13,96)
Penerimaan Bunga Interest Receipts	91.650	77.384	14.266	18,44
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payments	(147.144)	(178.458)	31.314	(17,55)
Penerimaan Restitusi Pajak Tax Restitution	-	-	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Generated From Operating Activities	996.771	1.161.303	(164.532)	(14,17)

Tabel Laporan Arus Kas (dalam Rp juta)
Consolidated Statement of Cash Flow (in Rp million)

Deskripsi *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Nominal*	Persentase *Percentage*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
Penerimaan Jaminan Usaha Receipts of Business Guarantee	43.720	30.252	13.468	44,52
Pembayaran Jaminan Usaha Payments of Business Guarantee	(33.194)	(29.318)	(3.876)	13,22
Perolehan Aset Takberwujud Acquisition of Intangible Assets	(2.224)	(9.571)	7.347	(76,76)
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(515.921)	(614.092)	98.171	(15,99)
Hasil Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sales of Fixed Assets	-	-	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	**(507.619)**	**(622.730)**	**115.111**	**(18,48)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
Pencairan Pinjaman Sindikasi Disbursement for Syndicated Loan	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Sindikasi Payment for Syndicated Loan	(34.300)	(26.300)	(8.000)	30,42
Pembayaran Pinjaman Bank Payments for Bank Loans	(270.936)	(256.221)	(14.715)	5,74
Penerimaan Pinjaman Bank Receipts from Bank Loans	-	159.500	(159.500)	(100,00)
Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi Receipts for Related Parties Loan	130.700	124.794	5.906	4,73
Pembayaran Pinjaman Pihak Berelasi Payments for Related Parties Loan	(143.300)	(122.100)	(21.200)	17,36
Pembayaran Dividen Payments for Dividends	(44.964)	(30.672)	(14.292)	46,60
Pembayaran Liabilitas Sewa Payments for Leases	(24.256)	(41.389)	17.133	(41,40)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	**(387.056)**	**(192.389)**	**(194.667)**	**101,18**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS INCREASE (DECREASE) IN NET CASH AND CASH EQUIVALENTS	**102.096**	**346.184**	**(244.088)**	**(70,51)**
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS	**1.602**	**1.846**	**(244)**	**(13,22)**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR	**1.836.375**	**1.488.345**	**348.030**	**23,38**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR	**1.940.072**	**1.836.375**	**103.697**	**5,65**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp996,77 miliar, menurun Rp164,53 miliar atau 14,17% dibandingkan Rp1,16 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan dari pelanggan, sementara pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran beban usaha mengalami peningkatan. Meskipun demikian, aktivitas operasi tetap menghasilkan arus kas positif, yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha utama Perseroan masih mampu mendukung likuiditas operasional.

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Net cash flows generated from operating activities in 2025 were recorded at Rp996.77 billion, down by Rp164.53 billion or 14.17% compared to Rp1.16 trillion in 2024. The decline was primarily influenced by lower collections from customers, while payments to suppliers and employees, as well as operating expense payments increased. Nonetheless, operating activities continued to generate positive cash flows, demonstrating that the Company's core business operations remain capable of supporting operational liquidity.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp507,62 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp622,73 miliar pada tahun 2024. Penurunan penggunaan kas sebesar Rp115,11 miliar atau 18,48% terutama mencerminkan berkurangnya perolehan aset tetap dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perseroan tetap menjalankan belanja investasi, namun dengan tingkat penggunaan kas yang lebih terkendali.

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash flows used in investing activities in 2025 were recorded at Rp507.62 billion, lower than the Rp622.73 billion recorded in 2024. The reduction in cash utilization by Rp115.11 billion or 18.48% primarily reflects lower acquisitions of fixed assets compared to the preceding year. The condition indicates that the Company continues to execute investment spending, but with a more controlled level of cash utilization.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp387,06 miliar, meningkat Rp194,67 miliar dibandingkan Rp192,39 miliar pada tahun 2024. Peningkatan penggunaan kas ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman bank, pembayaran pinjaman pihak berelasi, pembayaran dividen, serta pembayaran liabilitas sewa. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam memenuhi kewajiban pendanaan dan menjaga struktur keuangan yang lebih sehat.

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash flows used in financing activities in 2025 stood at Rp387.06 billion, increasing by Rp194.67 billion compared to Rp192.39 billion in 2024. The higher cash utilization was primarily driven by payments on bank loans, payments on loans from related parties, dividend distributions, and payments of lease liabilities. These conditions reflect the Company's commitment to fulfilling its financing obligations and maintaining a healthier financial structure.

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

Kas dan setara kas pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,94 triliun, meningkat Rp103,70 miliar atau 5,65% dibandingkan Rp1,84 triliun pada akhir tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Perseroan tetap mampu menjaga posisi kas yang solid, meskipun menghadapi tekanan pada arus kas operasi dan peningkatan penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan.

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Cash and cash equivalents at the end of 2025 stood at Rp1,94 trillion, reflecting an increase of Rp103.70 billion or 5.65% compared to Rp1.84 trillion at the end of 2024. The increase demonstrates that the Company remains capable of maintaining a solid cash position despite facing pressures on operating cash flows and higher cash utilization for financing activities.

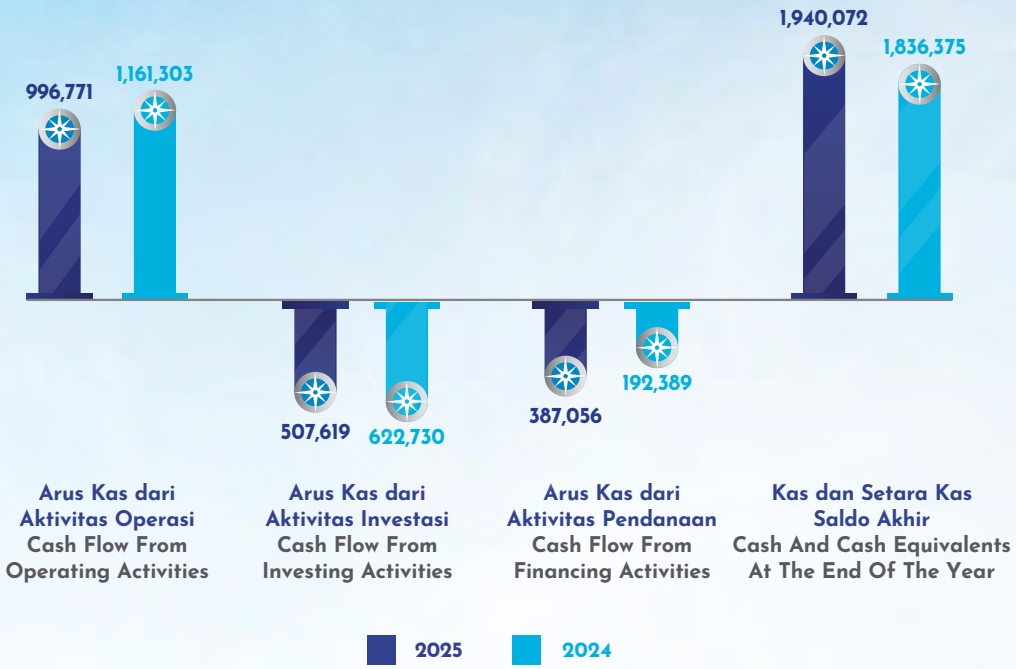

(dalam Rp Juta | In Rp Million)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG SOLVENCY

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS)

Kemampuan membayar utang jangka pendek atau likuiditas mencerminkan kapasitas Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban lancar secara tepat waktu dengan dukungan aset lancar yang tersedia. Pengukuran ini menjadi indikator penting untuk menilai ketahanan keuangan jangka pendek, kecukupan kas, serta fleksibilitas Perseroan dalam menjaga kelancaran operasional. Tingkat likuiditas yang memadai menunjukkan bahwa Perseroan memiliki ruang keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, kewajiban kepada pihak ketiga, serta komitmen jangka pendek lainnya tanpa menimbulkan tekanan terhadap kesinambungan usaha.

SHORT-TERM DEBT REPAYMENT CAPABILITY (LIQUIDITY)

The ability to fulfill short-term obligations, or liquidity, reflects the Company's capacity to meet all current liabilities in a timely manner with the support of available current assets. The metric serves as a vital indicator for assessing short-term financial resilience, cash adequacy, and the Company's flexibility in maintaining smooth operations. An adequate liquidity level demonstrates that the Company has sufficient financial capacity to fulfill operational requirements, obligations to third parties, and other short-term commitments without generating pressure on business continuity.

Tabel Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Liquidity Ratio

Uraian *Description*	2025	2024	Perubahan (basis poin) *Change (basis point)*
Rasio Kas Cash Ratio	**144,64**	138,06	6,58
Rasio Lancar Current Ratio	**178,89**	162,78	16,11

RASIO KAS

Rasio kas ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar 144,64%, meningkat 6,58 basis poin dibandingkan 138,06% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kas dan setara kas Perseroan semakin memadai untuk menutup liabilitas jangka pendek, sehingga memperkuat fleksibilitas keuangan dalam memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban yang jatuh tempo.

CASH RATIO

The cash ratio of ASDP in 2025 stood at 144.64%, reflecting an increase of 6.58 basis points compared to 138.06% in 2024. The improvement indicates that the Company's cash and cash equivalents are increasingly sufficient to cover short-term liabilities, thereby reinforcing financial flexibility in meeting operational requirements and maturing obligations.

RASIO LANCAR

Rasio lancar ASDP juga meningkat dari 162,78% pada tahun 2024 menjadi 178,89% pada tahun 2025, atau naik 16,11 basis poin. Kenaikan ini mencerminkan posisi aset lancar yang semakin kuat dibandingkan liabilitas jangka pendek, sehingga Perseroan memiliki kapasitas likuiditas yang lebih solid dalam menjaga kelancaran operasional dan kesinambungan usaha.

CURRENT RATIO

The current ratio also increased from 162.78% in 2024 to 178.89% in 2025, or an expansion of 16.11 basis points. The rise reflects an more robust position of current assets relative to short-term liabilities, providing the Company with a more solid liquidity capacity to safeguard operational smoothness and business continuity.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS)

Kemampuan membayar utang jangka panjang atau solvabilitas mencerminkan kapasitas Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta menjaga struktur permodalan yang sehat. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan berbasis liabilitas dibandingkan dengan ekuitas maupun aset yang dimiliki. Struktur solvabilitas yang terkendali menunjukkan bahwa Perseroan memiliki fondasi keuangan yang memadai untuk mendukung keberlanjutan usaha, memenuhi kewajiban pendanaan, dan menjaga ruang pembiayaan bagi pengembangan bisnis.

LONG-TERM DEBT REPAYMENT CAPABILITY (SOLVENCY)

The ability to fulfill long-term debt, or solvency, reflects the Company's capacity to meet long-term obligations and maintain a healthy capital structure. Solvency ratios are utilized to assess the level of the Company's dependence on liability-based funding compared to its equity or assets. A controlled solvency structure demonstrates that the Company has an adequate financial foundation to support business sustainability, fulfill funding obligations, and preserve financing headroom for business development.

Tabel Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Solvency Ratio

Uraian *Description*	2025	2024	Perubahan (basis poin) *Change (basis point)*
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	0,12	0,16	(0,04)
Rasio Liabilitas terhadap Aset Debt to Asset Ratio	9,77	12,49	(2,72)
Interest Coverage Ratio	2,88	4,89	(2,01)

RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS

Rasio liabilitas terhadap ekuitas pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,12, menurun 0,04 basis poin dibandingkan 0,16 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa porsi liabilitas terhadap ekuitas semakin rendah, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan berbasis utang.

RASIO LIABILITAS TERHADAP ASET

Rasio liabilitas terhadap aset juga menurun dari 12,49 pada tahun 2024 menjadi 9,77 pada tahun 2025, atau turun 2,72 basis poin. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya proporsi aset yang dibiayai oleh liabilitas, sehingga memperkuat kualitas struktur keuangan dan menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga tingkat leverage pada level yang lebih terkendali.

INTEREST COVERAGE RATIO

Interest coverage ratio tercatat sebesar 2,88 pada tahun 2025, menurun 2,01 basis poin dibandingkan 4,89 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan laba operasional Perseroan dalam menutup beban bunga mengalami penyesuaian, sejalan dengan tekanan pada kinerja profitabilitas. Meski demikian, rasio yang masih berada di atas 1 kali menunjukkan bahwa Perseroan tetap memiliki kapasitas untuk memenuhi beban bunga dari kinerja operasional yang dihasilkan.

DEBT TO EQUITY RATIO

The debt to equity ratio in 2025 was recorded at 0.12, reflecting a decline of 0.04 basis points compared to 0.16 in 2024. The decline indicates that the proportion of liabilities relative to equity has minimized, thereby rendering the Company's capital structure stronger and less dependent on debt-based financing.

DEBT TO ASSET RATIO

The debt to asset ratio also decreased from 12.49 in 2024 to 9.77 in 2025, or a contraction of 2.72 basis points. The decline reflects a reduced proportion of assets financed by liabilities, which strengthens the quality of the financial structure and demonstrates the Company's ability to maintain leverage at a more controlled level.

INTEREST COVERAGE RATIO

The interest coverage ratio was recorded at 2.88 in 2025, down by 2.01 basis points compared to 4.89 in 2024. The decrease indicates that the capacity of the Company's operating profit to cover interest expenses has undergone an adjustment, in line with pressures on profitability performance. Nevertheless, a ratio that remains above 1.0 times demonstrates that the Company still holds the capacity to meet interest expenses from its generated operational performance.

KOLEKTABILITAS PIUTANG
RECEIVABLES COLLECTIBILITY

KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kolektabilitas piutang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengelola penagihan piutang usaha dan mengonversi tagihan menjadi kas. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas pengelolaan piutang, kualitas arus kas, serta disiplin administrasi penagihan kepada pelanggan maupun pihak terkait lainnya. Semakin rendah collection period, semakin cepat piutang dapat tertagih, sehingga mendukung likuiditas dan kelancaran arus kas operasional Perseroan.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The collectibility of receivables reflects the Company's capability to manage trade receivable collections and convert billings into cash. The indicator is important for assessing the effectiveness of receivable management, cash flow quality, and billing administrative discipline toward customers and other related parties. A lower collection period signifies that receivables are collected more rapidly, thereby supporting liquidity and the fluidity of the Company's operational cash flows.

Tabel Kolektabilitas Piutang
Collectibility

Uraian *Description*	2025	2024	Perubahan (basis poin) *Change (basis point)*
Collection Period	5,42	2,31	3,11

Collection Period

Collection period ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,42 hari, meningkat 3,11 basis poin dibandingkan 2,31 hari pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu penagihan piutang menjadi lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, periode penagihan tersebut masih berada pada tingkat yang relatif singkat, sehingga kualitas kolektabilitas piutang Perseroan tetap terjaga.

Collection Period

The collection period in 2025 stood at 5.42 days, representing an increase of 3.11 basis points compared to 2.31 days in 2024. The rise indicates that the average time for receivable collections has lengthened compared to the preceding year. Nonetheless, the collection period remains within a relatively brief timeframe, ensuring that the quality of the Company's receivable collectibility is well-maintained.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal ASDP pada tahun 2025 menunjukkan penguatan komposisi permodalan yang tercermin dari meningkatnya porsi ekuitas dan menurunnya porsi liabilitas terhadap total liabilitas dan ekuitas. Liabilitas tercatat sebesar Rp2,32 triliun atau 20,43% dari total struktur modal, menurun dibandingkan Rp2,61 triliun atau 22,89% pada tahun 2024. Sementara itu, ekuitas meningkat menjadi Rp9,03 triliun atau 79,57%, dibandingkan Rp8,80 triliun atau 77,11% pada tahun sebelumnya. Dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp11,35 triliun, struktur modal Perseroan pada tahun 2025 mencerminkan profil keuangan yang lebih sehat, didukung oleh dominasi ekuitas sebagai sumber pendanaan utama serta penurunan ketergantungan terhadap liabilitas. Kondisi ini memberikan ruang yang lebih kuat bagi ASDP untuk menjaga kesinambungan usaha, mendukung kebutuhan investasi secara selektif, dan mempertahankan fleksibilitas pendanaan pada periode mendatang.

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The capital structure of ASDP in 2025 demonstrates a strengthening composition, as reflected by increased proportion of equity and a decreased proportion of liabilities relative to total liabilities and equity. Liabilities were recorded at Rp2.32 trillion or 20.43% of the total capital structure, down from Rp2.61 trillion or 22.89% in 2024. Meanwhile, equity increased to Rp9.03 trillion or 79.57%, compared to Rp8.80 trillion or 77.11% in the previous year. With total liabilities and equity amounting to Rp11.35 trillion, the Company's capital structure in 2025 reflects a healthier financial profile, backed by the dominance of equity as the primary source of funding and a reduced reliance on liabilities. The condition provides stronger headroom for ASDP to preserve business continuity, support selective investment needs, and maintain funding flexibility in upcoming periods.

Tabel Rincian Struktur Modal (dalam Rp juta)
Capital Structure Details (in Rp million)

Uraian *Description*	2025		2024		Peningkatan/Penurunan *Increase/Decline*	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Liabilitas Liabilities	2.319.723	20,43	2.612.309	22,89	(292.586)	518,04
Ekuitas Equity	9.034.962	79,57	8.798.855	77,11	236.107	(418,04)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**11.354.685**	**100,00**	**11.411.164**	**100,00**	**(56.479)**	**100,00**

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan manajemen atas struktur modal ASDP diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan liabilitas dan ekuitas guna mendukung keberlanjutan usaha, kebutuhan operasional, serta rencana pengembangan bisnis Perseroan. Manajemen menjaga kebijakan tersebut tetap relevan melalui pemantauan berkala terhadap komposisi liabilitas dan ekuitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, kemampuan arus kas operasi, kebutuhan belanja modal, serta profil jatuh tempo kewajiban. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengendalian keuangan, termasuk dalam penyusunan RKAP, pemantauan realisasi kinerja keuangan, pengelolaan pinjaman, dan penilaian kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pendanaan.

MANAGEMENT'S POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Management's policy regarding the capital structure of ASDP is directed at maintaining a balance between the utilization of liabilities and equity to support business sustainability, operational requirements, and the Company's business development plans. Management keeps this policy relevant through regular monitoring of the composition of liabilities and equity, liquidity ratios, solvency ratios, operating cash flow capacity, capital expenditure requirements, and maturity profiles of obligations. Evaluations are conducted as part of the financial planning and control process, including within the preparation of the WPB, monitoring of financial performance outcomes, loan management, and the assessment of the Company's capacity to fulfill funding obligations.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dasar pemilihan kebijakan struktur modal ASDP ditetapkan dengan mempertimbangkan status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang seluruh arah strategis dan keputusan korporasinya berada dalam koridor persetujuan serta pengawasan Pemegang Saham. Oleh karena itu, kebijakan struktur modal tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pendanaan internal, tetapi juga diselaraskan dengan mandat Pemegang Saham, rencana kerja dan anggaran perusahaan, arah pengembangan usaha, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesehatan keuangan Perseroan.

Dalam menentukan struktur pendanaan, manajemen mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas, kapasitas pembayaran kewajiban, profil risiko keuangan, kebutuhan investasi, serta dampak keputusan pendanaan terhadap kesinambungan usaha. Setiap penggunaan liabilitas diarahkan agar tetap proporsional, terukur, dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang, sedangkan penguatan ekuitas menjadi landasan utama untuk menjaga stabilitas permodalan. Dengan dasar tersebut, kebijakan struktur modal ASDP dipilih untuk memastikan keseimbangan antara kepatuhan terhadap arahan Pemegang Saham, kebutuhan pertumbuhan bisnis, dan kemampuan Perseroan dalam mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

BASIS FOR SELECTING MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The basis for selecting ASDP's capital structure policy is established by considering the Company's status as a State-Owned Enterprise, where all strategic directions and corporate decisions reside within the corridor of approval and supervision by the Shareholders. Consequently, capital structure policies are not only based on internal funding requirements but are also aligned with Shareholder mandates, corporate work plan and budget, business development directions, and prudent principles to preserve the Company's financial health.

In determining the funding structure, management considers the Company's capability to generate cash flows, payment capacities for obligations, financial risk profiles, investment needs, and the impact of funding decisions on business sustainability. Any utilization of liabilities is directed to remain proportional, measurable, and supportive of long-term value creation, while the strengthening of equity serves as the primary foundation to maintain capital stability. On this basis, ASDP's capital structure policy is chosen to ensure a balance between compliance with Shareholder directives, business growth needs, and the Company's capability to sustain a healthy and sustainable financial structure.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS ON CAPITAL GOODS INVESTMENT

Pada tahun 2025, ASDP memiliki sejumlah perikatan dan/atau perjanjian material dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi dalam rangka pelaksanaan investasi barang modal. Rincian perikatan dan/atau perjanjian material untuk investasi barang modal tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 yang dibuat di hadapan Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si., di Jakarta, tanggal 21 Maret 2024, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Term Loan* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp159.500.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku delapan tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 18 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7,25% per tahun untuk tahun pertama dan kedua, serta sebesar *reference rate* (JIBOR 3M) ditambah margin (0,75% per tahun) untuk tahun ketiga sampai dengan fasilitas kredit berakhir. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai peningkatan kapasitas Dermaga II di Pelabuhan Merak dan peningkatan kapasitas dermaga Ponton menjadi *Moveable Bridge* di Pelabuhan Gilimanuk. Perjanjian kredit ini tidak dijamin secara preferen dengan agunan kebendaan, pendapatan atau aktiva lain dalam bentuk apapun.

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perseroan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 150%, dan menjaga *Debt Service Coverage Ratio* di atas 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan:

1. Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan;
3. Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan yang wajar;
4. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;

In 2025, ASDP maintained a number of material engagements and/or agreements with third parties and related parties for the execution of capital asset investments. The details of these material engagements and/or agreements for capital asset investments in 2025 are presented as follows:

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Pursuant to Credit Agreement Deed No. 14, executed before Notary Julius Purnawan, S.H., M.Si., in Jakarta on 21 March 2024, the Company secured a Term Loan credit facility with a maximum credit limit of Rp159,500,000,000. The loan term spans eight years (including an availability period and a grace period of 18 months post-credit signing) with a borrowing interest rate of 7.25% per annum for the first and second years, and a reference rate (3M JIBOR) plus a margin (0.75% per annum) from the third year until the credit facility matures. The purpose of The loan is to finance the capacity expansion of Pier II at Merak Port and the upgrade of the Floating to a Moveable Bridge pier capacity at Gilimanuk Port. The credit agreement is not preferentially secured by any physical collateral, revenues, or other assets of any kind.

Relating to the credit facility, the Company is required to maintain positive equity, a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 150%, and a Debt Service Coverage Ratio above 100%.

Until the credit facility is fully repaid, the Company requires the Bank's prior written consent to:

1. Effect any reduction in authorized or paid-up capital;
2. File a petition for bankruptcy with the Commercial Court to declare the Company bankrupt;
3. Provide facilities/loans to any party, except for loans to employees and/or loans extended within the ordinary and reasonable course of the Company's daily business operations;
4. Enter into unreasonable agreements and transactions;

5. Menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun;
6. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini;
7. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali aset yang telah dijaminkan sebelumnya kepada kreditur eksisting.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp122.655.500.000 dan Rp147.218.500.000. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.563.000.000 dan Rp12.280.500.000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1-4 yang dibuat di hadapan Notaris Sriyani Burlian, S.H di Jakarta tanggal 25 Mei 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Transaksi Khusus dengan batas maksimum kredit sebesar Rp975.000.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku lima tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 12 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7% per tahun. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai transaksi dengan PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP terkait akuisisi 100% saham PT Jembatan Nusantara, pelunasan kapal afiliasi dan pengalihan kapal, dan *refinancing shareholder* atas pelunasan pinjaman kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk dan PT Chandra Sakti Utama.

Pinjaman ini dijamin dengan:
1. Saham PT Jembatan Nusantara dengan nilai penjaminan Rp873.953.000;
2. Deposito giro yang dimiliki dalam bentuk jaminan gadai dengan nilai penjaminan Rp275.000.000.000 (Catatan 10).

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perseroan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, kolektibilitas fasilitas kredit dalam keadaan lancar, rasio *Debt Equity Ratio* maksimal 150%, dan menjaga rasio *Debt Service Coverage Ratio* di atas 100%.

5. Permit defaults in any amount, under any circumstances, arising from any cause whatsoever;
6. Transfer or assign to another party, in whole or in part, any rights and obligations arising in connection with The credit facility;
7. Bind itself as a debt guarantor or pledge the Company's corporate wealth to another party, except for assets previously pledged to existing creditors.

As of 31 December 2025, the Company complied with all terms and loan conditions stipulated by the Bank.

The outstanding values as of 31 December 2025 and 31 December 2024 were Rp122,655,500,000 and Rp147,218,500,000, respectively. Loan repayment amounts in 2025 and 2024 were Rp24,563,000,000 and Rp12,280,500,000, respectively.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Pursuant to Credit Agreement Deed No. 1-4, executed before Notary Sriyani Burlian, S.H. in Jakarta on 25 May 2022, the Company secured a Special Transaction Working Capital Credit facility with a maximum credit limit of Rp975,000,000,000. The loan term is five years (including an availability period and a grace period of 12 months post-credit signing) with an interest rate of 7% per annum. The purpose of the loan is to finance transactions with PT Mahkota Pratama and PT Indonesia VIP relating to the 100% share acquisition of PT Jembatan Nusantara, the settlement of affiliated vessel obligations and vessel transfers, and shareholder refinancing for loan settlements to PT Bank Oke Indonesia Tbk and PT Chandra Sakti Utama.

The loan is secured by:
1. Shares of PT Jembatan Nusantara with a pledge value of Rp873,953,000;
2. Current account deposits held under a pledge agreement with a security value of Rp275,000,000,000 (Note 10).

Relating to the credit facility, the Company is required to maintain positive equity, ensure the credit facility collectibility remains current, maintain a maximum Debt Equity Ratio of 150%, and maintain a Debt Service Coverage Ratio above 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis Perseroan tidak diperkenankan:

1. Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan;
3. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini;
4. Mengagunkan aset Perseroan termasuk aset JN kecuali aset yang telah dijaminkan pada saat transaksi akuisisi ini dilakukan;
5. Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan yang wajar;
6. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
7. Mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi secara negatif kelancaran usaha Perseroan;
8. Melakukan divestasi aset/penjualan saham JN;
9. Perseroan dilarang untuk menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp225.000.000.000 dan Rp375.000.000.000. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp150.000.000.000.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. 37 tanggal 29 April 2024 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk.

Perjanjian ini telah diaddendum melalui surat No. 60041/GBK/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Kredit : Rp300.000.000.000
Tingkat Bunga : Ditetapkan sesuai perkembangan moneter pada saat penarikan
Jangka Waktu : 6 bulan setelah tanggal penarikan
Tujuan : *General Purpose*

For the duration of the credit facility has not been settled in full, the Company may not, without prior written consent:

1. Effect any reduction in authorized or paid-up capital;
2. File a petition for bankruptcy with the Commercial Court to declare the Company bankrupt;
3. Transfer or assign to another party, in whole or in part, any rights and obligations arising in connection with the credit facility;
4. Pledge the Company's assets, including JN assets, except for assets already pledged at the time the acquisition transaction was executed;
5. Provide facilities/loans to any party, except for loans to employees and/or loans extended within the ordinary and reasonable course of the Company's daily business operations;
6. Enter into unreasonable agreements and transactions;
7. Execute contracts or agreements with other parties and/or their affiliates that could negatively affect the smooth operations of the Company's business;
8. Conduct asset divestments or sell shares of JN;
9. Permit defaults in any amount, under any circumstances, arising from any cause whatsoever.

As of 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company complied with all terms and loan conditions stipulated by the Bank.

The outstanding values as of 31 December 2025 and 31 December 2024 were Rp225,000,000,000 and Rp375,000,000,000, respectively. Loan repayment amounts in 2025 and 2024 were Rp150,000,000,000 each.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Based on Credit Agreement No. 37 dated 29 April 2024 drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., in Jakarta, the Company obtained a working capital credit facility from PT Bank Central Asia Tbk.

This agreement has been amended through Letter No. 60041/GBK/2024 with the following details:

Credit Limit : Rp300.000.000.000
Interest Rate : Determined in accordance with monetary developments at the time of drawdown
Tenor : 6 months after the drawdown date
Purpose : General Purpose

Selama ASDP belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan:

1. Memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali pinjaman atau tambahan pinjaman yang diterima Debitor tersebut tidak menyebabkan Debitor melanggar ketentuan rasio keuangan.
2. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain, kecuali untuk menjamin utang/pinjaman perusahaan yang secara keuangan terkonsolidasi dengan ASDP.
3. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
4. Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.
5. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
6. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
7. Melakukan divestasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.
8. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar.
9. Mengubah susunan para pemegang saham, kecuali Debitor melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

Selama ASDP memiliki fasilitas kredit di BCA, maka ASDP diwajibkan untuk:

1. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan modal kerja ASDP.
2. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap ASDP.
3. Memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut ASDP, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, dan/atau harta kekayaan ASDP serta dapat mengganggu kemampuan ASDP untuk melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit.
4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat dan ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.

As long as ASDP has not fully repaid its debt or the drawdown period and/or use of the credit facility has not expired, the Company is not permitted to:

1. Obtain loans or additional loans/new credit facilities from other parties, except where such loans or additional loans received by the Debtor do not cause the Debtor to breach the financial ratio requirements.
2. Bind itself as a guarantor in any form or under any name and/or pledge the Debtor's assets to other parties, except to secure the debts/loans of companies that are financially consolidated with ASDP.
3. Lend money, including but not limited to affiliated companies, except in the ordinary course of business.
4. Conduct transactions with any individual or party, including but not limited to affiliated companies, in a manner that differs from or is outside prevailing practices and customs.
5. Make investments, equity participation, or establish new businesses other than existing businesses.
6. Sell or dispose of immovable assets or key assets used in carrying out its business, except in the ordinary course of business.
7. Carry out divestment, consolidation, merger, acquisition, or dissolution.
8. Change its institutional status and articles of association.
9. Change the composition of shareholders, except in the event that the Debtor conducts an Initial Public Offering (IPO).

As long as ASDP has a credit facility with BCA, ASDP is required to:

1. Use the credit facility granted by BCA solely for ASDP's working capital purposes.
2. Comply with all laws, government regulations, government policies, directives, or instructions from the government applicable to ASDP.
3. Notify BCA in writing of any legal case involving ASDP, whether civil, administrative, tax claim, investigation, or criminal case, which may affect ASDP's business, financial condition, and/or assets, and may impair ASDP's ability to fulfill its payment obligations under the credit agreement.
4. Pay all costs arising from and related to the granting of the credit facility and the implementation of the terms and conditions of the credit agreement, even if the credit facility is not utilized and/or the credit agreement is cancelled.

5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh ASDP.
7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha ASDP.
8. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
   a. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
   b. Laporan keuangan *unaudited* triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
9. Mempertahankan rasio keuangan ASDP konsolidasi berupa:
   a. *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* yaitu perbandingan antara kewajiban/utang berbunga terhadap ekuitas maksimal 3 (tiga) kali.
   b. *Current Ratio* yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali.
10. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
11. Memberitahukan pada ASDP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan dilakukan. ASDP wajib melunasi seluruh *outstanding* jumlah terutang yang ada di BCA apabila fasilitas kredit yang diterima ASDP dari BCA diakhiri, dilunasi atau ditutup.

Pada 31 Desember 2025, ASDP telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jumlah pemakaian fasilitas pinjaman pada tahun 2025 sebesar nihil.

Berdasarkan surat addendum kedua dengan No. 464/add KCK/2025, tanggal 22 Desember 2025, telah dilakukan perpanjangan perjanjian yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2026.

5. Provide all information requested by BCA in relation to the granting of the Credit Facility and Collateral.
6. Maintain Intellectual Property Rights, including copyrights, patents, and trademarks that have been or will be owned by ASDP.
7. Establish and maintain accounting, administrative, and financial control systems in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia and applied consistently to fairly reflect ASDP's assets, financial position, and operating results.
8. Submit to BCA, in a form and with details acceptable to BCA:
   a. Annual financial statements, comprising the statement of financial position and profit or loss statement, audited by a registered public accounting firm approved by BCA in the form of a long-form audited report, to be submitted no later than 180 (one hundred and eighty) days after the closing date of the financial year.
   b. Quarterly unaudited financial statements, to be submitted no later than 90 (ninety) days after the end of the reporting period.
9. Maintain ASDP's consolidated financial ratios as follows:
   a. Interest Bearing Debt to Equity Ratio, namely the ratio of interest-bearing liabilities/debt to equity, at a maximum of 3 (three) times.
   b. Current Ratio, namely the ratio of total current assets to total current liabilities/debt, at a minimum of 1 (one) time.
10. Notify BCA in writing of any changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.
11. Notify ASDP of such changes within ASDP no later than 5 (five) working days from the date the change is made. ASDP is required to settle all outstanding amounts due to BCA if the credit facility received by ASDP from BCA is terminated, repaid, or closed.

As of 31 December 2025, ASDP had fulfilled the requirements stipulated by the bank. The utilization of the loan facility in 2025 was nil.

Based on the second addendum letter No. 464/add KCK/2025 dated 22 December 2025, the agreement was extended and will expire on 29 July 2026.

ENTITAS ANAK - PT JEMBATAN NUSANTARA (JN)

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. 37 tanggal 29 April 2024 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas kredit tersebut merupakan *loan facility* dengan skema *joint-borrower* antara Perseroan dan JN, yang antara lain digunakan untuk kebutuhan modal kerja JN.

Perjanjian ini telah diaddendum melalui surat No. 60041/GBK/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Kredit : Rp50.000.000.000
Tingkat Bunga : 8,25% per tahun
Jangka Waktu : 3 bulan setelah tanggal penarikan
Tujuan : Modal Kerja

Selama JN belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan:

1. Memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali pinjaman atau tambahan pinjaman yang diterima Debitor tersebut tidak menyebabkan Debitor melanggar ketentuan rasio keuangan.
2. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain, kecuali untuk menjamin utang/pinjaman perusahaan yang secara keuangan terkonsolidasi dengan ASDP.
3. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
4. Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.
5. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
6. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
7. Melakukan divestasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.
8. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar.
9. Mengubah susunan para pemegang saham, kecuali Debitor melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

SUBSIDIARY ENTITY - PT JEMBATAN NUSANTARA (JN)

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Based on Credit Agreement No. 37 dated 29 April 2024 drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., in Jakarta, the Company obtained a credit facility from PT Bank Central Asia Tbk. The credit facility represents a loan facility under a joint-borrower scheme between the Company and JN, which is used, among others, to support JN's working capital requirements.

The agreement was amended through letter No. 60041/GBK/2024 with the following details:

Credit Limit : Rp50,000,000,000
Interest Rate : 8.25% per annum
Term : 3 months post-drawdown date
Purpose : Working Capital

For the duration of JN has not settled its debt in full or the drawdown and/or utilization period of the credit facility has not expired, the Company may not:

1. Obtain loans or additional new money/credit facilities from other parties, unless such loans or additional loans received by the Borrower do not cause the Borrower to breach provisions on financial ratio.
2. Bind itself as a guarantor in any form or name whatsoever and/or pledge the Borrower's assets to another party, except to secure debts/loans of companies that are financially consolidated with ASDP.
3. Lend money, including but not limited to its affiliated companies, except within the usual course of daily business operations.
4. Enter into transactions with an individual or a party, including but not limited to its affiliated companies, in a manner that differs from or falls outside established practices and customs.
5. Make investments, equity participations, or establish new business lines other than existing businesses.
6. Sell or dispose of immovable property or core assets utilized in running its business, except within the ordinary course of daily business operations.
7. Conduct divestments, consolidations, mergers, takeovers, or dissolutions.
8. Alter its institutional status and articles of association.
9. Alter the composition of shareholders, unless the Borrower conducts an Initial Public Offering (IPO).

Selama JN memiliki fasilitas kredit di BCA, maka JN diwajibkan untuk:

1. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan modal kerja JN.
2. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap JN.
3. Memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut JN, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, dan/atau harta kekayaan JN serta dapat mengganggu kemampuan JN untuk melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit.
4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat dan ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.
5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh JN.
7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha JN.
8. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
   a. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
   b. Laporan keuangan unaudited triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
9. Mempertahankan rasio keuangan ASDP konsolidasi berupa:
   a. *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* yaitu perbandingan antara kewajiban/utang berbunga terhadap ekuitas maksimal 3 (tiga) kali.
   b. *Current Ratio* yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali.

For the duration of JN holds credit facilities at BCA, JN is required to:

1. Utilize the credit facilities provided by BCA solely for JN's working capital needs.
2. Comply with all laws, government regulations, government policies, directives, or instructions from the government applicable to JN.
3. Notify BCA in writing regarding any legal proceedings involving JN, whether civil, administrative, tax disputes, investigations, or criminal cases that could affect the business, financial condition, and/or assets of JN, or impair JN's capability to fulfill payment obligations under the credit agreement.
4. Pay all costs arising from and relating to the granting of the credit facility and the execution of the terms and conditions of the credit agreement, even if the credit facility is not utilized and/or the credit agreement is cancelled.
5. Provide all information requested by BCA relating to the granting of the Credit Facility and Collateral.
6. Maintain Intellectual Property Rights, including copyrights, patents, and trademarks currently held or to be held by JN.
7. Establish and maintain a bookkeeping, administrative, and financial control system in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia, applied consistently to fairly reflect the asset position, financial condition, and operating results of JN.
8. Submit to BCA, in a form and with details acceptable to BCA:
   a. Annual financial statements (balance sheet and income statement) audited by a registered public accounting firm approved by BCA in the form of a long-form audited report, to be submitted no later than 180 (one hundred and eighty) days after the financial year closing date.
   b. Quarterly unaudited financial statements, to be submitted no later than 90 (ninety) days after the end of the reporting period.
9. Maintain the consolidated financial ratios of ASDP as follows:
   a. Interest Bearing Debt to Equity Ratio, being the ratio of interest-bearing liabilities/debt to equity, at a maximum of 3 (three) times.
   b. Current Ratio, being the ratio of total current assets to total current liabilities/debt, at a minimum of 1 (one) time.

10. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada JN selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan dilakukan.
11. JN wajib melunasi seluruh *outstanding* jumlah terutang yang ada di BCA apabila fasilitas kredit yang diterima ASDP dari BCA diakhiri, dilunasi atau ditutup.

Pada 31 Desember 2025, JN telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jumlah pemakaian fasilitas pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp88.397.676.517. Nilai terutang pada 31 Desember 2025 sebesar nihil. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp134.251.707.002

Berdasarkan surat addendum kedua dengan No. 464/add-KCK/2025, tanggal 22 Desember 2025, telah dilakukan perpanjangan perjanjian yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2026.

PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. BNISy/CRD/288/R tanggal 29 Juni 2018, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui perjanjian No. 01/ADD-006/CB1 FOG/VII/2021/MMQ tanggal 28 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah
Plafon Kredit : Rp161.077.113.461
Nisbah Bagi Hasil : Bank 39,96% dan Nasabah 60,04%
Jangka Waktu : Sampai dengan 25 Juli 2027
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas Musyarakah Mutanaqisah

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset Perseroan (Catatan 9):

1. 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Mahkota Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2296 tanggal 29 Mei 2009 dan Akta Hipotek Pertama No. 17/2018 tanggal 8 Agustus 2018;
2. 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Safira Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4947 tanggal 6 Maret 2012 dan Akta Hipotek Pertama No. 50/2020 tanggal 29 Juli 2020.

10. Notify BCA in writing of any change in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners at JN no later than 5 (five) business days from the date the change is made.
11. JN must settle all outstanding amounts at BCA if the credit facilities received by ASDP from BCA are terminated, repaid, or closed.

As of 31 December 2025, JN complied with the requirements stipulated by the bank. The utilized amount of the loan facility in 2025 was Rp88,397,676,517. The outstanding value as of 31 December 2025 was nil. The loan repayment amount in 2025 was Rp134,251,707,002.

Pursuant to the second addendum letter No. 464/add-KCK/2025 dated 22 December 2025, an extension was granted for the agreement, which will expire on 29 July 2026.

PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK

Pursuant to credit agreement No. BNISy/CRD/288/R dated 29 June 2018, which has undergone several amendments, most recently via agreement No. 01/ADD-006/CB1 FOG/VII/2021/MMQ dated 28 July 2021, with the details as follows:

Musyarakah Mutanaqisah Facility:
Credit Limit : Rp161,077,113,461
Profit-Sharing Ratio : Bank 39.96% and Customer 60.04%
Term : Until 25 July 2027
Purpose : Restructuring of the Musyarakah Mutanaqisah facility

The loan facility is secured by Company's assets (Note 9):

1. 1 unit of passenger vessel named KMP Mahkota Nusantara in accordance with ownership documents Grosse Akta of Vessel Registration No. 2296 dated 29 May 2009 and First Mortgage Deed No. 17/2018 dated 8 August 2018;
2. 1 unit of passenger vessel named KMP Safira Nusantara in accordance with ownership documents Grosse Akta of Vessel Registration No. 4947 dated 6 March 2012 and First Mortgage Deed No. 50/2020 dated 29 July 2020.

Selama kredit belum lunas, Perseroan diwajibkan untuk:

1. Perbandingan antara aset lancar dan utang lancar harus diupayakan minimal 1,0 kali;
2. Perbanding antara jumlah utang dengan modal maksimal 2,2 kali;
3. Perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran minimal 1,0 kali;
4. Tidak menjual atau memindahtangankan aset yang diagunkan/dijaminkan di bank;
5. Tidak mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan aset Perseroan yang telah diagunkan/dijaminkan kepada bank;
6. Tidak mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
7. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan Addendum Restrukturisasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No 35, tanggal 26 Februari 2026 (Catatan 30), Perseroan sudah memenuhi rasio keuangan dan pembatasan yang disyaratkan.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp85.683.732.789 dan Rp115.350.317.294. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.666.944.505 dan Rp24.429.222.682.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. 8 dan 9 tanggal 8 Maret 2017 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta, JN memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk operasional JN.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami adendum, adapun perubahan terakhir yaitu melalui Akta No. 28 dan 29 tanggal 29 Juni 2021 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp131.800.000.000
Tingkat Bunga : 11,50% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 8 Februari 2025

Until the credit facility is fully repaid, the Company is required to:

1. Strive to maintain a ratio between current assets and current debt of at least 1.0 time;
2. Maintain a ratio between total debt and capital at a maximum of 2.2 times;
3. Maintain a ratio between EBITDA and installment obligations at a minimum of 1.0 time;
4. Refrain from selling or transferring assets pledged/collateralized to the bank;
5. Refrain from binding itself as a debt guarantor or pledging the Company's assets that have already been collateralized/pledged to the bank;
6. Refrain from filing a petition to be declared bankrupt with the Commercial Court or filing a suspension of debt payment obligation petition with the Commercial Court, or conducting dissolution or liquidation based on an GMS resolution;
7. Refrain from conducting business activities that conflict with sharia principles.

As of 31 December 2025, based on the Restructuring Addendum of the Musyarakah Mutanaqishah Financing Agreement No. 35 dated 26 February 2026 (Note 30), the Company met the required financial ratios and restrictive provisions.

The outstanding values as of 31 December 2025 and 31 December 2024 were Rp85,683,732,789 and Rp115,350,317,294, respectively. Loan repayment amounts in 2025 and 2024 were Rp29,666,944,505 and Rp24,429,222,682, respectively.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Pursuant to credit agreements No. 8 and 9 dated 8 March 2017 by Notary Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., in Jakarta, JN secured a working capital credit facility and an investment credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The loan facility was utilized for JN operations.

The agreement has undergone several addenda, with the latest modification executed through Deed No. 28 and 29 dated 29 June 2021 by Notary Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., in Jakarta, with the details as follows:

Investment Credit Facility
Credit Limit : Rp131,800,000,000
Interest Rate : 11.50% per annum
Term : Until 8 February 2025

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:

i. Piutang usaha (Catatan 5);
ii. Kapal (Catatan 12); dan
iii. Persediaan (Catatan 8).

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:

1. Tidak melakukan merger dan *go public*;
2. Tidak melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan yang menyebabkan kepemilikan saham menjadi minoritas;
3. Tidak mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang;
4. Tidak memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga lain;
5. Tidak melakukan investasi, peluasan usaha atau penjualan aset melebihi Rp100.000.000.000;
6. Tidak melakukan pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank;
7. Tidak melakukan pelunasan dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di bank dilunasi;
8. Tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan pihak berelasi dengan alasan apapun.

Pada 31 Desember 2025 fasilitas tersebut "NIHIL" atau telah lunas per Februari 2025.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp6.999.999.999. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.999.999.999 dan Rp46.800.000.000.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.006 tanggal 19 Agustus 2016 dan persetujuan pemberian fasilitas kredit No. SPM/2.1/308/R tanggal 28 Agustus 2016, JN memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian direstrukturisasi melalui Akta No. 86 tanggal 14 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp87.550.000.000
Tingkat Bunga : 11,25% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 18 Agustus 2024
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Pada tanggal 24 September 2024, JN telah melunasi pinjaman fasilitas kredit ini.

The facilities are secured by:

i. Trade receivables (Note 5);
ii. Vessels (Note 12); and
iii. Inventories (Note 8).

Until the credit facility is fully repaid, JN is required to:

1. Refrain from executing mergers and going public;
2. Refrain from altering/transferring share ownership or changing the capital structure in a manner that results in shareholdings becoming a minority;
3. Refrain from binding itself as a guarantor or debt indemnifier;
4. Refrain from obtaining new loans/credit facilities from other banks or institutions;
5. Refrain from executing investments, business expansions, or asset sales exceeding Rp100,000,000,000;
6. Refrain from filing for bankruptcy with the Commercial Court without prior written consent from the bank;
7. Refrain from settling and/or paying debts to shareholders before debts to the bank are fully repaid;
8. Refrain from granting loans to shareholders and related parties for any reason whatsoever.

As of 31 December 2025, the credit facility balance is "NIL", or it was fully paid off as of February 2025.

The outstanding values as of 31 December 2025 and 31 December 2024 were nil and Rp6,999,999,999, respectively. Loan repayment amounts in 2025 and 2024 were Rp6,999,999,999 and Rp46,800,000,000, respectively.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Based on Credit Agreement No. 16.006 dated 19 August 2016 and approval for the granting of credit facility No. SPM/2.1/308/R dated 28 August 2016, JN obtained a credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, which was subsequently restructured through Deed No. 86 dated 14 March 2023, with the following details:

Investment Credit Facility
Credit Limit : Rp87,550,000,000
Interest Rate : 11.25% per annum
Tenor : Until 18 August 2024
Purpose : Restructuring of credit facility

On 24 September 2024, JN fully repaid this credit facility loan.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 009/SPM/PK-KI/2019 tanggal 20 Mei 2019, JN memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian di restrukturisasi melalui Akta No. 85 tanggal 14 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp88.100.000.000
Tingkat Bunga : 11,25% per tahun dengan pembebanan 9,00% dan 2,25% ditangguhkan
Jangka Waktu : Sampai dengan 19 Mei 2026
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
i. Piutang usaha (Catatan 5);
ii. Kapal (Catatan 12); dan
iii. Persediaan (Catatan 8).

JN diwajibkan untuk menjaga *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan *Debt Service Coverage* minimal 100,00%.

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:

1. Menggunakan dana JN untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas Bank BNI;
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain;
3. Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham;
4. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan kepailitan;
5. Mengubah bidang usaha;
6. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
7. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
8. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan atau kewajiban saudara yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
9. Menarik kembali modal yang disetor;
10. Merubah bentuk atau status hukum JN, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) berupa memindahtangankan saham JN baik antar pemegang saham maupun kepada kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan;

Based on Credit Agreement No. 009/SPM/PK-KI/2019 dated 20 May 2019, JN obtained a credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, which was subsequently restructured through Deed No. 85 dated 14 March 2023, with the following details:

Investment Credit Facility Limit
Credit Limit : Rp88,100,000,000
Interest Rate : 11.25% per annum, comprising 9.00% charged interest and 2.25% deferred interest
Tenor : Until 19 May 2026
Purpose : Restructuring of credit facility

The facilities are secured by:
i. Trade receivables (Note 5);
ii. Vessels (Note 12); and
iii. Inventories (Note 8).

JN is required to maintain a Current Ratio of at least 1 time, Debt to Equity Ratio of a maximum of 2.5 times, and Debt Service Coverage of at least 100.00%.

As long as the credit facility has not been fully repaid, JN is required not to:
1. Use JN's funds for purposes outside the business financed by the Bank BNI facility;
2. Bind itself as a guarantor or pledge assets that have already been pledged as collateral to other parties;
3. Distribute business profits and pay dividends to shareholders;
4. Conduct liquidation, dissolution, or bankruptcy actions;
5. Change its line of business;
6. Establish new businesses unrelated to the existing business;
7. Enter into unreasonable agreements or transactions;
8. Transfer or assign all or part of its rights and/or obligations arising under the credit agreement;
9. Withdraw paid-up capital;
10. Change JN's legal form or status, amend its articles of association, except for increasing the Company's capital, or transfer JN's shares, whether among shareholders or to other parties, resulting in a change of dominant shareholder;

11. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan JN kepada pihak lain termasuk unit-unit kapal yang belum menjadi jaminan/agunan di bank atau lembaga keuangan lainnya;
12. Menerima fasilitas kredit kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya;
13. Melakukan marger akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan kepada JN lain;
14. Melakukan investasi yang melebihi *proceed* JN;
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham JN kepada pihak manapun;
16. Melakukan *interfinancing* dengan JN afiliasi, induk JN dan atau anak JN kecuali yang berhubungan dengan operasional JN;
17. Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
18. Melunasi selusuh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI;
19. Melunasi atau membayar pokok atau biaya bunga dan atau biaya-biaya lainya atas pinjaman kepada pihak yang telah disetujui atau ditetapkan dalam perjanjian kredit, akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan atau afiliasinya;
20. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim atau wajar berdasarkan penilaian BNI.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp32.395.546.905. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp35.870.039.034.

SUMBER DANA UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Seluruh pendanaan yang dialokasikan untuk investasi barang modal pada tahun 2025 bersumber dari dana internal Perseroan dan fasilitas kredit bank. Komposisi pendanaan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan belanja modal, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan arus kas, kapasitas pendanaan, serta kebutuhan investasi yang mendukung kesinambungan operasional dan pengembangan aset strategis Perseroan.

11. Sell or pledge JN's assets to other parties, including vessel units that have not yet been pledged as collateral to banks or other financial institutions;
12. Obtain new credit facilities from other banks or financial institutions;
13. Conduct mergers, acquisitions, reorganizations, or investments/equity participation in other companies;
14. Make investments exceeding JN's proceeds;
15. Pledge or otherwise encumber JN's shares to any party;
16. Conduct interfinancing with affiliated companies, JN's parent company, and/or JN's subsidiaries, except where related to JN's operations;
17. Issue or sell shares, except where converted into capital through a notarial deed;
18. Repay all or part of debts to shareholders and/or affiliated companies that have not been or have been classified as subordinated loans under the BNI credit facility;
19. Repay or pay principal, interest costs, and/or other costs on loans to parties that have been approved or stipulated in the credit agreement, including but not limited to shareholders and/or their affiliates; and
20. Provide loans to other parties, except in the context of ordinary and reasonable business operational transactions based on BNI's assessment.

The outstanding balance as of 31 December 2025 amounted to Rp32,395,546,905. Loan repayments made in 2025 amounted to Rp35,870,039,034.

SOURCE OF FUNDS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

All funding allocated for capital asset investments in 2025 was sourced from the Company's internal funds and bank credit facilities. The funding composition reflects the application of prudent principles in capital expenditure management, while continuously considering cash flow capabilities, funding capacities, and investment needs that support operational continuity and the development of the Company's strategic assets.

MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI

Dalam pelaksanaan investasi barang modal, Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sebagai denominasi utama. Penggunaan Rupiah selaras dengan domisili operasional Perseroan, struktur pendapatan dan biaya yang sebagian besar dilakukan di dalam negeri, serta kebutuhan investasi yang pada umumnya berkaitan dengan pengadaan aset, fasilitas, peralatan, dan infrastruktur pendukung layanan di wilayah Indonesia. Dengan denominasi Rupiah, Perseroan dapat menjaga kesesuaian antara sumber pendanaan, realisasi belanja modal, dan pencatatan akuntansi, sehingga risiko ketidaksesuaian mata uang terhadap arus kas dan posisi keuangan dapat dikelola secara lebih terkendali.

CURRENCY OF DENOMINATION

In executing capital asset investments, the Company utilizes the Indonesian Rupiah as its primary denomination currency. The use of the Rupiah aligns with the Company's operational domicile, a revenue and cost structure that is largely conducted domestically, and investment needs that generally relate to the procurement of assets, facilities, equipment, and supporting infrastructure for services within the Indonesian territory. The Rupiah allows the Company to maintain alignment between funding sources, capital expenditure realization, and accounting records, thus currency mismatch risks toward cash flows and financial positions can be managed in a more controlled manner.

LANGKAH PERSEROAN UNTUK MELINDUNGI RISIKO DARI POSISI MATA UANG ASING

Perseroan senantiasa mengelola risiko nilai tukar secara hati-hati dengan memantau eksposur mata uang asing yang timbul dari transaksi, kontrak, maupun kewajiban tertentu yang menggunakan denominasi selain Rupiah. Pengelolaan risiko dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kebutuhan pembayaran dalam mata uang asing, kesesuaian antara sumber dana dan kewajiban, serta dampak perubahan nilai tukar terhadap posisi keuangan Perseroan. Dalam hal terdapat transaksi dengan eksposur valuta asing, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penetapan waktu pembayaran, pengelolaan saldo kas, dan pemantauan perkembangan kurs, sehingga potensi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap kinerja keuangan dapat diminimalkan.

THE COMPANY'S MEASURES TO MITIGATE RISKS FROM FOREIGN CURRENCY POSITIONS

The Company continuously manages foreign exchange risks prudently by monitoring foreign currency exposures arising from transactions, contracts, and specific obligations denominated in currencies other than the Rupiah. Risk management is performed through regular evaluations of payment requirements in foreign currencies, alignment between fund sources and obligations, and the impact of exchange rate fluctuations on the Company's financial position. In instances where transactions involve foreign currency exposure, the Company applies prudent principles in timing payments, managing cash balances, and monitoring exchange rate developments, thereby minimizing the potential impact of exchange rate fluctuations on financial performance.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Realisasi investasi konsolidasi ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp505,05 miliar, menurun dibandingkan Rp1,06 triliun pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya investasi pada fasilitas, akomodasi, peralatan, dan permesinan alat produksi, yang merupakan komponen terbesar dalam struktur investasi Perseroan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Perseroan menerapkan pola investasi yang lebih selektif dan terukur, dengan tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendukung keandalan operasional dan kesinambungan layanan.

The consolidated investment realization in 2025 was recorded at Rp505.05 billion, reflecting a decline compared to Rp1.06 trillion in 2024. The decrease was primarily influenced by lower investments in facilities, accommodation, equipment, and production machinery, which constitute the largest components within the Company's investment structure. The condition indicates that in 2025, the Company adopted a more selective and measured investment pattern, while continuing to prioritize needs that support operational reliability and service continuity.

Dari sisi komposisi, investasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai entitas induk masih menjadi kontributor utama terhadap total investasi konsolidasi. Investasi pada tanah, bangunan, peralatan kerja perkantoran, serta instalasi, jaringan, dan peralatan teknologi tetap dilakukan untuk mendukung efektivitas kerja, penguatan sistem, dan peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, investasi anak usaha diarahkan untuk mendukung pengembangan bisnis grup secara terintegrasi, sehingga belanja modal yang dilakukan tetap selaras dengan prioritas strategis dan kemampuan pendanaan Perseroan.

In terms of composition, investments by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) as the parent entity remained the primary contributor to total consolidated investments. Investments in land, buildings, office equipment, alongside installations, networks, and technology equipment were maintained to support work effectiveness, system reinforcement, and service quality improvements. Meanwhile, subsidiary investments were directed to support integrated group business development, ensuring that executed capital expenditures remained aligned with strategic priorities and the Company's funding capacities.

Tabel Rincian Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi (dalam Rp juta)
Details of Type, Objective, and Value of Investment (in Rp million)

Jenis Investasi *Type of Investment*	Tujuan Investasi *Investment Objective*	Nilai Investasi *Investment Value*	
		2025	2024
Fasilitas, Akomodasi, Peralatan, dan Permesinan Alat Produksi Facilities, Accommodation, and Machinery for Production Equipment	Mendukung kesiapan sarana produksi, peningkatan keandalan operasional, serta pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan layanan Perseroan. Support the readiness of production facilities, increasing operational reliability, and meeting the Company's service facilities and equipment needs.	398.921	909.622
Tanah, Bangunan, dan Peralatan Kerja Perkantoran Land, Buildings, and Office Equipment	Mendukung kebutuhan aset perkantoran, fasilitas kerja, serta sarana pendukung administrasi dan operasional Perseroan. Support the Company's office assets, work facilities, and administrative and operational support facilities.	44.943	55.450
Instalasi, Jaringan, dan Peralatan Teknologi Installation, Network, and Technology Equipment	Mendukung penguatan infrastruktur teknologi, digitalisasi proses bisnis, serta peningkatan efektivitas sistem operasional dan layanan. Supporting the strengthening of technology infrastructure, digitizing business processes, and increasing the effectiveness of operational and service systems	30.234	45.733
Total Investasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Total Investment of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Akumulasi investasi entitas induk untuk mendukung penguatan kapasitas operasional, fasilitas kerja, dan infrastruktur teknologi. Accumulated investments by the parent entity to support the strengthening of operational capacity, work facilities, and technology infrastructure.	474.098	1.010.807
Investasi Anak Usaha Subsidiary Investment	Mendukung pengembangan usaha, peningkatan kapasitas layanan, serta kebutuhan investasi pada entitas anak. Support business development, increase service capacity, and investment requirement in subsidiaries.	30.953	48.016
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	Akumulasi investasi Perseroan dan entitas anak dalam rangka mendukung kesinambungan operasional dan pengembangan bisnis ASDP Group. Accumulated investments by the Company and its subsidiaries to support the operational continuity and business development of the ASDP Group.	505.051	1.058.822

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
MATERIAL INFORMATION AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

Perseroan melakukan perubahan struktur organisasi melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.45/HK.002/JKTHS/II/ASDP-2026 tentang Organisasi dan Perangkat Pendukung di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 6 Februari 2026. Perubahan struktur organisasi ini sebagai bagian dari strategis peningkatan efisiensi operasional. Perubahan ini meliputi penggabungan beberapa divisi dan pembentukan unit bisnis baru. Manajemen berpendapat bahwa perubahan ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Adapun ruang lingkup Keputusan Direksi ini meliputi:

1. Struktur Organisasi Perseroan;
2. Kelas Cabang;
3. Perubahan Struktur Oganisasi;
4. Pelimpahan Wewenang SDM;
5. Sistem *Grading*;
6. Jabatan Fungsional.

Perseroan melakukan perubahan struktur organisasi sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi operasional. Perubahan ini meliputi penggabungan beberapa divisi dan pembentukan unit bisnis baru. Manajemen berpendapat bahwa perubahan ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The Company adjusted organizational structure through the Decision of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.45/HK.002/JKTHS/II/ASDP-2026 on the Organization and Supporting Apparatus within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dated 6 February 2026. The modification was part of a strategic effort to improve operational efficiency. The changes include the consolidation of several divisions and the creation of new business units. Management views that these changes do not have a material impact on the consolidated financial statements.

The scope of The BoD Resolution encompasses:

1. The Corporate Organizational Structure;
2. Branch Classification;
3. Organizational Structure Adjustments;
4. Delegation of HR Authority;
5. Grading System;
6. Functional Positions.

The Company executed these organizational structure adjustments as part of its strategy to improve operational efficiency. The change consolidated several divisions and formation of new business units. Management believes that these structural changes do not exert a material impact on the consolidated financial statements.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2025
COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION IN 2025

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI OPERASIONAL

Per 31 Desember 2025, perbandingan target dan realisasi operasional ASDP secara rinci akan dijabarkan di bawah ini.

COMPARISON OF OPERATIONS TARGET AND REALIZATION

As of 31 December 2025, a detailed comparison of ASDP operational targets and realizations will be outlined below.

PENYEBERANGAN KOMERSIL

Pada tahun 2025, kinerja segmen penyeberangan komersial secara umum belum sepenuhnya mencapai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tercermin dari realisasi trip sebanyak 133.075 trip atau 87,11% dari target, penumpang sebanyak 3.999.349 orang atau 86,81% dari target, serta kendaraan sebanyak 4.764.411 unit atau 82,74% dari target. Capaian kendaraan terutama dipengaruhi oleh realisasi kendaraan roda 2 sebanyak 1.917.925 unit atau 78,16% dari target, sementara kendaraan roda 4 terealisasi sebanyak 2.846.486 unit atau 86,13% dari target. Di sisi lain, angkutan barang mencatat capaian yang sangat tinggi sebesar 4.529.130 ton atau 7.860,34% dari target, yang menunjukkan adanya pergeseran kontribusi layanan pada segmen komersial dari mobilitas penumpang dan kendaraan menuju penguatan arus barang. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa segmen penyeberangan komersial masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan target layanan utama, sehingga Perseroan perlu terus memperkuat keandalan armada, optimalisasi pola operasi, serta strategi komersial per lintasan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.

COMMERCIAL FERRY

In 2025, the performance of the commercial ferry segment did not fully achieve the targets set in the corporate Work Plan and Budget (WPB), as reflected by the realization of 133,075 trips or 87.11% of the target, 3,999,349 passengers or 86.81% of the target, and 4,764,411 vehicle units or 82.74% of the target. Vehicle performance was primarily influenced by the realization of 2-wheel vehicles, which stood at 1,917,925 units or 78.16% of the target, while 4-wheel vehicles reached 2,846,486 units or 86.13% of the target. On the other hand, cargo transport recorded an exceptionally high achievement of 4,529,130 tons or 7,860,34% of the target, signaling a shift in the service contribution of the commercial segment from passenger and vehicle mobility toward strengthening cargo flows. Overall, these achievements indicate that the commercial ferry segment still faces challenges in meeting its core service targets, necessitating the Company to continuously reinforce fleet reliability, optimize operational patterns, and implement route-specific commercial strategies to improve productivity and service quality.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Segmen Penyeberangan Komersil
Comparison of Target and Realization for Commercial Ferry Segment Performance

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Trip | Trips	152.765	133.075	87,11
Penumpang (orang) | Passengers (person)	4.606.882	3.999.349	86,81
Kendaraan (unit) | Vehicles (unit)	5.758.545	4.764.411	82,74
Roda 2 | 2-Wheeled	2.453.834	1.917.925	78,16
Roda 4 | 4-Wheeled	3.304.711	2.846.486	86,13
Barang (ton) | Goods (ton)	57.620	4.529.130	7.860,34

PENYEBERANGAN PERINTIS

Pada tahun 2025, kinerja segmen penyeberangan perintis menunjukkan capaian yang relatif terjaga, terutama pada indikator trip yang terealisasi sebanyak 93.916 trip atau mencapai 107,87% dari target RKAP. Capaian ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam menjaga keberlangsungan layanan pada lintasan perintis sebagai bagian dari fungsi konektivitas dan pelayanan publik. Di sisi lain, jumlah penumpang terealisasi sebanyak 1.006.597 orang atau 82,45% dari target, sementara kendaraan tercatat sebanyak 503.494 unit atau 89,29% dari target. Realisasi kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 360.167 unit atau 88,93% dari target dan kendaraan roda 4 sebanyak 143.327 unit atau 90,19% dari target. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa frekuensi layanan perintis telah melampaui target, namun volume penumpang dan kendaraan masih memerlukan penguatan melalui evaluasi kebutuhan lintasan, peningkatan keandalan layanan, serta penyesuaian pola operasi agar manfaat konektivitas pada wilayah pelayanan perintis dapat semakin optimal.

PIONEER FERRY

In 2025, the performance of the pioneer ferry segment demonstrated a relatively well-maintained achievement, particularly in the trip indicator which was realized at 93,916 trips or 107.87% of the WPB target. The achievement reflects the Company's commitment to preserving service continuity on pioneer routes as part of its connectivity and public service functions. Conversely, passenger volume was realized at 1,006,597 people or 82.45% of the target, while vehicles were recorded at 503,494 units or 89.29% of the target. The vehicle realization consisted of 360,167 units of 2-wheel vehicles or 88.93% of the target and 143,327 units of 4-wheel vehicles or 90.19% of the target. Universally, these outcomes indicate that while the frequency of pioneer services exceeded the target, passenger and vehicle volumes require reinforcement through route demand evaluations, service reliability enhancements, and operational pattern adjustments to optimize connectivity benefits in pioneer service areas.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Segmen Penyeberangan Perintis
Comparison of Target and Realization for Pioneer Ferry Segment Performance

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Trip | Trips	87.065	93.916	107,87
Penumpang (orang) | Passengers (person)	1.220.845	1.006.597	82,45
Kendaraan (unit) | Vehicles (unit)	563.916	503.494	89,29
Roda 2 | 2-Wheeled	404.997	360.167	88,93
Roda 4 | 4-Wheeled	158.919	143.327	90,19

PENYEBERANGAN ANAK PERUSAHAAN

Pada tahun 2025, kinerja segmen penyeberangan anak perusahaan belum mencapai target RKAP pada seluruh indikator utama. Realisasi trip tercatat sebanyak 61.587 trip atau 73,18% dari target, sementara jumlah penumpang mencapai 707.342 orang atau 72,36% dari target. Dari sisi kendaraan, realisasi tercatat sebanyak 1.959.028 unit atau 67,34% dari target, terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 1.125.025 unit atau 74,15% dari target dan kendaraan roda 4 sebanyak 834.003 unit atau 72,20% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa segmen penyeberangan anak perusahaan masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi kapasitas layanan, utilisasi armada, dan pemenuhan volume angkutan.

SUBSIDIARY FERRY SERVICES

In 2025, the performance of the subsidiary ferry segment did not meet the WPB targets across all key indicators. Trip was recorded at 61,587 trips or 73.18% of the target, while passenger volume reached 707,342 people or 72.36% of the target. From the vehicle perspective, the realization stood at 1,959,028 units or 67.34% of the target, consisting of 1,125,025 units of 2-wheel vehicles or 74.15% of the target and 834,003 units of 4-wheel vehicles or 72.20% of the target. These figures indicate that the subsidiary ferry segment faces challenges in optimizing service capacity, fleet utilization, and meeting transport volume targets.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Segmen Penyeberangan Anak Perusahaan
Comparison of Target and Realization for Subsidiary Ferry Services Segment Performance

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Trip | Trips	84.159	61.587	73,18
Penumpang (orang) | Passengers (person)	977.491	707.342	72,36
Kendaraan (unit) | Vehicles (unit)	2.909.053	1.959.028	67,34
Roda 2 | 2-Wheeled	1.517.129	1.125.025	74,15
Roda 4 | 4-Wheeled	1.155.141	834.003	72,20

USAHA PELABUHAN - INFRASTRUKTUR

Pada tahun 2025, kapasitas infrastruktur pelabuhan Perseroan terealisasi sesuai dengan target RKAP pada seluruh indikator utama. Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur pelabuhan ASDP pada tahun 2025 tetap terjaga dan mampu mendukung kelancaran operasional penyeberangan, pengelolaan arus kendaraan dan penumpang, serta kesinambungan layanan kepelabuhanan di wilayah operasional Perseroan.

PORT BUSINESS - INFRASTRUCTURE

In 2025, the Company's port infrastructure capacity was realized in line with the WPB targets across all key indicators. The achievement indicates that ASDP's port infrastructure capacity in 2025 remained well-preserved and capable of supporting smooth ferry operations, vehicle and passenger flow management, and the continuity of port services across the Company's operational regions.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Segmen Usaha Pelabuhan - Infrastruktur
Comparison of Target and Realization for Port Business Segment Performance - Infrastructure

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Jumlah Pelabuhan | Total Port	37	37	100
Jumlah Dermaga | Total Docks:	89	89	100
Moveable Bridge	61	61	100
Plengsengan | Levee Dock	25	25	100
Ponton | Floating	3	3	100

USAHA PELABUHAN

Pada tahun 2025, kinerja segmen usaha pelabuhan menunjukkan capaian yang cukup kuat pada beberapa indikator utama, terutama jasa sandar dan jasa parkir. Jasa sandar terealisasi sebesar 1.086.150.395 GRT-*Call* atau mencapai 110,12% dari target RKAP, sedangkan jasa parkir mencatat realisasi 359.350 unit atau 255,58% dari target, yang menunjukkan optimalisasi layanan pendukung di area pelabuhan. Di sisi lain, pas pelabuhan terealisasi sebesar 19.205.126 atau 89,08% dari target, penumpang sebanyak 4.949.672 orang atau 80,95% dari target, kendaraan sebanyak 13.896.104 unit atau 90,80% dari target, serta pemeliharaan dermaga sebanyak 13.896.104 unit atau 90,80% dari target. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa segmen pelabuhan tetap menjadi penopang penting operasional Perseroan, dengan kinerja yang kuat pada jasa sandar dan jasa parkir, namun masih memerlukan penguatan pada optimalisasi arus penumpang dan kendaraan agar kontribusi layanan pelabuhan dapat semakin seimbang dan berkelanjutan.

PORT BUSINESS

In 2025, the performance of the port business segment showed a fairly robust achievement in several key indicators, particularly docking services and parking services. Docking services were completed at 1,086,150,395 GRT-Call or 110.12% of the WPB target, while parking services recorded completion of 359,350 units or 255.58% of the target, highlighting the optimization of supporting services within the port area. On the other hand, port admission tickets were recorded at 19,205,126 or 89.08% of the target, passenger volume at 4,949,672 people or 80.95% of the target, vehicles at 13,896,104 units or 90.80% of the target, and dock maintenance at 13,896,104 units or 90.80% of the target. Overall, these outcomes indicate that the port segment remains a vital anchor for the Company's operations, showing strong performance in docking and parking services, yet requiring reinforcement in optimizing passenger and vehicle flows to balance port service contributions sustainably.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Segmen Usaha Pelabuhan
Comparison of Target and Realization for Port Business Segment Performance

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Jasa Sandar (GRT-*Call*) Docking Services (GRT-*Call*)	986.334.108	1.086.150.395	110,12
Pas Pelabuhan Port Pass:	21.558.823	19.205.126	89,08
Penumpang (orang) Passenger (person)	6.114.790	4.949.672	80,95
Kendaraan (unit) Vehicle (unit)	15.303.429	13.896.104	90,80
Jasa Parkir (unit) Parking Service (unit)	140.604	359.350	255,58
Pemeliharaan Dermaga (unit) Dock Maintenance (unit)	15.303.428	13.896.104	90,80

USAHA ANEKA JASA DAN KERJA SAMA (UAJK) - PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pada tahun 2025, realisasi penjualan BBM tercatat sebesar 99.228.400 liter atau 95,75% dari target RKAP. SPBBK Merak menjadi kontributor utama dengan realisasi 90.474.400 liter atau 96,82% dari target, sedangkan SPBBK Ketapang mencatat realisasi 8.754.000 liter atau 85,96% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa penjualan BBM masih berjalan relatif baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target, sehingga Perseroan perlu terus mengoptimalkan pengelolaan pasokan, distribusi, dan pemanfaatan fasilitas SPBBK untuk mendukung kebutuhan operasional serta layanan pendukung di lingkungan pelabuhan.

ANCILLARY SERVICES AND PARTNERSHIP BUSINESS - FUEL SALES

In 2025, the fuel sales was recorded at 99,228,400 liters or 95.75% of the WPB target. The Merak Compact Fuel Filling Station (SPBBK) was the primary contributor with recorded volume of 90,474,400 liters or 96.82% of the target, while the Ketapang SPBBK recorded volume of 8,754,000 liters or 85.96% of the target. The achievement indicates that fuel sales performed relatively well despite falling slightly short of the target, pointing to the need for the Company to continuously optimize supply management, distribution, and SPBBK facility utilization to support operational requirements and supporting services within the port environment.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Comparison of Target and Realization for Fuel Sales

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
SPBBK Merak (liter | litre)	93.449.737	90.474.400	96,82
SPBBK Ketapang (liter | litre)	10.183.987	8.754.000	85,96
Jumlah | Total	103.633.724	99.228.400	95,75

PENYEBERANGAN TERMINAL EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, realisasi layanan Terminal Eksekutif Gabungan Merak-Bakauheni tercatat sebesar 1.166.460 atau mencapai 77,00% dari target RKAP. Capaian tertinggi berasal dari kendaraan golongan I sebesar 170,87% dan kendaraan golongan III sebesar 105,24%, sementara pejalan kaki, kendaraan golongan II, IVA, VA, dan VIA masih berada di bawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan terminal eksekutif tetap memiliki kontribusi penting dalam mendukung mobilitas pada koridor utama Merak-Bakauheni, namun masih memerlukan penguatan pada daya tarik layanan, optimalisasi pola operasi, dan peningkatan pengalaman pengguna jasa agar pemanfaatan kapasitas dapat lebih optimal.

EXECUTIVE TERMINAL MANAGEMENT

In 2025, the service completed of the Merak-Bakauheni Joint Executive Terminal was recorded at 1,166,460 or 77.00% of the WPB target. The highest achievement came from Class I vehicles at 170,87% and Class III vehicles at 105.24%, while pedestrians, Class II, IVA, VA, and VIA vehicles remained below target. The condition shows that while executive terminal services continue to provide a vital contribution to mobility along the main Merak-Bakauheni corridor, further reinforcement is required on aspects of service appeal, operational pattern optimization, and user experience improvement to better optimize capacity utilization.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Penyeberangan Terminal Eksekutif Gabungan Merak-Bakauheni
Comparison of Target and Realization for Ferry Transportation Services Output of Merak-Bakauheni Joint Executive Terminals

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Pejalan Kaki Pedestrian	500.030	371.048	74,21
Kendaraan Golongan I Vehicles Class I	103	176	170,87
Kendaraan Golongan II Vehicles Class II	94.417	85.268	90,31
Kendaraan Golongan III Vehicles Class III	2.061	2.169	105,24
Kendaraan Golongan IVA Vehicles Class IVA	830.068	633.769	76,35
Kendaraan Golongan VA Vehicles Class VA	7.916	7.057	89,15
Kendaraan Golongan VIA Vehicles Class VIA	80.249	66.973	83,46
Jumlah Total	1.514.844	1.166.460	**77,00**

SEWA RUANGAN

Pada tahun 2025, kinerja sewa ruangan menunjukkan capaian yang beragam pada tiga aset komersial Perseroan. Sosoro Mall dan Anjungan Agung Mall telah memenuhi target *net lettable area* masing-masing sebesar 100,00%, namun realisasi luas area tersewa dan tingkat okupansi masih berada di bawah target, yaitu 64,61% dan 64,76% untuk Sosoro Mall, serta 59,65% untuk Anjungan Agung Mall. Sementara itu, Plaza Marina Labuan Bajo mencatat capaian yang lebih kuat, dengan *net lettable area* mencapai 100,00%, luas area tersewa sebesar 88,28% dari target, dan tingkat okupansi sebesar 88,29%. Capaian ini menunjukkan bahwa optimalisasi ruang komersial masih memiliki ruang penguatan, terutama melalui peningkatan kurasi *tenant*, pengembangan konsep area komersial, serta strategi pemanfaatan aset yang lebih terarah untuk memperkuat kontribusi pendapatan *non-farebox* Perseroan.

PROPERTY RENT

In 2025, property rent performance showed varied results across the Company's three commercial assets. Sosoro Mall and Anjungan Agung Mall both fulfilled their net lettable area targets at 100.00% each, but the actuals of leased area and occupancy rates remained below target, standing at 64.61% and 64.76% for Sosoro Mall, and 59.65% for Anjungan Agung Mall. Meanwhile, Plaza Marina Labuan Bajo recorded a stronger performance, with a net lettable area of 100.00%, a leased area at 88.28% of its target, and an occupancy rate of 88.29%. These achievements indicate that the optimization of commercial space still has room for improvement, particularly through enhanced tenant curation, the development of commercial area concepts, and a more targeted asset utilization strategy to boost the Company's non-farebox revenue contributions.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sewa Ruangan
Comparison of Target and Realization for Property Rent

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Sosoro Mall			
Area Bersih Sewa (NLA) Net Lettable Area (NLA)	7.787	7.787	100,00
Luas Area Tersewa Rented Area	3.548	2.292,36	64,61
Tingkat Okupansi (%) Occupancy Rate (%)	45,46	29,44	64,76
Anjungan Agung Mall			
Area Bersih Sewa (NLA) Net Lettable Area (NLA)	6.833	6.833	100,00
Luas Area Tersewa Rented Area	1.817	1.083,90	59,65
Tingkat Okupansi (%) Occupancy Rate (%)	26,59	15,86	59,65
Plaza Marina Labuan Bajo			
Area Bersih Sewa (NLA) Net Lettable Area (NLA)	2.335	2.335	100,00
Luas Area Tersewa Rented Area	2.086	1.841,53	88,28
Tingkat Okupansi (%) Occupancy Rate (%)	89,33	78,87	88,29

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI ASPEK PEMASARAN

Pada tahun 2025, realisasi pangsa pasar ASDP tercatat sebesar 39,36%, atau mencapai 95,53% dari target RKAP sebesar 41,20%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Perseroan masih mampu mempertahankan posisi yang signifikan dalam industri penyeberangan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan persaingan dan perubahan dinamika pasar pada sejumlah lintasan, sehingga Perseroan terus memperkuat strategi pemasaran, peningkatan kualitas layanan, optimalisasi kanal digital, serta kolaborasi strategis untuk menjaga daya saing dan memperkuat pangsa pasar secara berkelanjutan.

COMPARISON OF MARKETING ASPECTS TARGET AND REALIZATION

In 2025, ASDP's market share was recorded at 39.36%, achieved 95.53% of the WPB target of 41.20%. The achievement indicates that the Company was still able to maintain a significant position within the ferry industry, despite not fully meeting the established target. The condition reflects competitive pressures and changing market dynamics across several routes, prompting the Company to continuously strengthen marketing strategies, improve service quality, optimize digital channels, and build strategic collaborations to maintain competitiveness and reinforce market share sustainably.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Pangsa Pasar (%)
Comparison of Target, Realization, and Projection of Market Share (%)

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Pangsa Pasar | Market Share	41,20	39,36	95,53

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN

Pada tahun 2025, realisasi kinerja keuangan ASDP menunjukkan capaian yang beragam dibandingkan target RKAP. Dari sisi posisi keuangan, aset lancar melampaui target dengan capaian 103,68%, didukung oleh kas dan aset lancar lain yang tetap kuat. Namun, aset tidak lancar terealisasi 82,36% dari target, sehingga jumlah aset Perseroan mencapai 86,10% dari target RKAP. Pada sisi pendanaan, liabilitas jangka pendek tercatat melampaui target dengan capaian 123,95%, sementara liabilitas jangka panjang berada di bawah target sebesar 46,52%, sehingga jumlah liabilitas terealisasi 72,82% dari target. Ekuitas tercatat mencapai 90,33% dari target, mencerminkan struktur permodalan Perseroan yang tetap didominasi oleh ekuitas.

COMPARISON OF FINANCIAL TARGET AND REALIZATION

In 2025, ASDP's financial performance realization showed varied results compared to the WPB targets. From the financial position standpoint, current assets exceeded the target with an achievement of 103.68%, supported by robust cash and other current assets. However, non-current assets were achieved at 82.36% of the target, bringing the Company's total assets to 86.10% of the WPB target. On the funding side, current liabilities exceeded the target at 123.95%, while long-term liabilities fell below target at 46.52%, resulting in total liabilities reaching 72.82% of the target. Equity was recorded at 90.33% of the target, reflecting a capital structure that remains heavily dominated by equity.

Pada laporan laba rugi, pendapatan usaha terealisasi sebesar 86,44% dari target RKAP, sementara beban pokok pendapatan mencapai 98,83% dari target. Kondisi tersebut berdampak pada laba bruto yang terealisasi 65,30% dari target. Beban usaha berada pada 79,22% dari target, namun belum mampu mengimbangi tekanan pada pendapatan dan beban pokok, sehingga laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba tahun berjalan masing-masing mencapai 41,03%, 41,54%, dan 40,14% dari target RKAP. Dari sisi arus kas, kas bersih dari aktivitas operasi mencapai 78,23% dari target, sedangkan kas bersih untuk aktivitas investasi dan pendanaan menunjukkan penggunaan kas yang lebih rendah dari rencana. Meski demikian, kas dan setara kas akhir tahun berhasil melampaui target dengan capaian 113,67%, yang menunjukkan bahwa Perseroan tetap mampu menjaga posisi likuiditas secara kuat di tengah tekanan terhadap profitabilitas.

In the profit or loss statement, revenue was booked at 86.44% of the WPB target, while the cost of revenue was recorded at 98.83% of the target. The condition compressed gross profit, which was realized at 65.30% of its target. Operating expenses stood at 79.22% of the target but were unable to offset the pressures on revenue and cost of revenue, leading operating profit, profit before tax, and profit for the year to reach 41.03%, 41.54%, and 40.14% of their respective WPB targets. Regarding cash flows, net cash from operating activities reached 78.23% of the target, while net cash used in investing and financing activities showed lower utilization than planned. Nonetheless, year-end cash and cash equivalents successfully exceeded the target at 113.67%, demonstrating that the Company remains capable of maintaining a strong liquidity position despite pressures on profitability.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan (dalam Rp juta)
Comparison of Target and Realization for Financial (in Rp million)

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
POSISI KEUANGAN | FINANSIAL POSITION			
Aset Lancar | Current Assets	2.314.350	2.399.487	103,68
Aset Tidak Lancar | Non-Current Assets	10.873.321	8.955.198	82,36
Jumlah Aset | Total Assets	13.187.670	11.354.685	**86,10**
Liabilitas Jangka Pendek | Current Liabilities	1.082.141	1.341.286	123,95
Liabilitas Jangka Panjang | Non-Current Liabilities	2.103.245	978.437	46,52
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities	3.185.387	2.319.723	**72,82**
Ekuitas | Equity	10.002.283	9.034.962	**90,33**
LABA RUGI | PROFIT LOSS			
Pendapatan Usaha | Revenue	5.740.794	4.962.465	86,44
Beban Pokok Pendapatan | Cost Of Revenue	3.619.235	(3.577.017)	(98,83)
Laba Bruto | Gross Profit	2.121.559	1.385.447	65,30
Beban Usaha | Operating Expenses	1.348.545	(1.068.268)	(79,22)
Laba Usaha | Operating Profit	773.014	317.180	41,03
Laba Sebelum Pajak | Profit Before Tax	746.964	310.252	41,54
Beban Pajak Penghasilan | Income Tax Expenses	35.942	(24.822)	(69,06)
Laba Tahun Berjalan | Profit For The Year	711.022	285.430	**40,14**
ARUS KAS | CASH FLOW			
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Generated from Operating Activities	1.274.208	996.771	78,23
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(2.071.765)	(507.619)	24,50
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	589.287	(387.056)	(65,68)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun **Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year**	1.915.041	1.836.375	**95,89**
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun **Cash and Cash Equivalents at the End of Year**	1.706.771	1.940.072	**113,67**

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL

Pada tahun 2025, realisasi struktur modal ASDP menunjukkan capaian yang tetap terjaga dibandingkan target RKAP, dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp11,35 triliun atau mencapai 90,33% dari target sebesar Rp13,19 triliun. Jumlah liabilitas terealisasi sebesar Rp2,32 triliun atau 72,82% dari target, terutama dipengaruhi oleh liabilitas jangka panjang yang berada di bawah target dengan capaian 46,52%, sementara liabilitas jangka pendek tercatat melampaui target dengan capaian 123,95%. Di sisi lain, ekuitas terealisasi sebesar Rp9,03 triliun atau 90,33% dari target RKAP.

COMPARISON OF CAPITAL STRUCTURE TARGET AND REALIZATION

In 2025, the ASDP's actual capital structure showed a well-maintained achievement compared to the WPB targets, with total liabilities and equity standing at Rp11.35 trillion, or reaching 90.33% of the target of Rp13.19 trillion. Total liabilities were realized at Rp2.32 trillion or 72.82% of the target, primarily influenced by long-term liabilities remaining below target with an achievement of 46.52%, while short-term liabilities were recorded as exceeding the target with an achievement of 123.95%. On the other hand, equity was recorded at Rp9.03 trillion or 90.33% of the WPB target.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal (dalam Rp juta)
Comparison of Capital Structure Targets and Realization (in Rp million)

Keterangan *Description*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
STRUKTUR MODAL **CAPITAL STRUCTURE**			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.082.141	1.341.286	123,95
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2.103.245	978.437	46,52
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	3.185.387	2.319.723	**72,82**
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	10.002.283	9.034.962	**90,33**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	13.187.670	11.354.685	**90,33**

HAL LAIN (PERBANDINGAN) YANG DIANGGAP PENTING BAGI PERUSAHAAN

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM

Pada tahun 2025, realisasi pengembangan SDM ASDP menunjukkan capaian yang belum sepenuhnya mencapai target RKAP. Biaya pelatihan terealisasi sebesar Rp20,21 miliar atau 92,88% dari target sebesar Rp21,76 miliar, yang mencerminkan bahwa alokasi pengembangan kompetensi tetap dijalankan secara optimal dan terkendali. Sementara itu, jumlah pekerja yang mengikuti pelatihan tercatat sebanyak 1.931 orang atau 39,25% dari target 4.920 orang. Capaian ini menunjukkan perlunya penguatan perencanaan dan pemerataan program pelatihan agar pengembangan kompetensi karyawan dapat menjangkau lebih banyak insan ASDP, sekaligus mendukung peningkatan kapabilitas organisasi dalam menghadapi kebutuhan bisnis dan layanan yang terus berkembang.

OTHER MATTERS (COMPARISON) CONSIDERED SIGNIFICANT TO THE COMPANY

COMPARISON OF HR DEVELOPMENT TARGET AND REALIZATION

In 2025, the ASDP's human resource development fell short of fully achieving the WPB targets. Training costs were recorded at Rp20.21 billion or 92.88% of the Rp21.76 billion target, indicating that competence development allocations were carried out optimally and under control. Meanwhile, the number of employees participating in training was recorded at 1,931 people or 39.25% of the target of 4,920 people. The outcome highlights the necessary strengthen planning and ensure equal distribution of training programs so that competency development can reach more ASDP personnel, while simultaneously supporting the organization's capability to address evolving business and service needs.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM
Comparison of Human Resources Development Targets and Realization

Keterangan *Description*	Satuan *Unit*	Target RKAP Tahun 2025 *WPB Target in 2025*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
Biaya Pelatihan Training Costs	Rp Juta Rp million	21.763	20.213	92,88
Pelatihan Pekerja Employee Training	Orang People	4.920	1.931	39,25

TARGET/PROYEKSI PERUSAHAAN 2026
COMPANY TARGET/PROJECTIONS IN 2026

PROYEKSI OPERASIONAL 2026

Per 31 Desember 2025, proyeksi operasional 2026 ASDP secara rinci adalah sebagai berikut:

OPERATIONAL PROJECTIONS IN 2026

As of 31 December 2025, ASDP's 2026 operational projections in detail are as follows:

PRODUKSI USAHA PENYEBERANGAN (INDUK)

FERRY BUSINESS PRODUCTION (PARENT ENTITY)

Tabel Proyeksi Kinerja Segmen Penyeberangan (Induk)

Projection for Ferry Segment Performance (Parent Entity)

Keterangan *Description*	Proyeksi *Projection 2026*
Trip | Trips	244.635
Penumpang (orang) | Passengers (person)	5.734.300
Kendaraan (unit) | Vehicles (unit)	5.680.679
Roda 2 | 2-Wheeled	2.477.704
Roda 4 | 4-Wheeled	3.202.975

PRODUKSI USAHA PELABUHAN (INDUK)

PORT BUSINESS PRODUCTION (PARENT ENTITY)

Tabel Proyeksi Kinerja Segmen Pelabuhan (Induk)

Projection for Port Segment Performance (Parent Entity)

Keterangan *Description*	Proyeksi *Projection 2026*
Jasa Sandar (GRT-*Call*) | Docking Services (GRT-Call)	996.633.494
Penumpang (orang) | Passengers (person)	5.409.153
Kendaraan Roda 2 (unit) | Vehicles 2-Wheeled (unit)	4.533.699
Kendaraan Roda 4 (unit) | Vehicles 4-Wheeled (unit)	9.868.001
Roda 4 Penumpang (orang) | 4-Wheeled Passengers (person)	4.134.438
Roda 4 Barang (unit) | 4-Wheeled goods (unit)	5.733.563
Jumlah Kendaraan | Total Vehicles	14.401.700
Jasa Pemeliharaan Dermaga (unit) | Jetty Maintenance Services (unit)	14.401.700

USAHA ANEKA JASA DAN KERJA SAMA (UAJK) - PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

ANCILLARY SERVICES AND PARTNERSHIP BUSINESS - FUEL SALES

Tabel Proyeksi Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Projection for Fuel Sales

Keterangan *Description*	Proyeksi *Projection 2026*
Bahan Bakar Minyak (BBM) Fuel Sales	88.162.430

PENYEBERANGAN TERMINAL EKSEKUTIF

EXECUTIVE TERMINAL MANAGEMENT

Tabel Proyeksi Penyeberangan Terminal Eksekutif Gabungan Merak-Bakauheni

Projection for Ferry Transportation Services Output of Merak and Bakauheni Joint Executive Terminals

Keterangan *Description*	Proyeksi *Projection 2026*
Pejalan Kaki | Pedestrian	412.921
Kendaraan Golongan I | Vehicles Class I	241
Kendaraan Golongan II | Vehicles Class II	84.662
Kendaraan Golongan III | Vehicles Class III	2.219
Kendaraan Golongan IVA | Vehicles Class IVA	717.365
Kendaraan Golongan VA | Vehicles Class VA	7.970
Kendaraan Golongan VIA | Vehicles Class VIA	76.399
Jumlah | Total	**1.301.777**

SEWA RUANGAN

PROPERTY RENT

Tabel Proyeksi Sewa Ruangan

Projection for Property Rent

Keterangan *Description*	Proyeksi *Projection 2026*
Sosoro Mall	
Area Bersih Sewa (NLA) | Net Lettable Area (NLA)	7.787
Luas Area Tersewa | Rented Area	4.161
Tingkat Okupansi (%) | Occupancy Rate (%)	53,43
Anjungan Agung Mall	
Area Bersih Sewa (NLA) | Net Lettable Area (NLA)	6.833
Luas Area Tersewa | Rented Area	2.963
Tingkat Okupansi (%) | Occupancy Rate (%)	43,37
Plaza Marina Labuan Bajo	
Area Bersih Sewa (NLA) | Net Lettable Area (NLA)	2.335
Luas Area Tersewa | Rented Area	2.244
Tingkat Okupansi (%) | Occupancy Rate (%)	96,10

PROYEKSI ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS PROJECTIONS IN 2026

Tabel Proyeksi Pangsa Pasar (%)
Market Share Projections (%)

Keterangan *Description*	Proyeksi 2026 *2026 Projection*
Pangsa Pasar | Market Share	43,62

PROYEKSI KEUANGAN 2026

Per 31 Desember 2025, proyeksi keuangan 2026 ASDP secara rinci adalah sebagai berikut:

FINANCIAL PROJECTIONS IN 2026

As of 31 December 2025, ASDP's 2026 financial projections in detail are as follows:

Tabel Proyeksi Kinerja Segmen Penyeberangan Perintis
Projection for Pioneer Ferry Segment Performance

Keterangan *Description*	Proyeksi 2026 *2026 Projection*
POSISI KEUANGAN | FINANSIAL POSITION	
Aset Lancar | Current Assets	1.678.592
Aset Tidak Lancar | Non-Current Assets	10.520.277
Jumlah Aset | Total Assets	**12.198.869**
Liabilitas Jangka Pendek | Current Liabilities	1.021.051
Liabilitas Jangka Panjang | Non-Current Liabilities	1.747.661
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities	**2.768.712**
Ekuitas | Equity	**9.430.156**
LABA RUGI | PROFIT LOSS	
Pendapatan Usaha | Revenue	5.617.708
Beban Pokok Pendapatan | Cost Of Revenue	3.548.297
Laba Bruto | Gross Profit	2.069.411
Beban Usaha | Operating Expenses	1.522.473
Laba Usaha | Operating Profit	546.938
Laba Sebelum Pajak | Profit Before Tax	532.304
Beban Pajak Penghasilan | Income Tax Expenses	32.207
Laba Tahun Berjalan | Profit For The Year	**500.097**
ARUS KAS | CASH FLOW	
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi | Net Cash Generated from Operating Activities	982.706
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Investasi | Net Cash Used in Investing Activities	(2.189.502)
Kas Neto Digunakan dari Aktivitas Pendanaan | Net Cash Used in Financing Activities	551.328
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun | Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year	**2.051.531**
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun | Cash and Cash Equivalents at the End of Year	**1.396.064**

Tabel Proyeksi Rasio Keuangan (%)

Projection for Financial Ratio (%)

Keterangan *Description*	Proyeksi 2026 *2026 Projection*
RASIO LIKUIDITAS | LIQUIDITY RATIO	
Rasio Kas | Cash Ratio	136,73
Rasio Lancar | Current Ratio	164,40
Rasio Cepat | Quick Ratio	145,32
RASIO SOLVABILITAS | SOLVENCY RATIO	
Rasio Utang terhadap Aset | Debt to Asset Ratio	14,79
Rasio Utang terhadap Modal | Debt to Equity Ratio	19,13
Interest Coverage Ratio	452,92

PROYEKSI STRUKTUR MODAL 2026

CAPITAL STRUCTURE PROJECTIONS IN 2026

Tabel Proyeksi Struktur Modal 2026

Capital Structure Projections in 2026

Keterangan *Description*	Proyeksi 2026 *2026 Projection*
Liabilitas Jangka Pendek | Current Liabilities	1.021.051
Liabilitas Jangka Panjang | Non-Current Liabilities	1.747.661
Jumlah Liabilitas | Total Liabilities	2.768.712
Jumlah Ekuitas | Total Equity	9.430.156
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | Total Liabilities and Equity	12.198.868

PROYEKSI PEMBAGIAN DIVIDEN 2026

Kebijakan pembagian dividen Perseroan ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan dividen dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kinerja laba bersih tahun berjalan, kewajiban pembentukan cadangan, kondisi likuiditas, struktur permodalan, serta kebutuhan pendanaan untuk menjaga kesinambungan operasional dan mendukung rencana investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan dividen Perseroan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak Pemegang Saham dan penguatan fondasi keuangan Perseroan secara berkelanjutan.

DIVIDEND DISTRIBUTION PROJECTION IN 2026

The Company's dividend distribution policy is established through the mechanism of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) with reference to the Articles of Association and applicable laws and regulations. The stipulation of dividends is carried out prudently, taking into account the performance of the profit for the year, mandatory reserve allocations, liquidity conditions, capital structure, and funding requirements to maintain operational continuity and support medium- to long-term investment plans. Through this approach, the Company's dividend policy is directed at maintaining a balance between fulfilling Shareholders' rights and strengthening the Company's financial foundation sustainably.

HAL LAIN (PROYEKSI) YANG DIANGGAP PENTING BAGI PERUSAHAAN

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM 2026

OTHER MATTERS (PROJECTIONS) CONSIDERED SIGNIFICANT TO THE COMPANY

PROJECTION OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN 2026

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM 2026
Projection of Human Resources Development In 2026

Keterangan *Description*	Satuan *Unit*	Proyeksi 2026 *2026 Projection*
Biaya Pelatihan | Training Costs	Rp Juta Rp million	42.905
Pelatihan Pekerja | Employee Training	Orang People	1.978

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN, DAN PEMBAYARAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY, ANNOUNCEMENT, AND PAYMENT

KEBIJAKAN DIVIDEN

ASDP membagikan dividen atas laba yang diperoleh dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26 tentang Penggunaan Laba. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian dividen ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan membukukan laba positif. Selain itu, dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal ditetapkan untuk dibayarkan akan dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip kepatuhan, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam pengelolaan laba Perseroan.

DIVIDEND POLICY

ASDP distributes dividends from earned profits with reference to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended latest by Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, as well as Article 26 of the Company's Articles of Association regarding the Utilization of Profits. Based on these provisions, dividend distribution is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS) and can only be executed if the Company records a positive profit. Furthermore, any dividend left unclaimed within five years from the date set for payment will be transferred into a special reserve fund in accordance with applicable regulations. The policy reflects the application of compliance, prudence, and accountability principles in managing the Company's profits.

PEMBAGIAN DIVIDEN

ASDP menerapkan kebijakan pembagian dividen dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Besaran dividen ditetapkan dengan mempertimbangkan laba yang diperoleh, kebutuhan pembentukan cadangan, kondisi likuiditas, rencana investasi, serta upaya menjaga struktur permodalan Perseroan agar tetap sehat dan optimal. Pembagian dividen atas laba tahun buku 2024 dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan dan kebutuhan pendanaan untuk mendukung kesinambungan usaha. Rincian pembagian dividen selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

DIVIDEND DISTRIBUTION

ASDP implements a dividend distribution policy based on the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS). The dividend amount is established by considering the profits earned, reserve requirements, liquidity conditions, investment plans, and efforts to maintain a healthy and optimal corporate capital structure. The distribution of dividends for the 2024 financial year was carried out based on the GMS resolution, while continuing to heed the Company's financial capacity and funding needs to support business continuity. Details of dividend distributions over the last three years are presented in the following table:

Tabel Pembagian Dividen Tahun Buku 2023-2025
Dividend Distribution for 2023-2025 Fiscal Year

Uraian *Description*	Tahun Buku 2025 *2025 Financial Year*	Tahun Buku 2024 *2024 Financial Year*	Tahun Buku 2023 *2023 Financial Year*
Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk (Rp juta) Net income attributed to the parent entity (Rp million)	**285.430**	447.306	636.540
Persentase Dividen (%) Dividend Percentage (%)	**10,25%**	5,00%	17,92%
Dividen yang Dibagikan (Rp juta) Appropriated Dividends (Rp million)	**(44.964)**	(30.672)	(101.000)
Dividen per Lembar (Rp juta) Dividend per Share (Rp million)	**44.964**	30.672	101.000
Pay Out Ratio (%) Pay Out Ratio (%)	**10,25%**	5,00%	17,92%
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	**23 Juni | June 2025**	4 Juni | June 2024	26 Juni | June 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payout	**23 Juli | July 2025**	1 Juli | July 2024	21 Juli | July 2023

REALISASI PENGGUNAAN DATA HASIL PENAWARAN UMUM
REALIZED USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Selama tahun buku 2025, ASDP tidak melakukan penawaran umum efek, baik dalam bentuk saham, obligasi, sukuk, maupun instrumen efek lainnya melalui pasar modal. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki dana hasil penawaran umum yang perlu dilaporkan realisasi penggunaannya pada periode pelaporan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian realisasi penggunaan dana, saldo dana yang belum digunakan, maupun persetujuan RUPS atau RUPO atas perubahan penggunaan dana. Seluruh informasi tersebut tidak relevan untuk disajikan karena Perseroan tidak memiliki aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum efek sepanjang tahun 2025.

During the 2025 financial year, ASDP did not conduct any public offering of securities, whether in the form of shares, bonds, sharia bonds, or other securities instruments through the capital market. Consequently, the Company has no proceeds from a public offering that require utilization reports during this reporting period.

In relation to this, the Company does not present information regarding total funds raised, planned utilization of funds, details of actual fund utilization, remaining balances of unused funds, or GMS/ GMB approvals regarding changes in the utilization of funds. All such information is irrelevant to present because the Company had no capital-raising activities through public offerings of securities throughout 2025.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, DISVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURASI UTANG DAN MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENTS, EXPANSION, MERGERS/CONSOLIDATIONS, DIVESTMENTS, ACQUISITIONS, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat informasi material terkait ekspansi, divestasi, penggabungan usaha/merger, akuisisi, maupun restrukturisasi utang dan/atau modal yang dilakukan oleh Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang dapat disajikan terkait nilai transaksi, pihak yang terlibat, tujuan transaksi, maupun dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan pada periode pelaporan. Adapun informasi mengenai investasi Perseroan disajikan secara terpisah pada subbab Investasi Barang Modal dalam bab ini.

Throughout the 2025 financial year, there was no material information regarding expansions, divestments, business combinations/mergers, acquisitions, or debt and/or capital restructurings carried out by the Company. Thus, no information can be presented regarding transaction values, parties involved, transaction purposes, or their impact on the financial condition and performance of the Company during the reporting period. Information regarding the Company's investments is presented separately in the Capital Goods Investment subsection of this chapter.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun buku 2025, Perseroan tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tersebut yang dapat disampaikan pada laporan tahunan ini.

MATERIAL TRANSACTION INVOLVING CONFLICT OF INTEREST

During the 2025 financial year, the Company did not engage in any transactions containing conflicts of interest. Consequently, there is no such information to be disclosed in this annual report.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI

PIHAK-PIHAK BERELASI

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang memiliki hubungan dengan entitas pelapor, baik melalui pengendalian, pengendalian bersama, pengaruh signifikan, hubungan kelompok usaha, maupun keterlibatan sebagai personel manajemen kunci. Pengungkapan pihak berelasi dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi dan saldo yang timbul dari hubungan tersebut disajikan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya dikategorikan memiliki relasi dengan entitas pelapor apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.
   c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. Suatu entitas dikategorikan memiliki relasi dengan entitas pelapor apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
   a. Entitas tersebut dan entitas pelapor merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama. Dalam hal ini, entitas induk, entitas anak, serta sesama entitas anak dalam kelompok usaha yang sama saling memiliki hubungan berelasi.
   b. Satu entitas merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain, termasuk entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan bagian dari kelompok usaha di mana entitas lain tersebut menjadi anggotanya.
   c. Kedua entitas merupakan ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   d. Satu entitas merupakan ventura bersama dari entitas ketiga, sementara entitas lainnya merupakan entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut.
   e. Entitas tersebut merupakan program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja bagi karyawan entitas pelapor atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Apabila entitas pelapor menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga dikategorikan sebagai pihak berelasi dengan entitas pelapor.
   f. Entitas tersebut dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

TRANSACTION WITH AFFILIATED OR RELATED PARTY

RELATED PARTIES

A related party is a person or entity connected to the reporting entity, whether through control, joint control, significant influence, business group relationships, or involvement as key management personnel. Disclosure of related parties is conducted to ensure that transactions and balances arising from such relationships are presented transparently, fairly, and in accordance with applicable accounting standards.

1. A person or a close member of that person's family is categorized as related to a reporting entity if they meet any of the following criteria:
   a. Has control or joint control over the reporting entity.
   b. Has significant influence over the reporting entity.
   c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. An entity is categorized as related to a reporting entity if it meets any of the following criteria:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group. In this situation, the parent entity, subsidiary entities, and fellow subsidiary entities in the same business group have a related relationship with each other.
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity, including an associate or joint venture that is part of a business group of which the other entity is a member.
   c. Both entities are joint ventures of the same third party.
   d. One entity is a joint venture of a third entity, while the other entity is an associate of the third entity.
   e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person meeting the criteria described in clause (a).

g. Orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka i memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut, atau merupakan personel manajemen kunci entitas tersebut maupun entitas induknya.
h. Entitas, atau anggota dari kelompok usaha di mana entitas tersebut menjadi bagian, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Dalam konteks ini, Pemerintah mencakup instansi pemerintah dan badan serupa, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian pada catatan yang relevan. Pengungkapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan serta ketentuan pelaporan yang berlaku.

SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam rangka mendukung kebutuhan operasional, pendanaan, maupun aktivitas bisnis lainnya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa penetapan harga dan persyaratan atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan secara wajar dan setara dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, sepanjang kondisi dan karakteristik transaksinya sebanding. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pihak berelasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kewajaran serta ketentuan yang berlaku. Adapun hubungan dan jenis akun atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi disajikan sebagai berikut:

g. A person meeting the criteria described in clause (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity or its parent entity.

h. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government. In this context, the Government includes government agencies and similar bodies, whether at the central or regional level. Government-related entities may include entities controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance as a shareholder, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises as the proxy for the shareholder.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The disclosure is part of the Company's commitment to transparency, accountability, and compliance with financial accounting standards and applicable reporting regulations.

NATURE OF RELATIONS

In conducting its business activities, the Group enters into transactions with related parties to support operational requirements, funding, and other business activities. Company policy dictates that pricing and terms for transactions with related parties are conducted fairly and independently, equivalent to transactions carried out with third parties, provided that the conditions and characteristics of the transactions are comparable. The policy is applied to ensure that all related party transactions are carried out transparently, accountably, and in accordance with fairness principles and applicable provisions. The relationships and types of accounts or transactions with related parties are presented as follows:

Tabel Pihak Berelasi Tahun 2025
Related Party in 2025

No	Pihak-pihak Berelasi *Related Parties*	Hubungan *Relationship*	Jenis Akun atau Transaksi *Type of Account or Transaction*
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Utang Bank, Pendapatan yang Masih Harus Diterima Cash and Cash Equivalents, Accounts Receivable, Bank Loans, Accrued Revenue
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Utang Bank Cash and Cash Equivalents, Accounts Receivable, Accrued Revenue, Bank Loans
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Kas dan Setara Kas, Utang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima Cash and Cash Equivalents, Accounts Payable, Accrued Revenue
5	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Kas dan Setara Kas, Utang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Pendapatan Usaha Cash and Cash Equivalents, Accounts Payable, Accrued Revenue, Revenue
7	PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha, Utang Asuransi, Utang Usaha Accounts Receivable, Revenue, Insurance Payable, Accounts Payable
8	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Controlled by the Indonesian Government	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Pendapatan Usaha, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Accounts Receivable, Accrued Revenue, Revenue, Other Current Liabilities
9	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Pendapatan Klaim Claims Revenue
10	PT Jasa Raharja Putera	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha, Pendapatan Usaha, Utang Asuransi Accounts Payable, Revenue, Insurance Payable
11	Perum DAMRI	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Accrued Revenue
12	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha, Pendapatan Usaha Accounts Payable, Revenue
13	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Piutang Usaha, Utang Usaha Accounts Receivable, Accounts Payable
14	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha, Pembelian Accounts Payable, Purchases
15	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Liabilitas Lain-lain Other Liabilities
16	PT Telkomsel	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha, Pembelian Accounts Payable, Purchases
17	PT Telkom Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
18	PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha, Pembelian Accounts Payable, Purchases
19	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha, Pembelian Accounts Payable, Purchases
20	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
21	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable

Tabel Pihak Berelasi Tahun 2025
Related Party in 2025

No	Pihak-pihak Berelasi *Related Parties*	Hubungan *Relationship*	Jenis Akun atau Transaksi *Type of Account or Transaction*
22	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
23	PT Surveyor Indonesia	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
24	PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha, Pembelian Accounts Payable, Purchases
25	PT Yoda Karya (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
26	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Indonesian Export Financing Institution	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Pinjaman Sindikasi Syndicated Loans
27	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
28	PT PLN (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
29	Angkasa Pura Support	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
30	PT BGR Logistik	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
31	PT Asuransi ASEI Indonesia	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
32	PT Bina Karya (Persero)	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
33	PT BRI Multifinance Indonesia	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Utang Usaha Accounts Payable
34	PT Patra Logistik	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Pendapatan Usaha Revenue
35	PT Elnusa Petrofin	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Pendapatan Usaha Revenue
36	PT Pegadaian	Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	Pendapatan Usaha Revenue
37	Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Personel Manajemen Kunci Key Management Personnel	Kompensasi dan Remunerasi Compensation and Remuneration

NILAI SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam rangka mendukung kebutuhan operasional, pendanaan, maupun aktivitas bisnis lainnya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa penetapan harga dan persyaratan atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan secara wajar dan setara dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, sepanjang kondisi dan karakteristik transaksinya sebanding. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pihak berelasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kewajaran serta ketentuan yang berlaku. Adapun transaksi signifikan dengan pihak berelasi disajikan sebagai berikut:

BALANCE OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

In conducting its business activities, the Group enters into transactions with related parties to support operational requirements, funding, and other business activities. Company policy dictates that pricing and terms for transactions with related parties are conducted fairly and independently, equivalent to transactions carried out with third parties, provided that the conditions and characteristics of the transactions are comparable. The policy is applied to ensure that all related party transactions are carried out transparently, accountably, and in accordance with fairness principles and applicable provisions. The significant transactions with related parties are presented as follows:

Pihak Yang Bertransaksi *Transacting Parties*	2025	2024
Jenis Transaksi - Bank Transaction Type - Bank		
Rupiah Indonesian Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	347.641.313.038	281.769.139.882
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	32.941.429.792	157.984.472.927
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	542.249.923.473	151.546.064.680
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.411.148.856	149.130.976.441
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	76.233.511.977	63.926.809.388
Dolar Amerika Serikat United States Dollar		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.466.054.149	1.408.130.895
Euro Euro		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.298.433	8.248.383
Total	**1.039.950.679.718**	**805.773.842.596**
Jenis Transaksi - Deposito Transaction Type - Deposit		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	310.000.000.000	310.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90.864.170.000	139.354.470.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	25.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000.000.000	125.000.000.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	10.000.000.000	-
Total	**735.864.170.000**	**874.354.470.000**
Jenis Transaksi - Piutang Usaha Transaction Type - Accounts Receivable		
Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	37.785.607.750	10.357.866.230
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	792.910.237	729.812.547
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	54.463.179	742.223.411
PT PP (Persero) Tbk	23.367.503	-
PT Telkomsel	13.652.743	247.062.373
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.531.012	118.400.907
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	-	141.105.250
Lain-lain Others	157.383.184	371.900.973
Sub Total	38.838.915.608	12.708.371.691
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(242.619.263)	(814.020.699)
Total	**38.596.296.345**	**11.894.350.992**
Jenis Transaksi - Pendapatan yang Masih Harus Diterima Transaction Type - Accrued Revenue		
Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	147.994.697.043	138.549.727.451
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.932.485.932	25.280.969.345
Perum DAMRI	134.868.000	134.868.000

Pihak Yang Bertransaksi *Transacting Parties*	2025	2024
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	662.149.000	133.113.800
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	109.999.047	125.218.728
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	32.925.075	-
Lain-lain Others	324.906.092	191.917.778
Sub Total	200.192.030.189	164.415.815.102
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(39.202.909.167)	(19.013.462.138)
Total	**160.989.121.022**	**145.402.352.964**
Jenis Transaksi - Utang Usaha Transaction Type - Accounts Payable		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	20.318.181.818	35.412.428.198
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	8.033.232.000	7.054.387.398
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	5.013.302.037	3.970.977.566
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	4.449.546.594	5.183.440.101
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	4.089.248.874	-
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	3.636.254.178	1.889.678.156
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.657.576.225	3.993.812.922
PT Dok dan Perkapalan Surabaya	1.406.694.060	-
PT Jasa Raharja Putera	1.112.929.151	885.890.320
PT PLN (Persero)	759.521.525	1.390.645.271
PT Surveyor Indonesia	493.201.575	-
PT Angkasa Pura Support	479.189.432	-
PT Bina Karya (Persero)	287.878.500	620.515.572
PT BRI Multifinance Indonesia	286.391.248	663.782.929
PT BGR Logistik Indonesia	245.000.000	391.850.000
PT Pos Indonesia (Persero)	212.411.054	169.611.254
PT Asuransi ASEI Indonesia	180.800.000	-
PT Yodya Karya (Persero)	172.062.500	172.062.500
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	-	156.387.300
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	14.063.589.610
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	572.522.522
PT Amarta Karya (Persero)	-	1.190.960.000
Lain-lain Others	2.383.288.817	692.267.561
Total	**55.216.709.588**	**78.474.809.180**
Jenis Transaksi - Pembelian Transaction Type - Purchase		
PT Pertamina (Persero)	1.029.642.937.899	1.034.548.086.399
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	14.382.853.842	13.529.661.053
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	8.142.301.583	-
Total	**1.052.168.093.324**	**1.048.077.747.452**
Jenis Transaksi - Utang Asuransi Transaction Type - Insurance Debt		
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	21.839.480.747	20.898.891.608

Pihak Yang Bertransaksi *Transacting Parties*	2025	2024
PT Jasa Raharja Putera	5.014.593.620	4.937.337.274
Total	**26.854.074.367**	**25.836.228.882**
Jenis Transaksi – Liabilitas Jangka Pendek Lainnya **Transaction Type - Other Current Liabilities**		
Kementeria Perhubungan (pel. Tg. Api Api) Ministry of Transportation (pel. Tg. Api Api)	538.818.775	-
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	23.772.724	606.735.669
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	12.600.000.000
Lain-lain Others	193.926.268	200.922.844
Total	**756.517.767**	**13.407.658.513**
Jenis Transaksi – Pinjaman Sindikasi **Transaction Type - Syndicated Loans**		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Indonesian Export Financing Institution	94.000.000.000	98.000.000.000
Total	**94.000.000.000**	**98.000.000.000**
Jenis Transaksi – Liabilitas Jangka Panjang Lainnya **Transaction Type - Other Non-Current Liabilities**		
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.542.940.176	1.542.940.176
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	322.624.767	242.160.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.824.729	45.925.000
Lain-lain Others	5.147.100	-
Total	**1.921.536.772**	**1.831.025.176**
Jenis Transaksi - Gaji dan Tunjangan **Transaction Type - Salary and Allowances**		
Dewan Komisaris Board of Commissioners	14.846.127.911	23.093.750.203
Dewan Direksi Board of Directors	22.125.300.000	40.256.332.451
Total	**36.971.427.911**	**63.350.082.654**
Jenis Transaksi – Pendapatan Usaha **Transaction Type - Revenue**		
Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	406.015.934.998	364.490.540.544
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	9.659.216.044
PT Asuransi Jasa Raharja Putera	29.730.753.454	-
PT Patra Logistik	16.897.519.420	-
PT Jasa Raharja	6.291.330.867	-
PT Elnusa Petrofin	4.052.421.837	-
PT Pos Indonesia	702.056.300	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	466.582.568	-
PT Pegadaian	375.480.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	130.217.350	-
Lain-lain Others	650.119.792	-
Total	**465.312.416.586**	**374.149.756.588**

KEWAJARAN TRANSAKSI

Nilai wajar merupakan harga yang akan diterima dari penjualan suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan dilakukan untuk keperluan pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan dalam laporan keuangan.

Nilai wajar diklasifikasikan ke dalam hirarki nilai wajar berdasarkan tingkat keterobservasian input dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Level 1
   Harga kuotasian tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik dan dapat diakses pada tanggal pengukuran.
2. Level 2
   Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Level 3
   Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik aset atau liabilitas terkait, dengan memaksimalkan penggunaan input relevan yang dapat diobservasi dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Perpindahan antarlevel dalam hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan saat perpindahan tersebut terjadi.

FAIRNESS OF TRANSACTIONS

Fair value is the price that would be received from the sale of an asset or the price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Fair value measurements of financial assets and liabilities are conducted for the purposes of recognition, measurement, and disclosure within the financial statements.

Fair value is classified into a fair value hierarchy based on the level of observability of inputs and the significance of inputs to the overall measurement, as follows:

1. Level 1
   Unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date.
2. Level 2
   Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
3. Level 3
   Unobservable inputs for the asset or liability.

In measuring the fair value of an asset or liability, the Group uses observable market data as much as possible. If fair value cannot be directly observed, the Group utilizes valuation techniques appropriate to the conditions and characteristics of the related asset or liability, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs. Transfers between levels within the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period in which the transfer occurs.

TUJUAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Tujuan ASDP melakukan transaksi dengan pihak berelasi adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha, memperkuat sinergi bisnis, serta menciptakan nilai tambah bagi masing-masing pihak. Transaksi tersebut dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kebutuhan bisnis yang wajar, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

PURPOSE OF RELATED PARTY TRANSACTION

The purpose of ASDP entering into transactions with related parties is to support smooth business activities, strengthen business synergies, and create added value for each party. These transactions are executed professionally, transparently, and based on legitimate business needs, while continuously adhering to fairness principles, compliance with applicable regulations, and the implementation of good corporate governance.

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Kebijakan mekanisme *review* transaksi dan pemenuhan peraturan terkait disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagai rujukan praktik tata kelola yang baik, khususnya dalam hal penilaian kewajaran, transparansi, pengendalian benturan kepentingan, dokumentasi, serta pengungkapan transaksi.

Mekanisme *review* dilakukan melalui identifikasi pihak yang bertransaksi, penelaahan sifat hubungan, evaluasi tujuan dan manfaat transaksi, penilaian kewajaran nilai dan persyaratan transaksi, serta pemeriksaan kesesuaian dengan prinsip *arm's length principle*. Transaksi yang bersifat signifikan atau memerlukan persetujuan organ perusahaan diproses sesuai jenjang kewenangan, termasuk melalui kajian unit terkait, fungsi hukum, fungsi keuangan, manajemen risiko, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh transaksi didokumentasikan secara memadai dan diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian pada catatan yang relevan sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Dewan Komisaris dan komite audit berperan untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*). Dengan demikian, Direksi ASDP menyatakan dan meyakini bahwa semua transaksi afiliasi telah melewati semua prosedur yang berlaku di Perseroan dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

POLICY ON TRANSACTION REVIEW MECHANISM AND REGULATORY COMPLIANCE

The policy for transaction review mechanisms and compliance with related regulations is compiled with reference to the Company's Articles of Association, PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, PSAK 224 regarding Related Party Disclosures, and other relevant laws and regulations. In its execution, the Company also heeds the principles in POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions as a reference for good governance practices, particularly regarding fairness assessments, transparency, conflict of interest control, documentation, and transaction disclosure.

The review mechanism is conducted by identifying the transacting parties, reviewing the nature of the relationship, evaluating the purpose and benefits of the transaction, assessing the fairness of the value and terms, and verifying alignment with the arm's length principle. Significant transactions or those requiring corporate organ approvals are processed according to the levels of authority, including reviews by relevant units, the legal function, the finance function, risk management, the Boards of Directors, Commissioners, and/or the Shareholders in accordance with applicable provisions. All transactions are adequately documented and disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements as a form of implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Board of Commissioners and the audit committee play a role in ensuring that affiliated transactions have gone through adequate procedures and are carried out with generally accepted business practices, including meeting the arm's-length principle. Accordingly, the Board of Directors of ASDP states and believes that all affiliated transactions have passed all applicable procedures in the Company and comply with the laws and regulations in force in Indonesia.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA
AMENDMENTS TO STATUTORY REGULATIONS AND THEIR IMPACT

Per 31 Desember 2025, terdapat beberapa perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi dan berdampak pada kelangsungan usaha ASDP. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2025, there were several changes in laws and regulations that impacted ASDP's business continuity. The details are as follows:

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 709).
Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette Year 2025 No. 2, Supplement to the State Gazette No. 709).

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:

1. Perubahan Jenis Saham, Susunan Pemegang Saham, dan Perubahan Tugas Wewenang Direksi; | Amendments to Share Categories, Shareholder Composition, and the Duties and Authorities of the Board of Directors;
2. Perubahan dan Penambahan Struktur Holding Pengelolaan BUMN; | Amendments to Share Categories, Shareholder Composition, and the Duties and Authorities of the Board of Directors;
3. Pembentukan Danantara dan Holding Investasi dan Holding Operasional; | Establishment of Danantara, Investment Holdings, and Operational Holdings;
4. Pola Koordinasi Holding; | Coordination Models for Holdings;
5. Status Non Penyelenggara Negara; | Coordination Models for Holdings;
6. Business Judgement Rules; dan | Business Judgment Rules; and
7. Perubahan Sistem Audit. | Restructuring of the Audit System.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Ketentuan ini menjadi dasar untuk memastikan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan aksi korporasi, pengawasan, dan pelaporan tetap selaras dengan ketentuan terbaru mengenai pengelolaan BUMN.

This provision serves as the basis to ensure that decision-making, corporate actions, oversight, and reporting remain aligned with the latest guidelines on SOEs management.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Tidak terdapat dampak kuantitatif langsung yang material terhadap laporan keuangan tahun 2025. Namun, terdapat potensi kebutuhan biaya kepatuhan dan administrasi korporasi, antara lain penyesuaian dokumen, kajian hukum, penguatan pelaporan, dan penyelarasan kebijakan internal. Dampak finansial baru dapat diukur apabila terdapat keputusan pemegang saham, restrukturisasi, atau aksi korporasi yang secara langsung melibatkan ASDP.

There is no material direct quantitative impact on the 2025 financial statements. However, potential compliance and corporate administration costs may arise, including document revisions, legal reviews, enhanced reporting, and the alignment of internal policies. Financial impacts can only be measured upon shareholder decisions, restructurings, or corporate actions directly involving ASDP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Government Regulation No. 10 of 2025 on the Organization and Governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency.

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut, Danantara memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.

The establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency or Danantara under Law No. 1 of 2025 on the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises aims to optimize the long-term investment value managed by SOEs sustainably. To deliver this function and objective, Danantara incorporates specific characteristics designed to provide operational flexibility and professionalism in improving investment value, while acting as a strategic partner for foreign investors.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampak terutama berkaitan dengan penyesuaian pola koordinasi, pelaporan, dan pengawasan dalam ekosistem BUMN yang berada dalam cakupan pengelolaan investasi negara.

The impact primarily relates to the adjustment of coordination, reporting, and oversight frameworks within the SOEs ecosystem that falls under the scope of state investment management.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Tidak terdapat dampak kuantitatif langsung yang material pada tahun 2025. Potensi dampak finansial dapat muncul pada periode berikutnya apabila terdapat arahan investasi, perubahan portofolio, penataan aset, pembiayaan, atau aksi korporasi yang ditetapkan melalui mekanisme Danantara dan berdampak pada struktur modal, kas, aset, atau liabilitas ASDP.

No material direct quantitative impact is recorded in 2025. Potential financial impacts may emerge in subsequent periods from investment mandates, portfolio adjustments, asset structuring, financing, or corporate actions determined through the Danantara framework that affect the capital structure, cash, assets, or liabilities of ASDP.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional.
Government Regulation No. 10 of 2025 on the Organization and Governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency.

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:

Penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dalam rangka pendirian Holding Operasional.

Additional state capital injection into the share capital of the State-Owned LLC of PT Biro Klasifikasi Indonesia, whose corporate status was established under Government Regulation No. 1 of 1977 on the Conversion of the State Company Biro Klasifikasi Indonesia into a State-Owned LLC, within the framework of establishing an Operational Holding.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampaknya bersifat tidak langsung, yaitu melalui potensi penguatan sinergi, koordinasi layanan, dan tata kelola antar-BUMN dalam ekosistem operasional yang relevan.

The impact is indirect, occurring through the potential strengthening of synergies, service coordination, and governance among SOEs within the relevant operational ecosystem.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Tidak terdapat dampak kuantitatif langsung terhadap aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, maupun beban ASDP pada tahun 2025 karena penyertaan modal negara dilakukan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia. Dampak finansial bagi ASDP hanya akan timbul apabila terdapat keputusan lanjutan yang secara khusus menempatkan ASDP dalam struktur holding, sinergi investasi, atau transaksi antar-BUMN tertentu.

There is no direct quantitative impact on the assets, liabilities, equity, revenues, or expenses of ASDP in 2025, as the state capital injection was allocated to PT Biro Klasifikasi Indonesia. Financial impacts for ASDP will only arise if subsequent decisions explicitly position ASDP within the holding structure, investment synergies, or specific inter-SOEs transactions.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Government Regulation No. 16 of 2025 on State Capital Injection into the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency.

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:
Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pengalih an 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham milik negara berupa saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

The state capital injection referenced in Article 1 originates from the transfer of 99% (ninety-nine percent) of state-owned shares in the form of Series B shares in the State-Owned LLC PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampaknya terutama bersifat strategis, yaitu potensi perubahan arah pengawasan investasi, koordinasi kebijakan portofolio, dan penajaman ekspektasi terhadap penciptaan nilai BUMN. Perseroan perlu memastikan bahwa rencana investasi, pengelolaan aset, dan kebijakan pendanaan tetap selaras dengan arah pengelolaan investasi negara.

The impact is strategic, driven by potential shifts in investment oversight, portfolio policy coordination, and heightened expectations for SOEs value creation. The Company must ensure that investment plans, asset management, and funding policies remain aligned with state investment strategies.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Tidak terdapat dampak kuantitatif langsung yang material terhadap laporan keuangan ASDP pada tahun 2025. Dampak kuantitatif baru dapat diakui apabila terdapat keputusan investasi, penyertaan modal, restrukturisasi pendanaan, atau aksi korporasi lanjutan yang melibatkan ASDP dan dapat diukur secara andal dalam laporan keuangan.

No material direct quantitative impact affects the financial statements of ASDP in 2025. Quantitative impacts will only be recognized upon investment decisions, capital contributions, funding restructurings, or subsequent corporate actions involving ASDP that can be reliably measured in the financial statements.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Government Regulation No. 28 of 2025 on the Amendment to Government Regulation No. 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing.

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:

PP 28/2025 mengatur perubahan atas mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk pengaturan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, layanan sistem OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi. Dalam ketentuan peralihannya, permohonan perizinan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang masih dalam proses tetap diselesaikan berdasarkan PP 5/2021 sampai sistem OSS yang disesuaikan dengan PP 28/2025 beroperasi. Adapun kegiatan usaha Perseroan yang telah terdaftar serta telah memiliki persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan PB UMKU yang telah terbit dan terverifikasi tidak terdampak secara retroaktif oleh ketentuan baru tersebut.

PP 28/2025 governs amendments to the Risk-Based Business Licensing mechanism, including rules on basic requirements, Business Licensing, PB UMKU, OSS system services, oversight, evaluation, bottleneck resolution, and sanctions. Under transitional provisions, license applications from PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) currently in progress will be completed based on PP 5/2021 until the OSS system updated for PP 28/2025 becomes operational. Registered business activities of the Company that already possess basic requirements, Business Licensing, and issued and verified PB UMKU are not retroactively affected by the new provisions.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampaknya mencakup kebutuhan pemutakhiran data perizinan, validasi kesesuaian KBLI, pemantauan izin operasional pelabuhan dan penyeberangan, serta pengendalian risiko kepatuhan atas izin baru, perpanjangan izin, maupun izin pendukung kegiatan usaha.

The impact includes the need to update licensing data, validate compliance with Indonesian Standard Industrial Classification, monitor port and operational permits, and manage compliance risks for new permits, renewals, and supporting operational licenses.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Dampak kuantitatif langsung terhadap laporan keuangan tahun 2025 tidak material. Namun, terdapat potensi biaya kepatuhan berupa biaya administrasi perizinan, pembaruan dokumen, penyesuaian sistem OSS, jasa konsultan atau legal, serta pemenuhan persyaratan teknis. Sebaliknya, penyederhanaan dan kepastian proses perizinan dapat mengurangi risiko keterlambatan operasional, risiko sanksi, dan potensi kehilangan pendapatan akibat izin yang belum terpenuhi.

The direct quantitative impact on the 2025 financial statements is immaterial. However, potential compliance costs may arise from licensing administration, document updates, OSS system adjustments, consultant or legal fees, and technical requirements. Conversely, a streamlined and certain licensing process mitigates the risk of operational delays, penalties, and potential revenue losses from unfulfilled permits.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampaknya bersifat tidak langsung, yaitu melalui potensi penguatan sinergi, koordinasi layanan, dan tata kelola antar-BUMN dalam ekosistem operasional yang relevan.

The impact is indirect, occurring through the potential strengthening of synergies, service coordination, and governance among SOEs within the relevant operational ecosystem.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Tidak terdapat dampak kuantitatif langsung terhadap aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, maupun beban ASDP pada tahun 2025 karena penyertaan modal negara dilakukan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia. Dampak finansial bagi ASDP hanya akan timbul apabila terdapat keputusan lanjutan yang secara khusus menempatkan ASDP dalam struktur holding, sinergi investasi, atau transaksi antar-BUMN tertentu.

There is no direct quantitative impact on the assets, liabilities, equity, revenues, or expenses of ASDP in 2025, as the state capital injection was allocated to PT Biro Klasifikasi Indonesia. Financial impacts for ASDP will only arise if subsequent decisions explicitly position ASDP within the holding structure, investment synergies, or specific inter-SOEs transactions.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Government Regulation No. 16 of 2025 on State Capital Injection into the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency.

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:
Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pengalih an 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham milik negara berupa saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

The state capital injection referenced in Article 1 originates from the transfer of 99% (ninety-nine percent) of state-owned shares in the form of Series B shares in the State-Owned LLC PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampaknya terutama bersifat strategis, yaitu potensi perubahan arah pengawasan investasi, koordinasi kebijakan portofolio, dan penajaman ekspektasi terhadap penciptaan nilai BUMN. Perseroan perlu memastikan bahwa rencana investasi, pengelolaan aset, dan kebijakan pendanaan tetap selaras dengan arah pengelolaan investasi negara.

The impact is strategic, driven by potential shifts in investment oversight, portfolio policy coordination, and heightened expectations for SOEs value creation. The Company must ensure that investment plans, asset management, and funding policies remain aligned with state investment strategies.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Tidak terdapat dampak kuantitatif langsung yang material terhadap laporan keuangan ASDP pada tahun 2025. Dampak kuantitatif baru dapat diakui apabila terdapat keputusan investasi, penyertaan modal, restrukturisasi pendanaan, atau aksi korporasi lanjutan yang melibatkan ASDP dan dapat diukur secara andal dalam laporan keuangan.

No material direct quantitative impact affects the financial statements of ASDP in 2025. Quantitative impacts will only be recognized upon investment decisions, capital contributions, funding restructurings, or subsequent corporate actions involving ASDP that can be reliably measured in the financial statements.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Government Regulation No. 28 of 2025 on the Amendment to Government Regulation No. 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing.

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:

PP 28/2025 mengatur perubahan atas mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk pengaturan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, layanan sistem OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi. Dalam ketentuan peralihannya, permohonan perizinan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang masih dalam proses tetap diselesaikan berdasarkan PP 5/2021 sampai sistem OSS yang disesuaikan dengan PP 28/2025 beroperasi. Adapun kegiatan usaha Perseroan yang telah terdaftar serta telah memiliki persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan PB UMKU yang telah terbit dan terverifikasi tidak terdampak secara retroaktif oleh ketentuan baru tersebut.

PP 28/2025 governs amendments to the Risk-Based Business Licensing mechanism, including rules on basic requirements, Business Licensing, PB UMKU, OSS system services, oversight, evaluation, bottleneck resolution, and sanctions. Under transitional provisions, license applications from PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) currently in progress will be completed based on PP 5/2021 until the OSS system updated for PP 28/2025 becomes operational. Registered business activities of the Company that already possess basic requirements, Business Licensing, and issued and verified PB UMKU are not retroactively affected by the new provisions.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampaknya mencakup kebutuhan pemutakhiran data perizinan, validasi kesesuaian KBLI, pemantauan izin operasional pelabuhan dan penyeberangan, serta pengendalian risiko kepatuhan atas izin baru, perpanjangan izin, maupun izin pendukung kegiatan usaha.

The impact includes the need to update licensing data, validate compliance with Indonesian Standard Industrial Classification, monitor port and operational permits, and manage compliance risks for new permits, renewals, and supporting operational licenses.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Dampak kuantitatif langsung terhadap laporan keuangan tahun 2025 tidak material. Namun, terdapat potensi biaya kepatuhan berupa biaya administrasi perizinan, pembaruan dokumen, penyesuaian sistem OSS, jasa konsultan atau legal, serta pemenuhan persyaratan teknis. Sebaliknya, penyederhanaan dan kepastian proses perizinan dapat mengurangi risiko keterlambatan operasional, risiko sanksi, dan potensi kehilangan pendapatan akibat izin yang belum terpenuhi.

The direct quantitative impact on the 2025 financial statements is immaterial. However, potential compliance costs may arise from licensing administration, document updates, OSS system adjustments, consultant or legal fees, and technical requirements. Conversely, a streamlined and certain licensing process mitigates the risk of operational delays, penalties, and potential revenue losses from unfulfilled permits.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:

Pengesahan UU 16/2025 pada 6 Oktober 2025 kembali membawa sejumlah perubahan dalam tata kelola BUMN antara lain terkait: | The enactment of Law 16/2025 on 06 October 2025 introduced further updates to SOEs governance, focusing on:

1. Status penyelenggara negara, | The status of state officials,
2. Kewenangan pemeriksaan BUMN oleh BPK, | The authority of the BPK to audit SOEs,
3. Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN (BP BUMN); | The transformation of the Ministry of SOEs into the SOEs Regulatory Agency (BP BUMN),
4. Pembagian kewenangan antara BP BUMN dan BPI Danantara, | The division of authority between BP BUMN and BPI Danantara,
5. Kepemilikan saham BUMN dan perusahaan holding, dan | Share ownership in SOEs and holding companies, and
6. Perlakuan perpajakan untuk transaksi yang melibatkan BPI Danantara, perusahaan holding, dan entitas di dalamnya. Tax treatments for transactions involving BPI Danantara, holding companies, and their respective subsidiaries.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampaknya mencakup penyesuaian governance, penguatan dokumentasi keputusan bisnis, mitigasi risiko hukum, serta penyelarasan mekanisme pengawasan dan pelaporan dengan ketentuan terbaru.

The implications cover governance adjustments, robust documentation of business decisions, mitigation of legal risks, and the alignment of oversight and reporting frameworks with the updated statutes.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Tidak terdapat dampak kuantitatif langsung yang material pada tahun 2025. Namun, perubahan ini berpotensi memengaruhi biaya kepatuhan, kebutuhan penyesuaian prosedur internal, audit, pelaporan, serta kajian hukum atas aksi korporasi. Dampak finansial yang lebih terukur dapat timbul apabila terdapat perubahan struktur kepemilikan, transaksi dengan holding atau Danantara, kebijakan perpajakan, maupun restrukturisasi korporasi yang melibatkan ASDP.

No material direct quantitative impact is noted in 2025. However, these changes may influence compliance costs, internal procedure adaptations, audits, reporting, and legal reviews of corporate actions. A measurable financial impact may occur upon changes in ownership structure, transactions with the holding company or Danantara, tax updates, or corporate restructurings involving ASDP.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Regulation of the Central Bureau of Statistics No. 7 of 2025 on the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

Keterangan Perubahan: | Description of Changes:

Perubahan dan Pemecahan KBLI yang berdampak pada Perubahan Anggaran Dasar atas Klasifikasi Baku Usaha, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian atas Anggaran Dasar.

Revisions and subdivisions within Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) codes affect the Article of Association regarding Business Classifications, necessitating a formal Adjustment to the Articles of Association.

Dampak Kualitatif | Qualitative Impact

Dampaknya bersifat administratif dan kepatuhan, yaitu kebutuhan untuk menelaah kesesuaian bidang usaha dalam Anggaran Dasar, NIB, perizinan berusaha, laporan statistik, dan dokumen korporasi dengan KBLI terbaru. Penyesuaian ini penting agar kegiatan usaha Perseroan tetap tercatat sesuai klasifikasi resmi dan tidak menimbulkan kendala pada proses perizinan atau pelaporan.

The consequences are administrative and compliance-driven, requiring a review of business fields in the Articles of Association, NIB, business licensing, statistical reporting, and corporate documents against the current KBLI. This update ensures that the Company's business activities match official classifications, preventing disruptions in licensing or reporting.

Dampak Kuantitatif | Quantitative Impact

Tidak terdapat dampak kuantitatif langsung terhadap kinerja keuangan tahun 2025. Potensi dampak terbatas pada biaya administrasi untuk pembaruan data, penyesuaian dokumen perizinan, dan harmonisasi Anggaran Dasar apabila terdapat KBLI yang berubah atau terpecah. Dampak finansial dapat menjadi material apabila ketidaksesuaian KBLI menghambat penerbitan atau perpanjangan izin usaha tertentu.

There is no direct quantitative impact on the 2025 financial performance. Potential impacts are restricted to administrative expenses for updating data, adjusting licensing files, and harmonizing the Articles of Association if specific KBLI codes have been altered or split. Financial impacts could become material if KBLI mismatches delay the issuance or renewal of commercial permits.

PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI PENTING
SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENCIES

PERJANJIAN PENTING

a. Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Operasi Tiketing Sistem di 4 (Empat) Pelabuhan Perusahaan antara Perusahaan dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) No. Sper.1172/UM.301/ASDP-2025 dan No. K.TEL./HK.810/SOE-00/2025 disepakati bahwa Perusahaan dan PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) bahwa PT Telekomunikasi menyediakan sistem penjualan tiket elektronik (*software*, *hardware*, dan infrastruktur pendukung) dan meliputi aspek investasi, proses bisnis, teknologi, manajemen proyek, *support maintenance*, komersial, laporan dan *Service Level Agreement* (SLA). Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

b. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan *Payment Gateway* Pada Platform Ferizy di lingkungan Perusahaan antara Perusahaan dengan PT Finnet Indonesia No Sperj.371/HK.102/JKTNS/IV/ASDP-2025N tanggal 09 Mei 2025 dan addendumnya No. Sperj.1355/HK.102/JKTNC/XII/ASDP-2025 tanggal 17 Desember 2025, disepakati bahwa Perusahaan dan PT Finnet Indonesia melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan *Payment Gateway* yang terintegrasi untuk kelancaran operasional dan pelayanan *Platform* Ferizy. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

c. Pada tanggal 29 Desember 2023 Perusahaan telah menandatangani pembaharuan perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Ternak RT-6 melalui perjanjian No. SPERJ.1064/HK.102/ASDP-2023 antara Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Ditlala), disepakati bahwa Perusahaan menyelenggarakan angkutan khusus ternak pada trayek tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan menggunakan kapal milik Ditlala. Perjanjian ini menggantikan perjanjian sebelumnya yaitu No. ADD.01/SATKERLALA/RT-6/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023. Selanjutnya, berdasarkan Amendemen III perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Ternak Trayek RT-6 Tahun Anggaran 2024 tanggal 30 September 2024 No. 03.ADD/RT-6/LALA/2024, nilai kontrak perjanjian adalah sebesar Rp15.843.254.347 dan berlaku mulai

SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Pursuant to the Agreement of Ticketing System Operations Management at 4 (Four) Company Ports between the Company and PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) No. Sper.1172/UM.301/ASDP-2025 and No. K.TEL./HK.810/SOE-00/2025, it was agreed that PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) provides an electronic ticketing system (software, hardware, and supporting infrastructure) covering aspects of investment, business processes, technology, project management, maintenance support, commercial terms, reporting, and Service Level Agreements (SLA). This agreement is effective from 30 June 2025 until 31 December 2025.

b. Pursuant to the Agreement of Payment Gateway Service Cooperation on the Ferizy Platform within the Company between the Company and PT Finnet Indonesia No. Sperj.371/HK.102/JKTNS/IV/ASDP-2025N dated 09 May 2025, alongside its addendum No. Sperj.1355/HK.102/JKTNC/XII/ASDP-2025 dated 17 December 2025, it was agreed that the Company and PT Finnet Indonesia collaborate to provide integrated Payment Gateway services for the operational execution and service delivery of the Ferizy Platform. This agreement remains effective from 19 December 2025 until 30 June 2026.

c. On 29 December 2023, the Company signed a renewal agreement of the Implementation of Public Service Obligation for the RT-6 Special Livestock Vessel under contract No. SPERJ.1064/HK.102/ASDP-2023 with the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation (Ditlala). It was agreed that the Company operates special livestock transportation on designated routes utilizing vessels owned by Ditlala. This contract supersedes the previous agreement, that is No. ADD.01/SATKERLALA/RT-6/VI/2023 dated 28 June 2023. Subsequently, based on Amendment III to the contract for the implementation of Public Service Obligation for the RT-6 Special Livestock Vessel Route Fiscal Year 2024 dated 30 September 2024 No. 03.ADD/RT-6/LALA/2024, the contract value stands at Rp15,843,254,347, running from 01 January 2024 until 31 December 2024. This

tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Perjanjian ini telah dilakukan perpanjangan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan perjanjian No. Sperj.1286/UM.301/ASDP-2024 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2026.

contract was extended on 31 December 2024 via agreement No. Sperj.1286/UM.301/ASDP-2024, valid from 01 January 2025 until 28 February 2025. The final arrangement extends through 31 December 2026.

d. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Reservasi dan *Payment Point* Tiket Kapal Penyeberangan Secara *Host to Host* dengan Mekanisme *Settlement*, Perusahaan dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk (MUI) No. SPERJ.519/HK.102/ASDP-2022 tanggal 27 September 2022, dan addendumnya No. SPERJ.1015/HK.102/ASDP-2025 tanggal 28 Agustus 2025 disepakati bahwa PT Midi Utama Indonesia akan menyediakan layanan reservasi tiket di gerai Alfamidi kepada para pengguna jasa kapal penyeberangan dan Perusahaan berkewajiban menyediakan perangkat yang diperlukan untuk penyaluran *traffic* data tiket di *host*. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyusunan.

d. Pursuant to the Cooperation Agreement for Services of Reservation and Payment Point of Host-to-Host Ferry Ticket with a Settlement Mechanism between the Company and PT Midi Utama Indonesia Tbk (MUI) No. SPERJ.519/HK.102/ASDP-2022 dated 27 September 2022, and its addendum No. SPERJ.1015/HK.102/ASDP-2025 dated 28 August 2025, it was agreed that PT Midi Utama Indonesia will deliver ticket reservation services at Alfamidi outlets for vessel users, and the Company must supply the infrastructure needed to route ticket data traffic to the host. As of the financial reporting date, the contract extension remains in development.

e. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reservasi dan *Sales Payment* Tiket Kapal Penyeberangan Secara *Host to Host* antara Perusahaan dengan PT Global Tiket Network No. Sperj.1101/JKTNS/X/ASDP-2025 mengenai Integrasi Sistem Reservasi dan *Sales Payment* Tiket Kapal Penyeberangan melalui Platform Tiket.Com tanggal 1 Oktober 2025 disepakati bahwa PT Global Tiket Network menyediakan layanan reservasi tiket melalui Aplikasi Tiket.Com kepada para pengguna jasa kapal penyeberangan. Perjanjian ini berlaku hingga 19 November 2026.

e. Pursuant to the Cooperation Agreement for Host-to-Host Ferry Ticket Reservation and Sales Payment between the Company and PT Global Tiket Network No. Sperj.1101/JKTNS/X/ASDP-2025 regarding the Integration of Ferry Ticket Reservation and Sales Payment Systems through the Tiket.Com Platform dated 1 October 2025, it was agreed that PT Global Tiket Network provides ticket reservation services via the Tiket.Com Application for vessel users. This agreement remains valid until 19 November 2026.

f. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Taman Hiburan (*Theme Park*) pada Kawasan Bakauheni Harbour City antara Perusahaan dengan PT Bunga Lampung Sedjati No. Sperj.245/HK.102/ASDP-2022 tanggal 30 Bulan Mei 2022, Perusahaan menyepakati pendayagunaan aset tanah Perusahaan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan serta melakukan Kerja Sama Usaha (KSU) pengembangan *Theme Park* pada Kawasan Bakauheni Harbour City dengan PT Bunga Lampung Sedjati. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun kalender terhitung sejak *Theme Park* mulai beroperasi dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Siap Operasional pada Mei 2023.

f. Pursuant to the Cooperation Agreement for the Development of a Theme Park in the Bakauheni Harbour City Area between the Company and PT Bunga Lampung Sedjati No. Sperj.245/HK.102/ASDP-2022 dated 30 May 2022, the Company approved the utilization of its land assets for construction, management, and a Joint Operations scheme to develop the Theme Park in the Bakauheni Harbour City Area with PT Bunga Lampung Sedjati. This agreement is valid for 20 calendar years starting from when the Theme Park initiated operations following the Operational Readiness Notice issued in May 2023.

g. IFPRO dalam melaksanakan bisnis hotelnya bekerja sama dengan PT Hotel Indonesia Group sebagai operator hotel

g. IFPRO, in executing its hospitality operations, cooperates with PT Hotel Indonesia Group as the hotel operator

sebagaimana perjanjian kerjasama No. 002/IPRO/PKS/IV/2019 dan No. 001/DIRUT/HIG-PERJ/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel di Labuan Bajo dengan Addendum Perjanjian No. 009/IFPRO-DIR/PKS/X/2022 dan No. 020/LGL-HIG/AMEND.PERJ/IX/2022. IFPRO memberikan izin kepada Hotel Indonesia Group untuk mengelola hotel milik Perusahaan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha Hotel Indonesia Group yang berlokasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan luas kurang lebih 2,4 Ha untuk manajemen hotel dengan merek dagang Meruorah Komodo Labuan Bajo. Bentuk kerja sama adalah Kerjasama Operasi Pengelolaan Hotel dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah hotel beroperasi.

under the management agreement No. 002/IPRO/PKS/IV/2019 and No. 001/DIRUT/HIG-PERJ/IV/2019 dated 18 April 2019, regarding the Hotel Management Cooperation Agreement in Labuan Bajo, alongside its Addendum Agreement No. 009/IFPRO-DIR/PKS/X/2022 and No. 020/LGL-HIG/AMEND.PERJ/IX/2022. IFPRO permits Hotel Indonesia Group to run the Company's hotel for Hotel Indonesia Group's commercial operations in Labuan Bajo, West Manggarai, East Nusa Tenggara, across an area of approximately 2.4 hectares under the trademark Meruorah Komodo Labuan Bajo. The arrangement is structured as a Hotel Management Operation Cooperation spanning 10 (ten) years from the operational launch of the hotel.

KONTINJENSI

PERKARA PERDATA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PT DIAN SENTOSA

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 514/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., PT Dian Sentosa mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan penyelesaian pembayaran atas pekerjaan paketisasi peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Merak, Ketapang, Lembar, Kayangan, Sape, dan Batam sebesar Rp23.108.020.000. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2020, Perusahaan berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2658/SG/JB pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah mencatat cadangan liabilitas sebesar Rp20.652.170.368.

Setelah keputusan banding keluar, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri, Perusahaan kembali mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3170 K/PDT/2023 pada tanggal 13 November 2023, permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan ditolak. Pada tanggal 4 September 2024, Perusahaan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3170 K/PDT/2023. Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah keluar Hasil Putusan Akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan PK Mahkamah Agung RI No.547 PK/Pdt/2025/PN Jkt.Pst Jo. No. 514/Pdr.G/2019/Jkt.Pst tanggal 29 Agustus 2025 bahwa Peninjauan Kembali Perusahaan ditolak dan Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut.

CONTINGENCY

CIVIL LITIGATION BETWEEN THE COMPANY AND PT DIAN SENTOSA

Through a lawsuit at the Central Jakarta District Court No. 514/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., PT Dian Sentosa filed a lawsuit against the Company and sought settlement regarding payments for the upgrade packages to improve the ferry port facilities at Merak, Ketapang, Lembar, Kayangan, Sape, and Batam totaling Rp23,108,020,000. Based on the Central Jakarta District Court ruling dated 2 June 2020, the Company was ordered to settle the payment. Against this ruling, the Company submitted a Memorandum of Appeal to the DKI Jakarta High Court No. 2658/SG/JB on 18 August 2021 and recorded a provision for liabilities of Rp20,652,170,368.

Following the appeal decision upholding the District Court's judgment, the Company submitted a cassation petition to the Supreme Court under No. 3170 K/PDT/2023 on 13 November 2023, which was subsequently dismissed. On 4 September 2024, the Company submitted a petition for Judicial Review against the Supreme Court Decision No. 3170 K/PDT/2023. Regarding this petition, the Final Decision of the Supreme Court and the Notification of the Supreme Court Judicial Review Decision No. 547 PK/Pdt/2025/PN Jkt.Pst Jo. No. 514/Pdr.G/2019/Jkt.Pst dated 29 August 2025 concluded that the Company's Judicial Review was denied and the Company must clear the compensation.

Pada tahun 2025, perkara tersebut telah diselesaikan secara final dan mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp20.652.170.368.

Perusahaan telah mengakui kewajiban dan/atau beban terkait dalam laporan laba rugi tahun berjalan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh dampak keuangan dari perkara tersebut telah dicatat secara memadai dalam laporan keuangan.

PERKARA PERDATA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PT INFINITI INDOSAKTI

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 630/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., PT Infiniti Indosakti mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan Kerjasama Operasi pembangunan dan pengoperasian dermaga IV Merak–Bakauheni senilai Rp111.193.200.000. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 2021, Perusahaan berkewajiban untuk mengganti rugi sebesar Rp76.500.000.000 (Catatan 6 dan 18). Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mendaftarkan banding dengan No. 232/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Pst Jo.630/PDT.G/2020/PN Jkt. Pst pada tanggal 20 Desember 2021, dan telah mengajukan memori banding No. 022/T&P/I22 pada tanggal 25 Januari 2022. Atas pengajuan banding tersebut, telah keluar Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 699/Pdt/2022/PT DKI tanggal 17 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Desember 2021.

Saat ini Perusahaan telah mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan No. 04/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.JKT.PST tanggal 12 Januari 2023. Atas pengajuan kasasi tersebut telah keluar Hasil Putusan Akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Relaas No. 2530K/Pdt/2023 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2023 bahwa Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut. Atas putusan tersebut Perusahaan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dan telah terbit Relaas No. 967 PK/Pdt/2024 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 29 November 2024 bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan sebelumnya ditolak. Adapun atas Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 967/PDT/2024 tanggal 3 Oktober 2024

During 2025, the matter concluded with a final and binding resolution. Based on the decision, the Company is required to pay Rp20,652,170,368.

The Company has recognized the corresponding liability and expense in the income statement for the current period under applicable PSAK rules.

Management maintains that all financial consequences from this litigation have been adequately recognized in the financial statements.

CIVIL LITIGATION BETWEEN THE COMPANY AND PT INFINITI INDOSAKTI

Through a lawsuit at the Central Jakarta District Court No. 630/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., PT Infiniti Indosakti brought a claim against the Company regarding a Joint Operations agreement for the construction and operation of Merak–Bakauheni Pier IV valued at Rp111,193,200,000. Under the Central Jakarta District Court decision dated 7 December 2021, the Company was ordered to pay damages of Rp76,500,000,000 (Note 6 and 18). The Company registered an appeal under No. 232/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Pst Jo. 630/PDT.G/2020/PN Jkt.Pst on 20 December 2021, and submitted a memorandum of appeal No. 022/T&P/122 on 25 January 2022. Following this, the Jakarta High Court issued Decision No. 699/Pdt/2022/PT DKI dated 17 November 2022, sustaining the District Court ruling of 7 December 2021.

The Company subsequently filed a cassation via Cassation Petition Deed No. 04/Srt.Pdt. Kas/2023/PN.JKT.PST dated 12 January 2023. The cassation resulting in the Supreme Court issued a Final Decision through Notification No. 2530K/Pdt/2023 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt. Pst dated 13 December 2023, establishing the Company's obligation to pay the damages. The decision led the Company to pursue a judicial review, resulting in Notification No. 967 PK/Pdt/2024 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst dated 29 November 2024, which dismissed the previously proposed petition. Regarding the Execution of the Decision of Supreme Court Judicial Review No. 967/PDT/2024 dated 3 October 2024, which holds permanent legal force, the Company is obligated to make payments across 3 scheduled tranches. Based on the Response

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Perusahaan wajib melakukan pembayaran bertahap dalam waktu 3 kali pembayaran dengan rincian yang telah ditentukan. Adapun berdasarkan Tanggapan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PK Mahkamah Agung, nilai penggantian yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan Perusahaan wajib melaksanakannya.

to the Execution of the Supreme Court's Judicial Review Decision, the settlement value is final and the Company must execute it.

PERKARA PERDATA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PT PERSADA GADING ELOK

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 672/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., PT Persada Gading Elok mengajukan gugatan kepada Perusahaan atas pelanggaran kesepakatan terkait dengan berakhirnya masa sewa pada ruangan di Gedung KTC pada tanggal 2 Maret 2023. Perusahaan digugat perihal masih ditinggalkannya peralatan kantor di Gedung KTC dari bulan Maret 2023 hingga bulan Oktober 2023 sehingga berkewajiban untuk mengganti kerugian sejumlah biaya sewa 7 bulan yaitu sebesar Rp8.284.182.865. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2024, Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp4.178.006.597. Perusahaan telah mengajukan banding atas putusan tersebut dan telah menerima Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 1072/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 April 2024. Perusahaan telah mengajukan kasasi dengan Akta Penerimaan Memori Kasasi No. 161/Srt.Pdt.Kas/2024/PN.JKT.PST.Jo tanggal 1 Oktober 2024. Atas Pengajuan Kasasi tersebut telah keluar Putusan No. 2853 K/Pdt/2025 tertanggal 14 Agustus 2025 bahwa Pengajuan Kasasi Perusahaan ditolak dan Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut.

Pada tahun 2025, perkara tersebut telah diselesaikan secara final dan mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp4.178.006.597.

Perusahaan telah mengakui kewajiban dan/atau beban terkait dalam laporan laba rugi tahun berjalan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh dampak keuangan dari perkara tersebut telah dicatat secara memadai dalam laporan keuangan.

CIVIL LITIGATION BETWEEN THE COMPANY AND PT PERSADA GADING ELOK

Through a lawsuit at the Central Jakarta District Court No. 672/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., PT Persada Gading Elok alleged a breach of contract regarding the lease expiration for a space in the KTC Building on 2 March 2023. The claim targeted office infrastructure left in the KTC Building from March 2023 through October 2023, creating an obligation to pay for 7 months of rent totaling Rp8,284,182,865. Following the Central Jakarta District Court ruling dated 24 April 2024, the Company was ordered to pay compensation of Rp4,178,006,597. The Company appealed and received the Central Jakarta High Court Decision No. 1072/PDT/2024/PT DKI dated 26 August 2024, which upheld the District Court ruling of 24 April 2024. The Company filed a cassation recorded under the Cassation Memorandum Acceptance Deed No. 161/Srt.Pdt.Kas/2024/PN.JKT.PST.Jo dated 1 October 2024. The Supreme Court issued Decision No. 2853 K/Pdt/2025 dated 14 August 2025, rejecting the Company-submitted cassation and validating the Company's payment obligation.

During 2025, the litigation reached a final and binding conclusion. Based on the ruling, the Company must pay Rp4,178,006,597.

The Company has recognized the relevant obligation and expense in the current period income statement under applicable PSAK rules.

The Management confirms that all financial impacts have been fully captured in the financial statements.

PENDAPATAN SUBSIDI PERINTIS TAHUN 2023

Perusahaan memiliki kontrak subsidi penyeberangan perintis dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) yang sebelumnya menggunakan skema *lump sum* menjadi harga satuan dengan total nilai kontrak sebesar Rp380.079.681.349 pada tahun 2023 yang baru dibayar Rp275.729.387.536 dan masih tersisa Rp104.350.293.813.

Selanjutnya, pada November 2023, Perusahaan dan Kemenhub melakukan audiensi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diantaranya membahas adendum kontrak subsidi tahun 2023 serta permohonan pembayaran kekurangan subsidi perintis tahun 2023.

Menanggapi permohonan tersebut, Kemenhub meminta agar dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reviu oleh BPKP pada Januari 2024 terhadap dua Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai sampel, yaitu BPTD Lampung dan BPTD Jawa Timur. Hasil reviu BPKP yang diterbitkan pada 7 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa kontrak subsidi perintis tahun 2023 tidak secara eksplisit mencantumkan jenis kontrak, namun berdasarkan isi klausul kontrak, disimpulkan bahwa kontrak tersebut bersifat lumpsum.

Pada Oktober 2024 diselenggarakan rapat bersama antara Perusahaan, LKPP, BPKP, dan Kemenhub yang menghasilkan kesimpulan bahwa Perusahaan dan Kemenhub perlu menyepakati jenis kontrak subsidi perintis tahun 2023.

Pada tanggal 9 September 2025 dilaksanakan rapat dengan hasil disepakati perhitungan subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2023 menggunakan KP DRJD 6890 Tahun 2023 dari mulai Januari 2023. Pada tanggal 10 Oktober 2025 Dirut PT ASDP mengirimkan permohonan audit ulang oleh BPKP kepada Direktorat SPASDP Kemenhub, sebagai tindaklanjut atas kesepakatan hasil rapat yang dilaksanakan pada 9 September 2025.

Pada tanggal 14 November 2025 Direktorat SPASDP mengirimkan surat permohonan Review ulang atas Pekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2023. Pada tanggal 21 November 2025 eskalasi dan berkoordinasi dengan Direktur SPASDP terkait dengan rencana audit dan *review* oleh BPKP.

2023 PIONEER SUBSIDY REVENUE

The Company maintains a pioneer crossing subsidy contract with the Ministry of Transportation (Kemenhub), which converted from a lump-sum model to a unit-price framework, yielding a total 2023 contract value of Rp380,079,681,349, of which only Rp275,729,387,536 has been disbursed, leaving an unpaid balance of Rp104,350,293,813.

In November 2023, the Company and Kemenhub held an audience with the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP) to discuss the 2023 subsidy contract addendum and the settlement request for the 2023 pioneer subsidy deficit.

In response, Kemenhub requested an audit by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), followed by a BPKP review in January 2024 across two Land Transportation Management Authorities (BPTD) chosen as samples: BPTD Lampung and BPTD East Java. The BPKP review published on 7 August 2024 concluded that while the 2023 pioneer subsidy contract did not explicitly name the contract type, its underlying clauses indicated a lump-sum structure.

In October 2024, a joint meeting between the Company, LKPP, BPKP, and Kemenhub concluded that the Company and Kemenhub needed to align on the contract type for the 2023 pioneer subsidy.

On 09 September 2025, a meeting concluded with an agreement to calculate the 2023 Pioneer Transportation subsidy using KP DRJD 6890 Year 2023 effective from January 2023. On 10 October 2025, the President Director of PT ASDP requested a re-audit by BPKP from the Directorate of SPASDP Kemenhub, following up on the 9 September 2025 agreement.

On 14 November 2025, the Directorate of SPASDP submitted a formal request for a re-review of the 2023 Pioneer Transportation Subsidy Operations. On 21 November 2025, escalation and coordination occurred with the Director of SPASDP regarding the BPKP audit and review schedule.

Pada tanggal 23 Desember 2025 Direktorat SPASDP mengirimkan Surat Tindaklanjut Hasil Reviu BPKP atas Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa poin, dimana PT ASDP mengusulkan perhitungan kekurangan pembayaran menggunakan dasar hukum KP-DRJD 6890 Tahun 2023, sedangkan para PPK BPTD tetap berpedoman pada PR-DRJD 2 Tahun 2022 yang berdampak pada selisih kekurangan tersebut tidak dapat diakomodir yang mengakibatkan terjadinya piutang perusahaan, kemudian poin berikutnya Direktorat SPASDP menyampaikan sepanjang PT ASDP dapat menunjukkan bukti ril pengeluaran biaya tahun 2023, maka selisih biaya tersebut dapat menjadi pertimbangan selanjutnya sebagaimana aturan yang mengatur, bahwa penyelenggaraan layanan subsidi ditanggung oleh negara.

On 23 December 2025, the Directorate of SPASDP issued a Follow-up Letter on the BPKP Review Results for the Pioneer Transportation Vessel Subsidy Fiscal Year 2023. The letter noted that PT ASDP proposed a deficit calculation based on KP-DRJD 6890 Year 2023, whereas the PPK BPTD adhered to PR-DRJD 2 Year 2022, leaving the variance unaccommodated and recorded as a company receivable. Furthermore, the Directorate of SPASDP indicated that should PT ASDP provides verified documentation of actual 2023 expenditures, the cost difference could undergo further evaluation, given that subsidy service delivery is structurally funded by the state.

Pada tanggal 24 Desember 2025 Direktur Utama PT ASDP mengirimkan Balasan Surat Tindaklanjut Hasil Reviu BPKP atas Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023, dengan melampirkan *link* Google Drive bukti pembiayaan pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023.

On 24 December 2025, the President Director of PT ASDP sent a Response Letter on the Follow-up Results of the BPKP Review of the Subsidy for the Operation of Pioneer Ferry Transport Vessels for the 2023 Fiscal Year, attaching a Google Drive link to repository containing evidence of operational financing for the Pioneer Transportation Vessels for Fiscal Year 2023.

Pada pertemuan terakhir secara informal BPKP meminta adanya *Legal Opinion* dari Jamdatun sebagai landasan hukum mereka melaksanakan audit terhadap pekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2023, akan tetapi pihak manajemen sampai dengan saat ini masih berusaha melakukan langkah-langkah alternatif supaya tidak melalui Jamdatun, dan sampai saat ini masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan, pembahasan terkait kesepakatan atas kekurangan pembayaran subsidi perintis sebesar Rp104.350.293.813 masih berlangsung.

In the latest informal meeting, BPKP requested a Legal Opinion from Deputy Attorney General for Civil and State Administration (Jamdatun) to establish their legal foundation for auditing the 2023 Pioneer Transportation Subsidy project. However, the management is actively evaluating alternative measures to bypass Jamdatun and continues to coordinate with relevant stakeholders. Up to the financial statements' release date, consultations regarding the remaining pioneer subsidy deficit of Rp104,350,293,813 remain ongoing.

PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PENYEBERANGAN DI LINTAS LEMBAR - PADANG BAI

Berdasarkan perjanjian kerjasama Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan Di Lintas Lembar - Padang Bai antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan kontrak No. Sperj.250./UM.301/ASDP-2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp88.720.000.100, Addendum Sperj. 10/HK.301/ASDP-2022 tanggal 7 Januari 2022, Addendum Kedua SPERJ.891/ADD/UM.301/ASDP-2023 tanggal 20 November 2023 adanya penambahan nilai kontrak sebesar Rp5.032.885.000 sehingga total nilai kontrak menjadi Rp93.752.885.100, dan Addendum Ketiga Sperj.911/HK.102/ASDP-2024 tanggal 27 September 2024.

CONSTRUCTION OF 1 (ONE) UNIT OF VESSEL FOR THE LEMBAR - PADANG BAI ROUTE

Pursuant to the cooperation contract for the Construction of 1 (One) Unit of Vessel for the Lembar - Padang Bai Route between PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and PT Industri Kapal Indonesia (Persero) under contract No. Sperj.250./UM.301/ASDP-2020 dated 9 March 2020 with a value of Rp88,720,000,100, Addendum Sperj. 10/HK.301/ASDP-2022 dated 7 January 2022, Second Addendum SPERJ.891/ADD/UM.301/ASDP-2023 dated 20 November 2023 on the addition of Rp5,032,885,000 to bring the total contract value to Rp93,752,885,100, and Third Addendum Sperj.911/HK.102/ASDP-2024 dated 27 September 2024.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Kapal oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sampai dengan diserahterimakan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Addendum Ketiga selama 59 bulan 18 hari kalender terhitung sejak Kontrak Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan di Lintas Lembar Padang Bai antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Sperj.250/UM.301/ASDP-2020 sejak 9 Maret 2020 sampai dengan 26 Februari 2025.

The timeframe for vessel construction by PT Industri Kapal Indonesia (Persero) prior to delivery to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), as structured in the Third Addendum, spans 59 months and 18 calendar days, starting from the Construction Contract for 1 (one) Unit of Vessel at the Lembar Padang Bai Route between PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Sperj.250/UM.301/ASDP-2020 from 9 March 2020 to 26 February 2025.

Pada tanggal 11 Oktober 2024, PT Industri Kapal Indonesia (Persero) memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada PT Indonesia Ferry (Persero) untuk melaksanakan pencairan Jaminan/Bank Garansi dengan No. 072/D.01-IKI/Sku/X/2024 dan No. 073/D.01-IKI/Sku/X/2024. Berdasarkan surat kuasa tersebut pada tanggal 20 Maret 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pencairan Jaminan dan Bank Garansi dengan jumlah Rp13.559.644.265.

On 11 October 2024, PT Industri Kapal Indonesia (Persero) granted a power of attorney with substitution rights to PT Indonesia Ferry (Persero) to liquidate Performance/Bank Guarantees No. 072/D.01-IKI/Sku/X/2024 and No. 073/D.01-IKI/Sku/X/2024. Utilizing this power of attorney, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) liquidated the guarantees on 20 March 2025 for a total sum of Rp13,559,644,265.

Sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 26 Februari 2025, nilai pembangunan kapal yang dibukukan sebagai aset dalam konstruksi sebesar Rp29.674.901.542.

By the contract's conclusion on 26 February 2025, the vessel construction expenditures capitalized under construction in progress amounted to Rp29,674,901,542.

Pada tanggal 28 April 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat No. UM.003/02379/IV/ASDP-2025, bersurat ke Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) perihal Permohonan Pendampingan Tindaklanjut Pengakhiran Kontrak Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan Di Lintas Lembar – Padang Bai. Surat tersebut telah dibalas melalui Surat Perintah Jamdatun Untuk Membuat Telaahan No. Print-398/G/Gph.2/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 dan Surat Perintah Jamdatun Untuk Membuat Telaahan No. Print.-526/G/Gph.2/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

On 28 April 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) issued letter No. UM.003/02379/IV/ASDP-2025 to the Junior Attorney General for Civil and State Administrative Affairs (Jamdatun) requesting Legal Assistance Regarding the Termination of the Construction Contract for 1 (one) Unit of Vessel at the Lembar Padang Bai Route. Jamdatun responded through mandates to prepare legal evaluations under No. Print-398/G/Gph.2/05/2025 dated 2 May 2025 and No. Print.-526/G/Gph.2/06/2025 dated 3 June 2025.

Pada tanggal 3 Desember 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat No.: TN.001/07556/XII/ASDP-2025 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pendampingan Hukum dalam rangka Tindaklanjut Pengakhiran Pembangunan Kapal Lintas Lembar – Padang Bai.

On 3 December 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sent letter No. TN.001/07556/XII/ASDP-2025 requesting an Application for Extension of the Legal Assistance Period regarding the Follow-up to the Termination of Construction of the Lembar – Padang Bai Ship Route.

Adapun tujuan pendampingan oleh Jamdatun adalah pendampingan dalam rangka tindak lanjut pengakhiran Perjanjian Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai dan memberikan telaah dan masukan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam aspek hukum dalam rangka tindak lanjut pengakhiran Perjanjian Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai.

The purpose of Jamdatun's assistance is to provide assistance in the context of following up on the agreement termination and to provide reviews and input to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) on legal aspects regarding follow up on the termination of the Agreement for the Construction of 1 (one) Unit of Vessel at the Lembar – Padang Bai route.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
IMPLEMENTATION OF THE CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

KEBIJAKAN YANG BERLAKU EFEKTIF PADA TAHUN 2025

1. PSAK 117, "Kontrak Asuransi";
2. Amendemen PSAK 117, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK 104 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif;
3. PSAK 103: "Kombinasi Bisnis"; PSAK 105: "Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"; PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; PSAK 109: "Instrumen Keuangan"; PSAK 115: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan"; PSAK 207: "Laporan Arus Kas"; PSAK 216: "Aset Tetap"; PSAK 219: "Imbalan Kerja"; PSAK 228: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; PSAK 232: "Instrumen Keuangan: Penyajian"; PSAK 236: "Penurunan Nilai Aset"; PSAK 237: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"; PSAK 238: "Aset Takberwujud"; serta PSAK 240: "Properti Investasi" - Amendemen konsekuensial karena berlaku efektifnya PSAK 117: "Kontrak Asuransi";
4. Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait Kekurangan Ketertukaran. PSAK 370: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" dan ISAK 335: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" - Amendemen konsekuensial karena berlaku efektifnya SAK Indonesia untuk Entitas Privat.

Pada tanggal 1 Januari 2025, Grup telah menerapkan standar dan amendemen PSAK yang relevan dengan kegiatan usaha Grup.

Manajemen telah melakukan evaluasi terhadap penerapan standar tersebut, termasuk analisis terhadap akun pendapatan, instrumen keuangan, serta aset hak-guna dan liabilitas sewa. Berdasarkan evaluasi tersebut, penerapan standar tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi maupun dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

POLICY EFFECTIVE IN 2025

1. PSAK 117, "Insurance Contracts";
2. Amendments to PSAK 117, "Insurance Contracts" regarding Initial Application of PSAK 104 and PSAK 109 - Comparative Information;
3. PSAK 103: "Business Combinations"; PSAK 105: "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations"; PSAK 107: "Financial Instruments: Disclosures"; PSAK 109: "Financial Instruments"; PSAK 115: "Revenue from Contracts with Customers"; PSAK 201: "Presentation of Financial Statements"; PSAK 207: "Statement of Cash Flows"; PSAK 216: "Fixed Asset"; PSAK 219: "Employee Benefits"; PSAK 228: "Investments in Associates and Joint Ventures"; PSAK 232: "Financial Instruments: Presentation"; PSAK 236: "Impairment of Assets"; PSAK 237: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets"; PSAK 238: "Intangible Assets"; and PSAK 240: "Investment Property" - Consequential amendments from the adoption of PSAK 117: "Insurance Contracts";
4. Amendments to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding Lack of Exchangeability. PSAK 370: "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities" and ISAK 335: "Presentation of Financial Statements of Non-profit Oriented Entities" - Consequential amendments from the adoption of Indonesian SAK for Private Entities.

On 1 January 2025, the Group adopted the standards and amendments to PSAK relevant to the Group's commercial operations.

The Management completed an evaluation of these updates, analyzing revenue categories, financial instruments, right-of-use assets, and lease liabilities. Following this review, the implementation of these standards does not create material shifts in accounting policies or significant financial impacts on the Group's consolidated financial statements.

STANDAR YANG TELAH DITERBITKAN, TETAPI BELUM BERLAKU EFEKTIF

1. PSAK 109: "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
2. Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-*linked*, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*.
3. Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Standar, amendemen, dan penyesuaian PSAK yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 antara lain mencakup penyesuaian tahunan PSAK yang mengacu pada IFRS *Accounting Standards Annual Improvements – Volume* 11.

Grup tidak melakukan penerapan dini atas standar tersebut. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen masih melakukan evaluasi atas dampak yang mungkin timbul, namun diperkirakan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

1. PSAK 109: "Financial Instruments" and PSAK 107: "Financial Instruments: Disclosures", on Classification and Measurement of Financial Instruments;
2. This amendment introduces and clarifies provisions in PSAK 109 for derecognizing financial liabilities, alongside clarifying cash flow assessment methodologies for financial assets with ESG-linked attributes, non-recourse elements, and contractually linked instruments such as tranches.
3. This amendment updates disclosures in PSAK 107 regarding equity investments measured at fair value through other comprehensive income, adding requirements for financial instruments with contractual provisions that modify the timing or value of cash flows.

Standards, amendments, and adjustments to PSAK published but not yet effective for periods beginning on or after 1 January 2026 cover annual revisions referencing the IFRS Accounting Standards Annual Improvements - Volume 11.

The Group did not early adopt these provisions. At the issuance date of the consolidated financial statements, management continues to assess the long-term impact, though no material adjustments to the Group's consolidated financial statements are anticipated.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
THE COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

Tingkat kesehatan ASDP untuk tahun buku 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

The ASDP company health level for the 2024 and 2025 financial years is presented below:

Keterangan *Description*	2025	2024
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level	**Sangat Sehat** **Very Healthy**	Sangat Sehat Very Healthy
Pelaksana Pemeringkatan Rating Agency	**PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Tingkat kesehatan ASDP untuk tahun buku 2025 dan 2024 dinilai berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Penilaian ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, yang mencakup pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUMN, penerapan manajemen risiko, tata kelola, perencanaan strategis, kegiatan korporasi signifikan, teknologi informasi, dan pelaporan. Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, ASDP memperoleh peringkat idAA+ dengan prospek stabil untuk tahun 2025 dan 2024, serta berada dalam kategori "Sangat Sehat".

Pencapaian peringkat AAA mencerminkan kapasitas keuangan Perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang, didukung oleh profil bisnis yang strategis, posisi ASDP dalam mendukung konektivitas penyeberangan nasional, serta pengelolaan keuangan yang tetap *prudent*. Konsistensi peringkat "Sangat Sehat" selama dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Perseroan mampu menjaga ketahanan usaha, kualitas pengelolaan risiko, dan struktur keuangan yang solid di tengah dinamika industri transportasi penyeberangan. Dengan hasil tersebut, ASDP terus berkomitmen memperkuat kinerja operasional, menjaga disiplin keuangan, serta memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku.

ASDP's corporate health level for the 2025 and 2024 financial years was assessed based on rating results conducted by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). The assessment aligns with Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, which regulates SOEs health level assessments, risk management implementation, governance, strategic planning, significant corporate activities, information technology, and reporting. Based on these rating results, ASDP obtained an idAA+ rating with a stable outlook for both 2025 and 2024, placing it in the " Very Healthy" category.

Achieving the AAA rating reflects the Company's very strong financial capacity to meet its long-term financial commitments, backed by a strategic business profile, ASDP's position in supporting national ferry connectivity, and continuously prudent financial management. The consistency of the "Very Healthy" rating for two consecutive years demonstrates the Company's ability to maintain business resilience, risk management quality, and a solid financial structure amid the dynamics of the ferry transportation industry. With these results, ASDP remains committed to strengthening operational performance, maintaining financial discipline, and ensuring corporate management runs in accordance with good governance principles and applicable provisions.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
GOING CONCERN INFORMATION

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Sepanjang tahun 2025, ASDP menghadapi sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha, baik dari sisi eksternal maupun internal. Faktor eksternal mencakup dinamika ekonomi, perubahan pola mobilitas masyarakat, tingkat persaingan pada lintasan tertentu, kondisi cuaca ekstrem, serta perubahan regulasi di sektor transportasi dan kepelabuhanan. Sementara itu, faktor internal terutama berkaitan dengan kesiapan armada, keandalan fasilitas pelabuhan, efektivitas pola operasi, pengendalian biaya, dan kemampuan Perseroan dalam menjaga kualitas layanan. Meskipun demikian, tidak terdapat kondisi yang mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan secara signifikan.

MATTERS WITH POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

Throughout 2025, ASDP faced a number of factors with the potential to affect business continuity, from both external and internal sides. External factors include economic dynamics, changes in public mobility patterns, competition levels on specific routes, extreme weather conditions, and regulatory changes in the transportation and port sectors. Meanwhile, internal factors primarily relate to fleet readiness, port facility reliability, operational pattern effectiveness, cost control, and the Company's ability to maintain service quality. Despite these factors, there were no conditions indicating material uncertainties that could significantly disrupt the Company's business continuity.

PENILAIAN MANAJEMEN TERHADAP HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen menilai bahwa ASDP masih memiliki fundamental usaha yang kuat untuk menjaga kesinambungan operasional dan keberlanjutan kinerja. Penilaian tersebut didasarkan pada posisi Perseroan sebagai penyedia layanan penyeberangan strategis nasional, dukungan jaringan pelabuhan dan lintasan yang luas, struktur permodalan yang tetap sehat, likuiditas yang memadai, serta kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasi. Manajemen juga secara berkala melakukan pemantauan terhadap risiko usaha, kinerja operasional, posisi keuangan, kepatuhan regulasi, serta efektivitas strategi bisnis untuk memastikan setiap potensi risiko dapat dimitigasi secara tepat waktu.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS WITH POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

Management assessed that ASDP's robust business fundamentals is sufficient in maintaining operational continuity and performance sustainability. The assessment is based on the Company's position as a national strategic ferry service provider, the support of a vast network of ports and routes, a capital structure that remains healthy, adequate liquidity, and the Company's ability to generate cash flows from operating activities. Management also periodically monitors business risks, operational performance, financial position, regulatory compliance, and business strategy effectiveness to ensure any potential risks can be mitigated in a timely manner.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN

Dalam melakukan penilaian atas kelangsungan usaha, Manajemen menggunakan sejumlah asumsi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis ASDP sebagai penyedia layanan penyeberangan, kepelabuhanan, dan layanan pendukung. Asumsi tersebut didasarkan pada parameter berikut:

1. Perkembangan ekonomi global dan nasional yang memengaruhi mobilitas masyarakat, aktivitas logistik, daya beli, serta kebutuhan distribusi barang antarpulau;
2. Dinamika industri transportasi, penyeberangan, kepelabuhanan, dan logistik, termasuk perubahan pola perjalanan, tingkat permintaan layanan, serta persaingan pada sejumlah lintasan strategis;
3. Kebijakan Pemerintah di sektor transportasi, kepelabuhanan, tarif, subsidi, pelayanan publik, keselamatan pelayaran, serta pengaturan arus kendaraan pada periode puncak;
4. Kondisi dan keandalan armada kapal, fasilitas pelabuhan, dermaga, serta sarana pendukung operasional dalam menjaga kesinambungan layanan;
5. Pergerakan harga bahan bakar, biaya pemeliharaan, biaya operasional kapal, serta komponen biaya utama lainnya yang dapat memengaruhi efisiensi dan profitabilitas Perseroan;
6. Kondisi cuaca, keselamatan pelayaran, serta faktor geografis dan operasional pada lintasan komersial maupun perintis yang dapat memengaruhi frekuensi layanan dan produktivitas armada;
7. Tingkat kesehatan Perseroan dari aspek keuangan dan non-keuangan, termasuk likuiditas, solvabilitas, arus kas operasi, struktur permodalan, tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
8. Kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi, digitalisasi layanan, serta efektivitas sistem informasi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional;
9. Rencana pengembangan usaha, kebutuhan investasi, optimalisasi aset, serta penguatan pendapatan non-*farebox* sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan keberlanjutan bisnis;
10. Faktor non-fundamental, termasuk perubahan regulasi, dinamika sosial dan politik, kondisi keamanan, gangguan operasional, serta perubahan perilaku pengguna jasa yang dapat memengaruhi kinerja dan kelangsungan usaha Perseroan.

ASSUMPTIONS ADOPTED BY MANAGEMENT FOR ASSESSMENT

In conducting business continuity assessments, the Management utilizes several assumptions tailored to ASDP's business characteristics as a provider of ferry, port, and supporting services. These assumptions are based on the following parameters:

1. Global and national economic developments affecting public mobility, logistics activities, purchasing power, and inter-island goods distribution needs;
2. Dynamics within the transportation, ferry, port, and logistics industries, including changes in travel patterns, service demand levels, and competition on several strategic routes;
3. Government policies in the transportation, port, tariff, subsidy, public service, maritime safety sectors, as well as traffic flow management during peak periods;
4. The condition and reliability of the vessel fleet, port facilities, docks, and operational supporting facilities in maintaining service continuity;
5. Movement of fuel prices, maintenance costs, vessel operating costs, and other major cost components that can affect the Company's efficiency and profitability;
6. Weather conditions, sailing safety, and geographical and operational factors on commercial as well as pioneer routes that can affect service frequency and fleet productivity;
7. The Company's health level from financial and non-financial aspects, including liquidity, solvency, operating cash flows, capital structure, governance, risk management, and compliance with laws and regulations;
8. Human resource readiness, technology application, service digitalization, and the effectiveness of information systems in supporting service quality improvements and operational efficiency;
9. Business development plans, investment needs, asset optimization, and non-farebox revenue optimization as part of diversification and business sustainability strategies;
10. Non-fundamental factors, including regulatory changes, social and political dynamics, security conditions, operational disruptions, and user behavior changes that can affect the Company's performance and business continuity.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

Pada tahun 2025, ASDP terus memperkuat kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab Perseroan dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara tertib melalui pembayaran pajak sesuai jatuh tempo, penyampaian SPT masa dan SPT tahunan, serta pemenuhan dokumen perpajakan dan pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut mencerminkan penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha Perseroan dijalankan dengan memperhatikan aspek kepatuhan fiskal.

Selain kontribusi melalui pajak, ASDP juga memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian, kontribusi Perseroan tidak hanya tercermin dari pelaksanaan kewajiban perpajakan, tetapi juga dari peran ASDP sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendukung penguatan penerimaan negara, keberlanjutan layanan transportasi penyeberangan, serta penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

In 2025, ASDP continued to strengthen tax compliance as part of the Company's responsibility to support state revenues and national development. The fulfillment of tax obligations was carried out orderly through timely tax payments, submission of periodic and annual tax returns (SPT), and the fulfillment of tax documentation and reporting to the regulator in accordance with applicable provisions. The commitment reflects the implementation of transparent and accountable governance, while ensuring that all of the Company's business activities are run with due regard to fiscal compliance aspects.

In addition to contributions through taxes, ASDP also contributes to the state through dividend payments and Non-Tax State Revenue (PNBP). Thus, the Company's contribution is reflected not only in the execution of tax obligations, but also in ASDP's role as a State-Owned Enterprise that supports the optimization of state revenues, the sustainability of ferry transportation services, and value creation for shareholders and stakeholders.

PEMBAYARAN PAJAK

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, ASDP memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari kontribusi Perseroan terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, pembayaran pajak dalam negeri ASDP tercatat sebesar Rp271,64 miliar, menurun Rp3,35 miliar atau 1,22% dibandingkan Rp274,99 miliar pada tahun 2024. Komposisi pembayaran pajak tersebut terutama ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp84,65 miliar, PPh Pasal 21 sebesar Rp67,78 miliar, Pajak Penghasilan Pelayaran Pasal 15 Final sebesar Rp27,24 miliar, serta Pajak Kini Tidak Final sebesar Rp24,82 miliar. Meskipun secara total mengalami penurunan, ASDP tetap menjaga kepatuhan fiskal melalui pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, serta tidak terdapat koreksi audit fiskus selama periode pelaporan, yang mencerminkan pengelolaan perpajakan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

TAX PAYMENTS

As a State-Owned Enterprise, ASDP has an obligation to fulfill tax provisions orderly, timely, and in accordance with applicable laws and regulations as part of the Company's contribution to state revenue and national development. In 2025, ASDP's domestic tax payments were recorded at Rp271.64 billion, down by Rp3.35 billion or 1.22% compared to Rp274.99 billion in 2024. The composition of these tax payments was primarily supported by Value Added Tax (VAT) at Rp84.65 billion, Income Tax Article 21 (PPh 21) at Rp67.78 billion, Shipping Income Tax Article 15 Final at Rp27.24 billion, and Non-Final Current Income Tax at Rp24.82 billion. Despite the total decrease, ASDP maintained fiscal compliance through the fulfillment of tax payment and reporting obligations, and there were no tax authority audit corrections during the reporting period, reflecting transparent, accountable tax management aligned with good corporate governance principles.

Tabel Pembayaran Pajak Dalam Negeri (dalam Rp juta)
Domestic Tax Payment (in Rp million)

Uraian Pajak	2025	2024	2023
PPH Pasal 25/29 | Income Tax 25/29	18.186	24.589	34.113
PPH Pasal 21 | Income Tax 21	67.781	69.703	66.043
PPH Pasal 22 | Income Tax 22	4.277	3.734	3.527
PPH Pasal 23 - Final | Income Tax 23- Final	13.224	13.442	12.649
PBB | Land and Building Tax	6.861	6.753	4.543
Pajak Kendaraan Bermotor | Vehicle Tax	712	690	818
Pajak Penghasilan Pelayaran (Pasal 15) - Final Shipping Income Tax (Article 15) – Final	27.241	26.864	25.838
PPH Pasal 04 Ayat 2 | Income Tax Article 4 Paragraph 2	7.712	10.460	13.504
Pajak Pertambahan Nilai | Value Added Tax (VAT)	84.654	78.091	89.414
Koreksi Audit Fiskus | Tax Audit Adjustment	Tidak ada | None	Tidak ada | None	Tidak ada | None
Pajak Daerah/Retribusi | Local Taxes/Retributions	1.223	834	1.332
Pajak Kini Tidak Final | Non-Final Current Tax	24.822	25.123	29.340
Pajak Tangguhan | Deferred Tax	14.951	14.710	3.957
Jumlah | Total	**271.643**	**274.993**	**285.079**

DIVIDEN

Pada tahun 2025, ASDP telah menyetorkan Dividen sebesar Rp44,96 miliar. Rincian pembagian dividen Perseroan telah dijelaskan pada sub bab tersendiri pada Laporan Tahunan ini.

DIVIDEND

In 2025, ASDP paid dividends totaling Rp44.96 billion. Details of the Company's dividend distribution are explained in a separate sub-chapter of this Annual Report.

Tabel Jumlah Dividen (dalam Rp juta)
Total Dividend (in Rp million)

Uraian *Description*	Jumlah *Total*
Dividen Dividend	44.964

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pada tahun 2025, ASDP telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 6,779 miliar.

NON-TAX STATE REVENUE

In 2025, ASDP paid Non-Tax State Revenue (PNBP) of Rp 6.779 billion.

Tabel Jumlah PNBP (dalam Rp juta)
Total Non-Tax State Revenue (in Rp million)

Uraian *Description*	Jumlah *Total*
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non-Tax State Revenue	6.779

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam memastikan transformasi ASDP berjalan secara berkelanjutan. Melalui penguatan kompetensi, budaya kerja AKHLAK, kepemimpinan yang adaptif, serta peningkatan produktivitas insan Perusahaan, ASDP terus membangun talenta yang tidak hanya mampu menjawab kebutuhan operasional hari ini, tetapi juga siap mendukung pengembangan bisnis, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas pelayanan bagi pengguna jasa di seluruh wilayah operasional.

Human resources serve as the primary foundation for ensuring that the transformation of ASDP proceeds sustainably. By strengthening competencies, AKHLAK corporate culture, adaptive leadership, and improving the productivity of the corporate workforce, ASDP continues to build talent that is not only capable of meeting today's operational requirements but also prepared to support business development, service digitalization, and service quality improvement for service users across all operational regions.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi ASDP disusun untuk memastikan setiap fungsi bisnis, operasional, pengawasan, dan pendukung dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah strategis Perseroan. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang penyeberangan, kepelabuhanan, dan layanan pendukung, struktur organisasi ASDP dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, pembagian kewenangan yang jelas, serta penguatan koordinasi antara Kantor Pusat, regional, cabang, dan entitas anak. Struktur tersebut juga menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi operasional armada, pengelolaan pelabuhan, pelayanan pelanggan, pengembangan bisnis, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen risiko, kepatuhan, serta pengendalian internal.

Pada tahun 2025, pengelolaan struktur organisasi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan transformasi layanan, digitalisasi, efisiensi operasional, dan penguatan tata kelola BUMN. Penyusunan dan penyesuaian struktur organisasi memperhatikan prinsip tata kelola, penerapan manajemen risiko, perencanaan strategis, penyelenggaraan teknologi informasi, serta pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. Regulasi tersebut menjadi acuan penting bagi BUMN dalam membangun pengelolaan perusahaan yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan struktur organisasi yang adaptif, ASDP berupaya memastikan seluruh unit kerja memiliki peran yang jelas dalam mendukung pencapaian target kinerja, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan konektivitas nasional.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The organizational structure of ASDP is structured to ensure that every business, operational, oversight, and supporting function operates effectively, in a coordinated manner, and in alignment with the strategic direction of the Company. As an SOE engaged in the ferry transportation, port operations, and ancillary services, the ASDP's organizational structure is designed to support rapid decision-making, clear delegation of authority, and the strengthening of coordination between Head Office, regional offices, branches, and subsidiaries. This structure also serves as the foundation for executing fleet operational functions, port management, customer service, business development, finance, human capital, information technology, risk management, compliance, and internal control.

In 2025, the management of the organizational structure became increasingly critical alongside the rising need for transformation in aspects of service, digitalization, operational efficiency, and the strengthening of SOE corporate governance. The formulation and adjustment of the organizational structure consider the principles of corporate governance, risk management implementation, strategic planning, information technology operations, and reporting as regulated under Ministry of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. It is an essential reference for SOEs in establishing a more planned, integrated, and sustainable corporate management. ASDP ensures an adaptive organizational structure shall define clear roles for all work units in achieving performance targets, service quality improvement, and the strengthening of national connectivity.

STRATEGY PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY

5 Prinsip Dasar Core Principles

PD 1

HC sebagai mitra strategis lebih proaktif terhadap dinamika Perusahaan dan kebutuhan bisnis
HC as the strategic partner that operates with heightened proactivity regarding Company's dynamics and business requirements.

PD 2

Interkonektivitas strategis antara bisnis dengan program pengembangan dan pembelajaran Karyawan
Strategic **interconnectivity** between business operations and Employee learning and development programs.

PD 3

Meningkatkan **transfer pengetahuan yang berkelanjutan** antar generasi Karyawan
Improve **sustainable knowledge transfer** across Employee generations.

PD 4

Memperkuat **internalisasi nilai budaya** di seluruh aktivitas dan proses bisnis Perusahaan
Strengthen **Company's culture value internalization** across all business activities and corporate processes.

PD 5

Membangun **lingkungan kerja yang konstruktif, suportif, dan positif** untuk mendorong motivasi, moral, & produktivitas Karyawan
Build a **constructive, supportive, and positive work environment** to drive Employee motivation, morale, and productivity.

3 Tema Inisiatif Strategic Themes

Penguatan dasar & peran HC sebagai Business Partner	Percepatan programpembelajaran berbasis Manajemen Talenta Terintegrasi	Mengoptimalkan Sistem & Kapabilitas demi Karyawan & Organisasi yang berkualitas
Strengthen HC foundations and roles as a Business Partner	Accelerate learning programs based on Integrated Talent Management	Optimize Systems and Capabilities for quality Employees and Organizations

10 Inisiatif Strategis *Strategic Initiative*

QW *Quick Wins*
N Inisiatif Baru New Initiative

P01 **Penguatan ASDP Culture Jurney** *Fortify the ASDP Culture Journey* — PD-2, PD-4, PD-5

P02 **Penguatan Peran SDM sebagai Strategic Business Partner** *Improve Employee Development Programs* — PD-1 (N, QW)

P03 **Peningkatan Program Pengembangan Karyawan** *Improve Employee Development Programs* — PD-2, PD-5

P04 **Pengembangan Knowledge Management System** *Develop the Knowledge Management System* — PD-2, PD-3 (N)

P05 **Memperbaharui Talent Pool & Succession Planning** *Memperbaharui Talent Pool & Succession Planning* — PD-2, PD-3

P06 **Optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja** | *Optimize the Performance Management System* — PD-2, PD-5 (N)

P07 **Employee Experience untuk Kinerja Terbaik** *Drive Employee Experience for Peak Performance* — PD-5

P08 **Pemanfaatan Employee Value Preposition** | *Leverage the Employee Value Proposition* — PD-5 (N)

P09 **Perluasan Human Capital Management System** *Expand the Human Capital Management System* — PD-1, PD-5

P10 **Integrasi Human Capital Infrastructure** | *Integrate Human Capital Infrastructure* — PD-5 (N)

Strategi pengelolaan sumber daya manusia ASDP tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat peran *Human Capital* sebagai mitra strategis bisnis dalam mendukung transformasi, peningkatan kualitas layanan, serta kesinambungan operasional Perseroan. Pengelolaan SDM tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga pada penguatan kapabilitas, budaya kerja, manajemen talenta, produktivitas, serta sistem SDM yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika bisnis.

Arah strategi tersebut dibangun berdasarkan 5 prinsip dasar, yaitu:

1. HC sebagai mitra strategis yang produktif terhadap dinamika Perseroan dan kebutuhan bisnis.
2. Interkonektivitas strategis antara bisnis dengan program pengembangan dan pembelajaran karyawan.
3. Transfer pengetahuan yang berkelanjutan antargenerasi karyawan.
4. Penguatan internalisasi nilai budaya di seluruh aktivitas dan proses bisnis Perusahaan.
5. Pembangunan lingkungan kerja yang konstruktif, suportif, dan positif untuk mendorong motivasi, moral, serta produktivitas karyawan.

Untuk memastikan strategi tersebut berjalan lebih terarah, ASDP menetapkan 3 tema inisiatif utama yang menjadi fokus pengelolaan SDM pada tahun 2025, yaitu:

1. Penguatan dasar dan peran HC sebagai *business partner*.
   Tema ini diarahkan untuk memperkuat fondasi budaya dan peran strategis SDM dalam mendukung kebutuhan bisnis. Implementasinya dilakukan melalui penguatan ASDP *Culture Journey* serta peningkatan peran SDM sebagai *strategic business partner* yang mampu memberikan dukungan lebih proaktif terhadap kebutuhan organisasi.
2. Percepatan program pembelajaran berbasis manajemen talenta terintegrasi.
   Tema ini difokuskan pada percepatan pengembangan kompetensi dan kesiapan talenta melalui peningkatan program pengembangan karyawan, pengembangan *knowledge management system*, pembaruan *talent pool* dan *succession planning*, serta optimalisasi sistem manajemen kinerja. Melalui pendekatan ini, Perseroan berupaya memastikan proses pembelajaran, pengembangan karier, dan regenerasi kepemimpinan berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

The human capital management strategy of ASDP in 2025 is directed toward strengthening the role of Human Capital as a strategic business partner to support transformation, service quality improvement, and the operational continuity of the Company. HR management focuses not only on fulfilling labor requirements but also on strengthening capabilities, corporate culture, talent management, productivity, and HR systems that are more integrated and adaptive to business dynamics.

The strategic direction is built upon 5 core principles:

1. HC as a strategic partner that operates productively regarding Company's dynamics and business requirements.
2. Strategic interconnectivity between business and employee development and learning programs.
3. Sustainable knowledge transfer across employee generations.
4. Strengthening corporate culture internalization across Company's all business activities and processes.
5. Building a constructive, supportive, and positive work environment to drive employee motivation, morale, and productivity.

To ensure that the strategy moves forward in a more targeted manner, ASDP has established 3 primary initiative themes that form the focus of HR management in 2025:

1. Strengthening HC foundations and roles as a business partner.
   The theme is directed toward strengthening cultural foundations and the strategic role of HR in supporting business requirements. The implementation is executed by fortifying the ASDP Culture Journey and improving the role of HR as a strategic business partner capable of providing more proactive support for organizational requirements.
2. Accelerating learning programs based on integrated talent management.
   The theme focuses on accelerating competency development and talent readiness by improving employee development programs, developing the knowledge management system, updating the talent pool and succession planning framework, and optimizing the performance management system. Through this approach, the Company endeavors to ensure that learning processes, career development, and leadership regeneration proceed in a more systematic and sustainable manner.

3. Optimalisasi sistem dan kapabilitas demi karyawan dan organisasi yang berkualitas.
   Tema ini diarahkan untuk memperkuat pengalaman karyawan dan kualitas organisasi melalui penguatan *employee experience*, pemanfaatan *employee value proposition*, perluasan *Human Capital Management System*, serta integrasi *Human Capital Infrastructure*. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kerja yang lebih efektif, berbasis data, dan mampu mendukung peningkatan kinerja karyawan maupun organisasi.

Melalui 10 inisiatif strategis tersebut, ASDP berupaya membangun sistem pengelolaan SDM yang lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat budaya kerja AKHLAK, meningkatkan kesiapan talenta, menjaga kesinambungan kepemimpinan, serta mendukung transformasi bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASDP terus memperkuat kerangka kebijakan SDM sebagai respons terhadap kebutuhan internal dan perubahan lingkungan eksternal, termasuk tuntutan peningkatan kapabilitas, digitalisasi proses kerja, penguatan budaya AKHLAK, manajemen talenta, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pembaruan kebijakan tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, pengembangan karier, remunerasi, kesejahteraan, hingga hubungan industrial, dapat berjalan secara lebih terarah, konsisten, dan akuntabel. Pada tahun 2025, Perseroan telah menyusun dan/atau memperbarui kebijakan pengelolaan SDM sebagai berikut:

3. Optimizing systems and capabilities for high-quality employees and organizational excellence.
   The theme is directed toward strengthening the employee experience and organizational quality by improving the employee experience, leveraging the employee value proposition, expanding the Human Capital Management System, and integrating Human Capital Infrastructure. This initiative forms an essential part of building a work ecosystem that is more effective, data-driven, and capable of supporting performance improvements for employees and organization.

Through these 10 strategic initiatives, ASDP endeavors to build a HR management system that is more measurable, integrated, and value-creation-oriented. This strategy is expected to strengthen the AKHLAK corporate culture, improve talent readiness, maintain leadership continuity, and support the business transformation of the Company in a sustainable manner.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICY

ASDP continues to strengthen its HR policy framework in response to internal requirements and external environmental changes, including demands for capability improvement, work process digitalization, the strengthening of AKHLAK culture, talent management, and compliance with applicable statutory provisions. Through these policy updates, the Company endeavors to ensure that all HR management processes, from manpower planning, recruitment, competency development, performance management, career development, remuneration, and employee welfare to industrial relations, can proceed in a more targeted, consistent, and accountable manner. In 2025, the Company formulated and/or updated HR management policies as follows:

Tabel Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management Policy

No	Kebijakan Pengelolaan SDM *Human Resources Management Policy*
1	Keputusan Direksi Nomor: KD.192/HK.002/JKTHS/XII/ASDP-2025 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor KD.225/HK.002/ASDP 2024 Tentang Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Board of Directors Decree No.: KD.192/HK.002/JKTHS/XII/ASDP-2025 concerning the Second Amendment to Board of Directors Decree No. KD.225/HK.002/ASDP-2024 concerning Human Resources Within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
2	Keputusan Direksi Nomor: KD.202/HK.002/JKTHS/XII/ASDP-2025 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direksi Nomor KD.225/HK.002/ASDP-2024 Tentang Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Board of Directors Decree No.: KD.202/HK.002/JKTHS/XII/ASDP-2025 concerning the Third Amendment to Board of Directors Decree No. KD.225/HK.002/ASDP-2024 concerning Human Resources Within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Tabel Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management Policy

No	Kebijakan Pengelolaan SDM *Human Resources Management Policy*
3	Keputusan Direksi Nomor: KD.191/HK.002/JKTHS/XII/ASDP-2025 Pembayaran Hak Atas Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Uang Pisah Bagi Karyawan yang Diputuskan Hubungan Kerjanya di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Board of Directors Decree No.: KD.191/HK.002/JKTHS/XII/ASDP-2025 concerning Payment of Severance Pay, Long Service Bonus, Replacement Pay, and Separation Pay for Employees Terminated at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
4	Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.1215/PA.105/JKTHS/XII/ASDP-2025 Tentang Panduan Manajemen Karier Dalam Penetapan Jabatan Kunci dan Seleksi Karier di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Board of Directors Decree No.: SK.1215/PA.105/JKTHS/XII/ASDP-2025 concerning Career Management Guidelines for Determining Key Positions and Career Selection within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
5	Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.1218/HK.001/JKTHS/XII/ASDP-2025 Tentang Kamus Kompetensi Karyawan Darat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Board of Directors Decree No.: SK.1218/HK.001/JKTHS/XII/ASDP-2025 concerning the Competency Dictionary for Ashore Employees of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN

ASDP menerapkan kebijakan rekrutmen yang transparan, objektif, adil, dan bebas dari diskriminasi untuk memastikan setiap kandidat memperoleh kesempatan yang setara sesuai dengan kompetensi, pengalaman, integritas, serta kebutuhan jabatan. Kebijakan ini berlaku bagi pemenuhan kebutuhan karyawan darat maupun karyawan laut, dengan tetap memperhatikan karakteristik bisnis Perseroan yang menuntut kesiapan operasional, keselamatan layanan, dan kualitas pelayanan di seluruh wilayah kerja. Pelaksanaan rekrutmen mengacu pada Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.225/HK.002/ASDP-2024 tentang Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk prinsip kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hubungan kerja.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menggunakan 2 (dua) metode rekrutmen utama, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal dilakukan untuk memberikan ruang pengembangan karier bagi karyawan Perseroan melalui mekanisme mutasi, promosi, atau lelang jabatan, sehingga pemenuhan posisi dapat mengoptimalkan talenta yang telah memahami proses bisnis, budaya kerja, dan kebutuhan organisasi. Sementara itu, rekrutmen eksternal dilakukan untuk menjaring kandidat dari luar Perseroan guna memenuhi kebutuhan kompetensi tertentu, memperkuat kapasitas organisasi, serta mendukung regenerasi dan pengayaan kapabilitas SDM.

RECRUITMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

ASDP implements a transparent, objective, fair, and discrimination-free recruitment policy to ensure that every candidate gets an equal opportunity in accordance with their competence, experience, integrity, and position requirements. The policy applies to fulfilling the requirements of ashore and marine employees alike, while continuing to consider the Company's business characteristics that demand operational readiness, service safety, and service quality across all operational areas. The execution of recruitment refers to the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.225/HK.002/ASDP-2024 regarding the Human Resources Within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), and the applicable labor provisions, including the principles of equal opportunity and treatment in employment relations.

In its execution, the Company utilizes 2 (two) primary recruitment methods, internal recruitment and external recruitment. Internal recruitment provides career development space for Company employees through mechanisms of transfer, promotion, or job bidding, such that position fulfillment can optimize talent that already understands the business processes, corporate culture, and organizational requirements. Meanwhile, external recruitment is conducted to attract candidates from outside the Company to fulfill specific competency requirements, strengthen organizational capacity, and support regeneration and the enrichment of human capital capabilities.

Seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terukur melalui tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, antara lain seleksi administrasi, asesmen kompetensi, evaluasi kesesuaian pengalaman dan potensi, serta tahapan lain sesuai ketentuan internal Perseroan. Untuk menjaga objektivitas dan kualitas proses seleksi, Perseroan dapat melibatkan pihak ketiga atau konsultan SDM yang memiliki kompetensi di bidang rekrutmen. Kandidat yang dinyatakan memenuhi kualifikasi selanjutnya ditempatkan sesuai kebutuhan Perseroan dan mengikuti proses familiarisasi atau *onboarding* untuk mempercepat adaptasi terhadap budaya AKHLAK, tata kelola, standar keselamatan, serta proses bisnis ASDP.

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan rekrutmen diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan organisasi secara tepat sasaran, menjaga kesinambungan operasional, serta memperkuat kualitas layanan Perseroan. Melalui proses rekrutmen yang berbasis kompetensi dan kebutuhan bisnis, ASDP berupaya memastikan ketersediaan talenta yang mampu mendukung transformasi Perseroan, peningkatan produktivitas, penguatan layanan pelanggan, serta keberlanjutan kinerja jangka panjang. Adapun rincian rekrutmen serta pemberhentian di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The entire selection process is executed in a measurable manner through stages tailored to position requirements, including administrative selection, competency assessment, evaluation of experience and potential alignment, as well as other stages in line with the internal provisions of the Company. To maintain objectivity and quality selection process, the Company may involve third parties or HR consultants with competency in recruitment. Qualified candidates are placed according to requirements and undergo an onboarding process to accelerate adaptation to the AKHLAK culture, governance, safety standards, and business processes of ASDP.

Throughout 2025, the recruitment was directed toward supporting the targeted fulfillment of organizational requirements, maintaining operational continuity, and strengthening the service quality of the Company. Through competence-based and business demands recruitment process, ASDP endeavors to ensure the availability of talent capable of supporting corporate transformation, productivity improvement, enhanced customer service, and long-term performance sustainability. The details of recruitment and termination in 2025 are presented as follows:

Tabel Rekrutmen dan Pemberhentian Tahun 2025
2025 Recruitment and Termination Table

Uraian *Description*	Jumlah *Total*
Rekrutmen | Recruitment	**168 Orang** | Person
Karyawan Darat | Ashore Employees	168 Orang | Person

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KAPABILITAS

Pengembangan kompetensi dan kapabilitas karyawan merupakan prioritas ASDP dalam memastikan setiap insan Perseroan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jabatan, standar keselamatan, kualitas layanan, dan transformasi bisnis. Program pengembangan kompetensi dapat mencakup pelatihan teknis, pelatihan fungsional, sertifikasi, penguatan kompetensi kepemimpinan, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelayanan pelanggan, digitalisasi, serta pemahaman tata kelola dan manajemen risiko. Pengembangan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus mempersiapkan talenta yang siap mendukung kebutuhan bisnis pada periode mendatang.

COMPETENCY AND CAPABILITY DEVELOPMENT

Employee competency and capability development is ASDP's priority in ensuring that every corporate individual possesses abilities that align with position demands, safety standards, service quality, and business transformation. Competency development programs may encompass technical training, functional training, certification, leadership competency strengthening, occupational safety and health training, customer service, digitalization, as well as an understanding of governance and risk management. Competency development is conducted to improve the effectiveness of task execution while preparing talent that is ready to support business requirements in future periods.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi mengacu pada kebutuhan organisasi, hasil evaluasi kinerja, pemetaan kompetensi, dan arah strategis Perseroan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur pelatihan kerja sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan, sementara PER-2/MBU/03/2023 menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan yang terencana, berbasis risiko, dan mendukung kinerja BUMN. Bagi ASDP, program pengembangan kompetensi memiliki peran strategis karena kualitas SDM berhubungan langsung dengan keselamatan operasional, keandalan layanan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi proses bisnis.

The implementation of competency development refers to organizational requirements, performance evaluation results, competency mapping, and the strategic direction of the Company. Law No. 13 of 2003 regulates job training as part of labor development, while PER-2/MBU/03/2023 emphasizes the importance of planned, risk-based corporate management that supports SOEs performance. For ASDP, competency development programs hold a strategic role because HR quality correlates directly with operational safety, service reliability, customer satisfaction, and business process efficiency.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIR

ASDP menempatkan pengembangan karier sebagai bagian penting dari strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan tersedianya talenta yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung kesinambungan kepemimpinan Perseroan. Komitmen tersebut diatur melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.225/HK.002/ASDP-2024 tentang Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang menjadi dasar dalam pengelolaan penempatan karyawan, manajemen karier, serta pengembangan talenta bagi karyawan darat maupun karyawan laut.

Kebijakan pengembangan karier dilaksanakan secara komprehensif melalui 2 (dua) jalur utama, yaitu jalur struktural dan jalur fungsional. Penetapan jalur karier dilakukan dengan mempertimbangkan *job family* jabatan, pola karier, kompetensi, potensi, serta kinerja karyawan. Melalui pendekatan tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan pengembangan yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan kontribusi individu, sekaligus mendukung prinsip meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Selain pengembangan karier, Keputusan Direksi tersebut juga mengatur pengembangan talenta sebagai upaya Perseroan dalam menyiapkan calon pemimpin masa depan. Program pengembangan talenta dilaksanakan secara terintegrasi dan berjenjang, mulai dari level *basic* hingga *executive*, melalui Ferizyan *Talent Development Program* (FTDP). Program ini dirancang untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan,

CAREER DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

ASDP places career development as an essential part of its HR management strategy to ensure the availability of talent that is competent, possesses integrity, and is ready to support the leadership continuity of the Company. The Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.225/HK.002/ASDP-2024 regarding the Human Resources Within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) shows that commitment and forms the basis for managing employee placement, career management, and talent development for ashore as well as marine employees.

The career development policy is executed comprehensively through 2 (two) primary paths: the structural path and the functional path. The setup of career paths considers the job family of the position, career patterns, competencies, potential, and employee performance. This approach allows the Company to ensure that every employee has the development opportunities aligned with organizational requirements and individual contributions, while supporting the principle of meritocracy in HR management.

In addition to career development, the Decree of the Board of Directors also regulates talent development as an effort by the Company to prepare future leaders. Talent development programs are executed in an integrated and hierarchal manner, spanning from the basic to executive levels, through the Ferizyan Talent Development Program (FTDP). The program is designed to strengthen leadership capabilities, accelerate talent readiness for strategic positions, and ensure

mempercepat kesiapan talenta pada posisi strategis, serta memastikan keberlanjutan organisasi dalam menghadapi dinamika bisnis penyeberangan, kepelabuhanan, dan layanan pendukung. Rincian program FTDP berdasarkan jenjang jabatan disajikan dalam tabel berikut:

organizational sustainability in facing the dynamics of ferry transportation, port operations, and ancillary services. The details of the FTDP program based on position levels are presented in herein:

Tabel Tingkatan *Talent Development Program*
Talent Development Program Levels

Band Level	*Talent Development Program*
D-1	*Executive Leadership Development Program* (ELDP)
D-2	*Managerial Leadership Development Program* (MLDP)
D-3	*Junior Managerial Leadership Development Program* - I (JLDP - I)
D-4	*Junior Managerial Leadership Development Program* - II (JLDP - II)
D-5	*Basic Leadership Development Program* (BLDP)

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

ASDP melakukan penilaian kinerja karyawan secara berkala, transparan, dan objektif sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, pengendalian, serta peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Penilaian kinerja tidak hanya digunakan untuk mengukur pencapaian individu terhadap sasaran kerja, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi, pemberian apresiasi, pengembangan karier, serta pemetaan talenta. Dengan sistem penilaian yang terstruktur, Perseroan berupaya memastikan bahwa kontribusi setiap karyawan selaras dengan target organisasi, nilai Perseroan, dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

Proses penilaian kinerja karyawan berpedoman pada Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.225/HK.002/ASDP-2024 tentang Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Tahapan penilaian dimulai dengan penetapan sasaran kerja pada awal tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), uraian jabatan, serta KPI Korporat. Selanjutnya, monitoring kinerja individu dilakukan secara berkala setiap bulan oleh atasan langsung pada masing-masing unit kerja, dan diakhiri dengan evaluasi kinerja pada akhir tahun untuk menilai tingkat pencapaian secara menyeluruh.

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

ASDP conducts employee performance evaluations periodically, transparently, and objectively as part of the mechanism for evaluating, controlling, and improving human resource productivity. Performance evaluations measure individual achievements against work targets as well as form the basis for identifying competency development requirements, granting recognition, career development, and talent mapping. A structured evaluation system ensures the Company to award contribution to every employee who aligns with organizational targets, corporate values, and evolving business requirements.

The employee performance evaluation process is guided by the Decree of the Board of Directors No. KD.225/HK.002/ASDP-2024 on the Human Resources Within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). The evaluation stages commence with the establishment of year-start work targets, which are formulated based on the Long-Term Plan (LTP), the Work Program and Budget (WPB), job descriptions, and Corporate KPIs. Then, individual performance monitoring is conducted monthly by direct supervisors in each work unit, concluding with a year-end performance evaluation to assess the overall achievement level.

Selain penilaian atas hasil kerja, ASDP juga melaksanakan penilaian perilaku berbasis nilai AKHLAK melalui mekanisme penilaian 360 derajat yang dilakukan setiap semester. Penilaian ini mencakup aspek Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagai nilai utama BUMN yang menjadi dasar perilaku kerja insan ASDP. Dalam komposisi penilaian, hasil kerja memiliki bobot 80%, sedangkan perilaku AKHLAK memiliki bobot 20%. Melalui kombinasi tersebut, Perseroan memastikan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga pada cara karyawan menjalankan tugas sesuai budaya kerja, integritas, kolaborasi, dan profesionalisme. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perseroan menetapkan predikat kinerja sesuai total nilai sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

In addition to evaluating work outputs, ASDP also conducts AKHLAK-based behavioral assessments every semester through a 360-degree evaluation mechanism on aspects of Trustworthy (*Amanah*), Competent (*Kompeten*), Harmonious (*Harmonis*), Loyal, Adaptive (*Adaptif*), and Collaborative (*Kolaboratif*) as the core values of SOEs that form the work behavior of ASDP personnel. In the evaluation composition, work outputs carry a weight of 80%, whereas AKHLAK behavior carries a weight of 20%. Through this combination, the Company ensures that performance evaluation is oriented not only toward target achievement but also toward the manner in which employees execute tasks in accordance with corporate culture, integrity, collaboration, and professionalism. Based on these evaluation results, the Company establishes performance ratings according to total scores as presented herein:

Tabel Predikat *Talent Development Program*
Predicate of Talent Development Program Levels

Jumlah Nilai *Score*	Predikat *Predicate*
>105	*Outstanding*
>100 - 105	*Above Target*
>95 - 100	*On Target*
>90 - 95	*Below Target*
<90	*Poor*

Selain penilaian kinerja, ASDP juga menyediakan mekanisme *coaching* dan *counseling* sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja individu secara lebih personal, terarah, dan berkelanjutan. *Coaching* dilaksanakan untuk memberikan bimbingan, umpan balik, dan dorongan kepada karyawan dalam mencapai sasaran kerja, mengembangkan potensi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Sementara itu, *counseling* difokuskan untuk membantu karyawan dalam menghadapi kendala personal maupun profesional yang berpotensi memengaruhi kinerja, motivasi, dan produktivitas kerja.

In addition to performance evaluation, ASDP also provides coaching and counseling mechanisms as part of efforts to improve individual performance in a more personalized, targeted, and sustainable manner. Coaching provides guidance, feedback, and encouragement to employees in achieving work targets, developing potential, and improving the effectiveness of task execution. Meanwhile, counseling focuses on assisting employees in facing personal or professional constraints that have the potential to affect performance, motivation, and work productivity.

Melalui pendekatan tersebut, Perseroan tidak hanya menilai capaian kinerja, tetapi juga memberikan dukungan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Pelaksanaan *coaching* dan *counseling* diharapkan mampu memperkuat keterlibatan karyawan, meningkatkan kualitas hubungan antara atasan dan bawahan, mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif. Dengan demikian, program ini menjadi bagian dari komitmen ASDP dalam membangun sumber daya manusia yang produktif, adaptif, dan selaras dengan pencapaian tujuan bisnis Perseroan.

Through this approach, the Company not only evaluates performance achievements but also provides development support tailored to each individual's needs. Coaching and counseling is expected to strengthen employee engagement, improve the relationships quality between supervisors and subordinates, drive continuous performance improvement, and establish a more supportive work environment. Consequently, this program forms part of the commitment of ASDP to building productive and adaptive human resources who is aligned with the achievement of the Company's business objectives.

STRUKTUR PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur pengelolaan sumber daya manusia ASDP per 31 Desember 2025 secara rinci adalah sebagai berikut:

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRUCTURE

The detailed human resource management structure of ASDP as of 31 December 2025 is as follows:

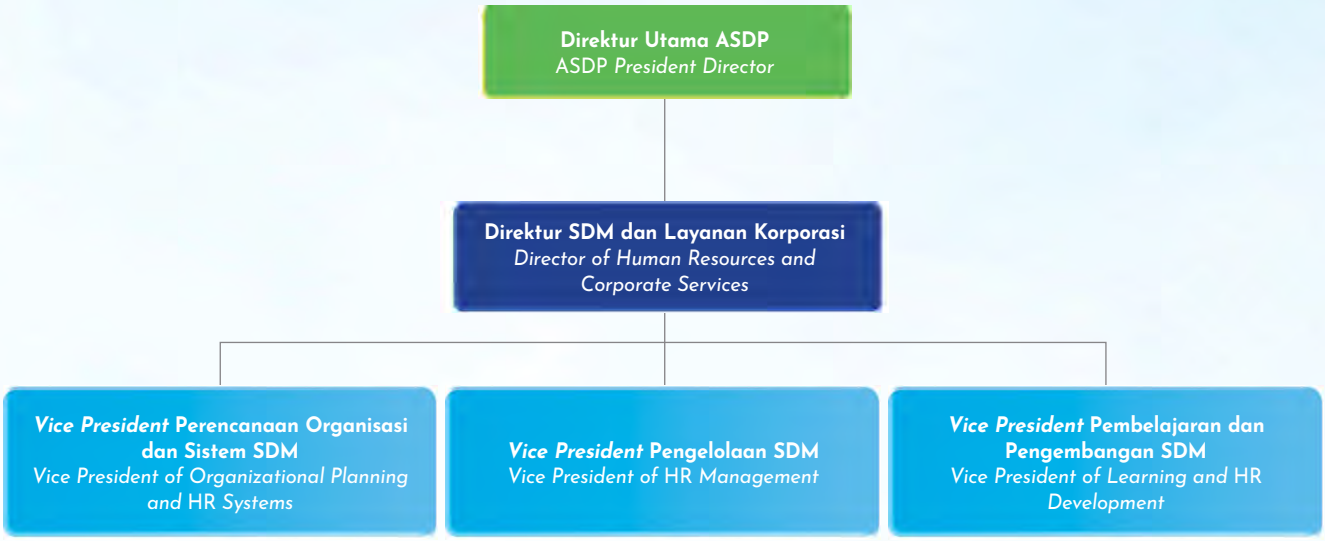

PROGRAM KERJA SDM TAHUN 2025

Untuk mendukung pencapaian rencana perusahaan pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan sejumlah program kerja di bidang sumber daya manusia, pengadaan, serta fungsi pendukung umum. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan karyawan, pengembangan kompetensi, efektivitas proses pengadaan, serta pemenuhan fasilitas kerja yang mendukung kelancaran operasional. Adapun pelaksanaan program kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE BENEFIT

Program *employee benefit* diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui penguatan fasilitas dan manfaat kerja. Pada tahun 2025, realisasi program ini belum sepenuhnya optimal sehubungan dengan adanya keterbatasan likuiditas Perseroan. Program penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan dilanjutkan sebagai bagian dari program kerja SDM tahun 2026. Sementara itu, program pemberian asuransi bagi awak kapal dan fasilitas *personal loan* belum dapat direalisasikan pada tahun 2025. Perseroan tetap memandang penguatan *employee benefit* sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan loyalitas karyawan secara berkelanjutan.

2025 HUMAN RESOURCES WORK PROGRAM

To support the achievement of the corporate plan in 2025, the Company executed a number of work programs in the fields of human resources, procurement, and general support functions. These programs were directed toward strengthening employee welfare, competency development, the effectiveness of procurement processes, and deliver work facilities that support smooth operations. The execution of the 2025 work programs is presented as follows:

EMPLOYEE BENEFIT

The employee benefit program was directed toward improving employee welfare by strengthening work facilities and benefits. In 2025, the realization of this program was not yet fully optimal due to the liquidity constraints. The contribution adjustment program for BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan (Employment and Health Social Security) will be continued as part of the 2026 HR work program. Meanwhile, the insurance program for vessel crews and personal loan facilities could not be realized in 2025. The Company continues to view the strengthening of employee benefits as an essential part of improving employee welfare, motivation, and loyalty in a sustainable manner.

EMPLOYEE DEVELOPMENT

Program *employee development* dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan kinerja karyawan dalam mendukung pencapaian sasaran Perseroan. Pada tahun 2025, program pelatihan dan pengembangan karyawan telah berjalan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu fokus utama pengelolaan SDM. Sinergi pengembangan SDM antara induk Perusahaan dan anak Perusahaan juga telah mulai berjalan, meskipun implementasinya masih perlu diperluas dan diperkuat, khususnya pada cabang-cabang yang memiliki irisan operasional dengan induk Perusahaan. Oleh karena itu, penguatan program pelatihan, pemerataan akses pengembangan, serta peningkatan sinergi antarentitas akan dilanjutkan dalam program kerja tahun 2026.

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Program *procurement of goods and services* diarahkan untuk meningkatkan kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2025, upaya penguatan proses pengadaan dilakukan melalui paketisasi pengadaan, sinergi proses pengadaan dengan induk Perusahaan, penilaian rekanan, serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Namun, implementasi program tersebut belum sepenuhnya optimal sehingga masih memerlukan penguatan dari sisi perencanaan, koordinasi, evaluasi pemasok, dan standardisasi proses. Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2026 guna mendukung pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan selaras dengan kebutuhan operasional Perseroan.

GENERAL AFFAIR

Program *general affair* difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kantor, fasilitas kerja, serta kelengkapan peralatan kerja yang menunjang efektivitas aktivitas operasional dan administrasi Perseroan. Pada tahun 2025, pemenuhan kebutuhan kantor dan fasilitas kerja telah berjalan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan tahunan. Namun, program peningkatan kesehatan karyawan belum dapat direalisasikan secara optimal pada tahun 2025 sehubungan dengan keterbatasan likuiditas Perseroan. Ke depan, Perseroan akan terus mendorong pemenuhan fasilitas kerja yang memadai dan memperkuat program pendukung kesehatan karyawan secara bertahap, dengan tetap mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan Perseroan.

EMPLOYEE DEVELOPMENT

The employee development program was executed to improve employee competence, capability, and performance in supporting the achievement of corporate targets. In 2025, employee training and development programs proceeded sustainably and became one of the primary focuses of HR management. HR development synergy between the holding and subsidiaries also commenced, although its implementation still requires expansion and strengthening, particularly at branches that have operational overlaps with the holding. Therefore, the strengthening of training programs, equalization of development access, and improvement of synergy across entities will be continued in the 2026 work program.

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The procurement of goods and services program was directed toward improving its smooth execution, effectiveness, and accountability. In 2025, efforts to strengthen the procurement process were conducted through bundling, synergy with the holding, vendor assessments, and the formulation of the Owner's Estimate (*Harga Perkiraan Sendiri*/HPS). However, the program's implementation was not fully optimal yet, thereby still requiring strengthening from the aspects of planning, coordination, supplier evaluation, and process standardization. This program will be continued in 2026 to support efficient and transparent procurement that is aligned with the Company's operational requirements.

GENERAL AFFAIR

The general affair program focused on fulfilling office requirements, work facilities, and the completeness of work equipment supporting the operational and administrative effectiveness of the Company. In 2025, the fulfillment of office requirements and work facilities proceeded sustainably in accordance with annual needs. However, the employee health improvement program could not be realized optimally in 2025 due to the liquidity constraints. Going forward, the Company will continue to drive the fulfillment of adequate work facilities and strengthen employee health support programs in a gradual manner, while continuing to consider priority needs and the financial capacity of the Company.

INTERNALISASI BUDAYA

Internalisasi budaya perusahaan merupakan bagian penting dari upaya ASDP dalam membangun perilaku kerja yang selaras dengan nilai AKHLAK, etika profesional, produktivitas, serta kualitas layanan. Pada tahun 2025, internalisasi budaya dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terstruktur, mulai dari kampanye budaya, peningkatan pemahaman karyawan, hingga pengukuran efektivitas implementasi budaya di lingkungan Perseroan.

CULTURE CAMPAIGN

Culture campaign merupakan mekanisme komunikasi budaya yang bertujuan untuk mempromosikan, memperkuat, dan menjaga konsistensi penerapan nilai, praktik, serta perilaku kerja yang berlaku di lingkungan Perseroan. Program ini mencakup kampanye budaya AKHLAK, 5R, *Respectful Workplace Policy* (RWP), serta 5S sebagai bagian dari pembentukan lingkungan kerja yang tertib, produktif, aman, dan saling menghargai. Pelaksanaan kampanye dilakukan melalui berbagai media komunikasi internal, antara lain video pendek, desain komunikasi visual, serta *merchandise* tematik untuk meningkatkan daya tarik, keterlibatan, dan daya ingat karyawan terhadap pesan budaya yang disampaikan.

CULTURE AWARENESS & UNDERSTANDING

Culture awareness & understanding diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan karyawan dalam menerapkan budaya perusahaan pada aktivitas kerja sehari-hari. Implementasi program dilakukan melalui kegiatan seperti *culture quiz*, lomba video AKHLAK, serta identifikasi implementasi program 5R di lingkungan kerja. Melalui pendekatan ini, Perseroan mendorong budaya perusahaan tidak hanya dipahami sebagai nilai formal, tetapi juga diterjemahkan ke dalam perilaku nyata, kolaborasi, disiplin kerja, kepedulian terhadap lingkungan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan.

CULTURE ASSESSMENT

Culture assessment merupakan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas penerapan budaya perusahaan secara berkala. Penilaian dilakukan melalui *internal culture survey* dan *external culture survey* guna memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman, penerimaan, dan penerapan budaya di lingkungan Perseroan, baik dari perspektif internal maupun eksternal. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar

CULTURE INTERNALIZATION

The internalization of corporate culture forms an essential part of ASDP's efforts to build work behavior aligned with AKHLAK values, professional ethics, productivity, and service quality. In 2025, culture internalization was conducted through various structured approaches, ranging from culture campaigns and improving employee understanding to measuring the effectiveness of culture implementation within the Company.

CULTURE CAMPAIGN

The culture campaign serves as a culture communication mechanism aimed at promoting, reinforcing, and maintaining consistency in the application of values, practices, and work behaviors applicable within the Company. The culture campaigns program encompasses AKHLAK, 5R, Respectful Workplace Policy (RWP), and 5S as part of establishing an orderly, productive, safe, and mutually respectful workplace. The execution of the campaign was conducted through various internal communication media, including short videos, visual communication designs, and thematic merchandise to improve the appeal, engagement, and retention of employees regarding the communicated cultural messages.

CULTURE AWARENESS & UNDERSTANDING

Culture awareness & understanding is directed toward improving employee awareness, understanding, and engagement in applying corporate culture to daily work activities. The program implementation was conducted through activities such as culture quizzes, AKHLAK video competitions, and the identification of 5R implementation in the workplace. The Company encourages corporate culture to be understood and implemented into actual behavior, collaboration, work discipline, care for the work environment, and service quality improvement.

CULTURE ASSESSMENT

Culture assessment is an evaluation mechanism to measure the effectiveness of corporate culture application periodically. Evaluations were conducted through internal culture surveys and external culture surveys to obtain an overview on the level of understanding, acceptance, and application of culture within the Company, from both internal and external perspectives. The evaluation results form the basis for ASDP in formulating follow-

bagi ASDP dalam menyusun tindak lanjut penguatan budaya, memperbaiki program internalisasi, serta memastikan budaya perusahaan tetap relevan dalam mendukung transformasi, kinerja, dan keberlanjutan organisasi.

up actions for culture strengthening, improving internalization programs, and ensuring that corporate culture remains relevant in supporting transformation, performance, and organizational sustainability.

TURNOVER PEKERJA

Sepanjang tahun 2025, *turnover* pekerja pada Perseroan sebanyak 330 orang dengan rincian keterangan sebagai berikut:

EMPLOYEE TURNOVER

Throughout 2025, employee turnover at the Company was 330 people with the following details:

Tabel *Turnover* Pekerja ASDP Tahun 2025
ASDP Employee Turnover in 2025

Keterangan *Description*	2025	
	Pria *Male*	Wanita *Female*
Mengundurkan Diri | Resign	110	14
Pensiun Sukarela | Voluntary Retirement	0	0
Pensiun Normal | Standard Retirement	131	8
Meninggal Dunia | Passed Away	17	1
Penugasan | Assigned	0	0
Habis Kontrak | Contract Expiration	29	4
PHK | Layoff	16	0
Jumlah | Total	**303**	**27**
	330	

Pada tahun 2025, jumlah *turnover* pekerja ASDP tercatat sebanyak 330 orang, terdiri dari 303 pekerja pria dan 27 pekerja wanita. Berdasarkan penyebabnya, *turnover* terbesar berasal dari pensiun normal sebanyak 139 orang, yang mencerminkan proses alamiah dalam siklus kepegawaian Perseroan, diikuti oleh pekerja yang mengundurkan diri sebanyak 124 orang. Selain itu, terdapat 33 pekerja yang berakhir masa kontraknya, 18 pekerja meninggal dunia, dan 16 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, tidak terdapat pekerja yang keluar karena pensiun sukarela maupun penugasan.

In 2025, the volume of worker turnover at ASDP was recorded at 330 individuals, consisting of 303 male workers and 27 female workers. Based on the causes, the largest turnover originated from normal retirement totaling 139 individuals, reflecting a natural process in the personnel cycle of the Company, followed by workers resigning totaling 124 individuals. Additionally, there were 33 workers whose work contract expired, 18 workers who passed away, and 16 workers who was termined from employment. No workers departed voluntary due to retirement or assignment.

PROGRAM PELATIHAN

Program pelatihan tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen ASDP dalam meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan kesiapan insan Perseroan untuk mendukung kebutuhan operasional, keselamatan layanan, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Rincian program pelatihan ASDP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TRAINING PROGRAM

The 2025 training program was conducted as part of ASDP's commitment to improving the competence, capability, and readiness of the Company's personnel to support operational requirements, service safety, digital transformation, and service quality improvement for service users. The details of the ASDP training program is detailed in the table below.

Tabel Program Pelatihan

Training Program

Uraian *Description*	**Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan (a)** *Number of Workers Receiving Training (a)*	**Jam Pelatihan (b)** *Training Hours (b)*	**Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja** *Average Training Hours/Worker* **(c = b/a)**
Berdasarkan Jenis Kelamin | By Gender			
Pria | Men	1.423	37.032	26,02
Wanita | Women	508	12.898	25,39
Jumlah | Total	**1.931**	**49.930**	**25,86**
Berdasarkan Tingkat Jabatan | By Positions			
Karyawan Darat | Ashore Employees	**1.631**	**49.730**	**30,49**
D-1 | BoD-1	235	5.384	22,91
D-2 | BoD-2	291	9.139	31,41
D-3 | BoD-3	67	1.840	27,46
D-4 | BoD-4	230	6.095	26,50
D-5 | BoD-5	802	27.024	33,70
D-6 | BoD-6	6	248	41,33
Karyawan Laut | Marine Employees	**119**	**4.502**	**37,83**
Nakhoda | Captain	12	536	44,67
Perwira | Officer	102	3.726	36,53
Rating | Crew	5	240	48,00
Jumlah | Total	**1.750**	**54.232**	**30,99**

Pada tahun 2025, jumlah pekerja yang memperoleh pelatihan tercatat sebanyak 1.750 orang dengan total 54.232 jam pelatihan dan rata-rata 30,99 jam pelatihan per pekerja. Berdasarkan jenis kelamin, pelatihan diikuti oleh 1.423 pekerja pria dengan 37.032 jam pelatihan dan 508 pekerja wanita dengan 12.898 jam pelatihan. Berdasarkan tingkat jabatan, karyawan darat menjadi kelompok peserta terbesar dengan 1.631 pekerja dan 49.730 jam pelatihan, terutama pada level D-5 sebanyak 802 pekerja. Sementara itu, pelatihan bagi karyawan laut diikuti oleh 119 pekerja dengan 4.502 jam pelatihan, terdiri dari nahkoda, perwira, dan ABK, dengan rata-rata jam pelatihan tertinggi pada ABK sebesar 48,00 jam per pekerja. Capaian ini menunjukkan bahwa ASDP terus mendorong pengembangan kompetensi secara menyeluruh bagi karyawan darat maupun laut untuk memperkuat kesiapan operasional, produktivitas, dan kualitas layanan Perseroan.

In 2025, the number of workers who received training was recorded at 1,750 individuals with a total of 54,232 training hours and an average of 30.99 training hours per worker. Based on gender, training was attended by 1,423 male workers with 37,032 training hours and 508 female workers with 12,898 training hours. Based on position levels, ashore employees formed the largest participant group with 1,631 workers and 49,730 training hours, particularly at the BoD-5 level totaling 802 workers. Meanwhile, training for marine employees was attended by 119 workers with 4,502 training hours, consisting of captains, officers, and crew members, with the highest average training hours found among crew members at 48.00 hours per worker. The achievement indicates that ASDP continues to drive comprehensive competency development for both ashore and marine employees to strengthen the operational readiness, productivity, and service quality of the Company.

Tabel Biaya Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi (dalam Rp juta)
Cost of Training Program (in Rp million)

Uraian *Description*	Satuan *Unit*	Realisasi 2025 *Realization 2025*	RKAP 2025 *WPB 2025*	Pencapaian Terhadap Target *Achievement Against Target*
		(1)	(2)	(3) = (1)/(2)
Biaya Pelatihan | Training Costs	Rupiah	20.213	21.763	92,88
Pelatihan Pekerja | Employee Training	Orang | Person	1.931	4.920	39,25

PEKERJA ANAK DAN PEKERJA PAKSA

ASDP tidak mempekerjakan pekerja anak dan tidak menerapkan kerja paksa dalam seluruh kegiatan operasional Perseroan. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengatur perlindungan tenaga kerja, batas usia kerja, serta larangan kerja paksa. Penerapannya dilakukan melalui proses rekrutmen dan penempatan karyawan yang memperhatikan usia, kompetensi, dan persyaratan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

CHILD LABOR AND FORCED LABOR

ASDP does not employ child labor and does not apply forced labor across all operational activities of the Company. This policy refers to Law No. 13 of 2003 regarding Labor as amended through Law No. 6 of 2023 regarding Job Creation, which regulates labor protection, working age limits, and the prohibition of forced labor. Its application is executed through employee recruitment and placement processes that consider age, competence, and position requirements in accordance with applicable provisions.

PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL

ASDP menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia, termasuk melalui dukungan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah operasional Perseroan. Kebijakan ini diterapkan dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kesesuaian kompetensi, dan persyaratan jabatan, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional sekaligus memberikan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat setempat. Informasi mengenai penyerapan tenaga kerja lokal ASDP disajikan pada tabel berikut:

LOCAL MANPOWER ABSORPTION

ASDP upholds the principle of sustainability as part of human resource management, including through support for the local manpower absorption in the Company's operational areas. This policy is implemented while continuing to consider organizational requirements, competency alignment, and position requirements, so that it can support smooth operations while contributing to the empowerment of the local community. Information regarding the absorption of local manpower at ASDP is presented in the following table:

Proyeksi SDM *Projection of HR*	2025		2024		2023	
	Karyawan Perusahaan *Company Employees*	*Outsourcing*	Karyawan Perusahaan *Company Employees*	Outsourcing	Karyawan Perusahaan *Company Employees*	Outsourcing
Jumlah Pekerja Number of Employees	4.738	2.827	4.727	2.541	4.738	2.420
Jumlah Pekerja Lokal Number of Local Employees	62	2.827	58	2.541	46	2.420

ASDP mendukung penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan operasional, ketersediaan kompetensi, dan persyaratan jabatan di masing-masing wilayah kerja. Pada tahun 2025, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 4.738 orang, dengan 62 orang merupakan pekerja lokal, meningkat dibandingkan 58 orang pada tahun 2024 dan 46 orang pada tahun 2023. Sementara itu, seluruh tenaga kerja *outsourcing* pada tahun 2025, yaitu sebanyak 2.827 orang, merupakan pekerja lokal, meningkat dibandingkan 2.541 orang pada tahun 2024 dan 2.420 orang pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa ASDP terus memberikan ruang bagi pemanfaatan tenaga kerja lokal, khususnya pada fungsi pendukung operasional, dengan tetap memperhatikan prinsip kompetensi, kebutuhan organisasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

ASDP supports the absorption of local manpower in accordance with operational requirements, competency availability, and position requirements in each work area. In 2025, corporate employees was recorded at 4,738 individuals, in which 62 are local workers, representing an increase compared to 58 individuals in 2024 and 46 individuals in 2023. Meanwhile, the entirety of the outsourced workforce in 2025, totaling 2,827 individuals, comprised local workers, representing an increase compared to 2,541 individuals in 2024 and 2,420 individuals in 2023. This achievement indicates that ASDP continues to provide space for the employing of local manpower, particularly in operational support functions, while continuing to consider competency principles, organizational requirements, and compliance with applicable labor provisions.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

ASDP mengelola hubungan industrial berdasarkan prinsip kemitraan yang harmonis, saling menghormati, keterbukaan komunikasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sebagai perusahaan yang menjalankan layanan penyeberangan, kepelabuhanan, dan layanan pendukung di berbagai wilayah operasional, stabilitas hubungan industrial menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan layanan, keselamatan operasional, dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, Perseroan membangun komunikasi yang konstruktif antara manajemen dan pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan secara musyawarah.

Ketentuan hubungan kerja di lingkungan ASDP diatur melalui kebijakan internal Perseroan, peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja yang berlaku, serta ketentuan ketenagakerjaan yang relevan. Pengelolaan hubungan industrial dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Melalui kerangka tersebut, Perseroan memastikan bahwa hak dan kewajiban pekerja maupun Perseroan dipahami dengan jelas, serta tersedia saluran komunikasi untuk menampung aspirasi, masukan, dan potensi permasalahan ketenagakerjaan.

INDUSTRIAL RELATIONS

ASDP manages industrial relations based on the principles of a harmonious partnership, mutual respect, open communication, and compliance with statutory provisions in the labor sector. As a company operating ferry transportation, ports, and ancillary services across various operational regions, the stability of industrial relations constitutes an essential factor in maintaining service continuity, operational safety, and work productivity. Therefore, the Company establishes constructive communication between management and workers to create a work environment that is conducive, professional, and oriented toward resolving issues through consensus.

Provisions on employment relationship within ASDP are regulated through the internal policies of the Company, applicable company regulations and/or work agreements, as well as relevant labor provisions. The management of industrial relations is executed with reference to Law No. 13 of 2003 regarding Labor as amended through Law No. 6 of 2023 regarding Job Creation, as well as Law No. 2 of 2004 regarding Industrial Relations Dispute Resolution. Through this framework, the Company ensures that the rights and obligations of both workers and the Company are clearly understood, and communication channels are available to accommodate aspirations, inputs, and potential labor issues.

MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

ASDP menerapkan mekanisme penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara sistematis, berjenjang, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan setiap permasalahan dapat ditangani secara adil, objektif, dan proporsional, tanpa mengganggu kelangsungan operasional Perseroan. Penyelesaian permasalahan diutamakan melalui komunikasi internal dan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap membuka ruang penyelesaian sesuai jalur hukum apabila diperlukan.

Tahapan penyelesaian permasalahan hubungan industrial meliputi:

1. Penyampaian Keluhan atau Permasalahan.
   Pekerja dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, atau permasalahan kepada atasan langsung, fungsi *Human Capital*, atau melalui saluran komunikasi resmi yang tersedia di lingkungan Perseroan. Setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan prinsip kerahasiaan.
2. Klarifikasi dan Pembahasan Internal.
   Perseroan melakukan klarifikasi atas permasalahan yang disampaikan dengan melibatkan pihak terkait. Pada tahap ini, penyelesaian diupayakan melalui dialog terbuka, objektif, dan konstruktif untuk memperoleh solusi yang dapat diterima oleh para pihak.
3. Perundingan Bipartit.
   Apabila permasalahan belum terselesaikan melalui pembahasan internal, penyelesaian dilanjutkan melalui perundingan bipartit antara Perseroan dan pekerja atau perwakilan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mediasi atau Konsiliasi.
   Dalam hal perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dengan melibatkan instansi ketenagakerjaan yang berwenang.
5. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
   Apabila tahapan sebelumnya belum menghasilkan penyelesaian, permasalahan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam seluruh proses tersebut, ASDP menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, perlindungan hak pekerja, objektivitas, kerahasiaan informasi, serta larangan terhadap tindakan pembalasan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dengan itikad baik. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga hubungan kerja yang sehat, memperkuat kepercayaan antara

INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE RESOLUTION MECHANISM

ASDP applies an industrial relations dispute resolution mechanism in a systematic, tiered manner that aligns with applicable provisions. This mechanism is designed to ensure that every issue can be handled in a fair, objective, and proportional manner, without disrupting the operational continuity of the Company. Dispute resolution is prioritized through internal communication and deliberation for consensus, while continuing to open space for resolution through legal channels if required.

The stages for resolving industrial relations dispute encompass:

1. Submission of Grievances or Issues.
   Workers can submit grievances, aspirations, or issues to direct supervisors, the Human Capital function, or through official communication channels available within the Company. Every report is followed up in accordance with procedures and confidentiality principles.
2. Clarification and Internal Discussion.
   The Company conducts clarifications regarding the submitted issues by involving relevant parties. At this stage, resolution is endeavored through open, objective, and constructive dialogue to obtain a solution acceptable to the parties.
3. Bipartite Negotiation.
   In the event that an issue has not been resolved through internal discussions, resolution proceeds through bipartite negotiations between the Company and the worker or worker representatives in accordance with statutory provisions.
4. Mediation or Conciliation.
   In cases where bipartite negotiations do not reach an agreement, the parties can proceed with resolution through mediation or conciliation by involving the competent labor institution.
5. Resolution through the Industrial Relations Court.
   If the previous stages have not yielded a resolution, the dispute can be submitted to the Industrial Relations Court in accordance with applicable mechanisms and legal provisions.

Throughout this entire process, ASDP upholds the principles of openness, protection of worker rights, objectivity, information confidentiality, and the prohibition of retaliatory actions against parties who submit grievances in good faith. This approach is executed to maintain healthy working relationships, strengthen trust between management and

manajemen dan pekerja, serta memastikan keberlanjutan operasional Perseroan. Sepanjang tahun buku 2025, tidak terdapat perselisihan hubungan industrial yang berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan.

workers, and ensure the operational sustainability of the Company. Throughout financial year 2025, there were no industrial relations disputes that had a material impact on the operational activities of the Company.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Peran Teknologi Informasi (TI) di ASDP terus berkembang dari fungsi pendukung operasional menjadi penggerak strategis dalam transformasi bisnis Perseroan. TI tidak lagi hanya berperan sebagai *business enabler*, tetapi telah menjadi *business transformer* yang mendorong efisiensi proses, inovasi layanan, penguatan integrasi sistem, serta peningkatan kualitas pengalaman pengguna jasa. Melalui pemanfaatan teknologi yang terarah, ASDP memperkuat fondasi digital untuk meningkatkan daya saing, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih adaptif serta berkelanjutan.

The role of Information Technology (IT) at ASDP continues to evolve from an operational support function into a strategic driver in the Company's business transformation. IT no longer merely serves as a business enabler but has become a business transformer that drives process efficiency, service innovation, system integration strengthening, and service quality improvement for the user experience. Through the targeted utilization of technology, ASDP strengthens its digital foundation to improve competitiveness, support data-driven decision-making, and establish business growth that is more adaptive and sustainable.

STRATEGI DAN ARAH PENGEMBANGAN IT

Strategi pengembangan Teknologi Informasi ASDP diarahkan untuk memperkuat peran TI sebagai fondasi utama transformasi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, dan penciptaan layanan yang lebih terintegrasi. Pengembangan TI tidak hanya difokuskan pada penyediaan sistem pendukung, tetapi juga pada pembentukan ekosistem digital yang mampu mendukung *revenue assurance, operations excellence, service excellence*, serta pengembangan sumber pendapatan baru. Untuk mencapai hal tersebut, ASDP membangun fondasi digital melalui penguatan tata kelola TI, kesiapan organisasi, integrasi proses bisnis, pengembangan platform data, pemanfaatan *dashboard* dan *business intelligence*, serta penguatan sistem informasi yang terintegrasi di seluruh aktivitas operasional Perseroan.

STRATEGY AND DIRECTION OF IT DEVELOPMENT

The Information Technology development strategy of ASDP is directed toward strengthening the role of IT as the primary foundation for business transformation, operational efficiency improvements, and the creation of services that are more integrated. IT development focuses not only on providing support systems but also on forming a digital ecosystem capable of supporting revenue assurance, operations excellence, service excellence, and the development of new revenue streams. To achieve this, ASDP builds its digital foundation by strengthening IT governance, organizational readiness, business process integration, data platform development, the utilization of dashboards and business intelligence, and strengthening integrated information systems across all operational activities of the Company.

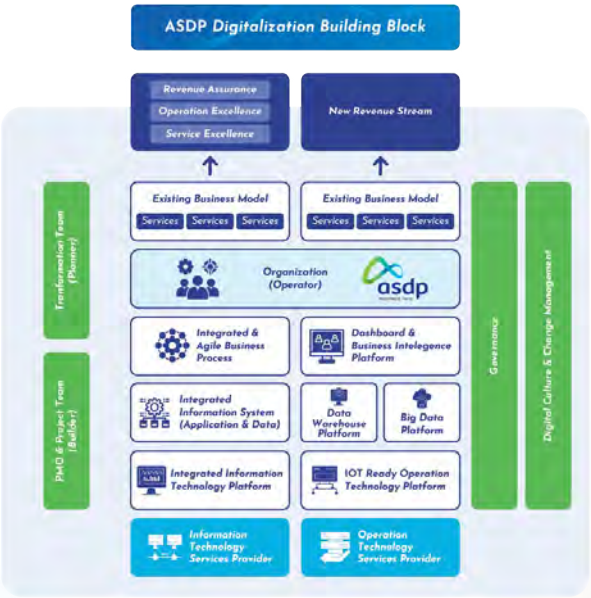

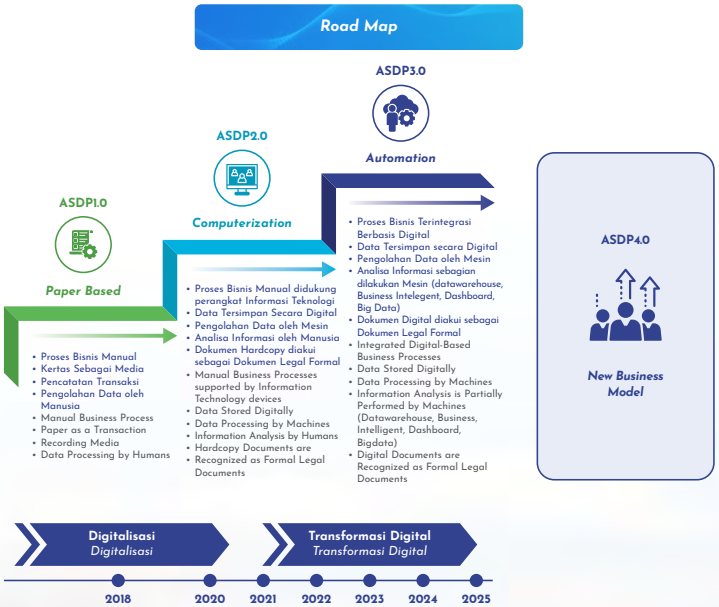

Arah pengembangan TI ASDP juga dilaksanakan melalui tahapan transformasi yang terstruktur. Pada tahap awal, proses bisnis masih bersifat manual dan berbasis dokumen fisik. Selanjutnya, ASDP memasuki fase digitalisasi melalui penggunaan perangkat teknologi informasi dan dukungan sistem digital dalam pengolahan data serta proses operasional. Pengembangan kemudian berlanjut menuju fase otomatisasi, yang ditandai dengan proses bisnis terintegrasi berbasis digital, pengolahan data yang mulai didukung mesin, analisis informasi melalui *dashboard* dan *business intelligence*, serta pengakuan dokumen digital sebagai dokumen formal. Pada tahap yang lebih maju, ASDP menargetkan pengembangan menuju model bisnis baru berbasis digital, di mana teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses, tetapi juga menjadi sumber inovasi layanan, perluasan bisnis, dan peningkatan nilai tambah bagi pengguna jasa.

Untuk memperkuat implementasi strategi tersebut, ASDP menetapkan beberapa pilar pengembangan utama, yaitu:

1. Penguatan proses bisnis yang terintegrasi.
   ASDP mendorong integrasi proses bisnis agar alur kerja operasional, layanan, keuangan, dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan terukur.
2. Pengembangan sistem informasi dan platform data.
   Perseroan memperkuat sistem informasi, *data warehouse*, *big data platform*, serta platform teknologi yang mendukung pengelolaan data secara lebih sistematis dan berbasis kebutuhan bisnis.
3. Pemanfaatan *dashboard* dan *business intelligence*.
   Pengembangan *dashboard* dan *business intelligence* diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, pemantauan kinerja secara lebih cepat, serta peningkatan akurasi analisis bisnis.
4. Penguatan tata kelola dan manajemen perubahan digital.
   ASDP memperkuat tata kelola TI, manajemen perubahan digital, serta kesiapan organisasi agar transformasi teknologi dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi proses bisnis.
5. Pengembangan layanan dan model bisnis digital.
   Pada tahap lanjutan, TI diarahkan untuk mendukung pengembangan layanan baru, peningkatan pengalaman pelanggan, serta penciptaan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar.

The IT development direction of ASDP is also executed through structured transformation stages. In the initial stage, business processes were manual and based on physical documents. Subsequently, ASDP entered the digitalization phase through the utilization of information technology devices and digital system support in data processing and operational processes. Development then continued toward the automation phase, which is characterized by integrated digital-based business processes, data processing starting to be machine-supported, information analysis through dashboards and business intelligence, and the recognition of digital documents as formal documents. At a more advanced stage, ASDP targets development toward a new digital-based business model, where technology not only improves process efficiency but also becomes a source of service innovation, business expansion, and value-added improvements for service users.

To strengthen the implementation of this strategy, ASDP has established several primary development pillars:

1. Strengthening integrated business processes.
   ASDP drives the integration of business processes so that operational workflows, services, finance, and decision-making can run more efficiently, accurately, and measurably.
2. Developing information systems and data platforms.
   The Company strengthens information systems, data warehouses, big data platforms, and technology platforms that support data management in a more systematic manner based on business requirements.
3. Leveraging dashboards and business intelligence.
   The development of dashboards and business intelligence is directed toward supporting data-driven decision-making, faster performance monitoring, and improving the accuracy of business analysis.
4. Strengthening governance and digital change management.
   ASDP strengthens IT governance, digital change management, and organizational readiness so that technological transformation can be applied consistently and provide a real impact on business processes.
5. Developing digital services and business models.
   In advanced stages, IT is directed toward supporting the development of new services, customer experience improvements, and the creation of business models that are more adaptive to market demand changes.

Melalui arah pengembangan tersebut, ASDP berupaya memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara bertahap, terukur, dan selaras dengan strategi Perseroan. Dengan fondasi TI yang semakin kuat, ASDP diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat integrasi layanan, memperkuat kualitas pengambilan keputusan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan.

Through this development direction, ASDP endeavors to ensure that digital transformation proceeds in a gradual, measurable manner that aligns with the Company's strategy. With an increasingly strong IT foundation, ASDP is expected to improve operational efficiency, accelerate service integration, strengthen the quality of decision-making, and create sustainable added value for customers, shareholders, and all stakeholders.

HIGHLIGHT KINERJA IT

Pada tahun 2025, ASDP mencatat sejumlah pencapaian penting dalam pengembangan teknologi informasi yang menjadi fondasi penguatan transformasi digital Perseroan. Pencapaian tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan sistem dan infrastruktur TI, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola, keamanan siber, kualitas layanan internal, efisiensi proses bisnis, serta pengalaman pengguna jasa. Melalui berbagai inisiatif tersebut, TI semakin berperan sebagai *business transformer* yang mendukung peningkatan kinerja operasional, kecepatan layanan, dan daya saing Perseroan secara berkelanjutan.

IT PERFORMANCE HIGHLIGHTS

In 2025, ASDP recorded essential achievements in information technology development that form the foundation for reinforcing the digital transformation of the Company. These achievements focused not only on improving IT systems and infrastructure but were also directed toward strengthening governance, cybersecurity, internal service quality, business process efficiency, and the user experience. Through these various initiatives, IT increasingly operates as a business transformer supporting continuous improvements in operational performance, service speed, and the competitiveness of the Company.

PENINGKATAN IT *MATURITY LEVEL*

ASDP berhasil meningkatkan *IT Maturity Level* dari skor 3,38 menjadi 3,43. Peningkatan ini mencerminkan semakin matangnya tata kelola, proses, dan kapabilitas TI Perseroan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan TI telah berjalan lebih terarah, terdokumentasi, dan terukur, sehingga mampu mendukung peningkatan efektivitas operasional, penguatan integrasi sistem, serta pengambilan keputusan berbasis data.

IMPROVING THE IT MATURITY LEVEL

ASDP successfully improved its IT Maturity Level from a score of 3.38 to 3.43. This improvement reflects the increasing maturity of the governance, processes, and IT capabilities in supporting business requirements. The achievement indicates that IT management has operated in a manner that is more targeted, documented, and measurable, thereby enabling it to support operational effectiveness improvements, system integration strengthening, and data-driven decision-making.

PENINGKATAN KESIAPAN INDI 4.0

Kesiapan ASDP dalam mengadopsi prinsip Industri 4.0 juga menunjukkan perkembangan positif. Skor INDI 4.0 atau *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* meningkat dari level 2 dengan skor 2,14 pada tahun 2022 menjadi level 3 dengan skor 2,84 berdasarkan hasil *review* terbaru. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Perseroan semakin siap dalam menerapkan digitalisasi proses, integrasi sistem, pemanfaatan data, serta penguatan kapabilitas organisasi berbasis teknologi.

IMPROVING INDI 4.0 READINESS

The readiness of ASDP in adopting Industry 4.0 principles also indicated positive development. The INDI 4.0 score or Indonesia Industry 4.0 Readiness Index increased from level 2 with a score of 2.14 in 2022 to level 3 with a score of 2.84 based on the latest review results. This increase indicates that the Company is increasingly prepared to implement process digitalization, system integration, data utilization, and the strengthening of technology-based organizational capabilities.

PEMBENTUKAN IT *SHARED SERVICE CENTER*

ASDP telah membentuk *IT Shared Service Center* sebagai pusat layanan TI yang terintegrasi. Inisiatif ini didukung oleh penerapan *IT Service Management* (ITSM) berbasis platform Ivanti pada modul *Request Fulfillment*. Dengan adanya pusat layanan ini, kebutuhan TI di lingkungan Perseroan dapat dikelola secara lebih terstandardisasi, terdokumentasi, dan responsif, mulai dari permintaan layanan, pemantauan penyelesaian, hingga evaluasi kualitas layanan TI.

ESTABLISHING THE IT SHARED SERVICE CENTER

ASDP established the IT Shared Service Center as an integrated IT service hub. This initiative is supported by the implementation of IT Service Management (ITSM) based on the Ivanti platform within the Request Fulfillment module. With this service center, IT requirements across the Company can be managed in a more standardized, documented, and responsive manner, ranging from service requests and resolution monitoring to the evaluation of IT service quality.

PENGUATAN KEMATANGAN KEAMANAN SIBER

ASDP melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dengan menggunakan instrumen Penilaian Kematangan Keamanan Siber (IKKS). Berdasarkan hasil penilaian, Perseroan memperoleh skor 4,43 atau berada pada Level 3. Capaian ini menunjukkan bahwa keamanan siber telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan TI Perseroan, terutama dalam menjaga keandalan sistem, perlindungan data, dan ketahanan layanan digital dari potensi risiko siber.

STRENGTHENING CYBERSECURITY MATURITY

ASDP conducted measurements of its cybersecurity maturity level by utilizing the Cybersecurity Maturity Assessment (IKKS). Based on the assessment results, the Company obtained a score of 4.43, placing it at Level 3. This achievement indicates that cybersecurity has become an essential part of the IT management of the Company, particularly in maintaining system reliability, data protection, and the resilience of digital services against potential cyber risks.

IMPLEMENTASI *SELF - SERVICE TICKETING*

ASDP juga mengimplementasikan layanan *self-service check-in* sebagai bagian dari digitalisasi layanan penyeberangan. Melalui layanan ini, pengguna jasa dapat melakukan pencetakan *boarding pass* secara mandiri melalui mesin kios dengan memindai kode batang *e-ticket*. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan proses layanan, memberikan kemudahan bagi pengguna jasa, serta mengurangi antrean di area pelabuhan.

Secara keseluruhan, pencapaian pengembangan TI tahun 2025 menunjukkan bahwa ASDP terus memperkuat fondasi digital secara bertahap dan terukur. Peningkatan kematangan TI, kesiapan Industri 4.0, penguatan layanan TI terintegrasi, keamanan siber, serta digitalisasi layanan pelanggan menjadi bagian dari langkah strategis Perseroan dalam membangun operasional yang lebih efisien, aman, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa.

IMPLEMENTING SELF - SERVICE TICKETING

ASDP also implemented self-service check-in as part of ferry transportation service digitalization. Through this service, service users can execute boarding pass printing independently via kiosk machines by scanning e-ticket barcodes. This initiative is designed to improve service process speeds, provide convenience for service users, and reduce queues within the port area.

Overall, the IT development achievements in 2025 indicate that ASDP continues to strengthen its digital foundation in a gradual and measurable manner. Improvements in IT maturity, Industry 4.0 readiness, the strengthening of integrated IT services, cybersecurity, and the digitalization of customer services form part of the strategic steps of the Company in building operations that are more efficient, secure, responsive, and oriented toward the requirements of service users.

5 TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi penting dalam memastikan seluruh kegiatan usaha ASDP berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) serves as a vital foundation to ensure that all business activities of ASDP are conducted in a transparent, accountable, responsible, independent, and fair manner.

asdp

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE COMMITMENT AND POLICY

ASDP menempatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha, pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, serta penciptaan nilai berkelanjutan bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam setiap proses bisnis, baik pada tingkat organ perusahaan, manajemen, maupun seluruh unit kerja.

Kebijakan tata kelola ASDP disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman tata kelola BUMN, serta praktik terbaik tata kelola korporasi. Dalam pelaksanaannya, Perseroan terus memperkuat struktur dan mekanisme GCG melalui kejelasan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi, penguatan komite-komite pendukung, penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, kepatuhan, sistem pelaporan pelanggaran, serta internalisasi etika bisnis dan budaya AKHLAK.

Pada tahun 2025, ASDP terus mendorong peningkatan kualitas penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan internal, penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta evaluasi berkala atas efektivitas penerapan tata kelola. Dengan komitmen tersebut, ASDP berupaya memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dijalankan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel untuk mendukung keberlanjutan kinerja Perseroan.

ASDP establishes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as the foundation for executing business activities, making decisions, managing risks, and creating sustainable value for Shareholders and all stakeholders. This commitment is realized through the application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness across every business process, spanning throughout corporate organs, management, and all operating units.

The governance policies of ASDP are formulated in line to the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, SOEs governance guidelines, and corporate governance best practices. In its execution, the Company continues to strengthen its GCG structure and mechanisms by clarifying the role of the Boards of Commissioners and Directors, reinforcing supporting committees, implementing risk management, internal control, compliance, whistleblowing systems, and embedding business ethics and the AKHLAK culture.

In 2025, ASDP continued to drive the improvement of GCG implementation quality in a consistent and sustainable manner. These efforts were carried out through refining internal policies, strengthening oversight, increasing compliance with regulations, and conducting periodic evaluations on the effectiveness of governance implementation. Through this commitment, ASDP strives to ensure that every business activity is managed professionally, with integrity, and accountably to support the Company's sustainable performance.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION BASIS

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di ASDP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan Pemegang Saham, serta kebijakan internal Perseroan. Dasar kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi organ perusahaan dan seluruh insan ASDP dalam menjalankan pengurusan, pengawasan, pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, kepatuhan, serta pengendalian internal secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Dasar kebijakan penerapan GCG Perseroan antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia yang terkait dengan Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pengelolaan Perseroan sebagai badan hukum dan BUMN.
2. Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai dasar pengaturan kewenangan, hak, dan kewajiban organ perusahaan, termasuk Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan Perseroan.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penugasan khusus serta program TJSL BUMN secara terarah dan akuntabel.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi rujukan utama dalam penguatan tata kelola, manajemen risiko, perencanaan strategis, pengendalian internal, teknologi informasi, pelaporan, serta pelaksanaan kegiatan korporasi signifikan BUMN.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi pedoman dalam pengaturan organ BUMN, fungsi pengurusan dan pengawasan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BUMN.

The execution of Good Corporate Governance (GCG) at ASDP refers to regulatory provisions, the Articles of Association, Shareholder resolutions, and the internal policies of the Company. This policy framework serves as a guideline for corporate bodies and all personnel of ASDP in conducting management, oversight, decision-making, risk management, compliance, and internal control in a transparent, accountable, responsible, independent, and fair manner. The policy framework for the implementation of GCG within the Company includes:

1. Laws of the Republic of Indonesia relating to Limited Liability Companies and State-Owned Enterprises, including Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by applicable laws and regulations, and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as most recently amended by Law No. 16 of 2025. These provisions are referenced as the legal basis for managing the Company as a legal entity and an SOE.
2. The Company's Articles of Association and the General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions are the basis for regulating the authority, rights, and duties of corporate bodies, including Shareholders, the Boards of Commissioners and Directors in executing the Company's management and oversight role.
3. Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, which serves as a reference for executing specific assignments and SOE CSER programs in a targeted and accountable manner.
4. Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which serves as the primary reference for strengthening governance, risk management, strategic planning, internal control, information technology, reporting, and the execution of significant corporate activities of SOEs.
5. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, which serves as a guideline for regulating SOE organs, management and oversight functions, and human resource management within the SOE environment.

6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG *Code* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai pedoman internal dalam penerapan prinsip, struktur, proses, dan mekanisme tata kelola di lingkungan Perseroan.
7. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). PUG-KI 2021 menjadi rujukan praktik governansi korporat di Indonesia dan memuat delapan prinsip utama, antara lain terkait peran Direksi dan Dewan Komisaris, perilaku etis, manajemen risiko, pengendalian internal, kepatuhan, pengungkapan, transparansi, hak pemegang saham, dan hak pemangku kepentingan.
8. Kebijakan internal Perseroan yang terdiri dari kebijakan, prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional, antara lain Pedoman Perilaku Etika, Pedoman Whistleblowing System, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Board Manual, Piagam Komite Audit, Internal Audit Charter, Pedoman Sistem Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, serta kebijakan lain yang relevan dengan penerapan tata kelola perusahaan

Dengan landasan tersebut, ASDP memastikan bahwa penerapan GCG tidak hanya bersifat pemenuhan kepatuhan, tetapi juga menjadi sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung integritas, pengendalian risiko, kualitas pengambilan keputusan, dan penciptaan nilai berkelanjutan bagi Pemegang Saham serta seluruh pemangku kepentingan.

6. Good Corporate Governance Guidelines or the GCG Code of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) as the internal guideline for implementing governance principles, structures, processes, and mechanisms within the Company.
7. The 2021 Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG). PUG-KI 2021 serves as a reference for corporate governance practices in Indonesia and contains eight core principles, including the roles of the Boards of Directors and Commissioners, ethical behavior, risk management, internal control, compliance, disclosure, transparency, shareholder rights, and stakeholder rights.
8. The Company's internal policies, comprising policies, procedures, guidelines, and technical instructions for operational implementation, include, among others, the Code of Conduct, Whistleblowing System Guidelines, Gratification Control Guidelines, Board Manual, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, Internal Control System Guidelines, Anti-Bribery Management System, Conflict of Interest Management Guidelines, and other policies relevant to the implementation of corporate governance.

With this foundation, ASDP ensures that GCG implementation is not merely a matter of regulatory compliance, but also serves as a corporate management system that supports integrity, risk control, decision-making quality, and sustainable value creation for Shareholders and all stakeholders.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN
IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan ASDP mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi Perseroan dalam menjalankan pengurusan, pengawasan, pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, serta pelaksanaan kegiatan usaha secara profesional, berintegritas, dan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip GCG yang diterapkan ASDP terdiri atas:

The implementation of Good Corporate Governance within ASDP refers to the GCG principles regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. These principles form the basis for the Company in executing management, oversight, decision-making, risk management, and business activities professionally, with integrity, and sustainably. The GCG principles applied by ASDP consist of:

ASDP menerapkan prinsip transparansi melalui penyediaan informasi yang material, relevan, akurat, dan tepat waktu kepada Pemegang Saham serta pemangku kepentingan.
ASDP applies the principle of transparency by providing material, relevant, accurate, and timely information to Shareholders and stakeholders.

ASDP menerapkan prinsip akuntabilitas dengan memastikan adanya kejelasan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing organ perusahaan serta unit kerja.
ASDP applies the principle of accountability by ensuring clarity of functions, tasks, responsibilities, and authorities of each corporate organ and operating unit.

ASDP menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, kebijakan internal, serta prinsip kehati-hatian.
ASDP conducts business activities by ensuring compliance with laws and regulations, the Articles of Association, internal policies, and the prudence principle.

ASDP menerapkan prinsip independensi dengan memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak mana pun yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
ASDP applies the principle of independence by ensuring that the management of the Company is conducted professionally, free from conflicts of interest, and unaffected by pressure from any party that contradicts the interests of the Company.

ASDP menerapkan prinsip kewajaran dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada Pemegang Saham serta seluruh pemangku kepentingan sesuai hak dan kewajibannya.
ASDP applies the principle of fairness by providing fair and equal treatment to Shareholders and all stakeholders in accordance with their rights and obligations.

Selain mengacu pada prinsip GCG sesuai ketentuan BP BUMN, penerapan tata kelola di lingkungan ASDP juga diselaraskan dengan 4 (empat) pilar governansi dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), yaitu:

Perilaku Beretika

ASDP senantiasa mengedepankan kejujuran, integritas, dan sikap saling menghormati dalam menjalankan kegiatan usaha. Pilar ini diterapkan melalui komitmen untuk memenuhi janji, menjaga nilai moral, memperkuat kepercayaan, serta memastikan seluruh insan Perseroan bertindak sesuai etika bisnis, Pedoman Perilaku, dan nilai AKHLAK.

In addition to referring to the GCG principles in accordance with the provisions of the SOE Supervisory Agency, the implementation of governance within ASDP is also aligned with the 4 (four) governance pillars under the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI), namely:

Ethical Behavior

ASDP consistently prioritizes honesty, integrity, and mutual respect in conducting business activities. This pillar is implemented through a commitment to fulfill promises, maintain moral values, strengthen trust, and ensure all corporate personnel act in accordance with business ethics, the Code of Conduct, and AKHLAK values.

Akuntabilitas

ASDP menerapkan akuntabilitas melalui kejelasan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan setiap organ perusahaan serta unit kerja. Setiap pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja dipertanggungjawabkan secara terukur, wajar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses pengelolaan Perseroan dapat diawasi dan dievaluasi secara efektif.

Transparansi

ASDP berkomitmen menyediakan informasi yang material, relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Informasi disampaikan melalui saluran komunikasi yang mudah diakses dan dipahami, dengan tetap memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi, kerahasiaan perusahaan, serta kepentingan Perseroan.

Keberlanjutan

ASDP menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pilar ini diwujudkan melalui pengelolaan bisnis yang selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Accountability

ASDP implements accountability through clear functions, responsibilities, and authorities for each corporate organ and operating unit. Every execution of duties and performance achievement is accounted for in a measurable, fair manner, and in accordance with applicable provisions, so that the management process of the Company can be monitored and evaluated effectively.

Transparency

ASDP is committed to providing material, relevant, accurate, and timely information to stakeholders. Information is delivered through communication channels that are easily accessed and understood, while being heedful of provisions of information disclosure, corporate confidentiality, and the interests of the Company.

Sustainability

ASDP conducts business activities by ensuring compliance with laws and regulations, social and environmental responsibility, and contributions toward sustainable development. This pillar is realized through business management aligned with stakeholder needs, service quality improvement, social and environmental impact management, and support for the national sustainable development agenda.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA
APPLICATION OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES FOR PUBLIC COMPANIES

Per 31 Desember 2025, ASDP bukan merupakan perusahaan terbuka dan tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan dan mengungkapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagaimana berlaku bagi emiten atau perusahaan publik. Namun demikian, ASDP tetap menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai ketentuan BUMN, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, Pedoman GCG Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As of 31 December 2025, ASDP is not a publicly listed company and does not list its shares on the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the Company does not have an obligation to implement and disclose the Corporate Governance Guidelines for Publicly Listed Companies that apply to issuers or public entities. Nevertheless, ASDP continues to apply good corporate governance principles in accordance with SOEs regulations, the Articles of Association, GMS resolutions, the GCG Guidelines of the Company, and applicable laws and regulations.

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

ASDP berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh lini organisasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan struktur dan mekanisme tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, sistem pelaporan pelanggaran, pengendalian gratifikasi, serta internalisasi etika bisnis dan budaya AKHLAK dalam setiap aktivitas Perseroan.

Penerapan GCG tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban kepatuhan, tetapi juga sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, menjaga integritas operasional, memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang. Oleh karena itu, ASDP secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tata kelola agar tetap relevan dengan dinamika bisnis, perkembangan regulasi, dan kebutuhan keberlanjutan Perseroan.

COMMITMENT TO THE SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

ASDP is committed to implementing Good Corporate Governance consistently and sustainably across all levels of the organization. This commitment is realized through strengthening governance structures and mechanisms, compliance with laws and regulations, the implementation of risk management, internal controls, whistleblowing systems, gratification controls, and the internalization of business ethics and the AKHLAK culture in every corporate activity.

The implementation of GCG is viewed not merely as fulfilling compliance obligations, but as a foundation for improving decision-making quality, maintaining operational integrity, strengthening the trust of Shareholders and stakeholders, and supporting long-term value creation. Therefore, ASDP periodically evaluates and refines its governance policies to ensure they remain relevant to business dynamics, regulatory developments, and the sustainability needs of the Company.

PENILAIAN GCG

Berdasarkan hasil penilaian terhadap praktik *Corporate Governance* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Perseroan memperoleh capaian nilai yang mencerminkan komitmen ASDP dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta wajar. Penilaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi Perseroan untuk mengevaluasi kualitas penerapan tata kelola, mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, serta memastikan praktik governansi ASDP selaras dengan standar tata kelola regional dan *best practices* yang berlaku.

GCG ASSESSMENT

Based on the assessment results of the Corporate Governance practices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) with reference to the principles regulated in the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), the Company obtained a score that reflects the commitment of ASDP to implementing transparent, accountable, responsible, independent, and fair corporate governance. The assessment serves as a basis for the Company to evaluate the quality of governance implementation, identify areas that require reinforcement, and ensure that the governance practices of ASDP align with regional governance standards and applicable best practices.

Rincian penilaian GCG dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Details of the GCG assessment is presented in the table below:

Rincian Penilaian GCG
Details of GCG Assessment

No	Komponen Penilaian (Prinsip) *Assessment Components (Principles)*	Skor Akhir *Final Score*
Level 1		
A	*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*	14,44
B	*Sustainability and Resilience*	11,59
C	*Disclosure and Transparency*	19,17
D	*Responsibilities of the Board*	34,10
Total Skor Level 1 | Total Level 1 Score		**79,30**
Level 2		
	Bonus	18,00
	Penalti | Penalty	(6,00)
Total Skor Level 2 | Total Level 2 Score		**12,00**
Total Skor Akhir | Final Total Score		**91,30**

Berdasarkan hasil penilaian praktik *Corporate Governance* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan menggunakan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Perseroan memperoleh total skor akhir sebesar 91,30 poin. Capaian tersebut terdiri dari total skor Level 1 sebesar 79,30 poin dan total skor Level 2 sebesar 12,00 poin, yang berasal dari perolehan bonus sebesar 18,00 poin setelah dikurangi penalti sebesar 6,00 poin. Pada Level 1, komponen *Responsibilities of the Board* mencatat skor tertinggi sebesar 34,10 poin, diikuti *Disclosure and Transparency* sebesar 19,17 poin, *Rights and Equitable Treatment of* Shareholders sebesar 14,44 poin, serta *Sustainability and Resilience* sebesar 11,59 poin.

Total skor akhir sebesar 91,30 poin menempatkan praktik tata kelola ASDP dalam predikat *Very Good* atau Level 4. Capaian ini menunjukkan bahwa ASDP telah memiliki komitmen yang kuat dalam mengadopsi standar tata kelola regional, khususnya dalam aspek tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, keterbukaan informasi, perlakuan yang setara kepada pemegang saham, serta integrasi aspek keberlanjutan dan ketahanan perusahaan. Meskipun demikian, hasil penilaian juga menjadi dasar bagi ASDP untuk terus memperkuat area yang masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait peningkatan kualitas transparansi, efektivitas pengawasan, dan penguatan kebijakan tata kelola yang selaras dengan *best practices* internasional.

Based on the assessment results of the Corporate Governance practices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters, the Company achieved a total final score of 91.30 points. This achievement consists of a total Level 1 score of 79.30 points and a total Level 2 score of 12.00 points, derived from a bonus score of 18.00 points after deducted by a penalty of 6.00 points. At Level 1, the Responsibilities of the Board component recorded the highest score of 34.10 points, followed by Disclosure and Transparency at 19.17 points, Rights and Equitable Treatment of Shareholders at 14.44 points, and Sustainability and Resilience at 11.59 points.

The total final score of 91.30 points placed ASDP's governance practices the "Very Good" category or Level 4. This achievement shows that ASDP is strongly committed to adopting regional governance standards, particularly in the aspects of the responsibilities of the Board of Commissioners and the Directors, information disclosure, equitable treatment of shareholders, and the integration of corporate sustainability and resilience. Nonetheless, the assessment results also provide a basis for ASDP to continue strengthening areas that still require refinement, particularly regarding improvements in transparency quality, oversight effectiveness, and the reinforcement of governance policies aligned with international best practices.

PENGUATAN KESIAPAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN YANG TERINTEGRASI

ASDP berkomitmen untuk memperkuat kesiapan pelaporan keberlanjutan secara terintegrasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan. Penguatan ini dilakukan dengan menyelaraskan pengungkapan kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola ke dalam proses pelaporan korporasi yang lebih terstruktur, berbasis data, serta relevan bagi kebutuhan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan terus mendorong penguatan sistem pengumpulan data, koordinasi lintas fungsi, validasi informasi, serta penyelarasan indikator keberlanjutan dengan ketentuan regulasi dan standar pelaporan yang berlaku. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disampaikan tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga dapat ditelusuri, diukur, dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan ASDP dapat semakin mencerminkan keterkaitan antara strategi bisnis, kinerja operasional, pengelolaan risiko, kontribusi sosial dan lingkungan, serta penciptaan nilai jangka panjang secara berkelanjutan.

STRENGTHENING READINESS FOR INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORTING

ASDP is committed to strengthening its readiness for integrated sustainability reporting as part of improving the quality of transparency, accountability, and corporate governance. This reinforcement is executed by aligning the disclosure of economic, social, environmental, and governance performance into a more structured, data-driven corporate reporting process that is relevant to the expectations of Shareholders and stakeholders.

In its execution, the Company continues to drive the reinforcement of data collection systems, cross-functional coordination, information validation, and the alignment of sustainability indicators with applicable regulatory provisions and reporting standards. This effort is essential to ensure that the sustainability information provided is not merely narrative, but is also traceable, measurable, and accountable. Consequently, the sustainability reporting of ASDP will increasingly reflect the interconnection between business strategy, operational performance, risk management, social and environmental contributions, and sustainable long-term value creation.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

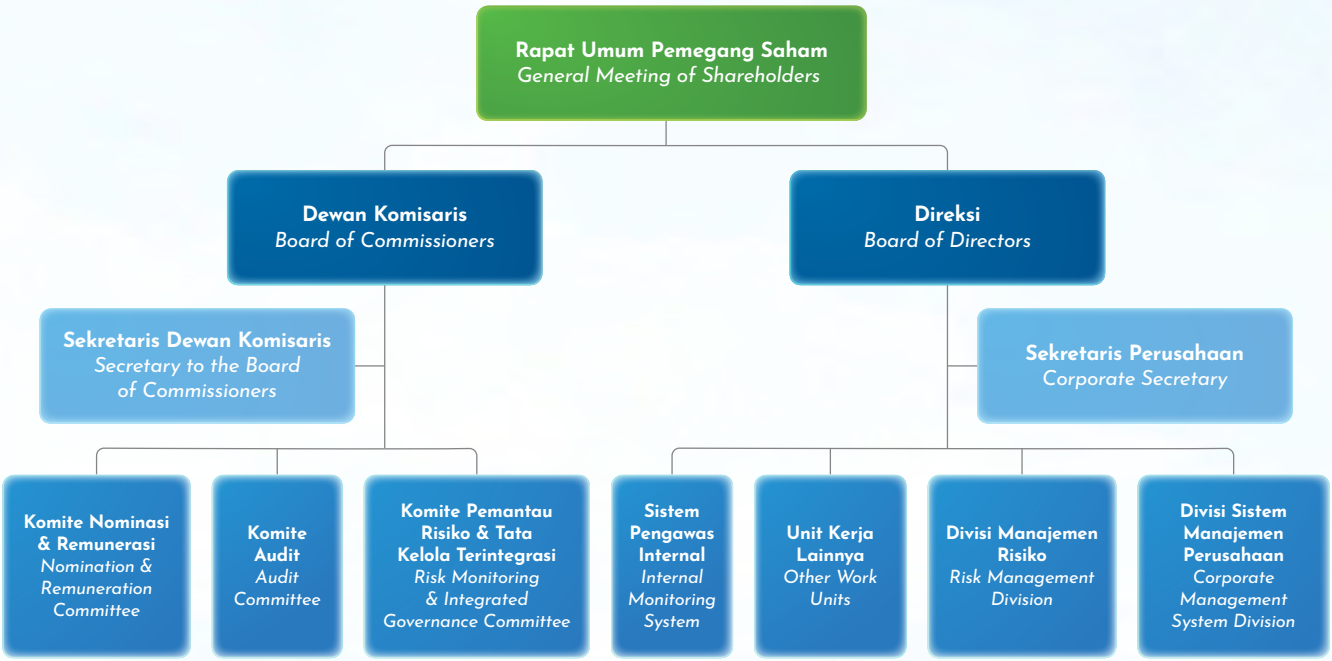

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan dengan kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS berwenang mengambil keputusan strategis, antara lain persetujuan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The GMS is the corporate organ holding the highest authority, which is not granted to the Boards of Directors or Commissioners. The GMS has the authority to make strategic decisions, including the approval of the annual report, determination of the allocation of net income, and the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dilakukan secara independen untuk memastikan pengelolaan Perseroan berjalan sesuai Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan prinsip GCG. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi menetapkan strategi, kebijakan operasional, pengelolaan sumber daya, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Sistem Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Sistem Manajemen Perusahaan, dan unit kerja lainnya.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham memiliki hak dan kewenangan utama dalam menentukan arah strategis Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kewenangan tersebut mencakup persetujuan atas laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, perubahan Anggaran Dasar, serta keputusan terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Melalui RUPS, Pemegang Saham juga berhak memperoleh pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan Perseroan, serta mengambil keputusan atas aksi korporasi penting seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners supervises policies and the management of the Company, as well as advises the Board of Directors. The oversight role is conducted independently to ensure the management runs in line with the Articles of Association, GMS resolutions, and GCG principles. The Board of Commissioners is supported by the Secretary to the Board of Commissioners, the Nomination & Remuneration Committee, the Audit Committee, and the Risk Monitoring & Integrated Governance Committee.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is fully responsible for the Company management for its established interests and objectives. The Board establishes strategies, operational policies, resource management, and represents the Company both inside and outside the court in accordance with applicable provisions. The Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, the Risk Management Division, the Corporate Management System Division, and other work units.

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

SHAREHOLDER RIGHTS

Shareholders has the highest rights and authority to determine the strategic direction of the Company through the General Meeting of Shareholders (GMS). This authority includes the approval of the annual report, determination of the net income allocation, amendments to the Articles of Association, and decisions on the appointment and dismissal of Board members.

Through the GMS, Shareholders also have the right to receive accountability for the execution of corporate management and oversight duties, and to make decisions on significant corporate actions such as mergers, consolidations, acquisitions, or the dissolution of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Sebagai organ tertinggi Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi forum utama bagi Pemegang Saham dalam menetapkan keputusan strategis, menilai pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui RUPS, Pemegang Saham menjalankan hak dan kewenangannya secara efektif untuk memperkuat akuntabilitas, menjaga keseimbangan kepentingan antarorgan Perseroan, dan mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi Perseroan.

As the highest organ of the Company, the General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the primary forum for Shareholders to establish strategic decisions, assess the accountability of corporate management, and ensure the implementation of good corporate governance. Through the GMS, Shareholders execute their rights and authority effectively to strengthen accountability, maintain a balance of interests among corporate organs, and drive sustainable value creation for the Company.

KEPUTUSAN PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS

Beberapa keputusan strategis Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, laporan keuangan, serta laporan penilaian kinerja Perseroan.
2. Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan atas keputusan strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, maupun arah pengembangan Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Persetujuan atas tindakan korporasi dan aktivitas Perseroan, termasuk yang berkaitan dengan entitas anak, sepanjang tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, finansial, dan/atau strategis bagi Perseroan.

CORPORATE DECISIONS REQUIRING GMS APPROVAL

The Company's decisions requiring the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) include the following:

1. Approval of the Annual Report, financial statements, and the performance evaluation report of the Company.
2. Appointment and/or dismissal of members of the Board of Commissioners and Directors.
3. Approval of strategic decisions that have a significant impact on business activities, financial condition, or the development direction of the Company, in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.
4. Approval of corporate actions and activities of the Company, including those relating to subsidiaries, provided that such actions entail legal, financial, and/or strategic consequences for the Company.

HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham memiliki hak yang dilindungi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Perseroan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi. Namun demikian, Pemegang Saham tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk memperoleh informasi yang memadai, memberikan suara, serta menerima hak ekonomi sesuai kepemilikan saham. Hak Pemegang Saham antara lain meliputi:

SHAREHOLDERS' RIGHTS

Shareholders possess protected rights in accordance with the Articles of Association of the Company and applicable provisions of laws and regulations. Shareholders do not intervene in the operational activities of the Company, which fall under the authority and responsibility of the Board of Directors. However, Shareholders retain the authority to execute strategic decision-making functions through the General Meeting of Shareholders (GMS), including obtaining adequate information, voting, and receiving economic rights corresponding to their share ownership. Shareholder rights include:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan teratur.
3. Menerima pembagian keuntungan Perseroan dalam bentuk dividen dan/atau bentuk pembagian keuntungan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memperoleh penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat terkait penyelenggaraan RUPS.

TATA TERTIB RUPS

Untuk memastikan RUPS berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan menetapkan tata tertib pelaksanaan RUPS, baik yang diselenggarakan secara fisik maupun melalui media elektronik. Tata tertib tersebut menjadi pedoman bagi seluruh peserta rapat dalam mengikuti jalannya RUPS dan memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel. Ketentuan tata tertib RUPS antara lain sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Peserta rapat terdiri dari:
   a. Pemegang Saham;
   b. Direksi Perseroan;
   c. Dewan Komisaris Perseroan;
   d. Pejabat Kementerian Keuangan;
   e. pihak lain yang diundang sesuai kebutuhan rapat.
3. Rapat dipimpin oleh Kuasa Pemegang Saham Mayoritas.
4. Agenda RUPS dilaksanakan sesuai dengan undangan rapat, termasuk paparan Direksi, laporan Dewan Komisaris, serta sesi tanya jawab antara Pemegang Saham dan Direksi Perseroan.
5. Hanya Pemegang Saham yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS.
6. Pihak undangan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran atas permintaan Pimpinan Rapat, namun masukan tersebut bersifat sebagai bahan pertimbangan Pemegang Saham dan tidak menjadi bagian dari keputusan rapat.

1. Attending and voting in the GMS according to the number of shares held.
2. Obtaining material information regarding the Company in a timely, measurable, and regular manner.
3. Receiving corporate profit distributions in the form of dividends and/or other forms of profit distribution in accordance with applicable regulations.
4. Obtaining full explanations and accurate information regarding the convening of the GMS.

RULES OF CONDUCT FOR THE GMS

To ensure that the GMS proceeds in an orderly, effective manner, and in compliance with applicable provisions, the Company establishes rules of conduct for the execution of the GMS, whether conducted physically or through electronic media. These rules of conduct serve as a guideline for all meeting participants in attending the GMS and ensure that the decision-making process is conducted validly, transparently, and accountably. The provisions and rules of the GMS include:

1. The meeting is conducted in the Indonesian.
2. Meeting participants consist of:
   a. Shareholders;
   b. The Board of Directors of the Company;
   c. The Board of Commissioners of the Company;
   d. Officials from the Ministry of Finance;
   e. Other invited parties according to meeting requirements.
3. The meeting is chaired by the Proxy of the Majority Shareholder.
4. The GMS agenda follows the meeting notice, including presentations by the Board of Directors, reports from the Board of Commissioners, and a Q&A session between Shareholders and the Board of Directors.
5. Only Shareholders possess the right to express opinions and vote in the GMS.
6. Invited parties may provide input or share perspectives upon the request of the Meeting Chairman; however, such input serves only as reference material for the Shareholders and does not form part of the meeting resolutions.

JENIS PENYELENGGARAAN RUPS

Penyelenggaraan RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan uraian sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

Merupakan RUPS yang diselenggarakan secara berkala. Dalam RUPS tersebut, pemegang saham memberikan persetujuan terhadap laporan atas realisasi rencana Perseroan tahun sebelumnya serta pengesahan rencana untuk tahun mendatang.

Atas hal tersebut, RUPS Tahunan dapat dibedakan menjadi:

1. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan;
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

RUPS LUAR BIASA (RUPSLB)

Merupakan RUPS yang diselenggarakan sewaktu-waktu ketika dinilai terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan pembahasan dan pengambilan keputusan yang mendesak dan signifikan. Pelaksanaan RUPSLB diusulkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Selain RUPSLB yang diselenggarakan dengan kehadiran fisik organ Perseroan, RUPSLB dapat diselenggarakan secara sirkuler. Keputusan RUPS yang diambil secara sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS

RUPS Perseroan terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan internal yang relevan. RUPS Tahunan diselenggarakan untuk memperoleh persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Tahunan Perseroan. RUPS terkait persetujuan RKAP dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan, sedangkan RUPS terkait persetujuan Laporan Tahunan diselenggarakan paling lambat pada bulan Juni atau 6 bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

TYPES OF GMS

The convening of the GMS of the Company consists of the Annual GMS and the Extraordinary GMS, detailed as follows:

ANNUAL GMS

This is the convening of regularly scheduled GMS. In this meeting, the shareholders grant approval to reports on the execution of the Company's plan from the previous year and ratify plans for the upcoming year.

Consequently, the Annual GMS can be categorized into:

1. Annual GMS to approve the Annual Report and ratify the Annual Financial Statements;
2. Annual GMS to ratify the Company Work Plan and Budget (WPB).

EXTRAORDINARY GMS (EGMS)

This is a GMS convened at any time when certain matters arise that require immediate and significant discussion and decision-making. The execution of an EGMS is proposed by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholders. In addition to an EGMS conducted with the physical presence of corporate organs, an EGMS may be conducted via circular resolutions. GMS resolutions adopted by employing circulars method carry equal legal force.

PROVISIONS FOR HOLDING THE GMS

The GMS of the Company consists of the Annual GMS and the Extraordinary GMS. The convening of the GMS refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by applicable laws and regulations, the Articles of Association of the Company, and relevant internal provisions. The Annual GMS is convened to obtain approval for the Company Work Plan and Budget (WPB) and the Annual Report of the Company. The GMS relating to WPB approval is executed no later than 30 days after the commencement of the current fiscal year, while the GMS relating to the approval of the Annual Report is convened no later than June or 6 months after the closing of the relevant Financial Year.

Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, tata cara rapat, serta pemberitahuan bahwa bahan rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS didokumentasikan dalam risalah rapat yang sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, agenda, peserta, dinamika pembahasan, serta keputusan RUPS. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit 1 Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

The notice for the GMS is issued via registered mail, specifying the date, time, venue, procedures, and a notification that meeting materials are available at the office of the Company from the date of the notice until the date of the GMS execution. The notice is issued no later than 14 days before the date of the GMS. Each GMS execution is documented in the minutes of the meeting, which contain at a minimum the time of execution, agenda, participants, discussion dynamics, and GMS resolutions. The minutes of the GMS must be signed by the Chairman of the GMS and at least 1 Shareholder designated from and by the GMS participants, unless the minutes of the GMS are drawn up in the form of a Notarial Deed.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 DAN REALISASINYA

THE CONVENING AND IMPLEMENTATION OF THE ANNUAL GMS FOR 2024 FINANCIAL YEAR

RUPS RKAP TAHUN BUKU 2024

GMS ON WPB FOR FINANCIAL YEAR 2024

Pemanggilan *Notice of Meeting*	Surat No. UM.005/0498/I/ASDP-2025 tanggal 3 Januari 2025 Letter No. UM.005/0498/I/ASDP-2025 dated 3 January 2025
Tanggal *Date*	30 Januari 2025 30 January 2025
Waktu *Time*	15.30 – 16.30 WIB
Lokasi *Location*	St. Regis Hotel, Caroline Astor Ballroom 1&2, B1 Level.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Attendance Summary of the Annual GMS for the 2024 Financial Year

No	Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Kehadiran *Attendance*
1.	Endra Gunawan, selaku kuasa dari | acting as proxy on behalf of Erick Thohir	Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia Representative of the Government of the Republic of Indonesia	Hadir Present
2.	Rizqi Kurnianto, selaku kuasa dari | acting as proxy on behalf of Dony Oskaria	Perwakilan PT Danantara Asset Management Representative of PT Danantara Asset Management	Hadir Present
3.	Heru Widodo	Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) President Director of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
4.	Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Deputy President Director of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
5.	Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Director of Finance, Information Technology and Risk Management of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
6.	Kusnadi Chanda Wijaya, selaku kuasa dari | acting as proxy on behalf of Wahyu Wibowo	Direktur Teknik dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Director of Engineering and Facilities of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
7.	Rio Theodore	Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Director of Operations and Transformation of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Attendance Summary of the Annual GMS for the 2024 Financial Year

No	Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Kehadiran *Attendance*
8.	Achmad Baidowi	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) President Commissioner and Independent Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
9.	Joddy Hernady	Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
10.	Susi Meyrista Tarigan	Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
11.	Elba Damhuri	Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
12.	Taufik Rachman	Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
13.	Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Independent Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present

Keputusan dan Realisasi RUPS RKAP Tahun Buku 2024
Resolutions and Realization of the GMS on WPB for Financial Year 2024

Agenda Pertama | *First Agenda*

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).	Ratification of the Company Work Plan and Budget (WPB) for Year 2025 including the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for Year 2025.
Keputusan | Resolution	
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. **Laba (Rugi) Konsolidasian** • Pendapatan sebesar Rp5.740.794.200.381,00 (lima triliun tujuh ratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah); • Laba Usaha sebesar Rp773.014.096.223,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar empat belas juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah); • EBITDA sebesar Rp1.380.664.156.685,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); • Laba Bersih sebesar Rp711.021.943.575,00 (tujuh ratus sebelas miliar dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah); 2. **Posisi Keuangan Konsolidasian** • Total Aset sebesar Rp13.187.670.241.197,00 (tiga belas triliun seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah); • Ekuitas sebesar Rp10.002.283.476.139,00 (sepuluh triliun dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah); • *Interest Bearing Debt* Rp2.153.121.373.036,00 (dua triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah); 3. ***Net Operating Cash Flow*** Sebesar Rp1.274.207.988.004,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat rupiah); 4. ***Capital Expenditure*** Sebesar Rp2.071.765.204.215,00 (dua triliun tujuh puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus empat ribu dua ratus lima belas rupiah).	Ratified the Company Work Plan and Budget (WPB) for Year 2025 including the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for Year 2025 with the following key items: 1. **Consolidated Profit (Loss)** • Revenues of Rp5,740,794,200,381.00 (five trillion seven hundred forty billion seven hundred ninety-four million two hundred thousand three hundred eighty-one Rupiah); • Operating Profit of Rp773,014,096,223.00 (seven hundred seventy-three billion fourteen million ninety-six thousand two hundred twenty-three Rupiah); • EBITDA of Rp1,380,664,156,685.00 (one trillion three hundred eighty billion six hundred sixty-four million one hundred fifty-six thousand six hundred eighty-five Rupiah); • Net Profit of Rp711,021,943,575.00 (seven hundred eleven billion twenty-one million nine hundred forty-three thousand five hundred seventy-five Rupiah); 2. **Consolidated Financial Position** • Total Assets of Rp13,187,670,241,197.00 (thirteen trillion one hundred eighty-seven billion six hundred seventy million two hundred forty-one thousand one hundred ninety-seven Rupiah); • Equity of Rp10,002,283,476.139.00 (ten trillion two billion two hundred eighty-three million four hundred seventy-six thousand one hundred thirty-nine Rupiah); • Interest Bearing Debt of Rp2,153,121,373,036.00 (two trillion one hundred fifty-three billion one hundred twenty-one million three hundred seventy-three thousand thirty-six Rupiah); 3. **Net Operating Cash Flow** Amounting to Rp1,274,207,988,004.00 (one trillion two hundred seventy-four billion two hundred seven million nine hundred eighty-eight thousand four Rupiah); 4. **Capital Expenditure** Amounting to Rp2,071,765,204,215.00 (two trillion seventy-one billion seven hundred sixty-five million two hundred four thousand two hundred fifteen Rupiah).
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.

Agenda Kedua | *Second Agenda*	
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).	Ratification of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-CSER) for Year 2025.
Keputusan | Resolution	
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan Total Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Dana *Community Involvement Development* (CID) Non-PUMK sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Ratified the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-CSER) of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for Year 2025 with a total Micro and Small Business (MSME) Funding Program allocation of Rp500,000,000.00 (five hundred million Rupiah) and Non-MSME Community Involvement Development (CID) Funds of Rp10,000,000,000.00 (ten billion Rupiah).
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.
Agenda Ketiga | *Third Agenda*	
Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).	Determined the Annual Management Contract containing the Collegial Key Performance Indicators (KPI) Targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners for Year 2025.
Keputusan | Resolution	
Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.	Determined the Annual Management Contract containing the Collegial Key Performance Indicators (KPI) Targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners for Year 2025, as attached, which forms an integral part of this resolution.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.
Agenda Keempat | *Fourth Agenda*	
Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.	Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to grant approval if there are actions resulting in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, provided that it does not alter the total investment value.
Keputusan | Resolution	
Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.	Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to grant approval if there are actions resulting in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, provided that it does not alter the total investment value.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.
Agenda Kelima | *Fifth Agenda*	
Persetujuan rencana penugasan khusus Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).	Approval of the plan for special assignments of the Company in year 2025.
Keputusan | Resolution	
Menyetujui rencana penugasan khusus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di darat dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan untuk Angkutan Penyeberangan. Persetujuan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yang mengatur bahwa apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.	Approved the plan for special assignments of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) in year 2025 within the framework of Executing Public Service Obligations for Land Cargo Transportation from and to Disadvantaged, Remote, Outermost, and Border Areas for Ferry Transportation. This approval remains heedful of the provisions of Article 66 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and other applicable laws and regulations, which stipulate that if such assignments are financially unfeasible, the Government must provide compensation for all costs incurred by the SOE, including the expected margin, provided it remains within a reasonable level matching the assignment given.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.

RUPS TAHUNAN AUDIT TAHUN BUKU 2024

ANNUAL GMS FOR THE AUDITED FINANCIAL YEAR 2024 RESOLUTIONS AND IMPLEMENTATION

Pemanggilan *Notice of Meeting*	Surat No. UM.005/03589/VI/ASDP-2025 tanggal 28 Mei 2025 Letter No. UM.005/03589/VI/ASDP-2025 dated 28 May 2025
Tanggal *Date*	23 Juni 2025 23 June 2025
Waktu *Time*	17.00 – 18.00 WIB
Lokasi *Location*	Ruang Sumba A dan B, Lantai III, Hotel Borobudur, Jakarta

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Attendance Summary of the Annual GMS for the 2024 Financial Year

No	Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Kehadiran *Attendance*
1.	Endra Gunawan, selaku kuasa dari | acting as proxy on behalf of Erick Thohir	Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia Representative of the Government of the Republic of Indonesia	Hadir Present
2.	Rizqi Kurnianto, selaku kuasa dari | acting as proxy on behalf of Dony Oskaria	Perwakilan PT Danantara Asset Management Representative of PT Danantara Asset Management	Hadir Present
3.	Heru Widodo	Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) President Director of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
4.	Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Deputy President Director of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
5.	Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Director of Finance, Information Technology and Risk Management of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
6.	Kusnadi Chanda Wijaya, selaku kuasa dari | acting as proxy on behalf of Wahyu Wibowo	Direktur Teknik dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Director of Engineering and Facilities of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
7.	Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Director of Operations and Transformation of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
8.	Achmad Baidowi	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) President Commissioner and Independent Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
9.	Joddy Hernady	Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
10.	Susi Meyrista Tarigan	Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
11.	Elba Damhuri	Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
12.	Taufik Rachman	Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present
13.	Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Independent Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Hadir Present

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

OF THE ANNUAL GMS FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR

Agenda Pertama | *First Agenda*

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.

Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company, Approval of the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME) for Financial Year 2024, alongside granting full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for oversight actions executed during Financial Year 2024.

Keputusan | Resolution

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 004372/2.1030/AU.1/06/11555/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".
   b. Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00829/2.1030/AU.2/12/11555/0/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
4. Menetapkan untuk menunda pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Nyonya Ira Puspadewi (mantan Direktur Utama), Tuan Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan), dan Tuan Muhammad Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan), atas tindakan-tindakan pengurusan selama tahun buku 2024, sampai dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan yang bersangkutan telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

1. Approved the Annual Report of the Company including the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2024 ending on 31 December 2024;
2. Ratified:
   a. The Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2024 ending on 31 December 2024, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as per report No. 004372/2.1030/AU.1/06/11555/1/IV/2025 dated 17 April 2025, with an opinion of "fair, in all material respects."
   b. The Financial Statements of the PUMK Program for Financial Year 2024 ending on 31 December 2024, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as per report No. 00829/2.1030/AU.2/12/11555/0/IV/2025 dated 17 April 2025, with an opinion of "fair, in all material respects."
3. Following the approval of the Annual Report including the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME), all for Financial Year 2024, the GMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for oversight actions executed during the financial year ending on 31 December 2024, provided that such actions do not constitute criminal offenses and/or violate applicable laws, regulations, and legal procedures, and are reflected in the aforementioned reports.
4. Determined to defer granting release and discharge (volledig acquit et de charge) to Ira Puspadewi (former President Director), Harry Muhammad Adhi Caksono (former Director of Planning and Development), and Muhammad Yusuf Hadi (former Director of Commercial and Services) for management actions during financial year 2024, until the investigation into corruption cases involving the concerned individuals has been adjudicated and has acquired binding legal force.

Realisasi | Implementation

Keputusan Pemegang Saham telah diaktakan dalam Akta Keputusan RUPS No. 19 tanggal 23 Juni 2025.

The Shareholder resolution was formalized in GMS Resolution Deed No. 19 dated 23 June 2025.

Agenda Kedua | *Second Agenda*

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Determination of the Allocation of the Net Income of the Company for Financial Year 2024.

Keputusan | Resolution

Menetapkan penggunaan Laba Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp438.744.684.039 (empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) atau sejumlah Rp44.964.111.493 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai Dividen yang pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagian dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sebesar Rp8.085 (delapan ribu delapan puluh lima rupiah) dibayarkan secara tunai ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   b. Bagian dividen atas Saham Seri B Perseroan sebesar Rp44.964.103.408 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tiga ribu empat ratus delapan rupiah) dibayarkan ke nomor rekening khusus Bank Tabungan Negara atas nama PT Danantara Asset Management (Persero) dengan nomor rekening 0021101300015877, yang akan dilakukan secara sekaligus paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini atau selambat-lambatnya 30-07-2025 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh lima);
   c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran Dividen Perseroan, termasuk untuk melakukan:
      i) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan
      ii) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 89,75% (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) atau sejumlah Rp393.780.572.546 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) digunakan sebagai saldo laba yang dicadangkan.

Determined the allocation of the Consolidated Net Income of the Company attributable to owners of the parent entity for Financial Year 2024 amounting to Rp438,744,684,039 (four hundred thirty-eight billion seven hundred forty-four million six hundred eighty-four thousand thirty-nine Rupiah) as follows:

1. An amount of 10.25% (ten point two five percent) or Rp44,964,111,493 (forty-four billion nine hundred sixty-four million one hundred eleven thousand four hundred ninety-three Rupiah) is designated as Dividends, with payments executed under the following provisions:
   a. The dividend portion paid to the Series A Dwiwarna Shareholder of the Company amounting to Rp8,085 (eight thousand eighty-five Rupiah) shall be paid in cash to the account designated by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs);
   b. The dividend portion for the Series B Shares of the Company amounting to Rp44,964,103,408 (forty-four billion nine hundred sixty-four million one hundred three thousand four hundred eight Rupiah) shall be paid to the special account of Bank Tabungan Negara under the name of PT Danantara Asset Management (Persero) with account number 0021101300015877, to be executed in a single lump sum no later than 1 (one) month after the determination of this General Meeting of Shareholders (GMS) resolution or at the latest by 30 July 2025;
   c. The Board of Directors is granted the power and authority with substitution rights to take all necessary actions in connection with the corporate Dividend payment, including:
      i) Deducting Dividend taxes in accordance with applicable tax regulations, and
      ii) Handling other technical matters in accordance with applicable provisions.
2. An amount of 89.75% (eighty-nine point seven five percent) or Rp393,780,572,546 (three hundred ninety-three billion seven hundred eighty million five hundred seventy-two thousand five hundred forty-six Rupiah) shall be allocated as appropriated retained earnings.

Realisasi | Implementation

Keputusan Pemegang Saham telah diaktakan dalam Akta Keputusan RUPS No. 19 tanggal 23 Juni 2025.

The Shareholder resolution was formalized in GMS Resolution Deed No. 19 dated 23 June 2025.

Agenda Ketiga | *Third Agenda*

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.

Determination of Salaries/Honoraria, Facilities and Allowances for the Board of Directors and Commissioners for Financial Year 2025, and Tantiem/Performance/Special Incentives for members of the Board of Directors and Commissioners for Performance in Financial Year 2024.

Keputusan | Resolution

1. Penetapan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B.
2. Menunda penetapan tantiem/insentif kinerja atas tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada Nyonya Ira Puspadewi (mantan Direktur Utama), Tuan Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan), Tuan Muhammad Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan), sampai dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan yang bersangkutan telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

1. The determination of tantiem/performance incentives/special incentives for financial year 2024, salaries for the Board of Directors, and honoraria for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for year 2025 will be determined separately by the Series B Shareholder.
2. Deferred the determination of tantiem/performance incentives for financial year 2024 for Ira Puspadewi (former President Director), Harry Muhammad Adhi Caksono (former Director of Planning and Development), and Muhammad Yusuf Hadi (former Director of Commercial and Services), until the investigation into corruption cases involving the concerned individuals has been adjudicated and has acquired binding legal force.

Realisasi | Implementation

Realisasi penetapan tantiem/insentif akan ditetapkan secara terpisah oleh Pemegang Saham Seri B.

The actual determination of tantiem/incentives will be established separately by the Series B Shareholder.

Agenda Keempat | *Fourth Agenda*

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPIS Individu serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025.

Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Conduct the Audit of the Financial Statements, Compliance Audit under PSA 62, Financial Statements Audit of the MSME Funding Program related to the Social and Environmental Responsibility Program, and the Application of Agreed Procedures on the Corporate and Individual KPI Performance Evaluation Results Report and Risk Composite Evaluation Results Report for FY 2025.

Keputusan | Resolution

1. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) termasuk realisasi biaya untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja *Key Performance Indicator* (KPI) Korporat dan *Key Performance Indicator* (KPI) Individual serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B berdasarkan usulan Dewan Komisaris;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah disetujui pada keputusan angka 1 (satu) di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut;
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan:
   a. Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti apabila Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
   b. Kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti;
4. Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi setiap tahun atas kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mengusulkan kembali untuk penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

1. The appointment of a Public Accounting Firm to conduct the Audit of the Consolidated Financial Statements for Financial Year 2025 including actual expenditures for the Social and Environmental Responsibility Program, Compliance Audit under PSA 62, Financial Statements Audit of the Micro and Small Business Funding Program (MSME) related to the Social and Environmental Responsibility Program, and the application of agreed-upon procedures on the Corporate KPI and Individual KPI Performance Evaluation Results Report as well as the Risk Composite Evaluation Results Report for Financial Year 2025 will be determined separately by the Series B Shareholder based on the proposal of the Board of Commissioners;
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the fee amount for the Audit services of the Public Accounting Firm (KAP) approved in resolution 1 (one) above, along with any necessary additions to the scope of work and other reasonable terms for the said Public Accounting Firm (KAP);
3. Delegating authority to the Board of Commissioners, after obtaining prior written approval from the Series B Shareholder, to determine:
   a. A replacement Public Accounting Firm (KAP) if the designated Public Accounting Firm (KAP) cannot continue or execute its duties due to any reason; and
   b. The terms of appointment and honorarium for the replacement Public Accounting Firm (KAP);
4. The Board of Commissioners is directed to evaluate the performance of the Public Accounting Firm (KAP) annually and re-propose the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) for Year 2026.

Realisasi | Implementation

Realisasi penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) ditetapkan secara terpisah oleh Pemegang Saham Seri B.

Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) is established separately by the Series B Shareholder..

Agenda Kelima | *Fifth Agenda*

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Amendment to the Articles of Association of the Company.

Keputusan | Resolution

1. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dalam hal ini perubahan nama Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi PT Danantara Asset Management (Persero), sehingga susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut: a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. PT Danantara Asset Management (Persero) sebanyak 5.561.759 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) lembar saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.561.759.000.000,00 (lima triliun lima ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	1. Approved the amendment to Article 4 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company, specifically changing the name of the Shareholder of the Company from previously PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to PT Danantara Asset Management (Persero), resulting in the following Shareholder structure: a. The State of the Republic of Indonesia holds 1 (one) Series A Dwiwarna share with a total nominal value of Rp1,000,000.00 (one million Rupiah); b. PT Danantara Asset Management (Persero) holds 5,561,759 (five million five hundred sixty-one thousand seven hundred fifty-nine) Series B shares, with a total nominal value of Rp5,561,759,000,000.00 (five trillion five hundred sixty-one billion seven hundred fifty-nine million Rupiah). 2. Granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all actions necessary in connection with the resolution of this Meeting agenda, including drafting and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the competent authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of the notification of amendments to the Articles of Association of the Company, performing everything deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making additions and/or variations to the amendments of the Articles of Association if required by the competent authorities.

Realisasi | Implementation

Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung	Executed during the course of the GMS.

PELAKSANAAN RUPS SIRKULER PADA TAHUN 2025

Hingga 31 Desember 2025, ASDP hanya melaksanakan RUPS Tahunan dan tidak ada pelaksanaan RUPS Sirkuler/Luar Biasa lainnya.

IMPLEMENTATION OF CIRCULAR GMS IN 2025

Until 31 December 2025, ASDP held only Annual GMS and held no other Circular/Extraordinary GMS.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN PADA TAHUN SEBELUMNYA

THE CONVENING OF THE ANNUAL GMS IN THE PREVIOUS YEAR

RUPS RKAP TAHUN BUKU 2023

GMS ON WPB FOR FINANCIAL YEAR 2023

Keputusan dan Realisasi RUPS RKAP Tahun Buku 2023

Resolutions and Realization of the GMS on WPB for Financial Year 2023

Agenda Pertama | *First Agenda*

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024.

Ratification of the Company Work Plan and Budget (WPB) for Year 2024 and the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for Year 2024.

Keputusan | Resolution

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dengan pokok- pokok sebagai berikut;

1. **Laba (Rugi) Konsolidasian**
   a. Pendapatan sebesar Rp5.779.026.180.307.00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh Sembilan miliar dua puluh enam juta seratus delapan ratus tiga ratus tujuh rupiah).
   b. Laba Usaha sebesar Rp837.372.364.085.00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah).
   c. Laba Bersih (Atribusi Induk) sebesar Rp692.992.595.582.00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
2. **Posisi Keuangan Konsolidasian:**
   a. Total Aset sebesar Rp12.206.419.736.009.00 (dua belas triliun dua ratus enam miliar empat ratus sembilan belas tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan rupiah).
   b. Ekuitas sebesar Rp8.869.936.005.00 (delapan triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ribu seratus rupiah).
   c. *Interest Bearing Debt* sebesar Rp2.259.528.325.248.00 (dua triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
3. ***Net Operating Cash Flow***
   Sebesar Rp1.511.281.247.959.00 (satu triliun lima ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
4. ***Capital Expenditure***
   Sebesar Rp1.720.083.145.067,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar delapan puluh tiga juta serratus empat puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah).

Ratified the Company Work Plan and Budget (WPB) for Year 2024 and the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for Year 2024 of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), with the following key items:

1. **Consolidated Profit (Loss)**
   a. Revenues of Rp5,779,026,180,307.00 (five trillion seven hundred seventy-nine billion twenty-six million one hundred eighty thousand three hundred seven Rupiah);
   b. Operating Profit of Rp837,372,364,085.00 (eight hundred thirty-seven billion three hundred seventy-two million three hundred sixty-four thousand eighty-five Rupiah);
   c. Net Profit (Attributable to Parent) of Rp692,992,595,582.00 (six hundred ninety-two billion nine hundred ninety-two million five hundred ninety-five thousand five hundred eighty-two Rupiah);
2. **Consolidated Financial Position**
   a. Total Assets of Rp12,206,419,736,009.00 (twelve trillion two hundred six billion four hundred nineteen million seven hundred thirty-six thousand nine Rupiah);
   b. Equity of Rp8,869,936,005.00 (eight billion eight hundred sixty-nine million nine hundred thirty-six thousand five Rupiah);
   c. Interest Bearing Debt of Rp2,259,528,325,248.00 (two trillion two hundred fifty-nine billion five hundred twenty-eight million three hundred twenty-five thousand two hundred forty-eight Rupiah);
3. **Net Operating Cash Flow**
   Amounting to Rp1,511,281,247,959.00 (one trillion five hundred eleven billion two hundred eighty-one million two hundred forty-seven thousand nine hundred fifty-nine Rupiah);
4. **Capital Expenditure**
   Amounting to Rp1,720,083,145,067.00 (one trillion seven hundred twenty billion eighty-three million one hundred forty-five thousand sixty-seven Rupiah).

Realisasi | Implementation

Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.

Executed during the course of the GMS

Agenda Kedua | *Second Agenda*	
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Social dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024.	Ratification of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-CSER) for Year 2024.
Keputusan | Resolution	
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Soaial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan total Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Dana *Community Involvement Development* (CID) Non-PUMK sebesar Rp. 9.542.500.000,00 (sembilan miliar lima ratus ribu rupiah)	Ratified the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-CSER) for Year 2024 with a total Micro and Small Business Funding Program (MSME) allocation of Rp600,000,000.00 (six hundred million Rupiah) and Non-MSME Community Involvement Development (CID) Funds of Rp9,542,500,000.00 (nine billion five hundred forty-two million five hundred thousand Rupiah).
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.
Agenda Ketiga | *Third Agenda*	
Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024.	Determination of the Annual Management Contract containing the Collegial Key Performance Indicators (KPI) Targets for the Boards of Directors and Commissioners for Year 2024.
Keputusan | Resolution	
Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagaimana terlampir.	Determined the Annual Management Contract containing the Collegial Key Performance Indicators (KPI) Targets for the Boards of Directors and Commissioners for Year 2024.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.
Agenda Keempat | *Fourth Agenda*	
Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (Sepuluh Persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak merubah total nilai investasi;	Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to grant approval if there are actions resulting in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, provided that it does not modify the total investment value.
Keputusan | Resolution	
Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak merubah total nilai investasi.	Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to grant approval if there are actions resulting in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, provided that it does not modify the total investment value.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.
Agenda Kelima | *Fifth Agenda*	
Persetujuan rencana penugasan khusus Perseroan pada tahun 2024.	Approval of the plan for special assignments of the Company in year 2024.
Keputusan | Resolution	
1. Menyetujui rencana penugasan khusus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di darat dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan untuk Angkutan Penyeberangan. 2. Persetujuan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yang mengatur bahwa apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran.	1. Approved the plan for special assignments of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) in year 2024 within the framework of Executing Public Service Obligations for Land Cargo Transportation from and to Disadvantaged, Remote, Outermost, and Border Areas for Ferry Transportation. 2. This approval remains mindful of the provisions of Article 66 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and other applicable laws and regulations, which stipulate that if such assignments are financially unfeasible, the Government must provide compensation for all costs incurred by the State-Owned Enterprise (SOE), including the expected margin, provided it remains within a reasonable level.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Resolutions and Implementaation of the Annual GMS for the 2023 Financial Year

Agenda Pertama | *First Agenda*

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company, Approval of the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME) for Financial Year 2023, alongside granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for oversight actions executed during Financial Year 2023.

Keputusan | Resolution

1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31-12-2023.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31-12-2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai laporannya Nomor 00169/2.1030/AU.1/06/1155-4/1/II/2024 tanggal 24-02-2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".
   b. Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai laporannya Nomor: 00182/2.1030/AU.2/12/1155-4/0/III/2024 tanggal 28-02-2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".

1. Approved the Annual Report including the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2023 ending on 31 December 2023.
2. Ratified:
   a. The Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2023 ending on 31 December 2023, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan as per report No. 00169/2.1030/AU.1/06/1155-4/1/II/2024 dated 24 February 2024, with an opinion of "fair, in all material respects."
   b. The Financial Statements of the MSME Program for Financial Year 2023 ending on 31 December 2023, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan as per report No. 00182/2.1030/AU.2/12/1155-4/0/III/2024 dated 28 February 2024, with an opinion of "fair, in all material respects."

Pokok-pokok Laporan Keuangan Konsolidasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun Buku 2023

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
   Laporan posisi keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31-12-2023 ditutup dengan:
   - Total Aset sebesar Rp11.055.700.503.635,00
   - Total Liabilitas sebesar Rp2.670.988.597.414,00
   - Ekuitas sebesar Rp8.384.711.906.221,00
2. Laporan Laba-Rugi Konsolidasian
   Laba bersih setelah Pajak Konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31-12-2023 sebesar Rp636.539.589.466,00.

Key Items of the Consolidated Financial Statements of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for Financial Year 2023

1. Consolidated Statement of Financial Position
   The consolidated statement of financial position of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for the year ending 31 December 2023 closed with:
   - Total Assets : Rp11,055,700,503,635.00
   - Total Liabilities : Rp2,670,988,597,414.00
   - Equity : Rp8,384,711,906,221.00
2. Consolidated Statement of Profit or Loss
   The Consolidated Net Profit after Tax of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for the year ending 31 December 2023 amounted to Rp636,539,589,466.00.

Pokok-pokok Laporan Tahunan Program TJSL PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun Buku 2023

1. Laporan posisi keuangan PUMK
   Keuangan Program PUMK per 31-12-2023 ditutup dengan jumlah Aset serta Kewajiban dan Aset bersih sebesar Rp6.329.969.505,00.
2. Efektivitas Penyaluran Dana Program PUMK
   Realisasi dana Program PUMK per 31-12-2023 ditutup dengan jumlah Dana Tersedia sebesar Rp1.490.432.967,00.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*), maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut.

Key Items of the Annual Report of the CSER Program of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for FY 2023

1. Statement of Financial Position of MSME
   The financial position of the MSME Program as of 31 December 2023 closed with total Assets as well as Liabilities and Net Assets of Rp6,329,969,505.00.
2. Effectiveness of MSME Program Fund Distribution
   The actual funds of the MSME Program as of 31 December 2023 closed with Available Funds amounting to Rp1,490,432,967.00.
3. Following the approval of the Annual Report including the Oversight Duty Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME), all for Financial Year 2023, the General Meeting of Shareholders (GMS) grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for oversight actions executed during the financial year ending on 31 December 2023, provided that such actions do not constitute criminal offenses and/or violate applicable laws, regulations, and legal procedures, and are reflected in the said reports.

Realisasi | Implementation

Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.

Executed during the course of the GMS.

Agenda Kedua | *Second Agenda*	
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.	Determination of the Allocation of the Net Income of the Company for Financial Year 2023.
Keputusan | Resolution	
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp613.449.069.695,00 sebagai berikut: 1. Sebesar 5,00% dari laba bersih atau sebesar Rp30.672.453.485,00 ditetapkan sebagai dividen tunai. 2. Sebesar 95,00% dari laba bersih atau sebesar Rp582.776.616.210,00 ditetapkan sebagai cadangan.	Determined the allocation of the Net Profit Attributable to Owners of the Parent of the Company for Financial Year 2023 amounting to Rp613,449,069,695.00 as follows: 1. An amount of 5.00% of the net profit or Rp30,672,453,485.00 is designated as cash dividends. 2. An amount of 95.00% of the net profit or Rp582,776,616,210.00 is designated as retained earnings.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.
Agenda Ketiga | *Third Agenda*	
Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for Year 2024 and Tantiem for FY 2023 for the Boards of Directors and Commissioners.
Keputusan | Resolution	
Menetapkan tantiem Tahun Buku 2023, gaji Direksi, dan honorarium Dewan Komisaris beserta fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2024 yang akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B.	Determined the tantiem for FY 2023, salaries for the Board of Directors, and honoraria for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for Year 2024, which will be established separately by the Series B Shareholder.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan melalui Surat Pemegang Saham Nomor SR-39/Wk.MBU.11/10/2024 tanggal 15-10-2024 perihal penyampaian penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2024.	Executed through Shareholder Letter No. SR-39/Wk.MBU.11/10/2024 dated 15 October 2024 regarding the submission of the income determination for the Boards of Directors and Commissioners for Year 2024.
Agenda Keempat | *Fourth Agenda*	
Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Non-PUMK Tahun Buku 2024.	Appointment of a Public Accountant (AP) and/or a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Consolidated Financial Statements of the Company, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME), and Non-MSME for Financial Year 2024.
Keputusan | Resolution	
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan Non-PUMK Tahun Buku 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik guna melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 sesuai kebutuhan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.	1. Appointed the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Rekan to perform the general audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2024 as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME) and Non-MSME for Financial Year 2024. 2. Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm and/or a Public Accountant to conduct audits of the financial statements of the Company for other periods within FY 2024 according to the needs and interests of the Company. 3. Granted a delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the audit fee amount, any necessary additions to the scope of work, and other reasonable terms for the Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Rekan for any reason cannot complete the audit of the Consolidated Financial Statements of the Company, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (MSME), and other reports for Financial Year 2024, including determining the audit fee and other terms for the replacement Public Accounting Firm.
Realisasi | Implementation	
Telah dilaksanakan pada saat RUPS berlangsung.	Executed during the course of the GMS.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan ASDP dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan RUPS, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan ASDP telah berjalan secara terarah dan menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas pengawasan, efektivitas pengambilan keputusan, serta akuntabilitas pengelolaan Perseroan. Dengan penerapan GCG yang konsisten, ASDP memiliki landasan yang kuat untuk memperkuat integritas organisasi, mengelola risiko secara lebih efektif, menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mendukung penciptaan nilai berkelanjutan bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners is a corporate organ tasked with supervising management policies and the general course of management, as well as providing advice to the Board of Directors. In executing its functions, the Board of Commissioners ensures that the management of ASDP is conducted in accordance with the Articles of Association, GMS resolutions, statutory regulations, and Good Corporate Governance principles.

The Board of Commissioners believes that the implementation of good corporate governance within ASDP has proceeded in a targeted manner and serves as the primary foundation for maintaining oversight quality, decision-making effectiveness, and accountability in managing the Company. Through the consistent implementation of GCG, ASDP possesses a solid framework to strengthen organizational integrity, manage risks more effectively, maintain compliance with applicable regulations, and support sustainable value creation for Shareholders and all stakeholders.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

LEGAL BASIS

The legal basis for the establishing and appointing the Board of Commissioners is as follows:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises that has been amended multiple times, most recently by Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that has been amended multiple times, most recently by Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Oversight, and Dissolution of State-Owned Enterprises as amended by Government Regulation No. 23 of 2022 concerning the Amendment to Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Oversight, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
7. Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) beserta seluruh perubahannya, terakhir berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0049825 Tahun 2026 tanggal 19 Februari 2026 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0071516 Tahun 2026 tanggal 19 Februari 2026;
8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025;
10. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025.

5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
7. The Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) along with all its amendments, most recently based on Deed No. 15 dated 26 January 2026 drawn up before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which has been accepted and recorded by the Minister of Law of the Republic of Indonesia under the Notice of Amendment to the Articles of Association Receipt No. AHU-AH.01.03-0049825 of 2026 dated 19 February 2026 and the Notice of Amendment to Company Data Receipt No. AHU-AH.01.09-0071516 of 2026 dated 19 February 2026;
8. Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
9. The Company Work Plan and Budget (WPB) of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for 2025;
10. The Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for Year 2025.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Hingga 31 Desember 2025, komposisi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Komisaris, dan Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris Perseroan disajikan sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As of 31 December 2025, the Company's Board of Commissioners consists of the President Commissioner who also serves as an Independent Commissioner, Commissioners, and Independent Commissioners. The composition is as follows:

Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2024
Composition of the Board of Commissioners in 2024

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Effective Date*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama/Komisaris Independen President/Independent Commissioner	Nomor: SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 Oktober 2024 19 October 2024
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen Independent Commissioner		
Taufik Rachman	Komisaris Commissioner	Nomor: SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 Oktober 2024 19 October 2024
Joddy Hernady	Komisaris Commissioner	Nomor: SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 Oktober 2024 19 October 2024
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	Nomor: SK-225/MBU/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024. No. SK-225/MBU/10/2024 dated 17 Oktober 2024.	17 Oktober 2024 17 October 2024
Elba Damhuri	Komisaris Commissioner	Nomor: SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	19 Oktober 2024 19 October 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ utama tata kelola Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pengawasan Dewan Komisaris mencakup kebijakan pengurusan dan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi, baik terhadap aspek korporasi maupun kegiatan usaha. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, tindak lanjut keputusan RUPS, serta kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan. Melalui fungsi tersebut, Dewan Komisaris berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pengurusan, kualitas pengambilan keputusan, dan keberlanjutan kinerja Perseroan.

KOMISARIS UTAMA

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama:

1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara kolektif sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan *Board Manual*.
2. Mengarahkan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar berjalan efektif, objektif, dan independen.
3. Memimpin rapat Dewan Komisaris serta memastikan pembahasan agenda strategis dan evaluasi kinerja Direksi dilakukan secara terstruktur.
4. Menjaga efektivitas mekanisme *checks and balances* antara Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Menjadi penghubung utama Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pemegang Saham dalam penyampaian pandangan, arahan, dan rekomendasi pengawasan.
6. Memastikan Dewan Komisaris menjalankan tugasnya sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
7. Mendorong penguatan GCG, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal untuk mendukung keberlanjutan kinerja Perseroan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the primary governance organ of the Company, which is collectively tasked with and responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors. In executing its functions, the Board of Commissioners ensures that the management of the Company is carried out in accordance with Good Corporate Governance principles, the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations.

The oversight scope of the Board of Commissioners encompasses the management policies and the general course of management by the Board of Directors, covering corporate aspects and business activities. This oversight includes the implementation of the Long-Term Plan, the Work Plan and Budget, compliance with the Articles of Association, the follow-up on GMS resolutions, and the alignment of Company management with the objectives of its establishment. The Board of Commissioners plays a key role in maintaining management accountability, decision-making quality, and the sustainable performance of the Company.

PRESIDENT COMMISSIONER

The duties and responsibilities are as follows:

1. Leading and coordinating the collective execution of duties by the Board in accordance with laws and regulations, the Articles of Association, and the Board Manual.
2. Directing the oversight and advisory role to the Board of Directors to ensure they run effectively, objectively, and independently.
3. Chairing the meetings of the Board of Commissioners and ensuring discussions on strategic agendas and structured performance evaluations of the Board of Directors.
4. Maintaining the effectiveness of the checks and balances mechanism between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
5. Act as the primary liaison for the Board of Commissioners with the Board of Directors and Shareholders in conveying perspectives, directives, and oversight recommendations.
6. Ensuring that the Board of Commissioners executes its duties in accordance with Good Corporate Governance principles.
7. Driving the reinforcement of GCG, risk management, and internal control systems to support the sustainable performance.

BOARD MANUAL - DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi atau *Board Manual*. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pemberian nasihat kepada Direksi, hubungan kerja antarorgan Perseroan, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap *Board Manual* dan melakukan pemutakhiran apabila diperlukan agar tetap selaras dengan kebutuhan Perseroan, dinamika bisnis, Anggaran Dasar, serta ketentuan peraturan perundang-undaIngan yang berlaku.

Board Manual ASDP telah dikaji ulang dan ditetapkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: SK.1007/HK.002/ASDP-2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 1 November 2024. Pedoman ini merupakan pemutakhiran dari edisi sebelumnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: SK.801/HK.002/ASDP-2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 22 Juni 2020. Adapun ketentuan terkait Dewan Komisaris yang dimuat dalam pedoman kerja tersebut disajikan sebagai berikut:

BOARD MANUAL - BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners executes its duties and functions with reference to the Guidelines for the Boards of Commissioners and Directors, or the Board of Manual. It serves as a reference for conducting oversight functions, advising the Board of Directors, managing working relationships among corporate organs, and implementing good corporate governance principles. The Company conducts periodic reviews of the Board Manual and introduces updates when necessary to ensure it remains aligned with the needs of the Company, business dynamics, the Articles of Association, and applicable laws and regulations.

The ASDP Board Manual has been reviewed and re-established based on the Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors No. SK.1007/HK.002/ASDP-2023 on the Guidelines and Rules of Procedure for the Boards of Commissioners and Directors, namely the Board Manual of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dated 1 November 2024. This guideline is the updated edition of the Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors No. SK.801/HK.002/ASDP-2020 on the Guidelines and Rules of Procedure for the Boards of Commissioners and Directors, namely the Board Manual of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dated 22 June 2020. The provisions related to the Board of Commissioners as set out in the Board Manual are as follows:

Uraian Pedoman Kerja *Description of Work Guidelines*			
1.	Program pengenalan, pelatihan, dan sertifikasi Dewan Komisaris Induction, training, and certification programs for the Board of Commissioners	8	Pengambilan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris (circular resolutions) Decision-making outside Board meetings (circular resolutions)
2.	Tugas Dewan Komisaris Duties of the Board of Commissioners	9.	Etika jabatan Code of office ethics
3.	Wewenang Dewan Komisaris Authorities of the Board of Commissioners	10	Pelaporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris Reporting and accountability of the Board of Commissioners
4.	Tanggung jawab Dewan Komisaris Responsibilities of the Board of Commissioners	11	Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris Measurement and assessment of the Board of Commissioners' performance
5.	Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggota Dewan Komisaris Distribution of duties, authorities, and responsibilities among members of the Board of Commissioners	12.	Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Commissioners
6.	Rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris Work plan and budget of the Board of Commissioners	13.	Organ pendukung Dewan Komisaris Supporting organs of the Board of Commissioners
7.	Rapat Dewan Komisaris Meetings of the Board of Commissioners		

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan *Board Manual*, hak dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, baik yang berkaitan dengan Perseroan maupun kegiatan usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan atas pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:
   a. Melihat buku, surat, dan dokumen lainnya milik Perseroan, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, surat berharga, serta aset dan kekayaan Perseroan.
   b. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
   c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan.
   d. Mengetahui seluruh kebijakan dan tindakan yang telah maupun akan dijalankan oleh Direksi.
   e. Meminta Direksi dan/atau pejabat di bawah Direksi, dengan sepengetahuan Direksi, untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
   f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris apabila dianggap perlu.
   g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
   h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit yang wajib dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.
   i. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan atas hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut.
   j. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the provisions of Article 15 paragraph (1) of the Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and the Board Manual, the rights and authorities of the Board of Commissioners are:

1. Supervising management policies and the course of management of the Company conducted by the Board of Directors, regarding both the Company and its business activities, as well as providing advice to the Board of Directors. This includes supervising the implementation of the Long-Term Plan of the Company, the Company Work Plan and Budget (WPB), the provisions of the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and applicable laws and regulations, for the interest of the Company and in line with its purposes and objectives.
2. In executing oversight duties, the Board of Commissioners has the authority to:
   a. Review books, letters, and other corporate documents, examine cash for verification purposes, as well as securities, assets, and properties of the Company.
   b. Enter buildings, yards, or other premises used or controlled by the Company.
   c. Request explanations from the Board of Directors and/or other officers regarding all matters relating to the management of the Company.
   d. Aware of all policies and actions that have been or will be executed by the Board of Directors.
   e. Request the Board of Directors and/or BoD-1 executives, with the Board's knowledge, to attend Board of Commissioners meetings.
   f. Appoint and dismiss the Secretary to the Board of Commissioners if deemed necessary.
   g. Suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.
   h. Establish other committees apart from the Audit Committee, which must be formed in accordance with applicable provisions.
   i. Attend meetings of the Board of Directors and provide perspectives on matters discussed in such meetings.
   j. Execute other oversight authorities provided they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association of the Company, and/or GMS resolutions.

3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan, tanggapan, dan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Perseroan sesuai Anggaran Dasar, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, serta ketentuan internal yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025.
2. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak Triwulan IV serta *Unaudited* Tahun Buku 2024.
3. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak *Audited* Tahun Buku 2024.
4. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak Triwulan I Tahun Buku 2025.
5. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak Triwulan II serta Semester I Tahun Buku 2025.
6. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak Triwulan III Tahun Buku 2025.

3. In executing their duties and authorities, each member of the Board of Commissioners shares personal liability for any corporate losses if the individual concerned is found guilty or negligent in performing their duties. This liability applies jointly and severally to all members of the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.

APPROVALS AND RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is authorized to grant approval, feedback, and recommendations to the Board of Directors on the management execution of the Company in accordance with the Articles of Association, the Work Guidelines of the Board of Commissioners, and applicable internal provisions.

Throughout 2025, the Board of Commissioners provided approvals and recommendations to the Board of Directors, which included the following matters:

1. Feedback from the Board of Commissioners on the Company Work Plan and Budget (WPB) of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for 2025.
2. Feedback from the Board of Commissioners on the Management Report of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries for Quarter IV and Unaudited Financial Year 2024.
3. Feedback from the Board of Commissioners on the Management Report for the Audited Consolidated Financial Statements of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries for FY 2024.
4. Feedback from the Board of Commissioners on the Management Report of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries for Q I FY 2025.
5. Feedback from the Board of Commissioners on the Management Report of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries for Q II and Semester I of FY 2025.
6. Feedback from the Board of Commissioners on the Management Report of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries for Q III FY 2025.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat melalui pembagian tugas secara individual kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembagian tugas tersebut dimaksudkan untuk memastikan pengawasan terhadap bidang-bidang strategis Perseroan dapat dilakukan secara lebih fokus, terarah, dan sesuai dengan kompetensi serta ruang lingkup pengawasan yang telah ditetapkan.

Meskipun terdapat pembagian tugas secara individual, Dewan Komisaris tetap menjalankan kewenangan dan tanggung jawab secara kolegial. Setiap keputusan, arahan, dan rekomendasi pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Adapun pembagian tugas Dewan Komisaris ASDP telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 09/KOM/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry, dengan rincian sebagai berikut:

SEPARATION OF SUPERVISORY DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners drives the effectiveness of its oversight and advisory functions through individual assignment of duties to each member of the Board of Commissioners. These assignments aim to ensure that oversight over the strategic areas of the Company can be conducted with a sharper focus, better direction, and in accordance with the established competencies and scope of oversight.

Despite individual assignments, the Board of Commissioners continues to execute its authority and responsibility on a collegial basis. Every decision, directive, and oversight recommendation is part of the joint responsibility of the Board of Commissioners as regulated in the Work Guidelines of the Board of Commissioners. The separation of duties was established through the Decree of the Board of Commissioners No. 09/KOM/XI/2024 dated 29 November 2024 concerning the Separation of Duties of the Board of Commissioners of the Company PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), detailed as follows:

Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Separation of Duties of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Pembidangan Tugas *Separation of Duties*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	1. Melakukan koordinasi dan memberikan pengarahan kepada seluruh Komisaris; 2. Mengkoordinasikan pengawasan yang dilakukan oleh para Komisaris sesuai dengan bidangnya masing-masing; 3. Bertanggung jawab untuk sewaktu-waktu diperlukan, menyelenggarakan dan memimpin rapat internal Dewan Komisaris dan Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi guna membahas dan mengevaluasi perkembangan laporan kinerja Direksi; 4. Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Memberikan tugas lain kepada setiap Komisaris; dan 6. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham. 1. Coordinating and providing direction to all Commissioners; 2. Coordinating the oversight activities conducted by the Commissioners according to their respective fields; 3. Taking responsibility for convening and chairing internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors whenever required, to discuss and evaluate the progress of performance reports from the Board of Directors; 4. Serving as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee; 5. Assigning other duties to each Commissioner; and 6. Chairing the Annual General Meeting of Shareholders and General Meetings of Shareholders.

Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Separation of Duties of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Pembidangan Tugas *Separation of Duties*
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko; 2. Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, manajemen risiko, proses bisnis, mutu dan pengembangan IT Perseroan. 1. Serving as the Chairman of the Risk Oversight Committee; 2. Overseeing all aspects relating to the implementation of Good Corporate Governance, risk management, business processes, quality, and IT development of the Company.
Taufik Rachman	Komisaris Commissioner	1. Menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko; 2. Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi; 3. Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan/pembinaan dan pengembangan SDM Perusahaan, penerapan *Good Corporate Governance*, manajemen risiko, akuntansi dan keuangan. 1. Serving as the Vice Chairman of the Risk Oversight Committee; 2. Serving as a member of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee; 3. Overseeing all aspects relating to the management/fostering and development of human resources of the Company, the implementation of Good Corporate Governance, risk management, accounting, and finance.
Joddy Hernady	Komisaris Commissioner	1. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit; 2. Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, termasuk investasi dan asset, serta strategis pengembangan bisnis dan pemasaran, serta perencanaan strategis dan transformasi bidang organisasi/kelembagaan. 1. Serving as the Chairman of the Audit Committee; 2. Overseeing all aspects relating to accounting and finance, including investment and asset, strategic business development and marketing, as well as strategic planning and institutional/organizational transformation.
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	1. Menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit; 2. Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, termasuk investasi dan aset, serta strategis pengembangan bisnis dan pemasaran, serta perencanaan strategis dan transformasi bidang organisasi/kelembagaan. 1. Serving as the Vice Chairman of the Audit Committee; 2. Overseeing all aspects relating to accounting and finance, including investment and assets, strategic business development and marketing, as well as strategic planning and institutional/organizational transformation.
Elba Damhuri	Komisaris Commissioner	1. Menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi; 2. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko; 3. Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan ketaatan terhadap regulasi sektoral, kepatuhan prosedur dan hukum, pelayanan, fasilitas, kelestarian lingkungan, keamanan, dan manajemen armada Perusahaan, serta Nominasi dan Remunerasi. 1. Serving as the Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee; 2. Serving as a member of the Risk Oversight Committee; 3. Overseeing all aspects relating to compliance with sectoral regulations, procedural and legal compliance, services, facilities, environmental sustainability, security, and fleet management of the Company, as well as Nomination and Remuneration.

Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris

Composition of Members of the Board of Commissioners in the Committees under the Board of Commissioners

Komite *Committees*	Ketua *Chairman*	Wakil Ketua *Vice Chairman*
Komite Audit Audit Committee	Joddy Hernady	Susi Meyrista Tarigan
Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	Siti Ariani Muflikhah	Taufik Rachman
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Achmad Baidowi	Elba Damhuri

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta persyaratan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas, dan karakteristik usaha Perseroan. Persyaratan tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris memiliki kapasitas hukum, integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Persyaratan anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Persyaratan formal, yaitu calon anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan umum dinyatakan pailit; atau
   c. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Persyaratan lain, yaitu persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan tersebut dibuktikan melalui dokumen pernyataan dan/atau surat keterangan dari calon anggota Dewan Komisaris, yang disimpan oleh Perseroan sebagai bagian dari dokumentasi tata kelola perusahaan.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Candidates for the Board of Commissioners must meet the formal requirements regulated in the Articles of Association of the Company and applicable laws and regulations, alongside other requirements tailored to the needs, complexity, and characteristics of the Company. These requirements serve as the basis to ensure that members of the Board of Commissioners possess the legal capacity, integrity, competence, and track record necessary to execute oversight and advisory functions for the Board of Directors.

The requirements include:

1. Formal requirements, stipulating that a candidate for the Board of Commissioners must be an individual with full legal capacity who, within a period of 5 years prior to appointment, has never:
   a. been declared bankrupt;
   b. been a member of a Board of Directors or a Board of Commissioners found at fault for causing a company or a public corporation to be declared bankrupt; or
   c. been convicted of a criminal offense that caused financial losses to the state and/or related to the financial sector.
2. Other requirements, representing additional criteria established in the Articles of Association and applicable laws and regulations, considering the needs and nature of the Company's business.
3. The attainment is verified through statement documents and/or certificates provided by the candidate for the Board of Commissioners, which are retained by the Company as part of its corporate governance documentation.

MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Ketentuan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir;
   c. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
   d. mengundurkan diri; atau
   e. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.
3. Pemberhentian sewaktu-waktu oleh RUPS dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris:
   a. tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan atau melanggar Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
   d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
   e. memiliki alasan lain yang ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
5. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, b, dan c dilakukan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri.

TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office for members of the Board of Commissioners are regulated as follows:

1. The term of office for a member of the Board of Commissioners is 5 years, and individuals may be reappointed for 1 subsequent term.
2. The term of office of a Board member terminates if the individual concerned:
   a. passes away;
   b. reaches the end of the term of office;
   c. loses Indonesian citizenship;
   d. resigns; or
   e. is dismissed at any time based on a GMS resolution.
3. Dismissal at any time by the GMS can be executed if the member of the Board of Commissioners:
   a. is unable to execute duties and responsibilities optimally;
   b. no longer meets the requirements or violates the Articles of Association and/or statutory provisions;
   c. is involved in actions that cause detriment to the Company and/or the State;
   d. is found guilty based on a court ruling that has acquired binding legal force; or
   e. has other reasons determined by the GMS.
4. The plan for early dismissal is delivered in writing by the Shareholder to the concerned member of the Board of Commissioners.
5. The dismissal resolution referred to in number 3 letters a, b, and c is made after the concerned member of the Board of Commissioners has been granted an opportunity to present a self-defense statement.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rincian rangkap jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

CONCURRENT POSITIONS ON THE BOARD OF COMMISSIONERS

Details of the dual positions of the Company's Board of Commissioners are as follows:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Concurrent Positions on the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain *Position In Other Companies/Institutions*	Nama Perusahaan/ Instansi Lain *Name of Other Companies/ Institutions*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Ketua | Chairman	Yayasan Wakaf Qur'an Indonesia
		Dewan Pakar | Board of Experts	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
		Wakil Ketua Umum II | Deputy Chairman II	DPP Peradaban
		Ketua Bidang BUMN MN | Chairman of SOEs (National Assembly)	KAHMI
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada | None	Tidak ada | None
Taufik Rachman	Komisaris Commissioner	Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK | Selection Committee for KPK Leadership and KPK Supervisory Board candidates	KPK | Corruption Eradication Commission
		Ketua Departemen Ilmu Hukum | Head of the Department of Legal Studies	Fakultas Hukum Unair | Faculty of Law, Airlangga University
Joddy Hernady	Komisaris Commissioner	Tidak ada | None	Tidak ada | None
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	Kepala Biro Umum dan Keuangan | Head of the General and Financial Bureau	Kementerian BUMN | Ministry of SOEs
Elba Damhuri	Komisaris Commissioner	Juru Bicara | Spokesperson	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2025 antara lain mencakup:

1. Memberikan tanggapan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025.
2. Melakukan pengawasan terhadap realisasi RKAP, termasuk pencapaian kinerja operasional, keuangan, investasi, dan program strategis Perseroan.
3. Menelaah Laporan Manajemen Perseroan dan Entitas Anak secara berkala, meliputi laporan triwulan, semester, serta laporan tahunan.

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

The executed duties and responsibilities by the Board of Commissioners in 2025 included:

1. Providing feedback on the Company Work Plan and Budget (WPB) of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for Year 2025.
2. Conducting oversight on the realization of the WPB, including the achievement of operational, financial, investment performance, and strategic programs of the Company.
3. Reviewing the Management Reports of the Company and Subsidiaries periodically, covering quarterly, semi-annual, and annual reports.

4. Memberikan tanggapan atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak Tahun Buku 2024 yang telah diaudit.
5. Memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi terkait penguatan kinerja operasional, pengendalian biaya, optimalisasi aset, peningkatan layanan, serta pengelolaan risiko usaha.
6. Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan, dan tindak lanjut hasil audit.
7. Melakukan rapat internal Dewan Komisaris, rapat gabungan bersama Direksi, serta pembahasan dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk mendukung efektivitas pengawasan.
8. Memberikan persetujuan, arahan, dan rekomendasi atas aksi atau keputusan Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan internal.
9. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut keputusan RUPS dan arahan Pemegang Saham.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Pemegang Saham sebagai bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris.
11. *Corporate Rating.*
12. Implementasi system penilaian kinerja hingga level individu.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris menyampaikan pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan secara berkala setiap tahun melalui penandatanganan Pakta Integritas. Pernyataan tersebut menjadi bentuk komitmen Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara objektif, independen, serta mengutamakan kepentingan Perseroan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

4. Providing feedback on the Audited Consolidated Financial Statements of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries for Financial Year 2024.
5. Giving directives and recommendations to the Board of Directors regarding the improvement of operational performance, cost control, asset optimization, service improvements, and business risk management.
6. Supervising the implementation of corporate governance, risk management, internal control systems, compliance, and the follow-up on audit findings.
7. Holding internal meetings of the Board of Commissioners, joint meetings with the Board of Directors, and discussions with committees under the Board of Commissioners to support oversight effectiveness.
8. Providing approval, directives, and recommendations for corporate actions or decisions that require the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association and internal provisions.
9. Supervising the follow-up actions on GMS resolutions and Shareholder directives.
10. Submitting reports on the execution of oversight duties to Shareholders as a form of accountability of the Board of Commissioners.
11. Corporate Rating.
12. Implementing the performance evaluation system down to the individual level.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners submits a statement of independence and freedom from conflicts of interest periodically every year by signing an Integrity Pact. This statement represents a commitment from the Board of Commissioners to execute its oversight and advisory functions objectively, independently, and while prioritizing the interests of the Company in accordance with Good Corporate Governance principles.

Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris
Signing of the Board of Commissioners' Integrity Pact

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Tanggal Penandatanganan *Date of Signing*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama/Komisaris Independen | President Commissioner/Independent Commissioner	7 Juli 2025 | 7 July 2025
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen | Independent Commissioner	7 Juli 2025 | 7 July 2025
Taufik Rachman	Komisaris | Commissioner	7 Juli 2025 | 7 July 2025
Joddy Hernady	Komisaris | Commissioner	7 Juli 2025 | 7 July 2025
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris | Commissioner	7 Juli 2025 | 7 July 2025
Elba Damhuri	Komisaris | Commissioner	7 Juli 2025 | 7 July 2025

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Afiliasi merupakan hubungan yang dapat dimiliki oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan. Pengungkapan hubungan afiliasi dilakukan sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, independensi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Hubungan afiliasi yang diungkapkan mencakup:

1. Hubungan afiliasi antaranggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan.

AFFILIATE RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

An affiliation refers to relationships held by members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Principal and/or Controlling Shareholders of the Company. Disclosure of affiliated relationships is part of implementing the principles of transparency, independence, and good corporate governance.

The disclosed affiliated relationships include:

1. Affiliated relationships among members of the Board of Commissioners.
2. Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and of the Directors.
3. Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and the Company's Major and/or Controlling Shareholders.

Rincian hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris Perseroan disajikan dalam tabel berikut:

The affiliated relationships of the members of the Board of Commissioners are presented herein:

Hubungan Keuangan, Keluarga, dan Kepengurusan Komisaris
Financial, Familial, and Managerial Relationships of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan Dengan *Financial Relationships with*						Hubungan Keluarga Dengan *Familial Relationships with*						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain *Managerial Relationship with Other Companies*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Taufik Rachman	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Joddy Hernady	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Elba Damhuri	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris telah menyampaikan dan mengisi daftar khusus yang memuat informasi kepemilikan saham, baik atas nama pribadi maupun keluarga, pada Perseroan dan/atau perusahaan lain, termasuk pernyataan dalam hal tidak memiliki saham. Daftar khusus tersebut

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners has submitted and completed a special register containing information on share ownership, whether in a personal capacity or on behalf of family members, in the Company and/or other companies, including disclosures of non-ownership. This special register is updated periodically at the end of each year, while any data

diperbarui secara berkala setiap akhir tahun, sedangkan setiap perubahan data wajib disampaikan kepada Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga 31 Desember 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham, baik pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) maupun pada perusahaan lainnya.

changes must be reported to the Company in accordance with applicable provisions.

As of 31 December 2025, no members of the Board of Commissioners held any shares, either in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) or in other companies.

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Dewan Komisaris
Company Share Ownership by the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kepemilikan Saham *Shares Ownership*	
		ASDP	Perusahaan Lain *Other Companies*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Taufik Rachman	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Joddy Hernady	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Elba Damhuri	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None

KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen dalam komposisi Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, maupun hubungan lain dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, atau Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Kriteria Komisaris Independen Perseroan meliputi:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, maupun Perseroan yang dapat memengaruhi independensinya.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi pada perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONER

The presence of Independent Commissioners within the Board of Commissioners is established with reference to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership, or family relationships, nor any other relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Controlling Shareholders, or the Company that could affect their capacity to act independently. The criteria for the Independent Commissioners of the Company include:

1. Having no financial, management, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Controlling Shareholders, or the Company that could affect their independence.
2. Not serving as a Director in a company affiliated with the Company.

3. Bebas dari kepentingan, aktivitas bisnis, atau hubungan lain yang dapat mengganggu kemampuan untuk bertindak dan berpikir secara independen dalam menjalankan fungsi pengawasan.
4. Tidak bekerja pada instansi pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, atau kemiliteran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
5. Tidak bekerja pada Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
6. Tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan/atau produk kepada Perseroan dan afiliasinya.

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 2 Komisaris Independen dari total 6 anggota Dewan Komisaris, yaitu Achmad Baidowi dan Siti Ariani Muflikhah. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen Perseroan mencapai 33,33% dari total anggota Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

KEBIJAKAN UMUM

Rapat Dewan Komisaris merupakan forum resmi bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Rapat internal Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan, dan apabila diperlukan Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat gabungan bersama Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif Komisaris Utama, usulan paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau permintaan tertulis dari Pemegang Saham terbesar dengan mencantumkan agenda rapat. Pelaksanaan rapat mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris. Undangan rapat disampaikan secara tertulis paling lambat 5 hari sebelum rapat, dengan memuat agenda, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat. Ketentuan undangan tersebut tidak berlaku apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. Jumlah rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

3. Being free from interests, business activities, or other relationships that could interfere with the ability to act and think independently in executing oversight functions.
4. Not having worked in a government institution, including ministries, agencies, or the military, within the last 3 years.
5. Not having worked for the Company or its affiliates within the last 3 years.
6. Having no financial links, whether direct or indirect, with the Company or companies providing services and/or products to the Company and its affiliates.

As of 31 December 2025, the Company has 2 Independent Commissioners, Achmad Baidowi and Siti Ariani Muflikhah, out of a total of 6 Board members. The proportion of Independent Commissioners stands at 33.33% of the total membership of the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

GENERAL POLICY

Meetings of the Board of Commissioners constitute the official forum for the Board of Commissioners to execute its oversight and advisory role for the Board of Directors. Internal meetings of the Board of Commissioners are held at least monthly, and if necessary, the Board of Commissioners may convene joint meetings with the Board of Directors.

Meetings of the Board of Commissioners may be convened at any time upon the President Commissioner's initiative, a proposal from at least 1/3 of the Board of Commissioners, a request from the Board of Directors, or a written request from the largest Shareholder indicating the meeting agenda. The convening refers to the Board of Commissioners's Annual Work Plan and Budget (WPB). Meeting notices are delivered in writing at the latest 5 days prior, specifying the agenda, date, time, and venue. This notification provision does not apply if all members of the Board of Commissioners are present at the meeting. The number of meetings and the attendance rate of each member of the Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report of the Company.

PROSEDUR RAPAT

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengusulkan agenda rapat sesuai kebutuhan pengawasan dan pembahasan strategis. Sekretaris Dewan Komisaris atau fungsi lain yang ditunjuk bertanggung jawab mengelola bahan, dokumen, dan laporan manajemen yang menjadi materi rapat. Seluruh bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 3 hari sebelum rapat diselenggarakan.

Dalam proses pengambilan keputusan, perbedaan pendapat di antara anggota Dewan Komisaris dimungkinkan dan dicatat secara resmi dalam risalah rapat sebagai *dissenting opinion*. Setiap rapat juga dapat memuat evaluasi atas tindak lanjut keputusan rapat sebelumnya, sesuai agenda yang dibahas.

KETENTUAN KEHADIRAN DAN KUORUM RAPAT

Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berwenang mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai, dengan ketentuan setiap anggota hanya dapat mewakili 1 anggota lainnya.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk. Dalam hal tidak terdapat penunjukan, rapat dipimpin oleh Komisaris yang paling lama menjabat atau, apabila terdapat kondisi yang sama, oleh Komisaris yang paling senior berdasarkan usia. Keputusan atas agenda lain-lain hanya dapat diambil apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan agenda tersebut secara bulat.

MEETING PROCEDURES

Each Board member has the right to propose a meeting agenda in line with oversight requirements and strategic discussions. The Secretary to the Board of Commissioners or other designated function is responsible for managing the materials, documents, and reports that serve as meeting data. All meeting materials are distributed to participants at the latest 3 days before the meeting is held.

During the decision-making process, dissenting opinion among members of the Board of Commissioners are permissible and are officially recorded in the minutes of the meeting. Each meeting may also include an evaluation of the follow-up actions on previous meeting resolutions, in line with the agenda under discussion.

MEETING ATTENDANCE AND QUORUM REQUIREMENTS

Meetings of the Board of Commissioners are declared valid and authorized to make binding decisions if attended or represented by more than 1/2 of the total Board members. A member of the Board of Commissioners who is unable to attend may be represented by another Board member based on a specific, stamped power of attorney, provided that each member can only represent 1 other member.

Meetings of the Board of Commissioners are chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend, the meeting is chaired by a designated Board member. In the absence of a designation, the meeting is led by the longest-serving Commissioner or, in the event of equal tenure, by the senior member based on age. Decisions on miscellaneous agendas can only be adopted if all members of the Board of Commissioners or their valid proxies are present and unanimously approve the addition of the agenda.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 17 kali sesuai Anggaran Dasar, *Board Manual*, serta ketentuan tata kelola yang berlaku. Rapat tersebut menjadi forum pengawasan, pembahasan isu strategis, evaluasi kinerja Perseroan, serta pemberian arahan dan nasihat kepada Direksi. Informasi mengenai agenda rapat dan tanggal pelaksanaan, disajikan dalam tabel berikut:

INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, the Board of Commissioners convened 17 internal meetings in line with the Articles of Association, the Board Manual, and applicable corporate regulations. These meetings are a strategic forum for oversight, deliberation on material issues, evaluation of the Company's performance, and the provision of guidance and counsel to the Board of Directors. Information concerning agendas and execution dates is detailed herein:

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Agenda of the Internal Meetings of the Board of Commissioners

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
1.	09 Januari 2025 09 January 2025	Pembahasan *Update* Usulan Struktur Organisasi	Discussion of the Proposed Organizational Structure Update
2.	10 Januari 2025 10 January 2025	1. Pergantian anggota komite yang berakhir masa kerjanya pada 23 Januari 2024 2. Rencana Kerja Komisaris, khususnya terkait kunjungan dan fokus atensi 3. Detail Plafon Anggaran Dekom 2025	1. Replacement of committee members whose terms expire on 23 January 2024 2. Commissioners' Work Plan, specifically of visits and focus areas 3. Detailed 2025 Board of Commissioners Budget Limit
3.	29 Januari 2025 29 Januari 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris 2025 3. Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d Desember 2024 dan Laporan Manajemen Perusahaan *Unaudited* Tahun 2024 4. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the BoC's 2025 Activity Schedule 3. Discussion of the Company's Performance as of December 2024 and the 2024 Unaudited Company Management Report 4. Miscellaneous.
4.	26 Februari 2025 26 Februari 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2025 3. Pembahasan Progres Pelaksanaan Audit untuk Tahun Buku 2024	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in January 2025 3. Discussion of Audit Progress for the FY 2024
5.	03 Maret 2025 03 March 2025	Perkenalan Anggota Komite Baru.	Introduction of New Committee Members.
6.	19 Maret 2025 19 Maret 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in February 2025 3. Miscellaneous.
7.	23 April 2025 23 April 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Maret 2025 3. Pembahasan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in March 2025 3. Discussion of the Audit of the FS for the FY 2024
8.	20 Mei 2025 20 May 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan April 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in April 2025 3. Miscellaneous.
9.	23 Juni 2025 23 June 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in May 2025 3. Miscellaneous.
10.	08 Juli 2025 08 July 2025	1. Wawancara Kandidat Kepala SPI 2. Rapat Komisaris Utama dengan Anggota Komite	1. Interview of the Head of Internal Audit Candidate 2. President Commissioner Meeting with Committee Members
11.	28 Juli 2025 28 July 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Semester I Tahun 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance on First Half of 2025
12.	22 Agustus 2025 22 August 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2025 3. *Update* Isu Strategis Perusahaan	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in July 2025 3. Update on the Company's Strategic Issues
13.	16 September 2025 16 September 2025	Rapat Terkait RKA Dekom Tahun 2025	Meeting on the BOC's 2025 Work Plan and Budget

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Agenda of the Internal Meetings of the Board of Commissioners

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
14.	26 September 2025 26 September 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2025 3. Pembahasan RKAP Tahun 2026	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in August 2025 3. Discussion of the 2026 WPB
15.	24 Oktober 2025 24 October 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2025 3. Pembahasan Pembahasan Laporan Manajemen TW II 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in September 2025 3. Discussion of the Management Report for the Q2 2025
16.	21 November 2025 21 November 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2025 3. Persiapan Nataru 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in October 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025
17.	19 Desember 2025 19 December 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2025 3. Persiapan Nataru 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of Company Performance in November 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi sebanyak 20 kali sebagai forum koordinasi, pengawasan, dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perseroan. Rapat tersebut membahas berbagai agenda strategis, termasuk kinerja operasional dan keuangan, realisasi RKAP, pengelolaan risiko, tindak lanjut arahan Pemegang Saham, serta isu-isu penting yang memerlukan perhatian bersama. Informasi mengenai agenda rapat dan tanggal pelaksanaan, disajikan dalam tabel berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 20 joint meetings with the Board of Directors as a forum for coordination, oversight, and advising on the management of the Company. These meetings discussed various strategic agendas, including operational and financial performance, WPB realization, risk management, follow-up actions on Shareholder directives, and critical issues requiring joint attention. Information regarding the meeting agendas and execution dates is presented in the following table:

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi

Agenda of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
1.	09 Januari 2025 09 January 2025	*Sharing Session* dengan Direktur Keuangan, Teknologi Informasi, dan Manajemen Risiko Sharing Session with Director of Finance, Information Technology and Risk Management	
2.	10 Januari 2025 10 January 2025	Pembahasan *Update* Usulan Struktur Organisasi Discussion of the Proposed Organizational Structure Update	
3.	21 Januari 2025 21 January 2025	*Sharing Session* dengan Direktur Teknik dan Fasilitas Sharing Session with Director of Engineering and Facilities	
4.	21 Januari 2025 21 January 2025	Rapat Potensi *Impairment* atas Pengakuan Pendapatan Perintis Tahun 2023 Meeting on Potential Impairment on Pioneer Revenue Recognition for 2023	
5.	30 Januari 2025 30 January 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d. Desember 2024 dan Laporan Manajemen Perusahaan *Unaudited* Tahun 2024 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance as of December 2024 and the 2024 Unaudited Management Report 3. Miscellaneous.
6.	26 Februari 2025 26 February 2025	Pengawasan dan Pengendalian atas BBM Subsidi terhadap Kapal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Supervision and Control of Subsidized Fuel for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ships	
7.	28 Februari 2025 28 February 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2025 3. Pembahasan Progres Pelaksanaan Audit untuk Tahun Buku 2024	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in January 2025 3. Discussion of Audit Progress for the FY 2024

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi

Agenda of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
8.	14 Maret 2025 14 March 2025	*Talent Pool* ASDP	
9.	21 Maret 2025 21 March 2025	*Sharing Session* bersama DR 1. Tupoksi 2. Program Kerja Direktorat	Sharing Session with DR: 1. Duties and Functions 2. Directorate Work Program
10.	24 Maret 2025 24 March 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d. Februari 2025 3. Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance as of February 2025 3. Discussion on Preparations for 2025 Eid Transportation
11.	19 Mei 2025 19 May 2025	Rapat Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan *Audited* Tahun Buku 2024 Discussion Meeting of Audited Management Report for the FY 2024	
12.	21 Mei 2025 21 May 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan April 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in April 2025 3. Miscellaneous.
13.	24 Juni 2025 24 June 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2025 3. Pembahasan *Update* KPI Individu Direksi Tahun 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in May 2025 3. Discussion on the 2025 Update of Individual KPIs for Directors
14.	26 Juni 2025 26 June 2025	Pembahasan terkait Persetujuan KPI Direksi Kolegial 2025 Discussion regarding the 2025 Collegial BoD KPI Approval	
15.	29 Juli 2025 29 July 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Semester I Tahun 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance on First Half of 2025 3. Miscellaneous.
16.	25 Agustus 2025 25 August 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2025 3. *Update* Isu Strategis Perusahaan	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in July 2025 3. Update on the Company's Strategic Issues
17.	29 September 2025 29 September 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2025 3. Pembahasan RKAP Tahun 2026	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in August 2025 3. Discussion of the 2026 WPB
18.	28 Oktober 2025 28 October 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2025 3. Pembahasan Laporan Manajemen TW III 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in September 2025 3. Discussion of the Management Report for the Q3 2025
19.	21 November 2025 21 November 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2025 3. Persiapan Nataru 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in October 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025
20.	22 Desember 2025 22 December 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2025 3. Persiapan Nataru 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of Company Performance in November 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 39 kali, terdiri dari 17 kali Rapat Dewan Komisaris, 20 kali Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan 2 kali RUPS. Rincian agenda, tanggal pelaksanaan, serta tingkat kehadiran masing-masing anggota disajikan pada tabel berikut:

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 39 meetings, consisting of 17 Board of Commissioners Meetings, 20 Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, and 2 GMS. Details of the agenda, implementation dates, and attendance of each member are presented in the following table:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Keseluruhan
Overall Frequency and Attendance of Board of Commissioners Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Dewan Komisaris *Board of Commissioners Meetings*			Rapat Gabungan Dewan Komisaris *dengan Direksi* Joint Meetings of the Boards of Commissioners and Directors			RUPS GMS		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*			Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*			Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*	Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*	Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	17	17	100%	20	20	100%	2	2	100%
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen Independent Commissioner	17	17	100%	20	20	100%	2	2	100%
Taufik Rachman	Komisaris Commissioner	17	17	100%	20	20	100%	2	2	100%
Joddy Hernady	Komisaris Commissioner	17	17	100%	20	20	100%	2	2	100%
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	17	16	94,12%	20	20	100%	2	2	100%
Elba Damhuri	Komisaris Commissioner	17	17	100%	20	20	100%	2	2	100%

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, Perseroan melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru untuk memberikan pemahaman mengenai profil, kegiatan usaha, struktur organisasi, tata kelola, serta aspek strategis Perseroan. Program pengenalan dapat dilaksanakan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan kerja, pengkajian dokumen, atau metode lain yang relevan. Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan bersama Sekretaris Dewan Komisaris.

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian, program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru tidak dilaksanakan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

As regulated in the Board Manual, the Company executes an orientation program for new members of the Board of Commissioners to provide an understanding of the profile, business activities, organizational structure, governance, and strategic aspects of the Company. The orientation program can be carried out through presentations, meetings, site visits, document reviews, or other relevant methods. The execution of the program is coordinated by the Corporate Secretary together with the Secretary to the Board of Commissioners.

In 2025, there were no changes to the composition of the Board of Commissioners. Therefore, the orientation program for new members of the Board of Commissioners was not conducted.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Rincian pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, members of the Board of Commissioners participated in various training and competency development programs. The programs attended by members of the Board of Commissioners are detailed in the following table:

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris
Training and/or Competency Development of Members of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Training and Competency Development*	Waktu dan Tempat *Date and Place*	Penyelenggara *Organizer*
• Achmad Baidowi • Siti Ariani Muflikhah • Taufik Rachman • Joddy Hernady • Susi Meyrista Tarigan • Elba Damhuri	Membangun Ketahanan Operasional Bisnis melalui Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha Building Business Operational Resilience through a Business Continuity Management System	14 Juli | July 2025, Zoom *Meeting*	HC *Development*, Senin Belajar Bareng (SeBBar) Ferizyan Series #051
• Achmad Baidowi • Siti Ariani Muflikhah • Taufik Rachman • Joddy Hernady • Elba Damhuri	*In House Training & Certification* QRGP (*Qualified Risk Governance Professional*)	18-19 September 2025, Kantor Pusat 18-19 September 2025, Head Office	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS)
• Achmad Baidowi • Siti Ariani Muflikhah • Taufik Rachman • Joddy Hernady • Susi Meyrista Tarigan • Elba Damhuri	*Executive Briefing* Penetapan Strategi Risiko Executive Briefing on Risk Strategy Determination	01 Oktober 2025, Kantor Pusat 01 October 2025, Head Office	CRMS
• Siti Ariani Muflikhah • Taufik Rachman	*The New Special Directorship Program: Governance Strategies - Managing Corporate Risk in a Volatile World*	26-27 Agustus | August 2025, Hotel Pullman Thamrin	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sesuai Anggaran Dasar, *Board Manual*, keputusan RUPS, serta ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, capaian KPI Dewan Komisaris tercatat sebesar 104,9, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Performance evaluations of the Board of Commissioners are conducted to assess the effectiveness of its oversight and advisory functions for the Board of Directors in line with the Articles of Association, the Board Manual, GMS resolutions, and applicable provisions. In 2025, the KPI score of the Board of Commissioners reached 104.9, indicating effective duties execution by the Board has exceeded the set targets.

Realisasi *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2025
Realization of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators in 2025

No	Indikator *Indicator*	Uraian *Description*	Output	Kuantitas *Quantity*	Bobot *Weight*	Realisasi *Actual*	Bobot Realisasi *Weight*
A	**Aspek Perencanaan** Planning Aspect				**10**		**10**
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2026 Prepare the WPB and the KPI of the Board of Commissioners for 2026	Program Kerja Tahunan meliputi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026 Annual Work Program incld. Activities and Budget for 2026	Dokumen Document	1 kali time	10	1 kali | time	10
B	**Aspek Pengawasan/Nasihat** Oversight/Counsel Aspect				**75**		**75**
1.a	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Respond/recommend to Shareholders on the Company's WPB	Tahunan Annual	Surat | Letter	1 kali time	5	1 kali | time	5
1.b	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham atas kinerja triwulanan Respond/recommend to Shareholders on quarterly performance	Triwulan Quarterly	Surat | Letter	4 kali time	10	4 kali | time	40
1.c	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Respond/recommend to Shareholders on the Annual Report	Tahunan Annual	Surat | Letter	1 kali time	5	1 kali | time	5
1.d	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham atas pengusulan Eksternal Auditor/KAP Respond/recommend to Shareholders on proposals from External Auditors/Firms	Tahunan Annual	Surat | Letter	1 kali time	5	1 kali | time	5
2.a	Rapat Dewan Komisaris dalam rangka memberi saran/nasihat kepada Direksi, jumlah rapat Board of Commissioners meetings to counsel the Board of Directors, number of meetings	Minimal rapat 1 kali dalam sebulan Min. one meeting monthly	Kali | Times	12 kali time	5	10 kali | time	5
2.b	Rapat Dewan Komisaris dalam rangka memberi saran/nasihat kepada Direksi, kehadiran rapat Board of Commissioners meetings to counsel the Board of Directors, meeting attendance	Bulanan Monthly	%	100%	10	99%	9,9
2.c	Rapat Dewan Komisaris dalam rangka memberi saran/nasihat kepada Direksi, risalah rapat Board of Commissioners meetings to counsel the Board of Directors, meeting minutes	Bulanan Monthly	Risalah Meeting Minutes	12 risalah document	5	>12 risalah document	5
3	Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Board of Commissioners meetings with Committees	Setahun Full-Year	Risalah Meeting Minutes	12 risalah document	10	12 risalah document	10
4	Monitoring/pengawasan Dewan Komisaris ke divisi bisnis dan kantor cabang Board of Commissioners monitoring of business divisions and branch offices	Setahun Full-Year	Laporan monitoring/surat Monitoring report	2 laporan reports	10	>3 laporan reports (8 kunjungan visits)	15

Realisasi *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2025
Realization of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators in 2025

No	Indikator *Indicator*	Uraian *Description*	Output	Kuantitas *Quantity*	Bobot *Weight*	Realisasi *Actual*	Bobot Realisasi *Weight*
5	Pemberian persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam waktu 14 hari kalender sejak surat usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris Grant written approval by the BoC for the actions of the BoD in accordance with the Company's Articles of Association within 14 calendar days of receipt of the proposal letter or complete documents by the BoC	Penyampaian persetujuan atas Surat Permohonan Direksi tepat waktu Punctual approval of Director's Letter	%	100%	5	100%	5
6	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Respond/recommend to Shareholders on the Company's WPB	Penyampaian tanggapan sejak Surat Permohonan Direksi tepat waktu Punctual response of Director's Letter	%	100%	5	100%	5
C	**Aspek Pelaporan** **Reporting Aspect**				**10**		**10**
1	Menyampaikan laporan tahunan tentang tugas pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Submit the annual report on the supervisory duties and realization of the Board of Commissioners' KPI implementation	Laporan tugas pengawasan tahun buku 2025 FY 2025 supervisory report	Surat | Letter	1 surat letter	10	1 surat letter	10
D	**Aspek Dinamis/Lain** **Dynamic/Other Aspects**				**5**		**5**
1	Peningkatan kompetensi melalui kegiatan seminar dan *workshop* Competency improvement through seminars and workshops	Tahunan Annual	Surat/Laporan Letter/Report	2 laporan reports	5	2 laporan reports	5
	Jumlah | Total				**100**		**104,9**

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku berjalan. Proses penilaian dilakukan dengan memperhatikan realisasi program kerja Dewan Komisaris, pelaksanaan rapat, pemberian arahan dan rekomendasi kepada Direksi, serta tindak lanjut atas keputusan RUPS dan arahan Pemegang Saham.

Secara umum, prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Penyusunan rencana kerja dan indikator pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
2. Pemantauan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun buku.

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE

The performance of the Board of Commissioners is evaluated periodically covering the execution of oversight duties during the ongoing financial year. The evaluation process weighs the realization of the Board of Commissioners' work program, meeting execution, the provision of directives to the Board of Directors, and follow-up actions on GMS resolutions and Shareholder directives.

In general, the performance evaluation procedures for the Board of Commissioners include:

1. Drafting the work plan and performance indicators for the duties of the Board.
2. Monitoring the execution of oversight and advisory functions for the Board of Directors throughout the financial year.

3. Evaluasi atas kehadiran, partisipasi, dan kontribusi anggota Dewan Komisaris dalam rapat serta pembahasan isu strategis Perseroan.
4. Penelaahan terhadap efektivitas rekomendasi Dewan Komisaris dalam mendukung pengelolaan Perseroan.
5. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan secara kolegial maupun kontribusi masing-masing anggota. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada aspek kehadiran formal, tetapi juga pada kualitas pengawasan, relevansi arahan, serta kontribusi Dewan Komisaris dalam menjaga tata kelola, kinerja, dan keberlanjutan Perseroan.

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan sesuai Anggaran Dasar dan *Board Manual*.
2. Efektivitas pemberian nasihat, arahan, dan rekomendasi kepada Direksi.
3. Tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi.
4. Pengawasan terhadap pencapaian kinerja operasional, keuangan, investasi, dan program strategis Perseroan.
5. Pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan sistem pengendalian internal.
6. Tindak lanjut atas keputusan RUPS, arahan Pemegang Saham, hasil audit, serta rekomendasi komite di bawah Dewan Komisaris.
7. Kontribusi Dewan Komisaris dalam mendukung keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang bagi Perseroan.

3. Evaluating the attendance, participation, and contribution of the Board members in meetings and discussions of the Company's strategic issues.
4. Reviewing the effectiveness of the Board of Commissioners' recommendations in supporting the management of the Company.
5. Submitting the oversight duty execution report of the Board of Commissioners to Shareholders through the GMS mechanism.

CRITERIA FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Performance evaluation criteria for the Board of Commissioners are formulated to assess the effectiveness of collective oversight as well as individual contributions. The assessment focuses not only on attendance but also on oversight quality, the relevance of directives, and the contribution of the Board toward maintaining governance, performance, and corporate sustainability.

The performance evaluation criteria for the Board of Commissioners include:

1. Execution of oversight duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the Board Manual.
2. Effectiveness in providing advice, directives, and recommendations to the Board of Directors.
3. Rate of attendance and active participation in meetings of the Board of Commissioners and joint meetings with the Board of Directors.
4. Oversight of the operational, financial, investment performance, and strategic program achievements of the Company.
5. Oversight of the implementation of Good Corporate Governance, risk management, compliance, and internal control systems.
6. Follow-up actions on GMS resolutions, Shareholder directives, audit findings, and recommendations from committees under the Board of Commissioners.
7. Contribution of the Board of Commissioners in supporting business sustainability and long-term value creation for the Company.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS berdasarkan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Penilaian tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi selama tahun buku berjalan.

Selain penilaian oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris juga dapat melakukan evaluasi internal untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas secara kolegial maupun individual. Evaluasi internal tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan dalam meningkatkan kualitas rapat, efektivitas pengawasan, koordinasi dengan Direksi, serta optimalisasi peran komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted by the Shareholders through the GMS based on the oversight report of the Board of Commissioners. The assessment is a form of the Board's accountability for its oversight and advisory functions for the Board of Directors during the current financial year.

In addition to evaluations by Shareholders, the Board of Commissioners may conduct internal evaluations to assess the effectiveness of its duties collectively and individually. This internal evaluation serves as a basis for improvement to increase meeting quality, oversight effectiveness, coordination with the Board of Directors, and to optimize the roles of the committees under the Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DAN UNIT DI BAWAH DEWAN KOMISASRIS SERTA DASAR PENILAIAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Keberadaan komite-komite tersebut berperan penting dalam memperkuat kualitas pengawasan, khususnya terkait penelaahan laporan keuangan, audit dan pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola, serta nominasi dan remunerasi.

Penilaian kinerja komite dilakukan secara berkala oleh Dewan Komisaris melalui evaluasi atas pelaksanaan tugas, realisasi program kerja, penyampaian laporan, serta kualitas kajian dan rekomendasi yang diberikan. Prosedur penilaian mengacu pada piagam masing-masing komite, rencana kerja Dewan Komisaris, agenda pengawasan tahun berjalan, serta ketentuan tata kelola Perseroan.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja komite meliputi capaian kinerja selama tahun buku, kesesuaian pelaksanaan tugas dengan mandat dan piagam komite, kualitas rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, kompetensi anggota komite, serta tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dalam rapat. Penilaian juga mempertimbangkan kemampuan komite dalam memberikan masukan yang relevan terhadap isu strategis, pengelolaan risiko, kepatuhan, pengendalian internal, dan peningkatan kualitas tata kelola Perseroan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES AND UNITS UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In executing its oversight and advisory functions for the Board of Directors, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. The presence of these committees plays an important role in strengthening oversight quality, particularly regarding the review of financial statements, audits and internal controls, risk management, governance, as well as nomination and remuneration.

Performance evaluations of the committees are conducted periodically by the Board of Commissioners through assessing the execution of duties, work program realization, report submissions, and the quality of reviews and recommendations provided. The evaluation procedures refer to the charter of each committee, the work plan of the Board of Commissioners, the oversight agenda for the current year, and the corporate governance provisions of the Company.

The criteria for evaluating committee performance include achievements during the financial year, alignment of duty with the mandate and committee charter, the quality of recommendations submitted to the Board of Commissioners, the competence of committee members, and the rate of attendance and active participation in meetings. It also weighs the committee's capacity to provide relevant input on strategic issues, risk management, compliance, internal control, and improvements in the corporate governance quality of the Company.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif. Rekomendasi, kajian, dan masukan yang diberikan turut mendukung Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat ketepatan pengambilan keputusan, serta memastikan pengelolaan Perseroan tetap selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko, dan kepentingan jangka panjang ASDP.

Based on the evaluation results for 2025, the Board of Commissioners concludes that the committees under the Board of Commissioners have executed their functions and responsibilities effectively. The recommendations, reviews, and input provided have supported the Board of Commissioners in improving oversight quality, enhancing decision-making accuracy, and ensuring that the management of the Company remains aligned with Good Corporate Governance principles, risk management, and the long-term interests of ASDP.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta menjalankan pengelolaan Perseroan secara kolektif untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan usaha.

The Board of Directors is the Company organ vested with the authority and full responsibility for the management of the Company in accordance with the Articles of Association and prevailing regulations. The Board is also authorized to represent the Company both within and outside a court of law, and conducts the management of the Company collectively to support the achievement of its vision, mission, and business objectives.

Dalam pelaksanaannya, Direksi dapat membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsi, bidang kerja, serta keahlian masing-masing anggota. Namun, pembagian tersebut tidak mengurangi prinsip tanggung jawab kolektif Direksi, sehingga setiap kebijakan dan keputusan pengurusan Perseroan tetap menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

In practice, the Board of Directors may allocate duties and responsibilities based on the function, field of work, and expertise of each member. However, such allocation does not diminish the principle of collective responsibility of the Board of Directors. Consequently, every policy and management decision remains the joint responsibility of all members of the Board of Directors in compliance with prevailing regulations.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan dan penunjukan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

LEGAL BASIS

The legal basis for the establishing and appointing the Board of Directors is:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended several times, most recently by Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended several times, most recently by Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
7. Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) beserta seluruh perubahannya, terakhir berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0049825 Tahun 2026 tanggal 19 Februari 2026 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0071516 Tahun 2026 tanggal 19 Februari 2026;
8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025;
10. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025.

3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises as amended by Government Regulation No. 23 of 2022 concerning the Amendment to Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
7. Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) along with all their amendments, most recently based on Deed No. 15 dated 26 January 2026 drawn up before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which has been accepted and recorded by the Minister of Law of the Republic of Indonesia under Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0049825 of 2026 dated 19 February 2026 and Receipt of Notification of Amendment to Corporate Data No. AHU-AH.01.09-0071516 of 2026 dated 19 February 2026;
8. GMS Resolutions of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
9. Work Program and Budget (WPB) of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for FY 2025;
10. Work Program and Budget of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for Financial Year 2025.

KOMPOSISI DIREKSI

Hingga 31 Desember 2025, komposisi Direksi Perseroan terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur yang membidangi fungsi strategis sesuai struktur organisasi Perseroan. Susunan Direksi Perseroan disajikan sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of 31 December 2025, the Board of Directors consists of the President Director and Directors responsible for strategic functions in accordance with the Company's organizational structure. The composition of the Company's Board of Directors is presented as follows:

Komposisi Direksi Tahun 2025
Composition of the Board of Directors in 2025

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Effective Date*
Heru Widodo	Direktur Utama President Director	Keputusan Pemegang Saham No.SK-278/MBU/11/2024 Shareholder Decree No.SK-278/MBU/11/2024	11 November 2024 - 11 November 2029
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	Keputusan Pemegang Saham No.SK-278/MBU/11/2024 Shareholder Decree No.SK-278/MBU/11/2024	11 November 2024 - 11 November 2029
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation	Keputusan Pemegang Saham No.SK-278/MBU/11/2024 Shareholder Decree No.SK-278/MBU/11/2024	11 November 2024 - 11 November 2029
Nana Sutisna	Direktur Teknik Director of Engineering	Surat Keputusan No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025	30 Oktober 2025 - 30 Oktober 2030 30 October 2025 - 30 October 2030
Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan Director of Finance	Surat Keputusan No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025	30 Oktober 2025 - 30 Oktober 2030 30 October 2025 - 30 October 2030
Rudi Sunarko	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of HC & Corporate Services	Surat Keputusan No. SK.072/DI-DAM/DO/2025 Decree No. SK.072/DI-DAM/DO/2025	30 Oktober 2025 - 30 Oktober 2030 30 October 2025 - 30 October 2030

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta dijabarkan lebih lanjut dalam *Board Manual*. Pelaksanaan fungsi pengurusan tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan, proses bisnis, dan kegiatan operasional Perseroan berjalan efektif, selaras dengan tujuan Perseroan, arahan Pemegang Saham, prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi secara tepat. Direksi juga bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan Perseroan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors carries out the duties and responsibilities for the Company management as regulated in the Articles of Association and the Board Manual. The management role is directed to ensure that the policies, business processes, and operational activities of the Company run effectively, in alignment with corporate objectives, Shareholders' directives, GCG principles, and the appropriate utilization of innovation and technology. The Board of Directors is also responsible for ensuring that the management of the Company commits strongly to sustainability aspects, including the fulfillment of social and environmental responsibilities.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
4. Dalam hal Direksi terdiri dari 2 anggota atau lebih, tanggung jawab atas pengurusan Perseroan berlaku secara tanggung renteng bagi seluruh anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:
   a. kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi tidak mengurangi hak anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Tanggung jawab Direksi atas kesalahan atau kelalaian tidak mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan hukum pidana.
8. Dalam hal Perseroan dinyatakan pailit karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban Perseroan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang belum terlunasi.
9. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 8 juga berlaku bagi anggota Direksi yang terbukti bersalah atau lalai dan pernah menjabat dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
10. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:
    a. kepailitan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors comprise:

1. Fully responsible for the management of the Company for the interest and objectives of the Company, and representing the Company both within and outside a court of law.
2. Executing the management of the Company in good faith, with full responsibility, prudence, and in compliance with prevailing provisions.
3. Personally responsibility for Company losses if the respective member of the Board of Directors is proven guilty or negligent in performing their duties.
4. In the event that the Board of Directors consists of 2 or more members, the responsibility for the management of the Company applies jointly and severally to all members of the Board of Directors in accordance with statutory regulations.
5. Members of the Board of Directors cannot be held liable for Company losses if they can prove that:
   a. the losses were not caused by their error or negligence;
   b. they have conducted the management in good faith and with prudence for the interest of the Company and in line with the aims and objectives of the Company;
   c. they do not possess a conflict of interest, either direct or indirect, over the management actions that caused the losses; and
   d. they have taken measures to prevent the occurrence or continuation of such losses.
6. Provisions on the responsibility of the Board of Directors do not diminish the rights of other members of the Board of Directors and/or the Commissioners to file a lawsuit on behalf of the Company in line with prevailing regulations.
7. The responsibility of the Board of Directors for errors or negligence does not diminish other provisions regulated in statutory regulations, including criminal law provisions.
8. In the event that the Company is declared bankrupt due to the error or negligence of the Board of Directors and the bankruptcy assets are insufficient to satisfy all obligations of the Company, each Directors is jointly and severally liable for the unpaid obligations.
9. The responsibility referred to in item 8 also applies to the Directors who are proven guilty or negligent and have served within a period of 5 years prior to the pronouncement of the bankruptcy declaration judgment.
10. Members of the Board of Directors are not responsible for the bankruptcy of the Company if they can prove that:
    a. the bankruptcy was not caused by their error or negligence;
    b. they have conducted the management in good faith, with prudence, and full responsibility in the Company's interest and in line with its aims and objectives;

c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

11. Ketentuan tanggung jawab atas kepailitan juga berlaku terhadap Direksi Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD MANUAL - DIREKSI

Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi atau *Board Manual* sebagai acuan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Pedoman tersebut telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024 serta menjadi dasar dalam mengatur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi melakukan kaji ulang terhadap *Board Manual* secara berkala dan melakukan pemutakhiran apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan Perseroan, perkembangan bisnis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup pengaturan dalam *Board Manual* Perseroan meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Prinsip Dasar Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
5. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Penutup.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi memiliki hak, kewenangan, dan ketentuan kepegawaian sebagai berikut:

1. Mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan kepada anggota Direksi tertentu, pekerja Perseroan, atau pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

c. they do not possess a conflict of interest, either direct or indirect, over the management actions performed; and
d. they have taken measures to prevent the bankruptcy from occurring.

11. Provisions on responsibility for bankruptcy also apply to the Board of Directors of a Company declared bankrupt based on a third-party lawsuit, provided that it fulfills the prevailing statutory regulations.

BOARD MANUAL - BOARD OF DIRECTORS

The Company has a guideline, the Board Manual, as a reference for the Board of Directors in executing the management of the Company. The guidelines were ratified by the Boards of Commissioners and Directors in 2024 and serve as the basis for regulating the execution of duties, responsibilities, authorities, and work relationships between the Boards of Commissioners and Directors.

The Board of Directors reviews the Board Manual periodically and performs updates if necessary, taking into account the management needs of the Company, business developments, and prevailing statutory regulations. The scope of regulation in the Company's Board Manual includes:

1. Introduction;
2. Basic Principles of the Boards of Commissioners and Directors;
3. Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners;
4. Guidelines and Code of Conduct of the Board of Directors;
5. Work Relationships between the Boards;
6. Closing.

RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has the following rights, authorities, and employment provisions:

1. Manage the delegation of partial authority of the Board of Directors to represent the Company within and outside a court of law to specific members of the Board of Directors, Company employees, or other parties in line with prevailing regulations.

2. Memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, serta santunan purna jabatan yang jenis dan besarannya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menerima tantiem sebagai imbalan atas pencapaian kinerja apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan tertentu, dengan besaran yang ditetapkan oleh RUPS. Usulan insentif kinerja Direksi terlebih dahulu disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan sebelum diajukan kepada RUPS.
4. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kepentingan Perseroan, sesuai kebijakan internal dan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh salinan risalah rapat Direksi, baik bagi anggota Direksi yang hadir maupun tidak hadirdalam rapat.
6. Mengundurkan diri dari jabatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Saham, dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri. Dalam hal tanggal efektif tidak dicantumkan atau belum terdapat keputusan RUPS, anggota Direksi dinyatakan berhenti pada tanggal yang diminta atau setelah 30 hari sejak surat pengunduran diri diterima.

2. Obtaining salary, allowances, facilities, and post-employment benefits which types and amounts are determined by the GMS with due regard to statutory regulations.
3. Receiving performance bonus for achievement if the Company recorded a certain level of profit, with the amount determined by the GMS. Proposed performance incentives for the Board of Directors are first submitted to the Board of Commissioners to obtain approval before being presented to the GMS.
4. Utilizing Company infrastructure and facilities as long as it relates to the execution of duties and the interest of the Company, in accordance with internal policies and prevailing regulations.
5. Receiving copies of the minutes of Board of Directors meetings, both for members of the Board of Directors present or absent from the meeting.
6. Resigning from office by submitting a written notice to the Shareholders, with copies to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, at the latest 30 days prior to the effective date of resignation. In the event that the effective date is not stated or a GMS resolution has not been passed, the member of the Board of Directors is declared to have resigned on the requested date or 30 days after the resignation letter is received.

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Direksi melakukan pembagian tugas berdasarkan bidang kerja masing-masing anggota untuk mendukung efektivitas pengurusan Perseroan. Pembidangan ini menjadi dasar koordinasi dalam pelaksanaan strategi, pengelolaan operasional, pengambilan keputusan, dan pencapaian target kinerja.

SEPARATION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors performs assigned duties based on the respective expertise of each member to support the effectiveness of Company management. The division serves as the basis for coordination in the execution of strategy, operational management, decision-making, and the achievement of performance targets.

Meskipun tugas telah dibagi berdasarkan fungsi, Direksi tetap bertanggung jawab secara kolegial atas seluruh tindakan dan keputusan pengurusan Perseroan. Rincian pembidangan tugas Direksi disajikan sebagai berikut:

Although duties have been assigned based on function, the Board of Directors remains collegially responsible for all management actions and decisions of the Company. The separation of duties for the Board of Directors are presented as follows:

Pembidangan Tugas Direksi
Separation of Duties of the Board of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Pembidangan Tugas *Separation of Duties*
Heru Widodo	Direktur Utama President Director	Memimpin Perusahaan dengan 5 (lima) orang Direktur. Direktur Utama juga memimpin Direktorat Utama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Menetapkan visi, misi, rencana jangka panjang, dan jangka menengah Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Menetapkan arah, kebijakan, strategi, dan rencana strategis Perusahaan; 3. Membangun dan menjalin hubungan strategis beserta melaksanakan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan (termasuk regulator, pemerintah daerah, masyarakat, beserta pemegang saham); 4. Mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh Direksi dalam memimpin direktoratnya masing-masing untuk memastikan tercapainya rencana strategis Perusahaan; 5. Menetapkan keputusan terkait kegiatan investasi Perusahaan yang menggunakan permodalan negara untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas Perusahaan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham; 6. Memastikan pelaksanaan tata kelola, sistem manajemen perusahaan, *quality assurance* manajemen proyek serta kepatuhan Perusahaan. Leads the Company supported by 5 (five) Directors. The President Director also leads the Main Directorate, with duties and responsibilities outlined as follows: 1. Determining the vision, mission, long and medium-term plans of the Company in accordance with prevailing regulations; 2. Determining the direction, policies, strategy, and strategic plans of the Company; 3. Building and fostering strategic relationships as well as executing communication with all stakeholders of the Company (including regulators, local governments, communities, and shareholders); 4. Directing and coordinating the entire Board of Directors in leading their respective directorates to ensure the achievement of the Company's strategic plans; 5. Establishing decisions related to the Company's investment activities that utilize state equity to improve the revenue and profitability and provide added value to shareholders; 6. Ensuring the implementation of governance, management systems, project management quality assurance, and compliance.
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	Mendukung Direktur Utama dalam mengelola dan mengarahkan operasional Perusahaan, serta memastikan pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Perusahaan. Wakil Direktur Utama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan operasional Perusahaan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas; 2. Membantu dalam pengembangan dan implementasi strategi bisnis yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan; 3. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional bersama Direktur Utama dan jajaran Direksi lainnya; 4. Memantau kinerja Perusahaan dan memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan; 5. Membangun dan memelihara hubungan baik dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat; 6. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi operasional dan keberlanjutan Perusahaan; 7. Mendukung inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada pelanggan. Supports the President Director in managing and directing the operations of the Company, as well as ensuring the achievement of the vision, mission, and strategic objectives of the Company. The Deputy President Director has the following duties and functions: 1. Supervising and coordinating the operational activities of the Company to ensure efficiency and effectiveness; 2. Assisting in the development and implementation of business strategies aligned with the Company's vision and mission; 3. Participating in strategic and operational decision-making together with the President Director and other Directors; 4. Monitoring Company performance and ensuring the achievement of set targets; 5. Building and maintaining good relationships with external stakeholders, including the government, business partners, and the community; 6. Identifying, assessing, and managing risks that could affect the operations and sustainability of the Company; 7. Supporting digital transformation initiatives to improve operational efficiency and customer service.

Pembidangan Tugas Direksi

Separation of Duties of the Board of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Pembidangan Tugas *Separation of Duties*
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation	Memimpin dan mengarahkan operasional Perusahaan serta mengelola inisiatif transformasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Perusahaan. Direktur Operasi dan Transformasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mengawasi seluruh kegiatan operasional Perusahaan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi operasional; 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi transformasi bisnis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing Perusahaan; 3. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional; 4. Memimpin proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan operasional dan transformasi Perusahaan; 5. Memantau dan mengevaluasi kinerja operasional serta memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan; 6. Mendorong penggunaan teknologi terbaru untuk mendukung transformasi digital dan operasional Perusahaan; 7. Bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan Perusahaan; 8. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional dan transformasi Perusahaan. Leads and directs the operations of the Company, and manages transformation initiatives to improve the Company's efficiency and competitiveness. The Director of Operations and Transformation has the following duties and responsibilities: 1. Supervising all operational activities of the Company to ensure smooth and efficient operations; 2. Developing and implementing business transformation strategies to improve the performance and competitiveness of the Company; 3. Identifying and implementing process improvements to improve operational efficiency and effectiveness; 4. Leading strategic projects related to the operations and transformation of the Company; 5. Monitoring and evaluating operational performance and ensuring the achievement of set targets; 6. Promoting the use of the latest technology to support the digital and operational transformation of the Company; 7. Collaborating with other departments to ensure good synergy and coordination in achieving Company objectives; 8. Identifying and managing risks related to the operations and transformation of the Company.
Nana Sutisna	Direktur Teknik Director of Engineering	Memimpin Direktorat Teknik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas Perusahaan sesuai dengan rencana strategis jangka panjang Perusahaan; 2. Mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan operasional armada dan pelabuhan, termasuk aspek manajemen teknik armada dan pelabuhan, manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan (K2L), dan pengadaan armada; 3. Melakukan pengawasan aset-aset produksi termasuk dalam permintaan, perawatan, perpindahan, penghapusan, asuransi dan dokumentasi serta sertifikasi aset; 4. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan manajemen armada dan pelabuhan sesuai dengan pemenuhan standar yang ditetapkan; 5. Menetapkan keputusan terkait rencana strategis jangka menengah sesuai dengan RJPP; dan 6. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam teknik dan fasilitas Perusahaan. Leading the Engineering Directorate, with the following key duties and responsibilities: 1. Directing and supervising the implementation of planning, development, and construction of the Company's infrastructure and facilities in accordance with the Company's long-term strategic plan; 2. Directing and supervising the operational strategy for fleet and port operations, including technical management of fleets and ports, HSE (health, safety, and environmental) management, and fleet procurement; 3. Supervising production assets, including requests, maintenance, transfer, disposal, insurance, documentation, and asset certification; 4. Overseeing all fleet and port management activities and the fulfillment of established standards; 5. Determining decisions related to medium-term strategic plans as set in the LTP; and 6. Resolving strategic challenges and constraints faced by the Company's engineering and facilities functions.

Pembidangan Tugas Direksi

Separation of Duties of the Board of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Pembidangan Tugas *Separation of Duties*
Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan Director of Finance	Memimpin Direktorat Keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Menetapkan strategi dan kebijakan serta mengkoordinasi dan mengevaluasi penyusunan RKAP sesuai RJPP, menyediakan informasi keuangan dan KPI, pengendalian risiko keuangan, pengoptimalisasian keuangan, pemenuhan kewajiban terhadap pihak eksternal serta internal, penyelesaian laporan keuangan, proses pencatatan aset, pengelolaan teknologi informasi; 2. Menetapkan keputusan terkait RKAP dan informasi sesuai dengan RJPP; 3. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan dan informasi Perseroan. Leading the Finance Directorate, which has the following key duties and responsibilities: 1. Establishing strategies and policies, as well as coordinating and evaluating the preparation of the WPB in accordance with the LTP, providing financial information and KPIs, controlling financial risks, optimizing financial management, fulfilling obligations to external and internal parties, completing financial reports, managing asset recording processes, and overseeing information technology management; 2. Making decisions related to the WPB and information in line with the LTP; 3. Resolving strategic challenges and constraints encountered in the implementation of the Company's financial and information management processes.
Rudi Sunarko	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of HC & Corporate Services	Memimpin Direktorat Sumber Daya Manusia & Layanan Korporasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Menetapkan strategi dan kebijakan pelaksanaan proses pengelolaan sumber daya manusia dan umum, dan mengawasi implementasi strategi untuk memastikan tingkat daya saing organisasi; 2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta logistik agar dilaksanakan sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku, efisien, efektif, adil, dan wajar; 3. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pengelolaan sumber daya manusia dan umum; 4. Memberikan arahan terkait dengan penanganan permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan. Leading the Human Resources & Corporate Services Directorate, with the following key duties and responsibilities: 1. Establishing strategies and policies for the implementation of human resources and general affairs management processes, and supervising the implementation of such strategies to ensure the organization's competitiveness; 2. Directing and supervising the implementation of procurement of goods and services, as well as logistics, to ensure compliance with the Company's prevailing regulations and that it is carried out efficiently, effectively, fairly, and reasonably; 3. Resolving strategic challenges and constraints encountered in the implementation of human resources and general affairs management processes; and 4. Providing direction on the handling of legal and regulatory matters.

PERSYARATAN DIREKSI

Calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta persyaratan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas, dan karakteristik usaha Perseroan. Persyaratan tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa anggota Direksi memiliki kapasitas hukum, integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang memadai dalam menjalankan fungsi pengurusan Perseroan.

REQUIREMENTS FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Candidates for the Board of Directors must meet the formal requirements as outlined in the Articles of Association, prevailing regulations, and other requirements tailored to the needs, complexity, and business characteristics of the Company. These requirements serve as the basis to ensure that members of the Board of Directors have the legal capacity, integrity, competence, and adequate track record in executing the management function of the Company.

Persyaratan anggota Direksi meliputi:

1. Persyaratan formal, yaitu calon anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan umum dinyatakan pailit; atau
   c. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Persyaratan lain, yaitu persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan tersebut dibuktikan melalui dokumen pernyataan dan/atau surat keterangan dari calon anggota Direksi, yang disampaikan oleh calon anggota Direksi dan disimpan oleh Perseroan sebagai bagian dari dokumentasi tata kelola perusahaan.

The requirements for members of the Board of Directors include:

1. Formal requirements, namely that candidates for the Board of Directors must be individuals who are legally competent to perform legal acts and within a period of 5 years prior to their appointment have never:
   a. been declared bankrupt;
   b. become a member of the Board of Directors, Commissioners, or Supervisory found guilty of causing a company or public corporation to be declared bankrupt; or
   c. been convicted of a criminal offense that caused financial loss to the state and/or is related to the financial sector.
2. Other requirements, namely additional requirements specified in the Articles of Association and prevailing statutory regulations, considering the needs and nature of the Company's business.
3. Fulfillment of these requirements is proven through statement documents and/or certificates from the candidate for the Board of Directors, submitted by the candidate and kept by the Company as part of corporate governance documentation.

MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Ketentuan mengenai masa jabatan anggota Direksi diatur sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
2. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila yang bersangkutan:
   a. masa jabatannya berakhir;
   b. mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
   c. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
   d. meninggal dunia; atau
   e. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.
3. Pemberhentian sewaktu-waktu oleh RUPS dapat dilakukan apabila anggota Direksi:
   a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Kontrak Manajemen;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
   c. melanggar Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Provisions on the term of office for members of the Board of Directors are as follows:

1. The term of office for members of the Board of Directors is set for 5 years and they may be reappointed for 1 subsequent term of office.
2. The term of office of a member of the Board of Directors ends if the respective person:
   a. has their term of office expire;
   b. resigns in accordance with the provisions of the Articles of Association;
   c. loses Indonesian citizenship;
   d. passes away; or
   e. is dismissed at any time based on a GMS resolution.
3. Dismissal at any time by the GMS can be carried out if the member of the Board of Directors:
   a. fails to fulfill the obligations agreed upon in the Management Contract;
   b. cannot execute their duties and responsibilities optimally;
   c. violates the Articles of Association and/or prevailing statutory regulations;
   d. is involved in actions that cause loss to the Company and/or the State;

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
f. memiliki alasan lain yang ditetapkan oleh RUPS.

4. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
5. Keputusan pemberhentian dilakukan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri.
6. Dalam hal proses pembelaan diri masih berlangsung, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara. Selama masa pemberhentian sementara, Dewan Komisaris menunjuk anggota Direksi lainnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasan pemberhentian secara jelas.
8. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan maupun mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

e. is declared guilty based on a court decision that has obtained permanent legal force; or
f. has other reasons determined by the GMS.

4. The plan for dismissal at any time is submitted in writing by the Shareholders to the respective member of the Board of Directors.
5. The dismissal resolution is made after the respective member of the Board of Directors is given an opportunity to present a self-defense.
6. In the event that the self-defense process is still ongoing, the respective member of the Board of Directors may be temporarily suspended. During the temporary suspension period, the Board of Commissioners appoints another member of the Board of Directors to execute the duties and responsibilities of the suspended member.
7. The Board of Commissioners is authorized to temporarily suspend a member of the Board of Directors by clearly stating the reasons for the suspension.
8. Members of the Board of Directors who are temporarily suspended are not authorized to execute the management of the Company or represent the Company, both within and outside a court of law.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Rincian rangkap jabatan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

CONCURRENT POSITIONS ON THE BOARD OF DIRECTORS

Details of the dual positions of the Company's Directors are as follows:

Rangkap Jabatan Direksi
Concurrent Positions on the Board of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Positions*	Jabatan Pada Perusahaan/ Instansi Lain *Position In Other Companies/ Institutions*	Nama Perusahaan/Instansi Lain *Name Of Other Companies/ Institutions*
Heru Widodo	Direktur Utama President Director	Tidak ada | None	Tidak ada | None
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	Tidak ada | None	Tidak ada | None
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation	Tidak ada | None	Tidak ada | None
Nana Sutisna	Direktur Teknik Director of Engineering	Tidak ada | None	Tidak ada | None
Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan Director of Finance	Tidak ada | None	Tidak ada | None
Rudi Sunarko	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of HC & Corporate Services	Tidak ada | None	Tidak ada | None

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2025

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijalankan sesuai dengan arah strategis Perseroan yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2025. Direksi bertanggung jawab memastikan pengelolaan Perseroan berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan mandat Pemegang Saham, baik dalam aspek operasional, keuangan, pelayanan, pengembangan usaha, tata kelola, maupun keberlanjutan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menetapkan berbagai keputusan yang mendukung pelaksanaan strategi dan pengelolaan Perseroan, antara lain terkait:

1. Pelaksanaan layanan Angkutan Lebaran Tahun 2025 di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
2. Pelaksanaan layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026;
3. Penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, serta progres penerapan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR);
4. Penetapan dan/atau pembaruan kebijakan operasional untuk mendukung keselamatan, keandalan layanan, dan kelancaran penyeberangan;
5. Pengembangan dan optimalisasi aset Perseroan, termasuk dukungan terhadap pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC);
6. Penguatan sistem penilaian kinerja, pengelolaan talenta, serta pengembangan sumber daya manusia;
7. Implementasi program digitalisasi dan peningkatan efektivitas proses bisnis Perseroan;
8. Penguatan pengelolaan entitas anak, portofolio usaha, dan sinergi Grup ASDP;
9. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); dan
10. Tindak lanjut arahan Pemegang Saham, keputusan RUPS, serta rekomendasi Dewan Komisaris.

Selain itu, Direksi juga melaksanakan penyempurnaan peraturan internal dan keputusan Direksi melalui telaah serta penyusunan regulasi internal dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. Pada tahun 2025, terdapat 57 Keputusan Direksi yang telah selesai, antara lain terkait revisi kebijakan SDM dan penetapan tarif angkutan penyeberangan. Selain itu, terdapat 52 Keputusan Direksi yang masih dalam proses, antara lain terkait layanan loker bagasi dan tarif layanan

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

The duties and responsibilities of the Board of Directors is executed in accordance with the Company strategic direction set out in the Long-Term Plan (LTP), the Work Program and Budget (WPB), and the Key Performance Indicators (KPI) for 2025. The Board of Directors is responsible for ensuring that the management of the Company runs effectively, measureably, and in line with the mandate of the Shareholders across aspects of operational, financial, service, business development, governance, and sustainability.

Throughout 2025, the Board of Directors issued various decisions supporting the implementation of strategy and management of the Company, including those related to:

1. The implementation of the 2025 Eid Transport services within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
2. The implementation of the 2025/2026 Nataru event transport services;
3. Strengthening governance, risk management, internal control, and the progress of implementing Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR);
4. Establishing and/or updating operational policies to support safety, service reliability, and smooth ferry transportation;
5. Developing and optimizing Company assets, including support for the development of Bakauheni Harbour City (BHC);
6. Strengthening the performance appraisal system, talent management, and human resources development;
7. Implementing digitalization and improving the effectiveness of business processes;
8. Strengthening the management of subsidiaries, business portfolios, and the synergy of the ASDP Group;
9. Implementing Social and Environmental Responsibility (CSER) programs; and
10. Following up on Shareholders' directives, GMS resolutions, and recommendations from the Board of Commissioners.

In addition, the Board of Directors also improved internal regulations and Board of Directors Decisions through reviews and drafting of internal regulations with reference to applicable procedures. In 2025, there were 57 BoD Decisions completed, including those related to the revision of HR policies and the determination of ferry transportation tariffs. As many as 52 BoD Decisions are progressing, including those related to baggage locker services and its tariffs on

loker bagasi lintasan Merak-Bakauheni serta pengadaan kapal baru di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Direksi juga menetapkan 34 Surat Keputusan Direksi yang telah selesai, antara lain mengenai penetapan Tim Agen Perubahan atau *Agent of Change* dalam implementasi dan internalisasi budaya perusahaan serta Tim Restrukturisasi Anak Perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Di samping itu, terdapat 53 Surat Keputusan Direksi yang masih dalam proses, antara lain terkait penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap tidak produktif serta klasifikasi dan standar pengawakan kapal pada KMP Gajah Mada di Cabang Balikpapan.

the Merak-Bakauheni route, as well as the procurement of new vessels within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

The Board of Directors also completed 34 BoD Decrees, including those relating to the assignment of the Agent of Change Team in the implementing and internalizing corporate culture and the Subsidiary Restructuring Team of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Additionally, there are 53 BoD Decrees in progress, including those related to the write-off and transfer of non-productive fixed assets and the classification and standardization of vessel manning on KMP Gajah Mada at the Balikpapan Branch.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Setiap anggota Direksi menyampaikan pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan secara berkala setiap tahun melalui penandatanganan Pakta Integritas. Pernyataan tersebut menjadi bentuk komitmen Direksi untuk menjalankan fungsi pengurusan Perseroan secara profesional, objektif, independen, serta mengutamakan kepentingan Perseroan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

MANAGEMENT OF DIRECTORIAL CONFLICTS OF INTEREST

Each member of the Board of Directors submits a statement of independence and free from conflicts of interest annually by signing an Integrity Pact. This statement represents the commitment of the Board of Directors to execute the management function of the Company professionally, objectively, independently, and prioritizing the interests of the Company in accordance with Good Corporate Governance principles.

Penandatanganan Pakta Integritas Direksi
Signing of the Board of Directors Integrity Pact

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Tanggal Penandatanganan *Date of Signing*
Heru Widodo	Direktur Utama | President Director	5 Desember 2025 | 5 December 2025
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama | Deputy President Director	5 Desember 2025 | 5 December 2025
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi & Transformasi | Director of Operations & Transformation	5 Desember 2025 | 5 December 2025
Nana Sutisna	Direktur Teknik | Director of Engineering	5 Desember 2025 | 5 December 2025
Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan | Director of Finance	5 Desember 2025 | 5 December 2025
Rudi Sunarko	Direktur SDM dan Layanan Korporasi | Director of HC & Corporate Services	5 Desember 2025 | 5 December 2025

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Afiliasi merupakan hubungan yang dapat dimiliki oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan. Pengungkapan hubungan afiliasi dilakukan sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, independensi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

AFFILIATE RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS

An affiliation is a relationship held by members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Major and/or Controlling Shareholders of the Company. Its disclosure is part of implementation of transparency, independence, and good corporate governance principles.

Hubungan afiliasi yang diungkapkan mencakup:

1. Hubungan afiliasi antaranggota Direksi.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan.

Rincian hubungan afiliasi anggota Direksi Perseroan disajikan dalam tabel berikut:

The disclosed affiliate relationships include:

1. Affiliate relationships among members of the Board of Directors.
2. Affiliate relationships between members of the Board of Directors and of Commissioners.
3. Affiliate relationships between members of the Board of Directors and Major and/or Controlling Shareholders of the Company.

The affiliate relationships of the Company's Board of Directors are detailed in the following table:

Hubungan Keuangan, Keluarga, dan Kepengurusan Direksi
Financial, Familial, and Managerial Relationships of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationships with						Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain *Managerial Relationship with Other Companies*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Heru Widodo	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Nana Sutisna	Direktur Teknik Director of Engineering		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan Director of Finance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rudi Sunarko	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of HC & Corporate Services		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Setiap anggota Direksi telah menyampaikan dan mengisi daftar khusus yang memuat informasi kepemilikan saham, baik atas nama pribadi maupun keluarga, pada Perseroan dan/atau perusahaan lain, termasuk pernyataan dalam hal tidak memiliki saham. Daftar khusus tersebut diperbarui secara berkala setiap akhir tahun, sedangkan setiap perubahan data wajib disampaikan kepada Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Each member of the Board of Directors has submitted and filled out a special register containing information on share ownership, both in their personal name and family name, in the Company and/or other companies, including statements in the event that they do not hold shares. The special register is updated periodically at the end of every year, while any data changes must be submitted to the Company in accordance with prevailing regulations.

Hingga 31 Desember 2025, seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham, baik pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) maupun pada perusahaan lainnya.

As of 31 December 2025, no members of the Board of Directors hold share ownership, either in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) or in other companies.

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Direktor
Company Share Ownership by the Board of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kepemilikan Saham *Shares Ownership*	
		ASDP	Perusahaan Lain *Other Companies*
Heru Widodo	Direktur Utama | President Director	Tidak Ada | None	Tidak Ada | None
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama | Deputy President Director	Tidak Ada | None	Tidak Ada | None
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi & Transformasi | Director of Operations & Transformation	Tidak Ada | None	Tidak Ada | None
Nana Sutisna	Direktur Teknik | Director of Engineering	Tidak Ada | None	Tidak Ada | None
Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan | Director of Finance	Tidak Ada | None	Tidak Ada | None
Rudi Sunarko	Direktur SDM dan Layanan Korporasi | Director of HC & Corporate Services	Tidak Ada | None	Tidak Ada | None

INDEPENDENSI DIREKSI

Independensi Direksi merupakan prinsip penting dalam memastikan pengurusan Perseroan dilakukan secara objektif, profesional, dan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Untuk menjaga independensi tersebut, Perseroan menetapkan bahwa tidak ada pihak lain selain Direksi yang dapat melakukan atau turut campur dalam pengurusan Perseroan.

Setiap anggota Direksi juga dilarang melakukan aktivitas atau memiliki kepentingan yang dapat mengganggu independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengurusan. Dengan ketentuan tersebut, Direksi diharapkan dapat mengambil keputusan secara bebas, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The independence of the Board of Directors is an essential principle in ensuring that the management of the Company is carried out objectively, professionally, and solely for the interests of the Company. To maintain this independence, the Company stipulates that no party other than the Board of Directors may conduct or interfere in the management of the Company.

Each member of the Board of Directors is also prohibited from engaging in activities or having interests that could disrupt independence, objectivity, and professionalism in executing management duties. With these provisions, the Board of Directors is expected to make impartial and responsible decisions, in line with Good Corporate Governance principles.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Umum

Rapat Direksi merupakan forum resmi Direksi dalam membahas, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terkait pengurusan Perseroan. Rapat Direksi ASDP meliputi:

1. Rapat Internal Direksi;
2. Rapat Pengurus; dan
3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.

Prosedur Rapat

1. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.
2. Rapat Direksi dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila:
   a. dianggap perlu oleh 1 atau lebih anggota Direksi;
   b. terdapat permintaan tertulis dari 1 atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   c. diminta oleh Pemegang Saham terbesar dengan mencantumkan agenda rapat.
3. Pelaksanaan rapat Direksi mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Direksi.
4. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan, paling lambat 3 hari sebelum rapat diselenggarakan.
5. Undangan rapat memuat agenda, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
6. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat kegiatan usaha Perseroan, atau lokasi lain di wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
7. Dalam hal seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah, pemanggilan rapat tidak disyaratkan dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.
8. Rapat Direksi dapat dilaksanakan melalui sarana komunikasi jarak jauh, termasuk telekonferensi, konferensi video, atau media komunikasi lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat berpartisipasi secara efektif.
9. Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan atau fungsi lain yang ditunjuk oleh Direksi dan dapat disampaikan bersamaan dengan undangan rapat.
10. Jumlah rapat Direksi serta tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

General Policy

A Board of Directors Meeting is the official forum for the Directors to discuss, evaluate, and make decisions related to the management of the Company. ASDP Board of Directors Meeting covers:

1. Internal Meetings of the Board of Directors;
2. Management Meetings; and
3. Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors.

Meeting Procedures

1. Board of Directors Meetings are held periodically, at least once a month.
2. Board of Directors Meetings may be held at any time if:
   a. deemed necessary by 1 or more members of the Board of Directors;
   b. there is a written request from 1 or more members of the Board of Commissioners; or
   c. requested by the largest Shareholder by stating the meeting agenda.
3. The execution of Board of Directors meetings refers to the Annual Work Program and Budget of the Board of Directors.
4. The notice for a Board of Directors meeting is in writing by the member of the Board of Directors authorized to represent the Company, minimum of 3 days prior to the meeting.
5. The meeting notice contains the agenda, date, time, and venue of the meeting.
6. Board of Directors Meetings are held at the domicile of the Company, the place of the Company's business activities, or other locations within the territory of the Republic of Indonesia determined by the Board of Directors.
7. In the event that all members of the Board of Directors are present or legally represented, a meeting notice is not required and the meeting can make valid and binding decisions.
8. Board of Directors Meetings may be conducted through long-distance communication means, including teleconferencing, video conferencing, or other communication media that allow all meeting participants to participate effectively.
9. Meeting materials are prepared by the Corporate Secretary or other function appointed by the Board of Directors and may be delivered together with the meeting invitation.
10. The number of Board of Directors meetings and the attendance rate of each of Directors are disclosed in the Company's Annual Report.

Ketentuan Kehadiran dan Kuorum Rapat

1. Sekretaris Perusahaan atau fungsi lain yang ditunjuk menerima dan mengelola bahan, dokumen, serta laporan manajemen yang akan digunakan sebagai materi rapat Direksi.
2. Bahan rapat disampaikan kepada Direktur Utama untuk dipelajari dan diberikan arahan tindak lanjut.
3. Sekretaris Perusahaan atau fungsi lain yang ditunjuk mengedarkan agenda rapat beserta bahan pendukung kepada seluruh anggota Direksi untuk memperoleh masukan.
4. Setiap anggota Direksi wajib membaca dan mempelajari agenda serta bahan pendukung sebelum rapat diselenggarakan.
5. Setelah masukan diterima, Sekretaris Perusahaan atau fungsi lain yang ditunjuk menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat Direksi.
6. Dalam hal rapat Direksi mengundang pihak lain, undangan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan atau fungsi lain yang ditunjuk. Apabila pihak yang diundang berasal dari manajemen 1 atau 2 tingkat di bawah Direksi, undangan dilakukan dengan sepengetahuan Direktur terkait.
7. Peserta rapat menerima undangan dan bahan rapat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Dalam hal rapat Direksi dilaksanakan melalui konferensi jarak jauh:
   a. anggota Direksi yang berpartisipasi dianggap hadir untuk pemenuhan kuorum dan pengambilan keputusan;
   b. lokasi pimpinan rapat dianggap sebagai tempat penyelenggaraan rapat; dan
   c. risalah rapat disampaikan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

RAPAT PENGURUS

Sepanjang tahun 2025, Rapat Pengurus telah dilaksanakan sebanyak 62 kali dengan tingkat kehadiran Direksi sebesar 100% pada seluruh rapat. Capaian kehadiran tersebut mencerminkan komitmen Direksi dalam menjaga efektivitas koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pengurusan Perseroan secara kolektif.

Meeting Attendance and Quorum Requirements

1. The Corporate Secretary or another appointed function receives and manages materials, documents, and management reports to be used as Board of Directors meeting materials.
2. Meeting materials are submitted to the President Director to be studied and given follow-up directives.
3. The Corporate Secretary or another appointed function circulates the meeting agenda along with supporting materials to all members of the Board of Directors to obtain feedback.
4. Each member of the Board of Directors must read and study the agenda and supporting materials before the meeting is held.
5. After feedback is received, the Corporate Secretary or another appointed function prepares and delivers the invitation to the Board of Directors meeting.
6. In the event that a Board of Directors meeting invites other parties, the invitation is prepared by the Corporate Secretary or another appointed function. If the invited party is executive 1 or 2 levels below the Board, the relevant Director is informed of such invitation.
7. Meeting participants receive the invitation and meeting materials before the meeting is held.
8. In the event that a Board of Directors meeting is conducted via long-distance conference:
   a. participating members of the Board of Directors are considered present for quorum fulfillment and decision-making;
   b. the location of the meeting chairperson is considered the meeting venue; and
   c. minutes of the meeting are delivered and signed by all members of the Board of Directors in line with prevailing regulations.

MANAGEMENT MEETINGS

Throughout 2025, Management Meetings have been held 62 times with a Board of Directors attendance rate of 100% across all meetings. This attendance achievement reflects the commitment of the Board of Directors to maintaining the effectiveness of coordination, decision-making, and the collective execution of Company management.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 kali sebagai forum koordinasi, pembahasan kinerja, serta penyampaian informasi atas pengelolaan Perseroan. Rapat tersebut membahas berbagai agenda strategis, termasuk kinerja operasional dan keuangan, realisasi RKAP, pengelolaan risiko, tindak lanjut arahan Pemegang Saham, serta isu-isu penting yang memerlukan pembahasan bersama dengan Dewan Komisaris. Informasi mengenai agenda rapat dan tanggal pelaksanaan dapat dilihat dalam Bab Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Throughout 2025, the Board of Directors held joint meetings with the Board of Commissioners 12 times as a forum for coordination, performance discussion, and submission of information on the Company management. The meetings discussed various strategic agendas, including operational and financial performance, WPB achievements, risk management, follow-up on Shareholders' directives, and critical issues requiring joint discussion with the Board of Commissioners. Information on the meeting agendas and dates of execution is presented in Chapter Corporate Governance, Sub-Chapter Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors in this Annual Report.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 76 kali, terdiri dari 62 kali Rapat Pengurus, 12 kali Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan 2 kali RUPS. Rincian agenda, tanggal pelaksanaan, serta tingkat kehadiran masing-masing anggota disajikan pada tabel berikut:

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Throughout 2025, the Board of Directors held meetings 76 times, consisting of 62 Management Meetings, 12 meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, and 2 GMS. The agenda, dates, and the attendance rate of each member are presented in the following table:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi Keseluruhan
Overall Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Pengurus *Management Meetings*			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi *Joint Meetings of the Boards of Commissioners and Directors*			RUPS *GMS*		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*			Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*			Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*	Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*	Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*
Heru Widodo	Direktur Utama President Director	62	62	100%	12	12	100%	2	2	100%
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	62	62	100%	12	12	100%	2	2	100%
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation	62	62	100%	12	12	100%	2	2	100%
Kusnadi C. Wijaya*	Direktur Teknik dan Fasilitas Director of Engineering and Facilities	46	46	100%	10	10	100%	2	2	100%
Wahyu Wibowo*	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of Human Capital and Corporate Services	46	46	100%	10	10	100%	2	2	100%

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi Keseluruhan
Overall Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Pengurus *Management Meetings*			Rapat Gabungan Dewan Komisaris *dengan Direksi* *Joint Meetings of the Boards of Commissioners and Directors*			RUPS *GMS*		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*			Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*			Jumlah dan Persentasi Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*	Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*	Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*
Djunia Satriawan*	Direktur Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko Director of Finance, IT, and Risk Management	46	46	100%	10	10	100%	2	2	100%
Nana Sutisna**	Direktur Teknik Director of Engineering	16	16	100%	2	2	100%	-	-	-
Bunga Herlina Oktaviyanti**	Direktur Keuangan Director of Finance	16	16	100%	2	2	100%	-	-	-
Rudi Sunarko**	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of Human Capital and Corporate Services	16	16	100%	2	2	100%	-	-	-

*Berhenti menjabat per 30 Oktober 2025 | Term of office ended on 30 October 2025
**Mulai menjabat per 30 Oktober 2025 | Took office on 30 October 2025

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Perseroan memiliki kebijakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai profil Perseroan, kegiatan usaha, tata kelola, struktur organisasi, strategi, risiko, serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program pengenalan dapat dilaksanakan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak, pengkajian dokumen, maupun metode lain yang relevan dengan kebutuhan Perseroan. Materi program pengenalan paling sedikit mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan;
2. Gambaran umum Perseroan, termasuk tujuan, sifat dan lingkup kegiatan usaha, kinerja keuangan dan operasional, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, serta isu strategis lainnya;

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

The Company has an induction program policy for newly appointed members of the Board of Directors as regulated in the Board Manual. This program aims to provide a comprehensive understanding regarding the profile of the Company, business activities, governance, organizational structure, strategies, risks, as well as the scope of duties and responsibilities of the Board of Directors.

The induction program may be implemented through presentations, meetings, visits to Company work units and/or Subsidiaries, document reviews, or other methods relevant to the needs of the Company. The induction program materials at a minimum include:

1. The implementation of Good Corporate Governance principles within the Company;
2. A general overview, including objective, characteristic and scope of business activities, financial and operational performance, strategy, short and long-term plans, competitive position, risks, and other strategic issues of the Company;

3. Informasi mengenai kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan Audit Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk peran Komite Audit; dan
4. Penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi baru. Program pengenalan dilaksanakan pada 30 Oktober 2025 bagi Nana Sutisna, Rudi Sunarko dan Bunga Herlina Oktaviyanti.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, anggota Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengurusan Perseroan. Program tersebut diarahkan pada penguatan kapabilitas kepemimpinan, tata kelola, manajemen risiko, strategi bisnis, operasional, serta kompetensi lain yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan dan pengembangan ASDP. Rincian pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

3. Information regarding delegated authorities, Internal Audit and External Audit, internal control systems and policies, including the role of the Audit Committee; and
4. Explanations regarding the duties, responsibilities, authorities, as well as prohibitions for the Boards of Commissioners and Directors.

In 2025, the Company organizes an induction program for new members of the Board of Directors. The induction program was implemented on 30 October 2025 for Nana Sutisna, Rudi Sunarko, and Bunga Herlina Oktaviyanti.

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout Financial Year 2025, members of the Board of Directors participated in various training and competence development programs to support the effective execution of the Company's management function. The programs were directed toward strengthening leadership capabilities, governance, risk management, business strategy, operations, and other competencies relevant to the management and development needs of ASDP. The details of training and/or competence improvement for members of the Board of Directors are presented in the following table:

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Anggota Direksi
Training and/or Competency Development of Members of the Board of Directors

Nama *Name*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Training and Competency Development*	Waktu dan Tempat *Date and Place*	Penyelenggara *Organizer*
Heru Widodo	• *Sustainability Awareness Program* • *Executive Briefing Program* • *Quick Response Governance Program* • *Strong Character & Courageous Leadership Program for Board of Director* • *Next Practice Program ASDP x National University of Singapore* (NUS)	2025	-
Yossianis Marciano	*Qualifield Risk Governance Profesional* (QRGP)	2025	-
Rio Theodore Natalianto Lasse	• *Qualifield Risk Governance Profesional (QRGP)* • *Next Practice Program* ASDP *x National University of Singapore* (NUS)	2025	-
Nana Sutisna	• Pelatihan | Training *Strong Character and Courageous Leadership* BOD • Pelatihan | Training *Digital Leaders Insight: From AI to ROI* • *In-House Training Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) • *In-House Training Executive Briefing* • Pelatihan | Training *Sustainability Awareness*	2025	-
Bunga Herlina Oktaviyanti	ESG *Sharing Session for Board of Directors and Board Commissioners* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2025	-
Rudi Sunarko	*Executive Development Program*	2025	-

PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA KOLEGIAL

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala melalui evaluasi atas pencapaian target Perseroan dan pelaksanaan tugas pengurusan selama tahun buku. Proses penilaian dilakukan dengan memperhatikan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI), pencapaian RKAP, pelaksanaan strategi bisnis, kinerja operasional dan keuangan, serta tindak lanjut atas keputusan RUPS, arahan Pemegang Saham, dan rekomendasi Dewan Komisaris.

Prosedur penilaian kinerja Direksi mencakup:

1. Penetapan target kinerja Direksi dalam Kontrak Manajemen dan/atau KPI Perseroan.
2. Pemantauan realisasi kinerja secara berkala melalui laporan manajemen, laporan keuangan, dan laporan pelaksanaan program strategis.
3. Evaluasi atas pencapaian target operasional, keuangan, pengembangan usaha, tata kelola, manajemen risiko, dan keberlanjutan.
4. Penelaahan oleh Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh Direksi.
5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria penilaian kinerja Direksi digunakan untuk menilai efektivitas Direksi dalam mengelola Perseroan secara kolegial. Penilaian tidak hanya berfokus pada pencapaian angka kinerja, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan strategi, kepatuhan, tata kelola, dan keberlanjutan usaha. Kriteria penilaian kinerja Direksi antara lain meliputi:

1. Pencapaian KPI Perseroan dan target dalam Kontrak Manajemen.
2. Realisasi RKAP, termasuk kinerja operasional, keuangan, investasi, dan pengembangan usaha.
3. Efektivitas pelaksanaan strategi dan program prioritas Perseroan.
4. Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan RUPS, arahan Pemegang Saham, dan peraturan perundang-undangan.
5. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan.
6. Kualitas pengambilan keputusan Direksi secara kolegial.

COLLEGIAL PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Procedures for Conducting Performance Assessment of the Board of Directors

The Board of Directors' performance is assessed periodically through an evaluation of the achieved Company targets and the execution of management duties during the year. The assessment is carried out with due regard to the realization of KPI, WPB, business strategy implementation, operational and financial performance, as well as the follow-up on GMS resolution, Shareholders' directive, and recommendation from the Board of Commissioners.

The performance assessment procedures include:

1. Setting performance targets in the Management Contract and/or Company KPIs.
2. Monitoring performance realization periodically through management reports, financial reports, and work reports of strategic programs.
3. Evaluating the achievement of operational, financial, business development, governance, risk management, and sustainability targets.
4. Review by the Board of Commissioners on the execution of Company management by the Board of Directors.
5. Submitting the accountability report of the Board of Directors to the Shareholders through the GMS mechanism.

Criteria for Board of Directors Performance Assessment

The performance assessment criteria for the Board of Directors assesses its effectiveness in managing the Company collegially. The assessment focuses on numerical performance targets and the quality of strategy implementation, compliance, governance, and business sustainability. The assessment criteria for the Board of Directors include:

1. Achievement of Company KPIs and targets in the Management Contract.
2. Achieved WPB, including operational, financial, investment, and business development performance.
3. Effectiveness of the implementation of the Company's strategies and priority programs.
4. Compliance with the Articles of Association, GMS resolutions, Shareholders' directives, and statutory regulations.
5. Application of Good Corporate Governance, risk management, internal control, and compliance.
6. Quality of collegial decision-making by the Board of Directors.

7. Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris, hasil audit, serta arahan Pemegang Saham.
8. Kontribusi Direksi dalam menjaga keberlanjutan usaha, peningkatan layanan, dan penciptaan nilai bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS berdasarkan laporan pertanggungjawaban Direksi serta hasil pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga melakukan penelaahan dan memberikan pandangan atas kinerja Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

Hasil penilaian tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Saham dalam memberikan keputusan atas laporan pengurusan Perseroan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Perseroan pada periode berikutnya.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

7. Follow-up on recommendations from the Board of Commissioners, audit results, and Shareholders' directives.
8. Contribution of the Board of Directors to maintaining business sustainability, improving services, and creating value for Shareholders and stakeholders.

Parties Conducting the Assessment

The performance assessment of the Board of Directors is conducted by the Shareholders through the GMS mechanism based on the accountability report of the Board of Directors and the results of supervision by the Board of Commissioners, who also reviews and opined on the Board of Directors' performance as part of its supervisory and advisory role.

The results of this assessment serve as the basis for Shareholders to make decisions on the Company's management report, as well as evaluation material to improve the effectiveness of Company management in the subsequent period.

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Realisasi *Key Performance Indicators* Direksi 2025
Realization of the Board of Directors' Key Performance Indicators in 2025

No	KPI	Polaritas *Polarity*	Bobot *Weight*	Satuan *Unit*	Target Tahunan *Annual Target*	Realisasi Setahun *Annual Realization*	% Pencapaian Tahunan *% Annual Achievement*	% Pencapaian Tahunan (Max 110%) *% Annual Achievement (Max 110%)*	Nilai KPI *KPI Score*
I. NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA			**50**						**45,42**
FINANSIAL | FINANCIAL									
1	EBITDA	*Maximize*	7	Rupiah (Triliun) IDR (Trillion)	1,381	0,91	65,79%	65,79%	4,61
2	Perbandingan ROIC Terhadap WACC Ratio ROIC to WACC	*Maximize*	4	Persentase Percentage	2,18	(3,18)	0,00%	0,00%	0,00
OPERASIONAL | OPERATIONS									
3	*Safety/Accident Rate (Rate of Accident)*	*Minimize*	8	Persentase Percentage	0,23	0,22	110,00%	110,00%	8,80
4	Hari Siap Operasi (HSO) Dermaga Dock Operation Ready Day	*Maximize*	8	Persentase Percentage	100	110	110,00%	110,00%	8,80
5	Jumlah Produksi Kendaraan Vehicle Output Number	*Maximize*	7	Unit	9.231.514	7.408.139	80,25%	80,25%	5,62

Realisasi *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2025
Realization of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators in 2025

No	Indikator *Indicator*	Uraian *Description*	Output	Kuantitas *Quantity*	Bobot *Weight*	Realisasi *Actual*	Bobot Realisasi *Weight*
A	**Aspek Perencanaan | Planning Aspect**				**10**		**10**
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2026 Prepare the WPB and the KPI of the Board of Commissioners for 2026	Program Kerja Tahunan meliputi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026 Annual Work Program incld. Activities and Budget for 2026	Dokumen Documen	1 kali | time	10	1 kali | time	10
B	**Aspek Pengawasan/Nasihat | Oversight/Counsel Aspect**				**75**		**75**
1.a	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Respond/recommend to Shareholders on the Company's WPB	Tahunan Annual	Surat Letter	1 kali | time	5	1 kali | time	5
1.b	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham atas kinerja triwulanan Respond/recommend to Shareholders on quarterly performance	Triwulan Quarterly	Surat Letter	4 kali | time	10	4 kali | time	40
1.c	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Respond/recommend to Shareholders on the Annual Report	Tahunan Annual	Surat Letter	1 kali | time	5	1 kali | time	5
1.d	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham atas pengusulan Eksternal Auditor/KAP Respond/recommend to Shareholders on proposals from External Auditors/Firms	Tahunan Annual	Surat Letter	1 kali | time	5	1 kali | time	5
2.a	Rapat Dewan Komisaris dalam rangka memberi saran/nasihat kepada Direksi, jumlah rapat Board of Commissioners meetings to counsel the Board of Directors, number of meetings	Minimal rapat 1 kali dalam sebulan Min. one meeting monthly	Kali | Times	12 kali | time	5	10 kali | time	5
2.b	Rapat Dewan Komisaris dalam rangka memberi saran/nasihat kepada Direksi, kehadiran rapat Board of Commissioners meetings to counsel the Board of Directors, meeting attendance	Bulanan Monthly	%	100%	10	99%	9,9

Realisasi *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2025
Realization of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators in 2025

No	Indikator *Indicator*	Uraian *Description*	Output	Kuantitas *Quantity*	Bobot *Weight*	Realisasi *Actual*	Bobot Realisasi *Weight*
2.c	Rapat Dewan Komisaris dalam rangka memberi saran/nasihat kepada Direksi, risalah rapat Board of Commissioners meetings to counsel the Board of Directors, meeting minutes	Bulanan Monthly	Risalah Meeting Minutes	>12 risalah >12 Notice	5	>12 risalah >12 Notice	5
3	Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Board of Commissioners meetings with Committees	Setahun Full-Year	Risalah Meeting Minutes	>12 risalah >12 Notice	10	>12 risalah >12 Notice	10
4	Monitoring/pengawasan Dewan Komisaris ke divisi bisnis dan kantor cabang Board of Commissioners monitoring of business divisions and branch offices	Setahun Full-Year	Laporan monitoring/ surat Monitoring report	2 laporan reports	10	>3 laporan (8 kunjungan) >3 Reports (8 visits)	15
5	Pemberian persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam waktu 14 hari kalender sejak surat usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris Grant written approval by the BoC for the actions of the BoD in accordance with the Company's Articles of Association within 14 calendar days of receipt of the proposal letter or complete documents by the BoC	Penyampaian persetujuan atas Surat Permohonan Direksi tepat waktu Punctual approval of Director's Letter	%	100%	5	100%	5
6	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Respond/recommend to Shareholders on the Company's WPB	Penyampaian tanggapan sejak Surat Permohonan Direksi tepat waktu Punctual response of Director's Letter	%	100%	5	100%	5
C	**Aspek Pelaporan | Reporting Aspect**				**10**		**10**
1	Menyampaikan laporan tahunan tentang tugas pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Submit the annual report on the supervisory duties and realization of the Board of Commissioners' KPI implementation	Laporan tugas pengawasan tahun buku 2025 FY 2025 supervisory report	Surat Letter	1 surat letter	10	1 surat letter	10
D	**Aspek Dinamis/Lain | Dynamic/Other Aspects**				**5**		**5**
1	Peningkatan kompetensi melalui kegiatan seminar dan *workshop* Competency improvement through seminars and workshops	Tahunan Annual	Surat/ Laporan Letter/Report	2 laporan reports	5	2 laporan reports	5

Rincian pencapaian KPI Direksi secara individual dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Details of the individual KPI achievements of the Board of Directors is presented in the table herein.

Pencapaian KPI Direksi Secara Individual Tahun 2025
Individual KPI Achievement of the Board of Directors in 2025

No.	Jabatan *Position*	Nilai KPI *KPI Score*
1.	Wakil Direktur Utama | Deputy President Director	97,32
2.	Direktur Operasi & Transformasi | Director of Operations & Transformation	99,89
3.	Direktur Teknik | Director of Engineering	98,59
4.	Direktur SDM dan Layanan Korporasi | Director of HC & Corporate Services	94,43
5.	Direktur Keuangan | Director of Finance	101,30

PENILAIAN KINERJA KOMITE DAN/ATAU UNIT DI BAWAH DIREKSI SERTA DASAR PENILAIANNYA

Dalam menjalankan fungsi pengurusan Perseroan, Direksi didukung oleh Sistem Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Sistem Manajemen Perusahaan, serta unit kerja lainnya yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung efektivitas operasional, pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola, kepatuhan, dan peningkatan sistem manajemen Perseroan. Penilaian kinerja terhadap unit-unit tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi telah melaksanakan tugas sesuai mandat, rencana kerja, serta target kinerja yang ditetapkan.

Prosedur penilaian dilakukan secara berkala melalui evaluasi atas pencapaian KPI, realisasi program kerja, kualitas pelaksanaan tugas, penyampaian laporan, efektivitas rekomendasi, serta kontribusi masing-masing unit terhadap pencapaian sasaran Perseroan. Penilaian tersebut mengacu pada struktur organisasi, uraian tugas, rencana kerja, KPI unit, kebijakan internal, serta ketentuan tata kelola yang berlaku.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES AND/OR UNITS UNDER THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE BASIS FOR THEIR EVALUATION

In executing the Company's management function, the Board of Directors is supported by the Internal Audit System, the Risk Management Division, the Corporate Management System Division, and other work units with strategic functions in supporting operational effectiveness, internal control, risk management, governance, compliance, and the improvement of the Company's management system. Performance assessments for these units are conducted to ensure that each function has executed its duties in accordance with its mandate, work plan, and set performance targets.

The assessment procedure is conducted periodically through evaluations of KPI achievements, work program realizations, the quality of duty execution, report submissions, the effectiveness of recommendations, and the contribution of each unit toward achieving Company objectives. The assessment refers to the organizational structure, job descriptions, work plans, unit KPIs, internal policies, and prevailing governance provisions.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian meliputi capaian kinerja selama tahun buku, kesesuaian pelaksanaan tugas dengan mandat unit, efektivitas koordinasi dengan Direksi dan unit kerja terkait, kompetensi pelaksana, kualitas rekomendasi atau hasil kerja, kepatuhan terhadap ketentuan internal, serta kontribusi terhadap penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan efektivitas proses bisnis Perseroan.

The assessment criteria include financial year performance, duty execution alignment with the unit's mandate, coordination effectiveness with the Board of Directors and related units, personnel competence, recommendation or work output quality, internal compliance, and contributions toward strengthening corporate governance, risk management, internal control, and business process effectiveness.

Rincian penilaian kinerja komite dan unit di bawah Direksi tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Details of the performance assessment of committees and units under the Board of Directors in 2025 are presented as follows:

Penilaian Kinerja Komite dan/atau Unit di Bawah Direksi

Performance Assessment of Committees and/or Units Under the Board of Directors

Unit/Komite di Bawah Direksi *Units/Committees Under the BoD*	**Ruang Lingkup Penilaian** *Scope of Assessment*	**Dasar Penilaian** *Basis for Assessment*	**Nilai KPI 2025** *2025 KPI Score*
Sistem Pengawas Internal Internal Audit System Division	Pelaksanaan audit internal, evaluasi pengendalian internal, pemantauan tindak lanjut hasil audit, serta pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis. Implemented internal audits, evaluations of internal control, monitoring of audit results follow-ups, and recommendations for business process improvements.	Realisasi program kerja audit, kualitas rekomendasi, penyelesaian tindak lanjut hasil audit, ketepatan pelaporan, dan kontribusi terhadap penguatan pengendalian internal. Realization of audit work programs, quality of recommendations, completion of follow-ups on audit results, timeliness of reporting, and contribution to strengthening internal control.	104,89
Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	Pengelolaan risiko korporat, penyusunan profil risiko, pemantauan mitigasi risiko, serta penguatan budaya sadar risiko di lingkungan Perseroan. Management of corporate risks, risk profiles formulation, risk mitigation monitoring, and a risk-aware culture enhancement within the Company.	Pencapaian program manajemen risiko, efektivitas mitigasi risiko, ketepatan pelaporan risiko, pemantauan *risk register*, dan kontribusi terhadap pengambilan keputusan berbasis risiko. Achievement of risk management programs, effectiveness of risk mitigation, accuracy of risk reporting, monitoring of the risk register, and contribution to risk-based decision-making.	104,84
Divisi Sistem Manajemen Perusahaan Corporate Management Systems	Pengelolaan sistem manajemen, penyusunan dan pemutakhiran kebijakan/prosedur, serta penguatan standardisasi proses bisnis Perseroan. Execution of management systems, policies procedures formulation and updates, and standardization enhancement of the Company's business processes.	Realisasi pengembangan sistem manajemen, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, kepatuhan terhadap standar internal, serta kontribusi terhadap peningkatan efektivitas proses bisnis. Realization of management system development, improvement of policies and procedures, compliance with internal standards, and contribution to increasing business process effectiveness.	104,71
Unit Kerja Lainnya Other Work Units	Pelaksanaan fungsi operasional, pendukung bisnis, administrasi, keuangan, SDM, teknologi informasi, layanan, dan fungsi lain sesuai struktur organisasi Perseroan. Execution of operational functions, business support, administration, finance, HR, information technology, services, and other functions in accordance with the Company's organizational structure.	Pencapaian KPI unit, realisasi program kerja, ketepatan pelaksanaan tugas, efektivitas koordinasi, kualitas layanan internal, dan kontribusi terhadap target Perseroan. Achievement of unit KPIs, realization of work programs, accuracy of duty execution, effectiveness of coordination, quality of internal services, and contribution to Company targets.	102,45

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
NOMINATION & REMUNERATION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

KEBIJAKAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan untuk memastikan proses pengisian jabatan organ Perseroan berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan strategis Perseroan. Dalam praktik BUMN, proses nominasi mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar pengaturan organ BUMN, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas.

Secara umum, nominasi dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan formal, integritas, kompetensi, pengalaman, rekam jejak, independensi, serta kebutuhan keahlian yang relevan dengan arah pengembangan usaha Perseroan. Proses nominasi juga memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui penilaian kelayakan, kepatutan, dan kesesuaian calon dengan kebutuhan organisasi sebelum ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS atau keputusan sirkuler.

POLICY FOR NOMINATING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The nomination policy for the Boards of Commissioners and Directors is implemented to ensure that the position fulfilment process runs objectively, transparently, accountably, and in line with the strategic needs of the Company. In SOE practices, the nomination process refers to the Articles of Association, Shareholders' provisions, and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs, which serves as one of the basis for SOE organs, including the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supervisory Board.

In general, nomination is conducted by considering the fulfillment of formal requirements, integrity, competence, experience, track record, independence, and the mix of expertise relevant to the business development direction of the Company. The nomination process also pays attention to the principle of prudence through eligibility, propriety, and suitability assessments (fit and proper test) of candidates before being determined by Shareholders through the GMS mechanism or a circular resolution.

PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS

Prosedur nominasi Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan komposisi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha, kebutuhan pengawasan, keberagaman kompetensi, dan ketentuan mengenai Komisaris Independen.
2. Penjaringan dan pengusulan calon anggota Dewan Komisaris oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
3. Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain, termasuk integritas, independensi, pengalaman, kompetensi, serta tidak adanya kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

BOARD OF COMMISSIONERS NOMINATION PROCEDURE

The nomination procedure for the Board of Commissioners is carried out in stages of:

1. Identifying the required composition of the Board of Commissioners by considering business complexity, supervisory needs, diversity of competencies, and provisions regarding Independent Commissioners.
2. Sourcing and proposing candidates for the Board of Commissioners by authorized parties in accordance with Shareholders' provisions and statutory regulations.
3. Assessing the fulfillment of formal and other requirements, including integrity, independence, experience, competence, and the absence of conditions that could give rise to a conflict of interest.

4. Pelaksanaan proses uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.
5. Penetapan pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham melalui RUPS atau keputusan sirkuler sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
6. Pendokumentasian hasil pengangkatan, dasar keputusan, serta pernyataan pemenuhan persyaratan sebagai bagian dari dokumentasi tata kelola Perseroan.

PROSEDUR NOMINASI DIREKSI

Prosedur nominasi Direksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan komposisi Direksi berdasarkan strategi Perseroan, struktur organisasi, kompleksitas bisnis, kebutuhan pengurusan, serta pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi.
2. Penjaringan dan pengusulan calon anggota Direksi oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
3. Penilaian awal terhadap pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain, termasuk kapasitas kepemimpinan, kompetensi manajerial, pengalaman profesional, rekam jejak, integritas, dan kemampuan menjalankan pengurusan Perseroan.
4. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* untuk menilai kesesuaian calon dengan kebutuhan Perseroan dan standar pengurusan BUMN.
5. Penetapan pengangkatan anggota Direksi oleh Pemegang Saham melalui RUPS atau keputusan sirkuler sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Direksi baru agar memahami profil Perseroan, strategi, risiko, tata kelola, pengendalian internal, serta tugas dan tanggung jawab organ Perseroan.

4. Implementing the fit and proper test according to the mechanism established by the Shareholders.
5. Shareholders determining the appointment of the Board of Commissioners through a GMS or a circular resolution in line with the Articles of Association and prevailing provisions.
6. Documenting the appointment results, the basis of decisions, and statements of compliance with requirements as part of the Company's governance documentation.

BOARD OF DIRECTORS NOMINATION PROCEDURE

The nomination procedure for the Board of Directors is carried out through the following stages:

1. Identifying the required composition of the Board of Directors based on the Company's strategy, organizational structure, business complexity, management needs, and the division of duties of each Directors.
2. Sourcing and proposing candidates for the Board of Directors by authorized parties in accordance with Shareholders' provisions and statutory regulations.
3. Conducting an initial assessment of the fulfillment of formal and other requirements, including leadership capacity, managerial competence, professional experience, track record, integrity, and the ability to execute the management of the Company.
4. Implementing fit and proper test to assess the candidates' suitability with the needs of the Company and SOE management standards.
5. Determining the appointment of members of the Board of Directors by the Shareholders through a GMS or a circular resolution in accordance with the Articles of Association and prevailing provisions.
6. Holding an induction program for newly appointed Directors to understand the Company's profile, strategy, risks, governance, internal control, and the duties and responsibilities of the Company's organs.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ASDP ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta keputusan RUPS. Dasar kebijakan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025,
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi ASDP dalam menetapkan remunerasi organ Perseroan secara terukur, wajar, akuntabel, serta selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ASDP mempertimbangkan capaian kinerja Perseroan, kemampuan keuangan, kompleksitas usaha, tingkat tanggung jawab jabatan, pencapaian target RKAP, serta prinsip kewajaran dan kepatutan. Kebijakan ini juga memperhatikan peran masing-masing organ dalam mendukung pengurusan, pengawasan, pengambilan keputusan strategis, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi ASDP.

PROSEDUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ASDP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja ASDP, kemampuan keuangan, kompleksitas usaha, tingkat tanggung jawab jabatan, serta ketentuan yang berlaku.

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The remuneration policy for the Boards of Directors and Commissioners of ASDP is established with reference to regulations, the Articles of Association, and GMS resolutions. The basis of the policy among others include:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023.
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended most recently by Law No. 16 of 2025.
3. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

These provisions serve as references for ASDP in establishing the remuneration of the Company's organs measurably, reasonably, accountably, and aligned with Good Corporate Governance principles.

The remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of ASDP is determined by weighing the Company's performance, financial capacity, business complexity, level of job responsibility, achieved WPB targets, and principles of fairness and appropriateness. The policy also considers the role of each organ in supporting management, supervision, strategic decision-making, and long-term value creation for ASDP.

REMUNERATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The procedure for determining the remuneration of the Boards of Directors and Commissioners of ASDP is carried out through the following stages:

1. Formulating a remuneration proposal for the Boards of Directors and Commissioners by considering ASDP's performance, financial capacity, business complexity, level of job responsibility, and prevailing regulations.

2. Penelaahan usulan remunerasi sesuai mekanisme tata kelola ASDP, termasuk dengan memperhatikan rekomendasi organ pendukung yang relevan.
3. Penyampaian usulan remunerasi kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.
4. Penetapan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS.
5. Pelaksanaan pembayaran remunerasi oleh ASDP sesuai keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan kebijakan internal Perseroan.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ASDP dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang mencerminkan kewajaran, kepatutan, kinerja, serta kompleksitas pengelolaan Perseroan.

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ASDP meliputi:

1. Capaian kinerja Perseroan, termasuk realisasi target RKAP, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan pencapaian KPI.
2. Tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perseroan, dengan memperhatikan profitabilitas, likuiditas, struktur permodalan, serta keberlanjutan usaha.
3. Kompleksitas usaha ASDP, termasuk cakupan operasional, jumlah lintasan, pengelolaan pelabuhan, armada, entitas anak, serta skala pelayanan publik yang dijalankan.
4. Tanggung jawab, beban kerja, dan risiko jabatan masing-masing organ, baik dalam fungsi pengurusan oleh Direksi maupun fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
5. Kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN.
6. Prinsip kewajaran dan kepatutan, dengan memperhatikan praktik remunerasi pada industri sejenis dan perusahaan dengan skala usaha yang sebanding.
7. Kontribusi terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko, pengendalian internal, kepatuhan, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi ASDP.

2. Reviewing the remuneration proposal in line with ASDP's governance mechanism, including considering recommendations from relevant supporting organs.
3. Submitting the remuneration proposal to the Shareholders through the GMS mechanism.
4. Determining the remuneration amount for the Boards of Directors and Commissioners by the Shareholders through a GMS resolution.
5. Implementing remuneration payments by ASDP in accordance with the GMS resolution, Articles of Association, and internal policies of the Company.

INDICATORS FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The determination of remuneration for the Boards of Commissioners and Directors of ASDP is conducted by considering indicators that reflect fairness, appropriateness, performance, and the complexity of managing the Company.

The indicators for stipulating the remuneration of the Boards of ASDP include:

1. Achievement of the Company, including the of WPB targets, operational performance, financial performance, and KPI achievements.
2. The health level and financial capacity of the Company, with due regard to profitability, liquidity, capital structure, and business sustainability.
3. The business complexity of ASDP, including operational scope, number of routes, port management, fleet, subsidiaries, and the scale of public services executed.
4. Responsibility, workload, and job risks of each organ, both in the management function by the Board of Directors and the supervisory function by the Board of Commissioners.
5. Compliance with the Articles of Association, GMS resolutions, and prevailing statutory regulations for SOEs.
6. Principles of fairness and appropriateness, with due regard to remuneration practices in similar industries and companies with a comparable business scale.
7. Contribution to the application of Good Corporate Governance, risk management, internal control, compliance, and long-term value creation for ASDP.

Dengan mempertimbangkan indikator tersebut, ASDP memastikan bahwa remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan secara objektif, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham.

By considering these indicators, ASDP ensures that the remuneration of the Boards of Commissioners and Directors is determined objectively, proportionally, transparently, and accountably to the Shareholders.

STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi ASDP mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar ASDP, serta keputusan RUPS. Pedoman tersebut menjadi dasar dalam menetapkan remunerasi yang wajar, terukur, kompetitif, dan sejalan dengan tingkat tanggung jawab, kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, serta capaian kinerja ASDP.

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ASDP mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas, serta tantiem atau insentif kinerja yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Rincian struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi disajikan sebagai berikut:

REMUNERATION STRUCTURE AND NOMINAL/COMPONENTS FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The provision of remuneration to the Boards of Commissioners and Directors of ASDP refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the Articles of Association of ASDP, and GMS resolutions. These are the basis for establishing reasonable, measureable, competitive, remuneration in line with the level of responsibility, business complexity, financial capacity, and performance of ASDP.

The remuneration structure for the ASDP Board of Commissioners and Board of Directors comprises salary or honorarium, allowances, benefits, and bonuses (tantiem) or performance incentives determined via GMS resolutions. The structural details and components are presented below:

Komposisi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Komponen *Component*	**Jenis Penghasilan** | *Income type*	
	Dewan Komisaris | *Board of Commissioners*	**Direksi** | *Board of Directors*
Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	1. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. 2. Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama. 1. The honorarium for the President Commissioner is set at 45% (forty-five percent) of the President Director's salary. 2. The honorarium for a Commissioner is set at 90% (ninety percent) of the President Commissioner's honorarium.	1. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. 2. Gaji Wakil Direktur Utama ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama. 3. Anggota Direksi lainnya ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. 1. The President Director's salary is determined based on internal guidelines established by the Shareholders. 2. The Vice President Director's salary is set at 90% (ninety percent) of the President Director's salary. 3. The salaries of other members of the Board of Directors are set at 85% (eighty-five percent) of the President Director's salary.
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan Hari Raya untuk Anggota Dewan Komisaris diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium masing-masing Anggota Dewan Komisaris. The Religious Holiday Allowance (THR) for members of the Board of Commissioners is granted in the amount of 1 (one) time the honorarium of each respective member of the Board of Commissioners.	Tunjangan Hari Raya untuk Direksi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji masing-masing Direksi. The Religious Holiday Allowance for the Board of Directors is granted in an amount equal to one month's salary for each member of the Board of Directors.
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris. Transportation allowance is granted at 20% (twenty percent) of each Board of Commissioners member's honorarium.	Perseroan tidak memberikan tunjangan transporatasi kepada Direksi. The Company does not provide transportation allowances to the Board of Commissioners.

Komposisi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Komponen *Component*	Jenis Penghasilan | *Income type*	
	Dewan Komisaris | *Board of Commissioners*	**Direksi** | *Board of Directors*
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Perseroan tidak memberikan tunjangan perumahan kepada Dewan Komisaris. The Company does not provide housing allowances to the Board of Commissioners.	Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar: 1. Rp27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Negara. 2. Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi. 3. Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk wilayah Kabupaten dan Kota. 4. Tunjangan Perumahan diberikan apabila BUMN tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan Direksi. The housing allowance, including utility costs, is provided monthly at 40% (forty percent) of the salary, with a maximum amount as follows: 1. Rp27,500,000 (twenty-seven million five hundred thousand Rupiah) for the Capital City area. 2. Rp25,000,000 (twenty-five million Rupiah) for Provincial Capital areas. 3. Rp22,500,000 (twenty-two million five hundred thousand Rupiah) for Regency and Municipality areas. 4. The housing allowance is provided only if the SOE does not offer official housing facilities for the Board of Directors.
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti). 2. Premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Retirement insurance is provided under the following conditions: 1. Retirement insurance is granted during the term of office (from the date of appointment until termination). 2. The premium borne by the Company shall be a maximum of 25% (twenty-five percent) of the annual salary. 3. The choice of retirement insurance program is determined by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the SOE. 4. The provision of premiums, contributions, or other relevant terms for retirement insurance includes coverage for accident and life insurance.	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti). 2. Premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Retirement insurance is provided under the following provisions: 1. Retirement insurance is granted during the term of office (from the date of appointment until termination). 2. The premium covered by the Company shall not exceed 25% (twenty-five percent) of the annual salary. 3. The selection of the retirement insurance program is determined by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the SOE. 4. The payment of premiums, contributions, or other relevant terms for retirement insurance includes premiums for accident and life insurance.
Fasilitas Kendaraan Vehicle Benefit	Perseroan tidak memberikan fasilitas kendaraan kepada Dewan Komisaris. The Company does not provide vehicle benefit to the Board of Commissioners.	Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari Perseroan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS/Menteri. Members of the Board of Directors are entitled to only 1 (one) vehicle facility from the Company. This vehicle facility, including maintenance and operational costs, is provided by considering to the Company's financial condition. The vehicle specifications and standards are determined by the GMS/Minister.

Komposisi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Komponen *Component*	Jenis Penghasilan | *Income type*	
	Dewan Komisaris | *Board of Commissioners*	**Direksi** | *Board of Directors*
Fasilitas Kesehatan Health Benefit	Perseroan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris beserta seorang istri/suami dan maksimal tiga orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: 1. Rawat jalan dan obat; 2. Rawat inap dan obat; dan 3. *Medical check up.* The Company is required to provide healthcare benefits in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses. Healthcare benefits are provided to members of the Board of Commissioners along with one spouse and up to 3 (three) children under the age of 25, with the condition that if a child under 25 has ever been married or employed, they are no longer eligible for healthcare benefits. The healthcare benefits include: 1. Outpatient care and medication; 2. Inpatient care and medication; 3. Medical check-up.	Perseroan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: 1. Rawat jalan dan obat; 2. Rawat inap dan obat; dan 3. *Medical check up.* The Company is required to provide healthcare facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses. Healthcare benefits are granted to members of the Board of Directors, their spouse, and up to 3 (three) children under the age of 25, provided that any child under 25 who has been married or has worked is no longer eligible for such benefits. The healthcare coverage includes: 1. Outpatient care and medication; 2. Inpatient care and medication; 3. Medical check-up.
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Legal aid facilities are provided in the form of funding for legal services from a law firm/legal consultant, covering legal proceedings in which the individual is involved as a witness, suspect, or defendant in a court of law.	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Legal aid facilities are provided in the form of financing for legal counsel/law firm services, including proceedings as a witness, suspect, or defendant in judicial institutions.
Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentive	1. Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama. 2. Wakil Komisaris Utama ditetapkan sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari Direktur Utama. 3. Anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama. 1. The President Commissioner is entitled to 45% (forty-five percent) of the President Director's remuneration. 2. The Vice President Commissioner is entitled to 42.5% (forty-two point five percent) of the President Director's remuneration. 3. Members of the Board of Commissioners are entitled to 90% (ninety percent) of the President Commissioner's remuneration.	1. Wakil Direktur Utama 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama. 2. Anggota Direksi lainnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Direktur Utama. 1. The Deputy President Director receives 90% (ninety percent) of the President Director's salary. 2. Other members of the Board of Directors receive 85% (eighty-five percent) of the President Director's salary.

BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The remuneration received by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Rincian Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Details of Remuneration for Members of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Honorarium/ Gaji *Salary*	Tunjangan *Allowance*				Fasilitas *Facilities*			
			Hari Raya *Religious Holiday Allowance*	Perumahan *Housing Allowance*	Asuransi Purna Jabatan *Retirement Insurance*	Transportasi *Transportation Benefit*	Kendaraan *Vehicle Benefit*	Kesehatan *Health Benefit*	Bantuan Hukum *Legal Aid*	Tantiem/ Insentif Kinerja *Tantiem/ Performance Incentive*
Achmad Baidowi	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Siti Ariani Muflikhah	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Taufik Rachman	Komisaris Commissioner	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Joddy Hernady	Komisaris Commissioner	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Elba Damhuri	Komisaris Commissioner	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓

Rincian Remunerasi Anggota Direksi

Details of Remuneration for Members of the Board of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Honorarium/ Gaji *Salary*	Tunjangan *Allowance*				Fasilitas *Facilities*			
			Hari Raya *Religious Holiday Allowance*	Perumahan *Housing Allowance*	Asuransi Purna Jabatan *Retirement Insurance*	Transportasi *Transportation Benefit*	Kendaraan *Vehicle Benefit*	Kesehatan *Health Benefit*	Bantuan Hukum *Legal Aid*	Tantiem/ Insentif Kinerja *Tantiem/ Performance Incentive*
Heru Widodo	Direktur Utama President Director	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Yossianis Marciano	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Rio Theodore Natalianto Lasse	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nana Sutisna	Direktur Teknik Director of Engineering	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Bunga Herlina Oktaviyanti	Direktur Keuangan Director of Finance	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Rudi Sunarko	Direktur SDM dan Layanan Korporasi Director of HC & Corporate Services	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

KEBIJAKAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG

Sepanjang tahun 2025, ASDP belum memiliki kebijakan kompensasi atau insentif jangka panjang berbasis kinerja bagi manajemen dan/atau karyawan, termasuk dalam bentuk program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP) maupun program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP).

Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang dapat disajikan terkait jumlah saham ESOP/MSOP, realisasi pelaksanaan, jangka waktu program, persyaratan manajemen dan/atau karyawan yang berhak, maupun harga pelaksanaan atau mekanisme penentuan harga pelaksanaan.

LONG-TERM COMPENSATION POLICY

Throughout 2025, ASDP has not established a performance-based long-term compensation or incentive policy for management and/or employees, including in the form of a Management Stock Ownership Program (MSOP) or an Employee Stock Ownership Program (ESOP) programs.

Accordingly, there is no information to be presented regarding the number of ESOP/MSOP shares, implementation realization, program period, eligible management and/or employee requirements, or the exercise price or mechanism for determining the exercise price.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian, Perseroan tidak membentuk dan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah, sehingga tidak terdapat informasi terkait susunan, tugas, tanggung jawab, maupun pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas Syariah yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

The Company does not conduct business activities based on sharia principles as regulated in the Articles of Association. Thus, the Company has not established and does not have a Sharia Supervisory Board, so there is no information related to the composition, duties, responsibilities, or implementation of activities of a Sharia Supervisory Board that can be presented in this Annual Report.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY POLICY FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

ASDP menerapkan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan pengawasan dan pengurusan Perseroan, kompleksitas usaha, kompetensi, pengalaman, keahlian, integritas, independensi, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberagaman tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pengawasan, dan pengelolaan Perseroan secara berkelanjutan.

Dalam penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, ASDP memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, keahlian di bidang transportasi, kepelabuhanan, keuangan, hukum, manajemen risiko, tata kelola, sumber daya manusia, teknologi, serta bidang lain yang relevan dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Selain itu, ASDP juga memperhatikan aspek keberagaman usia, gender, dan independensi sepanjang selaras dengan prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, serta ketentuan Pemegang Saham.

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi ASDP bertujuan untuk memastikan bahwa organ Perseroan memiliki komposisi yang seimbang, objektif, dan mampu memberikan perspektif yang luas dalam mendukung pencapaian visi, misi, strategi, serta keberlanjutan usaha Perseroan.

ASDP applies a diversity policy to the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors by considering the supervision and management needs of the Company, business complexity, competence, experience, expertise, integrity, independence, and fulfillment of prevailing statutory regulations. This diversity serves as an important factor in strengthening the quality of decision-making, supervisory effectiveness, and sustainable management of the Company.

ASDP structures its Board of Commissioners and Board of Directors based on a alignment of educational background, professional experience, and specialized expertise in transportation, port operations, finance, law, risk management, governance, human resources, technology, and other fields that are relevant with the Company's business needs. Additionally, the Company incorporates age, gender, and independence diversity into its selection process, balanced against merit-based principles, organizational needs, and Shareholder mandates.

The diversity policy for ASDP's Boards of Commissioners and Directors aims to ensure a balanced and objective composition, capable of providing broad perspectives to support the achievement of the Company's vision, mission, strategy, and business sustainability.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Rincian Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Details of Diversity in the Composition of Members of the Boards of Commissioners and Directors

No.	Aspek Keberagaman *Diversity Aspect*	Realisasi di ASDP *Realization in ASDP*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Direksi *Board of Directors*
1.	Keahlian Expertise	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam, seperti jurnalistik, SDM, perencanaan strategis, hukum, manajemen risiko, perencanaan strategis korporasi, teknologi informasi, transformasi digital, audit, komunikasi, akuntansi dan keahlian lainnya yang menunjang kelangsungan bisnis Perseroan. Members of the Board of Commissioners possess diverse expertise, such as journalism, HR, strategic planning, law, risk management, corporate strategic planning, information technology, digital transformation, audit, communication, accounting, and other expertise supporting the business continuity of the Company.	Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam, seperti *Port Expert, Managerial Development Program,* QRMP, *Port Business Stakeholder Management, Certified Mediator* (IPPI/DSI), *Certified* CACP, *Leadership, Corporate Strategy, Business Development* dan keahlian lainnya yang menunjang kelangsungan bisnis Perseroan. Members of the Board of Directors possess diverse expertise, such as Port Expert, Managerial Development Program, QRMP, Port Business Stakeholder Management, Certified Mediator (IPPI/DSI), Certified CACP, Leadership, Corporate Strategy, Business Development, and other expertise supporting the business continuity of the Company.
2.	Pendidikan Education	Anggota Dewan Komisaris memiliki jenjang Pendidikan Sarjana dan Magister pada bidang Ilmu politik dan pemerintahan, ilmu hukum, teknis listrik, teknik telekomunikasi, ilmu komunikasi, filsafat, akuntansi dan pendidikan lainnya yang menunjang kelangsungan bisnis Perseroan. Members of the Board of Commissioners hold Bachelor's and Master's degrees in fields including political science and government, legal science, electrical engineering, telecommunications engineering, communication science, philosophy, accounting, and other educational backgrounds supporting the business continuity of the Company.	Anggota Direksi memiliki jenjang pendidikan Sarjana dan Magister di bidang *shipping and transport*, administrasi bisnis, TEKNIK sipil, keuangan, teknik mesin, akuntansi dan pendidikan lainnya yang menunjang kelangsungan bisnis Perseroan. Members of the Board of Directors hold Bachelor's and Master's degrees in fields including shipping and transport, business administration, civil engineering, finance, mechanical engineering, accounting, and other educational backgrounds supporting the business continuity of the Company.
3.	Pengalaman Kerja Work Experience	Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan, tenaga pengajar, konsultan hukum dan bisnis, *advisor corporate strategy*, jurnalis dan pengalaman kerja lainnya. Members of the Board of Commissioners possess work experience in Government, teaching, legal and business consulting, corporate strategy advisory, journalism, and other work experiences.	Anggota Direksi memiliki pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan, usaha angkutan barang, transportasi, marketing, komersial, manajer pelabuhan, *business development*, teknik dan operasional kendaraan dan pengalaman kerja lainnya. Members of the Board of Directors possess work experience in Government, freight transportation businesses, transportation, marketing, commercial, port management, business development, engineering and vehicle operations, and other work experiences.
4.	Usia Age	Anggota Dewan Komisaris memiliki rentang usia 45 – 57 tahun. Members of the Board of Commissioners are between 45 and 57 years of age.	Anggota Direksi memiliki rentang usia 41 – 57 tahun. Members of the Board of Directors are between 41 and 57 years of age.
5.	Jenis Kelamin Gender	Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) pria dan 2 (dua) wanita. The Board of Commissioners consists of 4 (four) men and 2 (two) women.	Anggota Direksi terdiri dari 5 (lima) pria dan 1 (satu) wanita. The Board of Directors consists of 5 (five) men and 1 (one) woman.
6.	Independensi Independence	Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi ASDP menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, objektif, dan profesional. All members of the ASDP Board of Commissioners and Directors carry out their duties and responsibilities independently, objectively and professionally.	

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
ORGANS AND COMMITTES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris didukung oleh organ dan komite di bawah Dewan Komisaris. Keberadaan organ pendukung tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan kualitas penelaahan, serta memastikan setiap rekomendasi Dewan Komisaris didasarkan pada kajian yang memadai sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Organ dan komite di bawah Dewan Komisaris ASDP terdiri dari:

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris berperan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, terutama dalam aspek administrasi, dokumentasi, koordinasi rapat, penyusunan risalah, pengelolaan bahan rapat, serta tindak lanjut keputusan dan arahan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris juga mendukung komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan unit kerja terkait.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi. Komite ini berperan dalam memberikan kajian, masukan, dan rekomendasi mengenai komposisi, pengembangan, penilaian, serta remunerasi organ Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan tata kelola ASDP.

In exercising its oversight and advisory functions for the Board of Directors, the Board of Commissioners (BoC) is supported by dedicated organs and committees. These supporting bodies are formed to strengthen oversight effectiveness, elevate review quality, and ensure that every recommendation from the Board of Commissioners is rooted in comprehensive assessment, in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

The organs and committees under the ASDP Board of Commissioners consist of:

Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners' key role is ensuring the smooth execution of the Board's duties, primarily on administration, documentation, meeting coordination, drafting minutes, managing meeting materials, and tracking the follow-up of the Board's decisions and directives. The Secretary also facilitates communication among the Board of Commissioners, the Board of Directors, committees under the BOC, and relevant work units.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Commissioners in overseeing nomination and remuneration policies. This committee is responsible for providing assessments, inputs, and recommendations regarding the composition, development, evaluation, and remuneration of Company organs, aligned with prevailing regulations and ASDP's governance needs.

Komite Audit

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan atas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, pelaksanaan audit internal dan eksternal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut atas hasil audit. Keberadaan Komite Audit menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaporan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Perseroan.

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, pengendalian risiko strategis, serta pelaksanaan tata kelola secara terintegrasi di lingkungan ASDP. Komite ini juga berperan dalam memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait penguatan mitigasi risiko, kepatuhan, dan efektivitas penerapan GCG secara berkelanjutan.

Audit Committee

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in reviewing financial statements, the effectiveness of internal controls, the execution of internal and external audits, compliance with laws and regulations, and the follow-up on audit findings. The Audit Committee plays a vital role in safeguarding reporting quality, accountability, and transparency in Company management.

Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee assists the Board of Commissioners in overseeing the implementation of risk management, strategic risk control, and the practice of integrated corporate governance across ASDP. This committee also provides input to the Board of Commissioners to reinforce risk mitigation, compliance, and the sustainable implementation of GCG.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretariat Dewan Komisaris merupakan organ pendukung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola ASDP. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan didukung oleh staf Sekretariat Dewan Komisaris yang diangkat serta diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar lingkungan ASDP.

The Secretary to the Board of Commissioners is a supporting organ that facilitates governance implementation within ASDP. It is led by the Secretary to the Board of Commissioners and supported by Secretariat staff, who are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners is appointed from outside the ASDP organization.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Wita Puspitarini*

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Indonesia, Jakarta

Berusia 42 tahun per Desember 2025.
Aged 42 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia (2018). • Sarjana Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung (2007).	• Master of Information Technology, Universitas Indonesia (2018). • Bachelor of Informatics Engineering, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung (2007).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Pranata Komputer Muda pada Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi (01 April 2021–saat ini). • Subkoordinator (09 Juni 2020–31 Maret 2021). • Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pemeliharaan Teknologi Informasi (07 Juli 2017–08 Juni 2020). • Kepala Subbidang Pengadaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Jabatan Fungsional (22 Oktober 2015–06 Juli 2017).	• IT Specialist, Assistant Deputy for IT (1 April 2021–present). • Subcoordinator (9 June 2020–31 March 2021). • Head of the IT Infrastructure and Maintenance Subdivision (7 July 2017–8 June 2020). • Head of the HR Procurement and Functional Position Management Subdivision (22 October 2015–6 July 2017).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	SK Dewan Komisaris No. 01/KOM/VIII/2022 tanggal 01 September 2022. Decree of the BoC No. 01/KOM/VIII/2022 dated 1 September 2022.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Does not hold any concurrent positions.	

*Berhenti menjabat per 5 Agustus 2025 | Term of office ended on 5 August 2025.

Irfan Maulana Muharikin*

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Indonesia, Jakarta

Berusia 33 tahun per Desember 2025.
Aged 33 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya (2015).	Bachelor of Law, Universitas Brawijaya (2015).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Sekretaris Dewan Komisaris PT Garam (2 Mei 2023-1 Mei 2026). • Sekretaris Dewan Komisaris PT Amarta Karya (Persero) (23 Agustus 2021- 2 Agustus 2024). • Staf Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) (2 Mei 2019 -26 Agustus 2021).	• Secretary to the Board of Commissioners of PT Garam (2 May 2023-1 May 2026). • Secretary to the Board of Commissioners of PT Amarta Karya (Persero) (23 August 2021-22 August 2024). • Staff Member of the Board of Commissioners of PT Hutama Karya (Persero) (2 May 2019-26 August 2021).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	SK Dewan Komisaris No. 05/KOM/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025. Decree of the Board of Commissioners No. 05/KOM/VIII/2025 dated 5 August 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Sekretaris Dewan Komisaris PT Garam. Secretary to the Board of Commissioners of PT Garam.	

*Mulai menjabat per 5 Agustus 2025 | Took office on 5 August 2025.

PEDOMAN KERJA DAN TUGAS TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris juga bertanggung jawab memastikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris dikelola dan disimpan secara tertib sesuai standar administrasi yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris serta pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, komite-komite, dan pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan informasi, data, dan dokumen yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
4. Memantau tindak lanjut atas keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris.
5. Menyiapkan materi administratif terkait laporan dan aktivitas Direksi dalam mengelola ASDP.
6. Memberikan dukungan administratif atas kegiatan Direksi yang memerlukan persetujuan, arahan, atau rekomendasi Dewan Komisaris.
7. Menghimpun informasi teknis dari komite, tenaga ahli, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Melalui pelaksanaan tugas tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris berperan dalam menjaga efektivitas dukungan administrasi, kelengkapan dokumentasi, kelancaran koordinasi, serta penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Dewan Komisaris.

WORK GUIDELINES, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing their duties, the Secretary to the Board of Commissioners adheres to the Corporate Governance Guidelines as well as the Working Guidelines (Board Manual) for the Boards of Commissioners and Directors. The Secretary is also responsible for ensuring that all documents related to Board of Commissioner activities are managed and archived in an orderly manner, in accordance with sound administrative standards.

The duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners in supporting the oversight and corporate governance role include:

1. Managing administration within the Board of Commissioners.
2. Coordinating Board of Commissioners' meetings as well as meetings between the Board of Commissioner and Shareholders, the Board of Directors, committees, and other relevant parties.
3. Providing information, data, and documents required by the Board and its sub-committees.
4. Monitoring the follow-up of decisions, advice, and directives issued by the Board.
5. Preparing administrative materials concerning the reports and activities of the Board of Directors in managing ASDP.
6. Providing administrative support for Board of Directors' activities require approval, guidance, or recommendations from the Board of Commissioners.
7. Gathering technical data from committees, experts, and other relevant parties to support the execution of Board of Commissioner duties.

Through these tasks, the Secretary to the Board of Commissioners ensures effective administrative support, comprehensive documentation, seamless coordination, and the robust application of Good Corporate Governance principles within the Board of Commissioner.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Training and/or Competency Development of the Secretary to the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan *Position*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Training and Competency Development*	Waktu dan Tempat *Date and Place*	Penyelenggara *Organizer*
Wita Puspitarini Irfan Maulana Muharikin	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners	*In House Training & Certification QRGP (Qualified Risk Governance Professional)*	18-19 September 2025, Kantor Pusat 18-19 September 2025, Head Office	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS)

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengelola, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen/surat-menyurat Dewan Komisaris, termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.
2. Menyusun Laporan Realisasi Rencana Kerja atau Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2025.
3. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris.
4. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
5. Mendampingi Dewan Komisaris dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja cabang.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

The Secretariat to the Board of Commissioners performs its roles and functions to support the Board of Commissioner in accordance with Good Corporate Governance principles. Throughout 2025, the Secretariat carried out its general duties, which included the following:

1. Managing, archiving, and administering the Board of Commissioner's documents and correspondence, including preparing approval letters and strategic inputs/advice from the Board of Commissioner to be submitted to the Board of Directors.
2. Drafting the 2025 Work Plan Realization and Duty Implementation Report for the Board of Commissioners.
3. Coordinating and organizing Board of Commissioners' meetings, including preparing meeting schedules and agendas, compiling and administering minutes of meetings, and tracking the follow-up on the Board of Commissioner's advice and opinions.
4. Providing data and information required by the Board of Commissioners and its committees.
5. Accompanying the Board of Commissioners during branch performance monitoring and evaluation visits.

6. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain:
   a. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
   b. Memastikan penyelesaian Laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
7. Menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025.

6. Assisting and supporting the execution of duties by the committees under the Board of Commissioner as part of the Board of Commissioner's regulatory mandates, including:
   a. Monitoring the implementation of Work Plans for committees under the Board of Commissioner.
   b. Ensuring the timely completion of reports by committees under the Board of Commissioner.
7. Drafting the 2025 Board of Commissioners Work Plan.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEES

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Keberadaan Komite Audit bertujuan untuk memperkuat efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian internal, kepatuhan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, piagam komite, serta prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme. Komite Audit bekerja secara kolektif dan kolegial dalam memberikan kajian, masukan, serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ruang lingkup tugas Komite Audit mencakup:
1. Penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian internal;
2. Penelaahan atas kualitas dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
3. Pemantauan pelaksanaan audit internal dan audit eksternal;
4. Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta prinsip tata kelola perusahaan.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Seluruh hasil pelaksanaan tugas, kajian, dan rekomendasi Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta menjadi bagian dari pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners and reports directly to the Board of Commissioner. The presence of the Audit Committee aims to strengthen the effectiveness of the Board of Commissioner's oversight function, particularly regarding financial reporting, audit execution, internal controls, compliance, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

In carrying out its duties, the Audit Committee is guided by prevailing laws and regulations, the committee charter, as well as the principles of independence, objectivity, and professionalism. The Audit Committee works collectively and collegially to provide reviews, input, and recommendations to the Board of Commissioners on strategic issues requiring attention during oversight.

The scope of the Audit Committee's duties includes:
1. Reviewing the effectiveness of the internal control system;
2. Reviewing the quality and compliance of financial statements with applicable accounting standards;
3. Monitoring the execution of internal and external audits;
4. Monitoring compliance with legal provisions, regulations, and corporate governance principles.

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. All work outcomes, reviews, and recommendations from the Audit Committee are reported to the Board of Commissioners to serve as concern for oversight, and form part of the Board of Commissioner's accountability to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit ASDP didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dasar hukum pembentukan Komite Audit meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
5. Anggaran Dasar ASDP; dan
6. Piagam Komite Audit ASDP.

LEGAL BASIS FOR THE FORMATION OF THE AUDIT COMMITTEE

The formation of the ASDP Audit Committee is based on statutory regulations, the Articles of Association, and Good Corporate Governance principles. The legal foundations for the establishment of the Audit Committee include:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as last amended by Law No. 6 of 2023;
2. Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
4. Indonesian General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
5. ASDP's Articles of Association; and
6. ASDP's Audit Committee Charter.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit memiliki pedoman kerja berupa Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.06/KOM/XII/2022 tentang Piagam Komite Audit Perseroan. Piagam tersebut menjadi acuan bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, kewenangan, mekanisme kerja, serta pelaporan kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit dikaji secara berkala dan dapat dimutakhirkan apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan organisasi, kebutuhan pengawasan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta praktik tata kelola terbaik atau *best practices*. Muatan Piagam Komite Audit mencakup ketentuan antara lain:

1. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
3. Tata cara dan prosedur kerja;
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
5. Sistem pelaporan;
6. Penanganan pengaduan;
7. Masa tugas; dan
8. Kode etik Komite Audit.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

In performing its duties, the Audit Committee is guided by the Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners under the Board of Commissioners Decree No. SK.06/KOM/XII/2022 concerning the Company's Audit Committee Charter. This charter serves as the reference point for the Audit Committee regarding its duties, responsibilities, authorities, working mechanisms, and reporting lines to the Board of Commissioners.

The Audit Committee Charter is reviewed periodically and may be updated as necessary to ensure alignment with organizational developments, oversight needs, regulatory mandates, and governance best practices. The contents of the Audit Committee Charter include provisions on:

1. Duties, responsibilities, and authorities;
2. Composition, structure, and membership requirements;
3. Working mechanisms and procedures;
4. Meeting policies;
5. Reporting system;
6. Whistleblowing and complaint handling;
7. Term of office; and
8. The Audit Committee's code of conduct.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, khususnya terkait pelaksanaan audit internal, efektivitas sistem pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Tugas pokok Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit meliputi:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan disampaikan ASDP kepada publik dan/atau otoritas, termasuk laporan keuangan, proyeksi, serta laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Menelaah tingkat kepatuhan ASDP terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen apabila terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dengan mempertimbangkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta mengawasi tindak lanjut Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan ASDP;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris atas potensi benturan kepentingan di lingkungan Perseroan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi ASDP.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

In executing its duties, the Audit Committee assists the Board of Commissioners in fulfilling its oversight and advisory roles, specifically regarding internal audit execution, internal control system effectiveness, the adequacy of financial reporting processes, compliance with applicable rules, and the follow-up on audit findings.

The core duties of the Audit Committee, as stipulated in the Audit Committee Charter, are:

1. Reviewing financial information to be released by ASDP to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports relating to the Company's financial data;
2. Reviewing ASDP's level of compliance with laws and regulations relevant to the Company's business operations;
3. Providing an independent opinion in the event of a disagreement between management and the Public Accountant regarding services rendered;
4. Submitting recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of a Public Accountant, taking into account independence, scope of work, and fees;
5. Reviewing audit execution by internal auditors and overseeing the Board of Directors' follow-up on internal audit findings;
6. Reviewing complaints related to ASDP's accounting and financial reporting processes;
7. Reviewing and advising the Board of Commissioners on potential conflicts of interest within the Company; and
8. Maintaining the confidentiality of ASDP's documents, data, and information.

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Sementara itu, anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali periode masa jabatan berikutnya.

TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITEE

The term of office for Audit Committee members who are also members of the Board of Commissioners ends automatically when their tenure on the Board of Commissioner expires. Meanwhile, Audit Committee external members (not Board of Commissioner members) serve a term of 3 years and can be extended for 1 subsequent term.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, evaluasi kinerja, dan ketentuan yang berlaku.

The provision do not limit the Board of Commissioners authority to dismiss Audit Committee members at any time as seen fit based on evaluations, and applicable regulations.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen dan dibantu oleh setidaknya 2 (dua) orang anggota. Susunan Komite Audit Perusahaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

STRUCTURE, COMPOSITION, AND EXPERTISE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is led by a Chairman who is an Independent Commissioner or a member of the Board of Commissioners who is impartial, assisted by at least 2 (two) members. The composition of the Company's Audit Committee in 2025 is as follows:

Susunan Komite Audit Periode Januari - Maret 2025
Composition of the Audit Committee for the January to March 2025

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Joddy Hernady	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Perencanaan, Strategis Korporasi, Teknologi Informasi, dan Transformasi Digital Planning, Corporate Strategy, Information Technology, and Digital Transformation
Susi Meyrista Tarigan	Wakil Ketua Deputy Chairman	Komisaris Commissioner	Akuntansi, Perencanaan Strategis, dan Sistem Informasi Accounting, Strategic Planning, and Information Systems
Taufik Rachman	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Triandi	Anggota Member	-	Akuntansi dan Audit Accounting and Auditing
Made Sumadi Arta	Anggota Member	-	Akuntansi dan Audit Accounting and Auditing

Susunan Komite Audit Periode Maret - Juni 2025
Composition of the Audit Committee for the March to June 2025

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Joddy Hernady	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Perencanaan, Strategis Korporasi, Teknologi Informasi, dan Transformasi Digital Planning, Corporate Strategy, Information Technology, and Digital Transformation
Susi Meyrista Tarigan	Wakil Ketua Deputy Chairman	Komisaris Commissioner	Akuntansi, Perencanaan Strategis, dan Sistem Informasi Accounting, Strategic Planning, and Information Systems
Taufik Rachman	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Made Sumadi Arta	Anggota Member	-	Akuntansi dan Audit Accounting and Auditing
Suhendar	Anggota Member	-	Akuntansi dan Audit Accounting and Auditing

Susunan Komite Audit Periode Juni - Desember 2025
Composition of the Audit Committee for the June to December 2025 Period

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Joddy Hernady	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Perencanaan, Strategis Korporasi, Teknologi Informasi, dan Transformasi Digital Planning, Corporate Strategy, Information Technology, and Digital Transformation
Susi Meyrista Tarigan	Wakil Ketua Deputy Chairman	Komisaris Commissioner	Akuntansi, Perencanaan Strategis, dan Sistem Informasi Accounting, Strategic Planning, and Information Systems
Taufik Rachman	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Suhendar	Anggota Member	-	Akuntansi dan Audit Accounting and Auditing
Muhamad Farkhan Supriyadi	Anggota Member	-	Akuntansi dan Audit Accounting and Auditing

PROFIL KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE PROFILE

Joddy Hernady

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 57 tahun per Desember 2025.
Aged 57 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Sains Teknik Elektro dari University of Southern California (USC), Los Angeles, USA. • Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).	• Master of Science, Electrical Engineering, University of Southern California (USC), Los Angeles - USA. • Bachelor's degree, Telecommunication Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Senior Advisor - Corporate Strategic Planning*, PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. • Komisaris PT. FitAja Digital Nusantara (Agustus 2022-Agustus 2023). • *Supervisor Board*, Cellum Global, Hungary (April 2018-Juni 2021). • Komisaris PT. Metranet (April 2020-Oktober 2020).	• Senior Advisor - Corporate Strategic Planning at PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. • Commissioner, PT FitAja Digital Nusantara (August 2022-August 2023). • Supervisory Board, Cellum Global, Hungary (April 2018-June 2021). • Commissioner, PT Metranet (April 2020-October 2020).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	19 November 2024-saat ini. 19 November 2024-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).	

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Susi Meyrista Tarigan

Wakil Ketua Komite Audit
Deputy Chairman of the Audit Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 49 tahun per Desember 2025.
Aged 49 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Akuntansi, Universitas Indonesia (2008). • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2001). • Diploma 3 Akuntansi di STAN (1997).	• Master's Degree, Accounting, Universitas Indonesia (2008). • Bachelor's Degree, Accounting, Universitas Indonesia (2001). • Diploma, Accounting, STAN (1997).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Kepala Bidang Anggota Komisaris di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015-2019). • Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015). • Kepala Bidang Sistem Informasi di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014-2015). • Sekretaris Dewan Komisaris I di PT Pelabuhan Indonesia (2014-2017). • Kasubid Perencanaan dan Pengembangan di PT Pelabuhan Indonesia (2010-2014).	• Head of Commissioner Member Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015–2019). • Head of Administration and Finance Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015). • Head of Information System Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014–2015). • Secretary to the Board of Commissioners I, PT Pelabuhan Indonesia (2014–2017). • Head of Planning and Development Subdivision, PT Pelabuhan Indonesia (2010–2014).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-225/MBU/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-225/MBU/10/2024 dated 17 October 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	17 Oktober 2024–saat ini. 17 October 2024–present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kementerian BUMN. Head of General and Financial Bureau, Ministry of SOEs.	

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Taufik Rachman

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 45 tahun per Desember 2025.
Aged 45 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S3 Hukum, Victoria University, Melbourne, Australia. • S2 Hukum, La Trobe University, Melbourne, Australia. • S1 Hukum, Universitas Airlangga.	• Doctoral degree in Law, Victoria University, Melbourne, Australia. • Master's degree in Law, La Trobe University, Melbourne, Australia. • Bachelor's degree in Law, Universitas Airlangga.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK (2024-2029). • Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023. • *Legal Consultant* Kominfo (2021). • Ketua Departemen Ilmu Hukum (2021-saat ini). • Ahli Pidana Indonesia (*Indonesian Criminal Law Expert*) USAID (Kontrak 2019).	• Selection Committee for KPK Leadership and Supervisory Board candidates (2024-2029). • Selection Committee for High Leadership Positions within the KPK in 2023. • Legal Consultant for the Ministry of Communication and Information Technology (2021). • Department Head of Legal Studies (2021-present). • Indonesian Criminal Law Expert for USAID (contract in 2019).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-279/MBU/11/2024 tanggal 19 November 2024. Decree of the Minister of SOEs No. SK-279/MBU/11/2024 dated 19 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	19 November 2024-saat ini. 19 November 2024-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).	

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Triandi*

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 64 tahun per Desember 2025.
Aged 64 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Akuntansi di Universitas Pancasila (2015). • Diploma IV Akuntansi di STAN (1991).	• Master of Accounting Universitas Pancasila (2015). • Diploma IV, Accounting, STAN (1991).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Anggota Komite Audit, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014-2019). • Anggota Komite Audit, PT Dahana (Persero) (2009-2014). • Dosen, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor (1996-saat ini). • Internal Auditor, Yayasan Kesatuan (2006-2017). • Auditor, Kantor Akuntan Publik (2001-2010).	• Audit Committee Member, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014-2019). • Audit Committee Member, PT Dahana (Persero) (2009-2014). • Lecturer, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor (1996-present). • Internal Auditor, Yayasan Kesatuan (2006-2017). • Auditor, Public Accounting Firm (2001-2010).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/I/2023 tanggal 20 Januari 2023. Board of Commissioners Decree No. 03/KOM/I/2023 dated 20 January 2023.	
Periode Jabatan *Term of Office*	30 Januari 2023-Maret 2025. 30 January 2023-March 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

*Berhenti menjabat per Maret 2025 | Term of office ended on March 2025.

Made Sumadi Arta*

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 65 tahun per Desember 2025.
Aged 65 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Manajemen di STIE IBII (1997). • *Diploma on Governmental Audit*, Modbury College of TAFE (1993). • Diploma III dan Diploma IV di STAN (1989).	• Master of Management, STIE IBII (1997). • Diploma in Governmental Audit, Modbury College of TAFE (1993). • Diploma III and Diploma IV, STAN (1989).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Unit Head s/d General Manager Internal Audit*, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2017). • *Senior Manager s/d Assistant Vice President Internal Audit & Risk Management*, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004). • Ketua Tim s/d Pengawas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1989-1998). • *Team Leader General Audit* Perusahaan Publik, Kantor Akuntan Publik Paul Lembong & Co (1987-1989).	• Unit Head to General Manager of Internal Audit, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2017). • Senior Manager to Assistant Vice President of Internal Audit & Risk Management, Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)(1999-2004). • Team Leader to Supervisor, Financial and Development Supervisory Agency (1989-1998). • Team Leader of General Audit of Public Companies, Public Accounting Firm Paul Lembong & Co (1987-1989).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No.04/KOM/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023. Board of Commissioners Decision No. 04/KOM/VI/2023 dated 23 June 2023.	
Periode Jabatan *Term of Office*	23 Juni 2023-Juni 2025. 23 June 2023-June 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

*Berhenti menjabat per Juni 2025 | Term of office ended on June 2025.

Suhendar*

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 49 tahun per Desember 2025.
Aged 49 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• *Master of Islamic Banking and Finance,* Universitas Indonesia (2009). • *Bachelor of Economics (Accounting),* Universitas Indonesia (2002).	• Master of Islamic Banking and Finance, Universitas Indonesia (2009). • Bachelor of Economics (Accounting), Universitas Indonesia (2002).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Assessor for Banking Risk Assessment, Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah* (LSPKS) (2024-saat ini). • *Board Member, Board of Indonesian Sharia Accounting Standard, Indonesian Accounting Institute* (DSAS-IAI) (2015-saat ini). • *Committee, Indonesian Islamic Banking Association* (ASBISINDO) (2015-2020). • *Committee,* BARa (*Banker Association for Risk Management*) (2015-2020).	• Assessor for Banking Risk Assessment, Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS) (2024-present). • Board Member, Board of Indonesian Sharia Accounting Standard, Indonesian Accounting Institute (DSAS-IAI) (2015-present). • Committee, Indonesian Islamic Banking Association (ASBISINDO) (2015-2020). • Committee, BARa (Banker Association for Risk Management) (2015-2020).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Decree of the Board of Commissioners No. 01/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	5 Maret 2025-saat ini. 5 March 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• *Assessor for Banking Risk Assessment,* Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS). • *Board Member, Board of Indonesian Sharia Accounting Standard, Indonesian Accounting Institute* (DSAS-IAI).	

*Mulai menjabat per Maret 2025 | Took office on March 2025.

Muhamad Farkhan Supriyadi*

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 51 tahun per Desember 2025.
Aged 51 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• *Master Degree* (S2), *Finance Department*, Universitas Trisakti (2005–2007). • S-1 Akuntansi, Universitas Diponegoro (1996–1999). • D-III Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1992–1995).	• Master's Degree, Finance Department, Universitas Trisakti (2005-2007). • Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Diponegoro (1996-1999). • Diploma III in Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1992-1995).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Partner*, PT Prosval Consulting (Juli 2022–saat ini). • *Audit Committee*, Perum Perhutani (April 2020–April 2025). • *Director*, PT Mitra Pratama Consulting (Januari 2021–Juni 2022). • *Associate Director*, McMillanwoods Capital Advisory (Oktober 2016–Desember 2020). • *Associate Partner*, KAP Rama Wendra (Oktober 2016–Desember 2020).	• Partner, PT Prosval Consulting (July 2022–present). • Audit Committee, Perum Perhutani (April 2020–April 2025). • Director, PT Mitra Pratama Consulting (January 2021–June 2022). • Associate Director, McMillanwoods Capital Advisory (October 2016–December 2020). • Associate Partner, KAP Rama Wendra (October 2016–December 2020).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No.04/KOM/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025. Decision of the BoC No. 04/KOM/VI/2025 dated 25 June 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	25 Juni 2025–saat ini | 25 June 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	*Partner*, PT Prosval Consulting (Juli 2022–saat ini | July 2022-present).	

*Mulai menjabat per Juni 2025 | Took office on June 2025.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Dalam rangka menjaga independensi, transparansi, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan, ASDP menyajikan informasi mengenai susunan dan keanggotaan Komite Audit. Pengungkapan ini menjadi bagian dari akuntabilitas Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Rincian anggota Komite Audit disajikan dalam tabel berikut:

INDEPENDENCY OF THE AUDIT COMMITTEE

To maintain independence, transparency, and prevent conflicts of interest, ASDP disclose the composition and membership of the Audit Committee, as part of the Audit Committee's accountability as a supporting organ of the Board of Commissioners. Details of the Audit Committee members are presented in the following table:

Independensi Anggota Komite Audit 2025
Independency of Audit Committee Members in 2025

Aspek Independensi *Independensi Aspects*	Joddy Hernady	Susi Meyrista Tarigan	Taufik Rachman	Triandi	Made Sumadi Arta	Suhendar	Muhamad Farkhan Supriyadi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Boards of Commissioners and Directors.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan afiliasi. Has no management relationship in the Company, Subsidiary, or affiliated Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Has no share ownership relationship in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. Has no family relations with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not serve as administrators of political parties, officials and government.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Sebagai bagian dari penguatan efektivitas pengawasan atas pelaporan keuangan, audit, kepatuhan, dan pengendalian internal, ASDP mendukung peningkatan kompetensi anggota Komite Audit melalui program pelatihan dan pengembangan yang relevan. Informasi mengenai pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris disajikan sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

As part of strengthening oversight effectiveness over financial reporting, auditing, compliance, and internal controls, ASDP supports competency development for Audit Committee members through relevant training programs. Information regarding the training and/or competency development attended by Audit Committee members from outside the Board of Commissioners is presented below:

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Anggota Komite Audit
Training and/or Competency Development of Members of the Audit Committee

Nama *Name*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Training and Competency Development*	Waktu dan Tempat *Date and Place*	Penyelenggara *Organizer*
• Suhendar • Muhamad Farkhan Supriyadi	*In House Training & Certification* QRGP (*Qualified Risk Governance Professional*)	18-19 September 2025, Kantor Pusat 18-19 September 2025, Head Office	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS)
• Suhendar • Muhamad Farkhan Supriyadi	*Executive Briefing* Penetapan Strategi Risiko Executive Briefing on Risk Strategy Determination	01 Oktober 2025, Kantor Pusat 1 October 2025, Head Office	CRMS

RAPAT KOMITE AUDIT

Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit dalam membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya terkait penelaahan laporan keuangan, audit internal dan eksternal, pengendalian internal, kepatuhan, serta tindak lanjut hasil audit. Seluruh hasil pembahasan rapat didokumentasikan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan pengawasan.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Audit Committee meetings are held periodically, at least 1 (one) time on each month, to support the committee in assisting the Board of Commissioner's oversight functions, particularly regarding the review of financial statements, internal and external audits, internal controls, compliance, and audit follow-ups. All meeting discussions are documented in minutes of meetings and submitted to the Board of Commissioners for oversight consideration.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 kali. Rincian agenda rapat, tanggal pelaksanaan, dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit disajikan dalam tabel berikut:

MEETING AGENDA OF AUDIT COMMITTEE

Throughout 2025, the Audit Committee convened a total of 14 meetings. Details regarding meeting agendas, execution dates, and member attendance rates are presented in the following table:

Agenda Rapat Komite Audit
Meeting Agenda of Audit Committee

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
1.	09 Januari 2025 09 January 2025	Pembahasan *Update* Usulan Struktur Organisasi.	Discussion of the Proposed Organizational Structure Update.
2.	29 Januari 2025 29 January 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris 2025 3. Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d Desember 2024 dan Laporan Manajemen Perusahaan *Unaudited* Tahun 2024 4. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the BoC's 2025 Activity Schedule 3. Discussion of the Company's Performance as of December 2024 and the 2024 Unaudited Company Management Report 4. Miscellaneous.
3.	26 Februari 2025 26 February 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2025 3. Pembahasan Progres Pelaksanaan Audit untuk Tahun Buku 2024.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in January 2025 3. Discussion of Audit Progress for the FY 2024.
4.	03 Maret 2025 03 March 2025	Perkenalan Anggota Komite Baru.	Introduction of New Committee Members.

Agenda Rapat Komite Audit
Meeting Agenda of Audit Committee

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
5.	19 Maret 2025 19 Maret 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in February 2025 3. Miscellaneous.
6.	19 Juni 2025 19 June 2025	Pembahasan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Usulan Calon Mitra Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut (TJP).	Discussion of the Board of Commissioners Written Response to the Proposal of Prospective Carrier Liability Insurance (TJP) Partners.
7.	23 Juni 2025 23 June 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in May 2025 3. Miscellaneous.
8.	08 Juli 2025 08 July 2025	1. Wawancara Kandidat Kepala SPI 2. Rapat Komisaris Utama dengan Anggota Komite.	1. Interview of the Head of Internal Audit Candidate 2. President Commissioner Meeting with Committee Members.
9.	28 Juli 2025 28 July 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Semester I Tahun 2025.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance on First Half of 2025.
10.	22 Agustus 2025 22 August 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2025 3. *Update* Isu Strategis Perusahaan.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in July 2025 3. Update on the Company's Strategic Issues.
11.	26 September 2025 26 September 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2025 3. Pembahasan RKAP Tahun 2026.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in August 2025 3. Discussion of the 2026 WPB.
12.	24 Oktober 2025 24 October 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2025 3. Pembahasan Pembahasan Laporan Manajemen TW II 2025.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in September 2025 3. Discussion of the Management Report for the Q2 2025.
13.	21 November 2025 21 November 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2025 3. Persiapan Nataru 2025.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in October 2025. 3. Preparation for Nataru Event 2025.
14.	19 Desember 2025 19 December 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2025 3. Persiapan Nataru 2025.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of Company Performance in November 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

FREQUENCY DAN ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS

The frequency and attendance of meetings of each member of the Audit Committee is presented in the table below:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Anggota Komite Audit
Frequency and Attendance of Audit Committee Members' Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Komite Audit *Audit Committee Meetings*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Pecentage*
Joddy Hernady	Ketua Chairman	14	14	100%
Susi Meyrista Tarigan	Wakil Ketua Deputy Chairman	14	13	92,86%
Taufik Rachman	Anggota Member	14	14	100%
Suhendar*	Anggota Member	11	11	100%
Muhamad Farkhan Supriyadi**	Anggota Member	7	7	100%
Triandi***	Anggota Member	1	1	100%
Made Sumadi Arta****	Anggota Member	7	7	100%

*Mulai menjabat per Maret 2025 | Took office on March 2025.
**Mulai menjabat per Juni 2025 | Took office on June 2025.
***Berhenti menjabat per Maret 2025 | Term of office ended on March 2025.
****Berhenti menjabat per Juni 2025 | Term of office ended on June 2025.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris sesuai Piagam Komite Audit dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan Dewan Komisaris terhadap sistem pengendalian internal, fungsi audit internal, audit eksternal, serta tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan.

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Komite Audit melaksanakan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal ASDP melalui penelaahan laporan yang disampaikan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), auditor eksternal, manajemen, serta penyedia *assurance* lainnya. Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa kerangka pengendalian internal telah diterapkan secara memadai, termasuk terhadap area yang memiliki risiko signifikan, kelemahan pengendalian, serta rencana perbaikan yang diperlukan. Hasil penelaahan tersebut menjadi bahan masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan kepada Direksi.

PENGAWASAN TERHADAP FUNGSI AUDIT INTERNAL

Komite Audit melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit internal melalui evaluasi atas Piagam Audit Internal atau *Internal Audit Charter*, kepatuhan pelaksanaan audit terhadap piagam tersebut, serta efektivitas pelaksanaan program kerja SPI. Pengawasan dilakukan melalui pembahasan rencana kerja audit, laporan hasil pemeriksaan, rekomendasi kepada unit kerja, serta pemantauan tindak lanjut atas temuan audit internal. Komite Audit juga melakukan pembahasan berkala dengan SPI untuk memastikan fungsi audit internal berjalan independen, objektif, dan memberikan nilai tambah bagi penguatan pengendalian internal ASDP.

IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES IN 2025

Throughout 2025, the Audit Committee carried out tasks delegated by the Board of Commissioners in accordance with the Audit Committee Charter and the approved work plan. The execution of these duties was aimed at strengthening the Board of Commissioner's oversight over the internal control system, the internal audit function, external audits, and the follow-up of oversight recommendations.

ASSESSMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Audit Committee supervised the effectiveness of ASDP's internal control system by reviewing reports submitted by the Internal Audit Unit (SPI), external auditors, management, and other assurance providers. The review is conducted in efforts to ensure that the internal control framework was adequately implemented, including across high-risk areas, control deficiencies, and required remediation plans. The results of these reviews served as inputs for the Board of Commissioners in providing directives to the Board of Directors.

OVERSIGHT OF THE INTERNAL AUDIT FUNCTION

The Audit Committee monitored the implementation of internal audit function by evaluating the Internal Audit Charter, compliance of audit implementation with the referenced charter, and the effectiveness of Internal Audit Unit's work programs. Oversight was maintained through discussions on audit work plans, audit result reports, recommendations to work units, and tracking the follow-up of internal audit findings. The Committee also held regular discussions with SPI to ensure the internal audit function remained independent, objective, and added value to ASDP's internal controls.

PENILAIAN AUDIT EKSTERNAL

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diusulkan kepada RUPS. Rekomendasi tersebut mempertimbangkan independensi KAP, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, kompetensi dan pengalaman auditor, serta hasil evaluasi atas kinerja auditor pada periode sebelumnya. Melalui proses tersebut, Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan audit eksternal dilakukan secara profesional dan sesuai standar yang berlaku.

SELEKSI AUDITOR EKSTERNAL

Dalam rangka mendukung rekomendasi Dewan Komisaris atas penunjukan KAP untuk audit Laporan Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2025, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap KAP berdasarkan sejumlah parameter. Parameter tersebut meliputi kesesuaian pelaksanaan audit dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kecukupan waktu pekerjaan lapangan, kecukupan jumlah dan kompetensi tim audit, efektivitas komunikasi audit, serta kualitas pelaporan dan *deliverables* lainnya.

PENUGASAN LAIN DARI DEWAN KOMISARIS

Komite Audit juga melaksanakan penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam mendukung fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Penugasan tersebut antara lain mencakup evaluasi atas Laporan Manajemen bulanan dan kinerja ASDP, penyusunan masukan bagi tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen triwulanan, serta penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulan IV dan Laporan Keuangan tahunan *unaudited*. Komite Audit juga mendukung pembahasan teknis dengan unit kerja di bawah Direksi terkait usulan kegiatan Perseroan yang memerlukan tanggapan atau persetujuan Dewan Komisaris.

EVALUATION OF EXTERNAL AUDITS

The Audit Committee provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditors or a Public Accounting Firm (KAP) to be proposed at the GMS. Recommendations considered the KAP's independence, audit scope, fees, auditor competence and experience, as well as performance evaluations from the previous period. Through this process, the Audit Committee supported the Board of Commissioner in ensuring that the external audit was conducted professionally and in accordance with applicable standards.

EXTERNAL AUDITOR SELECTION

To support the Board of Commissioner's recommendation for the appointment of a KAP to audit PT ASDP Indonesia Ferry's 2025 Financial Statements, the Audit Committee evaluated candidates based on several parameters. These parameters included alignment with Public Accountant Professional Standards (SPAP), adequacy of fieldwork time, adequacy of audit team size and competence, effectiveness of audit communication, and the quality of reporting and other deliverables.

OTHER ASSIGNMENTS FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Audit Committee carried out other tasks assigned by the Board of Commissioners to support oversight and advisory functions for the Board of Directors. These assignments included evaluating monthly Management Reports and ASDP's performance, formulating inputs for the Board of Commissioner's response to quarterly Management Reports, and reviewing the Q4 Management Report and unaudited annual Financial Statements. The Committee also supported technical discussions with work units under the Board of Directors regarding proposed corporate actions requiring Board of Commissioner response or approval.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam aspek nominasi, pengembangan, penilaian kinerja, serta remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan, piagam komite, serta prinsip independensi, objektivitas, profesionalisme, kewajaran, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*. Ruang lingkup tugas Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup penelaahan kebijakan nominasi, evaluasi komposisi dan kompetensi organ Perseroan, pemberian rekomendasi remunerasi, serta dukungan terhadap penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan komite di bawah Dewan Komisaris.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Seluruh hasil kajian dan rekomendasi komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

The Nomination and Remuneration Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners and reports directly to the Board. The committee was established to strengthen oversight functions, particularly on the nomination, development, performance evaluation, and remuneration of the Board of Commissioners and its supporting organs, as well as the Board of Directors.

In performing its duties, the Nomination and Remuneration Committee is guided by statutory laws, the committee charter, and the principles of independence, objectivity, professionalism, fairness, and Good Corporate Governance. The scope of its duties includes reviewing nomination policies, evaluating the composition and competency of Company organs, providing remuneration recommendations, and supporting performance evaluations of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and sub-Board of Commissioner committees.

Nomination and Remuneration Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. All assessment outcomes and recommendations are reported to the Board of Commissioner to serve as consideration in its oversight function.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi ASDP didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dasar hukum pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
6. Anggaran Dasar ASDP; dan
7. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ASDP.

LEGAL BASIS FOR THE FORMATION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The formation of the ASDP Nomination and Remuneration Committee is based on legal regulations, the Articles of Association, and Good Corporate Governance principles. The legal foundations for establishing the Committee include:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as last amended by Law No. 6 of 2023;
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and its amendments;
3. Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
5. Indonesian General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
6. ASDP's Articles of Association; and
7. ASDP's Nomination and Remuneration Committee Charter.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki pedoman kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Piagam tersebut menjadi acuan bagi komite dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, mekanisme kerja, serta penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dikaji secara berkala dan dapat dimutakhirkan apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta praktik tata kelola terbaik atau *best practices*. Muatan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup antara lain:

1. Ketentuan Umum;
2. Tata Kelola;
3. Tugas dan Wewenang;
4. Pedoman Rapat dan Pelaksanaan Tugas; dan
5. Pedoman Nominasi dan Remunerasi.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee follows a working manual, the Nomination and Remuneration Committee Charter established by the Board of Commissioners. It serves as a reference for the committee on its duties, responsibilities, authority, working mechanisms, and the formulation of recommendations to the Board of Commissioners.

The Nomination and Remuneration Committee Charter is reviewed periodically and may be updated as necessary to maintain alignment with organizational growth, regulatory changes, and governance best practices. The charter covers areas such as:

1. General Provisions;
2. Governance;
3. Duties and Authorities;
4. Guidelines for Meetings and Duty Implementation; and
5. Guidelines for Nomination and Remuneration.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, khususnya terkait sistem pengelolaan talenta, penilaian kinerja, pengembangan organ Perseroan, struktur organisasi, serta kebijakan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Melakukan penelaahan berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta atau *Talent Management System* ASDP, termasuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
2. Mengevaluasi sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta atau *Talent Classification* yang dilaksanakan oleh Direksi;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan Direksi kepada Dewan Komisaris sebagai *Selected Talent*, untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan kepada RUPS/Menteri sebagai *Nominated Talent*;
4. Mengevaluasi calon wakil ASDP yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
5. Mengevaluasi usulan KPI individu anggota Direksi;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
8. Mengevaluasi kebijakan remunerasi pegawai yang memerlukan persetujuan atau tanggapan dari Dewan Komisaris;
9. Mengevaluasi usulan Direksi terkait struktur organisasi ASDP;
10. Menyusun dan melakukan peninjauan atas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi;
11. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Komite Nominasi dan Remunerasi serta menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Mengakses dokumen, data, dan informasi ASDP yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas komite; dan
13. Memperoleh masukan dari pihak eksternal atau independen yang profesional apabila diperlukan, serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In executing its duties, the Nomination and Remuneration Committee works collectively to assist the Board of Commissioners in its oversight and advisory roles, particularly concerning talent management systems, performance evaluations, corporate organ development, organizational structure, and remuneration policies. The Committee answers directly to the Board of Commissioners.

The core duties of the Nomination and Remuneration Committee include:

1. Conducting periodic reviews of ASDP's Talent Management System, including monitoring and evaluating its execution;
2. Evaluating the systems and procedures for Talent Classification implemented by the Board of Directors;
3. Validating and calibrating talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioner as Selected Talent, to produce a shortlist of talent to be nominated to the GMS/Minister as Nominated Talent;
4. Evaluating candidates representing ASDP to serve as Board of Directors or Board of Commissioners members at subsidiaries before submission to the GMS/Minister;
5. Evaluating individual KPI proposals for members of the Board of Directors;
6. Preparing proposed individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
7. Preparing proposed development programs for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
8. Evaluating employee remuneration policies that require approval or feedback from the Board of Commissioners;
9. Evaluating organizational structure proposals submitted by the Board of Directors;
10. Reviewing and drafting the Nomination and Remuneration Committee Charter;
11. Compiling the Committee's Annual Work Plan and Budget and submitting periodic reports to the Board of Commissioners in line with applicable rules;
12. Accessing ASDP documents, data, and information required to perform committee duties; and
13. Obtaining input from professional external or independent parties when required, and executing other authorities granted by the Board of Commissioners.

MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Sementara itu, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali periode masa jabatan berikutnya.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi, hasil evaluasi kinerja, serta ketentuan yang berlaku.

TERM OF OFFICE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The term of office for Nomination and Remuneration Committee members who are also serving as members of the Board of Commissioners expires automatically when their tenure on the Board of Commissioner ends. Meanwhile, committee members from outside the composition of Board of Commissioners serve a 3-year term, which can be extended for 1 additional term.

These provisions do not limit the Board of Commissioner's authority to dismiss Nomination and Remuneration Committee members at any time based on organizational needs, performance evaluations, and applicable regulations.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, serta anggota komite. Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, dibantu oleh Wakil Ketua merangkap anggota yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris, serta 2 orang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris.

STRUCTURE, COMPOSITION, AND EXPERTISE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Board of Commissioners establishes the Nomination and Remuneration Committee, consisting of a Chairman, a Deputy Chairman concurrently serving as a member, and committee members. The Committee is led by a Chairman who is a member of the Board of Commissioners, assisted by a Deputy Chairman (also a Board of Commissioner member), and 2 members who are not part of the Board of Commissioner.

Salah satu anggota yang bukan berasal dari Dewan Komisaris merangkap sebagai Sekretaris Komite. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

One of the non-Board of Commissioner members also serves as the Committee Secretary. The Chairman, Deputy Chairman, and members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners following a BOC Decree.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Periode Januari - Februari 2025

Composition of the Nomination and Remuneration Committee for January to February 2025

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Achmad Baidowi	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Jurnalistik, SDM, dan Perencanaan Strategis Journalism, HR, and Strategic Planning
Elba Damhuri	Wakil Ketua Deputy Chairman	Komisaris Commissioner	Jurnalistik dan Manajemen Risiko Journalism and Risk Management
Taufik Rachman	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Munir M. Ali	Anggota Member	-	SDM, Perencanaan Strategis, Ekonomi, dan Manajemen Risiko HR, Strategic Planning, Economics, and Risk Management

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Periode Maret - Desember 2025

Composition of the Nomination and Remuneration Committee for March to December 2025

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Achmad Baidowi	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Jurnalistik, SDM, dan Perencanaan Strategis Journalism, HR, and Strategic Planning
Elba Damhuri	Wakil Ketua Deputy Chairman	Komisaris Commissioner	Jurnalistik dan Manajemen Risiko Journalism and Risk Management
Taufik Rachman	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Surahman	Anggota Member	-	SDM dan Psikologi HR and Psychology

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Achmad Baidowi

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination & Remuneration Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 45 tahun per Desember 2025.
Aged 45 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S3 Pendidikan Doktor Politik dan Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • S2 Pendidikan Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional Jakarta. • S1 Sosiologi Agama dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	• Doctoral degree in Politics and Government, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • Master's degree in Political Science, Universitas National Jakarta. • Bachelor's degree in Sociology of Religion, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	Anggota DPR RI tercatat dari tahun 2016-2024. Selama di DPR RI, beliau aktif terlibat dalam panitia perumusan RUU Pemilu, RUU Ketahanan Siber, RUU Cipta Kerja, dan RUU Ibukota Negara.	A member of the DPR RI (House of Representatives) from 2016-2024. While in the DPR RI, he was actively involved in the formulation committee of the Election Bill, Cyber Resilience Bill, Job Creation Bill, and State Capital Bill.
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No.02/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Decision of the BoC No. 02/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	6 Maret 2025-saat ini. 6 March 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Ketua Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Ketua Yayasan Wakaf Qur'an Indonesia. • Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). • Wakil Ketua Umum II DPP Peradaban. • Ketua Bidang BUMN MN KAHMI.	• President Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Chairman of Waqaf Qur'an Indonesia Foundation. • Expert Council Member of Indonesian Association of Muslim Intellectuals (ICMI). • Deputy Chairman II of DPP Peradaban. • Head of SOEs Division, MN KAHMI.

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Elba Damhuri

Wakil Ketua Komite Nomasi dan Remunerasi
Deputy Chairman of the Nomination & Remuneration Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 51 tahun per Desember 2025.
Aged 51 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S2 Magister Ekonomi Politik Global dari University of Newcastle United Kingdom. • S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Bandung.	• Master's degree, Global Political Economy, University of Newcastle, United Kingdom. • Bachelor's degree, Communication Studies, Universitas Islam Bandung.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	Jurnalis senior dan editor di Indonesia, beliau dikenal atas kontribusinya di industri media, khususnya sebagai Pemimpin Redaksi Harian Republika. Selain menjalankan tugas editorial, ia sering menulis tentang isu-isu ekonomi, politik, dan global. Dengan pengalaman jurnalistiknya yang luas, ia kerap diundang sebagai pembicara di berbagai forum mengenai media dan komunikasi.	Senior journalist and editor in Indonesia, renowned for contributions to the media industry, particularly as Chief Editor of Harian Republika. Also a frequent writer of economic, political, and global issues. The extensive journalistic experience leads to numerous invitations to speak at various forums on media and communication.
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No.02/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Decision of the BoC No. 02/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	5 Maret 2025–saat ini. 5 March 2025–present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Juru Bicara Kementerian Perhubungan.	• Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Spokesperson for the Ministry of Transportation.

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Taufik Rachman

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination & Remuneration Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 45 tahun per Desember 2025.
Aged 45 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S3 Hukum, Victoria University, Melbourne, Australia. • S2 Hukum, La Trobe University, Melbourne, Australia. • S1 Hukum, Universitas Airlangga.	• Doctoral degree in Law, Victoria University, Melbourne, Australia. • Master's degree in Law, La Trobe University, Melbourne, Australia. • Bachelor's degree in Law, Universitas Airlangga.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK (2024-2029). • Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023. • *Legal Consultant* Kominfo (2021). • Ketua Departemen Ilmu Hukum (2021-saat ini). • Ahli Pidana Indonesia (*Indonesian Criminal Law Expert*) USAID (Kontrak 2019).	• Selection Committee for KPK Leadership and Supervisory Board candidates (2024-2029). • Selection Committee for High Leadership Positions within the KPK in 2023. • Legal Consultant for the Ministry of Communication and Information Technology (2021). • Department Head of Legal Studies (2021-present) • Indonesian Criminal Law Expert for USAID (contract in 2019).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No.02/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Decision of the BoC No. 02/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	5 Maret 2025-saat ini. 5 March 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Anggota Komite Audit PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).	• Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Member of the Audit Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Munir M. Ali*

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination & Remuneration Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 61 tahun per Desember 2025.
Aged 61 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• *Master's Degree in Business Administration,* University of Illinois, Urbana Champaign (1994). • *Bachelor's Degree in Accounting,* Universitas Indonesia (1990).	• Master's Degree in Business Administration, University of Illinois, Urbana Champaign (1994) • Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Indonesia (1990)
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Center for Investment and Business Advisory (Member of* Crowe Global) – *Partner, Managing Partner; latest as Lead Partner for Performance Advisory.* • Crowe Indonesia – *Chief Executive Officer.* • PT Jababeka, Tbk – *Group Financial Controller.* • Prasetio, Utomo & Co (*Member of* Arthur Andersen) – *Senior Consultant.* • Universitas Indonesia – *System Consultant of Accounting Development Center.*	• Center for Investment and Business Advisory (Member of Crowe Global) – Partner, Managing Partner; latest as Lead Partner for Performance Advisory. • Crowe Indonesia – Chief Executive Officer. • PT Jababeka, Tbk – Group Financial Controller. • Prasetio, Utomo & Co (Member of Arthur Andersen) – Senior Consultant. • Universitas Indonesia – System Consultant of Accounting Development Center.
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No SK 06/KOM/IV/2024 Tanggal 23 April 2024. Board of Commissioners Decision No. SK 06/KOM/IV/2024 dated 23 April 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	23 April 2024–Februari 2025. 23 April 2024–February 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

*Berhenti menjabat per Februari 2025 dan dialihtugaskan ke Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi per Maret 2025 | Term of office ended on February 2025 and transferred to the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee as of March 2025.

Surahman*

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination & Remuneration Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 42 tahun per Desember 2025.
Aged 42 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• *Master of Psychology*, Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Jakarta (2015-2020). • *Master of Management*, STIE IBMT Surabaya (2017-2019). • *Bachelor of Psychology*, UIN Malang (2002-2007).	• Master of Psychology, Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Jakarta (2015-2020). • Master of Management, STIE IBMT Surabaya (2017-2019). • Bachelor of Psychology, UIN Malang (2002-2007).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Expert Staff*, DPR-RI (2014-2024). • *Researcher, Ministry of Health* (2015-2016). • *Assessor*, PT ASA (2013-2016). • *Counselor and Teacher*, SMA Sumenep (2010-2013). • *Assistant Manager*, Klinik Surya Medika (2009-2011).	• Expert Staff, DPR-RI (2014-2024). • Researcher, Ministry of Health (2015-2016). • Assessor, PT ASA (2013-2016). • Counselor and Teacher, SMA Sumenep (2010-2013). • Assistant Manager, Klinik Surya Medika (2009-2011).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No.02/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Decision of the BoC No. 02/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	5 Maret 2025-saat ini. 5 March 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

*Mulai menjabat per Maret 2025 | Took office on March 2025.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam rangka menjaga independensi, transparansi, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan, ASDP menyajikan informasi mengenai susunan dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengungkapan ini menjadi bagian dari akuntabilitas Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait nominasi, penilaian kinerja, pengembangan, dan remunerasi organ Perseroan. Rincian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan dalam tabel berikut:

INDEPENDENCE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

To safeguard independence, transparency, and prevent conflicts of interest, ASDP discloses information regarding the composition and membership of the Nominations and Remuneration Committee. This disclosure forms part of the Committee's accountability as a supporting organ of the Board of Commissioner in overseeing nomination, performance evaluation, development, and remuneration. Details of the committee members are presented in the table below:

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independency of the Nomination and Remuneration Committee

Aspek Independensi *Independency Aspects*	Achmad Baidowi	Elba Damhuri	Taufik Rachman	Munir M. Ali	Surahman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Boards of Commissioners and Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Has no management relationship in the Company, Subsidiary, or affiliated company.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan. Has no share ownership relationship in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Has no family relations with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Nomination and Remuneration Committee.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah. Does not serve as administrators of political parties, officials and government.	✓	✓	✓	✓	✓

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sebagai bagian dari penguatan efektivitas pengawasan di bidang nominasi, remunerasi, penilaian kinerja, serta pengelolaan talenta, ASDP mendukung peningkatan kompetensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi melalui program pelatihan dan pengembangan yang relevan. Informasi mengenai pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Dewan Komisaris disajikan sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY ENHANCEMENT OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERS

To strengthen oversight effectiveness in nomination, remuneration, performance evaluation, and talent management, ASDP supports competency enhancement for Nomination and Remuneration Committee members through relevant training and development programs. Information regarding training and/or development activities attended by non-Board of Commissioner committee members is outlined below:

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Training and/or Competency Development of Members of the Nomination and Remuneration Committee

Nama *Name*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Training and Competency Development*	Waktu dan Tempat *Date and Place*	Penyelenggara *Organizer*
Munir M. Ali	Membangun Ketahanan Operasional Bisnis melalui Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha Building Business Operational Resilience through a Business Continuity Management System	14 Juli | July 2025 Zoom Meeting	HC *Development*, Senin Belajar Bareng (SeBBar) Ferizyan Series #051
Munir M. Ali	*In House Training & Certification* QRGP (*Qualified Risk Governance Professional*)	18-19 September 2025, Kantor Pusat 18-19 September 2025, Head Office	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS)
Surahman	*Executive Briefing* Penetapan Strategi Risiko Executive Briefing on Risk Strategy Determination	01 Oktober 2025, Kantor Pusat 01 October 2025, Head Office	CRMS

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya terkait nominasi, penilaian kinerja, pengembangan talenta, struktur organisasi, serta kebijakan remunerasi. Seluruh hasil pembahasan rapat didokumentasikan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan pengawasan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

Nomination and Remuneration Committee meetings are held regularly, at least 1 (one) time per month, to support the committee in assisting the Board of Commissioner's oversight functions, specifically regarding nominations, performance reviews, talent development, organizational structure, and remuneration policies. All meeting deliberations are documented in minutes of meetings and forwarded to the Board of Commissioners.

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 15 kali. Rincian agenda rapat, tanggal pelaksanaan, dan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan dalam tabel berikut:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 15 meetings. Details of the meeting agendas, meeting dates, and attendance levels are presented in the following table:

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Meeting Agenda of Nomination and Remuneration Committee

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
1.	09 Januari 2025 09 January 2025	Pembahasan *Update* Usulan Struktur Organisasi	Discussion of the Proposed Organizational Structure Update
2.	29 Januari 2025 29 January 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris 2025 3. Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d Desember 2024 dan Laporan Manajemen Perusahaan *Unaudited* Tahun 2024 4. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the BoC's 2025 Activity Schedule 3. Discussion of the Company's Performance as of December 2024 and the 2024 Unaudited Company Management Report 4. Miscellaneous.
3.	26 Februari 2025 26 February 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2025 3. Pembahasan Progres Pelaksanaan Audit untuk Tahun Buku 2024	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in January 2025 3. Discussion of Audit Progress for the FY 2024
4.	03 Maret 2025 03 March 2025	Perkenalan Anggota Komite Baru.	Introduction of New Committee Members.
5.	19 Maret 2025 19 Maret 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in February 2025 3. Miscellaneous.
6.	19 Juni 2025 19 June 2025	Pembahasan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Usulan Calon Mitra Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut (TJP)	Discussion of the Board of Commissioners' Written Response to the Proposal of Prospective Carrier Liability Insurance (TJP) Partners
7.	23 Juni 2025 23 June 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in May 2025 3. Miscellaneous.
8.	08 Juli 2025 08 July 2025	1. Wawancara Kandidat Kepala SPI 2. Rapat Komisaris Utama dengan Anggota Komite	1. Interview of the Head of Internal Audit Candidate 2. President Commissioner Meeting with Committee Members
9.	28 Juli 2025 28 July 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Semester I Tahun 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance on First Half of 2025
10.	22 Agustus 2025 22 August 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2025 3. *Update* Isu Strategis Perusahaan	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in July 2025 3. Update on the Company's Strategic Issues
11.	16 September 2025 16 September 2025	Rapat Terkait RKA Dekom Tahun 2025	Meeting on the BOC's 2025 Work Plan and Budget
12.	26 September 2025 26 September 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2025 3. Pembahasan RKAP Tahun 2026	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in August 2025 3. Discussion of the 2026 WPB

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Meeting Agenda of Nomination and Remuneration Committee

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
13.	24 Oktober 2025 24 October 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2025 3. Pembahasan Pembahasan Laporan Manajemen TW II 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in September 2025 3. Discussion of the Management Report for the Q2 2025
14.	21 November 2025 21 November 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2025 3. Persiapan Nataru 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in October 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025
15.	19 Desember 2025 19 December 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2025 3. Persiapan Nataru 2025	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of Company Performance in November 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

The frequency and attendance of meetings of each member of the Nomination and Remuneration Committee is detailed in the table herein:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Frequency and Attendance of Nominasi dan Remunerasi Members' Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi *Nomination and Remuneration Committee Meetings*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of* Attendance	Persentase *Percentage*
Achmad Baidowi	Ketua | Chairman	15	15	100%
Elba Damhuri	Wakil Ketua | Deputy Chairman	15	15	100%
Taufik Rachman	Anggota | Member	15	15	100%
Munir M. Ali*	Anggota | Member	3	3	100%
Surahman**	Anggota | Member	11	11	100%

*Berhenti menjabat per Februari 2025 dan dialihtugaskan ke Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi per Maret 2025.
Term of office ended on February 2025 and transferred to the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee as of March 2025.
**Mulai menjabat per Maret 2025 | Took office on March 2025.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta rencana kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas tersebut difokuskan pada penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, rekomendasi program pengembangan, evaluasi kebijakan nominasi, serta pengelolaan talenta ASDP.

REKOMENDASI PENILAIAN KINERJA ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap 6 anggota Direksi yang sedang menjabat sesuai format Kementerian BUMN, berdasarkan Surat Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN No. S-151/DSI.MBU/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal *Updating Talent Pool* Kementerian BUMN Tahun 2025. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan bersama, kemudian diteruskan kepada Ketua *Cluster Talent Committee* (CTC) BUMN Klaster Logistik Laut melalui Surat No. 09/KOM/III/2025 tanggal 20 Maret 2025.

REKOMENDASI PROGRAM PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun rekomendasi program pengembangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hasil penilaian kinerja, kebutuhan penguatan kompetensi, perkembangan regulasi, serta tantangan strategis Perseroan. Program yang direkomendasikan mencakup pelatihan, lokakarya, seminar, *benchmark*, dan kegiatan pengayaan strategis lainnya yang relevan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organ Perseroan.

IMPLEMENTATION OF NOMINATION DAN REMUNERATION COMMITTEE ACZTIVITIES IN 2025

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee carried out duties delegated by the Board of Commissioners based on the Committee Charter and the established work plan. Activities focused on performance evaluations for the Board of Directors and Board of Commissioners, development program recommendations, nomination policy evaluations, and ASDP talent management.

PERFORMANCE EVALUATION RECOMMENDATIONS FOR DIRECTORS AND COMMISSIONERS

The Nomination and Remuneration Committee evaluated 6 incumbent members of the Board of Directors using the Ministry of SOEs format, pursuant to the Letter of the Deputy for HR, Technology, and Information of the Ministry of SOEs No. S-151/DSI.MBU/12/2024 dated 17 December 2024, regarding the 2025 Ministry of SOEs Updating Talent Pool. The evaluation results were submitted to the Board of Commissioners for joint approval and subsequently forwarded to the Chairman of the Maritime Logistics Cluster SOE Cluster Talent Committee (CTC) via Letter No. 09/KOM/III/2025 dated 20 March 2025.

DEVELOPMENT PROGRAM RECOMMENDATIONS FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Nomination and Remuneration Committee drafted development program recommendations for the Boards of Commissioners and Directors based on performance appraisal results, competency requirements, regulatory developments, and the Company's strategic challenges. Recommended initiatives included training, workshops, seminars, benchmarking, and other strategic enrichment activities designed to support the execution of duties.

EVALUASI KEBIJAKAN NOMINASI PERSEROAN

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi atas kebijakan nominasi dengan memperhatikan prinsip independensi, objektivitas, meritokrasi, keberagaman, serta kesesuaian dengan kebutuhan strategis ASDP. Evaluasi mencakup sistem, prosedur, dan kriteria nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, baik pada tingkat induk maupun anak perusahaan, termasuk proses validasi dan kalibrasi *selected talent* menjadi *nominated talent*. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada Ketua CTC BUMN Klaster Logistik Laut melalui Surat Nomor: 09/KOM/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 dan Surat Nomor: 21/KOM/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.

EVALUATION OF THE COMPANY'S NOMINATION POLICY

The Committee evaluated the nomination policy by focusing on independence, objectivity, meritocracy, diversity, and alignment with ASDP's strategic requirements. The evaluation covered systems, procedures, and criteria for nominating candidates to the Board of Directors and/or Board of Commissioners at both parent and subsidiary levels, including the validation and calibration of selected talent into nominated talent. The findings were submitted to the Board of Commissioner and forwarded to the Chairman of the Maritime Logistics Cluster SOE CTC via Letter No. 09/KOM/III/2025 dated 20 March 2025, and Letter No. 21/KOM/VI/2025 dated 10 June 2025.

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN TALENTA PERSEROAN

Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi sistem pengelolaan talenta sebagai bagian dari upaya memperkuat kesinambungan kepemimpinan dan kesiapan organisasi. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan manajemen talenta BUMN, proses identifikasi, klasifikasi, pengembangan, suksesi, serta validasi *selected talent* untuk memastikan objektivitas, transparansi, dan kesesuaian kriteria dalam penetapan *nominated talent*. Hasil evaluasi menjadi dasar rekomendasi perbaikan pengelolaan talenta ASDP secara berkelanjutan.

EVALUATION OF THE COMPANY'S TALENT MANAGEMENT SYSTEM

The Nomination and Remuneration Committee evaluated the talent management system to strengthen leadership continuity and organizational readiness. The evaluation assessed SOE talent management policies alongside identification, classification, development, succession, and selected talent validation processes to ensure objectivity, transparency, and alignment with criteria for determining nominated talent. The output serves as a foundation for ongoing improvements to ASDP's talent management.

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam aspek manajemen risiko, pengendalian risiko strategis, kepatuhan, pengendalian internal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara terintegrasi di lingkungan ASDP.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan, piagam komite, serta prinsip independensi, objektivitas, profesionalisme, kehati-hatian, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*. Ruang lingkup tugas komite mencakup penelaahan kebijakan dan penerapan manajemen risiko, pemantauan profil risiko Perseroan, evaluasi efektivitas mitigasi risiko, pengawasan penerapan tata kelola, serta pemberian masukan kepada Dewan Komisaris atas isu-isu strategis yang berkaitan dengan risiko dan tata kelola terintegrasi.

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Seluruh hasil kajian, evaluasi, dan rekomendasi komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners that reports directly to the Board of Commissioner. The committee was formed to reinforce the oversight function, specifically over risk management, strategic risk control, compliance, internal controls, and the integrated application of Good Corporate Governance across ASDP.

In performing its duties, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee complies with statutory laws, the committee charter, and principles of independence, objectivity, professionalism, prudence, and Good Corporate Governance (GCG). Its scope of work includes reviewing risk management policies and implementation, monitoring the Company's risk profile, evaluating mitigation effectiveness, overseeing governance practices, and providing the Board of Commissioner with strategic inputs on risk and integrated governance matters.

Members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. All studies, evaluations, and recommendations are reported to the Board of Commissioner to guide its oversight function.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi ASDP didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dasar hukum pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

LEGAL BASIS FOR RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The establishment of the ASDP Risk Monitoring and Integrated Governance Committee is anchored in legal regulations, the Articles of Association, and Good Corporate Governance principles. The legal basis for the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee formation include:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as last amended by Law No. 6 of 2023;

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
5. Anggaran Dasar ASDP; dan
6. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.02/KOM/III/2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan ASDP. Pelaksanaan tugas komite dilakukan melalui evaluasi, pemantauan, penelaahan, serta pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas aspek risiko, mitigasi risiko, kepatuhan, dan implementasi GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi meliputi:

1. Mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko ASDP, termasuk pelaksanaan program dan tahapan yang dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko serta fungsi terkait tata kelola perusahaan.
2. Menelaah penilaian risiko pada aspek pendapatan, pembiayaan, pelaksanaan *docking*, serta rencana investasi yang memiliki dampak material bagi Perseroan.
3. Mengawasi pelaksanaan mitigasi risiko oleh Divisi Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait, termasuk pemantauan atas efektivitas langkah pengendalian risiko.
4. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko.
5. Mengawasi aktivitas Divisi Sistem Manajemen Perusahaan dalam memantau penerapan GCG oleh unit kerja terkait.

2. Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
4. Indonesian General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
5. ASDP's Articles of Association; and
6. Board of Commissioners Decree No. SK.02/KOM/III/2024 concerning the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Charter.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in supervising risk management and good corporate governance across the ASDP organization. The committee achieves this through evaluations, monitoring, reviews, and by providing risk, mitigation, compliance, and GCG implementation recommendations to the Board of Commissioner.

The duties and responsibilities of the Committee include:

1. Evaluating the effectiveness of ASDP's risk management framework, including programs executed by the Risk Management Division and governance-related functions.
2. Reviewing risk assessments regarding revenue, financing, docking activities, and investment plans that have a material impact on the Company.
3. Supervising risk mitigation execution handled by the Risk Management Division alongside relevant work units, including monitoring control effectiveness.
4. Monitoring the follow-up of recommendations made by the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee implemented by the Risk Management Division.
5. Supervising the Corporate Management System Division in monitoring GCG implementation across relevant work units.

6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi komite yang dilaksanakan oleh Divisi Sistem Manajemen Perusahaan dalam bidang GCG.
7. Melakukan analisis dan penilaian atas proposal RKAP dan RJPP yang disampaikan oleh Direksi, khususnya dari aspek risiko, tata kelola, dan keberlanjutan usaha.
8. Menelaah informasi terkait risiko dan manajemen risiko Perseroan yang tercantum dalam laporan yang dipublikasikan, termasuk melalui diskusi dengan manajemen dan *review* atas laporan terkait.
9. Menelaah informasi penerapan GCG dalam laporan yang dipublikasikan, termasuk melalui pembahasan dengan manajemen dan penilaian terhadap efektivitas implementasi GCG.
10. Apabila diperlukan, mengusulkan penggunaan jasa konsultan independen di bidang manajemen risiko atau GCG untuk menelaah proses manajemen risiko dan penerapan tata kelola, termasuk memberikan masukan terkait kriteria dan kompetensi konsultan serta mengawasi pelaksanaan pekerjaannya bersama fungsi terkait.

MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Sementara itu, anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali periode masa jabatan berikutnya.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi, hasil evaluasi kinerja, serta ketentuan yang berlaku.

6. Monitoring the follow-up of committee recommendations carried out by the Corporate Management System Division in the field of GCG.
7. Analyzing and assessing WPB and LTP proposals submitted by the Board of Directors, particularly regarding risk, governance, and business sustainability.
8. Reviewing information related to Company risks and risk management contained in published reports, including through management discussions and report reviews.
9. Reviewing GCG implementation information within published reports, including through management discussions and evaluations of GCG implementation effectiveness.
10. Proposing, if necessary, the engagement of independent professional consultants in risk management or GCG to review risk management processes and governance implementation, including providing input on consultant criteria/competence and supervising their work alongside related functions.

TERM OF OFFICE OF THE RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The term of office for Risk Monitoring and Integrated Governance Committee members who also serves in the Board of Commissioners automatically ends when their Board of Commissioner tenure concludes. Meanwhile, Risk Monitoring and Integrated Governance Committee members from outside the Board of Commissioner serve a 3-year term, and is renewable for 1 (one) subsequent term.

These rules do not limit the Board of Commissioner's authority to dismiss Risk Monitoring and Integrated Governance Committee members at any time based on organizational demands, performance evaluations, and applicable provisions.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh anggota komite yang memiliki kompetensi serta pengalaman yang relevan di bidang manajemen risiko, tata kelola, kepatuhan, dan pengendalian internal. Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi ASDP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Periode Januari 2025

STRUCTURE, MEMBER, AND EXPERTISE OF THE RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee is led by a Committee Chairman who is a member of the Board of Commissioners, supported by committee members holding relevant competence and experience in risk management, governance, compliance, and internal controls. The composition of the ASDP Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2025 is as follows:

Composition of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee for January 2025

Fungsi Pemantau Risiko
Risk Monitoring Function

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Siti Ariani Muflikhah	Ketua Fungsi Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Function	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komunikasi dan Manajemen Risiko Communication and Risk Management
Taufik Rachman	Wakil Ketua Fungsi Pemantau Risiko Deputy Chairman of the Risk Monitoring Function	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Elba Damhuri	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	Komisaris Commissioner	Jurnalistik dan Manajemen Risiko Journalism and Risk Management
Agus Edy Susilo	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	-	Ekonomi dan Transportasi Economics and Transportation
Eko Nur Surachman	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	-	Teknologi Informasi, Keuangan, dan Manajemen Risiko Information Technology, Finance, and Risk Management

Fungsi Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Function

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Achmad Baidowi	Ketua Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Chairman of the Integrated Governance Function	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Jurnalistik, SDM, dan Perencanaan Strategis Journalism, Human Resources, and Strategic Planning
Siti Ariani Muflikhah	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komunikasi dan Manajemen Risiko Communications and Risk Management
Taufik Rachman	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Joddy Hernady	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner	Pertahanan Negara, Kebijakan Publik, dan Hukum di Indonesia National Defense, Public Policy, and Law in Indonesia
Susi Meyriska Tarigan	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner	Perencanaan Strategis Korporasi, Teknologi Informasi, dan Transformasi Digital Corporate Strategic Planning, Information Technology, and Digital Transformation
Elba Damhuri	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner	Jurnalistik dan Manajemen Risiko Journalism and Risk Management

Fungsi Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Function

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Ni Made Sasant	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner PT Indonesia Ferry Properti	-
Tumpal Simare Mare	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Independen Independent Commissioner PT Indonesia Ferry Properti	-
Kusnadi Chandra Wijaya	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner PT Jembatan Nusantara	Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development

Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Periode Maret - November 2025

Composition of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee for the March - November 2025

Fungsi Pemantau Risiko
Risk Monitoring Function

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Siti Ariani Muflikhah	Ketua Fungsi Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Function	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komunikasi dan Manajemen Risiko Communication and Risk Management
Taufik Rachman	Wakil Ketua Fungsi Pemantau Risiko Deputy Chairman of the Risk Monitoring Function	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Elba Damhuri	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	Komisaris Commissioner	Jurnalistik dan Manajemen Risiko Journalism and Risk Management
Eko Nur Surachman	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	-	Teknologi Informasi, Keuangan dan Manajemen Risiko Information Technology, Finance and Risk Management
Munir M. Ali	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	-	SDM, Perencanaan Strategis, Ekonomi, dan Manajemen Risiko HR, Strategic Planning, Economics, and Risk Management

Fungsi Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Function

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Achmad Baidowi	Ketua Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Chairman of the Integrated Governance Function	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Jurnalistik, SDM, dan Perencanaan Strategis Journalism, HR, and Strategic Planning
Siti Ariani Muflikhah	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komunikasi dan Manajemen Risiko Communication and Risk Management
Joddy Hernady	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner	Pertahanan Negara, Kebijakan Publik, dan Hukum di Indonesia National Defense, Public Policy, and Indonesian Law
Susi Meyriska Tarigan	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner	Perencanaan Strategis Korporasi, Teknologi Informasi, dan Transformasi Digital Corporate Strategic Planning, Information Technology, and Digital Transformation
Elba Damhuri	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner	Jurnalistik dan Manajemen Risiko Journalism and Risk Management

Fungsi Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Function

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Taufik Rachman	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Vinsensius Jemadu	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Utama President Commissioner PT Indonesia Ferry Properti	-
Ahmad Fanani	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner PT Indonesia Ferry Properti	-
Ni Made Sasant	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner PT Indonesia Ferry Properti	-
Lilik Handoyo	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner PT Indonesia Ferry Properti	-
Kusnadi Chandra Wijaya	Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Function	Komisaris Commissioner PT Jembatan Nusantara	Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development

Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Periode Desember 2025

Composition of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee for December 2025

Fungsi Pemantau Risiko
Risk Monitoring Function

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Keahlian *Expertise*
Siti Ariani Muflikhah	Ketua Fungsi Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Function	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komunikasi dan Manajemen Risiko Communication and Risk Management
Taufik Rachman	Wakil Ketua Fungsi Pemantau Risiko Deputy Chairman of the Risk Monitoring Function	Komisaris Commissioner	Hukum dan Manajemen Risiko Law and Risk Management
Elba Damhuri	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	Komisaris Commissioner	Jurnalistik dan Manajemen Risiko Journalism and Risk Management
Ahkmad Syafiudin	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	-	Teknologi Informasi, Keuangan dan Manajemen Risiko IT, Finance and Risk Management
Munir M. Ali	Anggota Fungsi Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Function	-	SDM, Perencanaan Strategis, Ekonomi, dan Manajemen Risiko HR, Strategic Planning, Economics, and Risk Management

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

PROFILE OF THE RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Siti Ariani Muflikhah

Ketua Fungsi Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Function

Indonesia, Jakarta

Berusia 56 tahun per Desember 2025.
Aged 56 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S2 Magister *Management of Communication* dari Universitas Trisakti. • *Film Summer School (International Documentary Film Festival & Goethe* ASEAN). • *Broadcast Media* BBC di *Word Service Unit.* • S1 *Philosophy* dari Universitas Gadjah Mada.	• Master's degree in Communication Management, Universitas Trisakti. • Film Summer School (International Documentary Film Festival & Goethe ASEAN). • Broadcast Media training, BBC World Service Unit. • Bachelor's degree in Philosophy, Universitas Gadjah Mada.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Konsultan pada tahun 2020. • Staf Informasi dan Komunikasi Politik di Kantor Staf Presiden pada tahun 2015-2019. • Produser di Tanamera (Dokumenter & Program TV) pada periode 2008-2014.	• Consultant (2020). • Political Communication and Information Staff, Presidential Executive Office (2015-2019). • Producer at Tanamera (Documentaries & TV Programs) (2008-2014).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/KOM/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025. Board of Commissioners Decision No. 08/KOM/XI/2025 dated 1 December 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	1 Desember 2025-saat ini. 1 December 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Komisaris Independen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Independent Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Integrated Governance Function of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).	

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Taufik Rachman

Wakil Ketua Fungsi Pemantau Risiko
Deputy Chairman of the Risk Monitoring Function

Indonesia, Jakarta

Berusia 45 tahun per Desember 2025.
Aged 45 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S3 Hukum, Victoria University, Melbourne, Australia. • S2 Hukum, La Trobe University, Melbourne, Australia. • S1 Hukum, Universitas Airlangga.	• Doctoral degree in Law, Victoria University, Melbourne, Australia. • Master's degree in Law, La Trobe University, Melbourne, Australia. • Bachelor's degree in Law, Universitas Airlangga.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK (2024-2029). • Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023. • *Legal Consultant* Kominfo (2021). • Ketua Departemen Ilmu Hukum (2021-saat ini). • Ahli Pidana Indonesia (Indonesian *Criminal Law Expert*) USAID (Kontrak 2019).	• Selection Committee for KPK Leadership and Supervisory Board candidates (2024-2029). • Selection Committee for High Leadership Positions within the KPK in 2023. • Legal Consultant for the Ministry of Communication and Information Technology (2021). • Department Head of Legal Studies (2021-present). • Indonesian Criminal Law Expert for USAID (contract in 2019).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/KOM/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025. Decision of the BoC No. 08/KOM/XI/2025 dated 1 December 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	1 Desember 2025-saat ini. 1 December 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Anggota Komite Audit PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Audit Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).	

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Elba Damhuri

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 51 tahun per Desember 2025.
Aged 51 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S2 Magister Ekonomi Politik Global dari University of Newcastle United Kingdom. • S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Bandung.	• Master's degree, Global Political Economy, University of Newcastle, United Kingdom. • Bachelor's degree, Communication Studies, Universitas Islam Bandung.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	Jurnalis senior dan editor di Indonesia, beliau dikenal atas kontribusinya di industri media, khususnya sebagai Pemimpin Redaksi Harian Republika. Selain menjalankan tugas editorial, ia sering menulis tentang isu-isu ekonomi, politik, dan global. Dengan pengalaman jurnalistiknya yang luas, ia kerap diundang sebagai pembicara di berbagai forum mengenai media dan komunikasi.	Senior journalist and editor in Indonesia, renowned for contributions to the media industry, particularly as Chief Editor of Harian Republika. Also a frequent writer of economic, political, and global issues. The extensive journalistic experience leads to numerous invitations to speak at various forums on media and communication.
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/KOM/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025. Board of Commissioners Decree No. 08/KOM/XI/2025 dated 1 December 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	1 Desember 2025–saat ini. 1 December 2025–present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Deputy Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Juru Bicara Kementerian Perhubungan. Spokesperson for the Ministry of Transportation.	

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Agus Edy Susilo*

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Indonesia, Jakarta

Berusia 71 tahun per Desember 2025.
Aged 71 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (2002). • Magister Transportasi di ITB (1988). • Sarjana Ekonomi di Universitas Mulawarman (1983).	• Doctor of Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (2002). • Master of Transportation, ITB (1988). • Bachelor of Economics, Universitas Mulawarman (1983).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Staf Komisaris, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2019-2020). • Tenaga Ahli Direksi Bidang Ekonomi, Kepelabuhanan dan Pengawasan, PT Pelindo I (Persero) (2017-2019). • Komisaris, PT Prima Indonesia Logistik (2015-2019). • Anggota Dewan Pengawas BLU Politeknik Penerbangan Surabaya (2017-2019). • Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Kepelabuhanan, dan Pengawasan Dewan Komisaris, PT Pelindo I (Persero) (2014-2017).	• Staff to Commissioner, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2019-2020). • Expert Advisor to the Board of Directors for Economics, Port Affairs, and Supervision, PT Pelindo I (Persero) (2017-2019). • Commissioner, PT Prima Indonesia Logistik (2015-2019). • Member of the Supervisory Board of the Surabaya Aviation Polytechnic Public Service Agency (2017-2019). • Expert Advisor to the Board of Commissioners for Economics, Port Affairs, and Supervision, PT Pelindo I (Persero) (2014-2017).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No. 12/KOM/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Board of Commissioners Decree No. 12/KOM/XI/2024 dated 28 November 2024.	
Periode Jabatan *Term of Office*	28 November 2024-Maret 2025. 28 November 2024-Maret 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

*Berhenti menjabat per Maret 2025 | Term of office ended on March 2025.

Eko Nur Surachman*

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Indonesia, Tangerang

Berusia 44 tahun per Desember 2025.
Aged 44 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• *Master of Commerce (Advanced)*, University of Queensland, Australia (2011). • Diploma IV Akuntansi (*Accounting*) di STAN (2006).	• Master of Commerce (Advanced), University of Queensland, Australia (2011). • Diploma IV Accounting, STAN (2006).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Head of Subdivision - Evaluation on Government Support to Infrastructure Project, Directorate of Government Support Management and Infrastructure Financing, Directorate General of Budget Financing and Risk Management,* Kementerian Keuangan (*Ministry of Finance*) (2014-2016). • *Head of Subdivision Risk of Transportation Infrastructure - Risk Management Unit - Fiscal Policy Agency,* Kementerian Keuangan (*Ministry of Finance*) Republik Indonesia (2011 – 2014). • *Risk Analyst, Risk Management Unit – Fiscal Policy Agency, Kementerian Keuangan* (Ministry of Finance) Republik Indonesia (2008 – 2009). • Dosen (*Lecturer*), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006-2008).	• Head of Subdivision - Evaluation on Government Support to Infrastructure Project, Directorate of Government Support Management and Infrastructure Financing, Directorate General of Budget Financing and Risk Management, Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) (2014-2016). • Head of Subdivision Risk of Transportation Infrastructure - Risk Management Unit - Fiscal Policy Agency, Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) Republik Indonesia (2011 – 2014). • Risk Analyst, Risk Management Unit – Fiscal Policy Agency, Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) Republik Indonesia (2008 – 2009). • Dosen (Lecturer), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006-2008).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Board of Commissioners Decision No. 03/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	5 Maret 2025-Desember 2025. 5 March 2025-December 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

*Berhenti menjabat per Desember 2025 | Term of office ended on December 2025.

Achmad Baidowi

Ketua Fungsi Tata Kelola Terintegrasi
Chairman of the Integrated Governance Function

Indonesia, Jakarta

Berusia 45 tahun per Desember 2025.
Aged 45 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• S3 Pendidikan Doktor Politik dan Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • S2 Pendidikan Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional Jakarta. • S1 Sosiologi Agama dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	• Doctoral degree in Politics and Government, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • Master's degree in Political Science, Universitas National Jakarta. • Bachelor's degree in Sociology of Religion, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	Anggota DPR RI tercatat dari tahun 2016-2024. Selama di DPR RI, beliau aktif terlibat dalam panitia perumusan RUU Pemilu, RUU Ketahanan Siber, RUU Cipta Kerja, dan RUU Ibukota Negara.	A member of the DPR RI (House of Representatives) from 2016-2024. While in the DPR RI, he was actively involved in the formulation committee of the Election Bill, Cyber Resilience Bill, Job Creation Bill, and State Capital Bill.
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Decision of the BoC No. 03/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	5 Maret 2025-Desember 2025. 5 March 2025-December 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Ketua Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Ketua Yayasan Wakaf Qur'an Indonesia. • Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). • Wakil Ketua Umum II DPP Peradaban. • Ketua Bidang BUMN MN KAHMI.	• President Commissioner of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Chairman of the Nomination & Remuneration Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Chairman of Waqaf Qur'an Indonesia Foundation. • Expert Council Member of Indonesian Association of Muslim Intellectuals (ICMI). • Deputy Chairman II of DPP Peradaban. • Head of SOEs Division, MN KAHMI.

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Susi Meyrista Tarigan

Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Integrated Governance Function

Indonesia, Jakarta

Berusia 49 tahun per Desember 2025.
Aged 49 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Akuntansi, Universitas Indonesia (2008). • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2001). • Diploma 3 Akuntansi di STAN (1997).	• Master's Degree, Accounting, Universitas Indonesia (2008). • Bachelor's Degree, Accounting, Universitas Indonesia (2001). • Diploma, Accounting, STAN (1997).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Kepala Bidang Anggota Komisaris di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015-2019). • Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015). • Kepala Bidang Sistem Informasi di PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014- 2015). • Sekretaris Dewan Komisaris I di PT Pelabuhan Indonesia (2014-2017). • Kasubid Perencanaan dan Pengembangan di PT Pelabuhan Indonesia (2010-2014).	• Head of Commissioner Member Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015–2019). • Head of Administration and Finance Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2015). • Head of Information System Division, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014–2015). • Secretary to the Board of Commissioners I, PT Pelabuhan Indonesia (2014–2017). • Head of Planning and Development Subdivision, PT Pelabuhan Indonesia (2010–2014).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Decision of the Board of Commissioners No. 03/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	5 Maret 2025–Desember 2025. 5 March 2025–December 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Wakil Ketua Komite Audit. Deputy Chairman of the Audit Committee. • Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kementerian BUMN. Head of General and Financial Bureau, Ministry of SOEs.	

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Joddy Hernady

Anggota Fungsi Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Integrated Governance Function

Indonesia, Jakarta

Berusia 57 tahun per Desember 2025.
Aged 57 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Sains Teknik Elektro dari University of Southern California (USC), Los Angeles, USA. • Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).	• Master of Science, Electrical Engineering, University of Southern California (USC), Los Angeles – USA. • Bachelor's degree, Telecommunication Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Senior Advisor – Corporate Strategic Planning*, PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. • Komisaris PT. FitAja Digital Nusantara (Agustus 2022–Agustus 2023). • *Supervisory Board*, Cellum Global, Hungary (April 2018–Juni 2021). • Komisaris PT. Metranet (April 2020–Oktober 2020).	• Senior Advisor – Corporate Strategic Planning at PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. • Commissioner, PT FitAja Digital Nusantara (August 2022–August 2023). • Supervisory Board, Cellum Global, Hungary (April 2018–June 2021). • Commissioner, PT Metranet (April 2020–October 2020).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Decision of the Board of Commissioners No. 03/KOM/III/2025 dated 5 March 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	5 Maret 2025-Desember 2025. 5 March 2025-December 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	• Anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). • Ketua Komite Audit PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Chairman of the Audit Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).	

Profil lengkap telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Dewan Komisaris | Full profile is presented in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-chapter.

Ahkmad Syafiudin

Anggota Fungsi Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Function

Indonesia, Bekasi

Berusia 47 tahun per Desember 2025.
Aged 47 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Ph.D (Cand) *Islamic Banking and Finance*, Unishams Malaysia. • Magister Akuntansi, Universitas Mercu Buana (2019). • S1 Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta (2001).	• Ph.D. (Cand.) Islamic Banking and Finance, Unishams Malaysia. • Master of Accounting, Mercu Buana University (2019). • Bachelor of Accounting Education, Jakarta State University (2001).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, STEBANK Islam (2025-saat ini). • Kaprodi Perbankan Syariah, STEBANK Islam (2024-2025). • Dosen Tetap Akuntansi Perbankan Syariah, STEBANK Islam (2019-saat ini). • Pengurus YAPI Al Azhar Rawamangun (Bendahara) (2016-2021). • Dosen Luar Biasa, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) (2014-2016).	• Deputy Chairman III for Student Affairs and Cooperation, STEBANK Islam (2025-present). • Head of Islamic Banking Study Program, STEBANK Islam (2024-2025). • Permanent Lecturer in Islamic Banking Accounting, STEBANK Islam (2019-present). • Manager of YAPI Al Azhar Rawamangun (Treasurer) (2016-2021). • Extraordinary Lecturer, Jakarta State University (UNJ) (2014-2016).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KOM/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025. Board of Commissioners Decision No. 08/KOM/XI/2025 dated 1 December 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	1 Desember 2025-saat ini. 1 December 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, STEBANK Islam. Deputy Chairman III for Student Affairs and Cooperation, STEBANK Islam.	

Munir M. Ali

Anggota Fungsi Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Function

Indonesia, Bekasi

Berusia 61 tahun per Desember 2025.
Aged 61 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• *Master's Degree in Business Administration,* University of Illinois, Urbana Champaign (1994). • *Bachelor's Degree in Accounting,* Universitas Indonesia (1990).	• Master's Degree in Business Administration, University of Illinois, Urbana Champaign (1994). • Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Indonesia (1990).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Center for Investment and Business Advisory (Member of Crowe Global) – Partner, Managing Partner; latest as Lead Partner for Performance Advisory.* • Crowe Indonesia – *Chief Executive Officer.* • PT Jababeka, Tbk – *Group Financial Controller.* • Prasetio, Utomo & Co *(Member of Arthur Andersen) – Senior Consultant.* • Universitas Indonesia – *System Consultant of Accounting Development Center.*	• Center for Investment and Business Advisory (Member of Crowe Global) – Partner, Managing Partner; latest as Lead Partner for Performance Advisory. • Crowe Indonesia – Chief Executive Officer. • PT Jababeka, Tbk – Group Financial Controller. • Prasetio, Utomo & Co (Member of Arthur Andersen) – Senior Consultant. • Universitas Indonesia – System Consultant of Accounting Development Center.
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	• Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KOM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025. Board of Commissioners Decision No. 03/KOM/III/2025 dated 5 March 2025. • Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KOM/XI/2025 tanggal 1 Desember 2025. Board of Commissioners Decision No. 08/KOM/XI/2025 dated 1 December 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	• 5 Maret 2025 - 1 Desember 2025 | 5 March 2025 - 1 December 2025. • 1 Desember 2025 - saat ini | 1 December 2025 - present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka menjaga independensi, transparansi, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan, ASDP menyajikan informasi mengenai susunan dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Pengungkapan ini menjadi bagian dari akuntabilitas Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait manajemen risiko, tata kelola, kepatuhan, dan pengendalian internal. Rincian anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi disajikan dalam tabel berikut:

INDEPENDENCY OF THE RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

To maintain the aspects of independence, transparency, and to prevent conflicts of interest, ASDP presents information on the structure and membership of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. This disclosure underpins the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee's accountability as a Board of Commissioner supporting organ across risk management, governance, compliance, and internal control oversight. Details of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee members are presented in the following table:

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Independency of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Nama *Name*	**Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi** *Has no financial relationship with the Boards of Commissioners and Directors.*	**Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi.** *Has no management relationship in the Company, Subsidiary, or affiliated company.*	**Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan.** *Has no share ownership relationship in the Company.*	**Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.** *Has no family relations with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Nomination and Remuneration Committee.*	**Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.** *Does not serve as administrators of political parties, officials and government.*
Siti Ariani Muflikhah	✓	✓	✓	✓	✓
Taufik Rachman	✓	✓	✓	✓	✓
Elba Damhuri	✓	✓	✓	✓	✓
Agus Edy Susilo	✓	✓	✓	✓	✓
Eko Nur Surachman	✓	✓	✓	✓	✓
Achmad Baidowi	✓	✓	✓	✓	✓
Susi Meyrista Tarigan	✓	✓	✓	✓	✓
Joddy Hernady	✓	✓	✓	✓	✓
Ni Made Sasant	✓	✓	✓	✓	✓
Tumpal Simare Mare	✓	✓	✓	✓	✓
Kusnadi Chandra Wijaya	✓	✓	✓	✓	✓
Munir M. Ali	✓	✓	✓	✓	✓
Vinsensius Jemadu	✓	✓	✓	✓	✓
Ahmad Fanani	✓	✓	✓	✓	✓
Lilik Handoyo	✓	✓	✓	✓	✓
Ahkmad Syafiudin	✓	✓	✓	✓	✓

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai bagian dari penguatan efektivitas pengawasan di bidang manajemen risiko, tata kelola terintegrasi, kepatuhan, dan pengendalian internal, ASDP mendukung peningkatan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi melalui program pelatihan dan pengembangan yang relevan. Informasi mengenai pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari luar Dewan Komisaris disajikan sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY ENHANCEMENT OF RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEMBERS

To strengthen the function of oversight effectiveness in risk management, integrated governance, compliance, and internal controls, ASDP supports competency development for Risk Monitoring and Integrated Governance Committee members through relevant training and development programs. Information regarding training and/or competency initiatives attended by non-Board of Commissioner committee members is shown below:

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Training and/or Competency Development of Members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Nama *Name*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Training and Competency Development*	Waktu dan Tempat *Date and Place*	Penyelenggara *Organizer*
• Munir M. Ali • Eko Nur Surachman	Membangun Ketahanan Operasional Bisnis melalui Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha Building Business Operational Resilience through a Business Continuity Management System	4 Juli | July 2025 *Zoom Meeting*	HC *Development*, Senin Belajar Bareng (SeBBar) Ferizyan Series #051
	In House Training & Certification QRGP (*Qualified Risk Governance Professional*)	18-19 September 2025, Kantor Pusat 18-19 September 2025, Head Office	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS)
	Executive Briefing Penetapan Strategi Risiko Executive Briefing on Risk Strategy Determination	01 Oktober 2025, Kantor Pusat 01 October 2025, Head Office	CRMS

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas komite dalam membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris, khususnya terkait penerapan manajemen risiko, pemantauan profil dan mitigasi risiko, penguatan tata kelola terintegrasi, kepatuhan, serta pengendalian internal. Seluruh hasil pembahasan rapat didokumentasikan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETINGS

Meetings of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee are held regularly, at least 1 (one) time each month, to support the committee's duties in assisting the Board of Commissioner's oversight, specifically regarding risk management implementation, risk profiling and mitigation monitoring, integrated governance strengthening, compliance, and internal controls. All meeting discussions resulted in outcomes that are documented in minutes of meetings and submitted to the Board of Commissioners for consideration in oversight implementation.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 kali. Rincian agenda rapat, tanggal pelaksanaan, dan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi disajikan dalam tabel berikut:

MEETING AGENDA OF THE RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Throughout 2025, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee held 14 meetings. Details of the meeting agendas, dates, and attendance levels of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee members are presented in the following table:

Tabel Rapat & Agenda Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Meetings & Agenda

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
1.	10 Januari 2025 10 January 2025	1. Pergantian anggota komite yang berakhir masa kerjanya pada 23 Januari 2024 2. Rencana Kerja Komisaris, khususnya terkait kunjungan dan fokus atensi 3. Detail Plafon Anggaran Dekom 2025.	1. Replacement of committee members whose terms expire on 23 January 2024 2. Commissioners' Work Plan, specifically of visits and focus areas 3. Detailed 2025 Board of Commissioners Budget Limit.
2.	29 Januari 2025 29 Januari 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris 2025 3. Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d Desember 2024 dan Laporan Manajemen Perusahaan *Unaudited* Tahun 2024 4. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the BoC's 2025 Activity Schedule 3. Discussion of the Company's Performance as of December 2024 and the 2024 Unaudited Company Management Report 4. Miscellaneous.
3.	26 Februari 2025 26 Februari 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2025 3. Pembahasan Progres Pelaksanaan Audit untuk Tahun Buku 2024.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in January 2025 3. Discussion of Audit Progress for the FY 2024.
4.	03 Maret 2025 03 March 2025	Perkenalan Anggota Komite Baru.	Introduction of New Committee Members.
5.	19 Maret 2025 19 Maret 2025	1. Pembahasan Matrik Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in February 2025 3. Miscellaneous.
6.	19 Juni 2025 19 June 2025	Pembahasan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Usulan Calon Mitra Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut (TJP).	Discussion of the Board of Commissioners' Written Response to the Proposal of Prospective Carrier Liability Insurance (TJP) Partners.
7.	23 Juni 2025 23 June 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2025 3. Lain-lain.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in May 2025 3. Miscellaneous.
8.	08 Juli 2025 08 July 2025	1. Wawancara Kandidat Kepala SPI 2. Rapat Komisaris Utama dengan Anggota Komite.	1. Interview of the Head of Internal Audit Candidate 2. President Commissioner Meeting with Committee Members.
9.	28 Juli 2025 28 July 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Semester I Tahun 2025.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance on First Half of 2025.
10.	22 Agustus 2025 22 August 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2025 3. *Update* Isu Strategis Perusahaan.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in July 2025 3. Update on the Company's Strategic Issues.
11.	26 September 2025 26 September 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2025 3. Pembahasan RKAP Tahun 2026.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in August 2025 3. Discussion of the 2026 WPB.
12.	24 Oktober 2025 24 October 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2025 3. Pembahasan Pembahasan Laporan Manajemen TW II 2025.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in September 2025 3. Discussion of the Management Report for the Q2 2025.
13.	21 November 2025 21 November 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2025 3. Persiapan Nataru 2025.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of the Company's Performance in October 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025.

Tabel Rapat & Agenda Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Meetings & Agenda

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	
14.	19 Desember 2025 19 December 2025	1. Pembahasan Matriks Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2025 3. Persiapan Nataru 2025.	1. Discussion of Follow-up Matrix to the Previous Meeting 2. Discussion of Company Performance in November 2025 3. Preparation for Nataru Event 2025.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETINGS

The meeting frequency and attendance of each member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee is detailed in the table below:

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Meetings Attendance Rate for the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Siti Ariani Muflikhah	Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Chairman of the Committee	14	14	100%
Taufik Rachman	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Deputy Chairman of the Committee	14	14	100%
Elba Damhuri	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Committee	14	14	100%
Agus Edy Susilo	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Committee	1	1	100%
Eko Nur Surachman	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Committee	11	11	100%
Achmad Baidowi	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Committee	14	14	100%
Susi Meyrista Tarigan	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Committee	14	13	92,86%
Joddy Hernady	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Committee	14	14	100%
Munir M. Ali	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Committee	11	11	100%
Ahkmad Syafiudin	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of the Committee	1	1	100%

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan tugas komite terbagi dalam 2 fungsi utama, yaitu fungsi pemantauan risiko dan fungsi tata kelola terintegrasi, dengan uraian sebagai berikut:

FUNGSI PEMANTAU RISIKO

Pada tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pengawasan dan evaluasi atas capaian penyelesaian program strategis manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh program strategis manajemen risiko mencatat capaian 100%, meliputi internalisasi budaya risiko, pemenuhan kompetensi organ pengelola risiko, pemenuhan implementasi *roadmap*, perbaikan penerapan manajemen risiko, simulasi dokumen BCP, pemutakhiran kebijakan manajemen risiko, asesmen *Risk Maturity Index*, pengembangan BCM di cabang baru, penerapan *stress testing* dan *internal control testing*, asistensi dan monitoring manajemen risiko pada induk, anak perusahaan, dan proyek, serta penyusunan profil risiko 2025.

Hasil monitoring tindak lanjut profil risiko utama korporat tahun 2025 menunjukkan capaian *output* sebesar 100%. Capaian tersebut turut mendorong penurunan indeks risiko dari *inherent risk* sebesar 8,33 menjadi *current risk* pada level 7,00 dalam *heat map risk*. Selanjutnya, program manajemen risiko yang telah ditetapkan akan terus didorong agar dilaksanakan sesuai target capaian dan jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga melaksanakan penugasan khusus dari Dewan Komisaris terkait pengawasan dan analisis kinerja keuangan Perseroan, serta memberikan masukan dalam rapat bulanan, khususnya pada area Manajemen Risiko dan *Quality Assurance*, termasuk masukan terkait level *output* dan *outcome* manajemen risiko. Komite juga aktif mendukung kegiatan Dewan Komisaris melalui pendampingan dalam rapat internal, rapat gabungan, serta kunjungan kerja ke Cabang Pontianak, Surabaya, Merak, Bakauheni, dan Anak Perusahaan PT Jembatan Nusantara.

IMPLEMENTATION OF RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE ACTIVITIES IN 2025

Throughout 2025, the committee's duties were divided into 2 core functions: the risk monitoring function and the integrated governance function, detailed as follows:

RISK MONITORING FUNCTION

In 2025, the Risk Monitoring Committee supervised and evaluated the completion of strategic risk management programs. Based on monitoring results, all strategic risk management programs achieved a 100% completion rate. This included risk culture internalization, risk management organ competency fulfillment, roadmap implementation fulfillment, risk management application improvements, BCP document simulations, risk management policy updates, Risk Maturity Index assessments, BCM development in new branches, stress testing and internal control testing implementation, risk management assistance and monitoring at parent, subsidiary, and project levels, as well as the formulation of the 2025 risk profile.

Monitoring of the follow-up on 2025 key corporate risk profiles showed a 100% output completion. This achievement helped drive down the risk index from an inherent risk of 8.33 to a current risk level of 7.00 on the risk heat map. Moving forward, designated risk management programs will continue to be championed to ensure execution remains aligned with targets and timelines.

Additionally, the Risk Monitoring Committee executed special assignments from the Board of Commissioners regarding the oversight and analysis of the Company's financial performance, and provided inputs during monthly meetings, particularly in Risk Management and Quality Assurance, including inputs on risk management output and outcome levels. The committee also supported the Board of Commissioner through assistance in internal meetings, joint meetings, and working visits to the Pontianak, Surabaya, Merak, and Bakauheni Branches, as well as the subsidiary, PT Jembatan Nusantara.

FUNGSI TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di ASDP menunjukkan capaian positif melalui pengawasan terhadap program strategis tata kelola perusahaan. Program tersebut mencakup penyiapan asesmen GCG tahun buku 2025, sosialisasi SMAP, penyusunan *risk register* SMAP dan pemenuhan indikator kinerja SMAP tahun 2025, ketentuan Tata Kelola Terintegrasi sesuai PER-2/MBU/03/2023 dan monitoring implementasinya, penyelarasan ketentuan internal dengan PER-1, PER-2, dan PER-3 Tahun 2023 pada induk maupun anak perusahaan, penyusunan KPI korporat, direktorat, dan unit kerja tahun 2025, serta penyusunan kebijakan dan SOP aksi korporasi. Seluruh program tersebut mencatat capaian 100%.

Dewan Komisaris juga telah menetapkan Keputusan Nomor SK.03/KOM/III/2025 tanggal 05 Maret 2025 mengenai perubahan susunan kepengurusan Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Komite Tata Kelola Terintegrasi menjalankan mandat pengawasan sesuai ketentuan regulasi, termasuk pemantauan sinergi induk dan anak perusahaan, penyempurnaan kebijakan tata kelola, serta evaluasi risiko terintegrasi.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan bersama unit Manajemen Risiko dan Satuan Pengawasan Intern (SPI), dengan melibatkan anak perusahaan, yaitu PT Jembatan Nusantara dan PT Indonesia Ferry Properti. Pada 06 Mei 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fokus pembahasan pada penyusunan dan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, penetapan usulan fokus area pengawasan, serta penyusunan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2025. Secara umum, Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi telah merealisasikan pembentukan struktur, pengesahan piagam, serta pelaksanaan rapat koordinasi strategis untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan sinergi induk dan anak perusahaan.

INTEGRATED GOVERNANCE FUNCTION

Throughout 2025, the implementation of Integrated Governance at ASDP yielded positive results through the oversight of strategic corporate governance programs. Programs included preparations for the FY 2025 GCG assessment, ABMS socialization, compiling the ABMS risk register and meeting 2025 ABMS performance indicators, managing Integrated Governance mandates in line with PER-2/MBU/03/2023 and monitoring its implementation, aligning internal regulations with PER-1, PER-2, and PER-3 of 2023 at both parent and subsidiary levels, drafting 2025 corporate, directorate, and work unit KPIs, as well as drafting corporate action policies and SOPs. All of these programs achieved a 100% completion rate.

The Board of Commissioners also issued Decree No. SK.03/KOM/III/2025 dated 05 March 2025, regarding management structure changes for the Risk Monitoring Committee and the Integrated Governance Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). The Integrated Governance Committee executed its oversight mandate pursuant to regulatory requirements, including monitoring parent-subsidiary synergies, refining governance policies, and evaluating integrated risks.

Oversight was conducted in tandem with the Risk Management unit and the Internal Audit Unit, involving subsidiaries PT Jembatan Nusantara and PT Indonesia Ferry Properti. On 06 May 2025, the Integrated Governance Committee held a coordination meeting focused on drafting and evaluating Integrated Governance Guidelines, defining proposed focus areas for oversight, and formulating the 2025 Integrated Governance Committee work program. Overall, the Board of Commissioners, through the Integrated Governance Committee, successfully established structures, ratified charters, and executed strategic coordination meetings to enhance governance, risk management, and synergies between the parent company and its subsidiaries.

KOMITE LAIN DI PERSEROAN
OTHER COMMITTEES IN COMPANY

Hingga 31 Desember 2025, ASDP membentuk komite-komite yang dinilai relevan dan memadai untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan, tata kelola, manajemen risiko, nominasi, dan remunerasi. Komite yang berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

Di luar komite-komite tersebut, ASDP tidak membentuk komite lain di bawah Dewan Komisaris. Struktur komite yang ada dinilai telah sesuai dengan kebutuhan pengawasan, kompleksitas usaha, serta ketentuan tata kelola yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara efektif.

As of 31 December 2025, ASDP has established relevant and adequate committees to support the effectiveness of oversight, governance, risk management, nomination, and remunerasi. The committees under the Board of Commissioners are the Audit Committee, the Nomination and Compensation Committee, and the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.

Apart from these committees, ASDP has not established any other committees under the Board of Commissioners. The existing structure is deemed in line with oversight requirement, business complexity, and applicable governance provisions in supporting the effective implementation of the Board of Commissioners' duties.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI
ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Di tingkat Direksi, ASDP didukung oleh organ dan unit kerja yang berperan dalam memperkuat pelaksanaan pengurusan, pengambilan keputusan strategis, keterbukaan informasi, pengendalian internal, manajemen risiko, serta sistem manajemen perusahaan. Organ dan unit pendukung tersebut meliputi Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Sistem Manajemen Perusahaan, serta unit kerja lainnya sesuai struktur organisasi Perseroan.

At the Board of Directors level, ASDP is supported by organs and work units that strengthen the management, strategic decision-making, information disclosure, internal controls, risk management, and the corporate management system. These supporting organs and units are Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Risk Management Division, Corporate Management System Division, and other units aligned with the Company's organizational structure.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berperan mendukung Direksi dalam pengelolaan komunikasi korporat, hubungan dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola.

CORPORATE SECRETARY

Supports the Board of Directors in managing corporate communication, relations with Shareholders and stakeholders, information disclosure, and compliance with governance provisions.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Berperan mendukung Direksi melalui pelaksanaan audit internal, evaluasi pengendalian internal, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit.

INTERNAL AUDIT UNIT

Supports the Board of Directors by conducting internal audits, evaluating internal controls, and monitoring the follow-up of audit findings.

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Divisi Manajemen Risiko (MR) bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan; memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi; melakukan pemantauan, evaluasi, dan konsolidasi profil risiko seluruh unit kerja menjadi profil risiko korporat; mengembangkan metodologi, sistem informasi, budaya, dan kompetensi manajemen risiko; serta menyusun dan mengimplementasikan strategi Business Continuity Management (BCM) untuk mendukung ketahanan dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

RISK MANAGEMENT DIVISION

The Risk Management Division is responsible for formulating the Company's risk management policies, strategies, and framework; ensuring the effective and integrated implementation of risk management; monitoring, evaluating, and consolidating the risk profiles of all work units into the corporate risk profile; developing risk management methodologies, information systems, culture, and competencies; as well as preparing and implementing the Business Continuity Management (BCM) strategy to support the Company's business resilience and continuity.

DIVISI SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN

Berperan mendukung pengelolaan sistem manajemen, pemutakhiran kebijakan dan prosedur, serta standardisasi proses bisnis. Unit kerja lainnya menjalankan fungsi operasional, bisnis, keuangan, SDM, teknologi informasi, layanan, dan fungsi pendukung lain sesuai kebutuhan pengelolaan ASDP.

CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM DIVISION

Supports the management of the management system, updating policies and procedures, and standardizing business processes. Other work units handle operational, business, financial, HR, information technology, services, and other supporting functions based on ASDP's management needs.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan tata kelola ASDP. Fungsi Sekretaris Perusahaan tidak hanya terbatas pada dukungan administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan komunikasi korporat, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penguatan hubungan dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan.

The Corporate Secretary is a supporting organ of the Board of Directors that holds a strategic role in strengthening the implementation of governance within ASDP. Its functions extend beyond administrative support to encompass managing corporate communication, information disclosure, compliance with applicable regulations, and strengthening relationships with Shareholders and stakeholders.

Dalam menjalankan perannya, Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa ASDP senantiasa memenuhi ketentuan terkait keterbukaan informasi dan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, guna mendukung efektivitas pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengelolaan Perseroan.

The Corporate Secretary ensures that ASDP consistently complies with requirements regarding information disclosure and steadily applies Good Corporate Governance principles. The Corporate Secretary is also responsible for providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners, both periodically and on an ad-hoc basis, to support effective decision-making, oversight, and management of the Company.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

ASDP menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat satu level di bawah Direksi yang memimpin fungsi Sekretariat Perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal ASDP dengan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan sumber daya manusia yang berlaku, termasuk ketentuan terkait promosi dan mutasi di lingkungan ASDP.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor S-KD.128/HK.001/ASDP-2021 tanggal 13 Desember 2021, dengan susunan sebagai berikut:

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE CORPORATE SECRETARY

ASDP designates the Corporate Secretary as an executive one level below the Board of Directors who leads the Corporate Secretariat function. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director through ASDP's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners, in accordance with applicable laws, regulations, and human resource policies, including provisions related to promotions and transfers within ASDP.

The Organizational Structure of the Corporate Secretary is based on the Decree of the Board of Directors No. S-KD.128/HK.001/ASDP-2021 dated 13 December 2021, with the following composition:

Struktur Organ Sekretariat Perusahaan
Organization Structure of the Corporate Secretariat

INDEPENDENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, objektif, dan independen dalam mendukung pelaksanaan tata kelola ASDP, khususnya terkait keterbukaan informasi, komunikasi korporat, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta penyediaan informasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

INDEPENDENCE OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary carries out their functions and responsibilities professionally, objectively, and independently to support ASDP's governance, particularly regarding information disclosure, corporate communication, stakeholder relations, and the provision of information to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pedoman kerja Sekretaris Perusahaan mengacu *Board Manual* Perusahaan yang disahkan pada tahun 2024.

CORPORATE SECRETARY CHARTER

The Corporate Secretary's work guidelines refer to the Company's Board Manual ratified in 2024.

PROFIL KEANGGOTAAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

THE PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY

Shelvy Arifin*

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Indonesia, Jakarta

Berusia 53 tahun per Desember 2025.
Aged 53 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Master of Business Administration di University of Grenoble (2013). • Magister Bisnis Administrasi di Universitas Indonesia (2013). • Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (2004).	• Master of Business Administration, University of Grenoble (2013). • Master of Business Administration, Universitas Indonesia (2013). • Bachelor's Degree in Communication Science, Universitas Indonesia (2004).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• VP *International Business*, Perum Peruri (2017). • VP *Creative & Marketing*, Shafira Corporation (2016-2017). • Direktur, Perum Produksi Film Negara (2013-2016). • *General Manager*, PT Balai Pustaka (Persero) (2011-2012). • *Directorate General of Marketing*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2010).	• VP International Business, Perum Peruri (2017). • VP Creative & Marketing, Shafira Corporation (2016-2017). • Director, Perum Produksi Film Negara (2013-2016). • General Manager, PT Balai Pustaka (Persero) (2011-2012). • Directorate General of Marketing, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2010).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: SK.852/PA.104/ASDP-2020 tanggal 8 Juli 2020. President Director Decree No. SK.852/PA.104/ASDP-2020 dated 8 July 2020.	
Periode Jabatan *Term of Office*	8 Juli 2020-11 November 2025. 8 July 2020-11 November 2025.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

*Berhenti menjabat per 11 November 2025 | Term of office ended on 11 November 2025.

Windy Sustia Andale*

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Indonesia, Jakarta

Berusia 40 tahun per Desember 2025.
Aged 40 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• *Master of Arts in International Relations*, University of Birmingham, United Kingdom (2009-2010). • *Student Exchange Program*, Peace Scholarship Program Recipients, Murdoch University, Australia (2006). • *Bachelor of Social Sciences*, Universitas Indonesia, Indonesia (2003-2007).	• Master of Arts in International Relations, University of Birmingham, United Kingdom (2009-2010). • Student Exchange Program, Peace Scholarship Program Recipients, Murdoch University, Australia (2006). • Bachelor of Social Sciences, Universitas Indonesia, Indonesia (2003-2007).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• *Vice President of Customer Services*, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Agustus 2022-November 2025). • *Senior Manager Ancillary Product Development*, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Maret 2022-Juli 2022). • *Senior Manager E-commerce*, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Mei 2019-Februari 2022). • *Sales Manager for Non-Government Corporate*, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Oktober 2018-Mei 2019). • *Sales Manager for Online Channel Distribution*, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Mei 2014-Oktober 2018).	• Vice President of Customer Services, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (August 2022-November 2025). • Senior Manager Ancillary Product Development, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (March 2022-July 2022). • Senior Manager E-commerce, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (May 2019-Februari 2022). • Sales Manager for Non-Government Corporate, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (October 2018-May 2019). • Sales Manager for Online Channel Distribution, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (May 2014-October 2018).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.1056/PA.104/JKTHC/XI/ASDP-2025 tanggal 11 November 2025. Board of Directors Decree No. SK.1056/PA.104/JKTHC/XI/ASDP-2025 dated 11 November 2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	11 November 2025-saat ini. 11 November 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

*Mulai menjabat per 11 November 2025 | Took office on 11 November 2025.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertugas membantu Direksi dalam memastikan pelaksanaan tata kelola, keterbukaan informasi, komunikasi korporat, serta hubungan dengan pemangku kepentingan berjalan secara efektif. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan fungsi kesekretariatan perusahaan, layanan korporasi, komunikasi eksternal, pengelolaan hubungan kelembagaan, serta dukungan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*.
2. Memberikan masukan kepada Direktur Utama dan Direksi terkait pengelolaan komunikasi korporat, hubungan dengan Pemegang Saham, regulator, kementerian, serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Memastikan penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mendukung pelaksanaan rapat Direksi, RUPS, dan kegiatan korporasi lainnya melalui pengelolaan administrasi, dokumentasi, risalah, serta tindak lanjut keputusan.

DUTIES AND RESPONSIBILITY OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is tasked with assisting the Board of Directors to ensure that governance, information disclosure, corporate communication, and stakeholder relations run effectively. The duties and responsibilities of the Corporate Secretary include:

1. Coordinating the execution of corporate secretarial functions, corporate services, external communication, institutional relations management, and support for the implementation of GCG principles.
2. Providing input to the President Director and the Board of Directors regarding the management of corporate communication and relations with Shareholders, regulators, ministries, and other stakeholders.
3. Ensuring the provision of accurate, timely, and relevant information to the Board of Directors, the Board of Commissioners, Shareholders, and related parties in line with applicable provisions.
4. Supporting the execution of Board of Directors' meetings, the GMS, and other corporate activities through administrative management, documentation, minutes, and the follow-up of decisions.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari penguatan fungsi kesekretariatan, kepatuhan, komunikasi korporat, dan dukungan terhadap penerapan tata kelola perusahaan, ASDP mendorong peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan melalui program pelatihan dan pengembangan yang relevan. Informasi mengenai pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan disajikan sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY ENHANCEMENT OF THE CORPORATE SECRETARY

In efforts to strengthening the role of the secretariat, compliance, corporate communications, and governance functions, ASDP encourages the improvement of Corporate Secretary competencies through relevant training and development programs. Information regarding Corporate Secretary competency training and/or development is presented as follows:

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Training and/or Competency Development of the Corporate Secretary

Nama *Name*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Training and Competency Development*	Waktu dan Tempat *Date and Place*	Penyelenggara *Organizer*
• Shelvy Arifin • Windy Sustia Andale	Pelatihan dan Sertifikasi | Training & Certification CSRS (Certified Sustainability Reporting Specialist)	21 Januari | January 2025	-
	Pelatihan | Training Finance for Non Finance (Finon) BOD BOC Perspective	11 Desember | December 2024	-
	Pelatihan | Training ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Quality Management System	05 Februari | February 2025	-

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Training and/or Competency Development of the Corporate Secretary

Nama *Name*	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Training and Competency Development*	Waktu dan Tempat *Date and Place*	Penyelenggara *Organizer*
	Pelatihan | Training ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3) | OHSMS	06 Februari | February 2025	-
	Pelatihan | Training ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) | Anti-Bribery Management System (ABMS)	06 Februari | February 2025	-
	Junior Managerial Leadership Development Program (JLDP) D-3 & D-4	23 Juni | June 2025	-
	In-House Training Risk Based Business Process	17 Juni | June 2025	-
	In-House Training Project Management PMI-PM Ready Certification	11 Juni | June 2025	-
	Pelatihan Teknik Komunikasi Dengan Anak | Communication Technique Training with Children	24 Februari | February 2025	-
	IHT Kehumasan: Akselerasi Komunikasi Publik ASDP Berdampak dan Berkelanjutan | In House Training Public Relations: Accelerating ASDP Public Communications with Impact and Sustainability	27 Agustus | August 2025	-
	Sertifikasi BNSP: Skema Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat | BNSP Certification: Community Empowerment Program Implementation Scheme	21 Agustus | August 2025	-
	Pelatihan Hukum dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BUMN | Training of Legal and Public Information Disclosure in SOEs	08 Oktober | October 2025	-
	Pelatihan dan Sertifikasi | Training & Certification CSRS (Certified Sustainability Reporting Specialist)	09 September 2025	-
	Workshop Pengelolaan Limbah Usaha dan Industri | Business and Industrial Waste Management Workshop	11 November 2025	-
	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 6 Bidang Analis Kebijakan | Training and Certification of Competency Qualifications in 6 Policy Analyst Fields	9 Agustus | August 2025	-
	In-House Training Executive Briefing	01 Oktober | October 2025	-
	Pelatihan | Training GRI *Standard*	23 Oktober | October 2025	-
	In-House Training ESG Fundamental & Implementation	21 November 2025	-
	Training for Leaders: Service Culture Transformation	08 Desember | December 2025	-

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan program kerja yang mendukung fungsi tata kelola, pelaporan korporasi, komunikasi internal dan eksternal, serta pelaksanaan kegiatan sosial Perseroan. Pelaksanaan tugas tersebut antara lain mencakup:

Pelaporan Korporasi

Sekretaris Perusahaan mendukung penyusunan dan penyampaian laporan korporasi secara tertib dan tepat waktu, meliputi laporan kinerja, laporan triwulanan, laporan semesteran, serta laporan tahunan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pelaporan dan akuntabilitas Perseroan.

DUTIES IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SECRETARY IN 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary executed work programs supporting governance functions, corporate reporting, internal and external communication, and the Company's social activities. The execution of these duties are categorised into the following:

Corporate Reporting

The Corporate Secretary supported the orderly and timely preparation and submission of corporate reports, including performance reports, quarterly reports, semi-annual reports, and annual reports as part of fulfilling the Company's reporting and accountability obligations.

Tata Kelola Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan mekanisme pengambilan keputusan Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan Internal dan Kenegaraan

Sekretaris Perusahaan turut mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal dan kegiatan kenegaraan Perseroan, antara lain kegiatan operasional kantor, seremoni perusahaan, peringatan Hari Ulang Tahun Perusahaan, perayaan Idul Fitri, serta peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial

Sekretaris Perusahaan mendukung pelaksanaan kegiatan sosial Perseroan, antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan kunjungan ke panti asuhan. Program sosial tersebut menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyusunan Pedoman

Sekretaris Perusahaan mendukung proses penyusunan dan pemutakhiran pedoman tata kelola, termasuk pedoman pelaksanaan tugas komite serta Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi atau *Board Manual*. Penyusunan pedoman tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas tata kelola, memperjelas mekanisme kerja organ Perseroan, serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Corporate Governance

The Corporate Secretary supported corporate governance implementation, including organizing the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the approval of the Financial Statements for Financial Year 2024. This activity is part of fulfilling the Shareholders' decision-making mechanism in accordance with the Articles of Association and applicable regulations.

Internal and State Events

The Corporate Secretary helped coordinate the internal and state events of the Company, including office operations activities, corporate ceremonies, the Company's Anniversary celebration, Eid al-Fitr celebrations, as well as the Independence Day commemoration of the Republic of Indonesia.

Social Responsibility

The Corporate Secretary supported the Company's social activities, including distributing social assistance and visiting orphanages. The social program is implemented as part of the Company's efforts to maintain good relations with the community and stakeholders.

Drafting Guidelines

The Corporate Secretary supported the drafting and updating of governance guidelines, including guidelines for committee duties and the Board Manual for the Boards of Commissioners and Directors. These guidelines were drafted to reinforce governance effectiveness, clarify the working mechanisms of the Company's organs, and ensure alignment with organizational needs and applicable regulations.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT

Fungsi pengawasan intern ASDP dilaksanakan oleh Direksi dengan dukungan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai unit audit internal Perseroan. Direksi menetapkan SPI untuk menjalankan fungsi audit internal secara independen dan objektif melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, SPI berperan memberikan *assurance* dan rekomendasi perbaikan kepada manajemen guna mendukung peningkatan efektivitas proses bisnis, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan ASDP.

ASDP's internal oversight function is executed by the Board of Directors with the support of the Internal Audit Unit as the Company's internal audit unit. The Board of Directors establishes SPI to perform internal audit functions independently and objectively by evaluating the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes.

In its execution, SPI provides assurance and improvement recommendations to management to support enhanced business process effectiveness, compliance with applicable rules, and the implementation of Good Corporate Governance within ASDP.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Struktur organisasi Satuan Pengawasan Internal (SPI) ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor KD.75/HK.001/ASDP-2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 13 Desember 2021. Secara struktural, SPI berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern, sedangkan secara fungsional SPI memiliki akses komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk melakukan koordinasi serta menyampaikan informasi terkait rencana audit, pelaksanaan audit, hasil audit, tindak lanjut rekomendasi, dan hal lain yang relevan dengan penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola ASDP.

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The organizational structure of the Internal Audit Unit (SPI) is established based on the Regulation of the Board of Directors No. KD.75/HK.001/ASDP-2021 concerning the Organization and Working Procedures of the Head Office and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dated 13 December 2021. Structurally, SPI is positioned under the President Director and is directly responsible for executing internal oversight functions. Functionally, SPI has direct communication access to the Board of Commissioners through the Audit Committee to coordinate and deliver information regarding audit plans, audit execution, audit results, recommendation follow-ups, and other matters relevant to strengthening ASDP's internal controls, risk management, and governance.

Struktur Organ Satuan Pengawasan Intern
Structure and Position of the Internal Audit Unit

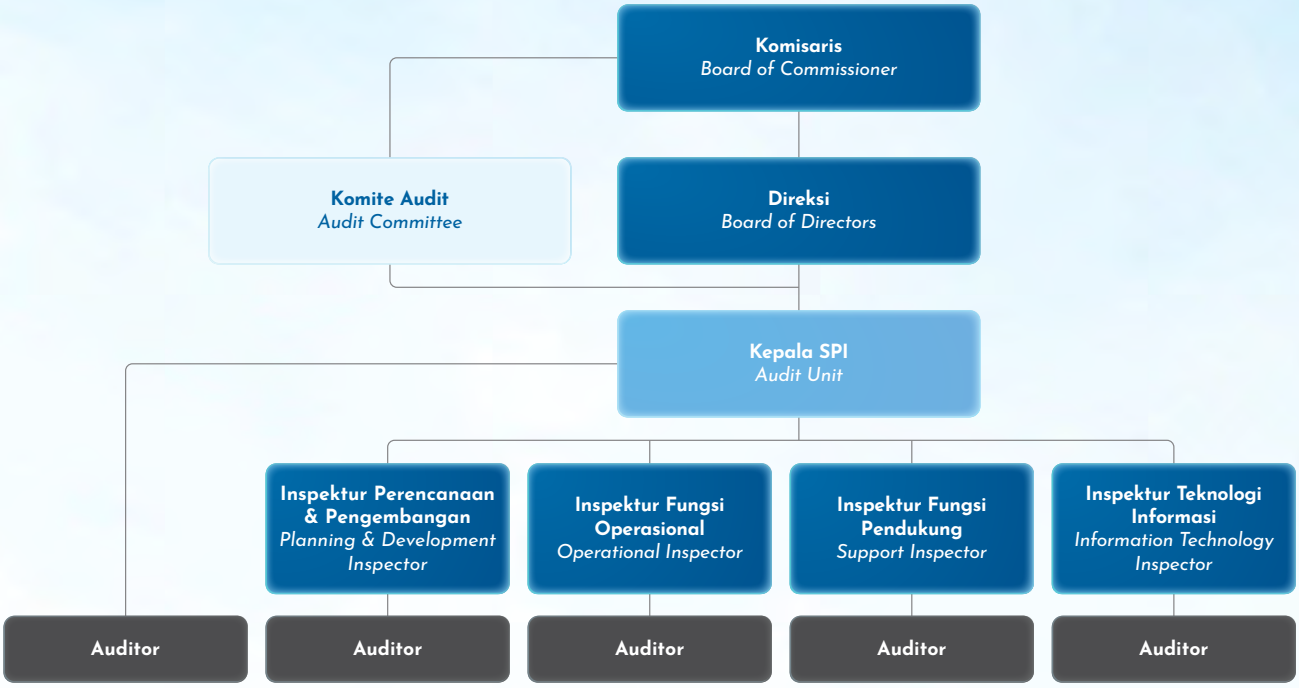

INDEPENDENSI SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Satuan Pengawasan Internal (SPI) menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, objektif, dan independen dalam mendukung pelaksanaan pengawasan intern ASDP, khususnya terkait evaluasi pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta proses tata kelola perusahaan. Dalam pelaksanaannya, SPI memiliki kedudukan struktural di bawah Direktur Utama dan akses komunikasi fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sehingga pelaksanaan audit, penyampaian hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi dapat dilakukan secara bebas dari intervensi pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas hasil pengawasan.

INDEPENDENCE OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit executes its functions and responsibilities professionally, objectively, and independently to support ASDP's internal oversight, particularly regarding the evaluation of internal controls, risk management, compliance, and corporate governance processes. Structurally positioned under the President Director with functional communication access to the Board of Commissioners through the Audit Committee, SPI conducts audits, delivers findings, and monitors recommendation follow-ups free from any intervention that could affect the objectivity and quality of oversight results.

PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Direksi bersama Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Audit Internal sebagai pedoman kerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam menjalankan fungsi pengawasan intern ASDP. Piagam tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor SKB.325/HK.002/ASDP-2022 dan menjadi acuan bagi SPI dalam melaksanakan tugas secara independen, objektif, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik audit internal.

Piagam Audit Internal disusun dengan memperhatikan struktur organisasi, kompleksitas kegiatan usaha, serta kebutuhan pengawasan intern Perseroan. Muatan Piagam Audit Internal mencakup:

1. Visi, misi, nilai, dan tujuan Satuan Pengawasan Internal;
2. Struktur organisasi, ruang lingkup, tugas, dan wewenang SPI;
3. Pedoman standar pelaksanaan audit serta hubungan kerja auditor internal dengan pihak terkait, termasuk *auditee*, auditor eksternal, Komite Audit, fungsi penilaian kinerja, dan fungsi manajemen risiko Perseroan; dan
4. Kode etik SPI sebagai pedoman sikap dan perilaku auditor internal dalam menjalankan penugasan, berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal, serta menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalisme.

INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER

The Board of Directors and the Board of Commissioners established the Internal Audit Charter as the working guideline for the Internal Audit Unit in running ASDP's internal oversight function. The charter was enacted through the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. SKB.325/HK.002/ASDP-2022 and serves as the reference for SPI to carry out its duties independently, objectively, professionally, and in accordance with statutory regulations and internal audit best practices.

The Internal Audit Charter was drafted considering the organizational structure, complexity of business activities, and internal oversight needs of the Company. The contents of the Internal Audit Charter include:

1. The vision, mission, values, and objectives of the Internal Audit Unit;
2. The organizational structure, scope, duties, and authority of Internal Audit Unit;
3. Guidelines for audit execution and internal auditors' working relationships with parties, such as auditees, external auditors, the Audit Committee, performance evaluation functions, and risk management function; and
4. Unit's code of conduct as a guideline for the attitude and behavior of internal auditors in executing assignments, interacting with internal and external parties, and maintaining integrity, objectivity, confidentiality, and professionalism.

PROFIL KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

THE PROFILE OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

Imran Kuru

Plt. Kepala Satuan Pengawas Internal
Acting Head of Internal Audit Unit

Indonesia, Jakarta

Berusia 54 tahun per Desember 2025.
Aged 54 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	Sarjana Teknik Perkapalan Universitas Hasanudin.	Bachelor of Naval Engineering, Universitas Hasanudin.
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Inspektur Audit Operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2018-2025). • GM Cabang Tual PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2018).	• Operational Audit Inspector, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2018-2025). • General Manager of the Tual Branch, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2018).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: SK.605/PA.104/JKTHC/VII/ASDP-2025. President Director Decree No. SK.605/PA.104/JKTHC/VII/ASDP-2025.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Juli 2025-saat ini. July 2025-present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertugas membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengawasan intern melalui kegiatan audit, evaluasi, konsultasi, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi perbaikan. Tugas dan tanggung jawab SPI meliputi:

1. Menyusun dan mengelola RKAP fungsi Audit Internal sebagai dasar pelaksanaan program kerja pengawasan intern.
2. Merumuskan kebijakan, strategi, dan rencana pengawasan intern serta bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit atas aktivitas ASDP sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengembangkan sistem manajemen audit dan pengendalian dokumen untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

DUTIES AND RESPONSIBILITY OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit is tasked with assisting the Board of Directors in running internal oversight functions through auditing, evaluation, consultation, and monitoring the follow-up of improvement recommendations. The duties and responsibilities include:

1. Compiling and managing the WPB of the Internal Audit function as the basis for executing internal oversight work programs.
2. Formulating internal oversight policies, strategies, and plans, and responsible for the planning and execution of audits over ASDP's activities in line with applicable provisions.
3. Developing audit management systems and document controls to support the effective execution of internal oversight functions.

4. Melaksanakan audit sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan, mencakup bidang teknik, fasilitas, operasional, komersial, sumber daya manusia, K2L, pemasaran, keuangan, administrasi, dan *general affairs*.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan audit khusus di luar PKPT berdasarkan instruksi Direksi atau kebutuhan pengawasan tertentu.
6. Menyusun, menelaah, dan mengelola Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas setiap kegiatan audit yang telah dilaksanakan.
7. Mengatur distribusi Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direksi dan Komite Audit, serta memenuhi permintaan informasi dari pihak terkait dengan persetujuan Direksi.
8. Memberikan pendampingan kepada auditor eksternal dalam pelaksanaan audit sesuai ruang lingkup penugasan.
9. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, baik yang berasal dari audit internal maupun audit eksternal, untuk memastikan penyelesaian perbaikan secara tepat waktu.
10. Melakukan evaluasi atas mutu kegiatan audit internal serta menilai efektivitas sistem, metodologi, dan prosedur audit.
11. Memberikan konsultasi secara independen dan objektif kepada Direksi, Komite Audit, dan unit kerja terkait dalam rangka penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola ASDP.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Adapun rincian pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Satuan Pengawas Internal pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4. Conducting audits according to the established Annual Audit Work Program (PKPT), covering engineering, facilities, operations, commercial, human resources, HSE, marketing, finance, administration, and general affairs.
5. Coordinating the execution of special audits outside the PKPT based on instructions from the Board of Directors or specific oversight needs.
6. Drafting, reviewing, and managing Inspection Report for every audit activity executed.
7. Managing the distribution of Internal Audit Report to the Board of Directors and the Audit Committee, and fulfilling information requests from related parties with the approval of the Board of Directors.
8. Providing assistance to external auditors in executing audits within the scope of their assignment.
9. Monitoring the follow-up of audit recommendations, both from internal and external audits, to ensure timely completion of improvements.
10. Evaluating the quality of internal audit activities and assessing the effectiveness of audit systems, methodologies, and procedures.
11. Providing independent and objective consultation to the Board of Directors, the Audit Committee, and related work units to strengthen ASDP's internal controls, risk management, and governance.

TRAINING AND/OR COMPETENCY ENHANCEMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT

The details of training and/or competency improvement for the Internal Audit Unit in 2025 are as follows:

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Satuan Pengawas Internal

Training and/or Competency Development of Members of the Internal Audit Unit

No	Bulan *Month*	Judul Diklat *Training Title*	Penyelenggara *Organizer*	Peserta *(orang/ person)*
1	Januari | January	*Certified Internal Audit Officer* (CIAO)	CRMS	1 orang | person
2	Februari | February	*Awareness Training* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | Quality Management System	BSI	1 orang | person
3	Februari | February	*Awareness* ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja | OHSMS	BSI	1 orang | person
4	Februari | February	*Awareness* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) | Anti-Bribery Management System (ABMS)	BSI	2 orang | person

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Satuan Pengawas Internal
Training and/or Competency Development of Members of the Internal Audit Unit

No	Bulan *Month*	Judul Diklat *Training Title*	Penyelenggara *Organizer*	Peserta *(orang/ person)*
5	Februari | February	Sertifikasi Certification Internal Auditor ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2020	BSI	4 orang | person
6	Februari | February	*Finance For Non Finance BoD BoC Perspective*	MMI	1 orang | person
7	Februari | February	*Internal Control Over Financial Reporting*	PMLI	2 orang | person
8	Februari | February	Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (CPSP) Certificate of Procurement of Goods and Services (CPSP)	PPM	1 orang | person
9	Februari | February	Pelatihan Peningkatan Efektivitas Implementasi ICOFR Training to Improve the Effectiveness of ICOFR Implementation	IAI	3 orang | person
10	April | April	Pengadaan Barang/Jasa Level 1 Level 1 Procurement of Goods/Services	PPM	1 orang | person
11	Mei | May	*Root Cause Analysis For Enhancing Internal Audit Effectiveness*	IIA	2 orang | person
12	Juni | June	*Fraud Prevention With a Powerful Internal Control*	IAI	1 orang | person
13	Juni | June	*Training Risk-Based Business Process*	CRMS	1 orang | person
14	Juli | July	*Indonesia Internal Audit Practitioner* (IIAP)	IIA	1 orang | person
15	Juli | July	SAP *Learning Hub, Customer Edition* (Training)	Trainocate	1 orang | person
16	Juli | July	Konferensi Auditor Internal (KAI) dan Munas FKSPI Internal Auditor Conference (KAI) and FKSPI National Conference	YPIA	1 orang | person
17	Juli | July	*Performing an Effective Quality Assessment* (QAE)	IIA	1 orang | person
18	Juli | July	*Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Dasar (Basic)	YPIA	2 orang | person
19	Juli | July	*Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	CRMS	1 orang | person
20	Agustus | August	*Expansive Leadership Program*	CLDI	1 orang | person
21	Agustus | August	*Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Dasar (Basic)	YPIA	2 orang | person
22	September | September	*Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Dasar (Basic)	YPIA	1 orang | person
23	Oktober | October	Pelatihan Purnabakti Batch III Retirement Training Batch III	SDM	3 orang | person
24	November | November	Sertifikasi Certification Internal Auditor ISO22301:2019 BCM	LSP-MKS	3 orang | person
25	November | November	Ujian Resertifikasi Skema *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) Recertification Test	LSP-MKS	3 orang | person
26	November | November	Ujian Resertifikasi Skema *Qualified Risk Management Profesional* (QRMP) Recertification Test	LSP-MKS	2 orang | person
28	November | November	Psikologi dan Komunikasi Dalam Audit Daring/*Online* Psychology and Communication in Online Auditing	YPIA	1 orang | person
29	November | November	*Professional Internal Auditor* (PIA)/CIAM	AAI	1 orang | person
30	November | November	ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) *Awareness*	RWI	2 orang | person
31	Desember | December	*Fraud Auditing-1*	LPFA	3 orang | person
32	Desember | December	*Quality Assurance Assessment*	The IIA	6 orang | person

QUALITY ASSURANCE REVIEW AUDIT INTERNAL

QUALITY ASSURANCE REVIEW AUDIT INTERNAL

Laporan Sementara Hasil Penilaian *Quality Assurance Ongoing Assessment* 2025

Interim Report on the Results of the Quality Assurance Ongoing Assessment 2025

No	Unit Kerja *Work Unit*	Tim Audit *Audit Team*	Jumlah Standar *Total Standard*	Secara Umum Sesuai *Generally in Conformity*	Sebagian Sesuai *Partially Conform*	Tidak Sesuai *Non Conform*	*Not Applicable*	*Score*	*Compliance*	Kesesuaian Hasil Praktek Audit *Score Obtained*
1.	Cabang Branch Kayangan	Tim Audit Operasional Area 2	19	18	1	0	0	1.876	98,7%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
2.	Cabang Branch Ternate	Tim Audit Operasional Area 2	14	10	4	0	0	1.300	92,9%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
3.	Cabang Branch Bangka	Tim Audit Operasional Area 1	14	12	2	0	0	1.350	96,4%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
4.	Cabang Branch Kupang	Tim Audit Operasional Area 2	14	12	2	0	0	1.350	96,4%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
5.	Cabang Branch Batam	Tim Audit Operasional Area 1	14	12	2	0	0	1.350	96,4%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
6.	Cabang Branch Bakauheni	Tim Audit Operasional Area 1	14	12	2	0	0	1.350	96,4%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
7.	Cabang Branch Biak	Tim Audit Operasional Area 2	14	12	2	0	0	1.350	96,4%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
8.	Cabang Branch Merak	Tim Audit Operasional Area 1	14	9	5	0	0	1.275	91,1%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
9.	PT. Jembatan Nusantara	Tim Audit Operasional Area 2	14	13	1	0	0	1.375	98,2%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity
10.	TJSL CSER	Tim Audit Operasional	14	10	4	0	0	1.300	92,9%	Secara Umum Sesuai Generally in Conformity

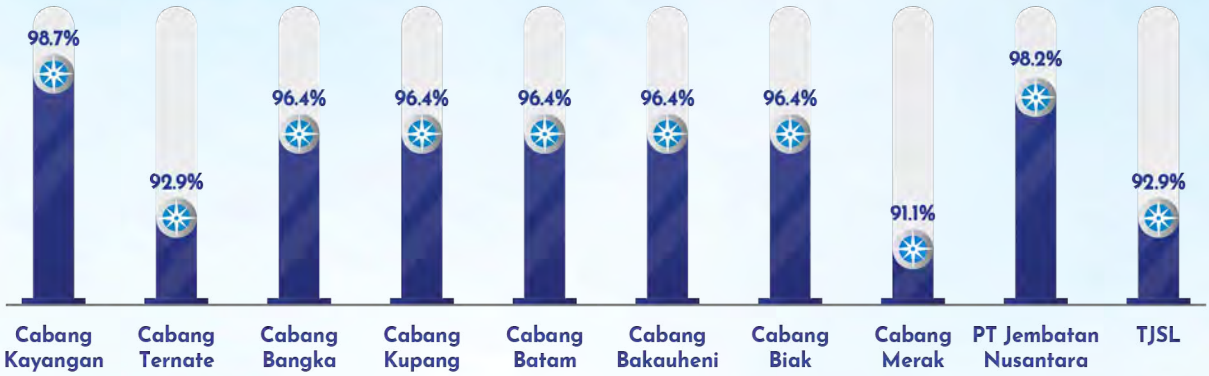

FORMASI DAN KUALIFIKASI AUDITOR SATUAN PENGAWAS INTERNAL

FORMATION AND QUALIFICATION OF AUDITORS IN INTERNAL AUDIT UNIT

Kualifikasi Auditor Satuan Pengawas Internal

Qualification of Auditors in Internal Audit Unit

No.	Sertifikat yang Dimiliki *Certificates Held*	Lembaga Sertifikasi *Institution*	Tahun Perolehan *Year Obtained*
1.	*Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Dasar | Basic	YPIA	2025
2.	*Qualified Internal Auditor* (QIA) Lanjutan *Advanced*	YPIA	2025
3.	*Certified Internal Audit Officer* (CIAO)	CRMS	2025
4.	*Certified Internal Audit Officer* (CIAO)	PPM	2025
5.	Resertifikasi | Recertification *Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	CRMS	2025
6.	Resertifikasi | Recertification *Qualified Chief Risk Officer*	CRMS	2025
7.	*Certified Internal Audit Executive* (CIAE)	BPKP	2025
8.	*Certified Procurement Specialist*	PPM	2025
9.	*Certified Information System Auditor*	Inixindo Widya	2025

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWAS INTERNAL TAHUN 2025

Program kerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang telah dijalankan sampai dengan Desember 2025 meliputi:

TINDAK LANJUT PERBAIKAN SOP PERUSAHAAN

SPI bersama fungsi terkait secara berkelanjutan melakukan penyusunan, peninjauan, dan perbaikan sistem serta prosedur Perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pedoman kerja internal tetap relevan dengan kebutuhan operasional, pengendalian internal, serta ketentuan yang berlaku.

REVIEW ATAS PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN

SPI melakukan review dan perbaikan atas metode pencatatan laporan produksi pendapatan agar sesuai dan selaras dengan metode pelaporan produksi pendapatan induk yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, konsistensi, dan keandalan data keuangan Perseroan.

KONSULTASI DAN PEMBERIAN NILAI TAMBAH KEPADA UNIT KERJA

SPI memberikan konsultasi kepada unit kerja terkait sebagai bagian dari fungsi *assurance* dan *advisory*. Konsultasi tersebut diarahkan untuk memberikan nilai tambah serta mendorong perbaikan kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan ASDP.

DUTIES IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT IN 2025

The work programs of the Internal Audit Unit carried out up to December 2025 include:

FOLLOW-UP ON CORPORATE SOP IMPROVEMENTS

Internal Audit Unit and related functions continuously draft, review, and improve the Company's systems and procedures. This activity is conducted to ensure that internal work guidelines remain relevant to operational needs, internal controls, and applicable regulations.

REVIEW OF FINANCIAL STATEMENT RECORDING

Internal Audit Unit conducts reviews and improvements on revenue production recording methods to match and align with the parent company's revenue production reporting methods used in compiling financial statements. This step aims to improve the accuracy, consistency, and reliability of the Company's financial data.

CONSULTATION AND VALUE CREATION FOR WORK UNITS

Internal Audit Unit provides consultation to related work units as part of its assurance and advisory functions. This consultation is directed at creating value and driving quality improvements in internal controls, risk management, and the implementation of good corporate governance within ASDP.

Pelaksanaan Audit Internal
Implementation of Internal Audit

No	Jenis Kegiatan *Activity*	Program Kerja *Work Program*	Rencana *Plan*	Realisasi *Realization*	Keterangan *Description*
1	Pendampingan KAP IA Co-Sourcing	Merak & Bakauheni	Januari January	Januari January	*Done*
2	PKAT Annual Audit Plan (AAP)	Cabang Branch Kayangan	Februari February	Februari February	*Done*
3	PKAT | AAP	IFCS (Divisi Komersial) IFCS (Commercial Division)	Februari February	Februari February	*Done*
4	Jasa Konsultasi Consulting Services	Pengelolaan Bakauheni Harbour City (PBHC) BHC Management	Januari January	Februari February	*Done*
5	Jasa Konsultasi Consulting Services	Pembangunan kapal lintas Merak-Bakauheni Construction of the Merak-Bakauheni ferry	Februari February	Maret March	*Done*
6	Jasa Konsultasi Consulting Services	Rehabilitasi KMP Jatra Rehabilitation of the KMP Jatra	Maret March	Maret March	*Done*

Pelaksanaan Audit Internal
Implementation of Internal Audit

No	Jenis Kegiatan *Activity*	Program Kerja *Work Program*	Rencana *Plan*	Realisasi *Realization*	Keterangan *Description*
7	Jasa Konsultasi Consulting Services	*Core Ticketing*	Februari February	Juni June	*Done*
8	Audit Khusus Special Audit	Pemeriksaan *Manifest* Susulan Cab Bakauheni Follow-up Manifest Inspection for Bakauheni Branch	Januari January	Januari January	*Done*
9	Audit Khusus Special Audit	Pemeriksaan *Manifest* Susulan Cab Merak & Ketapang Follow-up Manifest Inspection for Merak & Ketapang Branch	-	Februari February	*Done*
10	Audit Khusus Special Audit	Hutang Balikpapan Debt of Balikpapan	-	Februari February	*Done*
11	Audit Khusus Special Audit	KMP Rokatenda Cab. Ambon, KMP Wayangan Cab. Ambon, KMP Tuna Cab. Ternate, KMP Masirei Cab. Biak	-	Maret March	*Done*
12	PKAT | AAP	Cabang | Branch Ternate	April	April	*Done*
13	PKAT | AAP	Cabang | Branch Bangka	Maret March	April	*Done*
14	PKAT | AAP	Cabang | Branch Kupang	April	Mei May	*Done*
15	PKAT | AAP	Cabang | Branch Batam	Juli July	Mei May	*Done*
16	PKAT | AAP	Cabang | Branch Bakauheni	April	Juli July	*Done*
17	PKAT | AAP	Cabang | Branch Biak	Juli July	Juli July	*Done*
18	Audit Khusus Special Audit	Cabang | Branch Merak, Ketapang, Batam	-	Juli July	*Done*
19	PKAT | AAP	Cabang | Branch Merak	Juni June	Oktober October	*Done*
20	Audit Khusus Special Audit	Reviu Penghapusan Aset Cabang Ketapang, Merak, Batam & Bau Bau Review of Asset Write-Offs for Ketapang, Merak, Batam & Bau Bau Branches	-	Agustus August	*Done*
21	*Non Audit*	Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPIN) Internal Control System Effectiveness Assessment	Agustus August	Agustus August	*Done*
22	*Non Audit*	*Risk Maturity Indeks* (RMI)	April	Agustus August	*Done*
23	External BPKP Ext (State Auditor)	ICORPAX BPKP	-	Agustus August	*Done*
24	External BPKP Ext (State Auditor)	Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan (BPKP) |Port Infrastructure Development Evaluation	-	Agustus August	*Done*
25	External KPK Ext (KPK)	Perbaikan Sistem | System Improvement PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	-	Agustus August	*Done*
26	Anak Usaha Subsidiary	PT Jembatan Nusantara	September	Oktober October	*Done*
27	Anak Usaha Subsidiary	PT Indonesia Ferry Properti	September	Oktober October	*Done*
28	Audit Khusus Special Audit	Penggunaan Shareholder Loan (SHL) dan Kondisi Keuangan PT JN Use of Shareholder Loan (SHL) and Financial Condition of PT JN	-	Desember December	*Done*
29	Audit Tematik Thematic Audit	TJSL (Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan) CSER	-	Desember December	*Done*
30	Audit Tematik Thematic Audit	Keperintisan | Pioneering *Services Review of Asset Write-Offs for Ketapang, Merak, Batam & Bau Bau Branches*	-	Desember December	*On Progress*

Fungsi *Counterparting* juga dilakukan SPI terhadap auditor eksternal sepanjang tahun 2025 dengan kegiatan sebagai berikut:

Internal Audit also conducted counterparting with external auditors throughout 2025 with the following activities:

Counterparting Auditor Eksternal

External Auditor Counterparting

No	Auditor Eksternal *External Auditor*	Kegiatan *Activities*
1	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Supreme Audit (BPK)	Progres terakhir Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024, pencapaian sesuai rekomendasi sebesar 98,22% termasuk rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Temuan dengan status "Belum Sesuai Rekomendasi" sebesar 1,78%. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 dimana hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2024 menunjukkan bahwa atas empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 51 temuan senilai Rp1.694.094.128,75 serta 169 rekomendasi senilai Rp1.672.415.729,76, status tindak lanjut yang telah dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah sebagai berikut: 1. Sesuai rekomendasi sebanyak 159 rekomendasi (94,08%) senilai Rp1.672.415.729,76; 2. Belum sesuai rekomendasi sebanyak 3 rekomendasi (1,78%) senilai Rp0,00; 3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi (0%) senilai Rp0,00; dan 4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 7 rekomendasi (4,14%) senilai Rp0,00. The most recent progress of the Follow-up Monitoring Report of Audit Recommendations for Semester I of 2024 shows completion rate where 98.22% of the findings matched the recommendations, including those that cannot be followed up. Findings with the status "Not in Accordance with Recommendations" amounted to 1.78%. Follow-up Monitoring Report of Audit Recommendations up to Semester I of 2024 shows four Inspection Report with 51 findings valued at Rp1,694,094,128.75 and 169 recommendations valued at Rp1,672,415,729.76. The follow-up actions taken by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) carry the following status: 1. In accordance with recommendations: 159 recommendations (94.08%) valued at Rp1,672,415,729.76. 2. Not yet in accordance with recommendations: 3 recommendations (1.78%) valued at Rp0.00. 3. Recommendations not yet followed up: 0 recommendations (0%) valued at Rp0.00. 4. Cannot be followed up due to valid reasons: 7 recommendations (4.14%) valued at Rp0.00.
2	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm (KAP)	Tidak terdapat temuan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern Tahun Buku 2024. Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Laporan Keuangan KAP Tahun Buku 2024 sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai 95% (19 tindak lanjut dari 20 rekomendasi). Satu (1) rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut yaitu yang terkait klausula perjanjian *Shareholder Loan* (SHL) kepada anak perusahaan, khususnya PT Jembatan Nusantara. There were no compliance findings regarding statutory regulations and internal controls for the 2024 Financial Year. The follow-up on recommendations from the KAP Financial Statement Audit for the FY 2024 reached 95% by the end of 2025 (19 follow-ups out of 20 recommendations). One (1) recommendation still in progress relates to the Shareholder Loan (SHL) agreement clauses to a subsidiary, specifically PT Jembatan Nusantara.
3	ICORPAX Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ICORPAX - Finance and Development Supervisory Agency (BPKP)	Penilaian Indeks Akuntabilitas Korporasi Indonesia (*Indonesian Corporate Accountability Index*) Tahun 2024 pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan pemenuhan tindak lanjut ICORPAX 2023 dengan status sebagai berikut: 1. Selesai sebanyak 8; 2. Dalam proses sebanyak 0; 3. Belum ditindaklanjuti sebanyak 0; 4. Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0. The 2024 Indonesian Corporate Accountability Index assessment for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and the fulfillment of the 2023 ICORPAX follow-up bear the following status: 1. Completed: 8 2. In progress: 0 3. Not yet followed up: 0 4. Cannot be followed up: 0

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Kehadiran rapat Direksi dan komite audit oleh Satuan Pengawas Internal dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

FREQUENCY AND ATTENDANCE MEETINGS RATE

Attendance at Board of Directors and audit committee meetings by the Internal Supervisory Unit is detaied in the table below:

Kehadiran SPI dalam Rapat Tahun 2025

SPI Attendance in Meeting in 2025

Rapat *Meetings*	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Tingkat Kehadiran *Attendance Rate*
Direksi | Board of Directors	6	6	100%
Komite Audit | Audit Committee	8	8	100%

MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Hasil pemantauan tahun 2025, Satuan Pengawasan Internal mencatat 152 temuan audit internal, dengan 133 temuan telah ditindaklanjuti. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi hasil audit telah memperoleh tindak lanjut dari unit kerja terkait sebagai bagian dari komitmen ASDP dalam memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan, serta memperbaiki efektivitas proses bisnis.

MONITORING OF AUDIT FINDINGS FOLLOW-UP

In the 2025 monitoring results, the Internal Audit Unit recorded 152 internal audit findings, with 133 findings successfully followed up. This achievement demonstrates that most audit recommendations received proper follow-up from the respective work units, reflecting ASDP's commitment to strengthening internal controls, increasing compliance, and improving business process effectiveness.

Badan Pengawas Keuangan (BPK)

Supreme Audit Agency

Hasil Temuan *Findings*	Jumlah Temuan *Number of Findings*	Jumlah Temuan yang Telah Ditindaklanjuti *Number of Findings Followed Up*
Audit Internal	152	133

Monitoring Temuan BPK
Follow-up on BPK findings

No	Laporan Hasil Pemeriksaan *Audit Report Number of Findings*	Jenis Temuan Type of Findings	Jumlah Temuan *Qty of Findings*	Jumlah Rekomendasi *Number of Recommendation*	Status Tindak Lanjut *Follow-up Status*			
					S	BS	BD	TDD
1	Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor:117/T/S/ANGGOTA VII/PMT.01/09/2025 tanggal 3 September 2025 perihal Letter from the Supreme Audit Agency (BPK) No. 117/T/S/ ANGGOTA VII/PMT.01/09/2025 dated 3 September 2025, regarding	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 Report on Follow-up Monitoring of Audit Result Recommendations for Semester I, 2024						
		TL sd. Semester I Tahun 2024 Total to Semester I, 2024	51	169	159	3	0	7
		TL Semester II Tahun 2024 Total to Semester II, 2024			-	-	-	-
		TL sd. Semester II Tahun 2024 Total to Semester II, 2024	51	169	159	3	0	7
		Progres Tindak Lanjut BPK BPK Follow-up Progress		98,22%				

Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 117/T/S/ANGGOTA VII/PMT.01/09/2025 tanggal 3 September 2025 perihal Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024, terdapat 51 temuan dengan 169 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 159 rekomendasi telah berstatus sesuai, 3 rekomendasi belum sesuai, tidak terdapat rekomendasi berstatus belum ditindaklanjuti, dan 7 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, progres tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 98,22%. Capaian ini mencerminkan upaya Perseroan dalam menjaga akuntabilitas, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memastikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Based on the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) Letter No. 117/T/S/ANGGOTA VII/PMT.01/09/2025 dated 3 September 2025 regarding the Examination Follow-Up Monitoring Report for Semester I of 2024, there are 51 findings containing 169 recommendations. Of this total, 159 recommendations maintain a compliant status, 3 recommendations are partially compliant, zero recommendations remain unaddressed, and 7 recommendations are deemed unresolvable. Consequently, the follow-up progress for BPK recommendations reached 98.22%. This achievement reflects the Company's commitment to maintaining accountability, strengthening oversight mechanisms, and ensuring that the resolution of examination recommendations is executed in a measurable and sustainable manner.

Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

KAP Tahun Buku 2024 *KAP FY 2024*	Rekomendasi *Recommendation*	Selesai Tindak Lanjut *Completed Follow-up*	Dalam Proses Tindak Lanjut *In Process Follow-up*
Management Letter	20	19	1

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pengendalian internal yang efektif berperan penting dalam membantu ASDP memastikan tercapainya tujuan Perseroan, menjaga keandalan data dan informasi, serta mendukung proses penetapan sasaran dan strategi secara tepat. Melalui sistem pengendalian internal yang memadai, Perseroan dapat memperkuat integritas proses bisnis, mengamankan aset, mengelola risiko, serta menciptakan nilai secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya pengamanan dan optimalisasi aset Perseroan, Sistem Pengendalian Internal diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh jenjang organisasi, mulai dari pimpinan hingga seluruh insan ASDP. Sistem ini mencakup rangkaian proses, kebijakan, dan prosedur yang saling berkaitan serta dilaksanakan secara berkesinambungan dalam setiap aktivitas, baik oleh individu maupun unit kerja, guna memastikan operasional Perseroan berjalan efektif, efisien, patuh, dan akuntabel.

An effective internal control system plays an important role in helping ASDP ensure the achievement of the Company's objectives, safeguard data and information reliability, and support proper target and strategy setting. Through an adequate internal control system, the Company can strengthen business process integrity, safeguard assets, manage risks, and create sustainable value.

To secure and optimize the Company's assets, the Internal Control System is implemented comprehensively and in an integrated manner, involving all organizational levels, from leadership to all ASDP personnel. This system comprises a series of interrelated processes, policies, and procedures executed continuously across every activity, by both individuals and work units, to ensure that the Company's operations run effectively, efficiently, compliantly, and accountably.

AKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

ASDP menerapkan aktivitas pengendalian internal sebagai mekanisme untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan terkendali, sesuai kewenangan, serta selaras dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini dilaksanakan melalui penguatan kebijakan, pembagian tugas yang jelas, mekanisme otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pengamanan aset, serta pemantauan atas pelaksanaan prosedur kerja di seluruh unit organisasi.

Penerapan aktivitas pengendalian internal menjadi tanggung jawab bersama seluruh insan ASDP, mulai dari Direksi, manajemen, hingga pelaksana operasional. Dengan pengendalian yang berjalan secara konsisten, Perseroan dapat meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan keandalan informasi, memperkuat kepatuhan, serta mendukung efektivitas dan efisiensi operasional secara berkelanjutan.

INTERNAL CONTROL ACTIVITIES

ASDP implements internal control activities as a mechanism to ensure every business process runs under control, within proper authority, and in alignment with applicable provisions. These activities are carried out through policy reinforcement, clear segregation of duties, authorization mechanisms, verification, reconciliation, asset safeguarding, and monitoring work procedures across all organizational units.

The implementation of internal control activities is a shared responsibility of all ASDP personnel, spanning the Board of Directors, management, and operational executors. With consistently running controls, the Company can minimize potential deviations, improve information reliability, strengthen compliance, and support operational effectiveness and efficiency sustainably.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL, SERTA KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG

PENGENDALIAN KEUANGAN

ASDP menerapkan pengendalian keuangan untuk memastikan proses pencatatan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan berjalan akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi serta ketentuan yang berlaku. Pengendalian ini dilakukan melalui mekanisme otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemantauan anggaran, serta evaluasi atas transaksi keuangan guna menjaga keandalan laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dana Perseroan.

PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pengendalian operasional diterapkan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha ASDP berjalan efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan. Pengendalian ini mencakup penerapan prosedur kerja, pengawasan pelaksanaan operasional, pemantauan kinerja unit kerja, pengelolaan risiko operasional, serta evaluasi atas proses bisnis guna menjaga keandalan layanan penyeberangan, kepelabuhanan, dan layanan pendukung lainnya.

KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG

ASDP menerapkan pengendalian kepatuhan untuk memastikan seluruh aktivitas Perseroan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, keputusan Pemegang Saham, serta kebijakan internal yang berlaku. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan regulasi, penyesuaian kebijakan internal, sosialisasi ketentuan, serta evaluasi kepatuhan guna meminimalkan risiko hukum dan mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PENDEKATAN COSO DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

ASDP menerapkan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka COSO atau *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*. Kerangka ini digunakan untuk memastikan bahwa pengendalian internal atas aktivitas operasional, pelaporan keuangan, kepatuhan, serta pengelolaan risiko berjalan

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROLS, COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS

FINANCIAL CONTROLS

ASDP applies financial controls to ensure that financial recording, management, reporting, and accountability processes run accurately, transparently, and in accordance with accounting standards and applicable regulations. These controls are conducted through authorization, verification, reconciliation, budget monitoring, and evaluating financial transactions to maintain financial statement reliability and fund management accountability.

OPERATIONAL CONTROLS

Operational controls are applied to ensure all ASDP business activities run effectively, efficiently, safely, and according to set service standards. These controls include implementing work procedures, supervising operational execution, monitoring work unit performance, managing operational risks, and evaluating business processes to maintain the reliability of ferry transportation, port, and other supporting services.

COMPLIANCE WITH LAWS

ASDP implements compliance controls to ensure all Company activities are executed in accordance with laws, regulations, the Articles of Association, Shareholders' decisions, and applicable internal policies. The control is put in place through regulatory monitoring, internal policy adjustments, dissemination of rules, and compliance evaluations to minimize legal risks and support Good Corporate Governance implementation.

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

ASDP applies an internal control system referencing the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) framework. The implemented framework ensures that internal controls over operational activities, financial reporting, compliance, and risk management run in a structured, integrated, and continuous

secara terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan. Penerapan pengendalian internal tersebut diarahkan untuk memberikan *reasonable assurance* bahwa kegiatan Perseroan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan sistem pengendalian internal ASDP mencakup 5 komponen utama COSO, yaitu:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menjadi fondasi utama dalam membangun budaya pengendalian di ASDP. Komponen ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap integritas, nilai etika, struktur organisasi, pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta akuntabilitas setiap insan Perseroan dalam mendukung pencapaian tujuan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen, sementara Direksi dan manajemen memastikan struktur, pelaporan, dan tanggung jawab pengendalian internal diterapkan secara jelas di seluruh jenjang organisasi.

Penilaian Risiko

ASDP melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan Perseroan. Proses ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, identifikasi risiko pada setiap aktivitas dan unit kerja, penilaian potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta pertimbangan atas potensi kecurangan atau *fraud*. Hasil penilaian risiko menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi dan penguatan pengendalian yang diperlukan.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian diterapkan melalui kebijakan, prosedur, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan fungsi, pengamanan aset, serta pengendalian atas penggunaan teknologi informasi. ASDP menerapkan aktivitas pengendalian untuk memastikan bahwa risiko dikelola pada tingkat yang dapat diterima dan setiap proses bisnis berjalan sesuai ketentuan internal yang berlaku. Aktivitas ini dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja sebagai bagian dari penguatan efektivitas operasional dan kepatuhan.

manner. The implementation of internal control is expected to provide a sense of reasonable assurance that the Company's activities are carried out effectively, efficiently, accountably, and in compliance with provisions of statutory regulations.

ASDP's internal control system encompasses the 5 main components of COSO:

Control Environment

The core foundation for building a control culture within ASDP is by placing a control environment. This component reflects the organization's commitment to integrity, ethical values, organizational structure, assignment of authority, responsibility, and the accountability of all Company's personnel in supporting target achievements. The Board of Commissioners performs oversight independently, while the Board of Directors and management ensure that internal control structures, reporting, and responsibilities are clearly applied across all organizational levels.

Risk Assessment

ASDP conducts risk assessments in order to identify, analyze, and manage various risks that could affect the performance achievement of the Company's objectives. The risk assessments process involves setting clear goals, identifying risks across activities and work units, assessing potential impacts and probabilities, and considering potential fraud. The risk assessment results form the basis for determining necessary mitigation steps and control reinforcements.

Control Activities

Implemented through policies, procedures, authorizations, verifications, reconciliations, segregation of duties, asset safeguarding, and controls over information technology use. ASDP applies control activities to ensure risks are managed at an acceptable level and that every business process runs according to internal provisions. These activities are executed consistently by all work units in the organization to reinforce operational effectiveness and compliance.

Informasi dan Komunikasi

ASDP memastikan bahwa informasi yang relevan, akurat, dan berkualitas tersedia untuk mendukung pelaksanaan pengendalian internal. Informasi tersebut dikomunikasikan secara internal kepada unit kerja terkait, termasuk mengenai tujuan, tanggung jawab, dan mekanisme pengendalian. Selain itu, ASDP juga melakukan komunikasi dengan pihak eksternal yang relevan, termasuk regulator, auditor, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengendalian internal.

Information and Communication

ASDP ensures that the relevant, accurate, and high-quality information is available to support internal control execution. This information is communicated towards the internal party to related work units regarding objectives, responsibilities, and control mechanisms. Additionally, ASDP also build communications with relevant external parties, including regulators, auditors, Shareholders, and other stakeholders, regarding the implementation of internal control.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal secara berkelanjutan. Proses ini mencakup *ongoing review*, evaluasi terpisah, audit internal, serta penyampaian hasil evaluasi kepada pihak yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti. Setiap kelemahan pengendalian yang teridentifikasi dikomunikasikan kepada manajemen, Direksi, dan Dewan Komisaris melalui mekanisme yang berlaku agar dapat dilakukan tindakan perbaikan secara tepat waktu.

Monitoring Activities

Monitoring is conducted to assess the ongoing effectiveness of internal control execution. This process includes ongoing reviews, separate evaluations, internal audits, and delivering evaluation results to responsible parties for follow-up. Any identified control deficiencies are communicated to management, the Board of Directors, and the Board of Commissioners through applicable mechanisms so timely corrective actions can be taken.

Melalui penerapan kelima komponen COSO tersebut, ASDP berupaya memastikan bahwa sistem pengendalian internal mampu mendukung efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta pengamanan aset Perseroan secara berkelanjutan.

Through the implementation of the five COSO components, ASDP strives to ensure that the internal control system is able to support the effectiveness and efficiency of operations, the reliability of financial reporting, compliance with laws and regulations, and the ongoing security of the Company's assets.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITIAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

ASDP secara berkala melakukan tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pengendalian telah berjalan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur, penelaahan atas efektivitas pengendalian keuangan dan operasional, audit internal oleh Satuan Pengawasan Internal, serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari auditor internal maupun eksternal.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

ASDP periodically conducts reviews on the effectiveness of its internal control system to ensure control processes is implemented sufficiently towards supporting the achievement of the Company's objectives. Evaluations are performed by monitoring policy and procedure execution, reviewing financial and operational control effectiveness, conducting internal audits by the Internal Audit Unit, and following up on improvement recommendations from internal and external auditors.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal ASDP telah mendukung pengelolaan kegiatan usaha secara lebih tertib, terukur, dan akuntabel. Pengendalian internal juga berperan dalam menjaga keandalan pelaporan keuangan, efektivitas operasional, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pengamanan aset Perseroan. Terhadap area yang masih memerlukan penyempurnaan, ASDP melakukan tindak lanjut melalui perbaikan prosedur, penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan kualitas pengawasan, serta pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas tindakan perbaikan.

The evaluation results show that ASDP's internal control system has supported more orderly, measurable, and accountable management of business activities. Internal controls have also succeeded in maintaining financial reporting reliability, operational effectiveness, compliance with applicable rules, and the continuous safeguarding of Company assets. For areas requiring refinements, ASDP takes follow-up actions by improving procedures, strengthening coordination between units, increasing oversight quality, and conducting regular monitoring to ensure corrective action effectiveness.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal ASDP pada tahun 2025 telah berjalan cukup baik dan memadai dalam mendukung efektivitas pengelolaan Perseroan. Sistem tersebut dinilai telah mampu mendukung efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengamanan aset Perseroan. Penilaian ini didasarkan pada penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian, pelaksanaan fungsi pengawasan intern oleh Satuan Pengawasan Internal, pengawasan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal maupun eksternal.

Direksi bertanggung jawab memastikan sistem pengendalian internal diterapkan secara konsisten di seluruh proses bisnis dan unit kerja, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaannya. Terhadap area yang masih memerlukan penyempurnaan, ASDP terus melakukan perbaikan melalui penguatan prosedur, peningkatan koordinasi antarunit kerja, pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit, serta penguatan budaya kepatuhan dan pengendalian agar sistem pengendalian internal semakin efektif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan Perseroan.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners assess that ASDP's Internal Control System in 2025 ran well and adequately supported the effective management of the Company. The system is deemed capable of supporting operational effectiveness and efficiency, financial reporting reliability, compliance with laws and regulations, and safeguarding the Company's assets. This assessment is based on the implementation of control policies and procedures, internal oversight functions by the Internal Audit Unit, Board of Commissioners' oversight through the Audit Committee, and follow-ups on internal and external audit recommendations.

The Board of Directors is responsible for ensuring that the internal control system is applied consistently across all business processes and work units, while the Board of Commissioners oversees the adequacy and effectiveness of its execution. For areas still requiring refinement, ASDP continuously drives improvements by strengthening procedures, enhancing coordination between work units, monitoring audit recommendation follow-ups, and fostering a culture of compliance and control so that the internal control system becomes increasingly effective, adaptive, and aligned with the Company's needs.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Manajemen risiko merupakan proses terstruktur yang digunakan ASDP untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh aktivitas usaha Perseroan. Penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat dikelola secara tepat, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis Perusahaan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyeberangan, kepelabuhanan, serta layanan pendukung lainnya, ASDP menghadapi karakteristik bisnis yang kompleks, baik dari aspek operasional, keselamatan, keuangan, regulasi, teknologi, maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, ASDP menerapkan manajemen risiko secara berkelanjutan melalui pemetaan risiko, penetapan langkah perlakuan risiko, pemantauan efektivitas pengendalian, serta evaluasi berkala guna menjaga kesinambungan usaha dan mendukung penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan.

Risk management is a structured process utilized by ASDP to identify, measure, treat, monitor, and control risks arising from all business activities of the Company. The implementation of risk management is an essential element in ensuring that each potential risk is managed appropriately, measurably, and in alignment with the strategic objectives of the Company.

As a company engaged in ferry transportation business segment, port services, and other supporting services, ASDP faces complex business characteristics across operational, safety, financial, regulatory, technological, and public service aspects. Consequently, ASDP implements risk management on an ongoing basis through risk mapping, establishing isk treatment measures, monitoring control effectiveness, and periodic evaluations to maintain business continuity and support value creation for stakeholders.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem manajemen risiko ASDP disusun dengan mengacu pada Arsitektur Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Acuan tersebut menjadi landasan bagi ASDP dalam menerapkan pengelolaan risiko secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh aktivitas Perseroan.

Sebagai bentuk penguatan tata kelola risiko, ASDP telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor SK.1044/HK.002/ASDP-2024 tanggal 15 November 2024 tentang Piagam Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor SK.1041/HK.002/ASDP-2024 tanggal 15 November 2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management system of ASDP refers to the Risk Management Architecture based on SNI ISO 31000:2018 and the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. This reference serves as the foundation for ASDP to implement risk management in a structured, integrated, and sustainable manner across all activities of the Company.

To strengthen risk governance, ASDP established the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. SK.1044/HK.002/ASDP-2024 dated 15 November 2024 concerning the Risk Management Charter of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), alongside the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. SK.1041/HK.002/ASDP-2024 dated 15 November 2024 concerning the Risk Management Guidelines of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018
Risk Management Framework Based on ISO 31000:2018

ROADMAP SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2025, ASDP telah menetapkan Roadmap Manajemen Risiko Tahun 2026-2030. sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko di seluruh lingkungan Perseroan. *Roadmap* tersebut disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap penguatan kapabilitas manajemen risiko, penyelarasan proses, serta integrasi pengelolaan risiko dengan strategi dan aktivitas bisnis ASDP.

Roadmap Manajemen Risiko Terintegrasi 2026-2030 diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan organisasi, dinamika industri, profil risiko Perseroan, serta praktik terbaik atau *best practices* di bidang manajemen risiko. Melalui roadmap tersebut, ASDP menetapkan target dan tujuan pengelolaan risiko secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja serta menjaga ketahanan usaha Perseroan.

RISK MANAGEMENT SYSTEM ROADMAP

In 2025, ASDP established the Risk Management Roadmap for 2026-2030 as the reference for executing risk management across the entire Company environment. The roadmap is designed to provide a clear direction for improving risk management capabilities, aligning processes, and integrating risk management with the business strategies and activities of ASDP.

The Integrated Risk Management Roadmap 2026-2030 is updated periodically to remain relevant to organizational developments, industry dynamics, the risk profile of the Company, and best practices in the field of risk management. Through the roadmap, ASDP establishes comprehensive, measurable, and sustainable risk management targets and objectives to support performance attainment and safeguard the business resilience of the Company.

Roadmap Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System Roadmap

RMI 2026

3,6

Restrukturisasi Tata Kelola
Governance Restructuring

Membangun dasar yang kuat dengan menyusun ulang struktur tata kelola risiko dan memastikan pengintegrasian budaya risiko dalam seluruh aspek operasional Perusahaan.
Establishing a strong foundation by restructuring the risk governance framework and ensuring the integration of risk culture across all operational aspects of the Company.

RMI 2027

3,8

Penyelarasan Strategi Risiko
Risk Strategy Alignment

Mencapai penyelarasan penuh antara strategi risiko dan tujuan bisnis, serta mendorong penciptaan nilai melalui mitigasi risiko yang efektif.
Achieving full alignment between risk strategy and business objectives, while promoting value creation through effective risk mitigation.

RMI 2028

4,0

Integrasi Sistem
System Integration

Membangun sistem manajemen risiko yang terintegrasi, meningkatkan integrasi data secara real-time, dan memastikan konsistensi pengelolaan risiko di seluruh unit bisnis.
Developing an integrated risk management system, enhancing real-time data integration, and ensuring consistent risk management across all business units.

RMI 2029

4,2

Kecerdasan Risiko
Risk Intelligence

Menggunakan wawasan berbasis data untuk membuat keputusan risiko yang lebih baik, sekaligus memastikan Perusahaan mampu merespons secara proaktif terhadap risiko yang berkembang.
Utilizing data-driven insights to make better risk-based decisions, while ensuring that the Company is able to proactively respond to emerging risks.

RMI 2030

4,4

Keunggulan Berkelanjutan
Sustainable Excellence

Mencapai manajemen risiko yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip ESG dan memastikan bahwa pengelolaan risiko berkontribusi pada penciptaan nilai jangka panjang.
Achieving sustainable risk management by integrating ESG principles and ensuring that risk management contributes to long-term value creation.

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Kebijakan Manajemen Risiko ASDP disusun sebagai acuan utama dalam pelaksanaan proses manajemen risiko di seluruh lingkungan Perseroan. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 beserta ketentuan turunannya, serta Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor SK.1041/HK.002/ASDP-2024 tanggal 15 November 2024.

Kebijakan Manajemen Risiko ASDP mencakup perangkat utama pengelolaan risiko, antara lain matriks strategi risiko atau *Risk Appetite Statement*, kriteria kemungkinan, kriteria dampak dalam penilaian risiko, serta peta dan tingkat level risiko. Seluruh perangkat tersebut digunakan untuk memastikan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pemantauan, dan pelaporan risiko dilakukan secara konsisten, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis Perseroan.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEM POLICY

The Risk Management Policy of ASDP is formulated as the primary reference for risk management process across the Company. The policy refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 and its derivative regulations, as well as the Corporate Risk Management Guidelines established through the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.1041/HK.002/ASDP-2024 dated 15 November 2024.

The Risk Management Policy of ASDP encompasses the core risk management tools, including the risk strategy matrix or Risk Appetite Statement, likelihood criteria, impact criteria in risk assessment, as well as risk maps and risk levels. All such tools are utilized to ensure the processes of identification, measurement, treatment, monitoring, and reporting of risks are conducted consistently, measurably, and in alignment with the strategic objectives of the Company.

STRATEGI RISIKO LEVEL ENTITAS/KORPORAT

Dalam mendukung kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis, ASDP menetapkan nilai penerimaan risiko pada level entitas atau korporat sebagai acuan dalam perumusan strategi risiko Perseroan. Penetapan nilai penerimaan risiko tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa eksposur risiko yang diambil tetap berada dalam batas yang dapat diterima, sesuai kapasitas, selera, toleransi, dan batasan risiko Perseroan.

CORPORATE/ENTITY RISK STRATEGY LEVEL

In supporting operational continuity and business growth, ASDP establishes risk acceptance values at the entity or corporate level to serve as a reference in formulating the risk strategy of the Company. The establishment of these risk acceptance values aims to ensure that the risk exposure assumed remains within acceptable boundaries, in accordance with the capacity, appetite, tolerance, and risk limits of the Company.

Penerimaan Risiko Level Entitas/Korporat
Entity/Corporate-Level Risk Acceptance

Nilai Kapasitas Risiko Perusahaan *Company Risk Capacity*	Nilai Selera Risiko Perusahaan *Company Risk Appetite*	Nilai Toleransi Risiko Perusahaan *Company Risk Tolerance*	Nilai Batasan Risiko *Risk Limit*
Rp 1.305.579.581.518	Rp580.504.839.864 - Rp809.293.469.079	Rp 890.222.815.987	Rp 287.227.507.934

TAKSONOMI RISIKO ASDP 2025 ASDP RISK TAXONOMY 2025

1 Tema Risiko Portofolio BUMN

1.1 Kategori Risiko Fisikal

- 1.1.1 Peristiwa Risiko Terkait Dividen — Sikap Risiko: Tidak Toleran
- 1.1.2 Peristiwa Risiko Terkait PNM — Sikap Risiko: Konservatif
- 1.1.3 Peristiwa Risiko Terkait Subsidi & Kompensasi — Sikap Risiko: Konservatif

1.2 Kategori Risiko Kebijakan

- 1.2.4 Peristiwa Risiko Terkait Kebijakan SDM — Sikap Risiko: Tidak Toleran
- 1.2.5 Peristiwa Risiko Terkait Kebijakan Sektoral — Sikap Risiko: Tidak Toleran

1.3 Kategori Risiko Komposisi

- 1.3.6 Peristiwa Risiko Terkait Konsentrasi Portofolio — Sikap Risiko: Konservatif

2 Tema Risiko Struktur Korporasi & Organisasi

2.4 Kategori Risiko Struktur Korporasi

- 2.4.7 Peristiwa Risiko Terkait Struktur Korporasi — Sikap Risiko: Tidak Toleran

2.5 Kategori Risiko Restrukturisasi dan Reorganisasi

- 2.5.8 Peristiwa Risiko Terkait Penggabungan, Pengambilalihan, Peleburan, Pemburbaran, Likuidasi, Kemitraan dan Restrukturisasi — Sikap Risiko: Konservatif

3 Tema Risiko Bisnis BUMN

3.6 Kategori Risiko Industri Umum

- 3.6.9 Peristiwa Risiko Terkait Formulasi Strategi — Sikap Risiko: Moderat
- 3.6.10 Peristiwa Risiko Terkait Pasar & Makroekonomi — Sikap Risiko: Konservatif
- 3.6.11 Peristiwa Risiko Terkait Keuangan — Sikap Risiko: Konservatif
- 3.6.12 Risiko Hukum, Reputasi dan Kepatuhan — Sikap Risiko: Tidak Toleran
- 3.6.13 Peristiwa Risiko Terkait Proyek — Sikap Risiko: Konservatif
- 3.6.14 Peristiwa Risiko Terkait Teknologi & Keamanan Siber — Sikap Risiko: Konservatif
- 3.6.15 Risiko Hukum, Reputasi Sosial dan Lingkungan — Sikap Risiko: Konservatif
- 3.6.16 Peristiwa Risiko Terkait Operasional — Sikap Risiko: Konservatif

PROFIL KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO

PROFILE OF THE HEAD OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION

Nuke Dewi Novianti

***Vice President* Divisi Manajemen Risiko**
Vice President of Risk Management Division

Indonesia, Jakarta

Berusia 42 tahun per Desember 2025.
Aged 42 years as of December 2025.

Riwayat Pendidikan *Education Background*	• Magister Manajemen Strategik di Universitas Indonesia (2015). • Sarjana Teknologi Pangan di Universitas Pasundan (2006).	• Master of Strategic Management, Universitas Indonesia (2015). • Bachelor of Food Technology, Universitas Pasundan (2006).
Pengalaman Kerja *Professional Background*	• Inspektur Regional I Sistem Pengendalian Internal (2019-2021). • Subkoordinator (09 Juni 2020-31 Maret 2020. • Manajer Pendidikan dan Pelatihan (2019). • Manajer Pengembangan SDM (2018-2019). • Manajer Mutu (2014-2018).	• Regional Inspector I of Internal Control Systems (2019-2021). • Sub-coordinator (9 June 2020- 31 March 2020). • Education and Training Manager (2019). • HR Development Manager (2018-2019). • Quality Manager (2014-2018).
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Surat Keputusan Direksi No. SK.468/PA.104/ASDP-2021 tanggal 19 Juli 2021. Board of Directors Decree No. SK.468/PA.104/ASDP-2021 dated 19 July 2021.	
Periode Jabatan *Term of Office*	Juli 2021–saat ini. July 2021–present.	
Rangkap Jabatan *Concurrent Positions*	Tidak memiliki jabatan rangkap. Did not hold any concurrent positions.	

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Direksi menetapkan struktur Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Direksi Nomor KD.95/HK.001/ASDP-2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 20 Juni 2025. Secara struktural, Divisi Manajemen Risiko berada di bawah Direktorat Keuangan, Teknologi Informasi, dan Manajemen Risiko, serta memiliki peran dalam mengoordinasikan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi di lingkungan Perseroan.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION

The Board of Directors positions the Risk Management Division based on the Regulation of the BoD No. KD.95/HK.001/ASDP-2025 on the Organization and Work Procedures of the Head Office and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dated 20 June 2025. Structurally, the Risk Management Division operates under the Directorate of Finance, IT, and Risk Management, and holds a coordinating role in implementing integrated risk management across the Company.

Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Manajemen Risiko memiliki akses komunikasi secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Akses tersebut digunakan untuk mendukung koordinasi, penyampaian informasi, pelaporan profil risiko, pemantauan mitigasi, serta pembahasan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen risiko di ASDP.

In executing its functions, the Risk Management Division maintains functional communication access to the Board of Commissioners through the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. This access is utilized to support coordination, information sharing, risk profile reporting, mitigation monitoring, and discussions on strategic issues relating to the execution of risk management at ASDP.

Struktur Manajemen Risiko
Risk Management Structure

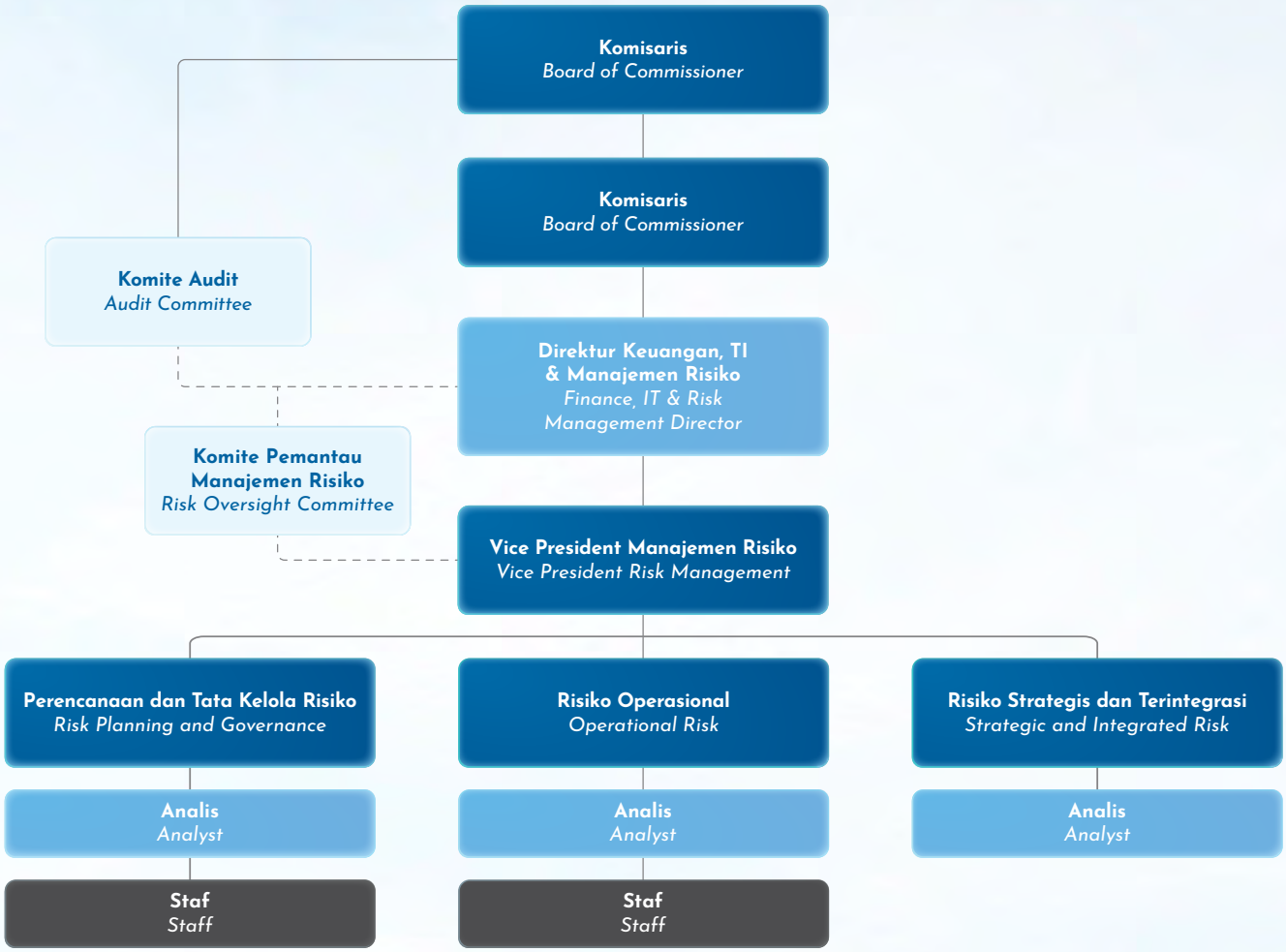

KOMPOSISI KARYAWAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

COMPOSITION OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION PERSONNEL

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pendidikan *Educational*
Nuke Dewi Novianti	*Vice President* Manajemen Risiko Vice President of Risk Management	S2 *Strategic Management*, Universitas Indonesia Master's degree in Strategic Management, Universitas Indonesia
Haniatur Rosyidah	*Manager* Perencanaan dan Tata Kelola Risiko Risk Planning and Governance Manager	S1 Statistika, Universitas Diponegoro Bachelor's degree in Statistics, Universitas Diponegoro
Miftachur Rohmatin	Analis Perencanaan dan Tata Kelola Risiko Risk Planning and Governance Analyst	S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Bachelor's degree in Industrial Engineering, ITS
Okto Abdillah	Staf Perencanaan dan Tata Kelola Risiko Risk Planning and Governance Staff	S2 Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Master's degree in Industrial Engineering, ITS
Mikhael Kristian Sinaga	Staf Perencanaan dan Tata Kelola Risiko Risk Planning and Governance Staff	S1 Teknik Industri, Universitas Diponegoro Bachelor's degree in Industrial Engineering, Universitas Diponegoro
Annisa Elyana Dewi	Staf Perencanaan dan Tata Kelola Risiko Risk Planning and Governance Staff	S1 Ekonomi Islam, Universitas Diponegoro Bachelor's degree in Islamic Economics, Universitas Diponegoro
Awaludin Ramadhani	Manager Risiko Operasional Operational Risk Manager	S1 Jurusan Manajemen, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Bachelor's degree in Management, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Dira Susma Yuniarti	Analis Risiko Operasional Regional I dan II Regional Operational Risk Analyst I and II	D3 Lalu Lintas ASDP D3 in Traffic Engineering, ASDP
Albert Pardomuan M.	Analis Risiko Operasional Regional III dan IV Regional Operational Risk Analyst III and IV	S1 Akuntansi Bachelor's degree in Accounting
Dedy Triwijaya	Staf Risiko Opersional Operational Risk Staff	D3 Lalu Lintas ASDP D3 in Traffic Engineering, ASDP
Nur Annisa Fathin	Staf Risiko Opersional Operational Risk Staff	S1 Teknik Sipil, Universitas Gajah Mada Bachelor's degree in Civil Engineering, Universitas Gajah Mada
Rian Hidayatullah Pratama	Analis Risiko Strategis dan Terintegrasi Strategic and Integrated Risk Analyst	S1 Teknik Industri, Universitas Andalas Bachelor's degree in Industrial Engineering, Universitas Andalas

FORMASI DAN KUALIFIKASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO

FORMATION AND QUALIFICATION OF RISK MANAGEMENT DIVISION PERSONNEL

Kualifikasi Divisi Manajemen Risiko

Qualification of Risk Management Division

Sertifikasi *Certification*	Jumlah Personil Tersertifikasi *Number of Certified Personnel*
QCRO (*Qualified Chief Risk Officer*)	1 orang | person
QRMP (*Qualified Risk Management Professional*)	2 orang | person
QRMA (*Qualified Risk Management Analyst*)	9 orang | person
Certified GRC *Professional*	3 orang | person
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	2 orang | person
Certified Chief Compliance Officer (CCCO)	1 orang | person
Implementer BCM ISO 22301: 2019	1 orang | person
Provisional Implementer BCM ISO 22301: 2019	1 orang | person
Certified Governance Professional (CGP)	2 orang | person
Certified Compliance Professional (CCP)	1 orang | person

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DIVISI MANAJEMEN RISIKO

ASDP berkomitmen memperkuat efektivitas pengelolaan risiko melalui peningkatan kompetensi seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan manajemen risiko. Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan agar proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pemantauan, dan pelaporan risiko dapat dilaksanakan secara konsisten serta selaras dengan kebutuhan organisasi dan *best practices* yang berlaku.

Program pengembangan kompetensi manajemen risiko tidak hanya ditujukan kepada fungsi pengelola risiko, tetapi juga mencakup organ Perseroan, *risk owner*, *risk manager*, *risk officer*, serta unit kerja terkait di seluruh lini organisasi. Melalui penguatan kapasitas tersebut, ASDP berupaya memastikan bahwa setiap insan Perseroan memiliki pemahaman yang memadai mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko pada masing-masing area kerja.

Sepanjang tahun 2025, pengembangan kompetensi manajemen risiko ASDP dilaksanakan melalui pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan serta tingkat keterlibatan dalam proses manajemen risiko. Program tersebut mencakup penguatan kompetensi bagi Dewan Komisaris, Direksi, komite di bawah Dewan Komisaris, Satuan Pengawasan Internal, Divisi Manajemen Risiko, serta unit kerja yang berperan sebagai pemilik dan pengelola risiko.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT DIVISION

ASDP is committed to strengthening the risk management effectiveness by improving the competence of those implementing the risk management. Continuous competency development ensures that the processes of risk identification, measurement, mitigation, monitoring, and reporting can be executed consistently and in alignment with organizational requirements and prevailing best practices.

The risk management competence development program is directed not only at the risk management function but also encompasses corporate organs, risk owners, risk managers, risk officers, and related work units across all organizational lines. Through this capacity building, ASDP endeavors to ensure that every individual in the Company possesses an adequate understanding of their roles and responsibilities in managing risk within their respective work areas.

Throughout 2025, the development of risk management competence at ASDP was executed through training, socialization, mentoring, and capacity building tailored to job requirements and the level of involvement in the risk management process. The program included competence building for the Board of Commissioners, the Board of Directors, committees under the Board of Commissioners, the Internal Audit Unit, the Risk Management Division, and work units serving as risk owners and managers.

Program *Capacity Building* Organ Pengelola Risiko
Capacity Building Program for Risk Management Organs

Organ Pengelola Risiko *Risk Management Organ*	Realisasi Pelatihan dan Sertifikasi di Tahun 2025 *Completed Training and Certification in 2025*		
	Nama Pelatihan/Sertifikasi *Training/Certification*	Jumlah Karyawan *Number of Persons*	Tanggal Pelaksanaan *Date Implemented*
Komite Pemantau Risiko & Komite Tata Kelola Terintegrasi Risk Monitoring Committee & Integrated Governance Committee	*Training* & Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	1 orang | person	18 - 19 September 2025
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan Executive Briefing: Corporate Governance	2 orang | persons	1 Oktober | October 2025
Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee	*Training* & Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	1 orang | person	18-19 September 2025
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan Executive Briefing: Corporate Governance	1 orang | person	1 Oktober | October 2025
SPI Internal Audit Unit	*In House Training Internal Control Over Financial Reporting*	3 orang | persons	Jakarta, 26-27 Februari | February 2025
	In House Training Risk-Based Business Process	1 orang | person	Jakarta, 18-19 Juni | June 2025
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan Executive Briefing: Corporate Governance	1 orang | person	1 Oktober | October 2025
	Internal Auditor ISO 22301:2019	3 orang | persons	Jakarta, 5-6 November 2025

Program Capacity Building Organ Pengelola Risiko
Capacity Building Program for Risk Management Organs

Organ Pengelola Risiko *Risk Management Organ*	Realisasi Pelatihan dan Sertifikasi di Tahun 2025 *Completed Training and Certification in 2025*		
	Nama Pelatihan/Sertifikasi *Training/Certification*	**Jumlah Karyawan** *Number of Persons*	**Tanggal Pelaksanaan** *Date Implemented*
Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	*Program Executive Finance Masterclass Manager Keuangan Pusat & Cabang*	1 orang | person (*Manager*)	*Online*, 3-4 Februari | February 2025; Bandung, 11-14 Februari | February 2025
	In House Training ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | Quality Management System	1 orang | person (Staf)	*Online*, 5 Februari | February 2025
	In House Training Awareness ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | OHS Management System	1 orang | person (Staf)	*Online*, 6 Februari | February 2025
	In House Training Awareness ISO37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) | ABMS (Anti-Bribery Management System)	1 orang | person (Staf)	*Online*, 6 Februari | February 2025
	In House Training Quality Management System (QMS) Internal Auditor ISO 9001:2025	2 orang | persons (1 Manager dan 1 Analis)	Jakarta, 10-11 Februari | February 2025
	In House Training Occupational Health and Safety Management System Internal Auditor ISO	2 orang | persons (1 Manager dan 1 Analis)	Jakarta, 12-13 Februari | February 2025
	In House Training Anti Bribery Management System Internal Auditor ISO 37001: 2026	2 orang | persons (1 Manager dan 1 Analis)	Jakarta, 17-18 Februari | February 2025
	ERM Fundamental with QRMA Certification	1 orang | person (Staf)	Bandung, 11-14 Februari | February 2025
	In-House Training & Sertifikasi Internal Auditor	2 orang | persons (1 Manager dan 1 Analis)	Jakarta, 10-13 & 17-18 Februari | February 2025
	Training Internal Control Over Financial Reporting	2 orang | persons (1 *Vice President* dan 1 Staf)	Bogor, 18-19 Februari | February 2025
	Perpanjang Sertifikasi | Extend Certification *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*	1 orang | person (*Manager*)	*Online*, 25 Februari | Februari 2025
	In House Training Internal Control Over Financial Reporting	3 orang | persons (1 Analis dan 2 Staf)	Jakarta, 26-27 Februari | February 2025
	In House Training Risk Modelling	6 orang | persons (2 Manager, 2 Analis, 2 Staf)	Pertemuan: • Ke-1 & 2: 28-29 April 2025; • Ke-3: 2 Mei | May 2025 • Ke-4 & 5: 26-27 Mei | May 2025 • Ke-6: 4 Juni | June 2025
	In House Training Risk-Based Business Process	5 orang | persons (5 Staf)	Jakarta, 18-19 Juni | June 2025
	Certified Governance Risk Compliance Professional (CGRCP)	1 orang | persons (1 Manager)	Jakarta, 5-8 Agustus | August 2025
Risk Owner (Lini Pertama) Risk Owner (First Line)	*Internal Auditor ISM Code*	1 Orang | person (1 *Analyst*)	Jakarta, 11-13 Agustus | August 2025
	Master Class Corporate Governance (with Certified Chief Governance Officer Certification)	1 orang | person (1 *Vice President*)	Jakarta, 13-15 Agustus | August 2025
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan Executive Briefing: Corporate Governance	9 orang | persons (1 *Vice President*, 2 Manager, 3 Analis dan 3 Staf)	Jakarta, 1 Oktober | October 2025
	Internal Auditor ISO 22301:2019	11 orang | persons (2 Manager, 4 Analis, dan 5 Staf)	5-6 November 2025
	In House Training Internal Control Over Financial Reporting	24 orang | persons (Tim *Counterpart* ICOFR)	Jakarta, 26-27 Februari | February 2025
	Training Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1 orang (1 Pejabat D-1) 1 BoD-1 executive	Jakarta, 23-25 April 2025
	Training Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1 orang (1 Pejabat D-1) 1 BoD-1 executive	Jakarta, 26-28 Mei | May 2025
	In-House Training Risk Based Business Process	61 orang | persons (62 *risk officer*)	Jakarta, 18-19 Juni | June 2025
	In-House Training Qualified Risk Management Officer (QRMP)	29 orang | persons (29 *risk officer*)	Jakarta, 9-11 Juli | July 2025
	In House Training Qualified Risk Management Professional (QRMP)	20 orang (20 Pejabat D-2) 20 BoD-1 executives	Jakarta, 21-25 Juli | July 2025
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)	21 orang (18 Pejabat D1 dan 3 Pejabat D-2 (18 BoD-1 and 3 BoD-2 executives)	1 Oktober | October 2025
	Internal Auditor ISO 22301:2019	38 orang | persons	Jakarta, 5-6 November 2025

Program Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko
Capacity Building Program for Risk Management Organs

Nama	Pelatihan/Sertifikasi	Tempat dan Tanggal	Penyelenggara *Organizer*
Nuke Dewi Novianti	*Training Internal Control Over Financial Reporting*	Bogor, 18-19 Februari 2025	PLMI
	Master Class Corporate Governance (with Certified Chief Governance Officer Certification)	Jakarta, 13-15 Agustus 2025	CRMS
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan Executive Briefing: Corporate Governance	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	ESG Fundamental & Implementation	Jakarta, 21 November 2025	ID Survey
	Training for Leaders: Service Culture Transformation	Jakarta, 8-9 Desember 2025	*Learning Resource* & ASDP
Awaludin Ramadhani	*Program Executive Finance Masterclass* Manager Keuangan Pusat & Cabang	Online, 3-4 Februari 2025 Bandung, 11-14 Februari 2025	ASDP
	In House Training Risk Modelling	Pertemuan 1 dan 2: 28-29 April 2025 Pertemuan 3: 2 Mei 2025 Pertemuan 4 dan 5: 26-27 Mei 2025 Pertemuan 6: 4 Juni 2025	RWI
	Certified Governance Risk Compliance Professional (CGRCP)	Jakarta, 5-8 Agustus 2025	PPM
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
Haniatur Rosyidah	*In House Training* dan Sertifikasi Internal Auditor	Jakarta, 10-13 & 17-18 Februari 2025	BSI
	In House Training Risk Modelling	Pertemuan 1 dan 2: 28-29 April 2025 Pertemuan 3: 2 Mei 2025 Pertemuan 4 dan 5: 26-27 Mei 2025 Pertemuan 6: 4 Juni 2025	RWI
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
	ESG Fundamental & Implementation	Jakarta, 21 November 2025	ID Survey

Program Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko
Capacity Building Program for Risk Management Organs

Nama	Pelatihan/Sertifikasi	Tempat dan Tanggal	Penyelenggara *Organizer*
Miftachur Rohmatin	*Training Internal Control Over Financial Reporting*	Bogor, 18-19 Februari 2025	PLMI
	In House Training Risk Modelling	Pertemuan 1 dan 2: 28-29 April 2025 Pertemuan 3: 2 Mei 2025 Pertemuan 4 dan 5: 26-27 Mei 2025 Pertemuan 6: 4 Juni 2025	RWI
	In House Training Risk-Based Business Process	Jakarta, 18 -19 Juni 2025	CRMS
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
Dira Susma Yuniarti	*In House Training Risk Modelling*	Pertemuan 1 dan 2: 28-29 April 2025 Pertemuan 3: 2 Mei 2025 Pertemuan 4 dan 5: 26-27 Mei 2025 Pertemuan 6: 4 Juni 2025	RWI
	Internal Auditor ISM Code	Jakarta, 11-13 Agustus 2025	BKI
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
	Training for Leaders: Service Culture Transformation	Jakarta, 8-9 Desember 2025	*Learning Resource* & ASDP
Rian Hidayatullah Pratama	*In House Training Internal Control Over Financial Reporting*	Jakarta, 26-27 Februari 2025	IAI
	In House Training Risk Modelling	Pertemuan 6: 4 Juni 2025	RWI
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
	Financial Analysis	Jakarta, 26-27 November 2025	Prasetiya Mulia Executive Learning Institute
Albert Pardomuan Manurung	*In House Training* dan Sertifikasi Internal Auditor	Jakarta, 10-13 & 17-18 Februari 2025	BSI
	In House Training Internal Control Over Financial Reporting	Jakarta, 26-27 Februari 2025	IAI
	In House Training Risk Modelling	Pertemuan 1 dan 2: 28-29 April 2025 Pertemuan 3: 2 Mei 2025 Pertemuan 4 dan 5: 26-27 Mei 2025 Pertemuan 6: 4 Juni 2025	RWI
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
Okto Abdillah	*In House Training ISO 9001:2015* Sistem Manajemen Mutu	Online, 5 Februari 2025	BSI
	In House Training Risk-Based Business Process	Jakarta, 18 -19 Juni 2025	CRMS
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis

Program Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko
Capacity Building Program for Risk Management Organs

Nama	Pelatihan/Sertifikasi	Tempat dan Tanggal	Penyelenggara *Organizer*
Mikhael Kristian Sinaga	*In House Training Awareness ISO 45001:2018* Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Online, 6 Februari 2025	BSI
	In House Training Internal Control Over Financial Reporting	Jakarta, 26-27 Februari 2025	IAI
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
Annisa Elyana Dewi	*In House Training Awareness ISO37001:2016* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Online, 6 Februari 2025	BSI
	In House Training Risk-Based Business Process	Jakarta, 18 -19 Juni 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
Nur Annisa Fathin Fauziyyah	*ERM Fundamental with QRMA Certification*	Bandung, 11-14 Februari 2025	CRMS
	In House Training Risk-Based Business Process	Jakarta, 18 -19 Juni 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
Dedy Triwijaya	*In House Training Risk-Based Business Process*	Jakarta, 18 -19 Juni 2025	CRMS
	Executive Briefing: Tata Kelola Perusahaan	Jakarta, 1 Oktober 2025	CRMS
	Internal Auditor ISO 22301:2019	Jakarta, 5-6 November 2025	Proxsis
	Financial Analysis	Jakarta, 26-27 November 2025	Prasetiya Mulia Executive Learning Institute

KEBIJAKAN PETA RISIKO DAN TINGKAT/LEVEL RISIKO

Penentuan level risiko dilakukan dengan mengombinasikan tingkat dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Kombinasi tersebut menghasilkan skala risiko yang digunakan sebagai dasar dalam memetakan posisi risiko pada matriks analisis risiko atau peta risiko.

RISK MAP AND RISK LEVEL POLICY

The determination of risk levels is established by putting together the factors of impact level and the probability of risk occurrence. This combination generates a risk scale utilized as the basis for mapping risk positions on the risk analysis matrix, also known as a risk map.

Peta risiko menjadi alat bantu bagi ASDP dalam menentukan tingkat risiko, menetapkan prioritas penanganan, serta merumuskan langkah mitigasi yang sesuai. Dengan adanya peta risiko, Perseroan dapat memastikan bahwa setiap risiko dikelola berdasarkan tingkat signifikansi dan urgensinya, sehingga proses pengambilan keputusan dan pengendalian risiko dapat dilakukan secara lebih terukur.

The risk map serves as a tool for ASDP to determine risk levels, establish handling priorities, and formulate appropriate mitigation steps. With the risk map in place, the Company can ensure that each risk is managed based on its level of significance and urgency, allowing the decision-making and risk control processes to be conducted in a more measurable manner.

Kebijakan Peta Risiko dan Tingkat/Level Risiko

Risk Map and Risk Level Policy

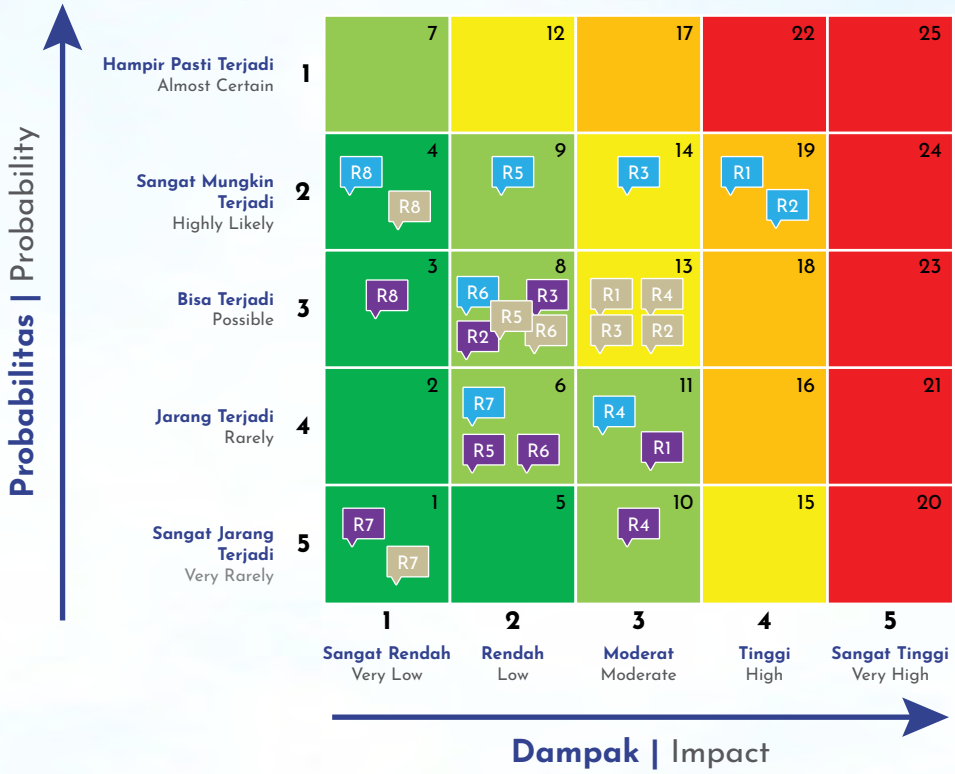

Total Risiko per Level (*Inheren Risk*)	1	4	1	2	0
Total Risiko per Level (*Residual Risk*)	2	6	0	0	0
Total Risiko per Level (*Current Risk*)	2	2	4	0	0

Skala Risiko *Risk Scale*	Level Risiko *Risk Level*
1-5	*Low*
6-11	*Low to moderate*
12-15	*Moderate*
16-19	*Moderate to high*
20-25	*High*

PROFIL RISIKO DAN MITIGASINYA RISK PROFILE AND MITIGATION

Profil Risiko dan Mitigasi Risiko Korporat Tahun 2025
Risk Profile and Corporate Risk Mitigation 2025

No	Risiko Utama *Main Risks*	Inheren | *inherent*			*Residual*			*Current*		
		Kemungkinan *Probability*	Dampak *Impact*	Nilai Risiko *Risk Score*	Kemungkinan *Probability*	Dampak *Impact*	Nilai Risiko *Risk Score*	Kemungkinan *Probability*	Dampak *Impact*	Nilai Risiko *Risk Score*
1	Terjadinya Kerusakan Kapal* Ship Damage*	4	4	19	2	3	11	3	3	13
2	Terjadinya Kecelakaan Armada (Tenggelam, Kebakaran, Tubrukan, Kandas)* Fleet Accidents (Sinks, Fires, Collisions, Grounding)*	4	4	19	3	2	8	3	3	13
3	Tidak berjalannya Komersialisasi Kawasan BHC sesuai dengan Perencanaan BHC Area Commercialization Falls Short of Planned	4	3	14	3	2	8	3	3	13
4	Keterlambatan Pelaksanaan Penyelesaian Docking* Delays in Docking Completion*	2	3	11	1	3	10	3	3	13
5	Kapal Kalah Bersaing dengan Kompetitor* Vessels Lose Competitiveness to Competitors*	4	2	9	2	2	6	3	2	8
6	Ketidaksesuaian perhitungan subsidi angkutan penyeberangan perintis Inconsistencies in Pioneer Ferry Subsidy Calculations	3	2	8	2	2	6	3	2	8
7	Terjadinya cross default dari anak perusahaan* Cross Defaults from Subsidiaries*	2	2	6	1	1	1	1	1	1
8	Aset properti belum dimanfaatkan secara menyeluruh ** Property Assets Not Fully Utilized**	4	1	4	3	1	3	4	1	4

* Terintegrasi dengan Profil Risiko Korporat 2025 PT Jembatan Nusantara
** Terintegrasi dengan Profil Risiko Korporat 2025 PT Indonesia Ferry (Persero)
* Terintegrasi dengan Profil Risiko Korporat 2025 PT Jembatan Nusantara
** Terintegrasi dengan Profil Risiko Korporat 2025 PT Indonesia Ferry (Persero)

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

ASDP secara berkala melakukan tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko untuk memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pemantauan, dan pelaporan risiko telah berjalan secara memadai di seluruh lini organisasi. Tinjauan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselarasan penerapan manajemen risiko terhadap strategi Perseroan, profil risiko, kebijakan internal, SNI ISO 31000:2018, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

Berdasarkan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (risk maturity index) tahun 2025 untuk tahun buku 2024 pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berada pada Fase Praktik yang Baik dengan skor 3,3 sesuai dengan Framework pada PER-2/MBU/03/2023 dan SK-8/DKU. MBU/12/2023. Pada level ini, Perusahaan dinyatakan telah menerapkan Manajemen risiko beserta prinsipnya secara konsisten pada setiap bagian Perusahaan, ditandai dengan penerapan struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, dan alat yang berkaitan dengan Manajemen Risiko meskipun efektivitas atau level implementasinya masih bervariasi. Karyawan juga sudah cukup sadar risiko dan target kinerja perusahaan telah dilakukan pada tingkat individu. Secara keseluruhan, dimensi praktik manajemen risiko telah mendekati atau sejalan dengan praktik standar industri.

Pada tahun 2025, sistem manajemen risiko ASDP dinilai telah berjalan cukup baik dan efektif dalam mendukung pengelolaan risiko Perseroan. Hal ini tercermin dari penerapan kebijakan dan pedoman manajemen risiko, pemetaan risiko, pemantauan mitigasi, penguatan kompetensi pengelola risiko, serta koordinasi antara Divisi Manajemen Risiko, Satuan Pengawas Internal, unit kerja sebagai *risk owner*, Direksi, dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

REVIEW OF RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

ASDP periodically reviews of the effectiveness of the risk management system to ensure that the processes of risk identification, measurement, treatment, monitoring, and reporting function adequately across all organizational lines. The review considers the alignment of risk management implementation with the strategies of the Company, the risk profile, internal policies, SNI ISO 31000:2018, and the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023.

Based on the 2025 Risk Maturity Index assessment for fiscal year 2024, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) was positioned in the Good Practice Phase with a score of 3.3, in accordance with the framework under PER-2/MBU/03/2023 and SK-8/DKU.MBU/12/2023. At this level, the Company is considered to have consistently implemented risk management and its principles across all parts of the organization, as reflected in the implementation of organizational structure, framework, compliance, processes, systems, and tools related to risk management, although the effectiveness or level of implementation may still vary. Employees have also demonstrated adequate risk awareness, while the Company's performance targets have been cascaded to the individual level. Overall, the Company's risk management practice dimensions have approached or aligned with industry standard practices.

In 2025, the risk management system have run reasonably well and effective in supporting the Company's risk management. This is shown in the implemented policies and guidelines, risk mapping, mitigation monitoring, competency improvement of risk managers, and coordination among the Risk Management Division, Internal Audit, Unit work units acting as risk owners, the Board of Directors, and the Board of Commissioners through the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko ASDP pada tahun 2025 telah berjalan cukup baik dan memadai dalam mendukung pengelolaan risiko Perseroan. Sistem tersebut dinilai telah mampu mendukung proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pemantauan, dan pelaporan risiko secara lebih terstruktur, serta membantu Perseroan dalam mengelola eksposur risiko yang berkaitan dengan aspek strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, teknologi, keselamatan, dan layanan.

Penilaian tersebut didasarkan pada penerapan kebijakan dan pedoman manajemen risiko, pelaksanaan *roadmap* Manajemen Risiko Terintegrasi 2026-2030, pemetaan dan pemantauan profil risiko, pelaksanaan mitigasi risiko, serta koordinasi antara Divisi Manajemen Risiko, unit kerja sebagai *risk owner*, Direksi, dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Terhadap area yang masih memerlukan penyempurnaan, ASDP terus memperkuat budaya sadar risiko, meningkatkan kualitas pelaporan risiko, serta memantau tindak lanjut mitigasi secara berkala agar sistem manajemen risiko semakin efektif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan Perseroan.

GOVERNING BOARDS AND AUDIT COMMITTEE STATEMENT ON RISK MANAGEMENT ADEQUACY

The Boards of Directors and Commissioners assess that the risk management system of ASDP in 2025 functioned reasonably well and adequately in supporting the risk management of the Company. The system is considered to have successfully supported the processes of risk identification, measurement, treatment, monitoring, and reporting in a more structured manner, while assisting in managing risk exposures relating to strategic, operational, financial, compliance, technological, safety, and service aspects.

This assessment is based on the implementation of risk management policies, guidelines, and Integrated Risk Management Roadmap 2026-2030, the mapping and monitoring of risk profiles, the execution of risk mitigation, and coordination among the Risk Management Division, work units acting as risk owners, the Boards of Directors and Commissioners on the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. Of areas requiring refinement, ASDP continues to strengthen the risk-aware culture, improve the risk reporting quality, and periodically monitor mitigation follow-ups to ensure the risk management system becomes increasingly effective, adaptive, and aligned with the needs of the Company.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK
FUNDING FOR SOCIAL AND/OR POLITICAL ACTIVITIES

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL

Pada tahun 2025, ASDP menyalurkan dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan data realisasi, total dana TJSL yang disalurkan mencapai Rp10.182.808.832 dari total anggaran sebesar Rp10.000.000.000. Penyaluran tersebut difokuskan pada pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, relevansi program, serta dampak yang dihasilkan bagi penerima manfaat.

FUNDS FOR SOCIAL ACTIVITIES

In 2025, ASDP distributed Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) program funds as a form of the commitment of the Company to supporting sustainable development and the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs). Based on actual performance data, the total distributed CSER funds amounted to Rp10,182,808,832 out of a total budget of Rp10,000,000,000. The distribution focused on the social pillar, economic pillar, environmental pillar, and the law and governance pillar, considering community needs, program relevance, and the generated impact for beneficiaries.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN POLITIK

Sepanjang tahun 2025, ASDP tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan kontribusi, donasi, maupun pendanaan kepada partai politik, kandidat, atau aktivitas politik dalam bentuk apa pun. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga independensi, integritas, netralitas, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*, sekaligus memastikan bahwa seluruh sumber daya Perseroan digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan usaha, pelayanan kepada masyarakat, penciptaan nilai bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, serta menjaga reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik.

FUNDS FOR POLITICAL ACTIVITIES

Throughout 2025, ASDP was not involved in political activities and did not provide contributions, donations, or funding to political parties, candidates, or political activities in any form. This policy reflects the commitment of the Company to maintaining independence, integrity, neutrality, and the implementation of Good Corporate Governance, while ensuring that all resources of the Company are utilized responsibly to support business activities, public services, value creation for Shareholders and stakeholders, and to safeguard the reputation, credibility, and public trust.

PERKARA HUKUM
LEGAL CASES

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Perkara hukum mencakup kasus litigasi maupun nonlitigasi yang dihadapi oleh ASDP, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi. Perkara hukum dapat timbul dari berbagai aspek, antara lain proses perizinan, sengketa perdata, hubungan kontraktual, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan proses bisnis Perseroan. Sepanjang tahun 2025, ASDP senantiasa memantau dan mengelola setiap perkara hukum secara cermat, terukur, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku guna memitigasi potensi dampak terhadap kegiatan usaha, reputasi, serta kesinambungan operasional Perseroan.

LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY

Legal cases encompass litigation and non-litigation cases faced by ASDP, subsidiaries, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors. Legal cases may arise from various aspects, including licensing processes, civil disputes, contractual relationships, compliance with statutory regulations, or alleged criminal acts relating to the business processes of the Company. Throughout 2025, ASDP consistently monitored and managed each legal case carefully, measurably, and in accordance with applicable legal procedures to mitigate potential impacts on the business activities, reputation, and operational continuity of the Company.

Perkara Hukum

Legal Cases

Jenis Perkara	Total	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) *Total Completed (Has Permanent Legal Force)*	Proses Penyelesaian *Settlement Process*
Perkara Perdata Civil Case	6	1. Perkara Perdata (Wanprestasi) antara PT ASDP dengan PT Infiniti Indosakti. Saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 967 PK/PDT/2024 tanggal 3 Oktober 2024. Civil Case (Breach of Contract) between PT ASDP and PT Infiniti Indosakti. The matter has attained final and binding legal force based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Judicial Review Decision No. 967 PK/PDT/2024 dated 3 October 2024.	1. Saat ini dalam proses negosiasi ganti kerugian dari PT ASDP kepada PT Infiniti Indosakti. Currently in the process of indemnity negotiations from PT ASDP to PT Infiniti Indosakti.
		2. Perkara Perdata (Wanprestasi) antara PT ASDP dengan PT Dian Sentosa. Saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 547 PK/PDT/2025/PN JKT.Pst tanggal 17 Juni 2025. Civil Case (Breach of Contract) between PT ASDP and PT Dian Sentosa. The matter has attained final and binding legal force based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Judicial Review Decision No. 547 PK/PDT/2025/PN JKT.Pst dated 17 June 2025.	2. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara PT ASDP dengan PT Dian Sentosa, proses penyelesaian ganti kerugian dilakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 11 November 2025. Based on the Agreement between PT ASDP and PT Dian Sentosa, the compensation settlement process shall be completed by 11 November 2025, at the latest.
		3. Perkara Perdata (PMH) antara PT ASDP dengan PT Persada Gading Elok. Saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2853/K/PDT/2025 tanggal 14 Agustus 2025. Civil Case (Unlawful Act/PMH) between PT ASDP and PT Persada Gading Elok. The matter has attained final and binding legal force based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Cassation Decision No. 2853/K/PDT/2025 dated 14 August 2025.	3. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara PT ASDP dengan PT Persada Gading Elok, proses penyelesaian ganti kerugian dilakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2025. Based on the Agreement between PT ASDP and PT Persada Gading Elok, the compensation settlement process will be completed with payment made no later than 31 December 2025.
		4. Perkara Perdata (gugatan konsumen, PMH) antara PT ASDP dengan Sdr Imam Fahrudin. Saat ini telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2025/PN.Jkt.PST tanggal 3 Desember 2025. Civil Case (Consumer Lawsuit, Unlawful Act/PMH) between PT ASDP and Mr. Imam Fahrudin. The matter is resolved and has attained final and binding legal force based on the Central Jakarta District Court Decision No. 564/Pdt.G/2025/PN.Jkt.PST dated 3 December 2025.	4. Sdr Imam Fahrudin (Penggugat) telah mencabut gugatannya secara resmi. Mr. Imam Fahrudin (the Plaintiff) has formally withdrawn the lawsuit.

Perkara Hukum
Legal Cases

Jenis Perkara	Total	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) *Total Completed (Has Permanent Legal Force)*	Proses Penyelesaian *Settlement Process*
		5. Perkara Perdata (PMH) antara PT ASDP dengan Sdr Turyono. Saat ini telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 5683/K/Pdt/2024 tanggal 19 November 2024. Civil Case (Unlawful Act/PMH) between PT ASDP and Mr. Turyono. The matter is resolved and has attained final and binding legal force based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Cassation Decision No. 5683/K/Pdt/2024 dated 19 November 2024.	5. Telah dilakukan eksekusi riil terhadap objek sengketa pada tanggal 15 Desember 2025. Physical execution of the disputed object was carried out on 15 December 2025.
		6. Perkara Perdata (Wanprestasi) antara PT ASDP dengan PT AJB Bumi Putera. Saat ini belum selesai dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Civil Case (Breach of Contract) between PT ASDP and PT AJB Bumi Putera. The matter is ongoing and has not yet attained final and binding legal force.	6. Saat ini dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 188/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel. Currently in resolution proceedings at the South Jakarta District Court under Case No. 188/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel.
Kasus Korupsi Corruption Cases	1	Perkara Pidana (tindak Pidana Korupsi) oleh ex-Direksi. Saat ini telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PNJktPst. Criminal Case (Corruption) involving former Board of Directors members. The matter is resolved and has attained final and binding legal force based on the Central Jakarta District Court Decision No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PNJktPst.	-
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relations Cases	-	-	-
Kasus Lain-lain	1	Perkara Pidana (Penyalahgunaan Kewenangan) oleh Sdr Khoiril Syaiful Imron yang pada saat kejadian sebagai Nahkoda KMP Pulo Tello dan Sdr Januar Heriandi yang pada saat kejadian sebagai ABK KMP Pulo Tello. Saat ini telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pid.sus/2026/PN Bgl tanggal 14 April 2026. Criminal Case (Abuse of Authority) involving Mr. Khoiril Syaiful Imron (serving as Master of KMP Pulo Tello at the time of the incident) and Mr. Januar Heriandi (serving as Crew Member of KMP Pulo Tello at the time of the incident). The matter is resolved and has attained final and binding legal force based on the Bengkulu District Court Decision No. 54/Pid.sus/2026/PN Bgl dated 14 April 2026.	Telah ditandatanganinya Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh masing-masing pihak pada tanggal 20 April 2026. The Court Execution Minutes were signed by each party on 20 April 2026.

PENYELESAIAN PERKARA HUKUM SETTLEMENT OF LEGAL CASES

Penyelesaian Perkara Hukum
Settlement of Legal Cases

Para Pihak *Parties*	**Pokok Perkara** *Case*	**Status Perkara** *Status of the Case*	**Upaya Manajemen** *Management Efforts*	**Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan** *Impact/Risk on the Company*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Infiniti Indosakti	Perkara Perdata (Wanprestasi) atas Perjanjian Kerjasama Operasi Pembangunan Dermaga Penyeberangan Merak IV – Bakauheni IV Civil Case (Breach of Contract) regarding the Joint Operations Agreement for the Construction of the Merak IV - Bakauheni IV Port Pier	Selesai di Pengadilan namun saat ini masih dalam tahap proses negosiasi penurunan nilai ganti kerugian. Resolved in Court; currently in the negotiation phase to reduce the indemnity value.	*Best effort* dalam proses peradilan dan saat ini dalam proses negosiasi untuk menurunkan nilai ganti kerugian dari PT ASDP kepada PT Infiniti Indosakti. Best effort in judicial proceedings; currently negotiating to lower the indemnity value payable by PT ASDP to PT Infiniti Indosakti.	-
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Dian Sentosa	Perkara Perdata Wanprestasi atas Perjanjian Nomor Sperj.464/UM.201/ASDP-2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Perjanjian Pekerjaan Paketisasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Merak, Ketapang (Gilimanuk), Lembar, Kayangan (Pototano), Sape, Bitung, dan Batam. Civil Case for Breach of Contract Regarding Agreement No. Sperj.464/UM.201/ASDP-2017 dated 21 August 2017, concerning the Contract for the Bundling Upgrade of Ferry Port Facilities at Merak, Ketapang (Gilimanuk), Lembar, Kayangan (Pototano), Sape, Bitung, and Batam.	Selesai Resolved	Telah melakukan ganti kerugian dari PT ASDP kepada PT Dian Sentosa sebesar Rp19.965.575.771, dimana nilai tersebut di bawah dari nilai yang ditentukan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2853/K/PDT/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yaitu sebesar Rp23.108.020.000,- Disbursed an indemnity from PT ASDP to PT Dian Sentosa amounting to Rp19,965,575,771, where said value is below the amount determined by the Supreme Court Cassation Decision No. 2853/K/PDT/2025 dated 14 August 2025, which stipulated Rp23,108,020,000.	-
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Persada Gading Elok	Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum atas Perjanjian Nomor Sperj.307/HK.207/ASDP-2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang sewa menyewa area gedung kantor Ex. Kelapa Gading *Trade Center* tahun 2021 sampai dengan 2022. Civil Case for Tort regarding Agreement No. Sperj.307/HK.207/ASDP-2021 dated 12 October 2021, concerning the lease of office space at the former Kelapa Gading Trade Center from 2021 through 2022.	Selesai Resolved	Telah melakukan ganti kerugian dari PT ASDP kepada PT Persada Gading Elok sesuai dengan nilai yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2025/PN.Jkt.PST tanggal 3 Desember 2025 yaitu sebesar Rp4.178.006.597,- Disbursed an indemnity from PT ASDP to PT Persada Gading Elok in accordance with the value stated in the Central Jakarta District Court Decision No. 564/Pdt.G/2025/PN.Jkt.PST dated 3 December 2025, amounting to Rp4,178,006,597.	-

Penyelesaian Perkara Hukum
Settlement of Legal Cases

Para Pihak *Parties*	Pokok Perkara *Case*	Status Perkara *Status of the Case*	Upaya Manajemen *Management Efforts*	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan *Impact/Risk on the Company*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Sdr Imam Fahrudin	Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum atas ketidakpuasan pengguna jasa terhadap pelayanan di Cabang Bakauheni. Civil Case for Tort Based on a Service User's Dissatisfaction with the Service at the Bakauheni Branch.	Selesai Resolved	Penggugat telah mencabut gugatannya secara resmi sehingga perkara dinyatakan selesai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Desember 2025 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya. The Plaintiff has formally withdrawn the lawsuit; thus, the case is declared resolved and holds final and binding legal force in accordance with the Decision of the Central Jakarta District Court No. 564/Pdt.G/PN.Jkt.Pst dated 1 December 2025, which granted the plaintiff's motion to dismiss the lawsuit.	-
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Sdr Turyono	Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum atas Objek Tanah seluas 25.000m2 yang terletak di desa Bakauheni, Kecamatan bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00007/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero) tertanggal 8 Februari 2021. Civil Case of Tort regarding a 25,000 m² plot of land located in Bakauheni Village, Bakauheni Subdistrict, South Lampung Regency, based on valid proof of ownership, namely Management Rights Certificate No. 00007/Bakauheni Village in the name of the rights holder PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero), dated 8 February 2021.	Selesai Resolved	Telah dilakukan eksekusi riil terhadap objek sengketa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Desember 2025. Physical execution of the disputed object was carried out based on the decision holding final and binding legal force on 15 December 2025.	-

PENGARUH PERKARA HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, perkara hukum yang dihadapi ASDP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan, reputasi, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Tidak terdapat perkara hukum yang berdampak langsung terhadap kegiatan operasional utama ASDP, termasuk layanan penyeberangan, pengelolaan pelabuhan, serta layanan pendukung lainnya. Perseroan senantiasa memantau perkembangan setiap perkara hukum dan melakukan pengelolaan secara hati-hati sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan risiko hukum tetap terkendali serta tidak mengganggu keberlanjutan operasional Perseroan.

IMPACT OF LEGAL CASES ON THE COMPANY

Throughout 2025, the legal cases faced by ASDP exerted no significant influence on the financial condition, reputation, or business continuity of the Company. No legal cases carried a direct impact on the primary operational activities of ASDP, including ferry transportation business segment, port management, and other supporting services. The Company consistently monitors the developments of each legal case and exercises prudent management in accordance with applicable provisions to ensure legal risks remain controlled and do not disrupt the operational sustainability of the Company.

PERKARA HUKUM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris ASDP, baik dalam perkara litigasi maupun nonlitigasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, maupun kegiatan Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat perkara hukum Dewan Komisaris yang berdampak terhadap reputasi, pengambilan keputusan, maupun kelangsungan operasional ASDP.

DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris ASDP. Namun demikian, terdapat 1 perkara pidana tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan anggota Direksi. Perkara tersebut telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Perkara hukum tersebut tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional utama ASDP, layanan kepada masyarakat, maupun kelangsungan usaha Perseroan.

LEGAL CASES INVOLVING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, no legal cases involved members of the Board of Commissioners of ASDP, whether in litigation or non-litigation matters relating to the execution of duties, responsibilities, or activities of the Company. Consequently, no legal cases involving the Board of Commissioners impacted the reputation, decision-making, or operational continuity of ASDP.

BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2025, no legal cases involved members of the Board of Commissioners of ASDP. However, 1 criminal corruption case involved a former member of the Board of Directors. The case has been resolved and has obtained final and binding legal force based on the Central Jakarta District Court Decision No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The legal case exerted no direct impact on the primary operational activities of ASDP, public services, or the business continuity of the Company.

Perkara Hukum Direksi
Legal Cases of Board of Directors

Jenis Perkara *Case*	Total	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) *Total Completed (Has Permanent Legal Force)*	Proses Penyelesaian *Settlement Process*
Perkara Perdata Civil Case	-	-	-
Kasus Korupsi Corruption Cases	1	Perkara Pidana (Tindak Pidana Korupsi) oleh ex-Direksi. Saat ini telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PNJktPst. Criminal Case (Corruption) involving former Board of Directors members. Resolved and has attained final and binding legal force based on the Central Jakarta District Court Decision No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PNJktPst.	-
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relations Cases	-	-	-
Kasus Lain-lain Miscellaneous Cases	-	-	-

INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
INFORMATION ON ADMINISTRATIVE SANCTIONS

SANKSI ADMINISTRATIF

Hingga 31 Desember 2025, ASDP tidak menerima sanksi administratif dari regulator maupun otoritas terkait. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

INTERNAL EMPLOYEE DISCIPLINARY SANCTIONS

As of 31 December 2025, ASDP had not received any administrative sanctions from regulators or relevant authorities. This reflects the Company's commitment to maintaining compliance with applicable laws and regulations and consistently implementing good corporate governance.

HUKUMAN DISIPLIN KARYAWAN INTERNAL

Sepanjang tahun 2025, ASDP mencatat sebanyak 59 hukuman disiplin karyawan internal. Berdasarkan tingkatannya, hukuman disiplin berat tercatat sebagai kategori terbanyak dengan 33 kasus, diikuti hukuman disiplin sedang sebanyak 18 kasus, hukuman disiplin ringan sebanyak 7 kasus, dan hukuman disiplin mendesak sebanyak 1 kasus. Data tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Perseroan dalam memperkuat pembinaan karyawan, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, budaya disiplin, serta efektivitas pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan kerja ASDP.

INTERNAL EMPLOYEE DISCIPLINARY SANCTIONS

Throughout 2025, ASDP recorded a total of 59 internal employee disciplinary sanctions. Based on the classification, severe disciplinary sanctions represented the highest category with 33 cases, followed by moderate disciplinary sanctions with 18 cases, mild disciplinary sanctions with 7 cases, and urgent disciplinary sanctions with 1 case. These data serve as evaluation material for the Company in improving employee development, compliance with company regulations, a culture of discipline, and the effectiveness of internal oversight and control within the work environment of ASDP.

Hukuman Disiplin Karyawan Internal Tahun 2025
Internal Employee Disciplinary Sanctions in 2025

No.	Tipe Sanksi *Classification of Sanctions*	Jumlah *Total*
1	Berat | Major	33
2	Sedang | Moderate	18
3	Ringan | Minor	7
4	Mendesak | Immediate Enforcement	1
	Total	**59**

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

ASDP telah menetapkan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor SK.504/HK.002/ASDP-2024 tanggal 06 Juni 2024. Pedoman tersebut menjadi acuan perilaku bagi seluruh insan Perseroan dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, serta menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja.

Standar Etika Perusahaan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi, kebutuhan organisasi, dinamika bisnis, serta kondisi lingkungan dan sosial. Apabila diperlukan, ASDP melakukan pemutakhiran terhadap standar etika tersebut agar tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* secara konsisten.

ASDP has established the Company's Code of Conduct based on the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. SK.504/HK.002/ASDP-2024 dated 06 June 2024. The Code serves as a behavioral guideline for all Company personnel in carrying out their duties, making decisions, interacting with stakeholders, and upholding integrity and professionalism in the workplace.

The Corporate Ethical Standards are evaluated periodically to ensure alignment with regulatory developments, organizational requirements, business dynamics, as well as environmental and social conditions. When necessary, ASDP updates the ethical standards to ensure they remain relevant, adaptive, and capable of consistently supporting the implementation of Good Corporate Governance.

NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

ASDP menerapkan nilai budaya perusahaan yang selaras dengan nilai utama atau *core values* AKHLAK BUMN, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN. Nilai AKHLAK terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh insan BUMN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan dan penciptaan nilai.

COMPANY VALUES

ASDP implements corporate cultural values aligned with the core values of SOEs' AKHLAK, as per the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 dated 1 July 2020 concerning the Core Values of SOE Human Resources. The AKHLAK values comprise *Amanah* (Trustworthy), *Kompeten* (Competent), *Harmonis* (Harmonious), *Loyal*, *Adaptif* (Adaptive), and *Kolaboratif* (Collaborative), which serve as behavioral guidelines for all SOE individuals in executing duties professionally, with integrity, and oriented toward service and value creation.

Sejalan dengan arahan tersebut, ASDP telah menyelaraskan nilai budaya I-ASDP dengan *core values* AKHLAK sebagai fondasi dalam membangun budaya kerja yang unggul, adaptif, dan kolaboratif. Perseroan juga memiliki motto "*We Bridge the Nation*" atau "Bangga Menyatukan Nusantara" yang mencerminkan peran strategis ASDP dalam menghubungkan wilayah kepulauan Indonesia serta menjadi landasan bagi seluruh insan Perseroan untuk bekerja keras, bekerja cerdas, menjaga komitmen pelayanan, dan menumbuhkan kebanggaan dalam melayani kepentingan pengguna jasa, masyarakat, serta Negara.

In line with this directive, ASDP aligned the I-ASDP cultural values with the AKHLAK core values as the foundation for building an excellent, adaptive, and collaborative work culture. The Company also adopts the motto "We Bridge the Nation" or "Bangga Menyatukan Nusantara," reflecting the strategic role of ASDP in connecting the archipelagic regions of Indonesia and serving as the foundation for all individuals in the Company to work hard, work smart, maintain service commitment, and foster pride in serving the interests of service users, the community, and the State.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode Etik Perusahaan disusun secara jelas dan komprehensif sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Insan ASDP dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, serta membangun hubungan kerja yang profesional dan berintegritas. Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan atau *Code of Conduct* memuat nilai, prinsip, standar perilaku, dan etika bisnis yang wajib dipatuhi dalam setiap aktivitas Perseroan.

Rincian muatan kode etik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is formulated comprehensively to serve as a behavioral guideline for all individuals at ASDP in executing duties, making decisions, and building professional working relationships with integrity. The Code of Conduct, as regulated within the Corporate Ethical Guidelines or Code of Conduct, encompasses values, principles, behavioral standards, and business ethics that must be complied with in every activity of the Company.

Details regarding the contents of the code of conduct can be observed in the table below:

Cakupan Muatan Kode Etik Perusahaan
Scope of the Company Code of Conduct

Cakupan Muatan *Scope*	Penjelasan *Description*	
Kepedulian terhadap kepentingan karyawan Commitment to Employee Interests	Aspek yang mengatur terkait perlindungan terhadap kepentingan karyawan yang mencakup: 1. Pengelolaan karyawan; 2. Pemberian kesempatan yang sama, kesetaraan, dan pedoman berperilaku saling menghargai di lingkungan perusahaan; 3. Keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.	Governance regulating the protection of employee interests, encompassing: 1. Employee management; 2. Provision of equal opportunities, equity, and mutual respect behavior guidelines within the corporate environment; 3. Occupational safety, health, and environment.
Etika dengan *Stakeholders* Ethics with Stakeholders	Aspek yang mengatur etika perusahaan dengan mitra usaha: 1. Etika perusahaan dengan Pemegang Saham; 2. Etika perusahaan dengan Kreditur/Investor; 3. Etika perusahaan dengan Pesaing; 4. Etika perusahaan dengan Pemasok; 5. Etika perusahaan dengan Regulator; 6. Etika perusahaan dengan Media Massa; 7. Etika perusahaan dalam menggunakan media sosial; 8. Kegiatan sosial dan kemitraan dengan masyarakat sekitar; 9. Benturan kepentingan; 10. Pengendalian gratifikasi; 11. Anti suap, anti kecurangan (*anti fraud*), dan anti korupsi; 12. Anti pencucian uang dan pendanaan terorisme; 13. Keterlibatan partai politik; 14. Pembayaran tidak wajar (imbalan), donasi, dan partisipasi politik; 15. Persamaan dan penghormatan pada HAM.	Governance regulating corporate ethics with business partners:: 1. Corporate ethics with Shareholders; 2. Corporate ethics with Creditors/Investors; 3. Corporate ethics with Competitors; 4. Corporate ethics with Suppliers; 5. Corporate ethics with Regulators; 6. Corporate ethics with Mass Media; 7. Corporate ethics in utilizing social media; 8. Social activities and partnerships with local communities; 9. Conflicts of interest; 10. Gratification control; 11. Anti-bribery, anti-fraud, and anti-corruption; 12. Anti-money laundering and terrorism financing Countermeasures; 13. Political party involvement; 14. Improper payments (gratuities), donations, and political participation; 15. Equality and respect for Human Rights.

Cakupan Muatan Kode Etik Perusahaan
Scope of the Company Code of Conduct

Cakupan Muatan *Scope*	Penjelasan *Description*	
Etika Perusahaan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan (Entitas) Corporate Ethics with Subsidiaries / Joint Ventures (Entities)	Perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya dengan membentuk anak perusahaan di antaranya melalui aksi korporasi (*merger* dan akuisisi) maupun bekerja sama membentuk perusahaan patungan.	The Company may expand its business by establishing subsidiaries, including through corporate actions (mergers and acquisitions) or collaborative joint venture formations.
Perlindungan Aset dan Informasi Asset and Information Protection	Aspek yang mengatur terkait perlindungan aset dan informasi perusahaan yang mencakup: 1. Integritas laporan keuangan; 2. Pengawasan dan perlindungan aset; 3. Perlindungan aset tidak berwujud (Hak Kekayaan Intelektual/HAKI); 4. Perlindungan informasi dan data perusahaan; 5. Penyimpanan dokumen; 6. Sistem teknologi informasi dan komunikasi.	Governance regulating the protection of corporate assets and information, encompassing: 1. Integrity of financial reports; 2. Oversight and protection of assets; 3. Protection of intangible assets (Intellectual Property Rights/IPR); 4. Protection of corporate information and data; 5. Document retention; 6. Information and communication technology systems.

BENTUK SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKANNYA

BENTUK SOSIALISASI KODE ETIK

ASDP memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan diterapkan sebagai pedoman perilaku dalam setiap aktivitas Perseroan. Untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan, sosialisasi kode etik dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh jenjang organisasi, mulai dari unit operasional hingga manajemen puncak, melalui kanal komunikasi internal, kegiatan pembekalan, serta media informasi di lingkungan kerja. Perseroan juga melakukan evaluasi atas efektivitas sosialisasi dan tingkat pemahaman karyawan terhadap Pedoman Etika Perusahaan, sehingga penerapan nilai etika, integritas, kepatuhan, dan profesionalisme dapat semakin tertanam dalam budaya kerja ASDP.

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

ASDP mendorong seluruh karyawan untuk berperan aktif dalam menjaga integritas dan kepatuhan dengan melaporkan setiap indikasi pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan. Pelaporan dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan yang telah disediakan, termasuk *Whistleblowing System* (WBS), untuk ditindaklanjuti secara objektif, independen, dan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan.

SOCIALIZATION AND ENFORCEMENT OF CODE OF CONDUCT

FORMS OF CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION

ASDP ensures that the Code of Conduct serves more than a formal document, but is implemented as a behavioral guideline across all activities of the Company. To reinforce understanding and compliance, its socialization is conducted continuously across all levels of the organization, from operational units to top management, through internal communication channels, briefings, and information media within the workplace. The Company also evaluates the effectiveness of socialization and the level of employee understanding regarding the Corporate Ethical Guidelines, ensuring that the application of ethical values, integrity, compliance, and professionalism is deeply embedded within the work culture of ASDP.

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT EFFORTS

ASDP encourages all employees to take an active role in maintaining integrity and compliance by reporting any indication of violations against the Corporate Ethical Standards. Reports can be submitted through the provided grievance mechanisms, including the Whistleblowing System (WBS), to be followed up objectively, independently, and in accordance with the prevailing regulations within the Company environment.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

ASDP menetapkan Kode Etik Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor SK.504/HK.002/ASDP-2024 tanggal 06 Juni 2024, yang menandai pemberlakuan Pedoman Etika Perusahaan bagi Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan yang memiliki hubungan kerja langsung dengan Perseroan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan standar etika, Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan ASDP secara berkala setiap tahun menyampaikan Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan.

COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT

ASDP established the Corporate Code of Conduct based on the Joint Decree of the Boards of Directors and Commissioners No. SK.504/HK.002/ASDP-2024 dated 06 June 2024, marking the implementation of the Corporate Ethical Guidelines for the Board of Directors, Commissioners, and all employees in direct employment relationships with the Company, both permanent and contract. As a form of commitment to the implementation of ethical standards, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees of ASDP periodically submit an annual Statement of Compliance with Corporate Ethical Standards.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

ASDP menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran Kode Etik Perusahaan, tanpa membedakan jabatan, fungsi, maupun kedudukan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Penetapan sanksi dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat materialitas, sifat pelanggaran, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta frekuensi terjadinya pelanggaran. Seluruh proses pemberian sanksi dilaksanakan dengan mengacu pada Kode Etik Perusahaan, Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANCTIONS FOR VIOLATING CODE OF CONDUCT

ASDP applies sanctions firmly and consistently against any violation of the Corporate Code of Conduct, without distinction regarding the position, function, or status of the party proven to have committed the violation. The determination of sanctions is conducted proportionally, taking into consideration the level of materiality, the nature of the violation, the degree of fault, the generated impact, and the frequency of the violation. The entire process of administering sanctions is executed with reference to the Corporate Code of Conduct, the Articles of Association, Company Regulations, and prevailing statutory provisions.

JUMLAH PELANGGARAN DAN SANKSI KODE ETIK

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang berdampak material terhadap kegiatan usaha, reputasi, maupun operasional ASDP.

NUMBER OF VIOLATIONS AND SANCTIONS OF THE CODE OF CONDUCT

Throughout 2025, no violations of the code of conduct occurred that exerted a material impact on the business activities, reputation, or operations.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA
POLICY ON LONG-TERM PERFORMANCE-BASED COMPENSATION

ASDP tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) maupun program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP, nilai realisasi, harga *exercise*, jangka waktu pelaksanaan, maupun persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak atas program tersebut.

ASDP does not maintain an Employee Stock Option Program (ESOP) or a Management Stock Option Program (MSOP). Consequently, no information is available regarding the No. of ESOP/MSOP shares, performance value, exercise price, execution period, or the eligibility requirements for employees and/or management under such programs.

KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*
POLICY ON INSIDER TRADING

ASDP bukan merupakan perusahaan terbuka, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan khusus terkait pencegahan *insider trading* maupun pengaturan perdagangan saham Perseroan oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, dan pihak internal lainnya. Dengan demikian, pengungkapan mengenai kebijakan dan mekanisme perdagangan saham sebagaimana berlaku bagi perusahaan terbuka tidak relevan untuk diterapkan di ASDP.

ASDP is not a publicly listed company, and therefore maintains no obligation to implement specific policies concerning the prevention of insider trading or the regulation of stock trading of the Company by the Board of Directors, the Board of Commissioners, employees, and other internal parties. Consequently, disclosures regarding stock trading policies and mechanisms as applicable to publicly listed companies are not relevant for implementation at ASDP.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA DALAM JANGKA PANJANG

POLICY ON DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS AND ITS LONG-TERM IMPLEMENTATION

Hingga akhir tahun 2025, ASDP bukan merupakan perusahaan terbuka dan tidak terdapat kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, ASDP tidak memiliki kebijakan mengenai kewajiban pengungkapan informasi kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perseroan. Namun demikian, sebagai bagian dari penerapan tata kelola, anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala setiap tahun menyampaikan Daftar Khusus terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

As of 2025, ASDP was not a publicly listed company and no shares of the Company were owned by members of the Boards of Directors or Commissioners. ASDP does not maintain a policy regarding the obligation to disclose information on stock ownership or changes in stock ownership of members of the Boards of Directors and Commissioners at the latest 3 business days after the change of the Company's stock ownership. Nevertheless, as part of governance implementation, members of the Boards of Directors and Commissioners periodically submit an annual Special Register on personal and family stock ownership in accordance with the provisions of the Articles of Association.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem pelaporan yang disediakan ASDP untuk mendorong peran aktif karyawan maupun pihak eksternal dalam menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perseroan. WBS menjadi bagian dari mekanisme penguatan tata kelola, integritas, dan kepatuhan, sekaligus sarana deteksi dini terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan standar etika, ketentuan hukum, maupun kebijakan internal Perseroan. Melalui penerapan WBS, ASDP berupaya membangun kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat upaya pencegahan korupsi, serta memberikan perlindungan terhadap Perseroan dan *stakeholders* dari praktik penyimpangan yang dapat merugikan reputasi maupun keberlanjutan usaha.

The Whistleblowing System (WBS) is a reporting system provided by ASDP to encourage the active role of employees and external parties in submitting grievances regarding alleged violations committed by individuals within the Company. The WBS serves as part of the mechanism to strengthen governance, integrity, and compliance, while acting as a means for early detection of actions inconsistent with ethical standards, legal provisions, or internal policies of the Company. Through the implementation of the WBS, ASDP endeavors to build stakeholder trust, strengthen corruption prevention efforts, and provide protection for the Company and stakeholders from deviant practices that could damage the reputation or business sustainability.

SOSIALISASI KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Dalam pelaksanaannya, *Whistleblowing System* (WBS) menjadi sarana bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal ASDP untuk menyampaikan laporan atas indikasi pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilandasi iktikad baik untuk menjaga kepentingan Perseroan. ASDP juga mendorong efektivitas penerapan WBS melalui sosialisasi kepada pemangku kepentingan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, antara lain situs web, media elektronik, media komunikasi visual, serta forum tatap muka seperti *Focus Group Discussion, Vendor Gathering,* dan *Customer Gathering*.

Pedoman WBS di lingkungan ASDP ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor SK.573/HK.002/ASDP-2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Perubahan SK.152/HK.002/ASDP-2021 tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pedoman tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan laporan, perlindungan pelapor, proses verifikasi, tindak lanjut pengaduan, serta penguatan budaya integritas dan kepatuhan di lingkungan Perseroan.

SOCIALIZATION OF WHISTLE-BLOWING SYSTEM POLICY

In its execution, the Whistleblowing System (WBS) serves as a means for internal and external stakeholders of ASDP to submit reports on indications of violations based on verifiable evidence and grounded in good faith to safeguard the interests of the Company. ASDP also drives the effectiveness of WBS implementation through socialization to stakeholders utilizing various communication media, including the website, electronic media, visual communication media, and face-to-face forums such as Focus Group Discussions, Vendor Gatherings, and Customer Gatherings.

The WBS Guidelines within ASDP are established through the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. SK.573/HK.002/ASDP-2025 dated 24 June 2025 concerning the Amendment to Decree No. SK.152/HK.002/ASDP-2021 on the Whistleblowing System of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). These Guidelines serve as a reference for report management, whistleblower protection, verification processes, follow-up of complaints, and the strengthening of a culture of integrity and compliance within the Company.

CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Setiap Insan ASDP maupun pihak eksternal, termasuk pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dapat menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan hukum, etika, kebijakan internal, maupun standar perilaku Perseroan. Dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) mencakup tindakan yang bersifat *fraud* maupun *non-fraud*, sepanjang disampaikan dengan iktikad baik dan didukung oleh informasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme penyampaian dan penanganan pelaporan pelanggaran di ASDP adalah sebagai berikut:

1. Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui sarana *Whistleblowing System* yang telah disediakan oleh Perseroan.

MANNER OF SUBMITTING VIOLATION REPORTS

Every individual at ASDP and external parties, including customers, suppliers, the public, and other stakeholders, may submit a report upon discovering indications of violations against legal provisions, ethics, internal policies, or behavioral standards of the Company. Alleged violations that can be reported through the Whistleblowing System (WBS) encompass both fraud and non-fraud actions categories, provided they are submitted in good faith and supported by verifiable information and evidence.

The mechanism for submitting and handling violation reports at ASDP is as follows:

1. Whistleblowers can submit a grievance through the Whistleblowing System facilities provided by the Company.

2. Pelapor diharapkan mencantumkan identitas yang jelas, meliputi nama, alamat rumah atau kantor, alamat *email*, serta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk kebutuhan komunikasi dan klarifikasi.
3. ASDP menerima laporan tanpa identitas atau *anonymous reporting*, dengan ketentuan pelapor menyampaikan data, bukti, atau dokumen pendukung yang memadai dan relevan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
4. Laporan anonim dapat tidak diproses lebih lanjut apabila dalam proses penanganan terdapat kendala komunikasi, kesulitan klarifikasi, atau dokumen pendukung yang disampaikan tidak memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Isi laporan wajib menjelaskan secara lengkap dugaan pelanggaran yang terjadi, pihak yang diduga sebagai pelaku atau terlapor, waktu dan tempat kejadian, kronologi peristiwa, serta bukti pendukung yang relevan.
6. Penerima laporan melalui surat resmi wajib memberikan tanda terima kepada pihak yang menyampaikan pengaduan sebagai bukti bahwa laporan telah diterima oleh Perseroan.
7. Apabila laporan disampaikan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen pendukung pelaporan, pelapor wajib melampirkan dokumen tambahan berupa fotokopi identitas pemangku kepentingan dan/atau perwakilannya, surat kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilan, serta dokumen legal yang menyatakan kewenangan perwakilan apabila berasal dari lembaga atau badan hukum.
8. Sekretariat Pelaporan Dugaan Pelanggaran bertugas menerima, meregistrasi, menelaah, dan meneruskan laporan sesuai jalur penanganan yang telah ditetapkan, termasuk terhadap laporan yang disampaikan secara anonim.
9. Apabila laporan diterima di luar jalur pelaporan yang ditentukan, penerima laporan wajib meneruskan laporan tersebut kepada jalur pelaporan resmi yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
10. ASDP menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan setiap laporan ditangani secara objektif, hati-hati, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Perseroan.

2. Whistleblowers are expected to include a clear identity, encompassing name, home or office address, email address, and a contact No. that can be reached for communication and clarification purposes.
3. ASDP accepts anonymous reporting, provided that the whistleblower submits adequate and relevant data, evidence, or supporting documents regarding the reported allegation of violation.
4. Anonymous reports may not be processed further if communication obstacles or clarification difficulties arise during the handling process, or if the submitted supporting documents are inadequate under the prevailing provisions.
5. The content of the report must fully explain the alleged violation, the party suspected as the perpetrator or reported party, the time and place of occurrence, the chronology of events, and relevant supporting evidence.
6. Recipients of reports submitted via official letter must provide a receipt to the party lodging the grievance as proof that the report has been received by the Company.
7. If the report is submitted by a stakeholder representative, the whistleblower must attach additional documents besides the supporting report documents, consisting of a photocopy of the identity of the stakeholder and/or their representative, a power of attorney from the stakeholder to the representative, and legal documents stating the authority of the representative if originating from an institution or legal entity.
8. The Secretariat for Whistleblower Reporting is tasked with receiving, registering, reviewing, and forwarding reports in accordance with the established handling channels, including reports submitted anonymously.
9. If a report is received outside the designated reporting channels, the recipient must forward the report to the official reporting channels established by the Company.
10. ASDP maintains the confidentiality of the identity of the whistleblower and ensures each report is handled objectively, carefully, and in accordance with the regulatory provisions prevailing within the Company environment.

SARANA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Sarana pelaporan dugaan pelanggaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

REPORTING CHANNEL FOR ALLEGED VIOLATIONS

The extensive channels for reporting suspected violations is detailed in the table below:

No.	Pihak yang Diduga Melakukan Pelanggaran *Party Suspected of Violation*	Tujuan/Penerima Laporan *Report Recipient*	Sarana Pelaporan *Reporting Facilities*	Informasi Tujuan *Information Purpose*
1	Karyawan, termasuk karyawan yang ditugaskan sebagai Sekretariat dan Tim Pengelola WBS I Employees, including employees assigned as Secretariat and WBS I Management Team	Direktur SDM dan Layanan Korporasi u.p. Sekretariat WBS I Director of HC & Corporate Services, Attn. WBS I Secretariat	*Email*	pelaporan.wbs.karyawan@indonesiaferry.co.id atau pelaporan.wbs.karyawan@asdp.id
			Surat resmi, diantar langsung atau melalui pos Official letters, delivered in person or by post	Direktur SDM dan Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) u.p. Sekretariat WBS I Director of HC & Corporate Services, Attn. WBS I Secretariat. Jalan Jendral Achmad Yani Kavling 52 A, Jakarta 10510
			Aplikasi | Apps WBS	*Website Whistleblowing System*
2	Organ Pendukung Dewan Komisaris ASDP, Dewan Komisaris Anak Perusahaan, dan Direksi Anak Perusahaan Supporting Organs of the ASDP BoC, Boc of Subsidiaries, and BoD of Subsidiaries	Ketua Komite Pemantau Risiko u.p. Sekretariat WBS II Chairman of the Risk Monitoring Committee, Attn. WBS II Secretariat	*Email*	pelaporan.wbs.topmanajemen@indonesiaferry.co.id atau pelaporan.wbs.topmanajemen@asdp.id
			Surat resmi, diantar langsung atau melalui pos Official letters, delivered in person or by post	Ketua Komite Pemantau Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) u.p. Sekretariat WBS II. | Chairman of the Risk Monitoring Committee PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Attn. WBS II Secretariat. Jalan Jendral Achmad Yani Kavling 52 A, Jakarta 10510
			Aplikasi | Apps WBS	*Website Whistleblowing System*
3	Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Company Board of Directors and Board of Commissioners	Tim Pengelola WBS Kementerian BUMN c.q. Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di Kementerian BUMN The WBS Management Team of the Ministry of SOEs c.q. Senior Management managing complaint handling at the Ministry of SOEs	Pelaporan kepada Tim Pengelola WBS Kementerian BUMN Reporting to the WBS Management Team of the Ministry of State-Owned Enterprises	Sesuai mekanisme pelaporan yang berlaku di Kementerian BUMN In accordance with the reporting mechanism in force at the Ministry of SOEs.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

ASDP memberikan perlindungan kepada pelapor sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mendukung penerapan *Whistleblowing System* (WBS) yang aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. Perlindungan tersebut diberikan untuk memastikan pelapor dapat menyampaikan dugaan pelanggaran dengan iktikad baik tanpa rasa takut terhadap ancaman, intimidasi, tekanan, atau tindakan pembalasan dari pihak mana pun.

Bentuk perlindungan terhadap pelapor mencakup:

1. Jaminan rasa aman dan perlindungan terhadap keselamatan pelapor dan keluarganya, termasuk perlindungan atas keamanan diri, harta benda, serta kepentingan pelapor sepanjang berkaitan dengan laporan yang disampaikan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor guna memberikan kepastian perlakuan yang adil dan mendorong keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk tindakan kecurangan atau *fraud*, korupsi, maupun pelanggaran lainnya.
3. Perlindungan identitas pelapor diberikan apabila pelapor menyampaikan identitas dan informasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan komunikasi, klarifikasi, maupun tindak lanjut laporan.
4. ASDP menjamin pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman, diskriminasi, atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun, sepanjang pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang dilaporkan dan menyampaikan laporan dengan iktikad baik.
5. Perlindungan juga berlaku bagi pihak yang terlibat dalam proses penelaahan awal, klarifikasi, investigasi, maupun pihak yang memberikan informasi terkait pengaduan.
6. Perlindungan terhadap pelapor dapat diperluas kepada anggota keluarga pelapor apabila diperlukan sesuai tingkat risiko dan kebutuhan penanganan laporan.
7. ASDP dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau pihak berwenang lainnya untuk memberikan perlindungan kepada pelapor, Tim Sekretariat, Tim Pengelola, Tim Investigasi, maupun pihak terkait lain dalam proses penanganan dugaan pelanggaran.
8. Perlindungan diberikan kepada pelapor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Menyampaikan laporan atas dasar kepedulian, iktikad baik, dorongan moral dan etika, serta tidak bertujuan memperoleh imbalan, keuntungan pribadi, atau popularitas;

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER

ASDP provides comprehensive protection to whistleblowers as part of the overarching commitment of the Company to supporting a safe, reliable, and responsible Whistleblowing System (WBS). This protection is provided to ensure whistleblowers can confidentially submit alleged violations in good faith without fear of facing threats, intimidation, pressure, or any form of retaliatory actions from any party.

Forms of protection for whistleblowers encompass:

1. Guarantees of security and protection for the safety of the whistleblower and their family, including protection over personal safety, property, and the interests of the whistleblower as long as they relate to the submitted report.
2. Guarantees of confidentiality regarding the identity of the whistleblower to provide certainty of fair treatment and encourage courage in reporting alleged violations, including fraudulent acts or fraud, corruption, or other violations.
3. Protection over the identity of the whistleblower is provided if the whistleblower submits their identity and information that can be utilized for communication, clarification, or report follow-up needs.
4. ASDP guarantees the whistleblower against all forms of threats, intimidation, punishment, discrimination, or unpleasant actions from any party, provided that the whistleblower maintains the confidentiality of the reported case and submits the report in good faith.
5. Protection also applies to parties involved in the initial review, clarification, and investigation processes, as well as parties providing information relating to the grievance.
6. Whistleblower protection can be extended to the family members of the whistleblower if necessary, in accordance with the risk level and report handling needs.
7. ASDP may cooperate with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) or other authorized parties to provide protection to the whistleblower, the Secretariat Team, the Management Team, the Investigation Team, or other related parties in the handling process of alleged violations.
8. Protection is given to whistleblowers who meet the following criteria:
   a. Submitting reports based on concern, good faith, moral and ethical drive, and not aimed at obtaining rewards, personal gain, or popularity;

b. Menolak berpartisipasi dalam aktivitas yang menurut penilaian pelapor dapat mengarah pada pelanggaran, meskipun aktivitas tersebut belum dimitigasi oleh Perseroan;
c. Tidak terbukti memiliki keterlibatan dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
d. Laporan yang disampaikan dapat dipercaya, didukung bukti, informasi, atau indikasi yang memadai, serta terbukti bukan merupakan laporan palsu dan/atau fitnah.

9. Apabila dalam proses investigasi pelapor terbukti turut terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, peraturan, atau ketentuan internal Perseroan, maka pelapor tetap dapat diproses sesuai ketentuan hukum dan/atau aturan yang berlaku.
10. Dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, ASDP mengedepankan prinsip kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah, objektivitas, dan profesionalisme.
11. Apabila identitas pelapor perlu diungkapkan untuk kepentingan investigasi atau pengambilan tindakan yang sesuai, Tim Pengelola WBS atau investigator wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pelapor.
12. Dalam hal identitas pelapor harus diungkapkan kepada pihak tertentu, pengungkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan yang sah, melalui permintaan tertulis, serta dengan persetujuan Direksi Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan identitas pelapor akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan.
14. Informasi mengenai tindak lanjut laporan dapat disampaikan kepada pelapor yang memiliki identitas lengkap, mencakup status penanganan, waktu, mekanisme tindak lanjut, serta unit atau pihak yang menangani laporan, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan.

Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti menyampaikan laporan palsu, fitnah, atau laporan yang dibuat dengan iktikad tidak baik. Pelapor yang melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal Perseroan.

b. Declining to participate in activities that, in the assessment of the whistleblower, could lead to violations, even though such activities have not been mitigated by the Company;
c. Demonstrating no proven involvement in the reported allegation of violation;
d. Submitting reports that are reliable, supported by adequate evidence, information, or indications, and proven not to be false and/or defamatory reports.

9. If during the investigation process the whistleblower is proven to be involved in actions that violate laws, regulations, or internal provisions of the Company, the whistleblower can still be processed in accordance with applicable legal provisions and/or regulations.
10. In following up on every grievance, ASDP prioritizes the principles of confidentiality, the presumption of innocence, objectivity, and professionalism.
11. If the identity of the whistleblower needs to be disclosed for the interest of investigation or taking appropriate action, the WBS Management Team or investigators must first obtain approval from the whistleblower.
12. In the event that the identity of the whistleblower must be disclosed to certain parties, disclosure can only be performed based on a legitimate need, through a written request, and with the approval of the Board of Directors of the Company in accordance with the prevailing provisions.
13. Parties violating the principle of whistleblower identity confidentiality will be subject to sanctions in accordance with the provisions prevailing within the Company environment.
14. Information regarding report follow-ups can be provided to whistleblowers who maintain a complete identity, encompassing handling status, timing, follow-up mechanisms, and the unit or party handling the report, while strictly respecting the principle of confidentiality.

Protection is not provided to whistleblowers proven to have submitted false, defamatory, or bad faith reports. Whistleblowers who make false and/or defamatory reports can be subject to sanctions in accordance with statutory regulations and internal Company regulations.

PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan pengaduan yang masuk akan melalui mekanisme di bawah ini:

HANDLING OF COMPLAINTS

The handling of incoming grievances will proceed through the mechanism detailed below:

Tahap Verifikasi | *Verification Phase*

Pada tahap ini, laporan yang diterima terlebih dahulu diperiksa kelengkapan administrasi, kejelasan substansi, serta kesesuaian bukti pendukung. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa laporan memenuhi persyaratan awal dan layak untuk diproses lebih lanjut.
During this phase, received reports undergo an initial examination regarding administrative completeness, substantive clarity, and the adequacy of supporting evidence. Verification is conducted to ensure that the report satisfies initial requirements and is eligible for further processing.

Tahap Investigasi | *Investigation Phase*

Apabila laporan dinyatakan memenuhi kriteria, Perseroan melanjutkan ke tahap investigasi guna menelaah fakta, mengumpulkan informasi tambahan, serta melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang objektif atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
If a report is determined to meet the criteria, the Company proceeds to the investigation phase to review facts, gather additional information, and perform clarifications with related parties. This phase aims to obtain an objective conclusion regarding the reported allegation of violation.

Tahap Penyelesaian | *Resolution Phase*

Berdasarkan hasil investigasi, Perseroan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan, termasuk rekomendasi perbaikan, penegakan disiplin, atau langkah hukum sesuai tingkat pelanggaran. Penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Based on the investigation results, the Company determines the necessary follow-up actions, including recommendations for improvement, disciplinary enforcement, or legal steps according to the severity of the violation. Resolution is carried out in accordance with internal provisions and applicable statutory regulations.

Komunikasi dengan Pelapor
Communication with the Whistleblower

Perseroan menjaga komunikasi dengan pelapor secara terbatas dan proporsional, terutama untuk menyampaikan status penanganan laporan sepanjang tidak mengganggu proses pemeriksaan. Pelaksanaan komunikasi ini tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan, perlindungan pelapor, dan asas praduga tidak bersalah.
The Company maintains limited and proportional communication with the whistleblower only to convey status of the report, provided it does not disrupt the examination process. The communication consistently prioritizes the principles of confidentiality, whistleblower protection, and the presumption of innocence.

Tahap Pemantauan Tindak Lanjut
Follow-Up Monitoring Phase

Setelah keputusan atau rekomendasi ditetapkan, Perseroan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut untuk memastikan perbaikan benar-benar dijalankan. Tahap ini penting untuk menjamin efektivitas penyelesaian kasus dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
After a decision or recommendation is established, the Company monitors the execution of the follow-up actions to ensure that improvements are genuinely implemented. This phase is essential to guarantee the effectiveness of case resolution and prevent the recurrence of similar violations.

Mekanisme WBS PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
WBS Mechanism of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

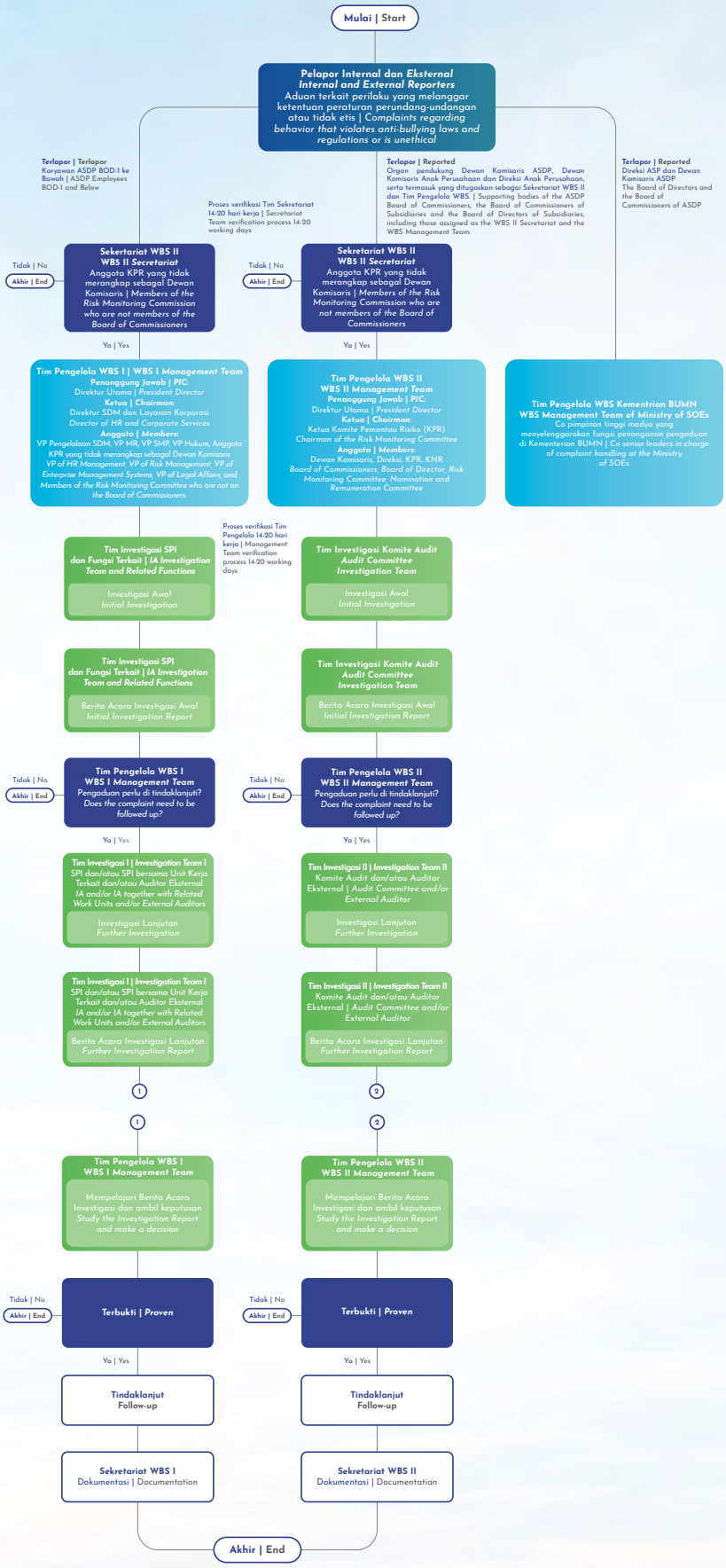

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Tim Pengelola Pelaporan Dugaan Pelanggaran atau Tim Pengelola WBS merupakan tim yang ditunjuk untuk menangani laporan dugaan pelanggaran di lingkungan ASDP. Tim ini terdiri dari personel dan pejabat yang memiliki kompetensi, kewenangan, serta independensi yang memadai sesuai dengan ruang lingkup penanganan laporan. Berdasarkan objek terlapor, Tim Pengelola WBS dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi, yaitu Tim Pengelola WBS I dan Tim Pengelola WBS II.

Tim Pengelola WBS I

Tim Pengelola WBS I menangani pelaporan dugaan pelanggaran dengan terduga pelaku karyawan, termasuk apabila pelaporan melibatkan karyawan yang ditugaskan sebagai Sekretariat dan Tim Pengelola WBS I. Susunan Tim Pengelola WBS I adalah sebagai berikut:

PARTIES MANAGING COMPLAINTS

The WBS Management Team is the designated team appointed to handle reports of alleged violations within the ASDP environment. The team consists of personnel and officers possessing adequate competence, authority, and independence in accordance with the scope of report handling. Based on the reported subject, the WBS Management Team is categorized into 2 classifications, namely WBS Management Team I and WBS Management Team II.

WBS Management Team I

WBS Management Team I handles reports of alleged violations where the suspected perpetrators are employees, including instances where the reporting involves employees assigned to the Secretariat and WBS Management Team I. The composition of WBS Management Team I is as follows:

Jabatan *Position*	Unsur *Element Position*
Penanggung Jawab | Person Responsible	Direktur Utama | President Director
Ketua | Chairman	Direktur SDM dan Layanan Korporasi | Director of HC & Corporate Services
Anggota | Member	*Vice President* Pengelolaan Sumber Daya Manusia | Vice President of HR Management
Anggota | Member	*Vice President* Sistem Manajemen Perusahaan | Vice President of Corporate Management System
Anggota | Member	*Vice President* Manajemen Risiko | Vice President of Risk Management
Anggota | Member	*Vice President* Hukum | Vice President of Legal Affairs
Anggota | Member	Anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak merangkap sebagai Dewan Komisaris | Members of the Risk Monitoring Committee who do not concurrently in the Board of Commissioners

Tim Pengelola WBS II

Tim Pengelola WBS II menangani pelaporan dugaan pelanggaran dengan terduga pelaku Organ Pendukung Dewan Komisaris ASDP, Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi Anak Perusahaan, termasuk pihak yang ditugaskan sebagai Sekretariat dan Tim Pengelola WBS II. Susunan Tim Pengelola WBS II adalah sebagai berikut:

WBS Management Team II

WBS Management Team II handles reports where the suspected perpetrators are the Supporting Organs of the Board of Commissioners of ASDP, the Board of Commissioners or Directors of Subsidiaries, including parties assigned to the Secretariat and WBS Management Team II. The composition of WBS Management Team II is as follows:

Jabatan *Position*	Unsur *Element Position*
Penanggung Jawab | Person Responsible	Komisaris Utama dan Direktur Utama | President Commissioner and President Director
Ketua | Chairman	Ketua Komite Pemantau Risiko | Chairman of the Risk Monitoring Committee
Anggota | Member	Dewan Komisaris | Board of Commissioners
Anggota | Member	Direksi | Board of Directors
Anggota | Member	Komite Pemantau Risiko | Risk Monitoring Committee
Anggota | Member	Komite Nominasi dan Remunerasi | Nomination and Remuneration Committee

HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN

Sepanjang tahun 2025, ASDP menerima dan menindaklanjuti pengaduan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kategori pelapor, terdapat pengaduan dari pihak eksternal Perusahaan dengan kategori laporan non-fraud dan pengaduan dari pihak internal Perusahaan dengan kategori laporan fraud. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan berstatus selesai.

RESULTS OF COMPLAINT HANDLING

Throughout 2025, ASDP received and followed up on grievances through the Whistleblowing System (WBS) mechanism in accordance with applicable provisions. Based on the whistleblower category, grievances were received from external parties of the Company under the non-fraud report category, and from internal parties of the Company under the fraud report category. All such grievances have been followed up and hold a resolved status.

No	Kategori Pelapor *WB Category*	Kategori Laporan Pelanggaran *Violation Category*	Tindak Lanjut Pengaduan *Report Follow-up*	Status Tindak Lanjut *Follow-up Status*
1.	Eksternal Perusahaan | External	*Non Fraud*	Ditindaklanjuti | Followed Up	Selesai | Resolved
2.	Internal Perusahaan | Internal	*Fraud*	Ditindaklanjuti | Followed Up	Selesai | Resolved

PROGRAM ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION PROGRAM

ASDP berkomitmen untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di seluruh lingkungan Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan anti korupsi, penguatan sistem pengendalian, serta sosialisasi kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pencegahan korupsi, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, dan praktik fraud. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan integritas dan tata kelola Perseroan dalam mendukung penciptaan nilai yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.

Sebagai landasan pelaksanaan, ASDP telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor KD.129/OP.404/ASDP-2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Selain itu, instrumen kebijakan anti korupsi juga dituangkan dalam Standar Etika Perusahaan dan diimplementasikan melalui kebijakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Melalui kebijakan tersebut, ASDP memastikan bahwa seluruh insan Perseroan memiliki pedoman yang jelas dalam menjaga integritas, kepatuhan, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas usaha.

ASDP is committed to preventing and eradicating corruption practices across the entire Company environment. This commitment is realized through the formulation of anti-corruption policies, strengthening control systems, and conducting socialization for employees to improve understanding and awareness regarding the prevention of corruption, bribery, gratification, conflicts of interest, and fraud practices. These efforts serve as part of reinforcing the integrity and governance of the Company to support the creation of a clean, transparent, and sustainable value.

As the basis for implementation, ASDP has established Board of Directors Decree No. KD.129/OP.404/ASDP-2021 dated 15 December 2021 on the Anti-Bribery Management System within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). In addition, anti-corruption policy instruments are also set out in the Company's Code of Conduct and implemented through the Guidelines for Managing Conflicts of Interest of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), as well as the Gratification Control Guidelines of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Through these policies, ASDP ensures that all Company personnel have clear guidance in upholding integrity, compliance, and professionalism in every business activity.

PROGRAM DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI

ASDP menerapkan program dan prosedur pencegahan korupsi, balas jasa atau *kickbacks, fraud*, suap, dan/atau gratifikasi secara terstruktur melalui penguatan kebijakan, sistem pengendalian, mekanisme pelaporan, serta penegakan disiplin di seluruh lingkungan Perseroan. Program tersebut mengacu pada kebijakan anti korupsi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Standar Etika Perusahaan, kebijakan pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, serta mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran. Melalui kebijakan tersebut, ASDP menegaskan larangan terhadap seluruh bentuk penyimpangan yang dapat merugikan Perseroan, pemangku kepentingan, maupun kepercayaan publik.

Dalam pelaksanaannya, prosedur pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan internalisasi nilai integritas kepada insan Perseroan, pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan internal, pelaporan dan pengendalian gratifikasi, pemenuhan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pihak yang diwajibkan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa, hubungan dengan mitra usaha, pelayanan kepada pengguna jasa, dan pengambilan keputusan bisnis. ASDP juga mendorong setiap insan Perseroan untuk menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran melalui kanal pelaporan resmi.

Setiap laporan atau indikasi pelanggaran terkait korupsi, *kickbacks, fraud*, suap, dan/atau gratifikasi ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, investigasi, penetapan rekomendasi, hingga pemantauan tindak lanjut. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, ASDP dapat mengenakan sanksi sesuai ketentuan internal dan/atau menempuh langkah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan program dan prosedur tersebut, ASDP berupaya memastikan seluruh aktivitas usaha dijalankan secara transparan, akuntabel, berintegritas, serta selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*.

ANTI-CORRUPTION PROGRAMS AND PROCEDURES

ASDP implements structured programs and procedures to prevent corruption, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification by strengthening policies, control systems, reporting mechanisms, and disciplinary enforcement across the entire Company environment. The program refers to anti-corruption policies, the Anti-Bribery Management System, Corporate Ethical Standards, gratification control policies, conflict of interest management, and the Whistleblowing System (WBS) mechanism as a means to report alleged violations. Through these policies, ASDP reinforces the prohibition against all forms of deviations that could harm the Company, stakeholders, or public trust.

In practice, prevention procedures are executed through the socialization and internalizations of integrity values for individuals in the Company, compliance monitoring against internal provisions, gratification reporting and control, fulfillment of LHKPN obligations for mandatory parties, and the application of prudent principles in procurement of goods and services, relationships with business partners, services to service users, and business decision-making. ASDP also encourages every individual in the Company to avoid situations with the potential to cause conflicts of interest and to report any indication of violations through official reporting channels.

Each report or indication of a violation relating to corruption, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification is followed up in accordance with applicable mechanisms, spanning report receipt, verification, investigation, recommendation formulation, and follow-up monitoring. If a violation is proven to have occurred, ASDP may impose sanctions in accordance with internal provisions and/or pursue legal steps based on prevailing statutory regulations. Through the implementation of these programs and procedures, ASDP endeavors to ensure all business activities are executed transparently, accountably, with integrity, and in alignment with the principles of Good Corporate Governance.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Hingga 31 Desember 2025, ASDP telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi sebagai bagian dari penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan budaya integritas di lingkungan Perseroan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman insan ASDP terhadap pencegahan korupsi, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan *fraud*, sekaligus memastikan seluruh aktivitas usaha dijalankan sesuai prinsip kepatuhan, transparansi, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Program pelatihan dan sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan ASDP antara lain mencakup:

1. Sosialisasi kebijakan anti penyuapan serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada insan Perseroan.
2. Sosialisasi dan internalisasi Standar Etika Perusahaan, termasuk ketentuan mengenai benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, anti suap, anti korupsi, dan anti *fraud*.
3. Peningkatan pemahaman terkait mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan yang aman, terpercaya, dan bertanggung jawab.
4. Pelaksanaan kegiatan *fraud awareness* untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran karyawan terhadap potensi kecurangan di lingkungan kerja.
5. Pemantauan dan evaluasi atas penerapan prinsip tata kelola, kepatuhan, dan integritas, termasuk kesesuaian dengan standar SMAP serta kebijakan internal Perseroan.

Melalui kegiatan tersebut, ASDP berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi secara berkelanjutan, membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas, serta meminimalkan risiko terjadinya praktik penyimpangan di seluruh lini organisasi.

ANTI-CORRUPTION TRAINING OR DISSEMINATION

As of 31 December 2025, ASDP conducted anti-corruption training and socialization as part of reinforcing the Anti-Bribery Management System (ABMS) and a culture of integrity within the Company environment. These activities improved the understanding of ASDP individuals on the prevention of corruption, bribery, gratification, conflicts of interest, and fraud, while ensuring all business activities are executed in accordance with compliance principles, transparency, and Good Corporate Governance.

The anti-corruption training and socialization programs conducted, among others, are:

1. Socialization of anti-bribery policies and the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS).
2. Socialization and internalization of Corporate Ethical Standards, including provisions on conflicts of interest, gratification control, anti-bribery, anti-corruption, and anti-fraud.
3. Improvement of understanding regarding the mechanism for reporting alleged violations through the Whistleblowing System (WBS) as a safe, reliable, and responsible reporting facility.
4. Execution of fraud awareness activities to increase employee vigilance and awareness regarding potential fraud within the work environment.
5. Monitoring and evaluation over the implementation of governance, compliance, and integrity principles, including alignment with ABMS standards and internal policies of the Company.

Through these activities, ASDP endeavors to strengthen the corruption prevention system on an ongoing basis, build a clean work culture with integrity, and minimize the risk of deviant practices across all organizational lines.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI
POLICY ON GRATIFICATION

ASDP berkomitmen memperkuat penerapan anti korupsi melalui pengendalian gratifikasi di seluruh lingkungan Perseroan. Pengendalian gratifikasi dilakukan untuk mencegah praktik pemberian dan/atau penerimaan hadiah, hiburan, fasilitas, atau bentuk gratifikasi lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, memengaruhi independensi pengambilan keputusan, serta berpotensi mengarah pada praktik suap, korupsi, atau pelanggaran etika. Sebagai landasan pelaksanaan, Direksi telah menetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: SK.862/HK.002/ASDP-2025 tanggal 3 September 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Seluruh insan ASDP dilarang menerima bingkisan, hadiah, hiburan, atau pemberian dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari mitra usaha, pemasok, pengguna jasa, maupun pihak ketiga lainnya apabila berkaitan dengan hubungan kedinasan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Pengendalian gratifikasi dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan, pelaporan mandiri atas penerimaan gratifikasi, pemantauan transaksi dan dokumen yang berpotensi mengandung unsur gratifikasi, penguatan kode etik kepada mitra bisnis, serta evaluasi dan pelaporan berkala kepada Direksi sebagai bentuk akuntabilitas.

Sepanjang tahun 2025, ASDP terus memperkuat pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi kebijakan kepada insan Perseroan dan pemangku kepentingan terkait, termasuk penyampaian ketentuan mengenai larangan penerimaan maupun pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan internal. Selama tahun 2025, ASDP tidak menerima laporan terkait gratifikasi. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga integritas, memperkuat budaya kepatuhan, serta mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* secara konsisten.

ASDP is committed to strengthening the implementation of anti-corruption practices through gratification control across the Company. Gratification control is carried out to prevent the giving and/or receiving of gifts, entertainment, facilities, or other forms of gratification that may create conflicts of interest, influence the independence of decision-making, and potentially lead to bribery, corruption, or ethical violations. As the basis for implementation, the Board of Directors has established a gratification control policy through the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.862/HK.002/ASDP-2025 dated 3 September 2025 on the Gratification Control Guidelines of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

All individuals at ASDP are prohibited from receiving parcels, gifts, entertainment, or provisions in any form, either directly or indirectly, from business partners, suppliers, service users, or other third parties if related to official duties and potentially causing conflicts of interest. Gratification control is executed through policy socialization, self-reporting of received gratification, monitoring of transactions and documents potentially containing gratification elements, reinforcement of the code of conduct to business partners, as well as periodic evaluations and reporting to the Board of Directors as a form of accountability.

Throughout 2025, ASDP continued to strengthen gratification control through policy socialization to individuals within the Company and related stakeholders, including the dissemination of provisions regarding the prohibition of receiving or giving gratification inconsistent with internal regulations. During 2025, ASDP received no reports relating to gratification. This reflects the commitment of the Company to maintaining integrity, reinforcing a culture of compliance, and consistently supporting the implementation of Good Corporate Governance.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

ASDP menerapkan pengelolaan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menjaga integritas, mencegah benturan kepentingan, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap insan ASDP wajib mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi, termasuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjamin kerahasiaan, objektivitas proses, serta hak pembelaan pihak yang dilaporkan.

MANAGEMENT OF GRATIFICATION CONTROL

ASDP implements gratification control management to maintain integrity, prevent conflicts of interest, and reinforce the implementation of good corporate governance. Every individual at ASDP must comply with gratification control provisions, including reporting alleged violations through the Whistleblowing System (WBS) mechanism to be followed up in accordance with applicable regulations, while consistently guaranteeing confidentiality, process objectivity, and the defense rights of the reported party.

PENERIMAAN GRATIFIKASI

Setiap insan ASDP dilarang menerima gratifikasi dari pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan jabatan, hubungan kedinasan, maupun aktivitas bisnis Perseroan. Larangan ini diterapkan untuk menjaga independensi, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal Perseroan.

RECEIPT OF GRATIFICATION

Every individual at ASDP is prohibited from receiving gratification from third parties, either directly or indirectly, relating to their position, official duties, or business activities of the Company. This prohibition is implemented to maintain independence, integrity, and compliance with statutory regulations as well as internal policies of the Company.

PEMBERIAN GRATIFIKASI

Seluruh insan ASDP dilarang memberikan gratifikasi kepada pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila pemberian tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas, menimbulkan benturan kepentingan, atau bertentangan dengan ketentuan Pedoman Gratifikasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam membangun hubungan bisnis yang sehat, wajar, dan bebas dari praktik penyimpangan.

GIVING GRATIFICATION

All individuals at ASDP are prohibited from giving gratification to third parties, either directly or indirectly, if such provisions have the potential to influence objectivity, cause a conflict of interest, or conflict with the provisions of the Gratification Guidelines. This policy serves as part of the endeavors of the Company to build healthy, fair business relationships that are free from deviant practices.

PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN

ASDP melarang setiap insan Perseroan memberikan gratifikasi kepada pihak ketiga atas permintaan dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik yang dapat merusak integritas, menimbulkan risiko hukum, serta melemahkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan.

FULFILLING GRATICATION UPON REQUEST

ASDP prohibits every individual in the Company from giving gratification to third parties upon requests in any form, either directly or indirectly. This prohibition aims to prevent practices that could damage integrity, generate legal risks, and weaken the implementation of good corporate governance within the Company environment.

PENGELOLAAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Setiap insan ASDP wajib melaporkan penolakan, penerimaan, maupun pemberian gratifikasi melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan Perseroan. Pengelolaan laporan dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan ASDP.

GRATUITY REPORTING MANAGEMENT

Every individual at ASDP must report the refusal, receipt, or giving of gratification through the reporting mechanism established by the Company. Report management is conducted to ensure transparency, accountability, traceability, and compliance with gratification control provisions within the ASDP environment.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

Hingga 31 Desember 2025, ASDP tidak menerima laporan terkait gratifikasi. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam memperkuat budaya integritas, menjaga kepatuhan terhadap kebijakan anti korupsi, serta mendorong penerapan pengendalian gratifikasi secara konsisten di seluruh lingkungan organisasi.

2025 GRATIFICATION REPORT

As of 31 December 2025, ASDP received no reports relating to gratification. This condition reflects the commitment of the Company to reinforcing a culture of integrity, maintaining compliance with anti-corruption policies, and driving the consistent implementation of gratification control throughout the organizational environment.

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGERA (LHKPN)
SUBMISSION OF STATE OFFICIALS WEALTH REPORT (LHKPN)

Pada tahun 2025, jumlah wajib lapor LHKPN di lingkungan ASDP Group tercatat sebanyak 316 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 303 orang telah menyampaikan laporan, sedangkan 13 orang belum menyampaikan laporan, sehingga tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 95,89%. Cakupan wajib lapor meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik periode sebelumnya maupun periode saat ini, Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan, serta pejabat struktural D-1 dan D-2.

In 2025, the number of LHKPN reporting obligors within ASDP Group was recorded at 316 individuals. Of this total, 303 individuals had submitted their reports, while 13 individuals had not, resulting in the LHKPN reporting compliance rate of 95.89%. The reporting obligors are the Company's Boards members of Commissioners and Directors, from the previous and current periods, members of the Boards of Commissioners and Directors of subsidiaries, as well as D-1 and D-2 structural officials.

Berdasarkan data pelaporan, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN. Adapun wajib lapor yang belum menyampaikan laporan berasal dari Dewan Komisaris anak perusahaan, pejabat D-1, dan pejabat D-2. ASDP terus mendorong peningkatan kepatuhan LHKPN melalui pemantauan, koordinasi, dan pengingat berkala sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam memperkuat integritas, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*.

Based on the reporting data, all members of the Boards of Commissioners and Directors had fulfilled their LHKPN reporting obligations. Meanwhile, the reporting obligors who had not yet submitted their reports were from the Board of Commissioners of subsidiaries, BoD-1 officials, and BoD-2 officials. ASDP continues to encourage improved LHKPN compliance through monitoring, coordination, and periodic reminders as part of the Company's commitment to strengthening integrity, transparency, accountability, and the implementation of Good Corporate Governance.

Jumlah Wajib Lapor LHKPN 2025
Number of LHKPN Reporting Obligors in 2025

Jabatan *Position*	**Jumlah Wajib Lapor** *Total Reporting Obligors*	**Jumlah Sudah Lapor** *Number of Reported Obligors*	**Jumlah Belum Lapor** *Number of Non-Reported Obligors*
Dewan Komisaris (periode sebelumnya) Board of Commissioners (previous period)	5	0	5
Dewan Komisaris (periode saat ini) Board of Commissioners (current period)	6	6	0
Direksi (periode sebelumnya) Board of Directors (previous period)	3	3	0
Direksi (periode saat ini) Board of Directors (current period)	6	6	0

Jumlah Wajib Lapor LHKPN 2025
Number of LHKPN Reporting Obligors in 2025

Jabatan *Position*	**Jumlah Wajib Lapor** *Total Reporting Obligors*	**Jumlah Sudah Lapor** *Number of Reported Obligors*	**Jumlah Belum Lapor** *Number of Non-Reported Obligors*
Dewan Komisaris PT Jembatan Nusantara (Anak Perusahaan) Board of Commissioners of PT Jembatan Nusantara (Subsidiary)	1	0	1
Dewan Komisaris PT Indonesia Ferry Property (Anak Perusahaan) Board of Commissioners of PT Indonesia Ferry Property (Subsidiary)	1	0	1
Direksi PT Jembatan Nusantara (Anak Perusahaan) Board of Directors of PT Jembatan Nusantara (Subsidiary)	3	3	0
Direksi PT Indonesia Ferry Property (Anak Perusahaan) Board of Directors of PT Indonesia Ferry Property (Subsidiary)	1	1	0
D-1 | BoD-1	79	77	2
D-2 | BoD-2	211	207	4
Jumlah | Total	**316**	**303**	**13**

TRANSPARANSI PRAKTEK *BAD GOVERNANCE*
TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

ASDP memahami bahwa praktik bad corporate governance dapat melemahkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta berdampak pada reputasi dan keberlanjutan usaha Perseroan. Oleh karena itu, ASDP berkomitmen untuk menghindari setiap kebijakan, tindakan, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

ASDP understands that bad corporate governance practices can significantly weaken the effectiveness of Good Corporate Governance (GCG) implementation, diminish stakeholder trust, and adversely impact the reputation and long-term business sustainability of the Company. Consequently, ASDP is firmly committed to avoiding any policy, action, or practice that conflicts with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Sepanjang tahun 2025, ASDP secara konsisten menjaga integritas tata kelola melalui penerapan kebijakan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, kode etik, sistem pelaporan pelanggaran, serta mekanisme pengawasan oleh organ Perseroan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, tidak terdapat praktik *bad governance* yang berdampak material terhadap kegiatan usaha, pelaporan, kepatuhan, maupun reputasi Perseroan. Informasi mengenai transparansi praktik *bad governance* disajikan dalam tabel berikut.

Throughout 2025, ASDP consistently maintained governance integrity by implementing policies, internal control systems, risk management, the code of conduct, the violation reporting system, and oversight mechanisms by corporate organs. Based on the monitoring conducted, no bad governance practices occurred that exerted a material impact on the business activities, reporting, compliance, or reputation of the Company. Information concerning transparency in bad governance practices is presented in the table below.

No.	Keterangan *Remarks*	Praktik *Practices*
1.	Terdapat laporan atas kegiatan Perseroan yang mencemari lingkungan. Reports regarding Company operations causing environmental pollution.	Tidak ada | None
2.	Terdapat perkara hukum terkait pencemaran lingkungan yang melibatkan Perseroan. Legal cases concerning environmental pollution involving the Company.	Tidak ada | None
3.	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Non-compliance found in the presentation of the Annual Report and Financial Statements against applicable regulations and Financial Accounting Standards (SAK).	Tidak ada | None
4.	Tidak menyampaikan kasus atau perkara hukum terkait buruh dan karyawan. Omission of legal cases or disputes concerning labor and employees.	Tidak ada | None
5.	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi. Omission of operating segment reviews.	Tidak ada | None
6.	Ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan versi cetak dan versi digital yang disampaikan melalui situs web Perseroan. Nonconformity between the printed and digital versions of the Annual Report published on the Company's website.	Tidak ada | None
7.	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan, entitas anak, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku. Omission of material legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners serving during the Financial Year.	Tidak ada | None

PENGUNGKAPAN TERKAIT PENERAPAN ATAS PEDOMAN GOVERNANSI PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN *"COMPLY OR EXPLAIN"* ATAU *"APPLY OR EXPLAIN"*

DISCLOSURE ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES USING THE "COMPLY OR EXPLAIN" OR "APPLY OR EXPLAIN" APPROACH

ASDP menerapkan pengungkapan tata kelola perusahaan dengan pendekatan comply or explain atau apply or explain sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*. Melalui pendekatan tersebut, ASDP mengungkapkan tingkat kepatuhan dan penerapan atas pedoman governansi yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan BUMN, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, maupun kebijakan internal Perseroan.

Dalam hal ketentuan atau prinsip governansi telah dipenuhi, ASDP menyampaikan penerapannya secara jelas dan terukur. Apabila terdapat ketentuan atau prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan, Perseroan memberikan penjelasan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk alasan yang melatarbelakangi serta rencana tindak lanjut untuk penguatan penerapan tata kelola. Pendekatan ini memastikan bahwa implementasi governansi ASDP tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada efektivitas, substansi, dan keberlanjutan praktik tata kelola.

ASDP implements corporate governance disclosure using a comply-or-explain or apply-or-explain approach as a form of the commitment of the Company to transparency, accountability, and reinforcing the implementation of Good Corporate Governance. Through this approach, ASDP discloses the level of compliance and implementation regarding applicable governance guidelines, whether sourced from statutory regulations, SOE policies, the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, or internal policies of the Company.

In fulfilling the governance provisions or principles, ASDP conveys their implementation clearly and measurably. If certain provisions or principles have not been fully implemented, the Company provides an objective and accountable explanation, including the underlying reasons and the follow-up plans to strengthen governance implementation. This approach ensures that the governance implementation of ASDP is oriented not only toward formal compliance, but also toward the effectiveness, substance, and sustainability of governance practices.

PERNYATAAN MENGENAI REKOMENDASI

Sepanjang tahun 2025, ASDP telah menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, komite di bawah Dewan Komisaris, auditor internal, auditor eksternal, serta hasil evaluasi dan pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup kewenangan masing-masing. Pelaksanaan rekomendasi dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan proses bisnis Perseroan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

STATEMENT REGARDING RECOMMENDATIONS

Throughout 2025, ASDP followed up on and executed recommendations provided by the Board of Commissioners, committees under the Board of Commissioners, internal auditors, external auditors, and the results of other evaluations and oversight in accordance with their respective authority. The recommendations was executed in a planned manner and integrated with the business processes of the Company as part of continuous improvement efforts in implementing good corporate governance.

BUKTI DAN/ATAU PENERAPAN REKOMENDASI

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan rekomendasi, ASDP menyusun dan melaksanakan rencana aksi atau *action plan* yang memuat langkah perbaikan, unit penanggung jawab, target penyelesaian, serta mekanisme pemantauan. Tindak lanjut rekomendasi dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan, perbaikan proses bisnis, serta penguatan koordinasi antarunit kerja. Pelaksanaan rekomendasi tersebut dipantau secara berkala oleh manajemen dan fungsi terkait, termasuk melalui forum evaluasi internal, laporan kemajuan, serta pemantauan oleh Satuan Pengawasan Internal dan komite di bawah Dewan Komisaris.

EVIDENCE AND/OR IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS

As a form of accountability for the execution of recommendations, ASDP formulates and implements action plans outlining corrective steps, responsible units, completion targets, and monitoring mechanisms. The follow-up on recommendations was conducted through refining policies and procedures, strengthening internal control systems, improving reporting quality, enhancing business processes, and reinforcing coordination between work units. The execution of these recommendations was monitored periodically by management and related functions, including through internal evaluation forums, progress reports, and monitoring by the Internal Audit Unit and committees under the Board of Commissioners.

PENJELASAN ATAS REKOMENDASI YANG BELUM DILAKSANAKAN

Sepanjang tahun 2025, ASDP berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diterima sesuai dengan kewenangan, prioritas, dan tingkat urgensinya. Dalam hal terdapat rekomendasi yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan pada tahun berjalan, hal tersebut umumnya disebabkan oleh kebutuhan penyelarasan kebijakan, penyesuaian proses bisnis, koordinasi lintas unit, atau pemenuhan dokumen pendukung. Atas kondisi tersebut, ASDP tetap melakukan pemantauan dan menetapkan langkah tindak lanjut agar rekomendasi dapat diselesaikan secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penguatan tata kelola Perseroan.

EXPLANATION FOR UNIMPLEMENTED RECOMMENDATIONS

Throughout 2025, ASDP endeavored to follow up on all received recommendations in accordance with their authority, priority, and level of urgency. In the event that certain recommendations could not be fully resolved during the current year, it was generally due to the need for policy alignment, business process adjustments, cross-unit coordination, or the fulfillment of supporting documents. Under these conditions, ASDP continues to monitor and establish follow-up steps so that recommendations can be resolved gradually, measurably, and in accordance with the requirements for strengthening the governance of the Company.

6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

ASDP berkomitmen menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perseroan. Pelaksanaan TJSL mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pada tahun 2025, ASDP merealisasikan Program TJSL sebesar Rp10,18 miliar yang diarahkan pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Program tersebut mencakup dukungan pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan UMKM, pelestarian lingkungan, serta kegiatan sosial di wilayah operasional Perseroan. Pelaksanaan TJSL juga diselaraskan dengan tujuh core subjects ISO 26000, yaitu:

1. Praktik ketenagakerjaan;
2. Isu pelanggan;
3. Hak asasi manusia (HAM);
4. Praktik operasi yang adil;
5. Lingkungan;
6. Pelibatan dan pengembangan komunitas;
7. Tata kelola keberlanjutan.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, informasi mengenai pelaksanaan TJSL selama periode pelaporan disajikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2025. Melalui pengungkapan tersebut, ASDP menegaskan komitmen untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada kinerja ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

ASDP is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) through the implementation of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program as part of the Company's sustainability strategy. The implementation of TJSL refers to Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, Law No. 1 of 2025 on the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

In 2025, ASDP realized TJSL Program funds amounting to Rp10.18 billion, which were directed toward the social, economic, environmental, as well as legal and governance pillars. The programs covered support for education, community and MSME empowerment, environmental preservation, and social activities within the Company's operational areas. The implementation of TJSL was also aligned with the seven core subjects of ISO 26000, namely:

1. Labor practices;
2. Consumer issues;
3. Human rights;
4. Fair operating practices;
5. The environment;
6. Community involvement and development;
7. Sustainability governance.

As a form of transparency and accountability, information on the implementation of TJSL during the reporting period is presented in the Company's 2025 Annual Report and Sustainability Report. Through this disclosure, ASDP reaffirms its commitment to conducting business activities that are not only oriented toward economic performance, but also provide positive contributions to society, the environment, and stakeholders in a sustainable manner.

REFERENSI SILANG SEOJK NO. 16 /SEOJK.04/2021: BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

CROSS-REFERENCE OF OJK CIRCULAR LETTER NO. 16/SEOJK.04/2021: FORMAT AND CONTENT OF THE ANNUAL REPORT OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021		Halaman Page
ISI LAPORAN TAHUNAN | ANNUAL REPORT CONTENT		
1	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Audited annual financial statements.	518-631
2	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. Statement letter from the Board of Directors and the Board of Commissioners members regarding responsibility for the Annual Report.	76-77
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | SUMMARY OF KEY FINANCIAL DATA		
	Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial information presented in comparative form for 3 (three) fiscal years or since the commencement of operations if the Company has been in operation for less than 3 (three) years.	
1	Pendapatan/penjualan | Revenue/sales;	25-26
2	Laba bruto | Gross profit.	25-26
3	Laba (rugi) | Profit (loss).	25-26
4	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali Total profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests;	25-26
5	Total laba (rugi) komprehensif | Total comprehensive profit (loss).	25-26
6	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent and non- controlling interests.	25-26
7	Laba (rugi) per saham | Profit (loss) per share.	25-26
8	Jumlah aset | Total assets;	22-24
9	Jumlah liabilitas | Total liabilities.	22-24
10	Jumlah ekuitas | Total equities.	22-24
11	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset | Profit (loss) ratio to total assets.	31
12	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas | Profit (loss) ratio to equity.	31
13	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan | Profit (loss) ratio to revenue/sales.	31
14	Rasio lancar | Current ratio.	31
15	Rasio liabilitas terhadap ekuitas | Liabilities to equity ratio.	31
16	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset | The ratio of liabilities to total assets.	31
17	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya. Other relevant financial information and ratios related to the Company and its industry type.	31

INDEKS SE OJK NO.016/2021 *INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021*		Halaman Page
INFORMASI SAHAM (JIKA ADA) | STOCK INFORMATION (IF ANY)		
1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Shares issued for each quarter presented in comparative form for the last 2 (two) fiscal years. a) Jumlah saham yang beredar | Number of outstanding shares a) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan | Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan | Highest, lowest, and closing share prices based on the price on the stock exchange where the shares are listed d) Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan | Trading volume on the stock exchange where the shares are listed	33
2	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal. In case of corporate actions causing changes in shares, such as stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, changes in nominal share value, issuance of conversion securities, as well as increase and decrease of capital. a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi | Date of implementation of corporate actions b) Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham | Ratios of stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, number of conversion securities issued, and changes in nominal share value c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi | Number of outstanding shares before and after corporate actions d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada) | Number of conversion securities executed (if any) e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi | Share prices before and after corporate actions	35
3	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* tersebut. In case of temporary suspension of stock trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, reasons for the temporary suspension of stock trading (suspension) and/or delisting of shares are explained.	35
4	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan/atau proses pembatalan pencatatan saham *(delisting)* masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham *(delisting)* tersebut. In case temporary suspension of stock trading as referred to in point 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, actions taken to resolve the temporary suspension of stock trading and/or delisting of shares are explained.	35
LAPORAN DIREKSI | BOARD OF DIRECTORS' REPORT		
1	Kinerja Perusahaan | Company Performance	
	a) Strategi dan kebijakan strategis Perusahaan | Company's strategic strategies and policies	63-64
	b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan | Role of the Board of Directors in formulating the Company's strategies and policies	64-65
	c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi | Processes carried out by the Board of Directors to ensure strategy implementation	65
	d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perusahaan | Comparison between achieved results and Company's targets	65-67
	e) Kendala yang dihadapi | Challenges faced	67-68
2	Gambaran tentang prospek usaha Perusahaan | Overview of Company's business prospects	68-69
3	Penerapan governansi Perusahaan | Implementation of corporate governance	69-70
LAPORAN DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT		
1	Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan | Assessment of the directors' performance regarding Company management, including the Board of Commissioners' supervision in formulating and implementing the Company's strategies	50-52
2	Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yg disusun oleh Direksi | Views on the Company's business prospects prepared by the Board of Directors	54
3	Pandangan atas penerapan governansi Perusahaan | Views on the implementation of corporate governance	55-56

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021		Halaman Page
PROFIL PERUSAHAAN | COMPANY PROFILE		
1	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of the Issuer or Public Company contains, at the minimum, information of: Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; The name of the Issuer or Public Company, including if there was any change of name, the reason for the change, and effective date of the name change during the fiscal year;	80-87
2	Akses terhadap Perusahaan termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perusahaan Access to the Company including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about the Company a) Alamat | Address b) Nomor telepon | Phone number c) Alamat surat elektronik | Email address d) Alamat situs web | Website address	95-100
3	Riwayat singkat Perusahaan | Brief history of the Company	82-83
4	Visi dan misi Perusahaan serta budaya Perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai Perusahaan; Company's vision and mission and corporate culture or values;	88
5	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan Business activities according to the latest articles of association, business activities conducted in the fiscal year, and types of goods and/or services produced	92-94
6	Wilayah operasional Perusahaan; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional Perusahaan. Company's operational area; the operational area is the area or region of operational activities or the scope of the Company's operational activities.	95-100
7	Struktur organisasi Perusahaan dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. Company's organizational structure in chart form, at least up to 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.	102-103
8	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. List of membership in industry associations both nationally and internationally related to sustainable financial practices.	101
9	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/ contract) in the fiscal year; Information disclosure can be presented in tabular form.	126-129
10	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi: Information on the use of public accountants' services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/ associations/alliances include: a) Nama dan alamat | Name and address b) Periode penugasan | Assignment period c) Informasi jasa audit yang diberikan; | Information on audit services provided; d) Biaya jasa (*fee*) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan | Audit service fees for each assignment given during the fiscal year; and e) Informasi jasa non audit yang diberikan; | Information on non-audit services provided; d) Biaya jasa (*fee*) non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan | Non-audit service fees for each assignment given during the fiscal year; and d) Catatan: dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut | Note: in the event that AP and KAP and their networks/ associations/alliances appointed do not provide non-audit services, then information regarding this is disclosed	135
11	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP Name and address of market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP	136

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021		Halaman Page
PROFIL DIREKSI | BOARD OF DIRECTORS PROFILE		
1	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab | Name and position corresponding to duties and responsibilities	111-118
2	Usia | Age	111-118
3	Kewarganegaraan | Nationality	111-118
4	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi | Educational background and/or certification	111-118
5	Riwayat jabatan, meliputi informasi | Job history, including information on: a) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan | Legal basis of appointment as a member of the Board of Directors in the respective Company b) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan | Concurrent positions, whether as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member, as well as other positions both within and outside the Company. c) Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.5.b) | Note: In case a Board member does not hold concurrent positions, this should be disclosed (under point A.1.7.5.b) d) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan | Work experience along with periods both within and outside the Company.	111-118
6	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Affiliation with other Board members, Board of Commissioners members, major shareholders, and controllers, whether direct or indirect, up to individual owners, including the names of affiliated parties.	111-118
7	Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.7.6) Note: In case a Board member has no affiliation, the Company discloses this information (under point A.1.7.6)	111-118
8	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi yang terakhir dan sebelumnya Changes in the composition of the Board members and reasons for the changes. In the event of changes in the composition of the Board occurring after the end of the fiscal year until the deadline for submitting the Annual Report, the composition stated in the Annual Report is the latest and previous composition.	118
9	Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.8) In case there are no changes in the composition of the Board members, this information is disclosed (under point A.1.7.8)	N/A
PROFIL DEWAN KOMISARIS | BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE		
1	Nama dan jabatan | Name and position	104-110
2	Usia | Age	104-110
3	Kewarganegaraan | Nationality	104-110
4	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi | Educational background and/or certification	104-110
5	Riwayat jabatan, meliputi informasi | Job history, including information on: a) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris | Legal basis of appointment as a member of the Board of Commissioners b) Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Perusahaan yang bersangkutan | Legal basis of the initial appointment as an independent commissioner in the respective Company c) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan | Concurrent positions, whether as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, as well as other positions both within and outside the Company d) Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.5.c) | Note: In the event that members of the Board of Commissioners do not hold concurrent positions, the Company discloses this information (under point A.1.8.5.c) a) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan | Work experience along with periods both within and outside the Company.	104-110

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021		Halaman Page
6	a) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Pemegang Saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; | Affiliation with other Board of Commissioners members, major shareholders, and controllers, whether direct or indirect, up to individual owners, including the names of affiliated parties. b) Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.8.6) | Note: In the event that members of the Board of Commissioners do not have any affiliation, the Company discloses this information (under point A.1.8.6).	104-110
7	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode | Statement of independence of independent commissioners if they have served for more than 2 (two) terms.	N/A
8	a) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya. Changes in the composition of the Board of Commissioners and reasons for the changes. In the event of changes in the composition of the Board of Commissioners occurring after the end of the fiscal year until the deadline for submitting the Annual Report, the composition stated in the Annual Report is the latest and previous composition. b) Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.8.a) In case there are no changes in the composition of the Board of Commissioners, this information is disclosed (under point A.1.8.8.a).	110
INFORMASI PEMEGANG SAHAM | SHAREHOLDER INFORMATION		
1	Nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Name of shareholders and ownership percentage at the beginning and end of the fiscal year, consisting of information regarding: c) Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan | Name and position corresponding to duties and responsibilities d) 1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan. | Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in the Company. e) Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut | In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, this shall be disclosed. c) Kelompok Pemegang Saham masyarakat, yaitu kelompok Pemegang Saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik | Shareholder groups from the public, which are groups of shareholders, each holding less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company.	130-131
2	a) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; The percentage of indirect ownership of the Company's shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information regarding shareholders listed in the shareholder register for the purpose of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; b) Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the Company's shares, this shall be disclosed.	130-131
3	Klasifikasi kepemilikan yang dimiliki Perusahaan: | Ownership classification held by the Company: a) Kepemilikan institusi lokal | Local institutional ownership b) Kepemilikan institusi asing | Foreign institutional ownership c) Kepemilikan individu lokal | Local individual ownership d) Kepemilikan individu asing | Foreign individual ownership	131-132
4	Informasi mengenai Pemegang Saham utama dan pengendali Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Information on major shareholders and controllers of the Company, both direct and indirect, up to individual owners.	130-131

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021		Halaman Page
5	Nama entitas anak, Perusahaan asosiasi, Perusahaan ventura bersama dimana Perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, Perusahaan asosiasi, Perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. Name of subsidiary entities, associated companies, joint venture companies in which the Company has joint control over entities (if any), along with the percentage of share ownership, business field, total assets, and operational status of subsidiary entities, associated companies, joint venture companies. For subsidiary entities, additional information about the address of such subsidiary entities is provided.	133-134
6	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada). Chronology of stock listing, number of shares, nominal value, and offer price from the beginning of the listing until the end of the fiscal year, as well as the name of the stock exchange where the Issuer's or Public Company's shares are listed, including stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, and changes in nominal stock value, execution of conversion effects, execution of capital increases and decreases (if any).	134
7	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud sebelumnya, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada) Information on other securities listings besides securities as mentioned earlier, which have not matured during the fiscal year, at least containing the name of the securities, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any).	134
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN | MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION		
1	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Perusahaan paling sedikit mengenai: Review of operations by business segment according to the Company's industry type, at least regarding:	
	a) Produksi, yg meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya | Production, including processes, capacity, and development	156-168
	b) Pendapatan/penjualan | Revenue/sales	168-169
	c) Profitabilitas | Profitability	168-169
2	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, Comprehensive financial performance including comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, explanation of the reasons for changes and the impact of these changes,	
	a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total asset | Current assets, non-current assets, and total assets	170-177
	b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas | Current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities	177
	c) Ekuitas | Equity	178
	d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi), komprehensif; dan | *Revenue/sales*, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total profit (loss), comprehensive; and	178-182
	e) Arus kas | Cash flows	182-185
3	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan The ability to pay debts or obligations by presenting relevant ratio calculations	185-187
4	Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan | The collectability level of the Company's receivables by presenting relevant ratio calculations.	188
5	Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud. Capital structure and management policies regarding capital structure along with the basis for determining such policies.	189-190
6	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan Discussion of material commitments for capital investment with explanations	
	a) Tujuan dari ikatan tersebut | The objectives of such commitments	191-202
	b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut | Expected sources of funds to fulfill such commitments	202
	c) Mata uang yang menjadi denominasi | The currency denomination	203
	d) Langkah yang direncanakan | Planned steps for Changes to protect against risks from related foreign currency positions	203
7	Bahasan mengenai investasi barang modal yang yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir: Discussion of capital investment realized during the last fiscal year:	
	a) Jenis investasi barang modal | Types of capital investment	203-204
	b) Tujuan investasi barang modal | Objectives of capital investment	203-204
	c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan | Value of capital investment expended	203-204

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021		Halaman Page
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); | Material information and facts occurring after the accountant's report date (if any);	205
9	Prospek usaha dari Perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya | Business prospects of the Company associated with industry conditions, general economy, and international markets accompanied by quantitative supporting data from reliable sources.	149-156
10	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) Comparison between targets/projections at the beginning of the fiscal year with the achieved results (realization)	
	a) Pendapatan/penjualan | Revenue/sales	213-214
	b) Laba (rugi) | Profit (loss)	213-214
	c) Struktur modal (capital structure) | Capital structure	215
	d) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan	216
11	Target/proyeksi yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang, Targets/projections that the Company aims to achieve for the next 1 (one) year,	
	a) Pendapatan/penjualan | Revenue/sales	219-220
	b) Laba (rugi) | Profit (loss)	219-220
	c) Struktur modal (capital structure) | Capital structure	220
	d) Kebijakan dividen | Dividend policy	221
	e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan | Other matters deemed important to the Company	221
12	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Perusahaan, paling sedikit mengenai Strategi pemasaran dan Pangsa pasar. Marketing aspects of the Company's goods and/or services, at least regarding Marketing strategy and Market share.	155-156
13	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir | Description of dividends for the last 2 (two) fiscal years	
	a) Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; | Dividend policy, including information on the percentage of dividends distributed to net income;	222-223
	b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; | Cash dividend payment date and/or non-cash dividend distribution date;	222-223
	c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan | Dividend amount per share (cash and/or noncash); and	222-223
	d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar; | Annual dividend amount paid; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in table form. In the event that the Issuer or Public Company has not distributed dividends in the last 2 (two) years, this shall be disclosed.	222-223
14	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan | Realization of the use of proceeds from public offerings, with the provision	
	a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. In the event that during the fiscal year, the Issuer is obligated to submit a report on the realization of the use of funds, the cumulative realization of the use of proceeds from public offerings until the end of the fiscal year is disclosed.	223
	b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut. In the event of changes in the use of funds as stipulated in the Financial Services Authority regulations regarding reports on the realization of the use of proceeds from public offerings, the Issuer explains such changes.	223
15	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku Material information (if any), including investments, expansions, divestments, business mergers/mergers, acquisitions, debt/capital restructuring, material transactions, affiliate transactions, and conflicts of interest transactions, occurring in the fiscal year	
	a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi | Date, value, and object of the transaction	224-233
	b) Nama pihak yang melakukan transaksi; | Name of the party conducting the transaction;	224-233
	c) Sifat hubungan afiliasi (jika ada); | Nature of affiliate relationships (if any);	224-233
	d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; | Explanation of the fairness of the transaction;	224-233
	e) Pemenuhan ketentuan terkait; dan | Compliance with related provisions; and	224-233

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021	Halaman Page
f) Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Perusahaan juga mengungkapkan informasi: In the event of affiliate relationships, in addition to disclosing information as referred to in letters a) through e), the Company also discloses information:	224-233
f1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Statement of the Board of Directors that affiliate transactions have undergone adequate procedures to ensure that affiliate transactions are conducted in accordance with generally accepted business practices, including compliance with the arm's-length principle	224-233
f2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). The role of the Board of Commissioners and the audit committee in conducting adequate procedures to ensure that affiliate transactions are conducted in accordance with generally accepted business practices, including compliance with the arm's-length principle.	224-233
g) Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. For affiliate transactions or material transactions that are business activities carried out to generate business income and carried out on a regular, recurring, and/or sustainable basis, an explanation is added that such affiliate transactions or material transactions are business activities carried out to generate business income and carried out on a regular, recurring, and/or sustainable basis. In the event that the intended affiliate transactions or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, additional information is provided regarding the reference to disclosure in the annual financial statements.	224-233
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui Pemegang Saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut. For the disclosure of affiliate transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the execution of affiliate transactions and/or conflict of interest transactions approved by independent shareholders, information regarding the date of the General Meeting of Shareholders approving the transaction is added.	224-233
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that there are no affiliate transactions and/or conflict of interest transactions, this shall be disclosed.	224-233
16 Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada) Changes in statutory regulations that significantly affect the Company and their impact on the financial statements (if any).	234-241
17 Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada) Changes in accounting policies, reasons, and impacts on the financial statements (if any).	250-251
TATA KELOLA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK **CORPORATE GOVERNANCE OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES**	
1 RUPS, paling sedikit memuat: | Annual General Meeting (RUPS), at least includes: a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku | Information regarding AGM decisions for the current fiscal year and the preceding fiscal year: 1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku | AGM decisions for the current fiscal year and the preceding fiscal year that were implemented during the fiscal year. 2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan | AGM decisions for the current fiscal year and the preceding fiscal year that have not been implemented along with the reasons for not being implemented.	292-306
b) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; | In the event that the Issuer or Public Company utilizes independent parties in conducting the AGM for vote calculation, such information shall be disclosed.	N/A

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021	Halaman Page
2 Direksi, paling sedikit memuat | Board of Directors, at least includes a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. | Duties and responsibilities of each Board member; Information regarding the duties and responsibilities of each Board member is outlined and may be presented in tabular form.	338-341
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi. | Statement that the Board has a charter or director's charter.	337
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan dalam RUPS (dapat disajikan dalam bentuk tabel). | Policy and implementation of the frequency of Board meetings, joint Board meetings with the Board of Commissioners, and the attendance level of Board members at such meetings, including attendance at AGMs; Information on the attendance level of the Board in Board meetings, joint Board meetings with the Board of Commissioners, and AGMs (may be presented in tabular form).	348-351
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi | Training and/or competency enhancement of Board members 1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan | Training and/or competency enhancement policy for Board members, including orientation programs for newly appointed Board members (if any); and 2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); | Training and/or competency enhancement attended by Board members during the fiscal year (if any);	352
e) Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: Board's assessment of the performance of committees supporting the Board's duties during the fiscal year, at least includes: 1) Prosedur penilaian kinerja; dan | Performance assessment procedures; and 2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan | Criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competency, and attendance at meetings.	357-358
f) Dalam hal Perusahaan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. | In the event that the Company does not have committees supporting the Board's duties, such information shall be disclosed.	N/A
3 Dewan Komisaris, paling sedikit memuat | Board of Commissioners, at least includes: a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; | Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	313-314
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris | Statement that the Board of Commissioners has a charter or commissioner's charter.	310
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. | Policy and implementation of the frequency of Board of Commissioners meetings, joint Board of Commissioners meetings with the Board of Directors, and the attendance level of Board of Commissioners members at such meetings, including attendance at AGMs; Information on the attendance level of Board of Commissioners members in Board of Commissioners meetings, joint Board of Commissioners meetings with the Board of Directors, or AGMs may be presented in tabular form.	322-327
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi | Training and/or competency enhancement of Board members 1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan | Training and/or competency enhancement policy for Board members, including orientation programs for newly appointed Board members (if any); and 2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); | Training and/or competency enhancement attended by Board members during the fiscal year (if any);	328

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021	Halaman Page
e) Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, at least includes: 1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; | Performance assessment implementation procedures; 2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan | Criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competency, and attendance at meetings; and 3) Pihak yang melakukan penilaian; dan | Party conducting the assessment.	332-333
f) Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of Committees supporting the Board of Commissioners' duties during the fiscal year includes: 1) Prosedur penilaian kinerja; dan | Performance assessment procedures; and 2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; | Criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competency, and attendance at meetings.	N/A
4 Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: | Nomination and Remuneration Committee for the Board of Directors and Board of Commissioners, at least includes:	
a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; | Nomination procedure, including a brief description of the policy and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	359-360
b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedure and implementation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, including: 1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; Procedure for determining remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners; 2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan Remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners such as salary, allowances, bonuses, and others; and 3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Amount of remuneration for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information disclosure may be presented in tabular form.	361-362
5 Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies conducting business activities based on Sharia principles as stipulated in the articles of association, at least includes: a) Nama; | Name; b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; | Legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board; c) Periode penugasan dewan pengawas syariah; | Period of assignment of the Sharia Supervisory Board; d) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan | Duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board; and e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; | Frequency and manner of providing advice and recommendations and overseeing compliance with Sharia principles in the capital market for Issuers or Public Companies;	367
6 Komite audit, paling sedikit memuat: | Audit Committee, at least includes:	
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite | Name and position in the committee membership;	380-386
b) Usia | Age	380-386
c) Kewarganegaraan | Nationality	380-386
d) Riwayat pendidikan | Educational background	380-386
e) Riwayat jabatan | Position history 1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite | Legal basis of appointment as committee member 2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) (pilih) | Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, as well as other positions (if any) (choose) 3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | Employment history including periods both within and outside the Issuer or Public Company;	380-386
f) Periode dan masa jabatan anggota komite audit | Period and tenure of the audit committee members	380-386
7 Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Committee or nomination and remuneration functions of the Issuer or Public Company, at least including:	

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021	Halaman Page
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite | Name and position in the committee membership;	398-402
b) Usia | Age	398-402
c) Kewarganegaraan | Nationality	398-402
d) Riwayat pendidikan | Educational background	398-402
e) Riwayat jabatan | Position history 1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite | Legal basis of appointment as committee member 2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada) (pilih) | Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, as well as other positions (if any) (choose) 3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | Employment history including periods both within and outside the Issuer or Public Company;	398-402
f) Periode dan masa jabatan anggota komite nominasi dan remunerasi | Period and tenure of the nomination and remuneration committee members	398-402
g) Pernyataan independensi komite; | Statement of committee independence;	403
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) | Training and/or competency enhancements attended during the fiscal year (if any)	404
i) Uraian tugas dan tanggung jawab | description of duties and responsibilities	395
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) | Statement of having guidelines or charter	394
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; | Policy and implementation of meeting frequency and the attendance level of members in those meetings;	404-406
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; | Brief description of activity implementation in the fiscal year;	407
m) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: | In case the nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company shall only disclose information as referred to in points i) to l) and disclose: 1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan | Reasons for not forming the committee; and 2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; | Parties carrying out the nomination and remuneration functions;	N/A
8 Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Other committees owned by the Issuer or Public Company in supporting the functions and tasks of the Board of Directors (if any) and/or committees supporting the functions and tasks of the Board of Commissioners, at least include: a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite | Name and position within committee membership b) Usia | Age c) Kewarganegaraan | Nationality d) Riwayat pendidikan | Educational background e) Riwayat jabatan | Position history 1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite | Legal basis of appointment as a committee member 2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan | Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, as well as other positions (if any); and 3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. | Work experience along with its period both within and outside the Issuer or Public Company f) Periode dan masa jabatan anggota komite audit | Period and tenure of the audit committee members	415-424
g) Pernyataan independensi komite; | Statement of committee independence;	425
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan | Training and/or competency enhancements attended during the fiscal year (if any); and	426
i) Uraian tugas dan tanggung jawab | Description of duties and responsibilities	410-411
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) | Statement of having guidelines or charter	N/A
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; | Policy and implementation of meeting frequency and the attendance level of members in those meetings;	426-428
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; | Brief description of activity implementation in the fiscal year;	429-430

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021	Halaman Page
9 Sekretaris Perusahaan, paling sedikit memuat: | Corporate secretary, at least including:	
a) Nama | Name	434-435
b) Domisili | Residence	434-435
c) Riwayat jabatan, meliputi: | Position history, including:	
1. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris Perusahaan; dan Legal | Basis of appointment as corporate secretary; and	434-435
2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Public | Work experience along with its period both within and outside the Issuer or Public Company;	434-435
d) Riwayat pendidikan | Educational background	
e) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku | Training and/or competency enhancements attended during the fiscal year	436-437
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris Perusahaan pada tahun buku; | Brief description of corporate secretary's duties in the fiscal year;	437-438
10 Unit audit internal, paling sedikit memuat: | Internal audit unit, at least including:	
a) Nama kepala unit audit internal | Name of head of internal audit unit	442
b) Riwayat jabatan | Position history	
1. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal | Legal basis of appointment as head of internal audit unit	442
2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan | Work experience along with its period both within and outside the Company	
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); | Qualifications or certifications as internal audit profession (if any);	446
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku | Training and/or competency enhancements attended during the fiscal year	443-444
e) Struktur dan kedudukan unit audit internal; | Structure and position of internal audit unit;	439-440
f) Uraian tugas dan tanggung jawab; | Description of duties and responsibilities;	442-443
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam | (charter) unit audit internal Statement of having guidelines or charter of internal audit unit	441
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; | Brief description of internal audit unit's duties in the fiscal year including policy and implementation of meeting frequency with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	447-449
11 Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Perusahaan | Description of the internal control system implemented by the Company	
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and operational controls, as well as compliance with other regulations;	452-455
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal | Review of the effectiveness of internal control systems	455-456
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; | Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	456
12 Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least including:	
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan; | Overview of the Company's risk management system;	457-469
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; | Types of risks and their management methods;	469-471
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Perusahaan | Review of the effectiveness of the Company's risk management system	472
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; | Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners or audit committee on the adequacy of the risk management system;	473
13 Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: Material legal matters faced by the Issuer or Public Company, subsidiary entities, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners (if any), at least include: a) Pokok perkara/gugatan; | Case/lawsuit details; b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan | Status of case/lawsuit settlement; and c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; | Its impact on the condition of the Issuer or Public Company;	475-480
14 Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); Information on administrative sanctions/penalties imposed on the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the fiscal year (if any);	480-481

INDEKS SE OJK NO.016/2021 | INDEX OF CIRCULAR LETTER OF OJK NO.016/2021		Halaman Page
15	Informasi mengenai kode etik Perusahaan | Information about the Company's code of ethics	
	a) Pokok-pokok kode etik | Key points of the code of ethics	481-483
	b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya Methods of code of ethics dissemination and enforcement efforts	483
	c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Company employees	483
16	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/ atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: A brief description of the long-term performance-based compensation policy for management and/or employees held by the Issuer or Public Company (if any), including management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP); In the case of compensation in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP), disclosed information should include at least: a) Jumlah saham dan/atau opsi; | Number of shares and/or options; b) Jangka waktu pelaksanaan; | Execution period; c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan | eligibility criteria for employees and/or management; and d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; | Exercise price or determination of exercise price;	484
17	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai | A brief description of the policy for disclosing information regarding a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; Ownership of shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any changes in ownership of shares in the Public Company;	486
	b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud | Implementation of the aforementioned policy	486
18	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Perusahaan: Description of the violation reporting system (whistleblowing system) in the Company:	
	a) Cara penyampaian laporan pelanggaran; | Reporting procedure for violations;	487-489
	b) Perlindungan bagi pelapor; | Protection for reporters;	490-491
	c) Penanganan pengaduan; | Handling of complaints;	492-493
	d) Pihak yang mengelola pengaduan; | Management of complaints;	494
	e) Hasil dari penanganan pengaduan: | Results of complaint handling: 1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku | Number of complaints received and processed in the fiscal year 2) Tindak lanjut pengaduan; | Follow-up on complaints;	495
19	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least including:	
	a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan | Programs and procedures undertaken to address corruption, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratuities within the Issuer or Public Company; and	495-496
	b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik | *Anti-corruption training*/ dissemination to employees of the Issuer or Public Company	497
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In case the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having such a policy should be explained.	N/A
20	Penerapan atas pedoman governansi Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Implementation of the governance guidelines for Public Companies issuing equity securities or Public Companies, including: a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan | Statement regarding implemented recommendations b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). | Explanation of recommendations not yet implemented, accompanied by reasons and alternative implementation (if any). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information disclosure can be presented in tabular form.	N/A

7 FINANCIAL STATEMENTS
LAPORAN KEUANGAN

Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak

Tanggal 31 Desember 2025 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

Independent Auditor's Report and Consolidated Financial Statements PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries

As of 31 December 2025, and for the Year Then Ended (Compared to 31 December 2024, and for the Year Then Ended)

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN
ENTITAS ANAK
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

Nomor : 00199/2.0999/AU.1/06/0139-1/1/IV/2026
Tanggal : 8 April 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - iii
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK	
- **LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN** Tanggal 31 Desember 2025 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)	1 - 2
- **LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)	3
- **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)	4
- **LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN** Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)	5
- **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN** Tanggal 31 Desember 2025 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)	6 - 95

Informasi Tambahan:

LAPORAN KEUANGAN POKOK
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

(Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri)

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

- Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk Saja
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja
- Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja
- Laporan Arus Kas - Induk Saja

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Heru Widodo
   Alamat kantor : Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat 10510
   NIK : 3674051712810007
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Bunga Herlina Oktaviyanti
   Alamat kantor : Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat 10510
   NIK : 3577034610830002
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 April 2026

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Direktur Utama	**Direktur Keuangan**
Heru Widodo	**Bunga Herlina Oktaviyanti**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) KANTOR PUSAT

METERAI TEMPEL 67EE9ANX343005865

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 -14

www.asdp.id

We Bridge the Nation

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00199/2.0999/AU.1/06/0139-1/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan dan Direksi Komisaris
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas Laporan Keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai nomor laporan 00473/2.1030/AU.1/06/1155-5/1/IV/2025, tanggal 17 April 2025.

HEAD OFFICE :
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 39838734, 39838735, Fax : 62-21 39832081
Website : www.kapdsi.com, E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA

Indra Soesetiawan, M.H., Ak., CPA., CA., Asean CPA., CFI., CACP.
NRAP : AP. 0139

8 April 2026

00199

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2e;2h;4	1.940.072.274.317	1.836.374.520.725
Piutang Usaha	2e;2g;5		
- Pihak berelasi	2e;5	38.596.296.345	11.894.350.992
- Pihak ketiga	5	35.037.634.064	19.856.396.390
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2g;6	62.628.780.963	47.115.075.190
Pendapatan yang Masih Harus Diterima			
- Pihak berelasi	2g;7	95.551.400.365	59.775.185.289
- Pihak ketiga	2g;7	5.071.466.591	893.059.002
Persediaan	2i;8	146.049.795.741	128.288.962.823
Pajak Dibayar Dimuka	16.a	12.407.605.984	9.213.943.678
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	2j;9	64.071.648.722	51.820.010.502
Jumlah Aset Lancar		**2.399.486.903.092**	**2.165.231.504.591**
Aset Tidak Lancar			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Pihak berelasi	2g;3.2;7	65.437.720.657	85.627.167.675
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2g;3.2;10	275.387.185.873	275.434.971.034
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	2j;3.2;9	391.080.139	467.889.787
Properti Investasi	2k;3.2;11	699.760.379.996	701.343.695.900
Aset Tetap	2l;12	7.872.523.634.961	8.132.548.053.145
Aset Hak Guna	2n;3.2;13	25.245.883.578	27.443.451.589
Aset Takberwujud	2m;14	16.387.613.039	23.005.906.405
Aset Pajak Tangguhan	2q;16.d	64.942.513	61.010.798
Jumlah Aset Tidak Lancar		**8.955.198.440.756**	**9.245.932.146.333**
JUMLAH ASET		**11.354.685.343.848**	**11.411.163.650.924**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	2e;15		
- Pihak Berelasi	2e	55.216.709.588	78.474.809.180
- Pihak Ketiga		401.760.763.227	371.170.594.962
Utang Pajak	2q;16b	43.563.526.826	42.369.226.319
Utang Asuransi	2g;17	26.854.074.367	25.836.228.882
Beban Akrual dan Provisi	2g;18	381.256.044.659	359.207.430.193
Utang Bank Jangka Pendek	2g;20	-	23.836.020.000
Liabilitas Jangka Jangka Pendek Lainnya	2g;19		
- Pihak Berelasi	2e	756.517.767	13.407.658.513
- Pihak Ketiga		121.200.085.262	104.150.030.482
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang:			
- Pinjaman Bank	20	259.697.547.739	263.432.165.478
- Pinjaman Sindikasi	21,36,37	44.400.000.000	34.300.000.000
- Liabilitas Sewa	13,37	6.581.101.566	13.934.482.121
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**1.341.286.371.001**	**1.330.118.646.130**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek:			
- Pinjaman Bank	2g;20	206.036.856.955	449.402.237.748
- Pinjaman Sindikasi	2g; 21; 36; 37	587.663.376.149	630.902.417.816
- Liabilitas Sewa	2n, 13, 37	4.743.923.460	9.091.704.617
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	36		
- Pihak Berelasi	2e;31	1.921.536.772	1.831.025.176
- Pihak Ketiga		4.127.482.265	5.513.737.673
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2p; 22	106.643.909.124	117.308.051.512
Liabilitas Pajak Tangguhan	2q;16d	67.299.881.406	68.140.433.008
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**978.436.966.131**	**1.282.189.607.550**
Jumlah Liabilitas		**2.319.723.337.132**	**2.612.308.253.680**
Ekuitas			
Modal Saham:			
- Modal Dasar - 10.000.000 Saham dengan (2024: 10.000.000 Saham) Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham			
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.561.760 Saham (2024:5.561.760 Saham)	23	5.561.760.000.000	5.561.760.000.000
Tambahan Modal Disetor	24	8.445.362.065	8.445.362.065
Saldo Laba:			
- Telah Ditentukan Penggunannya	25	2.807.583.928.196	2.413.803.355.650
- Belum Ditentukan Penggunannya		461.739.024.742	631.837.202.751
Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		8.839.528.315.003	8.615.845.920.466
Kepentingan Nonpengendali		195.433.691.713	183.009.476.778
Jumlah Ekuitas		**9.034.962.006.716**	**8.798.855.397.244**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**11.354.685.343.848**	**11.411.163.650.924**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan Usaha	2r;26	4.962.464.638.244	5.024.558.826.164
Beban Pokok Pendapatan	2r;27	(3.577.017.386.650)	(3.397.603.862.554)
Laba Bruto		**1.385.447.251.594**	**1.626.954.963.610**
Beban Administrasi dan Umum	2r;3;28	(1.102.483.720.833)	(1.063.012.739.063)
Pendapatan Lainnya	29	101.821.040.754	93.520.027.671
Beban Lainnya	29	(30.934.010.159)	(108.392.177.625)
Beban Pajak Final		(36.670.915.511)	(38.606.876.803)
Laba Usaha		**317.179.645.845**	**510.463.197.790**
Pendapatan Keuangan	2r;30	91.994.541.215	77.384.368.282
Beban Keuangan	2r;30	(98.921.933.935)	(115.418.684.592)
Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih		**(6.927.392.720)**	**(38.034.316.310)**
Laba sebelum Pajak		**310.252.253.125**	**472.428.881.480**
Beban Pajak Penghasilan	16.c	**(24.821.860.832)**	**(25.122.914.029)**
Laba Tahun Berjalan		**285.430.392.293**	**447.305.967.451**
Penghasilan Komprehensif Lain			
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		(5.576.208.851)	(3.411.292.599)
- Pajak Penghasilan Terkait		1.216.537.509	921.269.656
Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak		**(4.359.671.342)**	**(2.490.022.943)**
Jumlah Penghasilan Komprehensif		**281.070.720.951**	**444.815.944.508**
Laba yang Diatribusikan Kepada:			
- Pemilik Entitas Induk		272.986.840.366	438.744.684.039
- Kepentingan Nonpengendali		12.443.551.927	8.561.283.412
Jumlah Laba Tahun Berjalan		**285.430.392.293**	**447.305.967.451**
Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
- Pemilik Entitas Induk		268.646.506.021	436.073.652.970
- Kepentingan Nonpengendali		12.424.214.930	8.742.291.538
Jumlah Penghasilan Komprehensif		**281.070.720.951**	**444.815.944.508**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal yang Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba			Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah		
Saldo Per 1 Januari 2024 / 31 Desember 2023		**5.173.195.000.000**	**397.010.172.065**	**1.831.026.929.440**	**809.212.619.476**	**8.210.444.720.981**	**174.267.185.240**	**8.384.711.906.221**
Modal Ditempatkan dan Disetor	23	388.565.000.000	(388.564.810.000)	(190.000)	-	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	24	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	25	-	-	582.776.616.210	(582.776.616.210)	-	-	-
Dividen Tunai	25	-	-	-	(30.672.453.485)	(30.672.453.485)	-	(30.672.453.485)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	438.744.684.039	438.744.684.039	8.561.283.412	447.305.967.451
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	-	(2.671.031.069)	(2.671.031.069)	181.008.126	(2.490.022.943)
Saldo Per 31 Desember 2024		**5.561.760.000.000**	**8.445.362.065**	**2.413.803.355.650**	**631.837.202.751**	**8.615.845.920.466**	**183.009.476.778**	**8.798.855.397.244**
Modal Ditempatkan dan Disetor		-	-	-	-	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	24	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	25	-	-	393.780.572.546	(393.780.572.546)	-	-	-
Dividen Tunai	25	-	-	-	(44.964.111.502)	(44.964.111.502)	-	(44.964.111.502)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	272.986.840.366	272.986.840.366	12.443.551.927	285.430.392.293
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-		(4.340.334.327)	(4.340.334.327)	(19.336.992)	(4.359.671.319)
Saldo Per 31 Desember 2025		**5.561.760.000.000**	**8.445.362.065**	**2.807.583.928.196**	**461.739.024.742**	**8.839.528.315.003**	**195.433.691.713**	**9.034.962.006.716**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pelanggan		4.954.690.132.541	5.029.483.008.821
Pembayaran kas kepada Pemasok		(2.219.755.975.247)	(2.138.288.968.395)
Pembayaran kepada Karyawan		(1.127.918.317.539)	(1.089.194.335.373)
Pembayaran Beban Usaha		(512.019.678.889)	(493.596.602.717)
Penerimaan Lain-lain		54.734.746.934	67.259.879.700
Pembayaran Bunga Pinjaman		(97.466.709.488)	(113.287.083.746)
Penerimaan Bunga	30	91.650.103.101	77.384.368.282
Pembayaran Pajak Penghasilan		(147.143.666.269)	(178.457.747.522)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**996.770.635.144**	**1.161.302.519.050**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Jaminan Usaha		43.720.341.127	30.252.327.477
Pembayaran Jaminan Usaha		(33.194.295.809)	(29.318.151.568)
Perolehan Aset Takberwujud	14	(2.224.327.606)	(9.571.368.996)
Perolehan Aset Tetap		(515.920.729.965)	(614.092.376.971)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(507.619.012.253)**	**(622.729.570.058)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pencairan Pinjaman Sindikasi		-	-
Pembayaran Pinjaman Sindikasi		(34.300.000.000)	(26.300.000.000)
Pembayaran Pinjaman Bank	20	(270.936.018.532)	(256.221.460.499)
Penerimaan Pinjaman Bank	20	-	159.500.000.000
Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi		130.700.000.500	124.793.654.642
Pembayaran Pinjaman Pihak Berelasi		(143.300.000.500)	(122.100.000.000)
Pembayaran Dividen	25	(44.964.111.493)	(30.672.453.485)
Pembayaran Liabilitas Sewa	37	(24.255.618.238)	(41.388.939.255)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(387.055.748.263)**	**(192.389.198.597)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		**102.095.874.628**	**346.183.750.395**
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS		1.601.878.964	1.845.814.016
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	2e;2f;4	**1.836.374.520.725**	**1.488.344.956.314**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	2e;2f;4	**1.940.072.274.317**	**1.836.374.520.725**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tahun 1973 dengan nama Proyek Angkutan Sungai Danau dan Ferry (PASDF) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM.50/R/PHB-1973 tanggal 27 Maret 1973, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1986, status Perusahaan ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PERUM ASDP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1992 tanggal 17 Maret 1992, Pemerintah meningkatkan status dari bentuk PERUM ASDP menjadi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero).

Anggaran dasar telah mengalami beberapa perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 17 tanggal 21 November 2025 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H. M.kn. Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0359786 tanggal 28 November 2025.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, aktivitas penunjang angkutan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1973.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Ahmad Yani No. 52 A, Jakarta Timur. Jumlah cabang operasional dan pelabuhan Perusahaan terdiri dari 27 cabang operasional dan 36 pelabuhan sesuai dengan surat keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.186/HK.001/ASDP-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: KD.129/HK.001/ASP-2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PT Danantara Asset Management (Persero) adalah pemegang saham perusahaan dengan kepemilikan 99,99998% dan Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 0,00002%.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan Akta No. 17 tanggal 21 November 2025 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dengan Surat Pemberitahuan No.AHU-AH.01.09-0359786 tanggal 28 November 2025 dan Akta No. 05 tanggal 10 Desember 2024 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dengan Surat Pemberitahuan No.AHU-AH.01.09-0286416 tanggal 11 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

	2025	2024
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Achmad Baidowi	Achmad Baidowi
Komisaris Independen	Siti Ariani Muflikhah	Siti Ariani Muflihkhah
Komisaris	Susi Meyrista Tarigan	Susi Meyrista Tarigan
Komisaris	Elba Damhuri	Elba Damhuri
Komisaris	Joddy Hernady	Joddy Hernady
Komisaris	Taufik Rachman	Taufik Rachman
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Heru Widodo	Heru Widodo
Wakil Direktur Utama	Yossianis Marciano	Yossianis Marciano
Direktur Teknik	Nana Sutisna	Kusnadi Chandra Wijaya
Direktur Keuangan	Bunga Herlina Oktaviyant	Djunia Satriawan
Direktur SDM dan Layanan Korporasi	Rudi Sunarko	Wahyu Wibowo
Direktur Operasi dan Transformasi	Rio Theodore Natalianto Lasse	Rio Theodore Natalianto Lasse

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sejumlah 5.127 dan 5.122 orang (tidak diaudit).

Susunan anggota Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Ketua	Joddy Hernady	Joddy Hernady
Wakil Ketua	Susi Meyrista Tarigan	Susi Meyrista Tarigan
Anggota	Muhamad Farkhan Supriya	Made Sumadi Arta
Anggota	Suhendar	Triandi Kiansyah
Anggota	Taufik Rachman	Taufik Rachman

Sekretaris Perusahaan adalah Windy Sustia Andale dan Shelvy Arifin masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024. Kepala Internal Audit Perusahaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing dijabat Imran Kuru dan Theresia Damayanti.

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak yang dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha Utama	Lokasi Domisili	Tahun Beroperasi Komersil	Persentase Kepemilikan 2025 (%)	Persentase Kepemilikan 2024 (%)	Total Aset 2025	Total Aset 2024
PT Indonesia Ferry Properti	Perdagangan Umum dan Real Estat/ *General Trade and Real Estate*	Jakarta	2017	51,00	51,00	1.117.001.114.326	1.113.742.689.634
PT Jembatan Nusantara	Jasa Pelayaran/ *Shipping Services*	Surabaya	1975	99,99	99,99	1.430.048.223.929	1.647.968.126.967

PT Indonesia Ferry Property (IFPRO)

PT Indonesia Ferry Properti didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 21 tanggal 5 September 2017 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya Nomor AHU.0041206.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 September 2017. Berdasarkan Akta No.10 tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No.AHU-AH.01.03-0063595 tanggal 12 Februari 2018, Perusahaan memiliki 157.887 lembar saham senilai Rp157.887.000.000 yang mewakili kepemilikan saham sebesar 51,00%.

PT Jembatan Nusantara (JN)

Perusahaan mengakuisisi JN berdasarkan Akta No. 140 tanggal 22 Februari 2022 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0116605 tanggal 22 Februari 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 12 Oktober 2022 oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0204896.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022, Perusahaan memiliki 2.507.655.209 lembar saham senilai Rp1.253.827.604.500 yang mewakili kepemilikan sebesar 99,99%.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2.a Pernyataan Kepatuhan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

2.b Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung *(direct method)* dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 2d.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah Rupiah. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.c Standar Akuntansi Keuangan Baru, Amendemen, dan Penyesuaian

a) Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun 2024

- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa–Balik;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; serta
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada tahun 2024, Grup telah menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK yang relevan dengan kegiatan usaha Grup. Penerapan standar tersebut tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

b) Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun 2025

- PSAK 117, “Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 117, “Kontrak Asuransi” tentang Penerapan Awal PSAK 104 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif;
- PSAK 103: "Kombinasi Bisnis"; PSAK 105: "Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"; PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; PSAK 109: "Instrumen Keuangan"; PSAK 115: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan"; PSAK 207: "Laporan Arus Kas"; PSAK 216: "Aset Tetap"; PSAK 219: "Imbalan Kerja"; PSAK 228: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; PSAK 232: "Instrumen Keuangan: Penyajian"; PSAK 236: "Penurunan Nilai Aset"; PSAK 237: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"; PSAK 238: "Aset Takberwujud"; serta PSAK 240: "Properti Investasi" - Amendemen konsekuensial karena berlaku efektifnya PSAK 117: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 221, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” terkait Kekurangan Ketertukaran.
- PSAK 370: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" dan ISAK 335: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" - Amendemen konsekuensial karena berlaku efektifnya SAK Indonesia untuk Entitas Privat.

Pada tanggal 1 Januari 2025, Grup telah menerapkan standar dan amendemen PSAK yang relevan dengan kegiatan usaha Grup.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.c Standar Akuntansi Keuangan Baru, Amendemen, dan Penyesuaian (lanjutan)

b) Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun 2025 (lanjutan)

Manajemen telah melakukan evaluasi terhadap penerapan standar tersebut, termasuk analisis terhadap akun pendapatan, instrumen keuangan, serta aset hak-guna dan liabilitas sewa. Berdasarkan evaluasi tersebut, penerapan standar tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi maupun dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c) Standar yang Telah Diterbitkan, tetapi Belum Berlaku Efektif

- PSAK 109: "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked* , aset keuangan dengan fitur *non-recourse* , dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti, *tranche* .
- Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Standar, amendemen, dan penyesuaian PSAK yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 antara lain mencakup penyesuaian tahunan PSAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards Annual Improvements – Volume 11.

c) Standar yang Telah Diterbitkan, tetapi Belum Berlaku Efektif

Grup tidak melakukan penerapan dini atas standar tersebut. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen masih melakukan evaluasi atas dampak yang mungkin timbul, namun diperkirakan tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2.d Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.d Prinsip-prinsip Konsolidasian

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.d Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf - a);
   vii Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   vii Entitas atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.e Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi dengan entitas dan/atau grup mencakup Pemerintah Republik Indonesia serta entitas lain yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau berada di bawah pengaruh signifikan Pemerintah Republik Indonesia (entitas sepengendali pemerintah). Pengendalian tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui kementerian terkait atau melalui badan pengelola investasi pemerintah, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

2.f Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu dalam Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap individu entitas Grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs *spot* antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
USD	16.782	16.162
EUR	19.753	16.851

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada 31 Desember 2025 semua aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*).

Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga *(Solely Payments of Principal and Interest - SPPI)* dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan nilainya atau jarang terjadi.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

a) Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
b) Nilai waktu uang; dan
c) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misalnya, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif (lanjutan)

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Grup terutama terdiri dari liabilitas sewa, utang bank, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang dana pension dan utang sewa pembiayaan.

Liabilitas sewa, utang bank, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang dana pensiun, utang sewa pembiayaan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.g Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi *input* terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
ii. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk asset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
iii. *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.h Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas dari setiap entitas di grup, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.j Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.k Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

a) Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau, pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
b) Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
c) Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
d) Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.L Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	5 - 20
Bangunan Pelabuhan	5 - 20
Armada Kapal	5 - 30
Kendaraan	5
Peralatan Kantor	5

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset Dalam Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.m Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada). Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset Takberwujud dengan Umur Manfaat Terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomis dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset takberwujud, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sehubungan dengan lisensi *software* selama 5 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

2.n Sewa

Pada tanggal insepsi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

a) Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
b) Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
   (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
   (ii) Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
   - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
   - Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.n Sewa (lanjutan)

Grup Sebagai Penyewa *(Lessee)*

Pada tanggal permulaan, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa dengan:
a) Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
c) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Grup sebagai Pemberi Sewa (*Lessor*)

Grup mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.o Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1) Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.o Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

1) Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut: (lanjutan)
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan.
   - Kontrak memiliki substansi komersial.
2) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3) Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.

4) Mengalokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:
- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.p Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika seorang karyawan telah bekerja dalam suatu periode akuntansi. Jumlah imbalan kerjanya diukur berdasarkan nilai nominal tanpa memperhitungkan nilai tunainya.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Untuk program pensiun iuran pasti, Grup membayar iuran kepada program asuransi pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.p Imbalan Kerja

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b. Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur serta mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.q Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a) Pengakuan awal goodwill;
b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.q Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. Entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2.r Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

<u>Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap</u>

Perusahaan melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor- faktor seperti kondisi teknis (estimasi daya pakai, pengoperasi, pemeliharaan) dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap disajikan di Catatan 12.

<u>Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja</u>

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan rata-rata tingkat suku bunga obligasi pemerintah pada pasar yang aktif yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah. Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan dan nilai tercatat diungkapkan pada Catatan 22.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 5.

Pengukuran Nilai Wajar untuk Properti Investasi

Properti investasi Perusahaan diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Perusahaan menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, dan pendekatan pasar. Nilai tercatat properti investasi diungkapkan dalam Catatan 11.

ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.g dan 38.

3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

iii. Kombinasi Bisnis dan Penurunan Nilai Aset

Pada Februari 2022, Grup mengakuisisi PT Jembatan Nusantara ("JN") dan mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon (bargain purchase) sebesar Rp103.595.656.393 sesuai dengan PSAK 103 (d.h. PSAK 22): Kombinasi Bisnis.

Akuisisi saham JN pada tahun 2022 menghasilkan keuntungan secara konsolidasian dari akuisisi saham JN dengan diskon.

Dengan demikian, Grup tidak mengakui goodwill sehubungan dengan akuisisi saham JN karena transaksi tersebut menghasilkan keuntungan dari akuisisi saham JN dengan diskon (bargain purchase).

Manajemen telah melakukan penelaahan kembali atas identifikasi dan pengukuran seluruh aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi dan meyakini bahwa, pengakuan tersebut telah mencerminkan nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Pada tahun 2025, Grup memperoleh penilaian independen yang menunjukkan adanya perubahan nilai aset bersih JN dibandingkan dengan nilai pada tanggal akuisisi. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, kinerja operasional, serta asumsi ekonomi yang digunakan dalam penilaian.

Manajemen menilai bahwa, perubahan tersebut tidak mencerminkan kesalahan dalam pengukuran awal, melainkan merupakan perubahan estimasi dan kondisi ekonomi setelah tanggal akuisisi sesuai dengan PSAK 208 (d.h. PSAK 25): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Grup tidak melakukan penyesuaian atas nilai keuntungan dari akuisisi saham JN dengan diskon yang telah diakui pada tahun 2022.

Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai atas aset per 31 Desember 2025 sesuai sesuai dengan PSAK 236 (d.h. PSAK 48): Penurunan Nilai Aset, dan berdasarkan hasil pengujian tersebut, terdapat penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Pengujian penurunan nilai atas aset tertentu yang berasal dari akuisisi saham JN dilakukan pada tanggal 31 Desember 2025.

Asumsi utama yang digunakan dalam pengujian penurunan nilai meliputi tingkat diskonto, tingkat pertumbuhan, dan proyeksi arus kas, yang ditentukan berdasarkan kondisi pasar terkini dan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa, estimasi yang digunakan adalah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas	**2.371.271.585**	**2.655.123.059**
Bank		
Pihak Berelasi (Catatan 31)		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	347.641.313.038	284.674.576.558
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	32.941.429.792	155.079.036.251
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	542.249.923.473	151.546.064.680
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.411.148.856	149.130.976.441
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	76.233.511.977	63.926.809.388
	1.037.477.327.136	**804.357.463.318**
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2025:USD146,946.38; 2024:USD87,126.03)	2.466.054.149	1.408.130.895
Euro		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2025:EUR369.48; 2024: EUR489.48)	7.298.433	8.248.383
	2.473.352.582	**1.416.379.278**
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	111.400.044.369	119.602.819.854
PT Bank CIMB Niaga Tbk	23.843.747.994	32.297.635.881
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.636.662.913	1.673.020.190
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	5.697.738	17.609.145
	136.886.153.014	**153.591.085.070**
Total Bank	**1.176.836.832.732**	**959.364.927.666**
Deposito Berjangka		
Pihak Berelasi (Catatan 31)		
Rupiah		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	310.000.000.000	310.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000.000.000	125.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	25.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	10.000.000.000	-

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Deposito Berjangka		
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	25.000.000.000	-
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40.864.170.000	39.354.470.000
Total Deposito Berjangka	**760.864.170.000**	**874.354.470.000**
Total	**1.940.072.274.317**	**1.836.374.520.725**
Tingkat Bunga Deposito		
Rupiah	1,67%-4,99%	2,85%-6,20%
Dolar Amerika Serikat	2,19%	1,75%
Jangka Waktu	1 bulan	1 bulan

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan.

5. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan Pelanggan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)	38.838.915.608	12.708.371.691
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(242.619.263)	(814.020.699)
Sub Total	**38.596.296.345**	**11.894.350.992**
Pihak Ketiga	66.519.865.163	52.815.905.795
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(31.482.231.099)	(32.959.509.405)
Sub Total	**35.037.634.064**	**19.856.396.390**
Total	**73.633.930.409**	**31.750.747.382**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan Umur

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belum Jatuh tempo	59.085.311.364	28.599.939.058
Sampai dengan 30 Hari	4.793.977.039	3.145.078.056
31 - 60 Hari	5.357.049.025	3.000.045.814
60 - 90 Hari	2.763.212.141	1.514.284.844
Lebih dari 90 Hari	33.359.231.202	29.264.929.714
Sub Total	**105.358.780.771**	**65.524.277.486**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(31.724.850.362)	(33.773.530.104)
Total	**73.633.930.409**	**31.750.747.382**

c. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	33.773.530.104	26.236.549.843
Penambahan (Catatan 28)	21.248.925.438	27.591.846.276
Pemulihan (Catatan 29)	(23.297.605.180)	(20.054.866.015)
Total	**31.724.850.362**	**33.773.530.104**

Seluruh piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Piutang usaha dijadikan jaminan atas pinjaman sindikasi (Catatan 21).

6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bank Garansi	32.115.243.227	21.544.197.909
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	20.649.249.604	20.649.249.604
Lain-lain	9.864.288.132	4.921.627.677
Total	**62.628.780.963**	**47.115.075.190**

6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Bank Garansi merupakan jaminan pekerjaan atas pengoperasian *trip* subsidi kapal pada lintasan perintis antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Perusahaan.

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening penampungan pendapatan jasa pelabuhan Dermaga IV Merak-Bakauheni antara Perusahaan dengan PT Infiniti Indosakti. Perusahaan juga mencatat utang atas rekening penampungan tersebut (Catatan 18 dan 33.b).

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)	200.192.030.189	164.415.815.102
Pihak Ketiga	9.849.859.033	5.456.600.716
Total	**210.041.889.222**	**169.872.415.818**
Bagian Lancar	100.622.866.956	60.668.244.291
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Lancar	-	-
Bagian Lancar - Bersih	**100.622.866.956**	**60.668.244.291**
Bagian Tidak Lancar	109.419.022.266	109.204.171.527
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Tidak Lancar	(43.981.301.609)	(23.577.003.852)
Bagian Tidak Lancar - Bersih	**65.437.720.657**	**85.627.167.675**

Pendapatan yang masih harus diterima tidak lancar terutama merupakan pendapatan subsidi penyeberangan perintis tahun 2023 sebesar Rp104.350.293.813 yang masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait pembayarannya (Catatan 33.b).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan yang masih harus diterima adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	23.577.003.852	27.861.232.018
Penambahan (Catatan 28)	20.404.297.757	-
Pemulihan (Catatan 29)	-	(4.284.228.166)
Total	**43.981.301.609**	**23.577.003.852**

Pendapatan yang masih harus diterima terutama merupakan pendapatan subsidi atas pelayaran perintis dan penjualan bahan bakar minyak.

8. PERSEDIAAN

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Suku Cadang dan Perlengkapan Kapal	139.041.229.172	122.345.495.643
Perlengkapan dan Perabotan Hotel	3.703.182.664	2.971.063.116
Bahan Bakar	3.582.741.401	3.249.761.560
Sub Total	**146.327.153.237**	**128.566.320.319**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277.357.496)	(277.357.496)
Total	**146.049.795.741**	**128.288.962.823**
Saldo Awal	277.357.496	-
Penambahan	-	277.357.496
Total	**277.357.496**	**277.357.496**

Manajemen tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan pencurian mengingat jenis, sifat dan risiko masing-masing persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Tidak terdapat persediaan yang dijadikan jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Muka:		
Operasional	22.849.514.073	17.044.593.168
Pembangunan	13.832.753.109	18.076.307.806
Sub Total	**36.682.267.182**	**35.120.900.974**
Biaya Dibayar di Muka:		
Asuransi	12.625.949.620	8.941.688.897
Sewa	3.740.222.121	1.992.085.807
Lain-lain	11.414.289.938	6.233.224.611
Sub Total	**27.780.461.679**	**17.166.999.315**
Total	**64.462.728.861**	**52.287.900.289**
Dikurangi Bagian Tidak Lancar	(391.080.139)	(467.889.787)
Bagian Lancar	**64.071.648.722**	**51.820.010.502**

10. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Deposito yang Dijaminkan	275.000.000.000	275.000.000.000
Piutang Pegawai	2.260.519.335	2.260.519.335
Sub Total	**277.260.519.335**	**277.260.519.335**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.873.333.462)	(1.825.548.301)
Total	**275.387.185.873**	**275.434.971.034**

Deposito yang dijaminkan merupakan deposito milik Perusahaan yang menjadi jaminan utang bank di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 20).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai atas pendapatan yang masih harus diterima dan piutang pegawai adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	1.825.548.301	1.760.611.985
Penambahan (Catatan 28)	47.785.161	64.936.316
Pemulihan (Catatan 29)	-	-
Total	**1.873.333.462**	**1.825.548.301**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang pegawai di kemudian hari.

11. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Reklasifikasi	Kenaikan/ (Penurunan) Nilai Wajar	Saldo Akhir
Nilai Wajar				
Tanah	141.953.429.900	(13.372.859.753)	10.620.157.849	139.200.727.996
Bangunan	559.390.266.000	595.561.201	573.824.799	560.559.652.000
Total	**701.343.695.900**	**(12.777.298.552)**	**11.193.982.648**	**699.760.379.996**

11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Reklasifikasi	Kenaikan/ (Penurunan) Nilai Wajar	Saldo Akhir
Nilai Wajar				
Tanah	138.857.400.000	(5.058.850.000)	8.154.879.900	141.953.429.900
Bangunan	564.462.300.000	1.161.792.110	(6.233.826.110)	559.390.266.000
Total	**703.319.700.000**	**(3.897.057.890)**	**1.921.053.790**	**701.343.695.900**

Properti investasi terutama merupakan bangunan Sosoro Mall Merak, Anjungan Mall Bakauheni dan Plaza Labuan Bajo, serta beberapa tanah yang tersebar di berbagai cabang di seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan penilai KJPP Munir, Wisnu, Heru, dan Rekan dalam laporan No. 00149/2.0129-02/PI/06/0569/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 nilai wajar properti investasi pada 31 Desember 2025 untuk tanah sebesar Rp139.200.727.996 serta bangunan sebesar Rp18.553.652.000 dan laporan penilai KJPP Rengganis, Hamid, dan Rekan dalam laporan No. 00011/2.0012-02/PI/03/0352/1/II/2026 tanggal 16 Februari 2026. Nilai dari properti investasi pada 31 Desember 2025 dan Rp 542.006.000.000.

Berdasarkan laporan penilai KJPP Munir, Wisnu, Heru, dan Rekan dalam laporan No.00130/2.0129-02/PI/06/0569/1/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 dan laporan penilai KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan No.00120/2.0027-05/PI/06/0278/1/III/2025 tanggal 23 Januari 2025, nilai wajar properti investasi pada 31 Desember 2024 untuk tanah sebesar Rp141.953.429.900 serta bangunan sebesar Rp19.754.266.000 dan Rp539.636.000.000.

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Metodologi penilaian yang digunakan dalam pendekatan pasar adalah metode perbandingan data pasar, metodologi yang digunakan dalam pendekatan biaya adalah metode biaya yang terdepresiasi *(Depreciated Replacement Cost /DCR)* , dan metodologi yang digunakan dalam pendekatan pendapatan adalah arus kas terdiskonto *(Discounted Cash Flow /DCF)* .

Pada tahun 2025, Grup melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi (Catatan 12).

Pada tahun 2025 dan 2024, kenaikan nilai wajar masing-masing sebesar Rp. 11.193.982.648 dan Rp 1.921.053.790 yang diakui pada pendapatan dan beban lainnya (Catatan 29).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, bangunan dan sarana prasarana – properti investasi dijaminkan untuk pinjaman sindikasi (Catatan 21).

11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Usaha (Catatan 26)		
Aneka Jasa dan Kerja Sama	20.911.302.959	17.517.664.461
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 27)		
Aneka Jasa dan Kerja Sama	7.333.832.517	8.461.353.409

12. ASET TETAP

	2025					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Penurunan Nilai	Saldo Akhir
Harga Perolehan						
Tanah	275.343.983.492	-	-	13.434.309.753	-	288.778.293.245
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	341.815.241.880	9.352.910.773	(6.391.858.096)	46.192.660.247	-	390.968.954.804
Bangunan Pelabuhan	4.838.534.074.870	89.410.386.654	-	64.345.059.517	-	4.992.289.521.041
Armada Kapal	6.970.633.374.602	179.328.152.383	(1.281.171.950)	102.885.368.131	-	7.251.565.723.166
Kendaraan	64.810.542.215	5.300.863.424	-	-	-	70.111.405.639
Peralatan Kantor	569.452.434.584	18.224.868.840	-	36.216.339.576	-	623.893.643.000
Aset Dalam Penyelesaian	228.749.524.257	215.234.559.639	(434.873.510)	(323.140.376.897)	-	120.408.833.489
Sub Total	**13.289.339.175.900**	**516.851.741.713**	**(8.107.903.556)**	**(60.066.639.673)**	**-**	**13.738.016.374.384**
Akumulasi Penyusutan dan beban penurunan nilai						
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	53.381.690.803	14.783.842.915	-	-	-	68.165.533.718
Bangunan Pelabuhan	1.564.191.971.799	206.983.026.492	-	(22.543.266.039)	-	1.748.631.732.252
Armada Kapal	3.069.683.933.717	319.071.585.152	(93.332.912)	(22.990.231.872)	156.948.069.252	3.522.620.023.337
Kendaraan	60.296.770.463	1.762.320.304	-	-	-	62.059.090.767
Peralatan Kantor	409.236.755.972	59.064.489.746	(4.284.886.369)	-	-	464.016.359.349
Sub Total	**5.156.791.122.754**	**601.665.264.609**	**(4.378.219.281)**	**(45.533.497.911)**	**156.948.069.252**	**5.865.492.739.423**
Nilai Buku	**8.132.548.053.146**					**7.872.523.634.961**

12. ASET TETAP (lanjutan)

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Penurunan Nilai / *Impairment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga Perolehan						
Tanah	259.723.902.932	10.561.230.560	-	5.058.850.000	-	275.343.983.492
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	708.599.233.139	7.413.139.485	-	36.881.983.864	-	752.894.356.488
Bangunan Pelabuhan	3.902.111.563.915	37.467.519.304	-	505.024.699.154	-	4.444.603.782.373
Armada Kapal	6.822.938.191.012	176.704.252.095	(29.009.068.507)	-	-	6.970.633.374.600
Kendaraan	65.349.374.247	684.624.945	-	(1.223.456.977)	-	64.810.542.215
Peralatan Kantor	390.730.371.178	33.725.786.913	(3.806.250)	147.469.713.852	-	571.922.065.693
Aset Dalam Penyelesaian	442.911.439.280	351.885.541.423	-	(566.283.537.456)	-	228.513.443.247
Sub Total	**12.592.364.075.703**	**618.442.094.725**	**(29.012.874.757)**	**126.928.252.437**	**-**	**13.308.721.548.108**
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	62.473.422.939	22.981.673.060	-	(1.099.291.338)	-	84.355.804.661
Bangunan Pelabuhan	1.398.445.236.129	164.224.034.262	-	-	-	1.562.669.270.391
Armada Kapal	2.778.137.080.585	299.186.758.764	(27.558.615.063)	-	9.857.030.241	3.059.622.254.527
Kendaraan	59.968.578.423	1.551.649.017	-	(1.223.456.977)	-	60.296.770.463
Peralatan Kantor	235.437.870.310	48.441.387.999	(3.806.250)	125.353.942.862	-	409.229.394.921
Sub Total	**4.534.462.188.386**	**536.385.503.102**	**(27.562.421.313)**	**123.031.194.547**	**9.857.030.241**	**5.176.173.494.963**
Nilai Buku	**8.057.901.887.317**					**8.132.548.053.145**

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 27)	536.337.051.883	477.643.954.510
Beban Administrasi dan Umum (Catatan 28)	65.328.212.726	58.741.548.592
Total	**601.665.264.609**	**536.385.503.102**

Pada tahun 2025, terdapat pengurangan pada aset tetap sebesar Rp8.107.903.554. Pengurangan tersebut merupakan pembebanan terhadap aset dalam konstruksi yang dibebankan dan tidak termasuk bagian dalam aset tetap.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan hasil penilai independen yang telah terdaftar di OJK oleh KJPP Edi Andesta dan Rekan sebagaimana tertera dalam laporan No. 033/SKR-ANDESTA/IV/2026, tanggal 8 April 2026, dari nilai buku atas 53 Armada Kapal per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.529.842.330.644, nilai wajar seluruhnya sebesar Rp1.372.777.000.000 sehingga terdapat penurunan nilai aset tetap - kapal per 31 Desember 2025 sebesar Rp157.065.330.644.

Aset dalam konstruksi terdiri dari peningkatan dermaga di Ketapang, Bakauheni, Ambon, Kupang, Pembangunan Hotel Meruorah Tahap II dan *Multifunction* di kawasan Marina Labuan Bajo. Jangka waktu penyelesaian pembangunan tersebut berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 9 (sembilan) bulan. Pada 31 Desember 2025, persentase penyelesaian dari berkisar antara 10% sampai dengan 98%.

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Pada tahun 2025, Grup melakukan beberapa reklasifikasi, yaitu:

a. Properti investasi menjadi aset tetap untuk tanah sebesar Rp13.338.950.000 (Catatan 11);
b. Aset dalam konstruksi menjadi aset tetap untuk peralatan kantor dengan harga perolehan sebesar Rp16.648.813.756 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp3.651.648.552
c. Aset tetap menjadi properti investasi untuk tanah dan bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp1.056.642.288 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp46.479.414 (Catatan 11).

Aset tetap grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Central Asia (ACA) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp29.400.000.000 dan Rp1.380.893.034.994 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Civil Engineering Completed Risk (CECR) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.006.452.248 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Aset tetap grup juga diasuransikan kepada PT Asuransi Wahana Tata dengan nilai pertanggungan sebesar Rp353.161.436.808 dan Rp713.517.171.436 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Manajemen berkeyakinan jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Aset tetap Grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap segala risiko masing-masing dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp8.191.955.722.512 untuk periode 31 Desember 2024. Manajemen berkeyakinan jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan

Entitas Anak - PT Jembatan Nusantara

Pada tanggal 13 Februari 2025 melalui surat No. 001/KU.111/DK/II/JN-2025 Perusahaan mengajukan permohonan pembatalan polis asuransi marine hull atas 53 kapal yang dimiliki Perusahaan kepada PT Asuransi Central Asia (ACA). Permohonan tersebut kemudian disetujui oleh ACA melalui surat No. 011/BDII/II/2025/L tanggal 17 Februari 2025 sehingga sejak tanggal persetujuan tersebut hingga diterbitkannya laporan keuangan Perusahaan aset kapal yang dimiliki oleh Perusahaan tidak lagi tercover dalam perlindungan asuransi.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Entitas Anak - PT Jembatan Nusantara (lanjutan)

Terdapat 30 aset tetap-kapal yang berada dalam kondisi tidak beroperasi yang disebabkan masih berada di galangan kapal (docking), dan/atau menunggu docking pada tanggal pelaporan, sehingga manajemen telah melakukan penilaian atas penurunan nilai aset tersebut.

Sebagian aset tetap kapal Perusahaan dijadikan sebagai jaminan utang bank (Catatan 20).

Manajemen berkeyakinan bahwa selain aset tetap - kapal, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap untuk kelompok jenis aset yang lain, sehingga manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025

Sebagian aset tetap digunakan sebagai jaminan atas Pinjaman Sindikasi (Catatan 21).

13. ASET HAK GUNA

	2025				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Bangunan	21.294.066.325	9.737.935.000	-	-	31.032.001.325
Peralatan Komputer	309.525.353	-	-	-	309.525.353
Kapal	17.348.850.000	-	-	-	17.348.850.000
Kendaraan	11.043.584.754	-	-	-	11.043.584.754
Sub Total	**49.996.026.432**	**9.737.935.000**	**-**	**-**	**59.733.961.432**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	7.787.792.475	5.537.130.832	-	-	13.324.923.307
Peralatan Komputer	34.391.705	103.175.118	-	-	137.566.823
Kapal	10.786.900.000	3.469.770.000	-	-	14.256.670.000
Kendaraan	3.943.490.663	2.825.427.061	-	-	6.768.917.724
Sub Total	**22.552.574.843**	**11.935.503.011**	**-**	**-**	**34.488.077.854**
Nilai Buku	**27.443.451.589**				**25.245.883.578**

13. ASET HAK GUNA (lanjutan)

	2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Bangunan	19.984.246.067	10.064.064.911	(8.754.244.653)	-	21.294.066.325
Peralatan Komputer	125.353.942.862	309.525.353	-	(125.353.942.862)	309.525.353
Kapal	17.348.850.000	-	-	-	17.348.850.000
Kendaraan	7.061.014.561	3.982.570.193	-	-	11.043.584.754
Sub Total	**169.748.053.490**	**14.356.160.457**	**(8.754.244.653)**	**(125.353.942.862)**	**49.996.026.432**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	10.331.288.783	6.210.748.345	(8.754.244.653)	-	7.787.792.475
Peralatan Komputer	102.372.571.900	23.015.762.667	-	(125.353.942.862)	34.391.705
Kapal	7.317.130.000	3.469.770.000	-	-	10.786.900.000
Kendaraan	1.344.652.620	2.598.838.043	-	-	3.943.490.663
Sub Total	**121.365.643.303**	**35.295.119.055**	**(8.754.244.653)**	**(125.353.942.862)**	**22.552.574.843**
Nilai Buku	**48.382.410.187**				**27.443.451.589**

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Liabilitas Sewa		
Tidak lebih dari 1 tahun	9.049.640.136	15.260.237.307
Lebih dari 1 tahun	3.509.654.175	10.638.362.442
Total	**12.559.294.311**	**25.898.599.749**
Dikurangi Bagian Bunga	(1.234.269.285)	(2.872.413.011)
Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum	**11.325.025.026**	**23.026.186.738**
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(6.581.101.566)	(13.934.482.121)
Bagian Jangka Panjang	**4.743.923.460**	**9.091.704.617**

Beban yang timbul untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Bunga atas Liabilitas Sewa (Catatan 30)	3.386.651.577	2.131.600.846
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 27 dan 28)	13.011.138.453	35.295.119.055
Beban terkait Liabilitas Sewa Jangka Pendek	-	6.381.998.069
Total	**16.397.790.030**	**43.808.717.970**

13. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Pada tahun 2024, Grup melakukan reklasifikasi aset hak-guna menjadi aset tetap untuk peralatan kantor senilai Rp125.353.942.862 (Catatan 12).

14. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Harga Perolehan				
Lisensi *Software*	43.084.697.558	2.224.328.023	-	45.309.025.581
Sub Total	**43.084.697.558**	**2.224.328.023**	**-**	**45.309.025.581**
Akumulasi Penyusutan				
Lisensi *Software*	20.078.791.153	8.842.621.389	-	28.921.412.542
Sub Total	**20.078.791.153**	**8.842.621.389**	**-**	**28.921.412.542**
Nilai Buku	**23.005.906.405**			**16.387.613.039**

	2024			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Harga Perolehan				
Lisensi *Software*	33.513.328.562	9.571.368.996	-	43.084.697.558
Sub Total	**33.513.328.562**	**9.571.368.996**	**-**	**43.084.697.558**
Akumulasi Penyusutan				
Lisensi *Software*	13.163.118.341	6.915.672.812	-	20.078.791.153
Sub Total	**13.163.118.341**	**6.915.672.812**	**-**	**20.078.791.153**
Nilai Buku	**20.350.210.221**			**23.005.906.405**

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp8.842.621.389 dan Rp6.915.672.813 (Catatan 28).

15. UTANG USAHA

	31 Desember 2025	**31 Desember 2024**
Pihak Berelasi (Catatan 31)	55.216.709.588	78.474.809.180
Pihak Ketiga	401.760.763.227	371.170.594.962
Total	**456.977.472.815**	**449.645.404.142**

15. UTANG USAHA (lanjutan)

Akun ini terutama merupakan utang terkait pengadaan barang dan jasa, serta utang kepada perusahaan pelayaran terkait penjualan tiket terpadu.

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang Rupiah dan tidak ada jaminan yang diberikan yang diberikan oleh Grup atas perolehan utang ini.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	2025	2024
Entitas Anak - IFPRO		
Pajak Pertambahan Nilai	3.769.203.620	2.748.543.036
Pajak Penghasilan		
Pasal 28.a - 2025	2.173.001.722	-
Pasal 28.a - 2024	2.083.203.087	2.083.203.087
Pasal 28.a - 2023	2.396.757.661	2.396.757.661
Pasal 28.a - 2022	1.985.439.894	1.985.439.894
Total	**12.407.605.984**	**9.213.943.678**

b. Utang Pajak

	2025	2024
Perusahaan		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	17.822.647.483	19.772.120.412
Pasal 15	2.475.996.199	2.449.275.133
Pasal 29	1.954.074.122	2.159.699
Pasal 23	1.635.240.696	1.012.470.477
Pasal 25	1.492.640.959	1.764.498.201
Pasal 4 (2)	800.827.694	514.660.627
Pasal 22	386.775.442	547.699.896
Pajak Pertambahan Nilai Masukan (PPN Wapu)	5.762.237.249	7.334.360.968
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	3.518.792.699	3.855.340.744
Sub Total	**35.849.232.543**	**37.252.586.157**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak (lanjutan)

	2025	2024
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	3.126.015.264	3.563.639.306
Pasal 23	583.992.389	88.392.798
Pasal 21	2.635.046.720	216.931.727
Pasal 15	548.256.505	661.458.172
Pasal 22	-	-
Pasal 29	117.352.974	-
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	1.103.298	1.814.938
PB1	702.527.133	584.403.221
Sub Total	**7.714.294.283**	**5.116.640.162**
Jumlah	**43.563.526.826**	**42.369.226.319**

c. Pajak Kini

	2025	2024
Perusahaan		
Pajak Kini	24.302.273.160	24.588.646.720
Pajak Tangguhan	14.951.006.551	14.710.450.536
Sub Total	**39.253.279.711**	**39.299.097.256**
Entitas Anak		
Pajak Kini	147.533.479	-
Pajak Tangguhan	(14.578.952.358)	(14.176.183.227)
Sub Total	**(14.578.952.358)**	**(14.176.183.227)**
Konsolidasian		
Pajak Kini	24.449.806.639	24.588.646.720
Pajak Tangguhan	372.054.193	534.267.309
Total	**24.821.860.832**	**25.122.914.029**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Konsolidasian	310.252.253.125	472.428.881.489
Dikurangi: Laba (Rugi) Entitas Anak Sebelum Beban Pajak	(229.494.836.768)	(21.095.170.129)
Disesuaikan dengan Jurnal Eliminasi Konsolidasian	(29.835.639.732)	(68.021.942.777)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	**569.582.729.625**	**561.545.994.395**
Koreksi Non Final		
Beda Tetap		
Beban Pajak	52.918.074.752	100.210.754.064
Sumbangan	4.904.217.693	10.762.041.158
Denda Pajak	12.034.640.690	650.858.762
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi - Bersih	(8.823.982.648)	(6.647.453.790)
Pendapatan Denda/Klaim/Pinalti	(15.696.740.005)	(21.764.930.161)
Beban Jasa Administrasi Bank	(1.913.276.653)	-
Pendapatan Selisih Stock Opname	(3.255.848.718)	-
Beban Lainnya	-	-
Jumlah Beda Tetap	**40.167.085.111**	**83.211.270.033**
Beda Waktu		
Penyusutan Aset Tetap	(54.865.419.151)	(54.897.714.320)
Penyusutan Aset Hak-Guna	7.714.659.064	33.546.229.277
Liabilitas Sewa	(22.187.868.253)	(38.170.765.484)
Beban imbalan paska kerja (IPK) PSAK 219	(18.946.417.098)	(29.745.275.227)
Beban penyisihan piutang usaha	22.213.267.533	22.401.841.499
Jumlah Beda Waktu	**(66.071.777.905)**	**(66.865.684.255)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

	2025	2024
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final		
Beban Pokok Penyeberangan	1.827.060.114.751	1.720.491.113.666
Beban Usaha Penyeberangan	507.389.606.680	531.938.894.020
Beban Non Usaha	21.890.277.777	1.268.337.299
Pendapatan Jasa Administrasi Bank	390.201.476	-
Pendapatan Penyeberangan	(2.667.875.369.461)	(2.590.761.938.126)
Pendapatan Usaha Aneka Jasa atas Sewa	(31.492.748.140)	(37.530.453.178)
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	(90.575.241.938)	(91.530.956.915)
Jumlah Pendapatan - Dikenakan PPh Final	**(433.213.158.855)**	**(466.125.003.234)**
Penghasilan Kena Pajak	**110.464.877.976**	**111.766.576.930**
Penghasilan Kena Pajak - Dibulatkan	**110.464.878.000**	**111.766.576.000**
PPH Badan Terutang		
22% X Rp		
Beban Pajak Kini	**24.302.273.160**	**24.588.646.720**
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka		
Pasal 22	889.360.656	453.990.331
Pasal 23	3.547.146.886	2.958.518.290
Pasal 25	17.911.691.496	21.173.978.400
Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar di Muka	**22.348.199.038**	**24.586.487.021**
Utang Pajak Penghasilan - Perusahaan	1.954.074.122	2.159.699
Utang Pajak Penghasilan - Entitas Anak	117.352.974	-
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	**2.071.427.096**	**2.159.699**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

	2024	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Reklasifikasi	2025
Aset Pajak Tangguhan					
Entitas Anak					
Penyusutan Aset Tetap	(1.701.893.703)	(136.272.671)	-	-	(1.838.166.374)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	326.971.420	131.522.803	8.681.583	-	467.175.806
Penyisihan Piutang	1.435.933.081	-	-	-	1.435.933.081
Total Aset Pajak Tangguhan	**61.010.798**	**(4.749.868)**	**8.681.583**	**-**	**64.942.513**
Liabilitas Pajak Tangguhan					
Perusahaan					
Penyisihan Piutang	15.422.432.819	4.471.703.447	-	-	19.894.136.266
Aset Tetap	(69.577.093.298)	(12.070.392.213)	-	-	(81.647.485.511)
Aset Hak Guna	12.628.172.531	1.697.224.994	-	-	14.325.397.525
Liabilitas Sewa	(15.742.109.214)	(4.881.331.016)	-	-	(20.623.440.230)
Liabilitas Imbalan Kerja	24.971.090.370	(4.168.211.762)	1.216.537.509	-	22.019.416.117
Sub Total	**(32.297.506.792)**	**(14.951.006.550)**	**1.216.537.509**	**-**	**(46.031.975.833)**
Entitas Anak					
Selisih Nilai Wajar Kombinasi Bisnis	(35.842.926.216)	14.575.020.643	-	-	(21.267.905.573)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(68.140.433.008)**	**(375.985.907)**	**1.216.537.509**	**-**	**(67.299.881.406)**

	2024	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Reklasifikasi	2025
Aset Pajak Tangguhan					
Entitas Anak					
Penyusutan Aset Tetap	(1.569.026.910)	(132.866.793)	-	-	(1.701.893.703)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	314.281.285	116.836.191	(104.146.056)	-	326.971.420
Penyisihan Piutang	1.122.635.590	313.297.491	-	-	1.435.933.081
Total Aset Pajak Tangguhan	**(132.110.035)**	**(49.853.952.589)**	**(49.853.952.589)**	**(49.853.952.589)**	**61.010.798**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

	2024	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Reklasifikasi	2025
Perusahaan					
Penyisihan Piutang	10.494.027.689	4.928.405.130	-	-	15.422.432.819
Aset Tetap	(57.499.596.148)	(12.077.497.150)	-	-	(69.577.093.298)
Aset Hak-Guna	5.248.002.091	7.380.170.440	-	-	12.628.172.531
Liabilitas Sewa	(7.344.540.808)	(8.397.568.407)	-	-	(15.742.109.214)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	30.489.635.208	(6.543.960.550)	1.025.415.712	-	24.971.090.370
Sub Total	**(18.612.471.967)**	**(14.710.450.537)**	**1.025.415.712**	**-**	**(32.297.506.792)**
Entitas Anak					
Selisih Nilai Wajar Kombinasi Bisnis	(49.721.842.554)	13.878.916.338	-	-	(35.842.926.216)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	**(68.334.314.521)**	**(831.534.199)**	**1.025.415.712**	**-**	**(68.140.433.008)**

e. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Konsolidasian	310.252.253.125	472.428.881.480
Laba (Rugi) Entitas Anak Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(229.494.836.768)	(21.095.170.129)
Disesuaikan dengan Jurnal Eliminasi Konsolidasi	(29.835.639.732)	(68.021.942.777)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Rekonsiliasi (lanjutan)

	2025	2024
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	569.582.729.625	561.545.994.386
Laba Sebelum Pajak Setelah Pembulatan	569.582.730.000	561.545.994.000
Tarif Pajak yang Berlaku	22%	22%
Pajak Penghasilan Sesuai Tarif Pajak yang Berlaku	125.308.200.600	123.540.118.680
Pengaruh Pajak atas Beda Tetap	8.836.758.724	18.306.479.407
Pengaruh Pajak atas Beda Waktu	(14.951.006.551)	(14.710.450.536)
Pengaruh Pajak atas Pengaruh Koreksi Pajak Final	(95.306.895.025)	(102.547.500.831)
Beban Pajak Kini - Perusahaan	24.302.273.160	24.588.646.720
Beban Pajak Tangguhan - Perusahaan	14.951.006.551	14.710.450.536
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	39.253.279.711	39.299.097.256
Beban Pajak Kini - Entitas Anak	147.533.479	-
Beban Pajak Tangguhan - Entitas Anak	(14.578.952.358)	(14.176.183.227)
Beban Pajak Penghasilan	**24.821.860.832**	**25.122.914.029**

f. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Selama tahun 2025 Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar atas PPh 21 tahun fiskal 2020 sebesar Rp202,812,451, tahun fiskal 2021 sebesar Rp530.541.919, tahun fiskal 2023 sebesar Rp405.592.991, tahun fiskal 2024 Rp180.623.604.

Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar atas PPh 22 tahun fiskal 2023 sebesar Rp10.180.800, PPh 23 tahun 2023 sebesar Rp4.595.500, PPh Pasal 4 (2) tahun fiskal 2023 sebesar Rp1.995.866.452, PPh 15 tahun fiskal 2023 sebesar Rp33.516.212, STP atas PPh 25/29 tahun fiskal 2023 sebesar Rp7.926.042.175 dan PPN sebesar Rp744.868.586.

17. UTANG ASURANSI

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)		
PT Jasa Raharja (Persero)	5.014.593.620	4.937.337.274
PT Jasa Raharja Putera	21.839.480.747	20.898.891.608
Total	**26.854.074.367**	**25.836.228.882**

17. UTANG ASURANSI (lanjutan)

Akun ini merupakan utang kepada perusahaan asuransi terkait dengan asuransi kecelakaan penumpang, kendaraan bermotor dan barang-barang yang diseberangkan, serta barang lainnya yang dipertanggungkan.

18. BEBAN AKRUAL DAN PROVISI

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Akrual		
Umum	284.046.052.446	248.845.857.727
Administrasi Kantor	19.841.402.896	12.340.812.781
Kepelabuhanan	48.797.650	48.797.650
Lain-lain	819.791.667	819.791.667
Sub Total	**304.756.044.659**	**262.055.259.825**
Provisi (Catatan 33.a dan 33.b)	76.500.000.000	97.152.170.368
Total	**381.256.044.659**	**359.207.430.193**

19. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak Berelasi (Catatan 31)	**756.517.767**	**13.407.658.513**
Pihak Ketiga		
Sales Channel	63.039.624.138	38.506.171.492
Asuransi dan Kesejahteraan Karyawan	4.226.944.597	8.069.235.625
Utang Pelayaran	8.397.977.137	14.511.633.164
Uang Jaminan	8.226.802.817	8.003.462.947
Lain-lain	37.308.736.573	35.059.527.254
Sub Total	**121.200.085.262**	**104.150.030.482**
Total	**121.956.603.029**	**117.557.688.995**

20. UTANG BANK

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Bank Jangka Pendek		
Kredit Modal Kerja		
Entitas Anak - JN		
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	-	23.836.020.000
Total	**-**	**23.836.020.000**
Utang Bank Jangka Panjang		
Kredit Investasi		
Perusahaan		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	225.000.000.000	375.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	122.655.500.000	147.218.500.000
Sub Total	**347.655.500.000**	**522.218.500.000**
Entitas Anak - JN		
Pihak Berelasi		
Pokok Utang		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	85.683.372.789	115.350.317.294
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	32.395.531.905	66.600.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	6.999.999.999
Bunga Ditangguhkan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.665.585.933
Sub Total	**118.078.904.694**	**190.615.903.226**
Total	**465.734.404.694**	**712.834.403.226**
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(259.697.547.739)	(263.432.165.478)
Total Utang Bank Jangka Panjang	**206.036.856.955**	**449.402.237.748**

20. UTANG BANK (lanjutan)

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si., di Jakarta, tanggal 21 Maret 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *Term Loan* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp159.500.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku delapan tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 18 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7,25% per tahun untuk tahun pertama dan kedua, serta sebesar *reference rate* (JIBOR 3M) ditambah margin (0,75% per tahun) untuk tahun ketiga sampai dengan fasilitas kredit berakhir. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai peningkatan kapasitas Dermaga II di Pelabuhan Merak dan peningkatan kapasitas dermaga Ponton menjadi *Moveable Bridge* di Pelabuhan Gilimanuk. Perjanjian kredit ini tidak dijamin secara preferen dengan agunan kebendaan, pendapatan atau aktiva lain dalam bentuk apapun.

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perusahaan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 150%, dan menjaga *Debt Service Coverage Ratio* diatas 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan:

- Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan;
- Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan yang wajar;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar
- Menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain kecuali aset yang telah dijaminkan sebelumnya kepada kreditur eksisting.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp122.655.500.000 dan Rp147.218.500.000 Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.563.000.000 dan Rp12.280.500.000.

20. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1-4 yang dibuat dihadapan Notaris Sriyani Burlian, S.H di Jakarta tanggal 25 Mei 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Transaksi Khusus dengan batas maksimum kredit sebesar Rp975.000.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku lima tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 12 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7% per tahun. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai transaksi dengan PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP terkait akuisisi 100% saham PT Jembatan Nusantara, pelunasan kapal afiliasi dan pengalihan kapal, dan *refinancing shareholder* atas pelunasan pinjaman kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk dan PT Chandra Sakti Utama.

Pinjaman ini dijamin dengan:
- Saham PT Jembatan Nusantara dengan nilai penjaminan Rp873.953.000;
- Deposito giro yang dimiliki dalam bentuk jaminan gadai dengan nilai penjaminan Rp275.000.000.000 (Catatan 10).

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perusahaan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, kolektibilitas fasilitas kredit dalam keadaan lancar, rasio *Debt Equity Ratio* maksimal 150%, dan menjaga rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis Perusahaan tidak diperkenankan:
- Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini;
- Mengagunkan aset Perusahaan termasuk aset JN kecuali aset yang telah dijaminkan pada saat transaksi akuisisi ini dilakukan;
- Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan yang wajar;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
- Mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi secara negatif kelancaran usaha Perusahaan;
- Melakukan divestasi aset/penjualan saham JN;
- Perusahaan dilarang untuk menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp225.000.000.000 dan Rp375.000.000.000. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp150.000.000.000.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN)

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 37 tanggal 29 April 2024 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk operasional JN.

Perjanjian ini telah diaddendum melalui surat No. 60041/GBK/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Kredit	: Rp50.000.000.000
Tingkat Bunga	: 8,25% per tahun
Jangka Waktu	: 3 bulan setelah tanggal penarikan
Tujuan	: Modal Kerja

Selama JN belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, perusahaan tidak diperkenankan melakukan:

- Memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali pinjaman atau tambahan pinjaman yang diterima Debitor tersebut tidak menyebabkan Debitor melanggar ketentuan rasio keuangan.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain, kecuali untuk menjamin utang/pinjaman perusahaan yang secara keuangan terkonsolidasi dengan ASDP.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan divestasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.
- Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar.
- Mengubah susunan para pemegang saham, kecuali Debitor melakukan Initial Public Offering (IPO).

Selama JN memiliki fasilitas kredit di BCA, maka JN diwajibkan untuk:

- Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan modal kerja JN.
- Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap JN.
- Memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut JN, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang dapat memengaruhi usaha, keadaan keuangan, dan/atau harta kekayaan JN serta dapat mengganggu kemampuan JN untuk melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

- Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat dan ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
- Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh JN.
- Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha JN.
- Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
  - Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
  - Laporan keuangan *unaudited* triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Mempertahankan rasio keuangan ASDP konsolidasi berupa:
  - *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* yaitu perbandingan antara kewajiban/utang berbunga terhadap ekuitas maksimal 3 (tiga) kali.
  - *Current Ratio* yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali.
- Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada JN selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan dilakukan.
- JN wajib melunasi seluruh outstanding jumlah terutang yang ada di BCA apabila fasilitas kredit yang diterima ASDP dari BCA diakhiri, dilunasi atau ditutup.

Pada 31 Desember 2025, JN telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jumlah pemakaian fasilitas pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp88.397.676.517. Nilai terutang pada 31 Desember 2025 sebesar nihil. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp134.251.707.002

Berdasarkan surat addendum kedua dengan nomor 464/add-KCK/2025, tanggal 22 Desember 2025, telah dilakukan perpanjangan perjanjian yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2026.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. BNISy/CRD/288/R tanggal 29 Juni 2018, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui akta No 35 tanggal 26 Februari 2026, yang didasari Surat Penawaran Restrukturisasi nomor 06/014-3/SP3/CB1 tanggal 24 Februari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah
Plafon Kredit : Rp85.683.372.789
Nisbah
Bagi Hasil : Bank 33,00% dan Nasabah 67,00%
Jangka Waktu : Sampai dengan 25 Desember 2030
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas Musyarakah Mutanaqisah

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset JN (Catatan 12):
- 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Mahkota Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2296 tanggal 29 Mei 2009 dan Akta Hipotek Pertama No. 17/2018 tanggal 8 Agustus 2018;
- 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Safira Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4947 tanggal 6 Maret 2012 dan Akta Hipotek Pertama No. 50/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:
- Perbandingan antara aset lancar dan utang lancar harus diupayakan minimal 1,0 kali;
- Perbanding antara jumlah utang dengan modal maksimal 2,2 kali;
- Perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran minimal 1,0 kali;
- Tidak menjual atau memindahtangankan aset yang diagunkan/dijaminkan di bank;
- Tidak mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan aset JN yang telah diagunkan/dijaminkan kepada bank;
- Tidak mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
- Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan Addendum Restrukturisasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No 35, tanggal 26 Februari 2026 (Catatan 30), Perusahaan sudah memenuhi rasio keuangan dan pembatasan yang disyaratkan.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp85.683.732.789 dan Rp115.350.317.294. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.666.944.505 dan Rp24.429.222.682.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 8 dan 9 tanggal 8 Maret 2017 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta, JN memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk operasional JN.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami adendum, adapun perubahan terakhir yaitu melalui Akta No. 28 dan 29 tanggal 29 Juni 2021 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp131.800.000.000
Tingkat Bunga : 11,50% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 8 Februari 2025

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
i. Piutang usaha (Catatan 5);
ii. Kapal (Catatan 12); dan
iii. Persediaan (Catatan 8).

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:
- Tidak melakukan merger dan go public;
- Tidak melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan yang menyebabkan kepemilikan saham menjadi minoritas;
- Tidak mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang;
- Tidak memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga lain;
- Tidak melakukan investasi, peluasan usaha atau penjualan aset melebihi Rp100.000.000.000;
- Tidak melakukan pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank;
- Tidak melakukan perlunasan dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di bank dilunasi;
- Tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan pihak berelasi dengan alasan apapun.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, JN telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp6.999.999.999. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.999.9999.999 dan Rp46.800.000.000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.006 tanggal 19 Agustus 2016 dan persetujuan pemberian fasilitas kredit No. SPM/2.1/308/R tanggal 28 Agustus 2016, JN memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian di restrukturisasi melalui akta No. 86 tanggal 14 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp87.550.000.000
Jangka Waktu : Sampai dengan 18 Agustus 2024
Tingkat Bunga : 11,25% per tahun
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Berdasarkan Surat Nomor COB3/5/588 tanggal 24 September 2025 perjanjian kredit dengan nomor ENB/4.1/006/R tanggal 5 Januari 2023 telah lunas per tanggal 28 Agustus 2025.

Berdasarkan perjanjian kredit 009/SPM/PKKI/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian di restrukturisasi melalui akta No. 26 tanggal 10 Februari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp32.395.544.569
Tingkat Bunga : 8,50% per tahun dengan pembebanan 9,00% dan 2,25% ditangguhkan
Jangka Waktu : Sampai dengan 30 Januari 2033
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
i. Piutang usaha (Catatan 5);
ii. Kapal (Catatan 12); dan
iii. Persediaan (Catatan 8).
iv. Tanah dan Bangunan (Catatan 9).

JN diwajibkan untuk menjaga *current ratio* minimal 1 kali, *debt equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan *debt service coverage* minimal 100,00%.

20. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak – PT Jembatan Nusantara (JN) (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis PT Jembatan Nusantara tidak diperkenankan:

- Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain;
- Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham;
- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan kepailitan;
- Mengubah bidang usaha;
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan atau kewajiban saudara yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
- Menarik kembali modal yang disetor;
- Merubah bentuk atau status hukum JN, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) berupa memindahtangankan saham JN baik antar pemegang saham maupun kepada kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan;
- Menjual atau menjaminkan harta kekayaan JN kepada pihak lain termasuk unit-unit kapal yang belum menjadi jaminan/agunan di bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Menerima fasilitas kredit kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya;
- Melakukan marger akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan kepada JN lain;
- Melakukan investasi yang melebihi proceed JN;
- Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham JN kepada pihak manapun;
- Melakukan interfinancing dengan JN afiliasi, induk JN dan atau anak JN kecuali yang berhubungan dengan operasional JN;
- Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
- Melunasi selusuh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI;
- Melunasi atau membayar pokok atau biaya bunga dan atau biaya-biaya lainya atas pinjaman kepada pihak yang telah disetujui atau ditetapkan dalam perjanjian kredit, akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan atau afiliasinya;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim atau wajar berdasarkan penilaian BNI.

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No (03) 009/SPM-KI/2019, tanggal 10 Februari 2026 Perusahaan sudah memenuhi rasio keuangan dan pembatasan yang disyaratkan.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.395.546.905 dan Rp68.265.585.933. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp35.870.039.034 dan Rp46.546.757.817.

21. PERJANJIAN SINDIKASI

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pinjaman Sindikasi Jangka Panjang		
Entitas Anak - IFPRO		
Pihak Berelasi (Catatan 31)		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	94.000.000.000	98.000.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	550.400.000.000	580.700.000.000
Sub Total	**644.400.000.000**	**678.700.000.000**
Dikurangi: Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(12.336.623.851)	(13.497.582.184)
Total	**632.063.376.149**	**665.202.417.816**
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(44.400.000.000)	(34.300.000.000)
Bagian Jangka Panjang	**587.663.376.149**	**630.902.417.816**

Perjanjian Sindikasi

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 pada tanggal 18 Desember 2023 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, IFPRO memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dari PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) pihak ketiga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), pihak berelasi dengan *limit* kredit fasilitas sebesar Rp705.000.000.000 dengan *outstanding* sebagai berikut:

	Plafond	2025	2024
BCA			
Tranche I.A	200.000.000.000	188.000.000.000	196.000.000.000
Tranche I.B	100.000.000.000	94.000.000.000	98.000.000.000
Tranche III	305.000.000.000	268.400.000.000	286.700.000.000
LPEI			
Tranche I.C	100.000.000.000	94.000.000.000	98.000.000.000
Total	**705.000.000.000**	**644.400.000.000**	**678.700.000.000**

21. PERJANJIAN SINDIKASI (lanjutan)

IFPRO wajib menggunakan Fasilitas sesuai dengan tujuan pinjaman, yaitu:

a) Fasilitas Kredit Investasi I:

i. Tranche I.A, Fasilitas ini digunakan untuk melakukan pelunasan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Eksisting dan/atau pelunasan Fasilitas Kredit Eksisting yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial di Kawasan Wisata Labuan Bajo dengan suku bunga 7,75%.
ii. Tranche I.B, Fasilitas ini digunakan untuk pelunasan Pinjaman Pemegang Saham Eksisting yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial di Kawasan Wisata Labuan Bajo dengan suku bunga 7,50%.
iii. Tranche I.C, Fasilitas ini digunakan untuk pelunasan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Eksisting dan/atau pelunasan Hutang kepada Kontraktor yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial Bajo di Kawasan Wisata Labuan bajo dengan suku bunga 6%.

b) Fasilitas Kredit Investasi III:

Fasilitas ini akan digunakan pembayaran kembali dengan menggunakan fasilitas baru *(refinancing)* Fasilitas Kredit Eksisting, baik secara *take over* maupun yang telah dilunasi menggunakan pinjaman pemegang saham yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni dengan suku bunga 7,75%.

Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah maksimal 12 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi I adalah 144 bulan sejak tanggal perjanjian.
- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi *Tranche* II adalah 180 bulan sejak tanggal perjanjian.
- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi *Tranche* III adalah 144 bulan sejak tanggal perjanjian.

Antara IFPRO dengan PT Bank Central Asia Tbk, dijamin dengan:
- Gadai Atas Rekening Penampungan.
- Kuasa untuk Mengelola dan Melakukan Penarikan dari Rekening. Kuasa untuk yang diberikan IFPRO kepada BCA atas rekening yang digadaikan, sebagai berikut:
  1. Rekening Pengumpulan *(Collection Account)* nomor 2050050109
  2. Rekening Proyek (*Project Account*) nomor 2050050206
  3. Rekening Pembayaran Utang (*Debt Service Account*) nomor 2050050192
  4. Rekening Cadangan Pembayaran Utang (*Debt Service Reserve Account*) nomor 2050050176
  5. Rekening Penjaminan Kredit (*Credit Guarantee Account*) nomor 2050050184
  6. Rekening Operasional nomor 2050050087
     - *Cessie* piutang sebagai jaminan atas hak dalam perjanjian kerja sama.
     - Kuasa untuk menjual aset berupa bangunan di Merak, Bakauheni serta Labuan Bajo.

21. PERJANJIAN SINDIKASI (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, IFPRO harus menjaga rasio keuangan berikut yang harus dipenuhi 12 tahun setelah penandatanganan perjanjian kredit ini yaitu:

a) Debitur harus memastikan bahwa:
   i. Rasio Utang terhadap Ekuitas dari Debitur tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali;
   ii. Rasio Lancar dari Debitur tidak boleh kurang dari 1 (satu) kali; dan
   iii. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dari Debitur tidak boleh kurang dari 1 (satu) kali.

b) Debitur wajib mempertahankan ekuitas tetap positif.

Pada tanggal 31 Desember 2025, IFPRO telah mematuhi seluruh hal-hal yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Total liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing dihitung oleh Konsultan Aktuaris Independen.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dana Pensiun	437.114.028	31.163.186.450
Imbalan Pascakerja	106.206.795.096	86.144.865.062
Total Liabilitas	**106.643.909.124**	**117.308.051.512**

a) Dana Pensiun

Program Pensiun Iuran Pasti

Biaya pensiun iuran pasti masing-masing pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.178.786.639 dan Rp8.241.274.302 yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI untuk kompensasi pensiun pegawai.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk sebagian besar karyawan yang memenuhi persyaratan. Program dana pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang peraturannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Program dana pensiun memberikan imbalan pascakerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Jumlah karyawan Perusahaan peserta dana pensiun masing-masing adalah 875 dan 1.027 pada 31 Desember 2025 dan 2024.

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

a) Dana Pensiun (lanjutan)

Liabilitas program pensiun manfaat pasti karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Nilai Kini Liabilitas	358.797.297.057	348.893.612.078
Nilai Wajar Aset Program	(358.360.183.029)	(317.730.425.628)
Liabilitas yang Diakui	**437.114.028**	**31.163.186.450**

Mutasi atas nilai kini liabilitas program pensiun manfaat pasti karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	348.893.612.078	321.244.714.267
Perubahan yang Dibebankan ke Laba Rugi:		
Biaya Jasa Kini	5.219.833.743	5.651.156.800
Biaya Bunga	23.630.085.861	21.303.310.491
	28.849.919.604	**26.954.467.291**
Pengukuran Kembali Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain:		
Efek Perubahan dari Asumsi Demografik	-	(453.459.712)
Efek Perubahan dari Asumsi Keuangan	3.387.577.796	(1.120.207.884)
Efek Perubahan dari Penyesuaian Pengalaman	2.052.673.742	24.489.737.924
	5.440.251.538	**22.916.070.328**
Pembayaran Imbalan	(24.386.486.164)	(22.221.639.808)
Saldo Akhir	**358.797.297.056**	**348.893.612.078**

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

a) Dana Pensiun (lanjutan)

Mutasi atas nilai wajar aset program Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	(317.730.425.628)	(294.182.785.658)
Perubahan yang Dibebankan ke Laba Rugi:		
Penghasilan Bunga	(21.542.152.369)	(19.544.285.132)
	(21.542.152.369)	**(19.544.285.132)**
Pengukuran Kembali Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain:		
Imbal Hasil atas Aset Program	11.499.131.842	8.993.693.286
	11.499.131.842	**8.993.693.286**
Iuran Pemberi Kerja	(31.974.959.354)	(35.218.687.932)
Pembayaran Manfaat	24.386.486.164	22.221.639.808
Saldo Akhir	**(335.361.919.345)**	**(317.730.425.628)**

b) Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan pascakerja dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Nilai Kini Liabilitas	106.206.795.096	86.144.865.062
Nilai Wajar Aset	-	-
Liabilitas yang Diakui	**106.206.795.096**	**86.144.865.062**

Beban imbalan pascakerja Grup dialokasikan pada beban produksi dan beban usaha sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Biaya Jasa Kini	11.097.489.920	9.207.242.405
Biaya Bunga	5.788.006.248	6.841.607.842
Biaya Jasa Lalu	1.573.347.016	(1.061.598.308)
Kurtailmen	-	(2.012.925.547)
Beban Diakui	**18.458.843.184**	**12.974.326.392**

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

b) Imbalan Pasca Kerja

Perubahan liabilitas imbalan pascakerja dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Liabilitas Awal Tahun	86.144.865.062	117.259.041.731
Pembayaran Imbalan	(21.740.260.831)	(15.590.032.046)
Beban Tahun Berjalan	30.167.101.710	12.974.326.392
Penghasilan Komprehensif Lain	11.635.089.155	(28.498.471.015)
Liabilitas Akhir Tahun	**106.206.795.096**	**86.144.865.062**

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	49.602.034.071	78.100.505.086
Dampak Perubahan Asumsi Keuangan	39.461.739	(3.337.182.789)
Dampak Penyesuaian Pengalaman	7.031.162	(25.161.288.226)
Dampak Penyesuaian Demografik	-	-
Saldo Akhir Tahun	**49.648.526.972**	**49.602.034.071**

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

a. Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

b. Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

b) Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Analisa Sensitivitas

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisa sensitivitas di bawah ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

	2025		2024	
	Dana Pensiun	Imbalan Pascakerja	Dana Pensiun	Imbalan Pascakerja
Analisa Sensivitas Tingkat Diskonto				
Jika Tingkat +1%	354.077.339.212	85.738.961.593	343.637.790.574	74.410.136.220
Jika Tingkat -1%	363.866.005.894	116.177.547.005	354.558.848.898	100.001.908.917
Analisa Sensivitas Kenaikan Gaji				
Jika Tingkat +1%	364.478.698.154	116.974.274.669	355.258.409.673	100.762.591.781
Jika Tingkat -1%	353.418.670.708	84.849.752.904	342.892.801.655	73.589.955.281

Profil Jatuh Tempo Pembayaran Imbalan Pascakerja adalah:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Nilai Kini Manfaat Diharapkan akan Dibayar di:		
- sampai dengan 2 tahun	18.742.581.047	15.667.190.865
- 2 sampai dengan 5 tahun	13.598.585.827	11.827.171.607
- 5 sampai dengan 10 tahun	27.315.184.753	21.757.549.295
- diatas 10 tahun	46.550.443.469	36.892.953.295

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Usia pensiun	56 tahun	56 tahun
Tingkat kematian	GGAM - 1971 (ASDP, IFPRO and JN: TMI IV)	GGAM - 1971 (ASDP, IFPRO and JN: TMI IV)
Tingkat cacat:		
Usia 20 - 55 tahun	0,01% (JN: 10% dari TMI IV)	0,01% (JN: 10% dari TMI IV)

22. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

b) Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tingkat pengunduran diri:		
Usia 18 - 45 tahun	4% per tahun	4% per tahun
Usia 46 - 55 tahun	10% pada usia 46, turun 1% linier sampai usia 55	10% pada usia 46, turun 1% linier sampai usia 55
Kenaikan Gaji	6% per tahun (IFPRO: 8% per tahun, JN: 4% per tahun)	6% per tahun (IFPRO: 8% per tahun, JN: 4% per tahun)
Tingkat Diskonto	5,97% per tahun (IFPRO: 6,93% per tahun, JN: 7,12% per tahun)	5,97% per tahun (IFPRO: 6,93% per tahun, JN: 7,12% per tahun)
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*

23. MODAL SAHAM

Sesuai dengan Akta No. 20 tanggal 23 Juni 2025 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0303880 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang perubahan nama pemegang saham perseroan yang sebelumnya adalah perusahaan perseroran (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management.

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2025			
	Saham (Lembar)	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Kepemilikan (%)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)
PT Danantara Asset Management	5.561.759	1.000.000	99,99%	5.561.759.000.000
Negara Republik Indonesia	1	1.000.000	0,01%	1.000.000
			TOTAL	**5.561.760.000.000**

Pemegang Saham	31 Desember 2024			
	Saham (Lembar)	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Kepemilikan (%)	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)
Negara Republik Indonesia	5.561.760	1.000.000	100	5.561.760.000.000

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 2 Juli 2024 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0039757.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 3 Juli 2024, Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp388.565.000.000 (388.565 lembar saham) yang berasal dari tambahan modal disetor dan Penggunaan Saldo Laba (Catatan 24 dan 25).

Mutasi lembar saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah Saham Awal Tahun	5.561.760	5.173.195
Penambahan	-	388.565
Jumlah Saham Akhir Tahun	**5.561.760**	**5.561.760**

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Pengalihan Aset Perum		
Saldo Awal	7.741.162.065	7.741.162.065
Pemindahan ke Modal Saham	-	-
Sub Total	**7.741.162.065**	**7.741.162.065**
b. Pengampunan Pajak		
Aset Tetap - Kendaraan	594.200.000	594.200.000
Aset Tetap - Tanah dan Bangunan	110.000.000	110.000.000
Sub Total	**704.200.000**	**704.200.000**
c. Penyertaan Modal		
Aset Tetap - Kapal	-	388.564.810.000
Pemindahan ke Modal Saham (Catatan 23)	-	(388.564.810.000)
Sub Total	**-**	**-**
Total	**8.445.362.065**	**8.445.362.065**

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak No. 09300001103 tertanggal 4 Januari 2017, dengan uang tebusan yang dibayarkan ke kas negara sebesar Rp35.210.000 dan tambahan harta yang dilaporkan untuk Program Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp704.200.000.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 67 Tahun 2023 tentang penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan menerima 12 unit kapal senilai Rp388.564.810.000.

25. PENGGUNAAN SALDO LABA

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Juni 2025 dan tanggal 4 Juni 2024, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp438.744.684.039 dan 613.449.069.695.

Mutasi penggunaan saldo laba laba yang ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Awal	2.413.803.355.650	1.831.026.929.440
Laba Bersih Periode Lalu	438.744.684.039	613.449.069.695
Reklasifikasi ke Modal Disetor	-	(190.000)
Pembagian Dividen Tunai	(44.964.111.493)	(30.672.453.485)
Saldo Akhir	**2.807.583.928.196**	**2.413.803.355.650**

26. PENDAPATAN USAHA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyeberangan dan Lintas Perintis	3.109.897.045.967	3.237.559.962.732
Pelabuhan	1.234.969.760.124	1.171.851.359.127
Aneka Jasa dan Kerjasama	617.597.832.153	615.147.504.305
Total	**4.962.464.638.244**	**5.024.558.826.164**

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyeberangan dan Lintas Perintis	2.420.649.477.447	2.267.587.794.127
Pelabuhan	407.010.195.255	534.895.886.610
Aneka Jasa dan Kerjasama	749.357.713.948	595.120.181.817
Total	**3.577.017.386.650**	**3.397.603.862.554**

27. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Termasuk dalam beban pokok pendapatan, beban penyusutan aset tetap dan aset hak-guna, kerugian penghapusan aset tetap serta beban gaji dan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Gaji dan Tunjangan	621.287.138.001	630.900.759.864
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 12)	536.337.051.883	477.643.954.510
Beban Kerugian Penghapusan Aset Tetap (Catatan 12)		1.450.453.444
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 13)	7.331.378.563	7.045.007.768
Total	**1.164.955.568.447**	**1.117.040.175.586**

28. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gaji dan Tunjangan	509.058.394.873	475.508.803.655
Jasa Profesional	140.119.493.658	114.447.838.022
Pemeliharaan	84.497.398.076	61.046.123.228
Pajak	70.839.947.238	80.840.579.128
Penyusutan (Catatan 12)	65.328.212.726	58.741.548.592
Perjalanan Dinas	64.275.628.163	55.793.819.987
Telekomunikasi dan Perlengkapan Kantor	44.514.852.553	48.303.479.429
Representasi, Jamuan dan Sumbangan	36.426.310.797	28.666.025.731
Penurunan Nilai Piutang (Catatan 5, 7 dan 10)	20.168.837.938	27.656.782.592
Pendidikan dan Pelatihan	18.132.178.361	20.900.639.028
BBM, Listrik, dan Air	15.282.767.142	16.266.990.926
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	10.182.808.832	8.085.674.794
Amortisasi (Catatan 14)	8.842.621.389	6.915.672.812
Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 13)	5.679.759.890	28.250.111.287
Lain-lain (Dibawah Rp4 Milyar)	9.134.509.197	31.588.649.852
Total	**1.102.483.720.833**	**1.063.012.739.063**

29. PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Lainnya		
Pendapatan Non Usaha Lainnya	34.310.189.497	37.418.987.539
Denda/Klaim/Pinalti	31.105.986.776	29.840.892.161
Pemulihan Nilai Piutang (Catatan 5 dan 7)	23.297.605.180	24.339.094.181
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi (Catatan 11)	11.193.982.648	1.921.053.790
Laba Selisih Kurs	1.913.276.653	-
Total	**101.821.040.754**	**93.520.027.671**
Beban Lainnya		
Denda Pajak	13.427.519.039	653.783.469
Denda/Klaim/Pinalti	9.256.890.140	88.254.704.554
Beban di Luar Usaha Lainnya	7.551.308.813	8.197.929.260
Rugi Selisih Kurs	-	16.064.248
Jasa Administrasi Bank	698.292.167	1.412.665.853
Beban Penurunan Nilai (Catatan 12)	-	9.857.030.241
Total	**30.934.010.159**	**108.392.177.625**

30. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Keuangan		
Pendapatan Bunga Deposito	54.296.160.230	50.462.044.259
Pendapatan Jasa Giro	37.698.380.985	26.922.324.023
Total	**91.994.541.215**	**77.384.368.282**
Beban Keuangan		
Beban Bunga Pinjaman Bank	63.501.122.473	76.151.188.059
Beban Bunga Utang Pembiayaan	32.034.159.885	37.135.895.687
Bunga Aset Hak-Guna (Catatan 13)	3.386.651.577	2.131.600.846
Beban Bunga Pinjaman kepada Kepentingan Non Pengendali	-	-
Total	**98.921.933.935**	**115.418.684.592**

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas/ Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan	
	2025	2024	2025	2024
Bank (Catatan 4)				
Rupiah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	347.641.313.038	281.769.139.882	3,00	2,47
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	32.941.429.792	157.984.472.927	0,33	1,38
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	542.249.923.473	151.546.064.680	4,70	1,33
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.411.148.856	149.130.976.441	0,33	1,31
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	76.233.511.977	63.926.809.388	0,66	0,56
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.466.054.149	1.408.130.895	0,02	0,01
Euro				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.298.433	8.248.383	0	0
Total	**1.039.950.679.718**	**805.773.842.596**	**9,04**	**7,06**
Deposito (Catatan 4)				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	310.000.000.000	310.000.000.000	2,68	2,72
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000	1,73	1,75
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90.864.170.000	139.354.470.000	0,43	1,22
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	25.000.000.000	100.000.000.000	0,87	1,1
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000.000.000	125.000.000.000	0,87	0,88
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	10.000.000.000	-	0,87	0,88
Total	**735.864.170.000**	**874.354.470.000**		**7,67**
Piutang Usaha (Catatan 5)				
Kementerian Perhubungan	37.785.607.750	10.357.866.230	0	0,09
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	792.910.237	729.812.547	0,01	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	54.463.179	742.223.411	0	0,01
PT PP (Persero) Tbk	23.367.503		0	0
PT Telkomsel	13.652.743	247.062.373	0	0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.531.012	118.400.907	0	0
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	-	141.105.250	0	0
Lain-lain	157.383.184	371.900.973	0	0
Sub Total	**38.838.915.608**	**12.708.371.691**	**0,01**	**0,11**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(242.619.263)	(814.020.699)	-0,01	-0,01
Total	**38.596.296.345**	**11.894.350.992**	**0,0**	**0,1**

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas/ Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan	
	2025	2024	2025	2024
Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Catatan 7)				
Kementerian Perhubungan	147.994.697.043	138.549.727.451	1,11	1,21
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.932.485.932	25.280.969.345	0,44	0,22
Perum DAMRI	134.868.000	134.868.000	0	0
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	662.149.000	133.113.800	0,01	0
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	109.999.047	125.218.728	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	32.925.075	-	0	0
Lain-lain	324.906.092	191.917.778	0,20	0
Sub Total	**200.192.030.189**	**164.415.815.102**	**1,76**	**1,44**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(39.202.909.167)	(19.013.462.138)	-0,34	-0,17
Total	**160.989.121.022**	**145.402.352.964**	**1,42**	**1,27**
Utang Usaha (Catatan 15)				
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	20.318.181.818	35.412.428.198	0,88	1,36
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	8.033.232.000	7.054.387.398	0,35	0,27
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	5.013.302.037	3.970.977.566	0,22	0,15
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	4.449.546.594	5.183.440.101	0,19	0,2
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	4.089.248.874	-	0,18	--
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	3.636.254.178	1.889.678.156	0,16	0,07
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.657.576.225	3.993.812.922	0,07	0,15
PT Dok dan Perkapalan Surabaya	1.406.694.060	-	0,06	0,00
PT Jasa Raharja Putera	1.112.929.151	885.890.320	0,05	0,03
PT PLN (Persero)	759.521.525	1.390.645.271	0,03	0,05
PT Surveyor Indonesia	493.201.575	-	0,02	--
PT Angkasa Pura Support	479.189.432	-	0,02	--
PT Bina Karya (Persero)	287.878.500	620.515.572	0,01	0,02
PT BRI Multifinance Indonesia	286.391.248	663.782.929	0,01	0,03
PT BGR Logistik Indonesia	245.000.000	391.850.000	0,01	0,02
PT Pos Indonesia (Persero)	212.411.054	169.611.254	0,01	0,01
PT Asuransi ASEI Indonesia	180.800.000	-	0,01	--
PT Yodya Karya (Persero)	172.062.500	172.062.500	0,01	0,01
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	-	156.387.300	0,00	0,01
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)		14.063.589.610	0,00	0,54
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		572.522.522	0,00	0,02
PT Amarta Karya (Persero)		1.190.960.000	0,00	0,05
Lain-lain	2.383.288.817	692.267.561	0,10	0,03
Total	**55.216.709.588**	**78.474.809.180**	**2,38**	**3,02**

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas/ Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan	
	2025	2024	2025	2024
Utang Asuransi (Catatan 17)				
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	21.839.480.747	20.898.891.608	0,89	0,8
PT Jasa Raharja Putera	5.014.593.620	4.937.337.274	0,22	0,19
Total	**26.854.074.367**	**25.836.228.882**	**1,11**	**0,99**
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya (Catatan 19)				
Kementeria Perhubungan (pel. Tg. Api Api)	538.818.775	-	0.02	0
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	23.772.724	606.735.669	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	12.600.000.000	0	0,25
Lain-lain	193.926.268	200.922.844	0,01	0
Total	**756.517.767**	**13.407.658.513**	**0,01**	**0,25**
Pinjaman Sindikasi (Catatan 21)				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	94.000.000.000	98.000.000.000	3,88	3,75
Total	**94.000.000.000**	**98.000.000.000**	**3,88**	**3,75**
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya				
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.542.940.176	1.542.940.176	0,06	0,06
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	322.624.767	242.160.000	0,01	0,01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.824.729	45.925.000	--	--
Lain-lain	5.147.100	-	--	--
	1.921.536.772	**1.831.025.176**	**0,07**	**0,07**
Gaji dan Tunjangan				
Dewan Komisaris	14.846.127.911	23.093.750.203	1,3	2,1
Dewan Direksi	22.125.300.000	40.256.332.451	2,0	3,65
	36.971.427.911	**63.350.082.654**	**3,3**	**5,75**
Pendapatan Usaha				
Kementerian Perhubungan	406.015.934.998	364.490.540.544	8,19	7,25
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	9.659.216.044	0	0,19
PT Asuransi Jasa Raharja Putera	29.730.753.454	-	0,60	0,19
PT Patra Logistik	16.897.519.420	-	0,34	0,19
PT Jasa Raharja	6.291.330.867	-	0,13	0,19
PT Elnusa Petrofin	4.052.421.837	-	0,08	0,19
PT Pos Indonesia	702.056.300	-	0,01	0,19
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	466.582.568	-	0,01	0,19
PT Pegadaian	375.480.000	-	0,01	0,19
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	130.217.350	-	0	0,19
Lain-lain	650.119.792	-	0,01	0,19
	465.312.416.586	**374.149.756.588**	**9,38**	**9,15**

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas/ Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan	
	2025	2024	2025	2024
Pembelian				
PT Pertamina (Persero)	1.029.642.937.899	1.034.548.086.399	28,75	30,35
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	14.382.853.842	13.529.661.053	0,4	0,4
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	8.142.301.583	-	0,23	0
	1.052.168.093.324	**1.048.077.747.452**	**29,38**	**30,75**

Hubungan dan jenis akun atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No	Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun atau Transaksi
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Utang Bank, Pendapatan yang Masih Harus Diterima
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Utang Bank
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Utang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima
5	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Utang Usaha, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Pendapatan Usaha
7	PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha, Utang Asuransi, Utang Usaha
8	Kementerian Perhubungan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Pendapatan Usaha, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

No	Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun atau Transaksi
9	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Pendapatan Klaim
10	PT Jasa Raharja Putera	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pendapatan Usaha, Utang Asuransi
11	Perum DAMRI	Entitas Sepengendali	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
12	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pendapatan Usaha
13	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha, Utang Usaha
14	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
15	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Sepengendali	Liabilitas Lain-lain
16	PT Telkomsel	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
17	PT Telkom Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
18	PT Dok dan Perkapalan Air Kantung	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
19	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
20	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
21	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
22	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
23	PT Surveyor Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
24	PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
25	PT Yoda Karya (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
26	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas Sepengendali	Pinjaman Sindikasi
27	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
28	PT PLN (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

No	Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun atau Transaksi
29	Angkasa Pura Suport	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
30	PT BGR Logistik	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
31	PT Asuransi ASEI Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
32	PT Bina Karya (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
33	PT BRI Multifinance Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
34	PT Patra Logistik	Entitas Sepengendali	Pendapatan Usaha
35	PT Elnusa Petrofin	Entitas Sepengendali	Pendapatan Usaha
36	PT Pegadaian	Entitas Sepengendali	Pendapatan Usaha
37	Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Personel Manajemen Kunci	Kompensasi dan Remunerasi

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

	31 Desember 2025		31 Desember 2024	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Mata Uang Asing	Ekuivalen
Aset				
Kas dan Setara Kas				
USD	2.581.946	43.330.224.149	2.522.126	40.762.600.895
EUR	369,48	7.298.433	489,48	8.248.383

33. KONTINJENSI

a) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Dian Sentosa

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 514/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., PT Dian Sentosa mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan penyelesaian pembayaran atas pekerjaan paketisasi peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Merak, Ketapang, Lembar, Kayangan, Sape, dan Batam sebesar Rp23.108.020.000. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2020, Perusahaan berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2658/SG/JB pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah mencatat cadangan liabilitas sebesar Rp20.652.170.368 (Catatan 18).

33. KONTINJENSI (lanjutan)

a) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Dian Sentosa (lanjutan)

Setelah keputusan banding keluar, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri, Perusahaan kembali mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3170 K/PDT/2023 pada tanggal 13 November 2023, permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan ditolak. Pada tanggal 4 September 2024, Perusahaan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3170 K/PDT/2023. Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah keluar Hasil Putusan Akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Reklaas Pemberitahuan Isi Putusan PK Mahkamah Agung RI No.547 PK/Pdt/2025/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 514/Pdr.G/2019/Jkt.Pst tanggal 29 Agustus 2025 bahwa Peninjauan Kembali Perusahaan ditolak dan Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut.

Pada tahun 2025, perkara tersebut telah diselesaikan secara final dan mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp20.652.170.368.

Perusahaan telah mengakui kewajiban dan/atau beban terkait dalam laporan laba rugi tahun berjalan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh dampak keuangan dari perkara tersebut telah dicatat secara memadai dalam laporan keuangan.

b) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Infiniti Indosakti

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 630/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., PT Infiniti Indosakti mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan Kerjasama Operasi pembangunan dan pengoperasian dermaga IV Merak - Bakauheni senilai Rp111.193.200.000. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 2021, Perusahaan berkewajiban untuk mengganti rugi sebesar Rp76.500.000.000 (Catatan 6 dan 18). Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mendaftarkan banding dengan No. 232/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Pst Jo.630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 20 Desember 2021, dan telah mengajukan memori banding No. 022/T&P/I22 pada tanggal 25 Januari 2022. Atas pengajuan banding tersebut, telah keluar Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 699/Pdt/2022/PT DKI tanggal 17 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Desember 2021.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

b) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Infiniti Indosakti (lanjutan)

Saat ini Perusahaan telah mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan No. 04/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.JKT.PST tanggal 12 Januari 2023. Atas pengajuan kasasi tersebut telah keluar Hasil Putusan Akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Relaas No. 2530K/Pdt/2023 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2023 bahwa Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut. Atas putusan tersebut Perusahaan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dan telah terbit Relaas No. 967 PK/Pdt/2024 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 29 November 2024 bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan sebelumnya ditolak. Adapun atas Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 967/PDT/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Perusahaan wajib melakukan pembayaran bertahap dalam waktu 3 kali pembayaran dengan rincian yang telah ditentukan. Adapun berdasarkan Tanggapan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PK Mahkamah Agung, nilai penggantian yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan Perusahaan wajib melaksanakannya.

c) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Persada Gading Elok

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 672/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., PT Persada Gading Elok mengajukan gugatan kepada Perusahaan atas pelanggaran kesepakatan terkait dengan berakhirnya masa sewa pada ruangan di Gedung KTC pada tanggal 2 Maret 2023. Perusahaan digugat perihal masih ditinggalkannya peralatan kantor di Gedung KTC dari bulan Maret 2023 hingga bulan Oktober 2023 sehingga berkewajiban untuk mengganti kerugian sejumlah biaya sewa 7 bulan yaitu sebesar Rp8.284.182.865. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2024, Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp4.178.006.597. Perusahaan telah mengajukan banding atas putusan tersebut dan telah menerima Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 1072/PDT/2024/PT DKI tanggal 26 Agustus 2024 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 April 2024. Perusahaan telah mengajukan kasasi dengan Akta Penerimaan Memori Kasasi No. 161/Srt.Pdt.Kas/2024/PN.JKT.PST.Jo tanggal 1 Oktober 2024. Atas Pengajuan Kasasi tersebut telah keluar Putusan Nomor. 2853 K/Pdt/2025 tertanggal 14 Agustus 2025 bahwa Pengajuan Kasasi Perusahaan ditolak dan Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut.

c) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Persada Gading Elok (lanjutan)

Pada tahun 2025, perkara tersebut telah diselesaikan secara final dan mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp4.178.006.597.

Perusahaan telah mengakui kewajiban dan/atau beban terkait dalam laporan laba rugi tahun berjalan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh dampak keuangan dari perkara tersebut telah dicatat secara memadai dalam laporan keuangan.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

d) Pendapatan Subsidi Perintis Tahun 2023

Perusahaan memiliki kontrak subsidi penyeberangan perintis dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) yang sebelumnya menggunakan skema lumpsum menjadi harga satuan dengan total nilai kontrak sebesar Rp380.079.681.349 pada tahun 2023 yang baru dibayar Rp275.729.387.536 dan masih tersisa Rp104.350.293.813.

Selanjutnya, pada November 2023, Perusahaan dan Kemenhub melakukan audiensi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diantaranya membahas adendum kontrak subsidi tahun 2023 serta permohonan pembayaran kekurangan subsidi perintis tahun 2023.

Menanggapi permohonan tersebut, Kemenhub meminta agar dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reviu oleh BPKP pada Januari 2024 terhadap dua Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai sampel, yaitu BPTD Lampung dan BPTD Jawa Timur. Hasil reviu BPKP yang diterbitkan pada 7 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa kontrak subsidi perintis tahun 2023 tidak secara eksplisit mencantumkan jenis kontrak, namun berdasarkan isi klausul kontrak, disimpulkan bahwa kontrak tersebut bersifat lumpsum.

Pada Oktober 2024 diselenggarakan rapat bersama antara Perusahaan, LKPP, BPKP, dan Kemenhub yang menghasilkan kesimpulan bahwa Perusahaan dan Kemenhub perlu menyepakati jenis kontrak subsidi perintis tahun 2023.

Pada tanggal 9 September 2025 dilaksanakan rapat dengan hasil disepakati perhitungan subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2023 menggunakan KP DRJD 6890 Tahun 2023 dari mulai Januari 2023. Pada Tanggal 10 Oktober 2025 Dirut PT ASDP mengirimkan permohonan audit ulang oleh BPKP kepada Direktorat SPASDP Kemenhub, sebagai tindaklanjut atas kesepakatan hasil rapat yang dilaksanakan pada 9 September 2025.

Pada tanggal 14 November 2025 Direktorat SPASDP mengirimkan surat permohonan Review ulang atas Pekerjaan Subsidi Angkutan PenyeberanganPerintis Tahun 2023.Pada tanggal 21 November 2025 eskalasi dan berkoordinasi dengan Direktur SPASDP terkait dengan rencana audit dan Review oleh BPKP.

Pada tanggal 23 Desember 2025 Direktorat SPASDP mengirimkan Surat Tindaklanjut Hasil Reviu BPKP atas Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa poin, dimana PT ASDP mengusulkan perhitungan kekurangan pembayaran menggunakan dasar hukum KP-DRJD 6890 Tahun 2023, sedangkan para PPK BPTD tetap berpedoman pada PR-DRJD 2 Tahun 2022 yang berdampak pada selisih kekurangan tersebut tidak dapat diakomodir yang mengakibatkan terjadinya piutang perusahaan, kemudian poin berikutnya Direktorat SPASDP menyampaikan sepanjang PT ASDP dapat menunjukan bukti ril Pengeluaran biaya tahun 2023, maka selisih biaya tersebut dapat menjadi pertimbangan selanjutnya sebagaimana aturan yang mengatur, bahwa penyelenggaraan layanan subsidi ditanggung oleh negara.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

d) Pendapatan Subsidi Perintis Tahun 2023 (lanjutan)

Pada tanggal 24 Desember 2025 Direktur Utama PT ASDP mengirimkan Balasan Surat Tindaklanjut Hasil Reviu BPKP atas Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023, dengan melampirkan *Link Google Drive* bukti pembiayaan pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023

Pada pertemuan terakhir secara informal BPKP meminta adanya Legal Opinion dari Jamdatun sebagai landasan hukum mereka melaksanakan audit terhadap pekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2023, akan tetapi pihak manajemen sampai dengan saat ini masih berusaha melakukan Langkah – Langkah alternatif supaya tidak melalui jamdatun, dan sampai saat ini masih berkoordinasi dengan pihak pihak terkait. Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan, pembahasan terkait kesepakatan atas kekurangan pembayaran subsidi perintis sebesar Rp104.350.293.813 masih berlangsung.

e) Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan DI Lintas Lembar - padang Bai

Berdasarkan perjanjian kerjasama Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan Di Lintas Lembar - padang Bai antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan kontrak Nomor Sperj.250./UM.301/ASDP-2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai kontrak Rp.88.720.000.100, Addendum Sperj. 10/HK.301/ASDP-2022 tanggal 7 Januari 2022, Addendum Kedua SPERJ.891/ADD/UM.301/ASDP-2023 tanggal 20 November 2023 adanya penambahan nilai kontrak sebesar Rp5.032.885.000 sehingga total nilai kontrak menjadi Rp93.752.885.100 , dan addendum Ketiga Sperj.911/HK.102/ASDP-2024 tanggal 27 September 2024.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Kapal oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sampai dengan diserahterimakan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana diatur dalam Perjanjian addendum ketiga selama 59 bulan 18 hari kalender terhitung sejak Kontrak Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan di Lintas Lembar Padang Bai antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Sperj.250/UM.301/ASDP-2020 sejak 9 Maret 2020 sampai dengan 26 Februari 2025.

Pada tanggal 11 Oktober 2024, PT Industri Kapal Indonesia (Persero) memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada PT Indonesia Ferry (Persero) untuk melaksanakan pencairan Jaminan/Bank Garansi dengan Nomor : 072/D.01-IKI/Sku/X/2024 dan Nomor : 073/D.01-IKI/Sku/X/2024. Berdasarkan surat kuasa tersebut pada tanggal 20 Maret 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pencairan Jaminan dan Bank Garansi dengan jumlah Rp13.559.644.265.

Sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 26 Februari 2025, nilai pembangunan kapal yang dibukukan sebagai aset dalam konstruksi sebesar Rp29.674.901.542.

33. KONTINJENSI (lanjutan)

e) Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan DI Lintas Lembar - padang Bai (lanjutan)

Pada tanggal 28 April 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat Nomor : UM.003/02379/IV/ASDP-2025, bersurat ke Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) perihal Permohonan Pendampingan Tindaklanjut Pengakhiran Kontrak Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Penyeberangan Di Lintas Lembar – Padang Bai. Surat tersebut telah dibalas melalui Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untuk Membuat Telaahan nomor : Print-398/G/Gph.2/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untuk Membuat Telaahan nomor : Print.-526/G/Gph.2/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

Pada tanggal 3 Desember 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui surat Nomor : TN.001/07556/XII/ASDP-2025 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pendampingan Hukum Dalam rangka Tindaklanjut Pengakhiran Pembangunan Kapal Lintas Lembar – Padang Bai.

Adapun tujuan pendampingan oleh Jamdatun adalah pendampingan dalam rangka tindak lanjut pengakhiran perjanjian Pembangunan 1 (Satu) unit kapal penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai dan Memberikan telaah dan masukan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam aspek hukum dalam rangka tindaklanjut pengakhiran perjanjian Pembangunan 1 (Satu) unit kapal penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai.

34. KASUS HUKUM

a) Akuisisi Saham PT Jembatan Nusantara

Pada pertengahan tahun 2024, terdapat kasus hukum yang sedang dihadapi oleh 3 (tiga) orang Direksi Perusahaan yang menjabat sejak 2017 sampai dengan permasalahan hukum ini timbul. Kasus hukum tersebut dikaitkan dengan aksi korporasi Perusahaan dalam mengakuisisi PT Jembatan Nusantara pada awal tahun 2022 yang menurut institusi penegak hukum dalam prosesnya terdapat pelanggaran atas peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta diduga menimbulkan kerugian negara. Namun demikian, mengingat kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut diindikasikan bukan merupakan tindak pidana korporasi, maka dampak hukum akan tertuju kepada pertanggungjawaban perorangan dan bukan kepada Perusahaan.

berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhkan vonis pidana terhadap 3 (tiga) orang mantan Direksi Perusahaan pada tanggal 20 November 2025. Adapun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Pemberian Rehabilitasi, pada tanggal 25 November 2025, 3 (tiga) orang mantan Direksi Perusahaan tersebut diberikan rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

34. KASUS HUKUM (lanjutan)

b) Gugatan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kepada AJB Bumiputera

Perusahaan menjalin kemitraan dengan AJB Bumiputera melalui program asuransi Tunjangan Hari Tua (THT) sebagai wujud komitmen nyata dalam menjamin kesejahteraan jangka panjang seluruh karyawan.

Adanya indikasi wanprestasi dari AJB Bumiputera berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran klaim sesuai polis/perjanjian, maka perusahaan mengambil langkah penangguhan sementara pembayaran premi guna mencegah potensi kerugian yang lebih besar.

Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023, berdasarkan Surat Tagihan AJB Bumiputera tanggal 05 April 2023, untuk periode premi Februari 2022 s.d. Oktober 2022, dengan total nilai sebesar Rp1.290.950.470.

Meskipun tidak ada setoran ke AJB Bumiputera, namun sampai dengan periode berakhirnya laporan keuangan Tahun 2025 perusahaan tetap melakukan pemotongan iuran THT yang dilaksanakan setiap bulan. Dana hasil pemotongan tersebut tetap dicatat dan dikelola secara terpisah (dalam rekening penampungan), sehingga sewaktu-waktu dapat disalurkan setelah terdapat kejelasan aspek administratif dan/atau penyelesaian permasalahan dengan pihak AJB Bumiputera.

Perusahaan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada peserta THT dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan aset perusahaan. Seluruh dana iuran yang telah dipotong masih tersedia dan teradministrasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi karyawan.

Selanjutnya perusahaan akan mengambil langkah hukum sebagai upaya untuk memperoleh kepastian atas hak dan kewajiban para pihak, termasuk kejelasan status dana dan pemenuhan kewajiban AJB Bumiputera. Perusahaan akan melakukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut berdasarkan perkembangan hasil proses hukum dan/atau kesepakatan para pihak.

Oleh karena itu Manajemen berpendapat bahwa kasus hukum yang sedang dihadapi oleh para mantan direksi tersebut dipandang tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada 31 Desember 2024. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana pada proses akuisisi PT Jembatan Nusantara ini masih dalam proses penyidikan. Namun demikian, terdapat ketidakpastian mengenai apakah terdapat kerugian keuangan dan nonkeuangan lebih lanjut terhadap Perusahaan sebagai konsekuensi kasus tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut belum dapat diperkirakan.

35. PERJANJIAN PENTING

a) Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Operasi Tiketing Sistem Di 4 (Empat) Pelabuhan Perusahaan antara Perusahaan dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) Nomor. Sper.1172/UM.301/ASDP-2025 dan Nomor: K.TEL./HK.810/SOE-00/2025 disepakati bahwa Perusahaan dan PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) bahwa PT Telekomunikasi menyediakan sistem penjualan tiket elektronik (software, hardware, dan infrastruktur pendukung) dan meliputi aspek investasi, proses bisnis, teknologi, manajemen proyek, support maintenance, komersial, laporan dan Service Level Agreement (SLA). Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

b) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Payment Gateway Pada Platform Ferizy di lingkungan Perusahaan antara Perusahaan dengan PT Finnet Indonesia No Sperj.371/HK.102/JKTNS/V/ASDP-2025N tanggal 09 Mei 2025 dan addendumnya No. Sperj.1355/HK.102/JKTNC/XII/ASDP-2025 tanggal 17 Desember 2025, disepakati bahwa Perusahaan dan PT Finnet Indonesia melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan Payment Gateway yang terintegrasi untuk kelancaran operasional dan pelayanan Platform Ferizy. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

c) Pada tanggal 29 Desember 2023 Perusahaan telah memandatangani pembaharuan perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Ternak RT-6 melalui perjanjian No. SPERJ.1064/HK.102/ASDP-2023 antara Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Ditlala), disepakati bahwa Perusahaan menyelenggarakan angkutan khusus ternak pada trayek tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan menggunakan kapal milik Ditlala. Perjanjian ini menggantikan perjanjian sebelumnya yaitu No. ADD.01/SATKERLALA/RT-6/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023. Selanjutnya, berdasarkan Amendemen III perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Ternak Trayek RT-6 Tahun Anggaran 2024 tanggal 30 September 2024 No. 03.ADD/RT-6/LALA/2024, nilai kontrak perjanjian adalah sebesar Rp15.843.254.347 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Perjanjian ini telah dilakukan perpanjangan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan perjanjian No. Sperj.1286/UM.301/ASDP-2024 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Perjanjian ini berlaku hingga 31 Desember 2026.

d) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Penyeberangan Secara Host to Host dengan Mekanisme Settlement, Perusahaan dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk (MUI) No. SPERJ.519/HK.102/ASDP-2022 tanggal 27 September 2022, dan addendumnya No. SPERJ.1015/HK.102/ASDP-2025 tanggal 28 Agustus 2025 disepakati bahwa PT Midi Utama Indonesia akan menyediakan layanan reservasi tiket di gerai Alfamidi kepada para pengguna jasa kapal penyeberangan dan Perusahaan berkewajiban menyediakan perangkat yang diperlukan untuk penyaluran traffic data tiket di host. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyusunan.

35. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

e) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reservasi dan Sales Payment Tiket Kapal Penyeberangan Secara Host to Host antara Perusahaan dengan PT Global Tiket Network No. Sperj.1101/JKTNS/X/ASDP-2025 mengenai Integrasi Sistem Reservasi dan Sales Payment Tiket Kapal Penyeberangan melalui Platform Tiket.Com tanggal 1 Oktober 2025 disepakati bahwa PT Global Tiket Network menyediakan layanan reservasi tiket melalui Aplikasi Tiket.com kepada para pengguna jasa kapal penyeberangan. Perjanjian ini berlaku hingga 19 November 2026.

f) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Taman Hiburan *(Theme Park)* pada Kawasan Bakauheni Harbour City antara Perusahaan dengan PT Bunga Lampung Sedjati No. Sperj.245/HK.102/ASDP-2022 tanggal 30 Bulan Mei 2022, Perusahaan menyepakati pendayagunaan aset tanah Perusahaan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan serta melakukan Kerja Sama Usaha (KSU) pengembangan *Theme Park* pada Kawasan Bakauheni Harbour City dengan PT Bunga Lampung Sedjati. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun kalender terhitung sejak *Theme Park* mulai beroperasi dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Siap Operasional pada Mei 2023.

g) IFPRO dalam melaksanakan bisnis hotelnya bekerja sama dengan PT Hotel Indonesia Group sebagai operator hotel sebagaimana perjanjian kerjasama No. 002/IPRO/PKS/IV/2019 dan No. 001/DIRUT/HIG-PERJ/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel di Labuan Bajo dengan Addendum Perjanjian No. 009/IFPRO-DIR/PKS/X/2022 dan No. 020/LGL-HIG/AMEND.PERJ/IX/2022. IFPRO memberikan izin kepada Hotel Indonesia Group untuk mengelola hotel milik Perusahaan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha Hotel Indonesia Group yang berlokasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dengan luas kurang lebih 2,4 Ha untuk manajemen hotel dengan merek dagang Meruorah Komodo Labuan Bajo. Bentuk Kerjasama adalah Kerjasama Operasi Pengelolaan Hotel dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah hotel beroperasi.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mendefinisikan risiko- risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Dalam rangka mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi telah menentukan beberapa pedoman kebijakan pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup. Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup;
- Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin off-setting alami antara pendapatan dan biaya dan utang/pinjaman dan piutang dalam mata uang yang sama; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Grup mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak dan dapat dipercaya. Grup juga membentuk akun penurunan nilai piutang atas piutang usaha yang timbul dari kemungkinan ketidakmampuan pelanggan untuk memenuhi liabilitas kontraktual terhadap Grup. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas dan Setara Kas	1.940.072.274.317	1.836.374.520.725
Piutang Usaha	73.633.930.409	31.750.747.382
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	100.622.866.956	60.668.244.291
Aset Keuangan Lancar Lainnya	62.628.780.963	47.115.075.190
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.387.185.873	275.434.971.034
Total	**2.452.345.038.518**	**2.251.343.558.622**

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Kualitas Kredit Aset Keuangan (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan selalu menjaga dan menyediakan jumlah kas dan setara kas sesuai dengan kebutuhan operasional dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut memperlihatkan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya

	2025		
	Kurang dari 1 Tahun	> 1 Tahun	Total
Liabilitas Keuangan			
Utang Usaha	456.977.472.815	-	456.977.472.815
Utang Asuransi	26.854.074.367	-	26.854.074.367
Beban Akrual	304.756.044.659	-	304.756.044.659
Utang Bank Jangka Pendek	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	121.956.603.029	-	121.956.603.029
Utang Bank Jangka Panjang	259.697.547.739	206.036.856.955	465.734.404.694
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	-	6.049.019.037	6.049.019.037
Pinjaman Sindikasi	44.400.000.000	587.663.376.149	632.063.376.149
Total	**1.214.641.742.609**	**799.749.252.141**	**2.014.390.994.750**

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2024		
	Kurang dari 1 Tahun	> 1 Tahun	Total
Liabilitas Keuangan			
Utang Usaha	449.645.404.142	-	449.645.404.142
Utang Asuransi	25.836.228.882	-	25.836.228.882
Beban Akrual	262.055.259.825	-	262.055.259.825
Utang Bank Jangka Pendek	23.836.020.000	-	23.836.020.000
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	117.557.688.995	-	117.557.688.995
Utang Bank Jangka Panjang	263.432.165.478	449.402.237.748	712.834.403.226
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	-	7.344.762.849	7.344.762.849
Pinjaman Sindikasi	34.300.000.000	630.902.417.816	665.202.417.816
Total	**1.176.662.767.322**	**1.087.649.418.413**	**2.264.312.185.735**

Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Untuk meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bunga Tetap	1.109.122.805.869	1.254.654.341.042
Bunga Mengambang	122.655.500.000	147.218.500.000
Tanpa Bunga	808.852.834.335	862.439.344.693
Total	**2.040.631.140.204**	**2.264.312.185.735**

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat bunga. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan		
Perubahan Tingkat Suku Bunga (1%)	(88.925.238)	(106.733.413)
Perubahan Tingkat Suku Bunga (-1%)	88.925.238	106.733.413

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar, diungkapkan dalam Catatan 32.

Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari saldo kas dan setara kasnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan		
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (1%)	433.375.226	407.708.493
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (-1%)	(433.375.226)	(407.708.493)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2025		2024	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	1.940.072.274.317	1.940.072.274.317	1.836.374.520.725	1.836.374.520.725
Piutang Usaha	73.633.930.409	73.633.930.409	31.750.747.382	31.750.747.382
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	100.622.866.956	100.622.866.956	60.668.244.291	60.668.244.291
Aset Keuangan Lancar Lainnya	62.628.780.963	62.628.780.963	47.115.075.190	47.115.075.190
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.387.185.873	275.387.185.873	275.434.971.034	275.434.971.034
	2.452.345.038.518	**2.452.345.038.518**	**2.251.343.558.622**	**2.251.343.558.622**
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha	456.977.472.815	456.977.472.815	449.645.404.142	449.645.404.142
Utang Asuransi	26.854.074.367	26.854.074.367	25.836.228.882	25.836.228.882
Beban Akrual	304.756.044.659	304.756.044.659	262.055.259.825	262.055.259.825
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	121.956.603.029	121.956.603.029	117.557.688.995	117.557.688.995
Utang Bank Jangka Pendek	-	-	23.836.020.000	23.836.020.000
Utang Bank Jangka Panjang	465.734.404.694	465.734.404.694	712.834.403.226	712.834.403.226
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	6.049.019.037	6.049.019.037	7.344.762.849	7.344.762.849
Pinjaman Sindikasi	632.063.376.149	632.063.376.149	665.202.417.816	665.202.417.816
	2.014.390.994.750	**2.014.390.994.750**	**2.264.312.185.735**	**2.264.312.185.735**

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif serta untuk memaksimumkan nilai Grup.

Dalam mendesain struktur permodalan yang dapat meningkatkan nilai Grup, manajemen dapat melakukannya dengan cara menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau mengurangi maupun menambah jumlah utang.

37. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Transaksi Non-Kas

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penambahan Aset Hak-Guna melalui Liabilitas Sewa	9.737.935.000	14.356.160.457
Perolehan Aset Tetap melalui Utang Usaha	-	4.349.717.754

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025						
	Saldo Awal	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir
		Pencairan	Pembayaran	Penambahan	Bunga	Amortisasi	
Pinjaman Sindikasi	665.202.417.816	-	(34.300.000.000)	-	-	1.160.958.333	632.063.376.149
Liabilitas Sewa	23.026.186.738	-	(24.255.618.238)		(1.234.269.285)	13.788.725.811	11.325.025.026
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	13.407.658.513	130.700.000.500	(143.300.000.500)	-	(51.140.746)		756.517.767
Utang Bank	736.670.423.226	-	(270.936.018.532)	-	-	-	465.734.404.694

	2024						
	Saldo Awal	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas			Saldo Akhir
		Pencairan	Pembayaran	Penambahan	Bunga	Amortisasi	
Pinjaman Sindikasi	682.703.916.666	-	(26.300.000.000)	-	-	8.798.501.150	665.202.417.816
Liabilitas Sewa	47.927.364.690	-	(41.388.939.255)	14.356.160.457	2.131.600.846	-	23.026.186.738
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	10.714.003.871	124.793.654.642	(122.100.000.000)	-	-	-	13.407.658.513
Utang Bank	833.391.883.725	159.500.000.000	(256.221.460.499)	-	-	-	736.670.423.226

38. KELANGSUNGAN USAHA PT JEMBATAN NUSANTARA

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, yaitu bahwa Perusahaan akan dapat merealisasikan asetnya dan menyelesaikan liabilitasnya dalam kegiatan usaha normal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp255.635.425.786 dan memiliki saldo defisit sebesar Rp577.056.184.902. Selain itu, Perusahaan juga menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan yang tercermin dari keterbatasan kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban kepada pemasok, kewajiban perpajakan, serta kewajiban operasional lainnya yang telah jatuh tempo.

38. KELANGSUNGAN USAHA PT JEMBATAN NUSANTARA (lanjutan)

Perusahaan juga memiliki jumlah liabilitas jangka pendek yang signifikan sebesar Rp564.286.665.620 yang melebihi kemampuan kas operasional jangka pendek. Di samping itu, sebagian armada kapal Perusahaan dalam kondisi tidak beroperasi secara optimal karena sedang dalam proses docking dan/atau menunggu jadwal docking, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan utilisasi aset.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

1. Dukungan Pemegang Saham

Perusahaan memperoleh dukungan dari pemegang saham pengendali, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dalam bentuk komitmen dukungan finansial untuk memastikan Perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Dukungan tersebut mencakup antara lain:

- Perpanjangan dan/atau rollover atas fasilitas shareholder loan (SHL);
- Tidak menuntut pelunasan SHL dalam periode dukungan;
- Penyediaan tambahan pendanaan apabila diperlukan untuk menutup kekurangan kas;
- Dukungan terhadap pemenuhan kewajiban kepada kreditur, pemasok, dan kewajiban operasional lainnya.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan, proses formal persetujuan atas tambahan fasilitas shareholder loan masih dalam tahap penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Proyeksi Arus Kas

Manajemen telah menyusun proyeksi arus kas untuk periode 5 tahun (2026-2030) sejak tanggal laporan keuangan yang mempertimbangkan:

- Pemulihan bertahap jumlah kapal operasional melalui program docking.
- Peningkatan utilitas armada;
- Efisiensi biaya operasional; dan
- Dukungan finansial dari pemegang saham

Manajemen berkeyakinan bahwa, asumsi yang digunakan dalam proyeksi tersebut adalah wajar dan dapat dicapai.

3. Optimalisasi Operasional

Perusahaan melakukan langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi operasional, antara lain:

- Percepatan proses docking kapal untuk meningkatkan utilisasi armada;
- Penyesuaian rute dan jadwal operasional;
- Pengendalian biaya operasional dan overhead.

38. KELANGSUNGAN USAHA PT JEMBATAN NUSANTARA (lanjutan)

3. Optimalisasi Operasional (lanjutan)

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul apabila Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan melakukan perubahan struktur organisasi melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.45/HK.002/JKTHS/II/ASDP-2026 tentang Organisasi dan Perangkat Pendukung di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 6 Februari 2026. Perubahan struktur organisasi ini sebagai bagian dari strategis peningkatan efisiensi operasional. Perubahan ini meliputi penggabungan beberapa divisi dan pembentukan unit bisnis baru. Manajemen berpendapat bahwa perubahan ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Adapun ruang lingkup Keputusan Direksi ini meliputi:
1. Struktur Organisasi Perusahaan;
2. Kelas Cabang;
3. Perubahan Struktur Oganisasi;
4. Pelimpahan Wewenang SDM;
5. Sistem Grading;
6. Jabatan Fungsional.

Perusahaan melakukan perubahan struktur organisasi sebagai bagian dari strategi peningkatan efisiensi operasional. Perubahan ini meliputi penggabungan beberapa divisi dan pembentukan unit bisnis baru. Manjemen berpendapat bahwa perubahan ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

40. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai “Informasi Keuangan Entitas Induk”) yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia.

40. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN (lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab Manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

41. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN (TIDAK DIAUDIT)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

Kontribusi Pajak

Informasi keuangan tambahan menyajikan informasi terkait konstribusi Perusahaan dan Entitas Anak kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-32/DKU.MBU/08/2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Pajak		
Pajak Penghasilan (PPh)	134.946.193.577	148.792.262.524
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	106.266.984.977	78.091.380.318
Pajak Pemerintah Daerah	1.205.091.749	689.565.630
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.861.194.266	6.752.999.516
Sub Total	**249.279.464.569**	**234.326.207.988**
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
PNBP Lainnya	6.778.678.797	4.532.849.428
Sub Total	**6.778.678.797**	**4.532.849.428**
Total	**256.058.143.366**	**238.859.057.416**

42. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan pada tanggal 8 April 2026.

INFORMASI TAMBAHAN

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	1.829.173.430.066	1.713.613.544.262
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi	52.465.479.677	31.193.345.779
Pihak Ketiga	28.519.840.186	17.700.177.311
Aset Keuangan Lancar Lainnya	315.616.891.983	212.798.428.056
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	110.678.282.838	76.459.023.162
Persediaan	119.887.968.526	99.146.929.107
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	39.013.435.547	23.131.793.527
Pajak Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah Aset Lancar	**2.495.355.328.823**	**2.174.043.241.204**
Aset Tidak Lancar		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima -		
Pihak Berelasi	65.437.720.644	85.627.167.675
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.387.185.873	275.434.971.035
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka		
Jangka Panjang	391.080.139	467.889.787
Investasi Saham pada Entitas Anak	1.421.133.985.889	1.421.133.985.889
Properti Investasi	157.754.379.996	161.707.695.900
Aset Tetap	5.993.920.203.289	5.962.874.147.194
Aset Hak-Guna	21.826.697.526	22.197.556.151
Aset Takberwujud	16.130.877.125	22.406.092.697
Jumlah Aset Tidak Lancar	**7.951.982.130.481**	**7.951.849.506.328**
JUMLAH ASET	**10.447.337.459.304**	**10.125.892.747.532**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2024)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha		
Pihak Berelasi	48.750.456.931	41.218.845.468
Pihak Ketiga	305.578.174.501	289.753.462.304
Utang Pajak	35.849.232.543	37.252.586.157
Utang Asuransi	25.569.760.581	25.092.018.076
Beban Akrual	337.483.343.660	342.814.822.969
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	102.469.965.157	93.527.099.586
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam satu tahun:		
Liabilitas Sewa	4.214.569.267	11.390.435.149
Utang Bank	174.563.000.000	174.563.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.034.478.502.640**	**1.015.612.269.709**
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:		
Utang Bank	173.092.500.000	347.655.500.000
Liabilitas Sewa	2.737.073.168	5.494.615.404
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	3.315.102.327	4.786.009.128
Liabilitas Imbalan Pascakerja	100.088.255.079	113.504.956.227
Liabilitas Pajak Tangguhan	46.031.975.834	32.297.506.792
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**325.264.906.408**	**503.738.587.551**
Jumlah Liabilitas	**1.359.743.409.048**	**1.519.350.857.260**
Ekuitas		
Modal Saham	5.561.760.000.000	5.561.760.000.000
Tambahan Modal Disetor	8.445.362.065	8.445.362.065
Saldo Laba		
Telah Ditentukan Penggunaannya	2.807.583.928.196	2.413.803.355.650
Belum Ditentukan Penggunaannya	709.804.759.995	622.533.172.557
Jumlah Ekuitas	**9.087.594.050.256**	**8.606.541.890.272**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**10.447.337.459.304**	**10.125.892.747.532**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
Pendapatan Usaha	4.491.560.257.681	4.366.737.247.138
Beban Pokok Pendapatan	(2.980.244.152.753)	(2.854.921.091.868)
Laba Usaha	**1.511.316.104.928**	**1.511.816.155.270**
Beban Usaha		
Beban Umum dan Administrasi	(1.075.858.956.135)	(1.019.735.594.493)
Pendapatan Lain-lain - Neto	134.125.580.832	69.465.433.609
Laba Sebelum Pajak	**569.582.729.625**	**561.545.994.386**
Beban Pajak		
Pajak Kini	(24.302.273.160)	(24.588.646.720)
Pajak Tangguhan	(14.951.006.551)	(14.710.450.536)
Jumlah Beban Pajak	**(39.253.279.711)**	**(39.299.097.256)**
Laba Tahun Berjalan	**530.329.449.914**	**522.246.897.130**
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti	(5.529.715.950)	(4.660.980.510)
Pajak Terkait	1.216.537.509	1.025.415.712
Penghasilan Komprehensif Lain	**(4.313.178.441)**	**(3.635.564.798)**
Jumlah Penghasilan Komprehensif	**526.016.271.473**	**518.611.332.332**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal yang Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo Per 31 Desember 2023	**5.173.195.000.000**	**397.010.172.065**	**1.831.026.929.440**	**717.370.909.920**	**8.118.603.011.425**
Modal Ditempatkan dan Disetor	388.565.000.000	(388.564.810.000)	(190.000)	-	-
Alokasi Cadangan Umum	-	-	582.776.616.210	(582.776.616.210)	-
Dividen Tunai	-	-	-	(30.672.453.485)	(30.672.453.485)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	522.246.897.130	522.246.897.130
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(3.635.564.798)	(3.635.564.798)
Saldo Per 31 Desember 2024	**5.561.760.000.000**	**8.445.362.065**	**2.413.803.355.650**	**622.533.172.557**	**8.606.541.890.272**
Alokasi Cadangan Umum	-	-	393.780.572.546	(393.780.572.546)	-
Dividen Tunai	-	-	-	(44.964.111.489)	(44.964.111.489)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	530.329.449.914	530.329.449.914
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	(4.313.178.441)	(4.313.178.441)
Saldo Per 31 Desember 2025	**5.561.760.000.000**	**8.445.362.065**	**2.807.583.928.196**	**709.804.759.995**	**9.087.594.050.256**

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) - ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pelanggan		4.404.629.195.892	4.402.732.655.387
Pembayaran Kas Kepada Pemasok		(1.948.680.033.978)	(1.866.149.511.662)
Pembayaran Kepada Karyawan		(1.053.985.322.122)	(993.783.071.595)
Pembayaran Beban Usaha		(562.728.772.830)	(525.149.890.370)
Penerimaan/(Pembayaran) Lain-lain		6.650.479.509	24.799.727.751
Pengeluaran Lain-lain			
Pembayaran Bunga Pinjaman - Neto		(16.928.382.100)	(22.030.117.904)
Penerimaan Bunga - Neto		90.185.040.462	75.156.841.833
Pembayaran Pajak Penghasilan		(96.076.864.472)	(81.841.870.488)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**823.065.340.361**	**1.013.734.762.952**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Jaminan Usaha		43.720.341.127	30.252.327.477
Pembayaran Jaminan Usaha		(33.194.295.809)	(29.318.151.568)
Perolehan Aset Tetap		(474.092.192.523)	(594.289.392.949)
Peningkatan Biaya Transisi & Transformasi Ditangguhkan		-	-
Perolehan Aset Takberwujud		(2.224.327.606)	(9.346.283.530)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(465.790.474.811)**	**(602.701.500.570)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Liabilitas Sewa		(22.187.868.253)	(40.067.848.668)
Penerimaan Pinjaman Bank		-	159.500.000.000
Pembayaran Pinjaman Bank		(174.563.000.000)	(162.281.500.000)
Pembayaran Dividen		(44.964.111.493)	(30.672.453.485)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(241.714.979.746)**	**(73.521.802.153)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		**115.559.885.804**	**337.511.460.229**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	2e;2f;4	**1.713.613.544.262**	**1.376.102.084.033**
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	2e;2f;4	**1.829.173.430.066**	**1.713.613.544.262**

Laporan Tahunan | 2025 | *Annual Report*

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

corporate.secretary@asdp.id | (021) 191 | 08111-021191 | www.asdp.id
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52A, Cempaka Putih Timur,
Kota Jakarta Pusat, 10510, Indonesia